

ISBN : 978-602-73463-2-1

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL

**PENYULUHAN,
KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Semnas PKP-PM)**

2 MEI 2019



KERJASAMA



Sejak 1910



Diterbitkan Oleh :

Program Pascasarjana Universitas Andalas, Padang

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL

**PENYULUHAN, KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT:**

**“KONTRIBUSI ILMU PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI
PEMBANGUNAN UNTUK MEMPERKUAT KEMANDIRIAN
MASYARAKAT INDONESIA PADA ERA REVOLUSI
INDUSTRI 4.0”**

Padang, 2 Mei 2019

Penyunting:

Hery Bachrizal Tanjung

Basril Basyar

Fuad Madarisa

Zulvera

Sri Wahyuni

**Program Pascasarjana Universitas Andalas
Padang, 2019**

Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Prosiding Seminar Nasional Penyuluhan, Komunikasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat: Kontribusi Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan untuk Memperkuat Kemandirian Masyarakat Indonesia pada Era Revolusi Industri 4.0 – Hery Bachrizal Tanjung [et.al] – Padang: Program Pascasarjana Universitas Andalas, 2019.

viii, 707 p.; illus.: 29,7 x 21 cm

ISBN: 978-602-73463-2-1

1. Penyuluhan, Komunikasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
1. Judul

Penyunting:

- Hery Bachrizal Tanjung
- Basril Basyar
- Fuad Madarisa
- Zulvera
- Sri Wahyuni

Design dan Layout:

- Sari Muliadi
- Zandri

Administrasi:

- Lucy Nitami Figma
- Nalasari Tanjung

Diterbitkan oleh:

Program Pascasarjana Universitas Andalas, Padang

Gedung Program Pascasarjana Kampus Limau Manis Padang - 25163

Telp : 0751-71686; Fax: 0751-71691

Website : <http://seminar.pasca.unand.ac.id/pkp-pm-2019>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga prosiding hasil seminar nasional Penyuluhan, Komunikasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PKP-PM) dapat diselesaikan.

Prosiding ini disusun sebagai tindaklanjut dari kegiatan seminar nasional yang telah dilaksanakan pada Mei 2019. Seminar nasional yang diselenggarakan oleh Program studi Magister Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Program Pascasarjana Unand ini bertujuan untuk mengelaborasi pemikiran dan pengalaman berdasarkan hasil penelitian dan kajian pustaka terpilih tentang penyuluhan dan komunikasi pembangunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat di era revolusi industry 4.0 .Makalah dalam prosiding ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang penyuluhan dan komunikasi pembangunan dalam rangka ,memfasilitasi masyarakat melakukan proses transformasi menuju kemandirian.

Materi dalam prosiding dikelompokkan berdasarkan tema penyuluhan pembangunan, komunikasi pembangunan, pengembangan/pemberdayaan masyarakat, pembangunan sosial, pelatihan masyarakat dan kewirausahaan sosial. Kami menyadari bahwa pengelompokkan makalah berdasarkan tema ini mungkin tidak dilakukan secara tepat karena keterkaitan antar tema yang ada, namun tim berusaha mengelompokkan berdasarkan dominasi kajian yang dikandung tiap makalah.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi pada kegiatan seminar dan penyusunan prosiding ini. Semoga kumpulan makalah hasil seminar yang dimuat dalam prosiding ini bermanfaat dan dapat berkontribusi dalam pembangunan masyarakat Indonesia.

Padang, Agustus 2019

Dr. Ir. Basril Basyar, MM

Ketua Panitia Seminar Nasional

SAMBUTAN KOORDINATOR PRODI MAGISTER ILMU PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

Pembangunan pada hampir semua sektor (agama, sosial, keluarga, gizi dan kesehatan masyarakat, dan pertanian luas, serta sektor ekonomi lainnya) terutama untuk mewujudkan kualitas masyarakat yang bersifat madani, mandiri, bermartabat, dan selalu mengembangkan diri untuk peningkatan kesejahteraannya. Tujuan pembangunan akan tercapai optimal jika terdapat partisipasi masyarakat, interaksi dan sinergi dari multi pihak, serta mempertemukan pengetahuan dan inovasi dengan kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Seminar Nasional Penyuluhan, Komunikasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan tema “Kontribusi Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan untuk Memperkuat Kemandirian Masyarakat Indonesia pada Era Revolusi Industri 4.0” diadakan pada tanggal 1-2 Mei 2019 di Hotel Grand Inna Muara, Padang Sumatera Barat.

Publikasi prosiding seminar nasional tanggal 2 Mei 2019 ini telah menelusuri liku yang cukup lama. Namun, alhamdulillah, berkat yakin, usaha ini sampai juga. Oleh karena tekad program studi adalah menghadirkan bukti dan meraih kinerja. Tentu, sebagai bagian dari proses pembelajaran administratif dan substantif. Khususnya agar prodi – yang baru lima tahun berdiri – secara institusi, jadi lebih siap menumbuhkan daya tahan dan capaian untuk kejayaan bangsa.

Kesempatan ini juga digunakan untuk mengucapkan terima kasih tak hingga. Kepada semua institusi yang berkolaborasi bagi persiapan, penyelenggaraan dan pelaporan kegiatan seminar. Para pimpinan program pascasarjana, nara sumber, peserta, dan panitia. Semoga sumbangan dan kontribusi berupa sumber daya, tenaga, fikiran, waktu, fasilitas dan biaya mendapatkan balasan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin.

Akhirnya kami sampaikan prosiding ini sebagai bagian tak terpisahkan dari kolaborasi dan upaya menatap masa depan penyuluhan dan komunikasi kita. Sekiranya nampak kekeliruan, sudi kiranya bapak, ibu, saudara semua memberitahukannya. Mari kita saling memaafkan dan bersinergi bersama. Terima kasih.

Padang, Agustus 2019

Dr. Ir. Hery Bachrizal Tanjung, MSi.
Koordinator Program Studi IPKP

SAMBUTAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS

Pertama sekali, kami ucapkan Selamat dan Terimakasih kepada Program Studi Magister Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Program Pascasarjana Universitas Andalas, atas kerja kerasnya dalam menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Penyuluhan, Komunikasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat” di Padang, pada tanggal 2 Mei 2019.

Tema Seminar Nasional ini dipilih, karena sudah menjadi perhatian besar bagi para akademisi pembangunan saat ini, tidak hanya pada sektor pertanian, pedesaan, tetapi juga di sektor-sektor non-pertanian dan perkotaan. Walaupun pendekatan-pendekatan penyuluhan, komunikasi dan pemberdayaan masyarakat telah dilakukan untuk mendukung berbagai program ataupun proyek-proyek pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah, donor asing ataupun program CSR suatu perusahaan di pedesaan ataupun di perkotaan, namun pada kenyataannya, banyak sekali program dan proyek-proyek pembangunan itu yang tidak berhasil seperti yang diharapkan, terutama terkait dengan keberlanjutan dan kemandirian yang terbentuk pada petani, kelompok tani ataupun masyarakat yang menerima program ataupun proyek-proyek tersebut. Seminar Nasional yang dihadiri oleh para akademisi, dosen dan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia ini telah berhasil memberikan tempat bagi para akademisi tersebut untuk bertukar pengalaman dan pengetahuan terkait dari berbagai kajian terhadap program-program dan proyek-proyek pembangunan di Indonesia khususnya. Satu hal penting yang cukup banyak terungkap adalah pergeseran bentuk pendampingan terhadap jalannya sudah program atau proyek pembangunan, dari suatu bentuk yang lebih bersifat “one-way direction” dalam penyuluhan dan komunikasi, ke arah yang lebih bersifat “interaktif” dalam bentuk pemberdayaan masyarakat yang lebih partisipatif.

Pertemuan antara para praktisi pembangunan, pemerhati masalah pembangunan dan para akademisi dari berbagai bidang ilmu sosial dan ekonomi dalam Seminar Nasional ini,

merupakan satu bentuk sinergi yang sangat baik dan perlu terus dikembangkan lebih jauh, sehingga tidak hanya mampu menghasilkan pemikiran-pemikiran baru untuk menjamin tercapainya cita-cita pembangunan berkelanjutan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mampu menghasilkan model-model pendidikan, pengajaran dan pelatihan dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang handal untuk melakukan kegiatan penyuluhan, komunikasi dan pemberdayaan masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan.

Program Pascasarjana Universitas Andalas, yang sejak tahun 2012 telah dinyatakan sebagai satu Lembaga pendidikan pascasarjana yang mengkoordinir program-program magister dan doktor yang bersifat multi dan interdisiplin sangat mendukung sekali kegiatan Seminar Nasional seperti ini, karena Seminar ini telah memberi kesempatan kepada dosen dan mahasiswa program pascasarjana dari berbagai bidang studi terkait untuk dapat mempresentasikan hasil penelitiannya, dan juga memperoleh pemahaman dari akademisi bidang studi lainnya.

Akhir kata, kami, para Pimpinan di Program Pascasarjana, sekali lagi mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan dan melaksanakan Seminar Nasional ini,. Terimakasih yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada Pimpinan Universitas Andalas, Pemerintah Kota Padang, serta kepada seluruh sponsor yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah mendukung penyelenggaraan Seminar ini.

Padang, Agustus 2019

Prof. Dr. Ir. Rudi Febriamansyah, M.Sc.
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Andalas

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN KOORDINATOR PRODI MAGISTER ILMU PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN	iv - v
SAMBUTAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS	vi - vii
DAFTAR ISI	viii
PROLOG	1 - 7
MATERI PEMBICARA PANEL UTAMA	8 - 72
TOPIK PENYULUHAN PEMBANGUNAN	73 - 225
TOPIK KOMUNIKASI PEMBANGUNAN	226 - 408
TOPIK PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	409 - 554
TOPIK PEMBANGUNAN SOSIAL	555 - 639
TOPIK PELATIHAN MASYARAKAT	640 - 674
TOPIK KEWIRAUSAHAAN SOSIAL	675 - 704
EPILOG	705 - 706

**SEMINAR NASIONAL
PENYULUHAN, KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Padang, 02 Mei 2019

Tema:

**Kontribusi ilmu penyuluhan dan komunikasi pembangunan
untuk memperkuat kemandirian masyarakat Indonesia pada era revolusi industri 4.0**

PROLOG

Oleh:

FUAD MADARISA

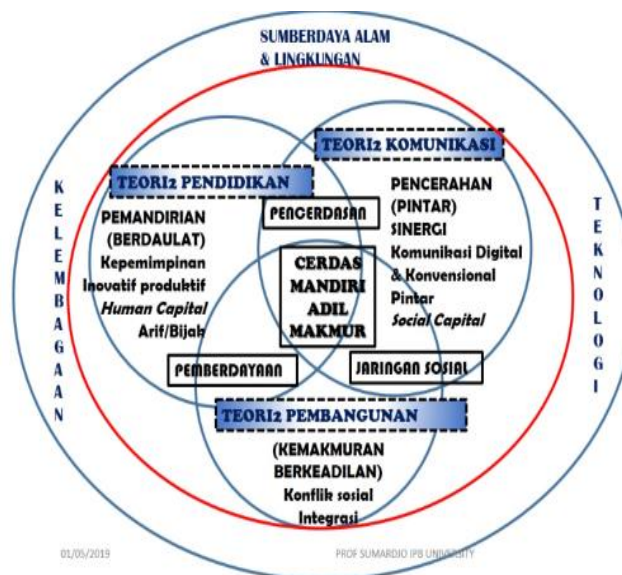
Tiga topik utama menyatu kedalam satu seminar nasional di Padang 02 Mei 2019; Penyuluhan, komunikasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (PKP-PM). Program studi magister Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan (PKP), pada program Pascasarjana Universitas Andalas mengangkat kegiatan. Pertanyaan strategisnya ialah, bagaimana program studi magister menyumbangkan kepakaran dalam proses mewujudkan transformasi menjadi masyarakat mandiri. Tentu, dalam upaya ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’ dan ‘untuk kedjajaan bangsa’.

Beberapa kecendrungan mendasari tindak pengumpulan buah pikiran para ahli itu. Pertama, dinamika dan orientasi pembangunan yang terjadi antara ‘ketergantungan’ dengan ‘madani, mandiri, bermartabat dan sejahtera’. Kedua, gerak pendulum antara arah yang ‘elitis’ dengan ‘partisipasi masyarakat’. Ketiga, ‘tarik menarik kepentingan’ dengan ‘kolaborasi sinergis’ antara kalangan yang berbeda. Keempat, keberpihakan kebijakan dan pengenalan inovasi ilmu pengetahuan dan bioteknologi. Akhirnya dilema revolusi industri 4.0; antara yang mampu mengisi peluang dan tersingkir jauh dibelakang kehidupan yang sejahtera.

Sebanyak enam topik secara paralel mendukung penyelenggaraan seminar. (1) Penyuluhan pembangunan, (2) pembangunan sosial, (3) pelatihan masyarakat, (4) komunikasi, (5) pengembangan pemberdayaan masyarakat dan (6) kewirausahaan sosial.

Semua isu ini terkait dengan bidang agama, sosial, keluarga, pertanian, gizi dan kesehatan masyarakat, serta industri kecil. Seluruhnya diikat dengan tiga tantangan bersama; ‘perubahan prilaku; perkembangan inovasi teknologi digital dan kebutuhan kepada kolaborasi untuk saling melengkapi dalam proses pembangunan. Rincian substansi yang punya keterkaitan satu sama lain, perhatikan Gambar 1 (Sumardjo, 2019).

Pertama, penyuluhan sebagai penguatan modal pengelolaan masyarakat. Definisi penyuluhan dalam UU 16/2006 ialah; **proses pembelajaran** bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan **dalam mengakses informasi informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya** sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, **pendapatan dan kesejahteraannya** serta meningkatkan kesadaran dalam **pelestarian fungsi lingkungan hidup.**” Intinya penyuluhan memakai dan menerapkan teori pendidikan dan komunikasi.



Gambar 1. Kerangka konsep kolaborasi para pihak dalam PKP-PM (Sumardjo, 2019)

Kedua, komunikasi pembangunan yang menitik kepada tiga hal; mendidik, membujuk dan memberi keterampilan. Aspek ini menggunakan baik teori komunikasi maupun konsep dari pembangunan. Keduanya berkolaborasi sinergis untuk meraih perubahan yang diinginkan. Maka, teori komunikasi dan teori pembangunan menyertai penerapan transformasi atau perubahan. Aspek aspek dari inovasi bioteknologi menjadi pemicu dan percepatan dinamika transformasi itu sendiri.

Tabel 1. Kategori, ruang lingkup dan fungsi PKP-PM

Kategori	Cakupan	Fungsi dan Aktivitas
1. Artikulasi / identifikasi kebutuhan atau permintaan	1. Scoping/ membatasi ruang lingkup	Mengumpulkan informasi
		Mengidentifikasi peluang
	2. Foresight/ mencermati rencana kedepan	Merencanakan hal strategis
		Menyusun visi
		Merundingkan /urun rembuk
	3. Mendiagnosa	Mencermati kebutuhan
Mencermati kesenjangan/gap pengetahuan		
Mendorong pemenuhan kebutuhan		
2. Pialang menggalang jejaring kerja	4. Menjaga gerbang kerjasama	Menjaring calon rekanan kolaborasi
		Memilih rekan kerja
	5. Membina kecocokan kerja	Mengaitkan dan mengkoordinasikan
		Membina mitra
3. Membangun kemampuan berwirausaha	6. Pengembangan organisasi	Memulai organisasi
		Manajemen dinamika kelompok
		Inkubasi bisnis/ usaha
	7. Pelatihan dan pembangunan kompetensi	Kemampuan manajerial
		Standar dan sertifikasi
		Kemampuan teknis
4. Dukungan institusi/ lembaga	8. Ranah dan batasan pekerjaan	Sinergi ilmu pengetahuan dan penerapannya
		Dasar dasar advokasi kebijakan
	Perubahan institusi	Fasilitasi perubahan aturan & undang undang
		Menggarap sikap dan penerapannya
5. Meng galang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)	9. Diseminasi ilmu dan bioteknologi	Memindahkan
		Menasehati
		Menyampaikan
	10. Komunikasi ilmu dan bioteknologi	Meneliti
		Menukar dan berbagi ilmu
		Menunjukkan uji coba
11. Mencocokkan penawaran & permintaan	Menetapkan dasar dan sumber dari luar	
	Menunjukkan pengalaman dan kearifan lokal	
6. Memantau manajemen proses inovasi	12. Mediasi dan arbitrase	Mengelola konflik dan sengketa
		Merundingkan dan negosiasi
		Mengelola rapat dan pertemuan
	13. Mempelajari	Menyediakan ruang/platform perubahan
		14. Menyatukan agenda
	Berbagi kontribusi/ aset pendukung	

Sumber : diolah dari Kilelu dkk (2011).

Ketiga, peranserta masyarakat yang tidak serta merta bisa muncul dan berfungsi optimal. Proses fasilitasi dan membuka ruang yang memungkinkan amat perlu. Baik dalam bentuk kebijakan, manajemen pengelolaan, sumbangan ilmu pengetahuan, atau kondisi dan masalah masyarakat terkait. Dimensi yang membutuhkan sentuhan tercantum pada Tabel 1.

Pertanyaan seminar merujuk kepada peran program studi magister PKP-PM tersebut dalam memberi tanggapan kepada kecendrungan praktek pembangunan yang terjadi. Kemudian rekomendasi pembelajaran agar memang jitu mengatasi dan memberi solusi masalah. Baik Febriamansyah (2019) maupun Karsidi (2019) mengerucut kepada kebutuhan **pendidikan yang lebih berorientasi untuk pengembangan kapasitas dalam berinovasi**. Dalam kaitan itu substansi pembelajaran adalah proses yang transformatif. Simak Tabel 2.

Tabel 2. Pendekatan belajar dalam penyuluhan, komunikasi dan pemberdayaan masyarakat

Kriteria	Pengetahuan	Teknis /Praktis	Transformasi
2	3	4	5
Fokus	Belajar untuk mengetahui	Belajar untuk menerapkan	Belajar untuk merubah
Hasil	Proposisi /rencana	Pengetahuan praktis	Pengalaman
Struktur	Disiplin	Kemampuan	Materi /substansi
Gaya mengajar	Menerangkan	Menunjukkan	Fasilitasi
Peran dosen	Ahli /mengetahui	Ahli /menguasai	Teman belajar
Cara mengajar	Kuliah	Ujicoba /demo	Praktek/ Magang
Filosofi dasar	Positivisme	Pragmatis	Konstruktif
Gaya penelitian	Dasar	Terapan	Aksi /Partisipasi
Tujuan penelitian	Pengetahuan umum	pada masalah pekerjaan	Teori lokal dan aksi perubahan
Peran penelitian	Menghasilkan pengetahuan	Penyelesai masalah teknis	Pencipta untuk perbaikan situasi

Sumber : Miller (2006).

Penjabaran secara rinci dari proses belajar transformatif dapat dipotret dengan kerangka kerja seperti Tabel 3. Sedikitnya ada empat titik kritis mencermati proses dari belajar; (1) target pembelajaran, (2) penggunaan bioteknologi dalam proses, (3) suasana atau penampakan dari proses belajar dan (4) cara menilai proses dan hasil belajar.

Tabel 3. Kerangka kerja proses pembelajaran transformatif

No	Titik kritis	Kriteria jawaban					
1	Sampai tingkat mana target mahasiswa belajar	Tahu	Paham	Terapan	Analisa	Sintesa	Evaluasi
2	Tingkat bioteknologi yang dipakai pada proses belajar	Substitusi / Penggantian	Augmentasi / Peningkatan	Modifikasi/ Penyesuaian	Re-definisi/ Pemaknaan Ulang		
		Hanya butuh teknologi sederhana	Teknologi belajar yang memperbaiki fungsi	Teknologi yang meningkatkan fungsi secara nyata / signifikan	Wow, ...tidak tahu apa yang bisa kita kerjakan dengan teknologi itu		
3	Bagaimana penampakan kondisi belajar	Suasana dan wujud lingkungan pembelajaran					
		Engaging/ Terikat/ terlibat	Collaborative / Kerjasama sinergis	Constructive / Merancang ikatan bahan ajar praktis	Authentic / Akurat, nyata dan jitu		
		Peserta aktif untuk menuntaskan target / produk tertentu	Peserta bekerjasama meraih tujuan sesuai dengan target pembelajaran	Peserta bisa menggunakan materi ajar dari kelas lain dan menghasilkan produk	Peserta mampu memaknai materi belajarnya dan bisa menerapkan pada masyarakat		
4	Cara menilai belajar	Quiz	Menulis tesis/ Laporan	Observasi	Diskusi	Seminar	Jurnal

Target pembelajaran meliputi perwujudan berfikir kritis, berfikir kreatif, dan berfikir inovatif. Kemudian tumbuh dalam pribadi mahasiswa kompetensi kepemimpinan

yang bisa bekerja secara bersama (teamwork). Proses meraih seluruh target ini menggunakan kecakapan dari teknologi informasi.

Cara belajar untuk sampai kepada pencapaian target terdiri dari beberapa metode. Metode ini mencakup basis informasi teknologi, bersifat praktis dan memberi solusi masalah tempatan. Dalam bahasa pemakalah hal ini dikutip seperti berikut; ‘selama era pertanian 4.0 maka proses pendidikan, maka mahasiswa mengalami belajar yang partisipatif, bersifat kemitraan, membina kreatifitas dengan memakai teknologi digital. Intinya memusat pada student centred learning dan blended learning.

Mengikuti saran pemakalah, secara filosofis terdapat tiga kategori (progresif, humanistik, radikal) yang mendekati capaian target pembelajaran. Kendatipun dua kategori (humanistik dan radikal) yang cukup relevan. Tentu, konsekwensinya ialah semua infrastruktur, saran dan fasilitas saling mendukung untuk mencapai target diatas. Perhatikan Tabel 4.

Tabel 4. Ruang lingkup filosofi pendidikan dan pembelajaran mahasiswa

Kategori	Filosofi Pendidikan				
	Liberal	Behavioral	Progresif	Humanistik	Radikal
1	2	3	4	5	6
Maksud	Mengembangkan kekuatan otak atau intelektual, memacu semangat belajar sampai sukses dibidang pendidikan	Mengembangkan kemampuan dan perubahan perilaku yang cocok dan mengacu pada standar & harapan masyarakat	Mendukung peranserta pada masyarakat dan membekali dgn pengetahuan praktis dan solusi masalah	<i>Membantu pengembangan dan pertumbuhan pribadi serta memfasilitasi aktualisasi diri</i>	<i>Melalui pendidikan melakukan perubahan mendasar pada budaya, sosial, politik dan ekonomi</i>
Peran maha siswa	Orang yang tercerahkan, selalu jadi pelajar, belajar mencari ilmu dan pengetahuan, mengerti konsep dan teori	Pelajar tidak ikut menentukan tujuan, pelatih yang menyiapkan sebelumnya, mempraktekkan sampai pandai dan terampil.	Kebutuhan, perhatian dan pengalaman dihargai dan menjadi bagian dari proses pembelajaran. Pelajar aktif	<i>Pelajar amat bersemangat dan mandiri serta bertanggung jawab pada proses belajar yang mereka ikut merencanakan</i>	<i>Pelajar dan pengajar sepadan posisinya dalam proses belajar. Ada otonomi pelajar, yang diberdayakan, pelajar dan peserta tidak terpaksa</i>
Peran dosen	Ahli, pemindah pengetahuan, mengajar agar pelajar berfikir dengan jelas. Mengarahkan proses belajar	Manejer, pengendali, berkuasa, menetapkan target, dan mengarahkan hasil belajar	Pengelola, memandu proses belajar, memberi contoh nyata penerapan ilmu, membantu murid bekerjasama	<i>Fasilitator, membantu, peran setara dalam proses belajar mengajar, mendukung proses belajar</i>	<i>Koordinator, perubah, mitra sejajar dengan pelajar, mengusul tapi tidak memutuskan arah belajar</i>
Konsep dan kata kunci	Seni liberal, belajar untuk diri sendiri, pendidikan umum dan menyeluruh, berfikir kritis, pengetahuan tradisionil, terbaik akademiknya	Sesuai standar, belajar untuk menguasai, kompeten, target perilaku, kinerja, praktek, umpan balik, peneguhan dan akuntabilitas	Penyelesai masalah, belajar praktis, menilai kebutuhan sesuai pengalaman, aktif mencari, kerjasama dan tanggungjawab sosial	<i>Kebebasan, otonomi individu, mandiri, tidak diperintah, komunikasi antar pribadi, keterbukaan, jitu dan otentik</i>	<i>Peningkatan kesadaran, praxis, tidak wajib belajar, tidakan sosial, pemberdayaan, keadilan sosial, tekad dan perubahan</i>
Metode	Kuliah, membaca dan analisa kritis, tanya jawab, diskusi terpimpin, belajar sendiri dan ujian yang distandarisasi	Instruksi berbasis komputer, kurikulum terkunci, pelatihan keterampilan, praktek dan ujian yang sesuai petunjuk	Metode proyek, penelitian ilmiah, kelompok simulasi, aktivitas belajar dan meneliti bersama	<i>Belajar dari pengalaman, belajar sambil menemukan, diskusi terbuka, studi independen, belajar bersama, menilai sendiri</i>	<i>Diskusi kritis, refleksi, analisa penyelesaian masalah dan media, drama tindakan sosial</i>
Ahli dan hasil kerjanya	Aristoteles, Plato, Adler, Great Book Society, Liberal education	Thorndike, Watson, Skinner. Pelatihan, ujian sertifikasi, manajemen sesuai tujuan	Dewey, Whitehead, Lindeman. Kampus masyarakat, dan penyuluhan	<i>Rogers, Maslow, Knowles. Dinamika kelompok, belajar sendiri, pendidikan beragam</i>	<i>Holt, Freire, Illich. Gerakan bebas dari sekolah, pendidikan berkeadilan sosial</i>

Sumber : Spurgeon, Linda dan Gary E. Moore (1994).

SEMINAR NASIONAL
PENYULUHAN, KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

MATERI PEMBICARA PANEL

Daftar Halaman

No.	Judul & Peserta	Halaman
1.	PERSPEKTIF DAN TANTANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 <i>Ravik Karsidi</i>	9 - 22
2.	SINERGI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DI ERA KOMUNIKASI DIGITAL DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN <i>Sumardjo</i>	23 - 52
3.	TRANSFORMASI PENYULUHAN PEMBANGUNAN/PERTANIAN : TANTANGAN MODEL PENDIDIKAN PENYULUHAN DI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 <i>Rudi Febriamansyah</i>	53 - 64
4.	SUSTAINABILTY BUSINESS EXCELLENCE CSR BEST PRACTICE BASED ON ISO 26000 <i>Yosviandri</i>	65 - 72

PERSPEKTIF DAN TANTANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Ravik Karsidi
Guru Besar UNS

Materi presentasi disampaikan pada
SEMINAR NASIONAL PENYULUHAN, KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Padang, 2 Mei 2019

GAMBARAN MASA DEPAN



- **Alvin Toffler (2000):**
Diramalkan bahwa dalam globalisasi akan **memunculkan adanya perubahan yang luar biasa** akibat gelombang teknologi komunikasi .
→ akan ada ancaman perubahan yang harus disikapi dengan penuh kewaspadaan.

ERA GLOBAL & DIGITAL



1. Sejak tahun 2005 Negara-negara Anggota WTO Menandatangani *General Agreement on Trade In Services (GATS)* yang mengatur **LIBERALISASI PERDAGANGAN** → itulah **Era Global**
2. Di Era Global , setiap negara harus membekali SDM-nya dengan mental dan keterampilan agar semakin siap bersaing dengan negara lain.
3. Revolusi industri telah menghasilkan INOVASI DIGITAL yang mempercepat Era Global berpengaruh pada kehidupan manusia.

ABAD 20



tiga kategori zaman

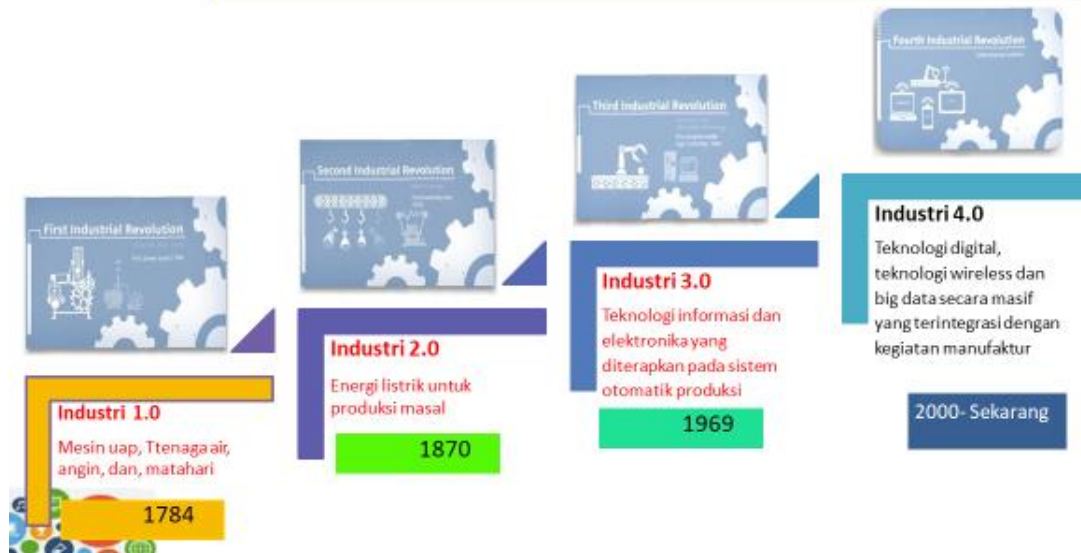
1. Tradisional patrimonial (*mitis-komunal*)
2. Kapitalis (*realis-individual*)
3. Teknokratis (*pseudo-realis*)

ABAD 21

merupakan era digital, yang mendobrak cara pandang konvensional menjadi super-digital

Perilaku budaya kita menjadi limbung menghadapi perubahan yang begitu sangat cepat ini

4 TAHAP REVOLUSI INDUSTRI



Dampak Dunia Digital dan Revolusi Industri 4.0

Era Baru *Industralisasi Digital*



Ancaman:

- Secara global era digitalisasi akan menghilangkan sangat banyak pekerjaan sepanjang tahun 2015-2025 karena digantikannya posisi manusia dengan mesin otomatis (Gerd Leonhard, *Futurist*);
- Diestimasi bahwa di masa yang akan datang, 65% murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada di hari ini (U.S. Department of Labor report).

Peluang:

- Era digitalisasi berpotensi memberikan peningkatan jumlah pekerjaan baru pada tahun 2025
- Terdapat potensi pengurangan emisi karbon kira-kira 26 miliar metrik ton dari tiga industri: elektronik (15,8 miliar), logistik (9,9 miliar) dan otomotif (540 miliar) dari tahun 2015-2025 (World Economic Forum).

Dunia Digital dan Revolusi Industri 4.0

Gejala-Gejala Transformasi di Indonesia

Saat ini beberapa jenis model bisnis dan pekerjaan di Indonesia sudah terkena dampak dari arus era digitalisasi

- Toko konvensional yang ada sudah mulai tergantikan dengan model bisnis *marketplace*.
- Taksi atau Ojek Tradisional posisinya sudah mulai tergeseerkan dengan moda-moda berbasis online



**JAWABAN &
JALAN
KELUARNYA?**

1. Teknologi digital telah merebut posisi manusia sebagai produsen budaya
2. Manusia merasa hidup dalam kekosongan makna
3. Tidak semua orang mampu menyelami hidup yang begitu cepat berubah
4. Fakta vs Fenomena Hyper Realitas



PERKEMBANGAN DUNIA MEDIA

- Di satu sisi media menjadi ujung tombak kemajuan
- Di sisi lain media menjadikan manusia sekadar sebagai komoditas
 - ➔ dapat diperjual-belikan, ditawarkan, ditukar, dan dipoles selayaknya barang baru (padahal stok lama).
- Kebudayaan berdiri di tengah zaman **post-truth era**
- Masa yang semakin susah mengais kebenaran sejati, kecuali berondongan informasi yang jauh dari jejak fakta objektif

ELEMEN PASAR GLOBAL

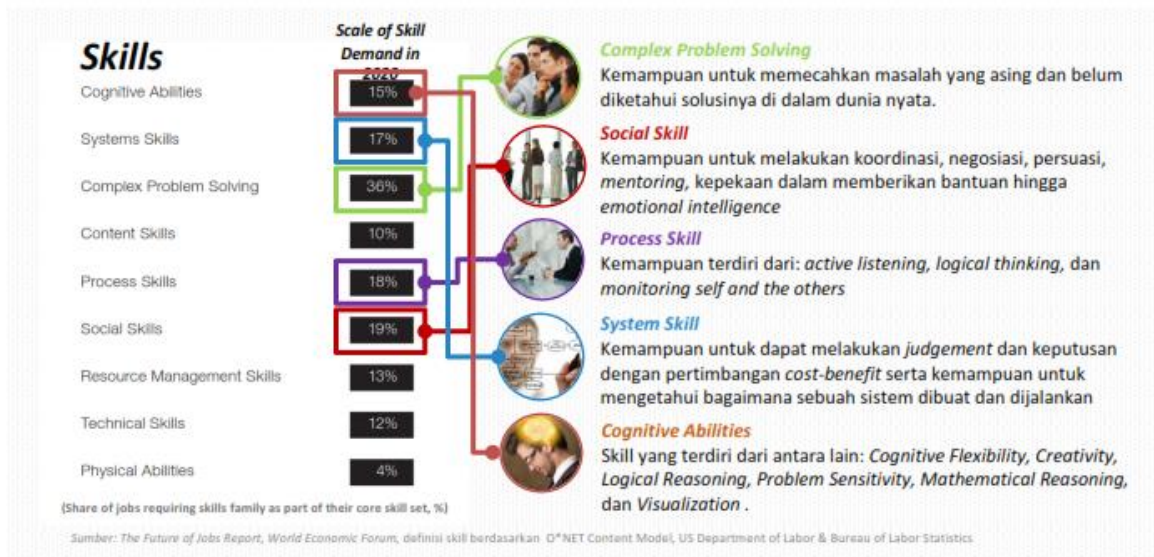
Ditandai adanya kebebasan pergerakan terhadap:

- (1) arus barang;
- (2) **arus jasa-jasa**;
- (3) arus modal; dan
- (4) **arus tenaga kerja**.



Skill di Industri Masa Depan

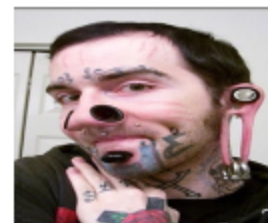
Tantangan-Tantangan



DAMPAK NEGATIF ERA DIGITAL

- 1. IDEOLOGIS :**
> hegemoni ideologi kapitalisme-sekuler
- 2. POLITIK:**
> terancamnya kedaulatan negara2 lemah
- 3. EKONOMI:**
> biaya pendidikan bisa mahal
- 4. SOSIAL-BUDAYA:**
>tatanan sosial berubah, terjadi kesenjangan sosial-budaya, identitas budaya terancam.

NEGARA LEMAH VS NEGARA KUAT



DAMPAK POSITIF

- MENGGUNAKAN **ANALISIS TEORI SISTEM DUNIA**, JIKA IKUT DAN BERHASIL DALAM ARUS BESAR INI, KITA AKAN BISA MENJADI BESAR JUGA
- MENGGUNAKAN PERSPEKTIF TEORI PEMBANGUNAN SISTEM DUNIA (IMMANUEL WALLERSTAIN, 1974) BAHWA MENGIKUTI ARUS BESAR INI BISA DIANGGAP “UNDANGAN” SEBAGAI KESEMPATAN YANG HARUS DIREBUT AGAR DAPAT “NAIK KELAS” UNTUK MENUJU SUATU “KEMANDIRIAN BANGSA YANG MAJU”.
- PERTUKARAN IDE, INFORMASI, PENGALAMAN DAN GAYA HIDUP ANTAR BELAHAN DUNIA SANGAT CEPAT
- BISA KAH, KITA MENGIKUTI?.....

LITERASI BARU

ORIENTASI BARU TIDAK HANYA CUKUP LITERASI LAMA
(membaca, menulis dan matematika):

1. **LITERASI DATA**: kemampuan untuk membaca, analisis dan menggunakan informasi (**Big Data**) di dunia digital.
2. **LITERASI TEKNOLOGI**: memahami cara kerja mesin dan aplikasi teknologi (coding, artificial intelligence dan engenering principles).
3. **LITERASI HUMAN**: ketrampilan kepemimpinan, bisa bekerja dlm tim, kelincahan dan kematangan berbudaya, inovasi dan entrepreneurship.

Pentingnya Literasi Humanistik

- Di Era Revolusi Industri 4.0, literasi human (manusia) menjadi penting untuk bertahan di era ini, tujuannya adalah agar manusia bisa berfungsi dengan baik di lingkungan manusia dan dapat memahami interaksi dengan sesama manusia.
- Oleh karena itu perlu dicari metoda untuk mengembangkan kapasitas kognitif para pembelajar (termasuk pendidikan nonformal): *higher order mental skills*, berpikir kritis & sistemik, amat penting untuk bertahan di era revolusi industri 4.0

KEKAWATIRAN MENGHADAPI ERA GLOBAL & DIGITAL

- Membanjirnya tenaga kerja asing profesional.
- Daya Saing tenaga kerja Indonesia masih rendah?
- Masih rendahnya inovasi & tingkat kewirausahaan dan kesiapan teknologi nasional.
- Tantangan bagi pemegang profesi yang harus lebih profesional (termasuk petugas pemberdaya masyarakat).

Strategi Menghadapi Era Digital

Bagaimana Merespon *Masa Depan*



1. Komitmen **semua pihak** thdp peningkatan kompetensi dan investasi di pengembangan *digital skills*
2. Selalu mencoba dan menerapkan *prototype* teknologi terbaru, ***Learn by doing!***
3. Dilakukannya **kolaborasi** antara dunia industri, akademisi, dan masyarakat untuk mengidentifikasi permintaan dan ketersediaan skill bagi era digital di masa depan
4. Dunia pendidikan PKP-PM perlu menyusun kurikulum pendidikan berbasis literasi data, literasi teknologi dan literasi kemanusiaan.

PELUANG BAGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEMAMPUAN ICT

1. **AKIBAT PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI (TIK) AKAN MENGUBAH POLA HUBUNGAN PENYULUH/PEMBERDAYA MASYARAKAT DGN CLIENNYA**
2. **PERLU PROFESIONALISME PEMBERDAYA MASYARAKAT DALAM BIDANG PENINGKATAN KOMPETENSI (SEIRING PERKEMBANGAN INOVASI TEKNOLOGI TERKINI).**
3. **BERUBAHNYA PERAN PETUGAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/PENYULUH DARI VOLUNTEER KE PROFESIONAL**
4. **LAYANAN KEPADA SASARAN/CLIEN: DARI KELOMPOK KE INDIVIDUAL**
5. **MENEGUHKAN PERAN FASILITATOR bukan INSTRUKTOR**
6. **ORIENTASI PADA KEBUTUHAN INDIVIDU CLIEN LEBIH DOMINASI DARIPADA KEBUTUHAN KELOMPOK**

ORIENTASI GLOBAL vs LOKAL

JIM IFE (2013) mengingatkan kita dengan apa yang disebutnya sebagai pendekatan “global and local practice” dan “universal and contectual issues”. Hal ini terkait dengan berkembang digitalisasi yang terus menerus masif, maka dalam PKP-PM kita perlu mengembangkan paradigma dalam mengglobalkan kearifan lokal (= **glokalisasi**).

SEBAGAI BANGSA yang kaya dengan budaya dan potensi lokal serta nilai-nilai luhur, kini saatnya kita bertindak untuk mengglobalkannya.

➔ **KEMBANGKAN POTENSI DAN TINDAKAN LOKAL** yang dampaknya global
- Diperlukan kesiapan SDM LOKAL (CLIEN/KELOMPOK SASARAN)



Pentingnya Kebijakan Pembangunan Bersifat Endogen

- Kebijakan pembangunan harus bersifat endogen atau berakar dari kebutuhan individu masyarakat, dan bukan merupakan desain bagi kelompok dan bukan dari pihak luar.
- Kebijakan yang bersifat endogen atau berakar dari kebutuhan individu akan mendorong percaya diri

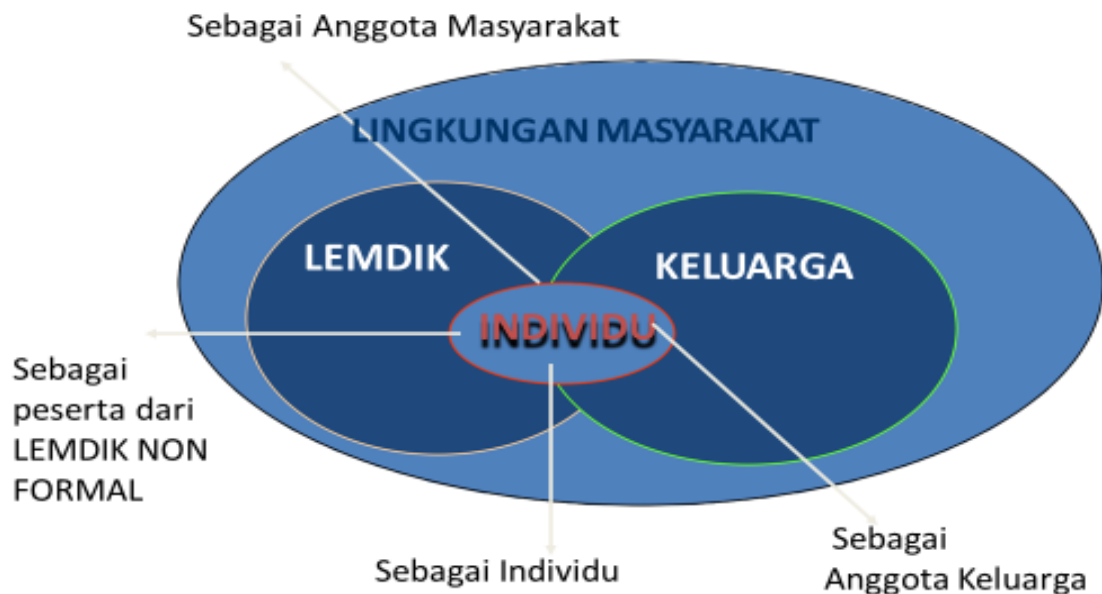


NILAI2 LOKAL DIGUNAKAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- PENGEMBANGAN *NILAI2 LUHUR LOKAL* HARUS MAMPU MEMPERKOKOH JATI DIRI BANGSA DAN KEMANDIRIAN BANGSA
- MAMPU MENGOKOHKAN NILAI2 LOKAL SPT: KERUKUNAN, GOTONG ROYONG, KERAMAHAN, KEJUJURAN, KEBERANIAN, KEULETAN, KERJA KERAS, MAJU TERUS PANTANG MUNDUR, DLL.



MENGOPTIMALKAN PERAN CENTRAL INDIVIDU DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



Reorientasi Pemberdayaan Masyarakat di Era Digital

- Pemberdayaan masyarakat perlu diarahkan pada upaya peningkatan **partisipasi individu dalam masyarakat**
- Partisipasi individu bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan masyarakat
- Tuntutan akan partisipasi masyarakat di era Revolusi Industri 4.0 semakin menggejala dengan difasilitasi oleh **teknologi media sosial**
- **Berubahnya konsep kelompok sosial dalam bentuk organisasi jaringan teknologi berbasis media sosial (seperti WA Group dll)**

BEBERAPA HAMBATAN KITA

1. Percepatan perkembangan teknologi digital (internet of things; smartphones; tablets dll) yang terus meningkat tak diimbangi dengan kecepatan kompetensi dan skill teknologi digital manusia di lingkungan PKP-PM (human skills and behavior).
2. Proses perubahan metodologi PKP-PM lambat
3. Isi (content) PKP-PM sering tertinggal dengan perkembangan teknologi yang cepat.

Peran PKP-PM

- Era globalisasi (Revolusi Industri 4.0) justru sangat membutuhkan peran pendidikan PKP-PM sebagai ilmu sosial bahkan lebih tinggi dibanding sebelumnya.
- Literasi kemanusiaan (selain literasi data dan literasi teknologi) menuntut operasionalisasinya dalam PKP-PM agar dapat mengikuti tuntutan zaman.

MULAI DARI MANA BERUBAH?

1. Secara bertahap mengubah kelompok sasaran menjadi **early adopter** dalam bidang digitalisasi (mis: mulai muncul petani melineal; teknologi digital untuk pemasaran produk2 UMKM, dll)
2. Metode2 pendampingan kelompok sasaran by-digital
3. Pembelajaran di PKP-PM yang harus adaptif terhadap perubahan yang terjadi di industri 4.0

KITA PERLU MELAKUKAN GERAKAN NASIONAL PERAN PKP-PM DALAM REVOLUSI INDUSTRI 4.0 terutama **memperkuat literasi humanistik (sebagai core bussiness) yang mampu menggali dan menguatkan nilai budaya, jati diri, identitas dan kebanggaan untuk meraih vitalitas yang maksimal sebagai BANGSA YANG LEBIH BERMARTABAT.**



ravikkarsidi@yahoo.com

TERIMA KASIH

SINERGI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DI ERA KOMUNIKASI DIGITAL DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN

**Oleh :
Sumardjo**

(Guru Besar Ilmu Penyuluhan Pembangunan Fakultas Ekologi Manusia IPB)

PENDAHULUAN

Teknologi komunikasi digital berkembang sangat pesat dan menjadi suatu keniscayaan, namun belum sepenuhnya diikuti dengan sikap adaptasi yang tepat dalam implementasi kehidupan masyarakat, sehingga terjadi kesenjangan informasi (*unequity digital communication*). Kesenjangan informasi ini berdampak pada kesenjangan kemampuan masyarakat beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan strategisnya. Dibutuhkan konsep yang implementatif tentang sinergi komunikasi dan penyuluhan pembangunan dalam Pembangunan Nasional. Implementasi kebijakan pendidikan tinggi oleh dirasakan para pengelola prodi terkait kurang akomodatif terhadap perkembangan Ilmu Penyuluhan Pembangunan. Penerapan ilmu penyuluhan bahkan telah ada di Indonesia sejak pra kemerdekaan (1905) hingga kini. Hal ini dapat dinilai menjadi salah satu penyebab kurang berkembangnya keberdayaan atau kemandirian masyarakat. Tampak terjadi kerancuan dalam persepsi berbagai pihak antara Penyuluhan Pembangunan, Komunikasi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Masyarakat.

Hal ini kini terindikasi dari tiadanya nama program studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan dalam nomenklatur program studi yang dikeluarkan secara resmi oleh Dirjen Dikti. Naifnya, Prodi Ilmu Penyuluhan Pembangunan yang merupakan salah satu prodi pascasarjana tetua di Indonesia dan di IPB misalnya, yang telah senantiasa terakreditasi A atau Unggul, namun terabaikan dalam daftar nomenklatur tersebut. Pada hal, secara formal terdapat 11 kementerian/ lembaga di Indonesia yang mencatumkan jabatan fungsional penyuluh. Hal ini mengindikasikan secara riil dibutuhkan profesi di

bidang penyuluhan pembangunan dan pentingnya dukungan lembaga pendidikan Penyuluhan Pembangunan di Indonesia.

Pada dasarnya Penyuluhan Pembangunan di Indonesia sangat dibutuhkan karena menjadi salah satu pilar pengemban utama amanah membangun kemandirian bangsa sebagaimana tersirat dalam Tujuan Nasional. Tujuan nasional yang dimaksud tertera dalam mukadimah UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan rakyat dan mewujudkan kesejahteraan. Lemahnya pemahaman dan komitmen para pemangku kepentingan Pembangunan Nasional terhadap sistem penyuluhan pembangunan dan dalam pendidikan penyuluhan telah menyebabkan upaya membangun kapital manusia dan kapital sosial bagi rakyat menjadi sangat lemah. Penyuluhan adalah salah satu pilar yang sangat dibutuhkan dalam mengembangkan modal manusia (*human capital*) dan modal sosial (*capital social*) dalam mewujudkan kehidupan masyarakat dan lingkungannya menjadi harmonis, adil makmur dan bermartabat.

Sinergi Ilmu Penyuluhan dan Ilmu Komunikasi Pembangunan merupakan jawaban atas serba keterbatasan dalam upaya mengembangkan modal manusia dan modal sosial dalam pembangunan bangsa di era revolusi industri 4.0 yang menguat big data dan 5.0. Tidak hanya di edua era tersebut penyuluhan pembangunan sebenarnya dibutuhkan, bahkan di era revolusi industri 1.0, 2.0 dan 3.0 membutuhkan penguatan individualitas rakyat.

Komunikasi digital adalah transmisi informasi elektronik yang telah dikodekan secara digital, seperti untuk penyimpanan dan pemrosesan oleh komputer. Dalam perkembangan teknologi komunikasi digital, tidak hanya menggunakan komputer dalam pengiriman dan penerimaan informasi namun telah berkembang sedemikian rupa menggunakan android, yang juga berfungsi sebagai handphone.

Menyadari kondisi tersebut, kini menjadi tugas kita para akademisi maupun para pemangku kepentingan pembangunan nasional ini untuk membangun konsep sinergi penyuluhan dan komunikasi pembangunan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermartabat, adil dan makmur. Tulisan ini membahas bagaimana sinergi tersebut dibangun dan bagaimana implikasi akademis, politis, strategis dan teknis dalam pembangunan.

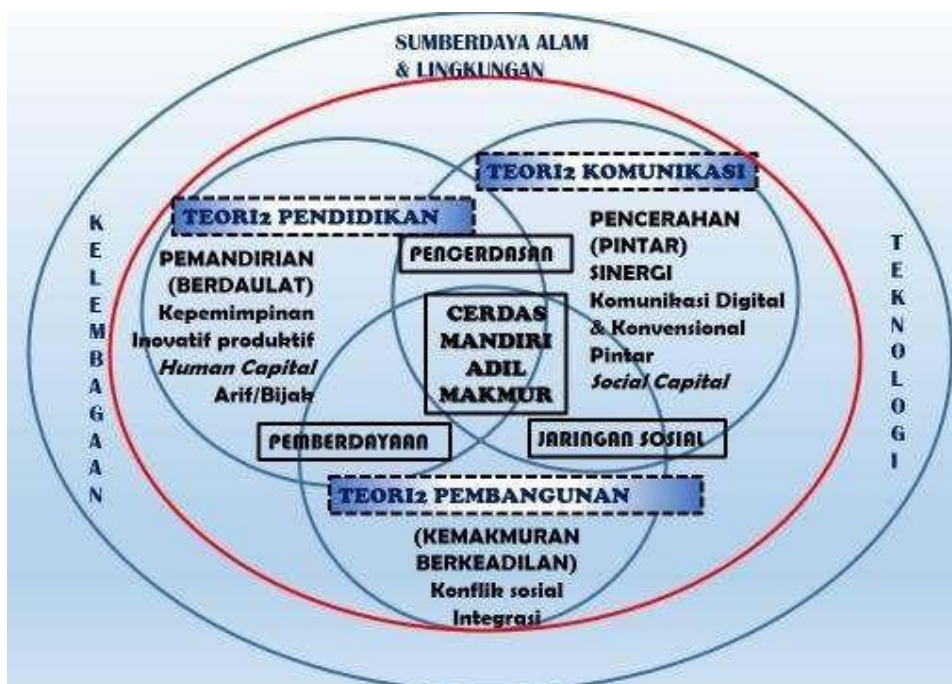
Argumentasi Pentingnya Sinergi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan

Pada kondisi saat ini, setidaknya ada tiga alasan pentingnya sinergi Penyuluhan dan Penyuluhan Pembangunan, (1) Kesamaan tujuan, (2) Peran yang saling melengkapi dalam pembangunan, dan (3) Perkembangan inovasi teknologi komunikasi yang berpotensi berdampak kesenjangan. Pertama, adanya kesamaan tujuan, penyuluhan dan komunikasi keduanya bertujuan perubahan perilaku, baik kognitif, afektif maupun psikomotorik, hanya berbeda dalam tekanannya. Kedua, penyuluhan bertanggungjawab selain pada perubahan perilaku pengetahuan, sikap dan ketrampilan, namun juga pada penerapan (adopsi) dalam kehidupan secara ahli (*skills*). Komunikasi membuat insan menjadi pintar dan berwawasan luas, sedangkan penyuluhan membuat insan menjadi cerdas dan inovatif dalam kehidupannya. Cerdas bermakna, selain pintar juga pandai menggunakan kalbunya sehingga menjadi arif dan bijak dalam menerapkan suatu ide-ide baru, maupun inovasi teknologi. Ketiga perkembangan yang sangat pesat dalam inovasi teknologi digital ternyata menimbulkan kesenjangan kapasitas manusia dalam pembangunan. Hal ini disebabkan akses informasi melalui teknologi digital tidak merata, sehingga terjadi kesenjangan dengan individu masyarakat yang kurang mampu akses dan atau kurang mampu mencerna informasi dari media digital.

Kata pembangunan dalam Penyuluhan Pembangunan, mengikat ilmu Komunikasi dan Ilmu Penyuluhan dalam penguatan modal manusia (Individualitas) dan modal sosial (sosialitas) mewujudkan kesejahteraan individu, keluarga dan masyarakat, serta lingkungannya melalui proses pemberdayaan insani dan sosialnya sampai mandiri. Sinergi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan terdapat pada terwujudnya kemandirian. Secara sederhana sinergi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan ini ditampilkan pada Gambar 1.

Komunikasi dan Penyuluhan Pembangunan merupakan perpaduan antar tiga ranah teori-teori : (1) komunikasi, (2) penyuluhan dan (3) pembangunan. Sinergi ketiganya adalah terwujudnya harmoni antar insan dan masyarakat yang cerdas, mandiri, adil dan makmur. Potensi konflik sosial terkelola dengan cerdas dan optimal melalui integrasi kondusif dalam pengelolaan sumberdaya dan lingkungan. Kontribusi teori-teori komunikasi dalam pembangunan adalah “mencerahkan”, yaitu menghasilkan insan yang pintar dengan berwawasan luas, memperluas alternatif pilihan hidup, memperluas

penguasaan informasi inovatif, pentingnya sinergi peran perkembangan teknologi komunikasi dalam pembangunan (komunikasi digital dan komunikasi konvensional), penguatan jaringan komunikasi/ kerjasama, penguatan modal sosial dan sebagainya. Kontribusi teori-teori penyuluhan dalam pembangunan adalah “mencerdaskan”, mendidik kebebasan bertindak secara etis, merubah perilaku dengan kalbu, memperkuat sikap menjadi semakin inovatif produktif, menekankan kearifan dan kebijakan dalam bertindak, membangun modal manusia (individualitas), kepemimpinan, sikap kewirausahaan sosial dan sikap positif lainnya. Baik komunikasi dan penyuluhan keduanya terikat dalam konteks pembangunan. Pembangunan berkontribusi pada pentingnya makna “memberdayakan” yang bermakna menguatnya akses pengelolaan sumberdaya dan lingkungan secara optimal, menguatnya partisipasi dan dialog yang memperkuat terbangunnya keadilan, perbaikan kualitas hidup diri, keluarga dan lingkungan, kemakmuran serta kemartabatan manusia dan masyarakat. Dapat dilihat pada Gambar 1



Gambar 1 Sinergi Ilmu Komunikasi dan Penyuluhan Pembangunan
(Sumardjo 2019)

Dalam konteks pendidikan penyuluhan pembangunan maka dibutuhkan kompetensi- kompetensi terkait ketiga kata kunci sinergi “Komunikasi, Penyuluhan, dan Pembangunan”. Visi pendidikan penyuluhan pembangunan berkaitan dengan “Dihasilkannya peneliti, pendidik dan komunikator pembangunan yang kompeten mewujudkan masyarakat mandiri, bermartabat (beretika) yang makmur dan berkeadilan”. Hal ini diwujudkan dengan mengembangkan sinergi sistem komunikasi dan penyuluhan dalam pendidikan pembangunan yang berkeadilan.

Menarik didiskusikan dalam forum seminar nasional ini, implikasi dari visi tersebut maka misi pendidikan penyuluhan pembangunan setidaknya menyangkut tiga hal, yaitu:

- (1) Mewujudkan Masyarakat Makmur Berkeadilan. Pendidikan yang menghasilkan IPTEKs Pengembangan Sumber Insani dan lulusan yang kompeten dalam rekayasa sosial partisipatif dalam pembangunan manusia (human capital) dan pembangunan sosial (Sosial capital) di masyarakat;
- (2) Mengembangkan Sinergi Sistem Komunikasi dan Penyuluhan dalam Pembangunan Aktual (tepat guna). Menghasilkan lulusan dengan kompetensi utama mensinergikan sistem komunikasi dan sistem penyuluhan pembangunan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan strategis aktual (tepat guna).
- (3) Menghasilkan Peneliti, Pendidik dan Komunikator Pembangunan yang Kompeten. Menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai peneliti, penyuluh/ pendidik dan komunikator pembangunan dalam mewujudkan masyarakat adil makmur melalui pengembangan IPTEKs, socio-preneur dan aksi partisipatoris yang mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Implikasi dari visi dan misi seperti itu maka beberapa matakuliah, dengan tingkat kedalaman sesuai dengan level kompetensi (Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), menarik untuk didiskusikan dan dipertimbangkan dalam ketiga perpektif Penyuluhan, Komunikasi dan Pembangunan, yaitu:

- (1) Penyuluhan, setidaknya mencakup teori-teori terkait : Falsafah dan Teori-Teori Penyuluhan Pembangunan, Sistem Penyuluhan Pembangunan, Falsafah dan Pendidikan Orang Dewasa, Kepemimpinan, Kelembagaan Sosial dan Manajemen

Kelompok/Organisasi Sosial, Manajemen Pelatihan dan Manajemen Mutu Terpadu, *Cyber Extension*, *Socio-preuneur* dan Kemitraan, Penyusunan dan Evaluasi Partisipatif Program Penyuluhan, Metoda dan Teknik Penyuluhan, Perubahan Sosial dan Pengembangan Sumberdaya Insani (Modal Manusia) dan Modal Sosial.

- (2) Komunikasi, setidaknya mencakup teori-teori terkait : Falsafah dan Teori Komunikasi Pembangunan, Sistem dan Jaringan Komunikasi Pembangunan, Komunikasi dan Perubahan Sosial, Komunikasi Lintas Budaya dan Manajemen Potensi Konflik Sosial, Komunikasi Inovasi, Komunikasi Digital dan Konvensional, Komunikasi Kelompok dan Organisasi,
- (3) Pembangunan, setidaknya mencakup teori-teori : Perkembangan Paradigma Pembangunan, Kelembagaan Ekonomi Lokal dan Kearifan Lokal, Pemenuhan Kebutuhan Manusia, Pengembangan Kualitas Hidup dan Indikator-Indikator Pembangunan, dan Pembangunan Berkelanjutan.

Di samping mata kuliah tersebut perlu diperkuat muatan lokal sesuai dengan keunggulan masing-masing lembaga penyelenggara pendidikan penyuluhan pembangunan.

3. Penyuluhan Pembangunan, Pemberdayaan dan Kemandirian

Kemandirian adalah puncak dari poses pemberdayaan dalam proses penyuluhan. Melalui Penyuluhan Pembangunan, individu atau masyarakat harus mengalami penguatan keberdayaan dalam mewujudkan kualitas kehidupan diri, keluarga, masyarakat dan lingkungannya. Konteks ke Indonesiaan sejalan dengan cita-cita bangsa dan tujuan nasional yang termuat dalam Mukadimah UUD Tahun 1945 yaitu mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan dan bermartabat. Hal ini sejalan dengan UU No 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan UU No 13 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Kemandirian adalah puncak dari keberdayaan seseorang. Kemandirian seseorang ditandai dengan tingginya daya saring, daya saing dan daya sanding dalam perilaku kehidupannya (Sumardjo, 2014; Sumardjo, 2016). Perkembangan tingkat keberdayaan ini dapat terjadi bahkan dari yang paling tidak berdaya (*dependent*), menjadi berdaya

(*independent*) dan puncaknya menjadi mandiri (*interdependent*). Individu atau masyarakat tidak berdaya terjadi ketika kehidupannya tergantung pada peran pihak lain, kurang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategisnya. Individu atau masyarakat yang berdaya ditandai dengan daya saring dan daya saing yang tinggi. Daya saring seseorang makin tinggi sejalan dengan luasnya wawasan dan kecerdasan yang dimilikinya. Sedangkan daya saing seseorang ditandai dengan tingginya kemampuannya mengelola usaha atau sumberdaya dalam kehidupannya secara efektif, efisien dan bermutu. Daya sanding seseorang adalah kemampuannya bermitra, berjaringan sinergis dengan pihak lain dalam kehidupannya. Inti dari daya sanding ini adalah *trust*, dapat saling diandalkan, saling memperkuat, saling dapat dipercaya dan ini merupakan bahan dasar membangun modal sosial dalam lingkungan kehidupannya. Pada Gambar 2 dapat dilihat aspek keberdayaan pada masing-masing level keberdayaan.

ASPEK KEBERDAYAAN	TINGKAT KEBERDAYAAN		
	Tidak Berdaya	Berdaya	Mandiri
Hubungan Sosial Utama	Dependent	Independent	Interdependent (otonom)
Inisiatif	Subsisten	Swakarsa	Swasembada
Sikap Adaptasi	Reaktif	Proaktif	Antisipatif
Orientasi Hidup	Orientasi Masa Lalu (eksploratif)	Orientasi masa kini (eksploitatif)	Orientasi masa depan (sustainability)
Hubungan dengan Alam	Menyerah pada alam	Menaklukkan alam (eksploitatif)	Menyelaraskan sinergi dengan alam

Gambar 2 Aspek Keberdayaan pada tiap Tingkat Keberdayaan

Telah banyak penelitian disertasi di IPB yang membuktikan bahwa kemandirian yang dicirikan kepemilikan daya saring, daya saing dan daya sanding ini berdampak nyata meningkatkan kesejahteraan yang bersangkutan seperti diantaranya Managanta *et al.* (2018), Saleh *et al.* (2017), Maad *et al.* (2017) dan Harjanti (2019). Analog dengan kemandirian individu (Otonomi) juga ternyata berlaku pada unit analisis pada tingkat entitas kelompok atau masyarakat (Sumardjo, 2014; Sumardjo, 2016).

Penyuluhan pembangunan tidak terlepas dari upaya mewujudkan kesejahteraan secara bermartabat. UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanahkan, bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia meliputi (1) Rehabilitasi sosial, dengan refungsionalisasi fungsi sosial warga masyarakat, (2) Jaminan sosial, yaitu terjaminnya upaya memenuhi kebutuhan dasar, (3) Pemberdayaan sosial, agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasar, dan (4) Perlindungan sosial, agar masyarakat terhindar dari resiko guncangan dan kerentanan sosial. Semua pendekatan penyelenggaraan tersebut relevan dengan kegiatan penyuluhan, terutama pendekatan pemberdayaan sosial, Pendekatan ini sangat relevan dengan prinsip dan filosofi penyuluhan.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial (UU Nomor 11 Tahun 2009 pasal 3) adalah meningkatkan taraf kesejahteraan, mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha serta kemampuan kemampuan dan kepedulian masyarakat secara melembaga. Asas penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas, dan keberlanjutan (UU Nomor 11 Tahun 2009 pasal 2). Hal ini sejalan dengan asas penyuluhan yang tercantum dalam UU No 16 Tahun 2006 pasal 2 demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerjasama, partisipatif, kemitraan, keberlanjutan, berkeadilan, pemerataan dan tanggunggugat.

Setelah melalui kajian terkait penyuluhan dan praktek pemberdayaan masyarakat Sumardjo (2010; 2014; 2016) sampai pada pemahaman bahwa dalam konteks pemberdayaan masyarakat falsafah penyuluhan pada dasarnya adalah “mengembangkan keberdayaan partisipan pendidikan non formal secara adaptif, partisipatif, dialogis dan sinergis mewujudkan modal manusia dan modal sosial menjadi berkehidupan yang makin berkualitas, mandiri dan bermartabat”. Di dalam **pemberdayaan** terkandung makna bahwa filosofi penyuluhan merupakan upaya terencana (Sumardjo, 2016):

- Mengembangkan keberdayaan partisipan maknanya membebaskan warga masyarakat dari ketidakcerdasan ketidaktahuan (kognitif), ketidakmampuan (psikomotorik-konatif) dan ketidaksiapan (afektif) beradaptasi terhadap kehidupan aktual dan atau memerdekakan dari dominasi pihak lain.

- Mengembangkan proses pendidikan orang dewasa (andragogi) bagi warga masyarakat, yaitu pendidikan non formal yang bermakna sebagai upaya peningkatan kualitas perilaku melalui pembelajaran di luar sekolah formal.
- Mengembangkan kemampuan adaptif menjadi semakin antisipatif, aktual, dinamis, dengan pendekatan komunikasi dialogis sehingga mampu mengembangkan sintesis atas berbagai solusi dan inovasi, serta partisipatif (voluntary change) dan sinergis terjadi konvergensi kepentingan dengan mitra sosialnya.
- Mengembangkan modal manusia menjadi kompeten dan semakin profesional, serta modal sosial yaitu mewujudkan masyarakat berdaya dan mandiri (better community).
- Meningkatkan kualitas hidup yang semakin sejahtera (to improve their level of living).
- Mewujudkan kemandirian (interdependen) individu dengan memperkuat daya saring (cerdas dan bermoral), daya saing (efektif, efisien dan bermutu), dan daya sanding (berdaulat dan bersinergi dalam kemitraan).
- Mewujudkan manusia dan masyarakat yang bermartabat (berdaulat, sejahtera, adil dan beradab)

Pandangan tersebut sejalan dengan falsafah penyuluhan yang di sampaikan oleh Kelsey dan Hearne (1955) dalam (Sumardjo, 2015; 2016) berikut : *“Philosophy of extension is based on the importance of individual in the promotion of progress for rural people and for the nation”*. Falsafah penyuluhan didasarkan pada kepentingan individu guna mengembangkan kemajuan bagi masyarakat pedesaan dan negara. Falsafah tersebut pada dasarnya adalah *“To help people to help themselves through educational means to improve their level of living”*. Membantu orang-orang dalam menolong diri mereka sendiri dengan pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Sistim nilai yang mendasari (memandu) penyuluhan pada dasarnya adalah pemberdayaan klien, pentingnya kehidupan masa depan (antisipatif), dan kepercayaan (optimisme) pada masa depan. Kepercayaan (keyakinan) penting yang ada pada para

penyuluh tentang sifat realita adalah memiliki perspektif kesisteman (berfikir sistem yang holistik, bukan parsial), rasional dan non deterministik. Para penyuluh seharusnya mempercayai tentang pengetahuan dan belajar bahwa pengetahuan itu diperoleh dan ditransmisikan yaitu bahwa belajar itu terikat konteks (filosofis idealis, realistik dan pragmatis) dan bahwa belajar itu merupakan proses yang aktif, adatif dan aktual (Sumardjo, 2016).

Seorang penyuluh atau setiap insan yang terlibat dalam pemberdayaan setidaknya memiliki falsafah idealis, realis dan pragmatis, yaitu memiliki gambaran masa depan yang jelas, berbasis realitas kehidupan dan memiliki manfaat bagi kehidupan dan masa depannya. Falsafah idealis merupakan keyakinan bahwa kebenaran itu ada dalam cita-cita, tujuan atau kondisi logis yang dapat diwujudkan, sehingga setiap insan perlu memiliki pandangan kedepan tentang masa depan yang ideal yang diyakini dapat diwujudkannya. Falsafah realistik merupakan keyakinan bahwa kebenaran itu ada dalam realita kehidupan. Falsafah pragmatis merupakan keyakinan, bahwa setiap insan meyakini kebenaran itu adanya dalam suatu yang dinilai bermanfaat bagi kehidupan nyata.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses pengembangan potensi dan kemampuan individu/ masyarakat sehingga menguat kapasitasnya, untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran/ pendidikan dan usaha-usaha lain (misalnya membantu penyediaan fasilitas tertentu), yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan kemauan mereka bertindak mengatasi masalah dan ancaman yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan belajar adalah usaha aktif seseorang yang bertujuan mengembangkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang berdampak tumbuhnya kemampuan bertindak cerdas dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya.

Paradigma Pembangunan Perpektif Penyuluhan Pembangunan

Pembangunan dari perspektif ilmu penyuluhan pembangunan merupakan suatu upaya terencana untuk mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan diri, masyarakat dan lingkungannya secara bermartabat, melalui peningkatan kualitas sumberdaya insani

dan perbaikan sarana dan prasarana. Faktor-faktor utama pembangunan adalah : (1) Pengembangan kapasitas, (2) Keadilan, (3) Pemberdayaan, (4) Kesalingtergantungan atau kemandirian, dan (5) keberlanjutan. Nilai-nilai utama dalam pembangunan adalah kelangsungan kehidupan yang layak, harga diri (martabat manusia), dan kemerdekaan atau kebebasan dari penindasan atau dominasi.

Hal ini lebih dekat dengan perspektif humanis yaitu : pembangunan dilihat sebagai “pembebasan dari kemelaratan, memupuk harga diri dan rasa penuh dayaguna atau kemampuan untuk membuat pilihan-pilihan mengenai masa depan. Implikasinya adalah pengembangan kapasitas untuk melakukan perubahan keadilan dalam distribusi ekonomi, pemberdayaan masyarakat, adanya saling ketergantungan, dan keberlanjutan”(Bryant & White, 1987). Pembangunan hakikatnya mengandung tiga nilai utama yaitu; “menunjang kelangsungan hidup, harga diri, dan kemerdekaan dari penjajahan dan perbudakan” (Todaro, 2011).

Pandangan paradigma humanis tersebut tidak bisa terlepas dari hakikat pembangunan menurut perpektif ekonomi (Djojohadikoesoema, 1994) yaitu sebagai suatu transformasi dalam arti perubahan struktural, yaitu perubahan dalam struktur ekonomi masyarakat yang meliputi perubahan pada perimbangan-perimbangan keadaan yang melekat pada landasan kegiatan ekonomi dan bentuk susunan ekonomi. Pembangunan berkaitan dengan perbaikan kualitas hidup rakyat, memperluas kemampuan mereka untuk membentuk masa depan mereka sendiri. Secara umum, pembangunan menuntut pendapatan per kapita yang lebih tinggi, dan hal-hal lain yang lebih luas. (*Bank dunia, 2000*). Pada Gambar 3 dapat dilihat potret karakteristik dari tiga paradigma pembangunan. Penyuluhan dan atau Pemberdayaan termasuk dalam paradigma Pembangunan Bersumber pada Manusia (*people centered Development*).

KARAKTERISTIK	PARADIGMA PEMBANGUNAN		
	PERTUMBUHAN	PEMERATAAN	PEOPLE CENTERED
FOKUS	INDUSTRI	PELAYANAN	MANUSIA
NILAI	BERPUSAT PADA INDUSTRI	BERORIENTASI PADA MANUSIA	BERPUSAT PADA MANUSIA
INDIKATOR	EKONOMI MAKRO	INDIKATOR SOSIAL	HUB. MANUSIA DG SDA
PERANAN PEMERINTAH	KEWIRAUSAHAAN	PEMBERI PELAYANAN	PEMBINAAN
SUMBER UTAMA	MODAL	KEMAMPUAN ADMINISTRATIF DAN ANGGARAN	KREATIVITAS DAN KOMITMEN
KENDALA	KONSENTRASI DAN MARGINALISASI	KETERBATASAN ANGGARAN DAN INKOMPETENSI APARAT	STRUKTUR DAN PROSEDUR YANG TIDAK MENDUKUNG

Gambar 3 Karakteristik Tiga Model Paradigma Pembangunan

Pergeseran paradigma juga tampak terjadi dari Paradigma konflik dependensi strukturalis Marxix dan non-strukturalis Marxix, yang menempatkan posisi masyarakat sebagai penonton (obyek pembangunan), ke paradigma equilibrium behavioralism, psikodinamika, difusionism, dualism sosiologis yang menempatkan posisi masyarakat menjadi pelaku utama (subyek pembangunan).

Salah satu faktor penting dalam pembangunan yang sangat relevan dengan penyuluhan pembangunan adalah pengembangan kapasitas. Agar tidak terjadi kerancuan antara istilah kapasitas (*capacity*), kemampuan (*ability*), dan kompetensi pada Gambar 3 ditunjukkan secara sederhana tentang ketiganya. Kapasitas adalah sejumlah kopetensi dalam posisi sosial tertentu, sedangkan kompetensi merupakan sejumlah kemampuan dalam bidang (misalnya profesi) tertentu, dan kemampuan (*ability*) adalah penguasaan aspek-aspek perilaku baik pengetahuan, sikap, ketrampilan dan tindakan. Kapabilitas adalah kapasitas yang ditampilkan secara aktual (teramati) sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.



Gambar 3 Kemampuan, Kompetensi, Kapasitas dan Kapabilitas

Pemberdayaan pada dasarnya adalah suatu upaya meningkatkan kesanggupan memenuhi kebutuhan diri sendiri. Beberapa tahapan untuk mencapai tujuan pemberdayaan dapat ditempuh melalui tahapan : (1) Identifikasi kebutuhan, (2) Identifikasi pilihan atau strategi pencapaian tujuan, (3) Keputusan atau pilihan tindakan pemberdayaan, (4) Mobilisasi sumberdaya-sumberdaya, dan (5) Tindakan mencapai tujuan, sampai terpenuhinya kebutuhan. Berdaya merupakan situasi menuju kemandirian (Sumardjo 2010) yang ditandai dengan Intervensi pihak luar minimal Pemberdayaan pilar utama pengembangan partisipasi masyarakat dan sebaliknya partisipasi masyarakat merupakan media atau sarana untuk meningkatkan keberdayaan. Untuk memberdayakan masyarakat langkah awal yang sangat penting adalah pengorganisasian masyarakat sasaran ke dalam kelompok (unit) yang akan menjadi wahana pemberdayaan.

Pengorganisasian masyarakat adalah proses membangun kekuatan dengan melibatkan anggota masyarakat sebanyak mungkin melalui proses:

- Menemu-kenali ancaman yang ada secara bersama;
- Menemu-kenali penyelesaian-2 yang diinginkan terha-dap ancaman-ancaman yang ada;

- Menemu-kenali orang-orang atau pihak-pihak dan struktur, birokrasi, perangkat yang ada agar proses penyelesaian yang dipilih menjadi mungkin dilakukan;
- Menyusun sasaran/tujuan yang harus dicapai;
- Membangun sebuah institusi yang secara demokratis diawasi oleh seluruh anggota; Mengembangkan kapasitas (belajar, berlatih, mencari dukungan, menggalang dana, dll) untuk menangani ancaman yang ada;
- Menampung semua keinginan dan kekuatan anggota yang ada.

Jadi pengorganisasian masyarakat bukan hanya sekedar melakukan pengerahan masyarakat untuk mencapai sesuatu kepentingan semata, tetapi suatu proses pembangunan organisasi masyarakat yang dilaksanakan dengan jalan mencari permasalahan dan tujuan bersama. Kemudian mencari penyelesaian secara bersama pula yang didasarkan pada potensi yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan. Disini permasalahan yang berkaitan dengan kelestarian sumberdaya dan keserasian lingkungan berpotensi muncul.

Penyuluhan partisipatif melalui pengorganisasian masyarakat sasaran bertujuan membangun kesadaran kritis dan penggalian potensi pengetahuan lokal tentang kebutuhan masyarakat (*felt needs*) untuk terjadinya sinkronisasi dengan kebutuhan riil (*real needs*) masyarakat. Penyuluhan partisipatif ini mengutamakan pengembangan masyarakat berbasis pemberdayaan individu, masyarakat dan lingkungannya berdasarkan dialog atau musyawarah yang demokratis. Pendapat dan usulan masyarakat merupakan sumber utama gagasan yang harus ditindaklanjuti secara kritis, sehingga partisipasi masyarakat dalam merencanakan, membuat keputusan dan melaksanakan program merupakan tonggak yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan dan keserasiannya dengan lingkungannya.

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat dari perspektif penyuluhan partisipatif adalah berkembangnya kesadaran dan motivasi masyarakat sehingga mampu mengelola secara optimal potensi sumberdaya mereka dan lingkungannya. Penyuluhan partisipatif melalui pengorganisasian masyarakat adalah penumbuhan kesadaran kritis, partisipasi aktif, pendidikan (nonformal) berkelanjutan, dan penggalangan kekuatan masyarakat. Jadi dalam perspektif penyuluhan, pemberdayaan masyarakat adalah bagian dari pengembangan sumberdaya insani yang bermuara pada peningkatan kesadaran dan

kemampuan masyarakat untuk mengatasi masalah yang mengancam kehidupan mereka dalam meningkatkan kualitas kehidupan diri, keluarga, masyarakat dan lingkungannya.

Implikasi Strategis Penyuluhan Pembangunan: Pengembangan Kapital Komunitas, Kapital Manusia dan Kapital Sosial

Setelah dengan cermat mencoba memahami sistem sosial pedesaan dan pertanian, kenapa kesejahteraan rakyat ini belum berkembang? Dilihat dari perspektif penyuluhan, ternyata kemiskinan dan ketertinggalan terjadi berhubungan erat dengan lemahnya kapital sosial dalam masyarakat (Sumardjo, 2010). Lemahnya kapital sosial tersebut berhubungan erat dengan lemahnya kapital manusia. Lemahnya kapital manusia tersebut dapat terjadi karena beberapa sebab antara lain, lemahnya human dignity dan kepastian hukum/keadilan sosial (*social justice*). Hubungan tersebut dapat dilihat Gambar 4 (Sumardjo, 2010). Pada hal Indonesia telah meratifikasi Hak Asasi Manusia, namun human dignity dan *social justice* masih lemah.



Gambar 4. Hubungan Kesejahteraan Sosial, Modal Sosial dan Modal Manusia

Penyuluhan/pemberdayaan masyarakat selain mengembangkan kapital manusia masyarakat harus mampu mengembangkan kapital sosial (Sumardjo, 2010). Istilah kapital manusia lebih tepat digunakan di sini sebagai pengganti istilah sumberdaya manusia, mengingat manusia semestinya harus dimanusiakan bukan di eksploitasi, bukan sebagai sumberdaya tetapi sebagai modal yang berperan penting dalam kehidupannya. Hal ini sejalan dengan filosofi penyuluhan yang pada dasarnya adalah “menolong orang-orang untuk dapat menolong dirinya sendiri melalui proses pendidikan non formal untuk meningkatkan kualitas hidup diri, keluarga dan masyarakatnya”. Penyuluhan pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas perilaku seseorang atau individu, yang meliputi kognitif, afektif dan psikomotorik/ konatif sehingga memiliki individualitas (*human capital*, bukan individualistis) yang kompeten, berdaya dan mandiri.

Tantangan ke depan dalam pengembangan ilmu penyuluhan adalah bagaimana penyuluhan efektif mengembangkan kapital manusia melalui peningkatan kapasitas warga masyarakat dalam mengembangkan energi sosial budaya kreatif sebagai kapital sosial. Kapital sosial diperlukan masyarakat untuk menjadi berdaya memenuhi kebutuhan kesejahteraannya. Kapital manusia dan kapital sosial ini sulit berkembang apabila penyuluhan dilaksanakan secara non partisipatif, karena kebutuhan/ kepentingan masyarakat tidak terwadahi dalam program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penyuluhan harus berubah dari non partisipatif ke penyuluhan yang partisipatif yang dialogis sehingga terjadi konvergensi kepentingan pihak-pihak terkait. Penyuluhan yang partisipatif menghasilkan kapital manusia dan kapital sosial yang handal pada masyarakat, sedangkan penyuluhan yang non partisipatif menghasilkan apatisme masyarakat dan ketergantungannya pada pihak lain. Kapital manusia berkembang ditandai oleh tingkat kemandirian dan menghasilkan kapital sosial yang mampu bermitra secara sinergis dengan pihak terkait.

Modal manusia dan modal sosial merupakan bagian dari modal komunitas (*community capital*), bagian yang lainnya adalah *natural capital* dan *produce economic capital*. *Natural capital* sebagai contoh cuaca, penyinaran matahari, ketersediaan air, flora, fauna, sumber energi, tanah dan sebagainya. Modal ekonomi digambarkan antara lain penguasaan asset ekonomi, aset finansial dan sumberdaya ekonmi lainnya. Pemberdayaan masyarakat haruslah meningkatkan kapasitas masyarakat mengelola aset modal komunitas

tersebut secara optimal dan berkelanjutan untuk meraih manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan bersama masyarakat yang bersangkutan.

Modal Sosial adalah kecenderungan kelompok dan hubungan sosial yang berkaitan dengan kerjasama dalam masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik, ditopang oleh nilai-nilai dan norma yang menjadi unsur-unsur utamanya seperti kepercayaan, keimbalbalikan, sistem nilai dan norma atau aturan-aturan kolektif dalam suatu masyarakat. Modal Sosial menurut tipe : melekat pada individu: (1) sikap percaya dan toleransi (*trust and tolerance*), dan (2) kelompok dan jejaring (*groups and networks*). Melekat pada komunitas: institusi, hubungan sosial, dan kebiasaan umum yang mendorong interaksi antar individu untuk berkontribusi positif terhadap pembangunan masyarakat.

Dari berbagai literatur Fukuyama, Putnam, Westamaster (Sumardjo, 2010) dapat dijelaskan wujud dari modal sosial itu pada dasarnya dapat dilihat dari konsep interaksi dalam tiga tipe berikut : (1) **Bonding**, yaitu interaksi sosial yang dilakukan secara internal di komunitas oleh warga yang memiliki dan berbagi kesamaan karakteristik demografis dan geografis, (2) **Bridging**, yaitu interaksi sosial yang dilakukan secara horisontal oleh warga/kelompok dalam komunitas dengan warga/kelompok lain di luar lingkup komunitas, tanpa memandang kesamaan karakteristik demografis dan geografis, dan (3) **Linking**, yaitu Interaksi sosial ketika warga atau masyarakat berinteraksi secara vertikal dengan pihak lain yang memiliki otoritas yang lebih tinggi misalnya pemerintah, organisasi formal kemasyarakatan/ politik, dan institusi bisnis, dan sebagainya. Unsur-unsur modal sosial itu meliputi :

- (1) *Trust*, yaitu sikap saling mempercayai di antara pihak yang bekerjasama,
- (2) *Reciprocity*, yaitu saling berbagi atau bertukar manfaat secara berkeadilan
- (3) *Value*, ide yang dianggap baik, benar, dibutuhkan atau penting
- (4) *Participation*, yaitu inisiatif atau kemampuan untuk melibatkan diri secara sadar dan sukarela dalam suatu jaringan hubungan sosial,
- (5) *Social Norm*, sejumlah aturan yang didasarkan pada value dan trust,
- (6) *Proactive action*, yaitu keingin terlibat secara sadar dalam kegiatan bekerjasama.

Keberlanjutan pembangunan melalui penyuluhan perlu diwarnai dengan tiga nilai utama (Sumardjo, 2010; sejalan dengan Todaro dan Smith, 2009), yaitu *sustenance*, *self-*

esteem, and freedom. Sustenance ditandai dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar manusia, yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan rasa aman. *Self-esteem* ditandai dengan berlakunya pengakuan sebagai manusia seutuhnya (*to be a person*) yang merupakan komponen universal kedua terpenting dalam kehidupan yang layak. *Freedom* adalah adanya iklim kebebasan manusia untuk memilih, yang dipahami sebagai keleluasaan emansipasi dari kondisi alienasi dalam kehidupan, tekanan institusi, dogmasi dalam keyakinan, pelayanan sosial dan khususnya dalam upaya pengentasan diri dari kemiskinan.

Di Indonesia untuk dapat menerapkan ketiga pendekatan ini masih perlu perjuangan serius! Ancaman serius yang dihadapi untuk itu adalah bagaimana mengembangkan kepastian hukum sehingga keadilan cenderung terwujud dan kondusif bagi pengembangan kapital manusia dan kapital sosial. Investasi dalam kapital manusia ini masih kurang diminati oleh pimpinan daerah, karena tidak secara langsung memberikan dampak nilai ekonomi bagi daerah. Keadaan seperti ini yang menjadi kendala terwujudnya kapital sosial yang berbasis pengembangan kapital manusia.

Energi Sosial Budaya Kreatif : Wujud Sinergi Komunikasi dan Penyuluhan dalam Rekayasa Sosial Partisipatif Pemberdayaan Masyarakat Pertanian

Istilah rakayasa sosial di dalam berbagai perspektif digunakan untuk hal yang bersifat negatif, digunakan dalam konteks dominasi seperti penindasan satu pihak atas pihak lain, manipulasi negatif untuk kepentingan sepihak tanpa disadari oleh pihak lain. Hal itu terjadi karena yang merekayasa sosial adalah pihak lain, tanpa melibatkan pihak yang terekayasa. Di sini diperkenalkan konsep “Rekayasa Sosial Partisipatif” yaitu rekayasa sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak yang direkayasa itu sendiri sebagai subyek atau pelaku utama, dalam menentukan masa depan yang lebih baik, cara-cara untuk mencapainya dan pihak-pihak yang disertakan dalam mewujudkan tujuan atau masa depan yang diidealkannya.

Energi sosial budaya kreatif merupakan rekayasa sosial yang dilakukan secara partisipatif dengan model komunikasi konvergen dan dialogis di antara internal masyarakat sendiri. Di era industri 4.0 ini, di antara masyarakat ada yang akses dengan baik

komunikasi digital dan sebagian warga masyarakat yang lain kurang akses dan kurang mampu mencerna informasi dari komunikasi digital. Komunikasi di antara mereka yang terjadi secara partisipatif menghasilkan konvergensi kepentingan dan menjadi kekuatan untuk terjadinya kerjasama kemitraan sinergis baik di antara mereka sendiri maupun dengan pihak luar yang mereka kehendaki.

Tantangan kedepan penyuluhan dituntut untuk mampu mengembangkan energy sosial budaya kreatif (Sumardjo, 2010), yang meliputi *ideals*, *ideas*, dan *friendship*. *Ideals* adalah kondisi ideal yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam mengembangkan masyarakat, yaitu kejelasan tujuan, harapan dan visi atau bahkan cita-cita bersama. *Ideals* ini membimbing kearah kejelasan *ideas*, yaitu cara-cara yang ditempuh bersama untuk mewujudkan *ideals* tersebut, yaitu kejelasan strategi, program, kegiatan, metoda atau tehnik yang dikembangkan secara kreatif dan tepat guna. *Ideas* menjadi pedoman bagi para pihak internal yang terkait untuk mengembangkan *friendship* yaitu jaringan kerjasama di antara mereka melalui penerapan kemitraan sinergis.

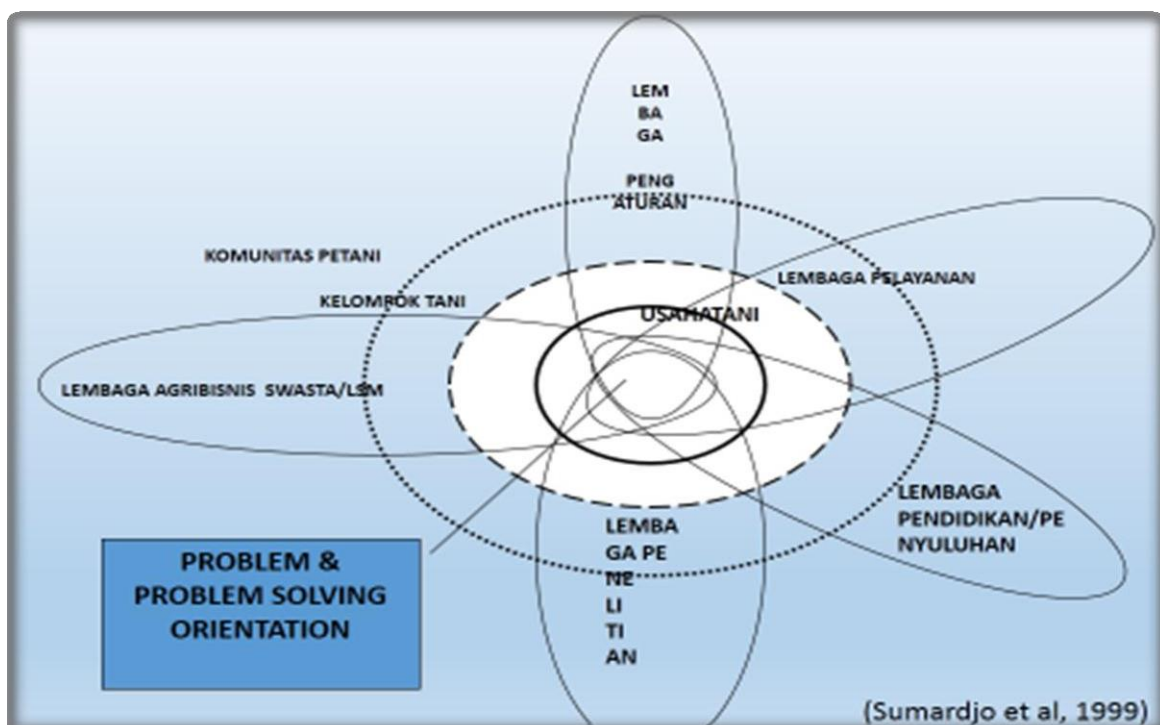
Sejauh ini tidak sedikit upaya pemberdayaan masyarakat yang kurang berhasil mengembangkan energy sosial tersebut, sehingga partisipasi masyarakat rendah dan kurang mampu meraih manfaat atas upaya pembangunan, akibatnya terjadi stagnasi dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat (Sumardjo, 2010). Terjadinya stagnasi inovasi sebagai akibat dari (1) lemahnya *linking system* antara penghasil IPTEKS, pendidikan/penyuluhan, pengaturan, pelayanan, dan dunia bisnis, (2) sistem agribisnis yang tersekat-sekat dan asimetris karena didominasi oleh pemodal kuat yang bergerak di segmen hilir, pengolahan hasil dan pemasaran, dan (3) lemahnya kompetensi reaktualisasi inovasi pada penyuluh juga menyebabkan ketidak berdayaan masyarakat/ petani.

Cyber Extension dan Media Forum: Wujud Sinergi Sistem Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan

Solusi stagnasi inovasi dalam dari hasil penelitian dalam dua dekade terakhir adalah *Cyber Extension*, Solusi ini menguat sejalan dengan semakin luasnya akses teknologi informasi oleh masyarakat, baik melalui komunikasi digital komputer maupun handphone. Yang masih menjadi masalah adalah masih lemahnya pengelola *Cyber Extension* ini

untuk mengawal kualitas informasi yang seharusnya menjadi perspektif solusi aktual bagi permasalahan kehidupan masyarakat (Sumardjo, 2010; Sumardjo, 2019).

Salah satu konsep yang berperan dalam pengembangan *cyber extension* di Indonesia khususnya di Kementan adalah konsep keterpaduan (*Interface*) sistem hasil kajian dalam disertasi Sumardjo (1999), yang kemudian dicoba diimplementasikan dalam lingkup Dirjen Hortilkultur Departemen Pertanian awal 2000an. Selanjutnya dilakukan dalam penelitian IPB dan Kementerian Pertanian (Sumardjo, Mulyandari, Baga dan Dharmawan) antara tahun 2005-2012. Pada tahun 2010 telah diterbitkan Buku *Cyber Extension: Peluang dan Tantangan dalam Pemberdayaan Petani Sayuran*. Rangkaian penelitian itu mendapat penghargaan dari Menristek sebagai innovator Indonesia di bidang *cyber extension* pemberdayaan petani sayuran bagi para peneliti pada tahun 2014 (Sumardjo, 2016). Hasil penelitian Sumardjo (1999) terkait dasar pemikiran *Cyber Extension* ini tersaji pada Gambar 5 tentang Paradigma Sistem Penyuluhan dalam *Cyber Extension* (CE).



Gambar 5 Keterpaduan antar Pihak Terkait dalam Cyber Extension

Pada dasarnya dasar pemikiran utamanya adalah terjadinya *interface* atau konvergensi informasi berbagai *stakhorders* pembangunan pertanian pada kebutuhan informasi/ inovasi dalam pengelolaan usahatani, dan kelompok tani. Konvergensi perlu terjadi terutama di antara: (1) Petani, (2) Pengembang IPTEK (Perguruan tinggi dan Litbang), (3) Lembaga Pendidikan, dan lembaga penyuluhan (pendidikan non formal), (4) Lembaga pengaturan (pembuat kebijakan/ aturan), (5) Lembaga Pelayanan (Dinas dan Instansi terkait), dan (6) Lembaga Bisnis (pelaku Usaha). Di antara elemen tersebut harus terjadi Jaringan Kemitraan Komunikasi Informasi/ Inovasi yang bersifat : saling mendukung, saling memperkuat, saling melengkapi dan saling dapat diandalkan maupun saling mempercayai.

Pada dasarnya sistem penyuluhan melalui *Cyber Extension* (CE) menerapkan paradig-paradigma (Sumardjo, 2016): (1) Sistem Penyuluhan Kafetaria, (2) Prinsip *tailor made massage*, (3) Komunikasi dialogis-konvergen, dan (4) jaringan kemitraan komunikasi informasi/ inovasi.

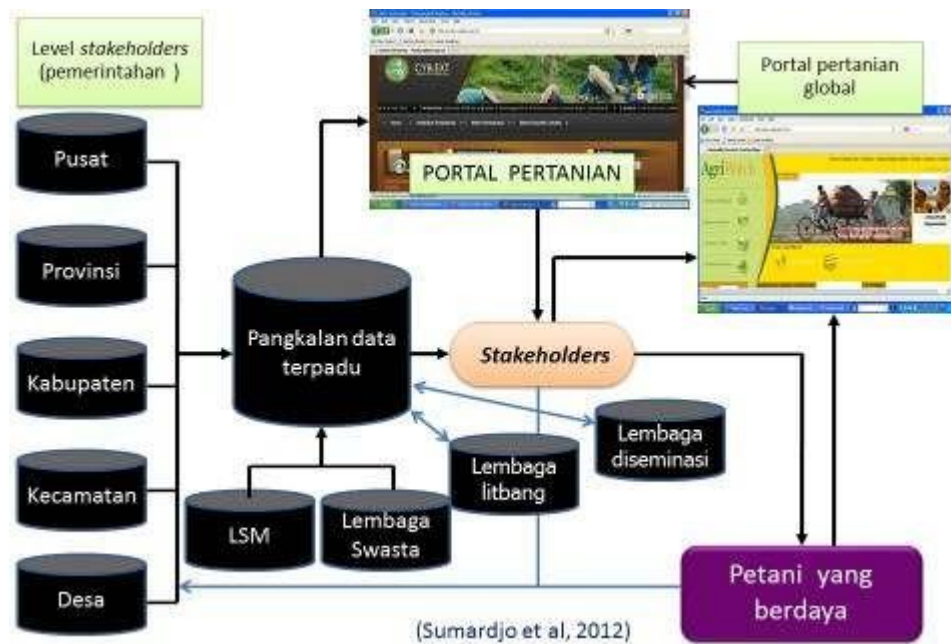
Sistem Penyuluhan Kafetaria maksudnya CE sebagai media penyuluhan menyediakan informasi sedemikian rupa sehingga informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya (Petani dan stakeholders pembangunan pertanian lainnya). Apapun yang dibutuhkan pengguna harus senantiasa disediakan oleh pengelola/admin CE, dengan memanfaatkan jaringan pakar dan situs dari instansi terkait. Sedemikian rupa dikondisikan sehingga CE berfungsi sebagai kafetarian informasi yang siap melayani segala kebutuhan informasi pelanggannya sesuai dengan potensi dan kondisi lokal.

Prinsip *Tailor Made Message* maksudnya adalah terjadinya kesesuaian antara penelitian, pendidikan dan penyuluhan dengan kebutuhan pelanggan CE, dan didukung oleh peraturan hukum dan pelayanan instansi/ pihak terkait secara tepat (lembaga bisnis dan dinas instansi terkait), cepat dan aktual. Diibaratkan CE seperti penjahit yang membuat baju sesuai dengan pesanan dan kebutuhan kondisi dan situasi pelanggannya (*customers*). Hal ini terjadi apabila terjadi komunikasi yang bersifat dialogis dan konvergen, yaitu paradigm komunikasi interaktif dan relasional, sehingga terjadi kesesuaian (*interface* atau konvergensi) berbagi informasi obyektif antar stakeholders pembangunan pertanian, dengan cara mencegah terjadinya hambatan dalam pemanfaat CE untuk kepentingan masing-masing pengguna/ pelanggannya.

Jaringan Kemitraan Komunikasi Informasi/ Inovasi perlu dikembangkan untuk terjadinya sinergi melalui simbiose mutualistis antara stakeholders pembangunan pertanian, sehingga terjadi hubungan (*relationship*) Siantar mereka secara : saling mendukung, saling memperkuat, saling dapat diandalkan dan Saling menghidupi.

Di antara para pelaku atau stakeholders pembangunan pertanian saling berbagi informasi dan saling memanfaatkan informasi sesuai kebutuhan atau kepentingannya. Hal ini dapat dirancang jaringan informasi seperti yang tertera pada Gambar 6 tentang kerangka konseptual pengelolaan informasi dalam jaringan informasi dan komunikasi pembangunan pertanian berbasis *cyber Extension* (Sumardjo, 2016).

Pada awal pengenalan *cyber extension* ini menghadapi pertanyaan yang menggambarkan kekhawatiran hilangnya peran para penyuluh, namun hasil penelitian beberapa disertasi di IPB menunjukkan justru ketika CE ini diakses oleh masyarakat, petani, penyuluh, dan tokoh lainnya, justru membuat peran penyuluhan semakin terasa dibutuhkan (Sumardjo, 2017). Hal ini terjadi disebabkan pada kalangan tertentu di perdesaan dan pertanian kehadiran informasi dari CE tersebut menyebabkan tumbuh dan bangkitnya kesadaran akan inovasi yang dinilai bermanfaat. Mereka (petani) lalu berupaya mengkonfirmasi informasi tersebut kepada kelompok tani, tokoh tani (petani maju) dan para penyuluh atau figur lainnya yang dinilai kompeten dengan informasi terkait. Dengan demikian, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media penyuluhan pertanian ini dinilai lebih efektif dan efisien serta mengurangi kesenjangan informasi dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian guna meningkatkan akses informasi kepada; Penyuluh Pertanian sehingga proses transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi inovatif ke petani menjadi aktual dan efektif. Disamping itu, petani sebagai pelaku utama dan pengguna informasi (*user*) dari *cyber* juga dapat secara interaktif berbagi informasi dan ilmu pengetahuan di kolom yang disediakan dalam *cyber extension*.



Gambar 6. kerangka konseptual pengelolaan informasi dalam jaringan informasi dan komunikasi pembangunan pertanian berbasis *cyber Extension*. (Sumardjo, 2010; Sumardjo 2012)

Tantangan terkait dengan pengembangan Cyber Extension ke depan dalam pembangunan pertanian antara lain (Sumardjo, 2017):

- a. Mewujudkan secara konsisten penerapan Paradigma : konvergensi komunikasi (interaktif/ relasional) dengan mengatasi sekat-sekat terjadinya komunikasi di antara *stakeholders* pembangunan pertanian.
- b. Penyuluh berperan **menjadi fasilitator dan motivator** bagi kelompok atau petani, membangun blog promosi.
- c. Penyuluh berperan sebagai **pendamping** kelompok tani (kelembagaan lokal) dalam uji coba teknologi baru dan menjembatani proses penyelesaian permasalahan *stakeholder* terkait.
- d. Kelembagaan penyuluhan berperan sebagai **motivator** peningkatan kapasitas penyuluh dalam sistem diseminasi inovasi berbasis TI, utamanya pengelolaan dan pemanfaatan informasi. Pelatihan pengelolaan situs dan pengemasan kembali informasi yang diakses melalui internet atau berbagai sumber, bagi penyuluh agar mengikuti perkembangan lingkungan strategisnya.

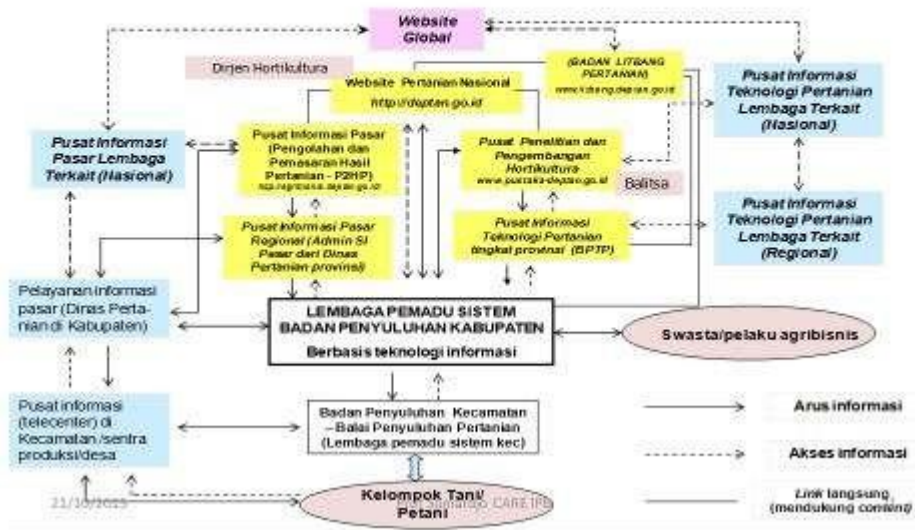
- e. Kelembagaan lokal berfungsi : (1) sebagai media forum, (2) sebagai penyaring informasi dari internet, (3) **inovator** pelaksana uji coba inpvasi, dan (4) sebagai **sumber informasi** yang valid, dan mutakhir.
- f. Kelembagaan lokal berfungsi sebagai penghubung dan pengembang jaringan komunikasi dengan *stakeholders* terkait, utamanya dalam pemasaran hasil pertanian.

Mengembangkan *Cyber Extension* semakin efektif berfungsi untuk (Sumardjo, 2017):

1. Mempermudah proses peningkatan kualitas pengelolaan usahatani dan pembangunan pertanian pada umumnya dengan meningkatkan intensitas interaksi di antara para pengguna dengan berkomunikasi dua arah, dialogis dan konvergen.
2. Menyajikan pengupasan materi secara sederhana, komunikatif dalam cakupan yang lebih luas dan mendalam sehingga akan meningkatkan kualitas informasi penyuluhan guna mempercepat arus informasi teknologi ke pengguna (petani) dan pengguna lainnya terkait dengan pengelolaan usahatani dan terwujudnya simetri sistem agribisnis yang semakin bersinergi.
3. Ketersediaan informasi yang aktual, cepat, tepat sesuai kebutuhan kekinian dan inovatif yang lakukan secara terus menerus, kekayaan informasi (informasi nyaris tanpa batas), jangkauan wilayah lokal dan global secara instan, pendekatan yang berorientasi kepada para penerima (*customer*), bersifat pribadi (*individual*), dan menghemat biaya, waktu, dan tenaga (Sumardjo, 2012; Adekoya, 2017).
4. Cyber extension juga merupakan tipe khusus dari suatu media informasi yang inovatif. Istilah saluran merupakan sebuah terminologi yang penting untuk pembelajaran inovasi karena memiliki beragam aplikasi yang sangat luas, namun memiliki makna yang sangat spesifik (Sumardjo, 2010; Browding dan Sornes, 2008).

Sistem jaringan komunikasi inovasi pertanian yang perlu dikembangkan dalam strategi pengembangan sistem informasi pertanian berbasis TI di Indonesia (diadaptasi dari Mulyandari 2005) → model yang direplikasi untuk FEATI dan Pusat Layanan Informasi Kecamatan

(Sumardjo et al, 2012)



Mekanisme Pemanfaatan pada tingkat petani

Mekanisme pemanfaatan *cyber extension* adalah dimulai dari informasi teknologi baru yang disadur penyuluh kemudian disebarakan kepada *opinion leaders* dan dilanjutkan kepada petani atau bisa langsung tanpa melalui pemuka pendapat. Sebagaimana model yang diperkenalkan sebagai *two step flow model of communication* (model komunikasi dua tahap) menjelaskan tentang proses pengaruh penyebaran informasi melalui media massa kepada khalayak. Menurut model ini, penyebaran dan pengaruh informasi yang disampaikan melalui media massa kepada khalayaknya tidak terjadi secara langsung (satu tahap), melainkan melalui perantara seperti misalnya “pemuka pendapat” (*opinion leaders*). Dengan demikian, proses pengaruh penyebaran informasi melalui media massa terjadi dalam dua tahap: pertama, informasi mengalir dari media massa ke para pemuka pendapat; kedua, dari pemuka pendapat ke sejumlah orang yang menjadi pengikutnya (Katz dan Lazarfelt, 1955).

Peran Penyuluh dalam Sistem Diseminasi Inovasi Pertanian Berbasis Teknologi Informasi *digital communication*:

1. Mediator bagi petani dalam memanfaatkan informasi inovasi pertanian yang diakses melalui internet
2. Mendampingi petani di bidang aplikasi TI, misalnya mengembangkan situs untuk promosi usaha, komunikasi, dan transaksi bisnis
3. Mengemas dan mengolah kembali informasi yang diakses melalui TI menjadi lebih sederhana sebagai materi penyuluhan yang dilaksanakan langsung maupun bahan siaran radio komunitas
4. Fasilitator dalam proses ujicoba teknologi baru yang diakses petani atau penyuluh melalui teknologi informasi (*download* dari internet maupun DVD).
5. Penghubung petani/kelompok tani dengan *stakeholders* terkait dalam pengembangan jaringan pemasaran dan kegiatan ekonomi lainnya
6. Penghubung petani/kelompok tani dalam menyelesaikan masalah dengan ahli/pakar melalui fasilitasi teknologi informasi

Peran Kelembagaan Penyuluhan dalam Sistem Diseminasi Inovasi Pertanian berbasis TI

1. Mengembangkan program layanan informasi berbasis TI (jejaring sosial dan melalui HP)
2. Mengembangkan situs (sumber informasi *online*)
3. Mengembangkan sumber informasi (layanan perpustakaan dengan menyediakan materi tercetak maupun elektronik bagi pengguna)
4. Menyediakan fasilitas untuk pengelolaan termasuk pengolahan kembali informasi yang diakses dari berbagai sumber sebagai materi penyuluhan berbasis teknologi informasi
5. Pengembangan kapasitas (*capacity building*) bagi para PPL, THL, dan pengurus kelembagaan
6. Penghubung petani/kelembagaan local dengan *stakeholders* terkait dalam pengembangan jaringan pemasaran/kegiatan ekonomi lainnya
7. Penyediaan sarana untuk pengembangan pelatihan bidang teknologi budidaya dan pascapanen
8. Pengembangan *show window* teknologi dan produk unggulan

9. Pemberian *reward* secara profesional bagi PPL dan THL dalam proses diseminasi inovasi pertanian berbasis TI

Peran Kelembagaan Lokal dalam Diseminasi Inovasi Pertanian berbasis TI

1. Menyaring informasi dari berbagai sumber (nasional maupun global) yang dapat diakses melalui internet.
2. Meneruskan informasi yang bermanfaat dan valid kepada anggota kelompok sehingga terhindar dari informasi yang tidak berguna bahkan merugikan
3. Media berbagi informasi dan pengetahuan
4. Media yang dapat membantu petani dalam proses uji coba teknologi yang diakses melalui teknologi informasi
5. Penghubung dengan *stakeholders* terkait
6. Mengelola informasi yang diakses melalui TI untuk dikemas dalam media sederhana yang dapat digunakan sebagai sarana untuk berbagi (misalnya untuk bahan/materi siaran radio komunitas)

KESIMPULAN

1. Tantangan dalam pengembangan sistem diseminasi inovasi pertanian berbasis TI, adalah mewujudkan sinergitas komunikasi dan penyuluhan pembangunan di era komunikasi digital ini. Dibutuhkan penyuluh berperan sebagai: sumber informasi, fasilitator, motivator, dan pendamping kelembagaan lokal dan petani dalam akses informasi dan proses uji coba teknologi baru, dan penghubung dengan *stakeholder* terkait. Kelembagaan penyuluhan berperan sebagai motivator untuk peningkatan kapasitas penyuluh dalam pengelolaan/pemanfaatan informasi berbasis TI.
2. Tantangan lainnya, dibutuhkan kelembagaan lokal berperan sebagai media forum, penyaring informasi, inovator pelaksana uji coba teknologi baru, sumber informasi terdekat, valid, dan mutakhir, serta sebagai penghubung dan pengembang jaringan komunikasi dengan *stakeholders* terkait pemasaran hasil pertanian.

3. Model diseminasi inovasi berbasis TI dengan memanfaatkan penyuluh dan kelembagaan lokal merupakan model ideal dengan beberapa penyempurnaan peran dari masing-masing pelaku diseminasi sesuai dengan lingkungan strategis.
4. Strategi implementasi sistem diseminasi inovasi pertanian berbasis TI dapat dilaksanakan dengan mengoptimalkan kelembagaan formal (penyuluh) bersinergi dengan kelembagaan lokal serta didukung dengan revitalisasi kelembagaan informal di tingkat lokal dengan mewujudkan *one stop shop* untuk pengembangan ekonomi perdesaan yang komprehensif.
5. Masalah/Hambatan Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Berbasis TI yang perlu diantisipasi, antara lain : Paradigma masih cenderung linier dan kurang bersifat konvergensi komunikasi, kesinambungan, kesiapan SDM, petani dan atau pengguna CE lainnya dalam aplikasi TI, aspek Sosial budaya, yaitu kultur berbagi informasi, dan lemahnya aktualisasi *Content CE*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryant, Coralie dan Louis G. White. 1987. Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang. Jakarta : LP3ES.
- Dahama OP, Bhatnagar OP. 1980. Education and Comunication for Development. Oxford & IBH Publishing CO. New Delhi.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan. PT Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta
- Helmy Z, Sumardjo, Purnaningsih N, Tjitropranoto P. 2013. *Cyber extension* in strengthening the extension workers' Readiness in the Regencies of Bekasi and Kuningan, West Java Province. International Journal of Science (IJSBAR) 8 (1): 56-66.
- Helmy, Zahron, Sumardjo, Purnaningsih N, Tjitropranoto P. 2013. Hubungan Kompetensi Penyuluh dengan Karakteristik Pribadi, Persepsi Penyuluh Terhadap Dukungan Kelembagaan dan Persepsi Penyuluh Terhadap Sifat Inovasi Cyber Extension. Jurnal Agro Ekonomi 31 (2): 1-18.
- Jacobs, Garry 2016. Development & Environment: Myths & Realities ([www.worldacademy.org/.../Development & Environment Myths Realities by Garry Jacobs](http://www.worldacademy.org/.../Development%20&Environment%20Myths%20Realities%20by%20Garry%20Jacobs)).

- Maad F, Sumardjo, A Saleh dan Pujianto. 2017. The Autonomous Development Strategies of Micro Finance and Small ntrepreneurs through Corporate Social Responcibility in Bogor District of West Java. *Nternational Journal of Science and Enginering (IJST)* Vol 7 No 1 p 70-76.
- Managanta, AAM, Sumardjo, D Sadono, dan P Tjitropraqnoto (2018), Interdependence of Farmer and inceasing Cocoa Productivity in Central Sulawesi Province, Indonesia. *Journal of Economics and Sustainable Development* vol 9 No 6 p 98-108.
- Mulyandari, RSH, Sumardjo, DP Lubis dan Nurmala, 2010. Implementasi Cyber Extension dalam Komuni in Bogor kasi Inovasi.*
- Mulyandari RSH, Sumardjo, Lubis DP, Pandjaitan NK. 2010. Analisis System Kerja Cyber *Extension* Mendukung Peningkatan Keberdayaan Petani Sayuran. *Jurnal Komunikasi Pembangunan* 8 (2).
- Roger, E. M. (1996). *Diffusion of Innovation*. New York: The Free Press, Collier Macmillan Publishers.
- Saleh K, Sumardjo, AV Hubeis, H Puspitawati. 2017, The Effect of Social Capital in Improving The Capacity of Rural Woman as Emping Melinjo Cottage Industry Actors in Banten Province Republic of Indonesia. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)* Vol 33 No 1 p 300-312
- Sumardjo, Baga, L.M., Mulyandari, R.S.H. 2010. *Cyber extension* Peluang dan Tantangan dalam Revitalisasi Penyuluhan Pertanian. Bogor: IPB Press.
- Sumardjo dan A. Kriswantriyono. (2014). Model Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan Menuju Komunitas Mandiri Nusantara. CARE LPPM IPB. Bogor.
- Sumardjo, Rizal Syarief N., A Kriswantriyono, YP Wulandari. (2015). Model Resolusi Konflik melalui Pendekatan Kedaulatan Pangan & Pemberdayaan Masyarakat Rawan Konflik di Provinsi Papua. Care LPPM IPB. Bogor.
- Sumardjo. 1999. Pergeseran Paradigma Penyuluhan Pertanian menuju Kemandirian Petani. Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor.
- Sumardjo, 2010. Penyuluhan Menuju Pengembangan Kapital Manusia dan Kapital Sosial dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Orasi Ilmiah Guru Besar IPB. 18 September 2010 di IPB Bogor.
- Sumardjo, 2012. Kajian Cyber Extension sebagai Media Pemberdayaan Petani Sayuran dan Hortikulturan, kasus di Ciajur, Jawa Barat. Kerjasama IPB dan Kementerian Pertanian. Bogor.

- Sumardjo, 2012a. Peran Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Keilmuan Sosiologi Dan Penyuluhan Pertanian yang sesuai dengan Kebutuhan Pembangunan. Seminar Nasional Perguruan Tinggi Pertanian di UNPAD. Januari 25-26. Bandung.
- Sumardjo, 2012b. Kelembagaan dan Kompetensi Penyuluh dalam Pemberdayaan Masyarakat. Forum Pertemuan kelembagaan pembangunan di Daerah. April 21. Padang Sumatera Barat.
- Sumardjo, 2014. Falsafah, Prinsip-Prinsip Dan Etika Profesi Dalam Penyuluhan. Sekolah Pascasarjana Ilmu Penyuluhan Pembangunan. IPB. Bogor.
- Sumardjo, 2014. *Social Capital and Social Institution*. Departement of Communication and Community Development Science, Faculty of Human Ecology. Bogor.
- Sumardjo, 2015. Indigenus Knowledge/Technology And Local Wisdom. Departement of Communication and Community Development Science, Faculty of Human Ecology. Bogor.
- Sumardjo, 2016. Kearifan Lokal Alternatif Menuju Modernisasi Dalam Penyuluhan Pembangunan. Makalah Seminar Pembangunan disampaikan dalam Nasional Perhimpunan Ahli konfrensi Penyuluhan dan Penyuluhan Komunikasi Pembangunan di UB Malang, tanggal 30 Agustus 2016.
- Sumardjo, 2014. Falsafah, Prinsip-Prinsip Dan Etika Profesi Dalam Penyuluhan. Sekolah Pascasarjana Ilmu Penyuluhan Pembangunan. IPB. Bogor.
- Sumardjo, 2014. *Social Capital and Social Institution*. Departement of Communication and Community Development Science, Faculty of Human Ecology. Bogor.
- Sumardjo, 2015. Indigenus Knowledge/Technology And Local Wisdom. Departement of Communication and Community Development Science, Faculty of Human Ecology. Bogor.
- Sumardjo, A V Hubeis, A Bintarti, S Sedyaningsih dan Mientarti, 2016. Komunikasi Inovasi. Penerbit UT Press. Jakarta.
- Sumardjo, 2017. Cyber Extension: Masalah Dan Tantangan Dalam Pembangunan Pertanian. Makalah hasil penelitian disampaikan dalam stadium generale di UNS, Solo 23 November 2017.
- Sumardjo 2019 Sinergi Ilmu Komunikasi dan Ilmu Penyuluhan Pembangunan dalam Program Studi Kmunikasi Pembangunan di IPB disampaikan dalam Lokakarya Program Studi Komunikasi Pembangunan di IPB, 22-23 Maret 2019 di Hotel Sahira Bogor.

TRANSFORMASI PENYULUHAN PEMBANGUNAN/PERTANIAN: TANTANGAN MODEL PENDIDIKAN PENYULUHAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Rudi Febriamansyah

Guru Besar Pembangunan Pedesaan, Universitas Andalas

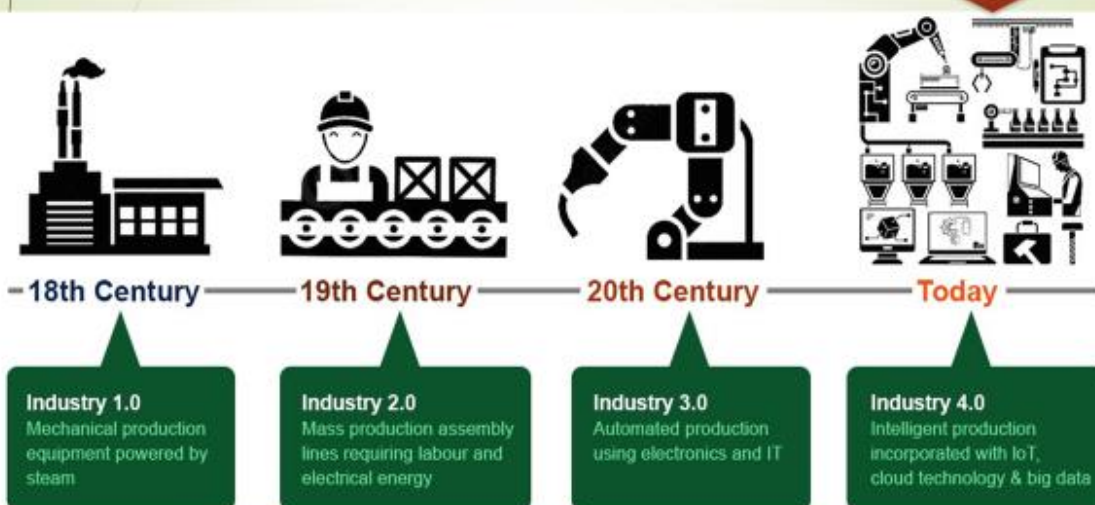
Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas



Disampaikan pada SEMINAR NASIONAL Penyuluhan, Komunikasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Grand Inna Hotel, Padang, 2-3 Mei 2019

Revolusi Industri, dari 1.0 ke 4.0

Digital
disruption



Outline

- ▶ What is Agriculture 4.0 ?
- ▶ Bagaimana keterkaitan antara pertanian digital 4.0 dan pembangunan pertanian berkelanjutan ?
- ▶ Bagaimana penyuluhan pertanian di era pertanian 4.0 ?
- ▶ Bagaimana model Pendidikan penyuluhan pertanian di era pertanian 4.0 ?

APA ITU AGRICULTURE 4.0

Digital Disruption in Agriculture



Source: <https://www.infosys.com/industries/agriculture/overview/>

What is Agriculture 4.0

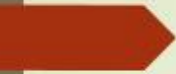
- Secara definitif; Agriculture 4.0 adalah analog dari Industry 4.0
- Dimaknakan sebagai keterpaduan jejaring internal dan eksternal dalam suatu usaha pertanian
- Dimana, seluruh bentuk informasi digital yang ada dimanfaatkan dalam seluruh proses produksi pertanian.
- Komunikasi dengan mitra eksternal seperti penyedia input dan pelanggan produk dilakukan melalui media komunikasi elektronik, transmisi data dan diproses secara otomatis.
- Portal internet digunakan untuk dapat menangani volume data yang sangat besar (big data management) dalam jejaring antara usahatani dengan mitra eksternalnya.

<http://www.cema-agri.org/page/what-agriculture-40>



TRANSFORMASI PERTANIAN

DARI		KE
USAHATANI TRADISIONAL		USAHATANI CERDAS (Smart Farming)
UMKM TRADISIONAL		START UPS (Merintis jenis usaha baru)
Usaha Jasa Tradisional		Usaha Jasa bernilai tinggi (High Values)
Tenaga kerja tidak trampil		Tenaga kerja cerdas dan trampil
Membeli Teknologi		Membuat teknologi



BAGAIMANA KETERKAITAN ANTARA
DIGITAL DISRUPTION DALAM PERTANIAN 4.0
DAN
PERTANIAN BERKELANJUTAN



Transformasi Pembangunan Pertanian

Pertanian Tradisional:

pertanian yang alamiah, baik dari segi teknis, sosial kelembagaan, maupun ekonomi dan ekologi

Pertanian Modern → Green Revolution, revolusi pertanian

teknologi modern dari luar, bisnis dan orientasi komersial – sering berdampak negatif terhadap tatanan sosial budaya dan kelembagaan yang sudah ada.

Pertanian Postmodern → Pembangunan Pertanian Berkelanjutan (*Sustainable Agriculture*) :

- memadukan aspek sosial, ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup
- Memadukan teknik pertanian modern dan pertanian yang alamiah (tradisional)

Pertanian Digital dan Pertanian Berkelanjutan

- ▶ Pertanian digital 4.0 – penerapan teknologi digital (big-data, internet) dalam pertanian
- ▶ Pertanian berkelanjutan – konsepsi ideal pembangunan pertanian merespon perubahan global – kerusakan lingkungan dan ketidakadilan/ketimpangan sosial ekonomi.
- ▶ TANTANGAN KE DEPAN: bagaimana menjadikan perkembangan teknologi digital dalam pertanian untuk mendorong, mendukung tercapainya sasaran pertanian berkelanjutan ("**THE CHANGES THAT TRANSFORM FARMING** will not be brought about by the introduction of revolutionary new technologies alone. ... old-fashioned conservation still has an incredibly important role to play.")

Seperti apa integrasinya

Contoh:

- ▶ Pengamatan terhadap perkembangan hama, atau serangga tertentu, (*pollinators*) yang penting untuk perkembangan pertumbuhan tanaman
- ▶ Biodiversitas yang harus dijaga di lingkungan sekitar produksi pertanian
- ▶ Membutuhkan integrasi banyak pihak dalam suatu wilayah pertanian yang luas – kepentingan terhadap kelembagaan sosial – ekonomi yang kuat.

BAGAIMANA PENYULUHAN PERTANIAN di NEGARA BERKEMBANG di ERA 4.0 ??

Transformasi Penyuluhan Pertanian di Indonesia (in practice)

- 1871 – kebun raya bogor – **plot demonstrasi**
- 1905 – dinas penyuluhan – **metode Olie Vlek**
- 1921-1942 – sekolah pertanian
- 1942-1945 – penjajahan jepang
- 1947 – BPMD (Balai Pendidikan Masy. Desa)
- 1959-1961 – Proyek padi sentra --**Penyuluhan paket**
- 1962 – IPB – BIMAS (melibatkan banyak sektor)
- 1965-1966 – BIMAS INMAS – koperasi
- 1970-1971 – BIMAS – Wilayah Unit Desa (WILUD)
- 1974 – BLPP (Balai latihan, Pendidikan, dan Penyuluhan Pert.)
- 1976/77 – World bank – **metoda LAKU, PPL** – petani – kel tani
- 1986 – BPP, WKBPP – PPL
- 1991 – BPP sbg kantor --- PPL bekerja di tingkat kecamatan
- 1999 – Penyuluhan diserahkan ke Kepala Daerah masing-masing
- **2006 – Sekarang** -- UU NO 16/2006 --SP3K : Sistim Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Definisi Penyuluhan Undang-undang No. 16 Tahun 2006

“Penyuluhan adalah **proses pembelajaran** bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan **dalam mengakses informasi informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya** sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, **pendapatan dan kesejahteraannya** serta meningkatkan kesadaran dalam **pelestarian fungsi lingkungan hidup.**”

Key words:

- Pembelajaran** – bisa bermakna luas; mendidik, mentransfer pengetahuan, mengorganize, memberdayakan orang dan/atau masyarakat/komunitas
- Akses informasi-informasi** – bisa bermakna digital
- Pendapatan, kesejahteraan, lingkungan hidup** – bermakna keberlanjutan (*sustainable*)

↳ **MERESPON** – pertanian 4.0 dan pertanian berkelanjutan

TERAKHIR

BAGAIMANA MODEL PENDIDIKAN PENYULUHAN PERTANIAN
di NEGARA BERKEMBANG
di ERA 4.0

Untuk tercapainya tujuan ideal dari konsepsi penyuluhan berdasar pada UU no.16/2006 tersebut

Transformasi Model Pendidikan

EDUCATION 1.0	LECTURERS AND MEMORIZATION
EDUCATION 2.0	INTERNET-ENABLED LEARNING
EDUCATION 3.0	KNOWLEDGE-PRODUCING EDUCATION
EDUCATION 4.0	INNOVATION-PRODUCING EDUCATION (Pendidikan yang lebih berorientasi kepada pengembangan kapasitas untuk berinovasi)

Sources: Arthur M Harkins, University of Minnesota

Siapa Target Grup pendidikan saat ini?

Generasi Z	Lahir 1999 – sekarang (saat ini, usia di bawah 19)	Pelajar, Mahasiswa S1, calon petani muda
Generasi Y – Gen Milenial	Lahir tahun 1981 – 1998 (saat ini, usia 20 – 30an)	Mahasiswa S1/S2, dosen muda, petani muda/pemula
Generasi X	Lahir tahun 1965 -- 1980	Petani Profesi
Generasi "Baby Boomer"	Lahir tahun 1946 -- 1964	

Source: PEW Research, www.pewsocialtrends.org

Karakter Generasi Milenial (mahasiswa/pemuda)

Technology	tech-savvy, web-savvy, app-friendly generation
Social	Very intensive interaction in social media
Expressive	tend to be tolerant with cultural differences and very concerned about the environment
Unstable	Quickly move from one thought / job to another thought / work



9 elemen kunci dalam Pendidikan 4.0



innovation-producing education

Source: Salmon, G. 2017. Higher Education 1.0 to 3.0; and Fisk, P. 2017. Education 4.0. Cited by Vincent Gaspersz, Lean Six Sigma Master Black Belt and Certified Management System Lead Specialist.

Keterkaitan antara Elemen Kunci Pendidikan 4.0 dan Konsepsi Penyuluhan

- Learning objectives:
 - critical thinking, creative thinking, innovative thinking
 - Individual leadership and teamwork
 - IT competencies
- Learning methods:
 - IoT based
 - Practical vs class session
 - Evaluation vs examination
 - Project/Problem based
- Management of education:
 - IoT based, academic management systems
 - Infrastructure development

Pembelajaran;

- mendidik,
- mentransfer pengetahuan,
- mengorganize,
- memberdayakan orang dan/atau masyarakat/komunitas

Peningkatan Akses informasi-informasi – bisa bermakna digital

Three human literation: SKILLS, CULTURAL AGILITY AND ENTREPRENEURSHIP (including social entrepreneurship)

Berfikir Kritis vs Berfikir Kreatif

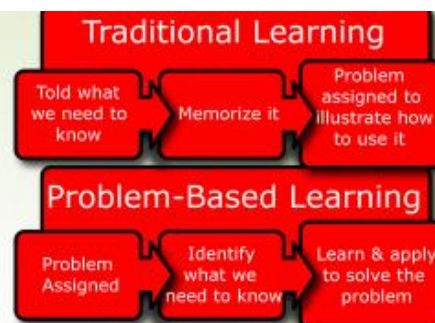
Berfikir kritis	Berfikir kreatif
Interpretasi	Original/baru
Analisa, sintesa	Inisiatif/generatif
probabilitas	possibilitas
Menyimpulkan/judgement	Elaborasi
menjelaskan	Kemungkinan
Mengecek diri sendiri	Tidak umum
Dialog/bertanya	Bertanya, if, why and how
Logis, objektif	"nakal", subjektif
Otak kiri	Otak kanan

Model PBL - Problem Based Learning: sudah dipraktekkan di Jur. sosial ekonomi pertanian

Sesi 1	Pengantar kuliah, penjabaran topik-topik materi kuliah, menjelaskan metoda belajar, penilaian dan ketentuan lainnya, termasuk pembagian kelompok, penjelasan kasus pertama, serta informasi reading materials
Sesi 2	Memahami kasus pemicu pertama, memfasilitasi diskusi dalam kelompok untuk mengidentifikasi keilmuan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dari kasus pemicu tsb, serta membagi tugas antar anggota kelompok untuk belajar mandiri dari berbagai sumber yang dapat diperoleh.
Sesi 3	Memfasilitasi diskusi dalam kelompok, dimana setiap anggota kelompok mempresentasikan (sharing) apa yang sudah dipelajari ke anggota lainnya, serta meminta setiap anggota memberi penilaian. Di akhir sesi, setiap kelompok berdiskusi menemukan jawaban terhadap masalah kasus pemicu, serta membagi tugas antar anggota untuk mempersiapkan bahan presentasi kelompok.
Sesi 4	Presentasi dan diskusi antar kel.; anggota kelompok lain memberi
<i>Elemen kunci: personal dan grup, peers/mentor, kombinasi kritis dan kreatif, multi sources (internet), menantang subjektivitas, lebih bersifat pemberdayaan</i>	

Catatan akhir:

- Di era pertanian 4.0 ini:
- SELAMA PROSES PENDIDIKAN, PESERTA DIDIK HARUS SUDAH MENGALAMI SENDIRI PROSES BELAJAR YANG PARTISIPATIF, BERSIFAT KEMITRAAN, MEMBANGUN KREATIFITAS DAN LAINNYA, DENGAN MEMANFAATKAN DAN MENGEMBANGKAN DIGITAL INFORMASI----
- SEHINGGA...
- DAPAT MENJADI BEKAL UNTUK BEKERJA BERSAMA PETANI, KELOMPOK TANI DAN STAKEHOLDER PEMBANGUNAN PERTANIAN LAINNYA
- UNTUK ITU.....
- DIPERLUKAN KERJASAMA ANTAR PROGRAM STUDI UNTUK BERSAMA MENGEMBANGKAN MODEL BELAJAR YANG LEBIH KREATIF → "STUDENT CENTERED LEARNING", "BLENDED LEARNING"**





CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) IMPLEMENTATION IN PT SEMEN PADANG, INDONESIA

SUSTAINABILITY BUSINESS EXCELLENCE CSR BEST PRACTICE BASED ON ISO 26000

Oleh
Yosviandri, Direktur Utama

Seminar Nasional PKP-PM 2019
Pascasarjana Universitas Andalas

SEMEN INDONESIA GROUP



Yosviandri

Direktur Utama PT Semen Padang

PERSONAL DETAIL

Full Name : Ir. Yosviandri, MM
Place & Date of Birth : Padang, January 30, 1968
Marital Status : Married, 2 children
Address :
Pondok Kopi Blok B-4 No.5 RT 06 RW 09 Kel. Pondok
Kopi Kec. Duren Sawit - Jakarta Timur
Mobile Phone : 08121012585
Email Address :
yosviandri@semenindonesia.com

EDUCATION

- 2018 - Binus Business School - Master Degree
- 1993 - Andalas University - Mechanical Engineering
- 1987 - SMA Negeri 1 Padang
- 1983 - SMP Negeri 1 Padang

ACHIEVEMENTS

(SCHOLARSHIP, COMPETITION, AWARD)

- 2017 - Gas Talk Speaker
- 2016 - Gas Talk Speaker
- 2016 - Fasilitator
- 2016 - Internal Fasilitator
- 2015 - Dharmas Karya Energi dan Sumber Daya Mineral Muda

CAREER HISTORY

- Jan 2018 - Recent : President Director PT Semen Padang
- Feb 2017 - Dec 2017 : President Director PT PGAS Solution
- May 2016 - Jan 2017 : President Director PT PGAS Solution
- 2015 : Regional Head I PT PGAS Solution
- 2014 : General Manager SBU III PT PGAS Solution
- 2013 : Head of the SBU Distribution I Operating Department PT PGAS Solution

TRAINING/WORKSHOP/SEMINAR/

RELEVANT KEY COURSES

- 2013 - Infrastruktur Bisnis Natural GAS
- 2013 - Executive Leadership Forum
- 2011 - Safety and Healthy Environment Day
- 2010 - COP Knowledge Management
- 2010 - Emergency Response Plan
- 2010 - Employee Office Safety
- 2009 - Advance Quality Management Auditing

Outline

- *Company Profile*
- Implementation of CSR inspired by ISO 26000



PT. Semen Padang berdiri sejak tahun 1910 dan terus berkembang mulai dari pabrik Indarung I sampai pabrik Indarung VI, berevolusi menggunakan teknologi sederhana sampai menggunakan teknologi berbasis digital.

Berada dalam Semen Indonesia Grup, PT. Semen Padang menjadi perusahaan semen terkemuka di Indonesia dan menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Barat dengan produknya yang berkualitas tinggi, sesuai dengan **tagline "Semen Padang Jaminan Mutu dan Kekuatan"**

PABRIK IND. VI
Commercial Production Tahun 2017
Kapasitas Produksi
3.000.000 Ton/tahun

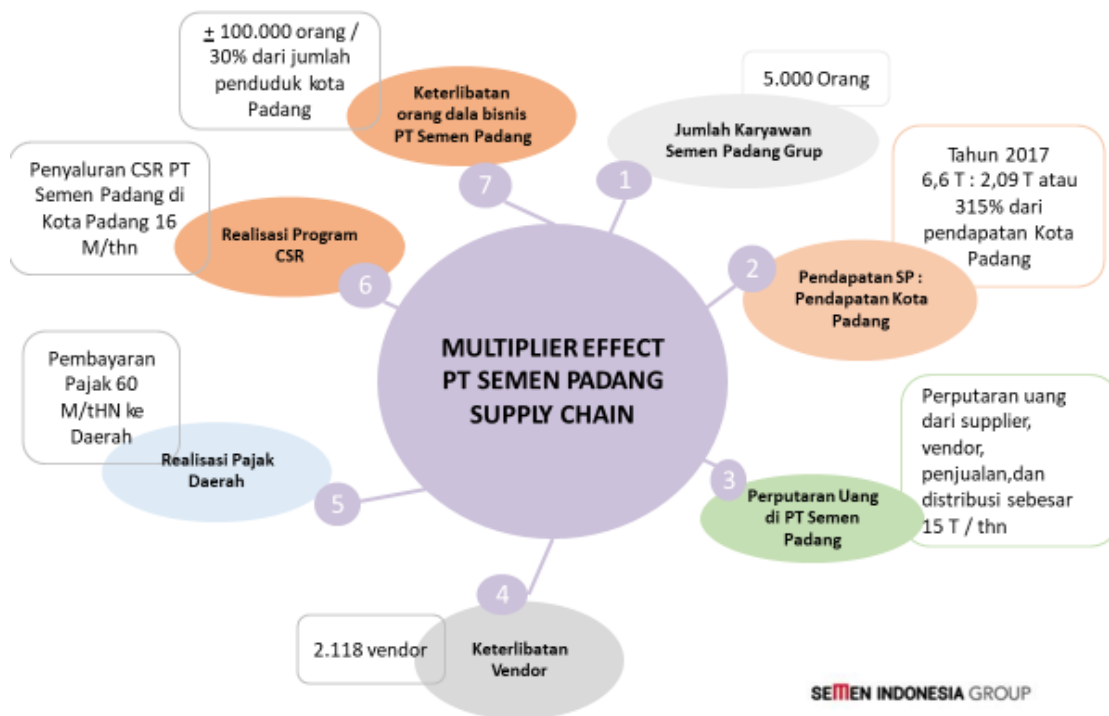


PT Semen Padang

Jaminan Mutu dan Kekuatan



MULTIPLIER EFFECT PT SEMEN PADANG



Outline

- Company Profile
- *Implementation of CSR inspired by ISO 26000*



Alignment Triple Bottom Line, ISO 26000 SR dan Peraturan



Pelaksanaan CSR PT Semen Padang berlandaskan pada *Triple Bottom Line* yang diintegrasikan dengan ISO 26000 SR, serta berdasarkan Peraturan dan Perundangan-undangan yang berlaku.



Integrasi Triple Bottom Line dan ISO 26000 SR

DASAR HUKUM

- UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- UU No. 19 Pasal Tahun 2003
- Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab sosial dan lingkungan PT
- Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2015, PER-02/MBU/07/2017 tentang PKBL BUMN
- Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-07/MBU.S/2008, tentang Pelaksanaan PKBL dan penerapan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Pedoman Teknis CSR PT Semen Padang

"BASINERGI MAMBANGUN NAGARI"

Triple Bottom Line



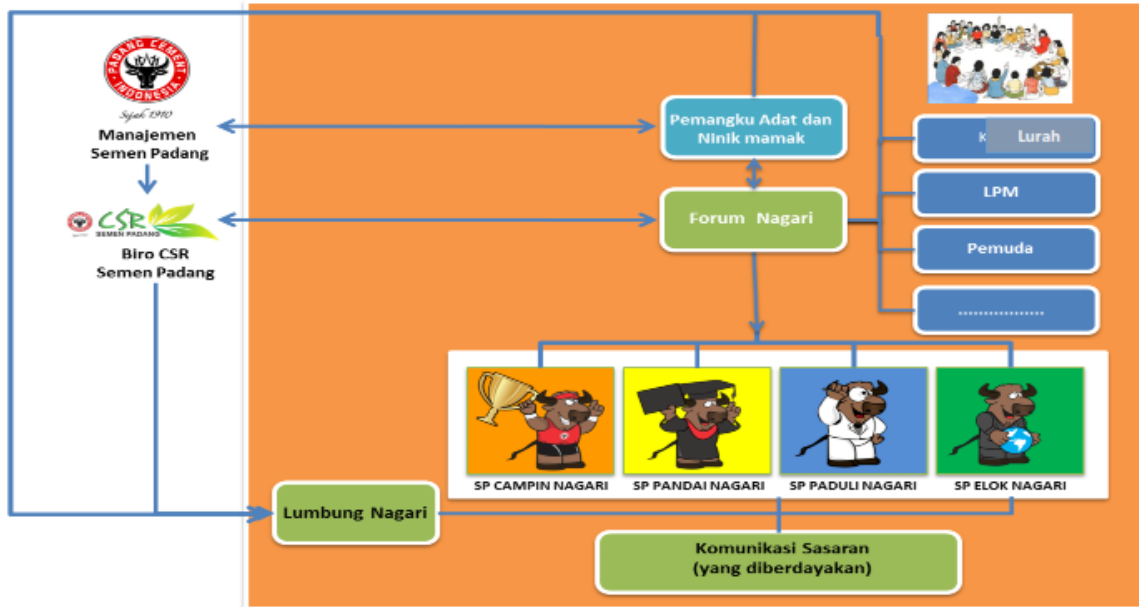
SEMENTEN INDONESIA GROUP

8 KELOMPOK PROGRAM UTAMA



10

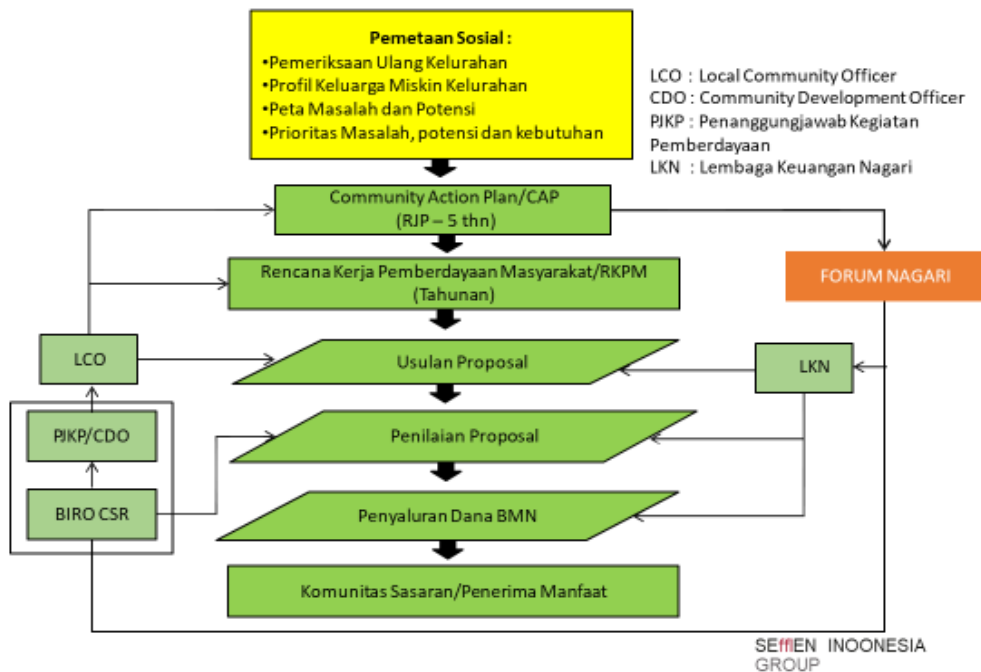
Forum Nagari sebagai Representasi Jembatan Hubungan Perusahaan dengan Masyarakat



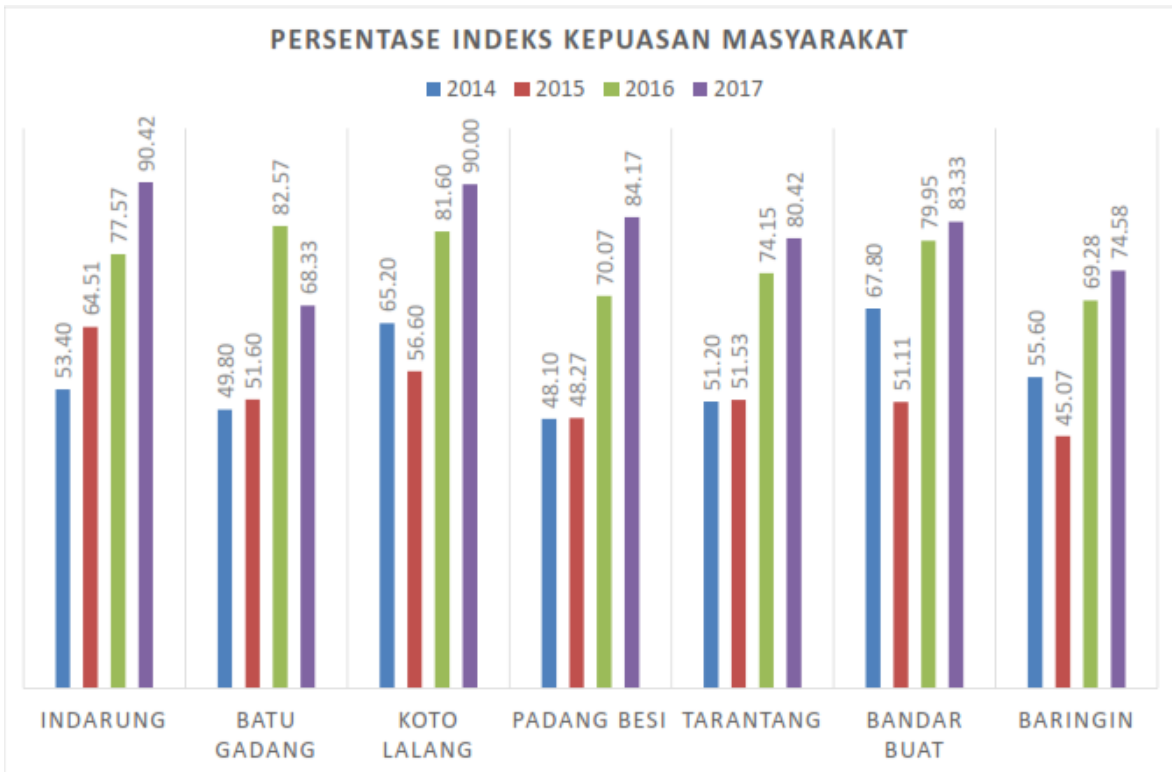
PT Semen Padang menjalin hubungan dengan Masyarakat dengan membentuk forum di tiap kelurahan yang dapat menjadi forum representasi masyarakat

SEMIEN INDONESIA GROUP

Forum Nagari (lanjutan)



SEMIEN INDONESIA GROUP



Awards



Indonesian CSR Award (2017)
Corporate Forum for Community Development (CFCD)



TOP CSR (2018)
Majalah Top Business



Padmamitra Award (2018)
Kementerian Sosial RI



SEMENTEN INDONESIA GROUP



Terima Kasih
www.semenpadang.co.id

SEMINAR NASIONAL
PENYULUHAN, KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TOPIK PENYULUHAN PEMBANGUNAN

Daftar Halaman

No.	Judul & Peserta	Halaman
1.	PENYULUHAN PERTANIAN: KINI DAN MASA DEPAN DI ERA DIGITAL <i>Sunarru Samsi Hariadi</i>	75 - 82
2.	TINGKAT KEMAMPUAN KELOMPOK TANI DALAM PENERAPAN METODE JAJAR LEGOWO PADA USAHATANI PADI SAWAH (<i>ORYZA SATIVA L.</i>) STUDI KASUS DI DESA TUAK KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER <i>Dina Lesmana</i>	83 - 93
3.	INTRODUKSI TEKNOLOGI UNTUK PETERNAKAN ITIK TRADISIONAL <i>Femi Hadidjah</i>	94 - 99
4.	PEMANFAATAN MEDIA MASSA OLEH PENYULUH DALAM KEGIATAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KOTA PADANG <i>Zulvera</i>	100 - 108
5.	POTENSI STRATEGIS PENYULUH SWADAYA DALAM PENYULUHAN PERTANIAN PADA PETANI KOPI DI WILAYAH AMSTIRDAM KABUPATEN MALANG <i>Andi Warnaen</i>	109 - 119
6.	PERENCANAAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN UNTUK MENGOPTIMALKAN KUALITAS PETANI TEMPATAN DALAM MENGELOLA LAHAN SAWAH BARU DI KABUPATEN LINGGA <i>Muhamad Reza</i>	120 - 131

Sambungan Daftar Halaman

No.	Judul & Peserta	Halaman
7.	PERAN PENYULUH DALAM PENGEMBANGAN ENERGI SOSIAL BUDAYA KREATIF DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR HUTAN LINDUNG <i>Adi Firmansyah</i>	132 - 143
8.	HUBUNGAN KARAKTERISTIK PETANI DAN KARAKTERISTIK INOVASI PADI SALIBU TERHADAP KEBERLANJUTAN PENERAPAN TEKNOLOGI PADI SALIBU DI KECAMATAN LIMA KAUM KABUPATEN TANAH DATAR <i>Sri Wahyuni</i>	144 - 155
9.	PENYULUHAN PEMANFAATAN ASAP CAIR KULIT KAKAO SEBAGAI PESTISIDA ALAMI PADA TANAMAN KAKAO DI KELOMPOK TANI AULIA NATURAL DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN <i>I Ketut Budaraga</i>	156 - 167
10.	PERAN KELEMBAGAAN DAN ATRIBUT INOVASI PADA ADOPTI TEKNOLOGI PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU PADI SAWAH DI KABUPATEN BANDUNG BARAT DAN SUMEDANG <i>Lukman Effendy</i>	168 - 189
11.	STRATEGI PENYULUHAN DALAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KELAPA SAWIT RAKYAT DI KAB. DHARMASRAYA <i>Yulistriani</i>	190 - 197
12.	PERAN PENYULUH DALAM MEMFASILITASI PENERAPAN BUDIDAYA PADI ORGANIK DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN <i>Zulhafandi</i>	198 - 208
13.	ANALISIS DINAMIKA KELOMPOK PADA KELOMPOK TANI DI KELURAHAN LIMAU MANIS KECAMATAN PAUH KOTA PADANG <i>Ahmad Fachri</i>	209 - 225

PENYULUHAN PERTANIAN: KINI DAN MASA DEPAN DI ERA DIGITAL

Sunarru Samsi Hariadi^{1,2*}

¹ FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

² Gurubesar Fak Pertanian/ Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

*Email: sunarru_sh@yahoo.com

ABSTRAK

Sampai dengan saat ini tahun 2019 jumlah Penyuluh Pertanian Pusat dan Daerah yang terdiri dari PNS 31.511 (termasuk pengangkatan CPNS tahun 2017 sebanyak 6.033 orang), dan jumlah THL-TBPP sebanyak 12.548 orang. Dengan demikian jumlah Penyuluh Pertanian secara keseluruhan sebanyak 44.059 orang. Apabila secara ideal bahwa satu desa dibina oleh 1 orang Penyuluh Pertanian, maka Indonesia yang berjumlah ada 83.447 desa, masih ada kekurangan Penyuluh Pertanian sebanyak 39.388 orang, yang artinya baru terpenuhi sekitar 50% lebih. Untuk mengatasi kekurangan tenaga Penyuluh Pertanian tersebut, pemerintah mengembangkan Penyuluh-penyuluh Swadaya yang merupakan para petani andalan di desanya masing masing, para Penyuluh Swadaya ini mengorganisasi Posluhdes (Pos Penyuluhan Desa) yang pada umumnya merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani yang ada di suatu desa. Di era revolusi industri 4.0 (memasuki era digital) ini, sudah nampak terjadi transformasi model penyuluhan pertanian dari yang umumnya *face- to face communication* ke arah penyuluhan melalui media digital seperti Instagram, What Apss, Face Book, dsb. Strategi penyuluhan pertanian masa depan merupakan penyuluhan era digital, yang banyak menggunakan android dan sejenisnya. Sementara itu, usaha pertanian juga mengarah ke sistem komputer yang lebih efisien, namun memang dampak negatifnya adalah menggeser tenaga kerja pertanian. Dalam teori *social change* ada “*twin effect*” (dampak positif dan negatif perubahan teknologi), ini yang perlu diperhatikan. Ke depan, penyuluhan tidak perlu harus bertatap muka antara penyuluh dengan petani, melainkan dengan media online seperti Instagram, FB, WhatApps, Twitter dan lain sebagainya, Posluhdes di tingkat desa yang dibina Penyuluh Swadaya bisa menjadi *Center of Extension*. Di masa depan, yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan ilmu penyuluhan pertanian dan praktis, adalah: kurikulum dan materi kuliah penyuluhan yang sesuai dengan revolusi industri 4.0 yang menyebabkan “*twin effect*”, adanya realitas dampak negatif sosial ekonomi dan budaya masyarakat di era revolusi industri 4.0.

Kata kunci: “*twin effect*” era revolusi industri 4.0, kurikulum/ materi kuliah penyuluhan, *center of extension*

PENDAHULUAN

Sampai dengan saat ini tahun 2019 jumlah Penyuluh Pertanian Pusat dan Daerah yang terdiri dari PNS 31.511 (termasuk pengangkatan CPNS tahun 2017 sebanyak 6.033 orang), dan jumlah THL-TBPP sebanyak 12.548 orang. Dengan demikian jumlah Penyuluh Pertanian secara keseluruhan sebanyak 44.059 orang. Apabila secara ideal bahwa satu desa dibina oleh 1 orang Penyuluh Pertanian, maka Indonesia yang berjumlah ada 83.447 desa, masih ada kekurangan Penyuluh Pertanian sebanyak 39.388 orang, yang artinya baru terpenuhi sekitar 50% lebih (Anonim. 2019a).

Untuk mengatasi kekurangan tenaga Penyuluh Pertanian tersebut, pemerintah mengembangkan Penyuluh-penyuluh Swadaya yang merupakan para petani andalan di desanya masing masing, para Penyuluh Swadaya ini mengorganisasi Posluhdes (Pos Penyuluhan Desa) yang pada umumnya merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani yang ada di suatu desa.

Sementara itu, saat ini sudah masuk revolusi industri 4.0 yang merupakan akumulasi dari perkembangan revolusi industri 1.0, 2.0, dan 3.0, yang diawali penemuan mesin uap, kemudian listrik, alat komunikasi, bahan kimia dan minyak, kemudian komputer, internet, telepon genggam, kemudian otomisasi proses produksi dalam kegiatan industri. Dengan demikian, terjadilah proses usaha pertanian dan penyuluhan pertanian searah dengan hadirnya era digital di revolusi industri 4.0. Namun yang menjadi problem adalah dampak negatif yang mungkin terjadi, dalam teori *social change* (Vago. 1989) menjelaskan bahwa setiap teknologi baru memiliki “*twin effect*” , yakni efek positif dan efek negatif.

TRANSFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN

Dewasa ini berada pada masa transisi dalam metode penyuluhan pertanian, transformasi dari penyuluhan model face to face communication dimana penyuluh biasanya memberikan penyuluhan kepada kelompok kelompok tani secara tatap muka, bergeser ke model penyuluhan yang lebih banyak menggunakan media digital. Penyuluhan menggunakan media digital mengurangi terjadinya *face to face communication*, melainkan lebih banyak menggunakan sarana Android/ Hand Phone.

Di era digital ini, terus terjadi transformasi model penyuluhan pertanian dari yang umumnya face- to face communication ke arah penyuluhan melalui media digital seperti Instagram, What Apss, Face Book, dsb. Penyuluhan melalui face to face communication yang biasa dilakukan dalam pertemuan antara Penyuluh dengan Kelompok Tani, memang lebih efektif dikarenakan terjadinya dialogis secara langsung , terjadi proses pembelajaran antara keduanya yakni Penyuluh Pertanian dan Petani. Dalam proses dialogis tersebut, petani belajar pada Penyuluh namun sebaliknya bahwa Penyuluh pun sebenarnya juga belajar pada petani. Hal ini terlihat ketika petani mempertanyakan problema pertanian pada Penyuluh, maka mau tak mau Penyuluh juga harus berusaha menjawab problema petani, dan ketika saat beremu tatap muka dan Penyuluh belum mampu menjawab problema petani tersebut, maka ia harus belajar dan mencari jawaban nya, kadangkala petanipun sudah memperoleh jawaban dari problema tersebut berdasar pengalamannya yang kemudian disampaikan kepada penyuluh, disini terjadilah proses belajar dimana Penyuluh juga belajar pada petani.

Era digital memungkinkan petani tidak harus bertatap muka dengan Penyuluh Pertanian, juga tidak memungkinkan terjadinya dialogis yang intensif, memang bisa terjadi dialog namun tidak se intensif ketika bertatap muka. Terlebih lagi, bila pesan penyuluhan disampaikan lewat media sosial dengan menggunakan *short message*, kemungkinan terjadi *mis perception* cukup besar, ditambah lagi dengan tingkat pendidikan petani yang masih rendah. Oleh karena itu, di era digital yang memungkinkan penyuluhan lewat media sosial ataupun media baru perlu dilakukan kajian untuk keberhasilan penyuluhan pertanian, sejauh mana efektifitas penyuluha pertanian.

Kekurangan Penyuluh Pertanian sebagai tenaga pembangunan pertanian, dan solusi menggunakan tenaga Penyuluh Swadaya merupakan kebijakan yang tidak bisa dipungkiri. Namun demikian, ketrampilan para Penyuluh Swadaya dan juga Penyuluh Negeri memang harus dibekali pengetahuan dan ketrampilan penyuluhan pertanian, terlebih lagi ketrampilan penggunaan media penyuluhan yang mulai bergeser dengan menggunakan model digital.

Kondisi penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten dan provinsi saat ini jauh berbeda dengan kondisi pada satu dekade terakhir. Ketika masih berjalannya UU SP3K tahun 2006, kelembagaan cukup rapi dan terkesan saling sinergi satu lembaga dengan

lembaga lainnya. Di tingkat provinsi ada Bakorluh yang merupakan lembaga bertugas mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan pertanian, kemudian di tingkat kabupaten ada Bapelluh atau Badan Pelaksana Penyuluhan yang merupakan lembaga yang bertugas meng eksekusi kegiatan penyuluhan sesuai dengan program penyuluhan pertanian, di level bawahnya yakni kecamatan ada BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) yang merupakan *Center of Extension*, yang sekarang ini sudah sangat berubah dan variatif fungsi dan perannya.

PENYULUHAN PERTANIAN ERA DIGITAL

Di era revolusi industri 4.0 ini, pengembangan pertanian dengan menggunakan konsep pertanian cerdas (*smart farming*), konsep ini merujuk pada diterapkannya TIK pada bidang pertanian. Tujuan yang utama dalam penerapan teknologi ini tentu saja untuk mengoptimalkan peningkatan hasil serta efisiensi penggunaan sumberdaya.

Di Era digital, era revolusi industri 4.0 tentu akan dibanjiri peralatan pertanian yang menggunakan basis kinerja digital, seperti mesin pengolah tanah, mesin penanam bibit, mesin pemanen padi, mesin pengendali hama dan sebagainya. Menurut Menteri Pertanian (Anonim. 2019b dlm Bisnis Tempo 2019), Saat ini pertanian sudah memasuki era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan penggunaan mesin-mesin otomatis yang terintegrasi dengan jaringan internet. Melalui implementasi revolusi industri 4.0 di sektor pertanian diharapkan proses usaha tani menjadi lebih efisien, terjadi peningkatan produktivitas dan daya saing. Dengan inovasi teknologi, ongkos bertani bisa dipangkas hingga separuhnya, dahulu biaya menanam padi saja sampai Rp 2 juta per hektar, sekarang hanya perlu Rp 1 juta per hektar. Di Balai Besar Mekanisasi Serpong, pada Jumat 28 Sept 2018 juga dipamerkan teknologi pertanian modern seperti misalnya *Autonomous Tractor*, yakni traktor pengolah tanah otomatis tanpa pengemudi dan cukup dioperasikan lewat laptop. Ada juga *Drone* deteksi unsur hara dengan remote control, Jajar legowo Rifding Transplanter yakni mesin penanam padi, dan Boom Sprayer yakni alat penyiram air atau pembasmi hama yang bisa mengubah menjadi bentuk spray. Yang mungkin menjadi pertanyaan kita semua, dan juga bagaimana solusinya, karena pasti ada dampak negatif perkembangan teknologi yakni *pergeseran* atau *tersingkirnya* tenaga kerja atau buruh-buruh tani di pedesaan.

Beberapa kendala dalam penerapan revolusi industri 4.0 di Indonesia (Anonim. 2019) antara lain:

1. Sumberdaya manusia

Secara umum, sebagian besar petani berusia lebih dari 40 tahun, dan lebih dari 70% petani hanya berpendidikan setara SD dan bahkan dibawahnya. Pendidikan petani yang rendah tersebut menjadi kendala ketika akan diterapkannya inovasi baru dan digunakannya teknologi digital untuk kegiatan usaha tani dan untuk diseminasi informasi.

2. Keadaan Lahan Pertanian Indonesia

Pada umumnya luas pemilikan lahan pertanian sempit- sempit, hal ini cukup menyulitkan ketika akan menggunakan teknologi mekanik dan bahkan teknologi digital dengan memanfaatkan *remote control* untuk pengoperasian mesin- mesin pertanian seperti traktor.

3. Teknologi modern belum sepenuhnya diterima masyarakat

Masyarakat umum masih menyukai teknologi tradisional dibandingkan dengan teknologi modern, para petani masih lebih suka menggunakan peralatan tradisional dibanding dengan teknologi canggih. Terlebih lagi, kemungkinan adanya dampak negatif dari penggunaan teknologi modern, seperti misalnya tergesernya tenaga kerja buruh di sektor pertanian. Sementara itu, sektor industri belum mampu menampung jika terjadi luapan tenaga kerja pertanian karena dampak negatif mekanisasi pertanian.

Strategi penyuluhan pertanian masa depan merupakan penyuluhan era digital, yang banyak menggunakan android dan sejenisnya. Penyuluhan tidak perlu harus bertatap muka antara penyuluh dengan petani, melainkan dengan media online seperti Instagram, FB, WhatApps, Twitter dan lain sebagainya. Namun demikian yang masih menjadi masalah; sejauh mana Penyuluh Pertanian mampu dan terampil menggunakan media online ?. Demikian juga, sejauhmana petani mampu dan terampil menggunakan media online ?.

Model penyuluhan pertanian menggunakan digital bisa menjangkau jarak jauh bahkan tidak terbatas, namun informasi yang diberikan lewat digital sangat terbatas, bahkan mungkin bisa menyebabkan terjadinya *mis communication* ataupun salah persepsi, dengan demikian penyuluhan menjadi tidak efektif karena tidak mampu memberikan penjelasan secara tuntas meskipun jangkauannya cukup luas.

Penting diingat bagi penyuluh-penyuluh yang memberikan penyuluhan lewat digital, bahwa metode penyuluhan lewat digital memerlukan ke hati hatian yang ekstra, demikian pula bila lewat film/ video misalnya youtube.

Era Digital: Pemuda sebagai *Agent of Change*

Hasil penelitian Ajeng (2019) di DI. Yogyakarta menunjukkan bahwa kaum muda yang sering disebut sebagai kaum milenial, banyak yang menggunakan media baru seperti FB, Instagram, Twitter, dan sejenisnya untuk pemberdayaan. Media tersebut digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, disini kaum muda secara kreatif menyebarkan atau mendeseminasikan inovasi di bidang pertanian, penjualan produk, lingkungan, kesehatan, dst menggunakan media FB, Instagram, Twitter, dsb. Kaum muda yang tertarik kemudian membentuk kelompok atau group yang selalu bertukar pikiran tentang inovasi melalui media tersebut. Memang, hal ini masih didominasi oleh kaum muda yang gemar menggunakan HP/ Android sebagai media komunikasi, hal ini belum berkembang di kalangan kaum “tua”. Bisa dimaklumi bahwa kaum “tua” agak kesulitan dalam memanfaatkan media sosial ini, baik dalam menulis, memposting, mengunduh, dsb. Dengan demikian, bisa dibayangkan, bisa terjadi pada masa depan justru “kaum muda” saat ini yang menjadi *agent of change* di bidang pertanian. Hal ini sudah mulai bisa dilihatn ketika seminar di Ungaran bulan desember 2018 yang lalu, ada 3 pemuda yang berhasil dalam usaha di bidang pertanian, satu pemuda sukses usaha hortikultura di kawasan Salatiga, satu pemuda lagi juga sukses usaha horrtikultura di kawasan Magelang, dan seorang pemuda lagi yang sukses dalam usaha gula kelapa di daerah Banyumas, mereka memperoleh penghasilan kalau dihitug hitung bisa lebih dari 20 juta an per bulan. Survei Pertanian Antar Sensus (Sutas) tahun 2018 BPS menunjukkan bahwa baru 13,44 % (4.501 orang) petani yang menggunakan internet, dan ada 86,56 % (28.986.391 orang) yang tidak menggunakan intenet.

Era Digital: Penyuluhan Dengan Media Digital

Kondisi penyuluhan di masa depan, apabila tidak ada reformasi di bidang kelembagaan penyuluhan, artinya penyuluhan tetap menggunakan lembaga- lembaga pertanian yang ada seperti saat ini, di tingkat Provinsi ada Dinas Pertanian Provinsi, di tingkat kabupaten ada Dinas Pertanian Kabupaten, di tingkat kecamatan ada BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) bila masih eksis, di tingkat Desa ada Posluhtan (Pos Penyuluhan Pertanian) yang dibina biasanya oleh Penyuluh Swadaya. Maka lembaga Posluhtan inilah, yang kemudian nanti perlu di berdayakan sebagai *Center Of Extension* dengan pimpinan seorang Penyuluh sawadaya.

Sumber inovasi bisa dari Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian kabupaten, Lembaga Penelitian seperti BPPT di tingkat Provinsi, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dsb. Inovasi disebarakan melalui media digital dan diterima oleh pimpinan Posluhtan, semua anggota kelompok Posluhtan ini bisa menerima materi pemberdayaan melalui media sosial. Fungsi kelompok disini adalah, media belajar bersama yakni belajar dari inovasi yang diberikan oleh sumber inovasi kepada Penyuluhan Swadaya. Disamping itu, kelompok posluhtan bisa juga menjadi ajang kerjasama pemasaran, pembelian saprotan, dsb. Kelompok Posluhtan bisa juga menjadi ajang berproduksi, memproduksi usaha tani, memproduksi bahan mentah pertanian menjadi bahan jadi yang praktis untuk dipasarkan.

PENUTUP

Perkembangan teknologi tentu tidak bisa dihindari, memasuki era digital revolusi industri 4.0 menjadi peluang dan tantangan bagi dunia pertanian dan penyuluhan pertanian Ke depan, perlu terus dipantau dan diperhatikan, bagaimana dampak dari revolusi industri 4.0 di bidang pertanian, mengingat secara teoritis setiap perkembangan teknologi akan ditemui "*twin effect*". Bagaimana efek negatif dari perkembangan teknologi, apakah di masyarakat akan terjadi *polarisasi* ataukah *stratifikasi* seperti yang banyak diperdebatkan pada tahun 1980 an ketika berkembang mekanisasi di bidang pertanian.

REFERENSI

Anonim 2019a. Presiden: Pengangkatan Penyuluh Pertanian Menjadi PNS Bertahap.

[https://kata](https://kata.data.co.id/berita/2019) data.co.id/berita/2019

Anonim 2019b. Bisnis Tempo: Revolusi Industri 4.0 di Sektor Pertanian.

<https://www.warta>

ekonomi.co.id

Ajeng, Diah. 2019. Unsur-unsur Pemberdayaan Masyarakat... Sekolah Pascasarjana UGM.

Yogyakarta.

Vago, Steven. 1989. Social Change. Prentice Hall, Englewood Cliffs. New Jersey.

TINGKAT KEMAMPUAN KELOMPOK TANI DALAM PENERAPAN METODE JAJAR LEGOWO PADA USAHATANI PADI SAWAH (*ORYZA SATIVA L.*) STUDI KASUS DI DESA TUAK KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER

Dina Lesmana^{1*}, Ernawati¹, Suandi¹

¹ Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi tingkat kemampuan kelompok tani dalam penerapan metode jajar legowo pada usahatani Padi Sawah, mengetahui sejauh mana efektifitas komunikasi dalam kelompok tani serta bagaimana hubungan tingkat kemampuan kelompok tani dengan efektifitas komunikasinya sebagai wadah untuk peningkatan produksi, produktivitas dan kapasitas kelompok tani. Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan dimulai dari bulan September sampai bulan Desember 2017, dengan lokasi penelitian di Desa Sungai Tuak Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser. Sejumlah 75 orang petani dari 243 orang yang diambil sebagai sampel secara purposive pada tiga jenis kelas kelompok tani (pemula, lanjut dan madya). Data dianalisis menggunakan korelasi Rank Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemampuan kelompok tani masih pada kategori rendah (untuk kelas Pemula), sedangkan untuk kelas Lanjut dan Madya ada pada kategori tinggi. Efektifitas komunikasi yang juga pada kategori kurang efektif pada kelas kelompok tani Pemula dan lanjut, sedangkan untuk Madya ada pada kategori efektif. Tingkat Penerapan metode jajar legowo pada kelas pemula masih ada pada kategori kurang menerapkan, sedang pada kelas lanjut dan madya sudah pada kategori menerapkan dengan baik sesuai anjuran. Korelasi Rank Spearman yang menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan yang nyata antara tingkat kemampuan kelompok dengan tingkat penerapan jajar legowo, hal ini berarti semakin tinggi tingkat kemampuan kelompok maka semakin tinggi pula tingkat penerapan jajar legowo dalam kelompok.

Kata kunci: Tingkat Kemampuan kelompok tani, efektivitas komunikasi, kelas kelompok

PENDAHULUAN

Kegiatan penyuluhan dalam pembangunan pertanian berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara praktek yang dijalankan oleh petani dengan pengetahuan dan teknologi petani yang selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan para petani. Salah satu tugas dan fungsi Penyuluhan Pertanian adalah berupaya untuk menumbuhkan dan

pengembangan kemampuan, kemandirian serta tanggung jawab dari petani beserta keluarganya dalam memanfaatkan dan meningkatkan mutu sumber daya pertanian didalam usahataniya dan memfasilitasi, mengupayakan kemudahan akses dalam meningkatkan kemampuan petani. Kegiatan penyuluhan pertanian sebagai proses belajar para petani melalui pendekatan kelompok diarahkan untuk terwujudnya kemampuan kerjasama yang lebih efektif (baik antara anggota kelompok maupun antar kelompok) sehingga mampu menerapkan inovasi, mengatasi sebagai resiko usaha, menerapkan asas skala usaha yang ekonomis untuk memperoleh pendapatan yang layak.

Kegiatan penyuluhan melalui pendekatan kelompok untuk mendorong terbentuknya kelembagaan petani yang mampu membangun sinergitas antar petani dan antar kelompok tani dalam upaya mencapai efisiensi usaha agar terwujudnya kelompok tani yang mandiri. Pengembangan Kelompok Tani diarahkan pada (a) penguatan kelompok tani menjadi Kelembagaan Petani yang kuat dan mandiri,(b) peningkatan kemampuan anggota dalam pengembangan agribisnis; dan (c) peningkatan kemampuan kelompok tani dalam menjalankan fungsinya. (Permentan No. 82/2013).

Kabupaten Paser mempunyai 158 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan memiliki 1.005 kelompok tani (BKPP Kabupaten Paser, 2016). Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah tenaga penyuluh di Kabupaten Paser belum memenuhi persyaratan satu desa satu penyuluh sesuai dengan kebijakan Departemen Pertanian sehingga dimungkinkan kinerja penyuluh relatif belum optimal.

Kabupaten Paser memiliki 7 BPP yang terdiri dari 10 kecamatan yaitu, Kecamatan Batu Engau, Kecamatan Batu Sopang, Kecamatan Kuaro, Kecamatan Long Ikis, Kecamatan Long Kali, Kecamatan Muara Komam, Kecamatan Muara Samu, Kecamatan Pasir Belengkong, Kecamatan Tanah Grogot, dan Kecamatan Tanjung Harapan, yang terdiri dari 118 desa. Kecamatan Tanah Grogot memiliki luas wilayah paling kecil di bandingkan kecamatan yang lainnya hanya mencapai 335.38 km². BPP Kecamatan Tanah Grogot saat ini memiliki 19 Penyuluh dan memiliki 12 desa binaan salah satunya adalah Desa Sungai Tuak. Di Kecamatan Tanah Grogot penyuluh ditempatkan satu desa satu penyuluh dan penyuluh-penyuluh ini ditempatkan di 12 desa yang aktif dibidang pertanian, peternakan dan perikanan (BP3K Tanah Grogot, 2016). Desa Sungai Tuak memiliki 10 kelompok tani dengan tingkat kelas yang berbeda-beda yaitu terdapat 1 kelompok tani

kelas pemula, 8 kelompok tani kelas lanjut, dan 1 kelompok tani kelas madya dan terdiri dari satu Gapoktan. Aktif tidaknya kelompok tani sangat ditentukan oleh peran penyuluhnya dalam membina dan tingkat kemampuan kelompok dalam melaksanakan penerapan dari petunjuk teknis yang dianjurkan oleh penyuluh. Dalam hal ini tergantung pada efektivitas komunikasi yang dijalin antara kelompok tani dengan penyuluh.

Desa Sungai Tuak sejak tahun 2010 sudah menerapkan sistem tanam jajar legowo. Desa Sungai Tuak merupakan juga daerah pertanian yang sangat cocok untuk budidaya padi sawah. Dalam meningkatkan produksi padi sawah di desa tersebut masih ada beberapa kendala dalam budidaya padi sawah, sehingga produktivitas padi baru mencapai 4,72 ton per hektar. Salah satu permasalahan yang dihadapi petani adalah belum efektifnya penerapan metode dan teknik sistem tanam jajar legowo. Hal ini dirasakan belum efektif karena jalinan komunikasi petani dengan penyuluh masih kurang, selama ini komunikasi cukup intensif jika terkait dengan beberapa bantuan yang ditujukan pada kelompok tani. Untuk memberikan pemahaman yang baik dan penerapan yang sesuai dengan anjuran metode tanam jajar legowo maka komunikasi yang intensif dan efektif sangat diperlukan guna meningkatkan kepaahaman dan kemampuan kelompok tani. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kemampuan kelompok tani sesuai dengan kelas kelompoknya. Suatu kelompok dikatakan efektif apabila kelompok tersebut mampu menjalankan fungsinya sebagai wadah informasi dan wadah dalam meningkatkan kemampuan anggota kelompok tani dalam merencanakan kegiatan guna meningkatkan produksi usahataniya melalui penerapan metode tanam jajar legowo.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan/metode deskriptif, analitik dan korelasional (Nazir, 2005). Untuk pelaksanaan penelitian dilaksanakan secara purposive method yang berlokasi di Desa Sungai Tuak Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, kuisioner, dan studi pustaka.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Tingkat kemampuan Kelompok tani yang diukur dengan menggunakan 3 indikator

penilaian kelompok tani berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 82 /Permentan/ OT.140 /8/2013 Tentang Pedoman Pembimbingan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani, pengembangan dan pemeliharaan kelompok tani. Deskripsi data untuk kemampuan kelompok tani dalam penerapan sistem tanam jajar legowo dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data pada masing masing kelas kelompok tani yang ada di lokasi penelitian ke dalam 2 kategori yakni rendah dan tinggi. Katagori efektifitas komunikasi adalah kurang efektif dan efektif. Kategori untuk penerapan sistem tanam jajar legowo adalah kurang diterapkan dan diterapkan. Selanjutnya untuk mengetahui hubungan antara tingkat kemampuan kelompok tani dengan efektifitas komunikasi dan tingkat kemampuan kelompok dalam penerapan sistem tanam jajar legowo digunakan analisis korelasi Rank Spearman (Siegel,1997).

Tabel 1. Indikator untuk mengukur variabel yang diteliti

Variabel	Indikator	Skor Min	Skor Max
Tingkat Kemampuan Kelompok Tani Kategori kemampuan : Rendah (756 – 1.136) Tinggi (1.137 – 1.516)	1. Penguatan kelompok tani menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri.	216	436
	2. Peningkatan kemampuan anggota dalam pengembangan penerapan sistem jajar legowo untuk meningkatkan produktitas padi	180	360
	3. Peningkatan kemampuan anggota dalam menjalankan tugas dan fungsinya	360	720
	Total Skor	756	1.516
Efektifitas Komunikasi dlm kelompok Kategori : Kurang efektif (936-1.872) Efektif (1.873 – 2.808)	1. Teknik komunikasi	252	756
	2. Frekuensi komunikasi dgn penyuluh	288	864
	3. Media komunikasi	216	648
	4. Materi komunikasi	180	540
Total Skor	936	2.808	
Penerapan sistem Tanam Jajar Legowo Kategori Kurang diterapkan : (1.102 – 2.204) Diterapkan : (2.205 – 3.306)	1. Pengolahan tanah	190	570
	2. Persiapan benih	152	456
	3. Pengaturan jarak tanam jajar legowo	190	570
	4. Pemupukan	190	570
	5. Pengairan	190	570
	6. Pengendalian OPT	190	570
Total Skor	1.102	3.306	

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Rata-rata umur anggota kelompok tani berada pada usia produktif namun secara pendidikan masih banyak yang tingkat pendidikannya masih SD, hanya 3 orang petani yang berpendidikan SMA dan 1 orang yang sarjana yaitu responden yang berada pada kelas kelompok lanjut. Untuk pengalaman usahatani petani dinilai sudah sangat berpengalaman yaitu 36 % pengalaman lebih dari 10 tahun.

Tabel 2. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Pemula		Lanjut		Madya	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
Umur (th)	15 - 64	25	100	23	92	96	91,2
	≥ 65	0		2	8	4	8,8
Pendidikan	SD	20	80	17	68	24	96
	SLTP	5	20	4	16	1	4
	SLTA	0	0	3	12	0	0
	Sarjana	0	0	1	4	0	0
Pengalaman (th)	< 5	3	12	14	56	8	32
	5-10	7	28	6	24	10	40
	>10	15	60	5	20	7	28

Sumber : analisis data primer

Tingkat Kemampuan Kelompok Tani

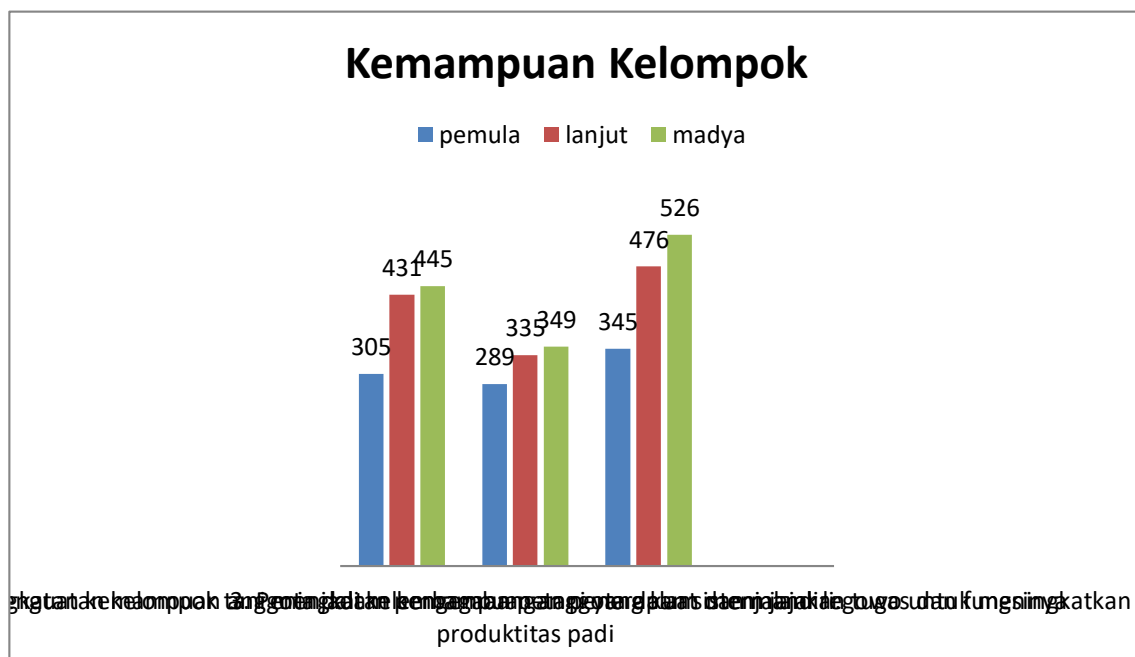
Hasil penelitian tingkat kemampuan kelompok tani dengan indikator (1) Penguatan kelompok tani menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri, (2) peningkatan kemampuan anggota dalam pengembangan agribisnis, dan (3) peningkatan kemampuan kelompok tani dalam menjalankan fungsinya menunjukkan bahwa kemampuan berdasarkan klasifikasi kelas kelompok rata rata adalah pada kategori tinggi, kecuali pada kelas kelompok pemula, hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan di kelompok pemula masih rendah.

Kemampuan untuk menjadikan kelembagaan yang kuat dan mandiri masih rendah. Dalam hal ini pelaksanaan pertemuan atau rapat anggota, rapat pengurus yang belum diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan. Begitu pula dalam menyusun rencana kerja kelompok dalam bentuk Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), kelompok tani juga masih belum menjalankan aturan dan norma yang disepakati dan ditaati bersama dan pencatatan aktivitas kelompok tidak dilakukan dengan baik. Hubungan kerjasama dengan kelompok lain dan pihak lain kurang dan berkumpul sekedarnya saja. Fakta ini terjadi di beberapa kelompok tani pemula di Desa Sungai Tuak. Berikut total skor untuk penilaian tingkat kemampuan kelompok tani pada setiap kelas kelompok (analisis data primer)

Total skor Pemula : $305+289+345 = 938$ (Tingkat kemampuan kelompok Rendah)

Total skor Lanjut : $431+335+476 = 1.242$ (Tingkat kemampuan kelompok Tinggi)

Total skor Madya : $445+349+526 = 1.320$ (Tingkat kemampuan kelompok Tinggi)



Efektifitas Komunikasi Anggota Kelompok Tani

Efektifitas komunikasi antar anggota kelompok tani dipengaruhi oleh teknik komunikasi, frekuensi komunikasi, media komunikasi dan materi yang dikomunikasikan di

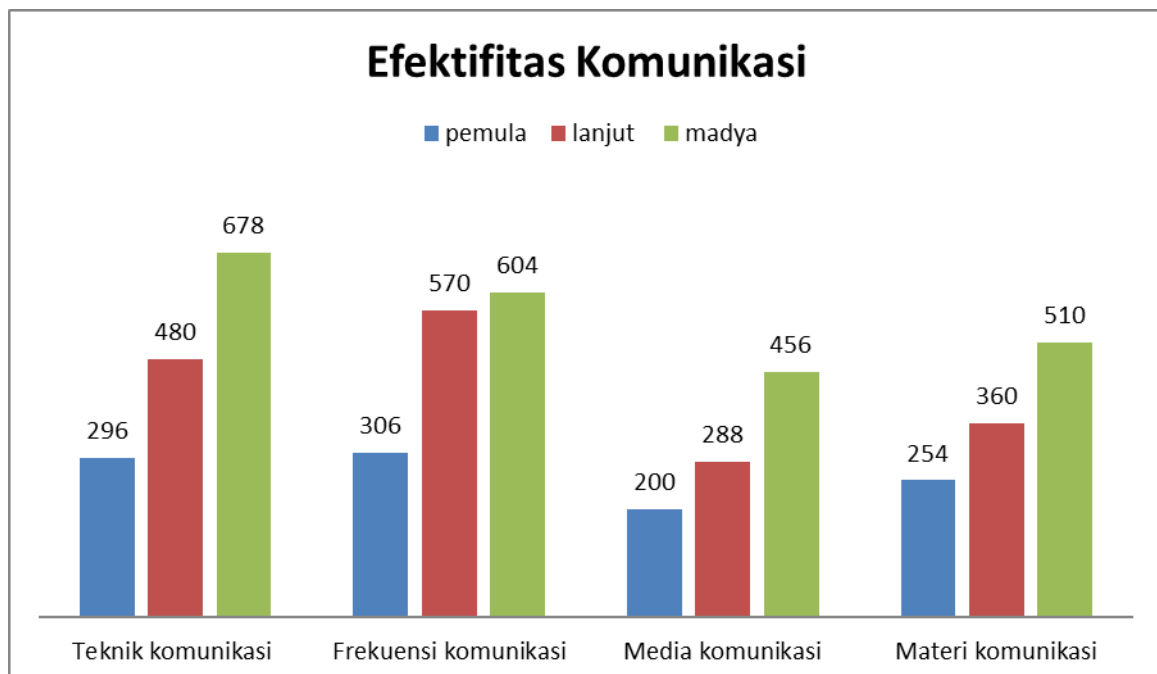
dalam kelompok. Komunikasi akan efektif jika apa yang ingin disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh masing masing anggota kelompok tani. Pemahaman ini terjadi dengan adanya komunikasi timbal balik yang berlangsung di dalam kelompok.

Hasil penelitian menunjukkan dari kelompok Pemula tingkat efektifitas komunikasinya masih kurang efektif, hal ini menunjukkan bahwa kondisi komunikasi didalam kelompok masih belum berjalan dua arah, sehingga timbal balik pesan tidak berjalan efektif. Masing masing individu dalam kelompok masih belum terbuka dan merasa memiliki kelompok sebagai wahana belajar dan memanfaatkan kelompok untuk bertukar informasi teknologi maupun tentang pemasaran usahatani. Berikut total skor untuk penilaian tingkat efektifitas komunikasi anggota kelompok pada setiap kelas kelompok.

Total skor Pemula : $296+306+200+254 = 1.056$ (Kurang Efektif)

Total skor Lanjut : $480+570+288+360 = 1.498$ (Kurang Efektif)

Total skor Madya : $678+604+456+510 = 2.268$ (Efektif)



Penerapan Sistem Jajar Legowo (Jarwo)

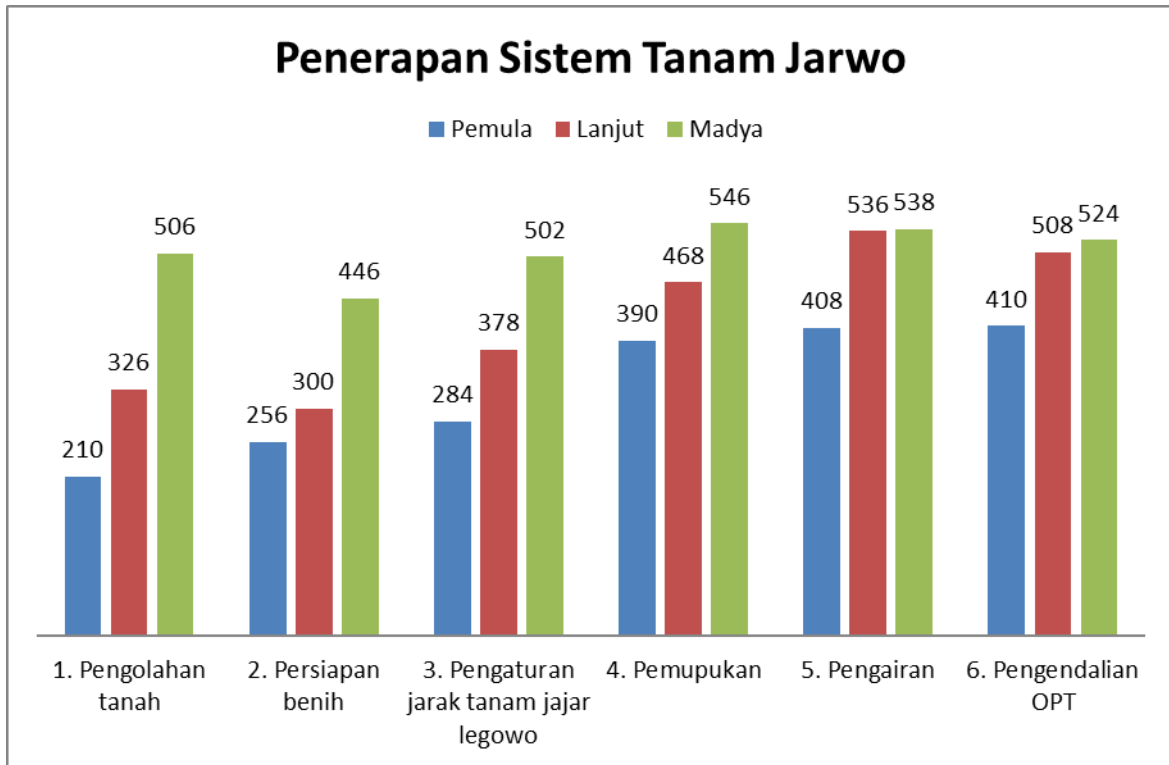
Sistem legowo merupakan suatu rekayasa teknologi untuk mendapatkan populasi tanaman lebih dari 160.000 per hektar. Penerapan Jajar Legowo selain meningkatkan populasi pertanaman, juga mampu menambah kelancaran sirkulasi sinar matahari dan udara disekeliling tanaman pingir sehingga tanaman dapat berfotosintesa lebih baik. Selain itu, tanaman yang berada di pinggir diharapkan memberikan produksi yang lebih tinggi dan kualitas gabah yang lebih baik, mengingat pada sistem tanam jajar legowo terdapat ruang terbuka seluas 25-50%, sehingga tanaman dapat menerima sinar matahari secara optimal yang berguna dalam proses fotosintesis. Namun demikian, penerapan jajar legowo di lapangan masih menunjukkan banyak variasi. Hal ini dimungkinkan akibat dari pemahaman mengenai sistem tanam legowo masih sangat beragam walaupun memiliki kesamaan konsep dasar yang dipahami. Oleh karena tu, dibutuhkan bimbingan teknis penerapan sistem tanam legowo dengan harapan dapat mempermudah penerapan di lapangan dan tidak menyimpang dari konsepnya. Adapun tahapan kegiatan metode tanam jajar legowo ini adalah Pengolahan tanah, Persiapan benih, Pengaturan jarak tanam jajar legowo, Pemupukan, Pengairan dan pengendalian OPT. Berikut hasil dari penerapan sistem Jarwo pada setiap kelas kelompok :

Total skor Pemula : $210+256+284+390+408+410 = 1.958$ (Kurang Menerapkan)

Total skor Lanjut : $326+300+378+468+536+508 = 2.516$ (Menerapkan)

Total skor Madya : $506+446+502+546+538+524 = 3.062$ (Menerapkan)

Hasil menunjukkan kelas pemula yang masih banyak belum menerapkan secara menyeluruh tahapan kegiatan sesuai anjuran petunjuk teknis Jarwo dengan total skor 1.958.



Hubungan Tingkat Kemampuan Kelompok terhadap Efektifitas Komunikasi dan Penerapan Sistem Tanam Jajar Legowo (Jarwo)

Uji analisis hubungan antara tingkat kemampuan kelompok tani dengan efektifitas komunikasi dan hubungan tingkat kemampuan kelompok tani dengan penerapan sistem tanam jajar legowo dengan menggunakan uji korelasi peringkat Spearman pada tingkat kepercayaan 95%, derajat bebas (db) = n-2. Hasil dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3. Hasil pengujian hipotesis hubungan antara variabel

Variabel Y	Variabel X	R_s	T_{hitung}
Kemampuan kelompok tani	Keefektifan komunikasi kelompok	0,142	1,225
	Tingkat penerapan sistem tanam jajar legowo	0,246	1,981*

*nyata pada taraf kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$)

Ttabel = $\alpha = 0,05 = 1,670$

Berdasarkan analisis diatas diperoleh nilai r_s untuk tingkat kemampuan kelompok dengan efektifitas komunikasi sebesar 0,142 dan thitung sebesar 1,225. Nilai thitung 1,225 lebih kecil dari nilai ttabel pada tingkat kepercayaan 95% (n-2) sebesar 1,670 artinya hipotesis ditolak pada $\alpha = 0,05$, yaitu tidak ada hubungan yang nyata pada kedua variabel. Sedangkan nilai r_s untuk tingkat kemampuan kelompok dengan tingkat penerapan sistem tanam jajar legowo sebesar 0,246 dan thitung sebesar 1, 981. Nilai thitung 1,981 lebih besar dari nilai ttabel pada tingkat kepercayaan 95% (n-2) sebesar 1,670 artinya hipotesis diterima pada $\alpha = 0,05$, yaitu ada hubungan yang nyata pada kedua variabel ini.

Hasil menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan kelompok maka akan semakin tinggi tingkat penerapan sistem tanam jajar legowo. Tingkat penerapan dapat dilihat dari kemampuan kelas kelompok dalam menerapkan anjuran anjuran teknis dalam sistem tanam jajar legowo dalam meningkatkan produktivitas usahatani padi.

KESIMPULAN

Dari hasil kajian ini disimpulkan bahwa tingkat kemampuan kelompok tani masih pada kategori rendah (untuk kelas Pemula),sedangkan untuk kelas Lanjut dan Madya ada pada kategori tinggi. Efektifitas komunikasi yang juga pada kategori kurang efektif pada kelas kelompok tani Pemula dan lanjut, sedangkan untuk Madya ada pada kategori efektif. Tingkat Penerapan metode jajar legowo pada kelas pemula masih ada pada kategori kurang menerapkan, sedang pada kelas lanjut dan madya sudah pada kategori menerapkan dengan baik sesuai anjuran. Korelasi Rank Spearman yang menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan yang nyata antara tingkat kemampuan kelompok dengan tingkat penerapan jajar legowo, hal ini berarti semakin tinggi tingkat kemampuan kelompok maka semakin tinggi pula tingkat penerapan jajar legowo dalam kelompok. Berdasarkan hasil ini perlu disarankan untuk melakukan pembinaan dan pendampingan dengan interaksi dan komunikasi yang intensif untuk menerapkan metode tanam jajar legowo pada petani petani yang masih pada level kelas pemula agar dapat meningkatkan produktivitas. Peran penyuluh dan kebijakan pemerintah daerah sangat penting dalam pendampingan, sehingga direkomendasikan agar bimbingan teknis dan pembinaan kelembagaan kelompok tani

perlu ditingkatkan sehingga wawasan dan penguasaan teknologi informasi pasar dapat memotivasi petani untuk meningkatkan kemampuannya.

DAFTAR PUSTAKA

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, 2016.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur, 2016. Dilihat pada 2017

Departemen Pertanian. 2007. Pedoman pembinaan kelembagaan petani. Departemen pertanian, Jakarta.

Milles, M.B. and Huberman, M.A. 1984. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication

Mulyono, M. 2001. *Pola Pengembangan Penyuluhan Pertanian Berorientasi Agribisnis Pada Era Otonomi Daerah*. 336 Hal.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013. *Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani*.

Van den Ban, A.W. dan H.S. Hawkins. 1999. Penyuluhan pertanian. Kanisius, Yogyakarta.

INTRODUKSI TEKNOLOGI UNTUK PETERNAKAN ITIK TRADISIONAL

Femi Hadidjah Elly^{1*}, Agustinus Lomboan¹, Jolanda Kalangi¹
Judy M. Tumewu, Merry Manese dan Jeane Pandey

¹Fakultas Peternakan, Universitas Sam Ratulangi Manado, 95115

*Email: femihelly@unsrat.ac.id dan femi_elly@yahoo.co.id

ABSTRAK

Peternakan itik adalah salah satu usaha yang dijalankan oleh masyarakat pedesaan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Ternak itik sebagai suatu komoditas yang menunjang kebutuhan konsumsi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan protein hewani yang berasal dari ternak. Permintaan terhadap produk peternakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sehingga dibutuhkan suatu kebijakan dalam mengimbangi laju permintaan yang semakin meningkat tersebut. Permasalahannya sebagian besar usaha ternak itik diusahakan secara tradisional sehingga laju pertumbuhannya dianggap lambat. Berdasarkan permasalahan yang ada maka perlu dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui perilaku petani dalam mengembangkan usaha peternakan itik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dan studi kasus yaitu suatu metode yang mengkaji secara mendalam kegiatan dan proses produksi suatu peternakan itik. Sampel lokasi adalah kecamatan di Kabupaten Minahasa yang memiliki populasi ternak itik terbanyak. Peternakan itik tradisional dikembangkan petani dengan cara digembalakan di lahan-lahan sawah setelah panen padi. Petani di Kabupaten Minahasanya mengembangkannya dengan cara berpindah-pindah. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pakan. Kebutuhan pakan ternak itik diperoleh dari padi yang rontok saat panen, limbah padi dan hewan-hewan kecil di sawah. Petani mengembangkan ternak itik dengan tujuan pemeliharaan untuk menghasilkan telur sekaligus daging. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa introduksi teknologi sangat dibutuhkan dalam menunjang pengembangan peternakan itik tradisional ke arah komersial.

Kata Kunci : itik, introduksi, teknologi, tradisional

PENDAHULUAN

Peternakan itik adalah salah satu usaha yang dijalankan oleh masyarakat pedesaan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Ternak itik sebagai suatu komoditas yang menunjang kebutuhan konsumsi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan protein hewani yang berasal dari ternak. Permintaan terhadap produk peternakan dari tahun ke tahun

mengalami peningkatan sehingga dibutuhkan suatu kebijakan dalam mengimbangi laju permintaan yang semakin meningkat tersebut.

Peternakan itik di Kabupaten Minahasa memiliki potensi yang cukup memadai untuk dikembangkan oleh petani peternak. Disisi lain, pemerintah daerah ini memberi perhatian yang serius dalam peningkatan populasi itik dalam rangka mengimbangi permintaan produk ternak itik yang cenderung meningkat. Berbagai peran ternak itik yang bisa dimanfaatkan oleh petani diantaranya sebagai sumber pendapatan, membuka kesempatan kerja, tabungan petani dan sumber protein hewani baik dari daging maupun telur. Faktor lain yang mendorong petani peternak antusias dalam mengembangkan ternak itik sebagai suatu usaha diantaranya yaitu tersedianya pasar untuk daging dan telur itik. Ternak itik memiliki keunggulan tertentu yaitu memiliki daya tahan terhadap penyakit dan ini merupakan kelebihanannya dibanding unggas lainnya (Budi *et al.* 2015). Itik lokal memiliki daya adaptasi sangat baik dengan lingkungan pengembangannya dan pada lingkungan barunya (Matitaputty dan Suryana, 2014).

Permasalahannya sebagian besar usaha ternak itik diusahakan secara tradisional sehingga laju pertumbuhannya dianggap lambat. Berdasarkan permasalahan yang ada maka perlu dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui perilaku petani dalam mengembangkan usaha peternakan itik.

METODE PENELITIAN

Materi penelitian ini adalah ternak itik (jumlah yang dimiliki anggota kelompok), pakan dan teknologi yang diintroduksi yaitu mesin tetas, telur tetas, bibit itik. Introduksi mesin tetas untuk mengatasi sulitnya memperoleh bibit (DOD), telur tetas diintroduksi untuk melatih anggota kelompok menggunakan mesin tetas, bibit itik diintroduksi untuk melatih petani mengelola usaha ternak itik yang baik dan benar.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dan studi kasus yaitu suatu metode yang mengkaji secara mendalam kegiatan dan proses produksi suatu peternakan itik. Sampel lokasi adalah kecamatan di Kabupaten Minahasa yang memiliki populasi ternak itik terbanyak. Responden adalah anggota kelompok yang ditentukan secara purposive sampling yaitu 8 (delapan) orang anggota kelompok yang

mengembangkan ternak itik dan siap untuk kegiatan pemberdayaan introduksi teknologi. Analisis data secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peternakan itik tradisional dikembangkan petani dengan cara digembalakan di lahan-lahan sawah setelah panen padi. Petani di Kabupaten Minahasanya mengembangkannya dengan cara berpindah-pindah. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pakan. Kebutuhan pakan ternak itik diperoleh dari padi yang rontok saat panen, limbah padi dan hewan-hewan kecil di sawah. Petani mengembangkan ternak itik dengan tujuan pemeliharaan untuk menghasilkan telur sekaligus daging. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peternakan itik di Kabupaten Minahasa pada umumnya bersifat tradisional. Ciri-ciri peternakan itik tradisional adalah pengetahuan beternak rendah, teknologi pengelolaan rendah serta tidak didukung oleh manajemen pengelolaan yang baik. Walaupun menurut Budi *et al* (2015) dan Thermolen *et al* (2016), kondisi ini terjadi di wilayah mana saja di Indonesia. Ternak itik lebih banyak dilepas atau diumbar disiang hari atau digembalakan ke areal persawahan (Gambar 1).



Gambar 1. Itik Digembalakan di Lahan Persawahan

Gambar 1 menunjukkan sistem pemeliharaan ternak itik oleh petani yang hanya digembalakan di lahan sawah setelah padinya dipanen, yang disebut sebagai sistem pemeliharaan ekstensif (Ranto dan Sitanggang, 2009., Elly, 2011). Ternak itik dibiarkan sepanjang hari dan mencari makan di sekitar pemukiman penduduk atau di persawahan

tanpa dikandangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilikan ternak itik oleh anggota kelompok berkisar 50 ekor - 200 ekor. Pemeliharaan dengan cara digembalakan, menurut petani hal ini disebabkan karena pakan tersedia apabila petani panen padi.

Berdasarkan keadaan peternakan itik maka telah dilakukan pemberdayaan terhadap petani peternak itik. Perberdayaan dilakukan melalui penerapan ipteks terhadap anggota kelompok. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan anggota kelompok terhadap tehnologi berkaitan dengan pengembangan usaha ternak itik. Introduksi teknologi yang telah dilakukan adalah penetasan telur itik dengan menggunakan mesin tetas (Gambar 2). Adanya mesin tetas bermanfaat bagi anggota kelompok dalam penyediaan bibit secara kontinyu.



Gambar 2. Mesin Yang Diintroduksi dan DOD Hasil Tetas

Mesin tetas yang diintroduksi seperti Gambar 2 merupakan teknologi tepat guna dengan DOD yang dihasilkan dengan penggunaan mesin tetas hanya 30 persen dari telur yang ditetaskan. Tetapi tehnologi ini diharapkan mendorong anggota kelompok untuk pengembangan ternak itik. Penerapan ipteks bagi anggota kelompok tani ternak itik juga telah dilakukan dengan mengintroduksi bibit itik jenis Mojosari Alabio Raja Ratu (Gambar 3).



Gambar 3. Bibit Itik Jenis Mojosari Alabio Raja Ratu Yang Diintroduksi

Jenis itik ini baru dikenal oleh anggota kelompok. Tujuan introduksi bibit itik ini adalah untuk meningkat pengetahuan anggota kelompok dalam mengelola usaha ternak itik yang baik sesuai dengan yang dianjurkan. Apabila anggota kelompok mengusahakan ternak itik pedaging maka pendapatan mereka meningkat sekitar 50-75 % dari pendapatan yang ada. Hal ini ditunjang dengan kebutuhan masyarakat terhadap daging itik cenderung meningkat dilihat dari semakin bertambahnya beberapa restoran maupun rumah makan yang menyajikan daging itik (Purba dan Ketaren, 2011).

Penerapan ipteks juga dilakukan dengan memanfaatkan kandang bagi ternak itik. Pembuatan kandang memanfaatkan sumberdaya lokal yaitu menggunakan bambu. Kandang yang baik tersedia tempat makan dan tempat minum. Beberapa penelitian menunjukkan produksi telur semakin tinggi apabila ternak itik dikandangkan (Risqina, 2011 dan Taufik *et al.* 2013).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah adanya introduksi teknologi maka petani peternak telah mengembangkan usaha ternak itik ke arah semi komersial. Hal ini ditunjukkan bahwa petani peternak telah memanfaatkan mesin tetas selama 4 periode penetasan. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya telur tetas sehingga petani peternak memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan mesin tetas. Kenyataan lainnya menunjukkan bahwa usaha tersebut masih berjalan dan saat ini petani sudah mengintroduksi DOD sebanyak 600 ekor. Menurut Indraswari (2014) bahwa pengetahuan petani sangat membantu dalam menunjang kemampuan dalam mengadopsi teknologi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa introduksi teknologi sangat dibutuhkan dalam menunjang pengembangan peternakan itik tradisonal ke arah komersial. Saran yang disampaikan bahwa introduksi perlu dilakukan untuk petani peternak itik yang lain sebagai upaya pembangunan peternakan itik yang berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada Rektor Universitas Sam Ratulangi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dengan dana skim RTUU tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, E.S., E. Yektiningsih dan E. Priyanto. 2015. Profitabilitas Usaha Ternak Itik Petelur di Desa Kebonsari Kecamatan Candi, Sidoarjo. *Jurnal Agraris*. Vol 1 No 1 Jan 2015 : 33-37.
- Elly, F.H. 2011. Analisis Usaha Ternak Itik. Makalah Disampaikan pada Temu Lapang Kelompok Ternak Itik di Kecamatan Langowan. Kamis, 6 Oktober 2011. Pelaksana Tim BPTP Kalasey, Sulawesi Utara.
- Matitaputty, P.R dan Suryana. 2014. Tinjauan tentang Performans Itik Cihateup (*Anas platyrhynchos Javanica*) sebagai Sumberdaya Genetik Unggas Lokal di Indonesia. *Wartazoa* Vol 24 No 4 Tahun 2014 : 171-178.
- Purba, M dan P.P. Ketaren. 2011. Konsumsi dan Konversi Pakan Itik Lokal Jantan Umur Delapan Minggu dengan Penambahan Santoquin dan Vitamin E dalam Pakan. *JITV* Vol. 16 No 4, p: 280-287.
- Ranto dan M. Sitanggang. 2009. *Panduan Lengkap Beternak Itik*. Agromedia. Jakarta.
- Risqina. 2011. Analisis Pendapatan Peternak Sapi Potong dan Sapi Bakalan Karapan di Sapudi Kabupaten Sumenep. *JITP* Vol. 1, No.3.
- Taufik, D.K., Isbandi dan M. Dyah. 2013. Analisis Pengaruh Sikap Peternak Terhadap Pendapatan Pada Usaha Peternakan Itik Di Kelurahan Pesurungan Lor Kota Tegal. *JITP* Vol. 2 No. 3.
- Thermolen, B., L. Herlin dan M. Paturochman. 2016. Analisis Efisiensi Penggunaan Beberapa Faktor Produksi Usaha Ternak Itik Pedaging. *Jurnal Ilmu Ternak*, Vol 18, No.1, p: 18-22

PEMANFAATAN MEDIA MASSA OLEH PENYULUH DALAM KEGIATAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KOTA PADANG

Zulvera^{1*}

¹ Prodi Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang

*Email: zulveraunand@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan media massa oleh penyuluh dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan media massa dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Penelitian menggunakan metode survey dengan responden 43 penyuluh pertanian yang berada ditiga wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kota Padang. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang diperoleh dari responden penelitian, dan data sekunder yang berasal dari instansi terkait dengan topik penelitian. Untuk menganalisis pemanfaatan media masa oleh penyuluh dalam kegiatan penyuluhan digunakan analisis deskriptif kualitatif. Pengolahan dan analisis data untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan media massa dalam penyuluhan dilakukan dengan analisis statistik, menggunakan program SPSS versi 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan media massa dalam kegiatan penyuluhan oleh penyuluh berada pada kategori rendah sampai sedang. Hal ini ditunjukkan oleh sedikitnya jenis media massa yang dimanfaatkan dalam proses pencarian informasi oleh penyuluh pertanian. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan media massa dalam kegiatan penyuluhan adalah kemampuan penyuluh dalam menggunakan media dan intensitas pendidikan nonformal yang diikuti oleh penyuluh. Untuk meningkatkan pemanfaatan media massa dalam kegiatan penyuluhan pertanian dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan penggunaan media kepada penyuluh, serta, memfasilitasi penyuluh agar dapat mengakses media massa yang sesuai dengan tugas pokoknya.

Kata kunci: penyuluhan pertanian, pemanfaatan media massa

PENDAHULUAN

Penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang guna melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya dengan memberikan pendapat tertentu sehingga dapat membuat keputusan yang benar (ban dan Hawkins, 1999). Undang-undang No 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mendefinisikan Penyuluhan sebagai proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasi dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya,

serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Agar tujuan penyuluhan pertanian tercapai dibutuhkan tenaga-tenaga penyuluh yang kompeten dalam melakukan proses belajar bersama petani. Proses belajar akan efektif jika didukung oleh berbagai faktor yang terkait dengan pembelajaran, salah satunya adalah media yang digunakan penyuluh dalam kegiatan pembelajaran bersama petani.

Penyuluhan sebagai suatu proses belajar membutuhkan media komunikasi sebagai alat untuk menyampaikan informasi berupa inovasi kepada petani sebagai penerima manfaat penyuluhan. Media komunikasi menurut Leewis (2009), merupakan alat yang membantu untuk mengkombinasikan saluran-saluran komunikasi yang berbeda untuk menjadi pengangkut sinyal-sinyal yang berbentuk tulisan, visual, terdengar, tersentuh atau tercium. Ruben (1992) mendefinisikan media sebagai: alat-alat teknologi yang meningkatkan kemampuan alamiah kita untuk menciptakan, mentransmisikan, menerima, serta memproses pesan-pesan komunikasi baik secara visual, terdengar, tercium, terasa atau tersentuh. Leewis membagi media komunikasi atas 3 yaitu : (1) media konvensional, (2) media interpersonal, dan (3) media hibrida. Keberagaman media yang dimanfaatkan oleh penyuluh dalam kegiatan penyuluhan pertanian akan mempengaruhi penerimaan petani terhadap inovasi yang disampaikan. Penelitian bertujuan untuk: (a) mendeskripsikan pemanfaatan media massa oleh penyuluh dalam kegiatan penyuluhan pertanian, dan (b) menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan media massa oleh penyuluh pertanian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Padang Propinsi Sumatera Barat. dengan menggunakan metode penelitian survey..Populasi penelitian adalah penyuluh pertanian yang terdapat di tiga wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kota Padang, yaitu: BPP Marapalam, BPP Nanggalo dan BPP Koto Tangah. Responden penelitian berjumlah 43 orang penyuluh pertanian yang tersebar ditiga BPP tersebut. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang diperoleh dari responden penelitian dan data sekunder yang berasal dari instansi terkait.

Variabel yang diamati dalam penelitian ini terdiri dari jenis media masa yang dimanfaatkan oleh penyuluh faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan media

massa oleh penyuluh dalam kegiatan penyuluhan, Untuk menganalisis pemanfaatan media massa oleh penyuluh dalam kegiatan penyuluhan digunakan analisis deskriptif kualitatif. Pengolahan dan analisis data untuk mengetahui factor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan media massa dalam penyuluhan dilakukan dengan statistik deskriptif, menggunakan program SPSS versi 16.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Karakteristik Responden Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh pertanian yang menjadi responden penelitian terdiri dari Penyuluh PNS sebanyak 86% (37 orang) dan 14% (6 orang) penyuluh pertanian Non PNS (THL TBPP). 65 % dari penyuluh pertanian tersebut berjenis kelamin perempuan dan 35% berjenis kelamin laki-laki. Sebaran persentase karakteristik penyuluh disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran persentase karakteristik Penyuluh Pertanian

Variabel	kategori	Kelompok Penyuluh		Jumlah (%)
		PNS	Non PNS	
Umur	29-36	14	0	14 (32,56)
	37-44	9	3	12 (25,53)
	45-52	1	3	4 (8,51)
	>52	13		13 (27,66)
Pendidikan Formal	SLTA	12	0	12 (25,53)
	D3	1	1	2 (4,25)
	S1	24	4	28 (59,57)
	S2	0	1	1 (2,13)
Masa kerja	1 - 10	16	4	20 (42,55)
	11- 20	8	2	10 (21,28)
	21 - 30	2	0	2 (4,25)
	<30	11	0	11 (23,40)
Pendidikan non formal 1 tahun terakhir	0	24	4	28 (59,57)
	1	2	1	3 (6,38)
	2	9	0	9 (19,15)
	<2	2	1	3 (6,38)
jenis Kelamin	Laki-laki	12	3	15 (34,88)
	Perempuan	25	3	28 (65,12)

Tabel 1 menunjukkan bahwa 32,56% penyuluh pertanian berada pada usia 29 sampai dengan 36 tahun, yang merupakan rentang umur produktif. Namun jika diamati

pada Tabel 1 tersebut, penyuluh dengan usia tua, juga cukup tinggi yaitu sebanyak 27,66%. Hal ini menggambarkan bahwa sekitar lima tahun kedepan akan terjadi kekurangan tenaga penyuluh karena banyak penyuluh yang akan memasuki usia pensiun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh pertanian yang berada di Kota Padang memiliki pendidikan formal setara S1 sebanyak 59,57%, yang diikuti oleh tamatan SLTA sebanyak 25,53%. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan penyuluh pertanian di Kota Padang sudah berada pada taraf pendidikan tinggi, bahkan sudah ada sebanyak 2,23 % yang memiliki pendidikan strata 2. Namun pendidikan formal tidak diikuti dengan tingginya intensitas pendidikan non formal. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa lebih dari 50% penyuluh pertanian mengaku tidak ada mengikuti pendidikan non formal selama satu tahun terakhir. Informasi dilapangan mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran, merupakan salah satu penyebab rendahnya frekuensi pendidikan non formal yang diikuti oleh penyuluh pertanian.

b. Media komunikasi yang dimanfaatkan penyuluh dalam kegiatan penyuluhan pertanian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis media yang dimanfaatkan oleh penyuluh pertanian dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan terdiri dari surat kabar, leaflet, radio, televisi, poster, majalah, internet, buku, video, dan HP. Tingkat pemanfaatan masing-masing media oleh penyuluh dalam kegiatan penyuluhan pertanian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Pemanfaatan Media Massa oleh Penyuluh pertanian

No	Nama Media	Pemanfaatan dalam penyuluhan			
		Sering		Jarang	
		jumlah	%	jumlah	%
1	Surat Kabar	16	37,21	27	62,79
2	Leaflet	37	86,05	6	13,95
3	Radio	4	9,30	39	90,70
4	Televisi	15	34,88	28	65,12
5	Poster	11	25,58	32	74,42
6	Majalah	23	53,49	20	46,51
7	Internet	25	58,14	18	41,86
8	buku	15	34,88	28	65,12
9	video	13	30,23	30	69,77
10	HP	21	48,84	22	51,16

Tabel 2. Menunjukkan bahwa urutan media massa yang digunakan oleh penyuluh pertanian dalam kegiatan penyuluhan secara berturut-turut adalah , leaflet (86,05%), internet (58,14%), majalah,(53,49%) dan HP (48,84%), surat kabar (37,21%), televise dan buku (masing-masing 15%), video (30,23), poster (25,58%) dan terakhir radio (9,30%)

Penggunaan media oleh penyuluh pertanian ini terkait juga dengan ketersediaan media yang menyajikan materi atau informasi tentang pertanian. Radio sebagai salah satu contoh, sangat rendah penggunaannya oleh penyuluh, karena tidak tersedianya radio khusus pertanian, sedangkan radio yang ada tidak pula menyajikan acara bertemakan pertanian. Radio yang dapat dimanfaatkan oleh penyuluh untuk kegiatan penyuluh pertanian adalah radio RRI. Televisi juga termasuk salah satu media yang rendah pemanfaatannya dalam kegiatan penyuluh. Rendahnya pemnfaatan televisi, menurut penyuluh disebabkan tidak tersedianya acara yang menyajikan materi atau informasi terkait dengan pertanian. Salah satu televisi yang menyajikan berita tentang dunia pertanian adalah TVRI. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan dari Anwas (2010) yang menyatakan bahwa radio dan televisi termasuk media yang rendah pemanfaatannya oleh penyuluh.

Pemanfaatan leaflet berada pada posisi yang tinggi, dibandingkan dengan media lainnya. Informasi dilapangan menunjukkan bahwa leaflet dapat diperoleh dari lembaga penyuluhan pada saat menyebarkan suatu inovasi. Penyuluh diberikan leaflet oleh lembaga-lembaga yang menyebarkan inovasi, sehingga dapat langsung digunakan penyuluh atau dibagikan pada petani saat kegiatan penyuluhan berlangsung. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Enggar dkk (2013) di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa media komunikasi penyuluhan, yang paling banyak diterima oleh petani di kedua provinsi tersebut adalah buku, leaflet, DVD/VCD, poster, dan poster kalender. Hasil penelitian ini memperkuat informasi bahwa leaflet merupakan salah media yang banyak digunakan oleh penyuluh dilapangan.

Pemanfaatan majalah dan internet juga termasuk pada kategori sering digunakan yaitu mencapai angka lebih dari dari 50%. Tingginya pemanfaatan majalah karena tersedianya majalah pertanian yang dapat diakses oleh penyuluh. Majalah yang banyak dimanfaatkan penyuluh adalah Sinar Tani dan Trubus, yang berisikan berbagai informasi dan inovasi terkait komoditi yang dikembangkan petani diwilayah kerja penyuluh

pertanian. Internet juga menjadi salah satu media massa yang sering dimanfaatkan oleh penyuluh di lapangan. Internet merupakan media hybrid yang memadukan media konvensional dan media interpersonal (Leuwis, 2009). Keberadaan lokasi penyuluhan yang tidak dapat mengakses signal internet menjadi salah satu kendala yang dirasakan penyuluh dalam pemanfaatan media ini di lapangan.

Pemanfaatan buku dan video dalam kegiatan penyuluh termasuk kategori rendah, yaitu lebih dari 60% penyuluh mengaku jarang menggunakan video dan buku-buku pertanian dalam kegiatan penyuluhan. Keterbatasan buku yang tersedia di lembaga penyuluhan menjadi salah satu alasan penyuluh jarang menggunakannya dalam kegiatan penyuluhan. Buku juga dianggap kurang efektif untuk digunakan dalam kegiatan penyuluhan, karena dikhawatirkan tidak akan dibaca oleh petani. Anwas (2010) dalam artikelnya menyatakan bahwa rendahnya minat terhadap buku disebabkan isi buku kalah menarik dibandingkan dengan majalah. Video sebagai salah satu media yang dapat digunakan penyuluh dalam menyampaikan informasi pada penerima manfaat penyuluh, juga jarang dimanfaatkan, karena kesulitan dalam membuat video yang sesuai dengan kebutuhan, disamping butuh fasilitas dan biaya yang cukup besar.

c. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan media massa oleh penyuluh pertanian dalam kegiatan penyuluhan pertanian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan media massa oleh penyuluh pertanian adalah faktor pendidikan non formal yang diikuti oleh penyuluh selama satu tahun terakhir, status penyuluh (penyuluh PNS atau Non PNS) dan kemampuan penyuluh dalam menggunakan media (termasuk dalam hal ini kemampuan dalam pembiayaan untuk mengaksesnya). Nilai korelasi faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan media oleh penyuluh disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan media oleh penyuluh pertanian dalm kegiatan penyuluhan.

Variabel yang berhubungan	nilai Korelasi rank spearman
Pendidikan non formal	0,334
Status Penyuluh	0,319
Kemampuan dalam penggunaan teknologi	0,302

Tabel 3. Menunjukkan bahwa pendidikan non formal berhubungan dengan pemanfaatan media oleh penyuluh dengan nilai korelasi rank spearman sebesar 0,334. Hal ini berarti bahwa terdapat kecenderungan semakin tinggi frekuensi pendidikan non formal yang diikuti oleh penyuluh pertanian semakin banyak media yang akan dimanfaatkan oleh penyuluh dalam melakukan kegiatan penyuluhan pertanian. Pendidikan non formal merupakan suatu wadah yang dapat membantu meningkatkan kompetensi penyuluh dalam menjalankan tugasnya. Dengan seringnya penyuluh mengikuti kegiatan pendidikan non formal maka kemampuan penyuluh akan semakin tinggi pula, baik untuk kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor. Begitu juga kesadaran akan pentingnya penggunaan beragam media dalam kegiatan penyuluhan serta keterampilan menggunakan berbagai media penyuluhan. Hal ini akan mendorong tingginya pemanfaatan media massa dalam kegiatan penyuluhan di lapangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suryantini (2004) yang menyatakan bahwa pendidikan non formal berhubungan nyata dengan pemanfaatan media cetak.

Faktor berikutnya yang berhubungan dengan pemanfaatan media oleh penyuluh pertanian adalah status penyuluh, yang meliputi; kategori penyuluh dengan status PNS dan penyuluh dengan status non PNS, dengan nilai korelasi sebesar 0,319 Faktor ketiga yang berhubungan dengan pemanfaatan media massa oleh penyuluh adalah kemampuan dalam penggunaan teknologi dengan nilai korelasi sebesar 0,302. Ini berarti bahwa terdapat kecenderungan semakin tinggi kemampuan penyuluh dalam penggunaan media massa maka akan semakin tinggi pemanfaatan media massa oleh penyuluh pertanian. Kemampuan penyuluh dalam penggunaan media massa diamati dari aspek keterampilan dalam menggunakan media dan kemampuan dalam hal pembiayaan untuk mengakses media tersebut. Pengakuan penyuluh dilapangan menggambarkan bahwa kurangnya

keterampilan dalam menggunakan media ditambah biaya yang cukup besar yang harus dikeluarkan untuk menggunakan media dalam penyuluhan, menjadi salah satu kendala mereka dalam memanfaatkan beragam media massa dalam kegiatan penyuluhan.

Purwatiningsih dkk (2018) menyatakan bahwa suatu teknologi yang digunakan akan membutuhkan biaya untuk operasionalnya, sehingga akan berdampak terhadap pengeluaran individu yang menggunakan teknologi tersebut. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Mardikanto (1993), bahwa teknologi yang tersedia membawa konsekuensi ekonomi yang akan ditimbulkan (tambahan biaya investasi, pemeliharaan, dan biaya operasional). Dalam Mardikanto (2009) disebutkan pula bahwa didalam manajemen, pembiayaan merupakan unsur penting, dan diantara unsur pembiayaan yang diperlukan dalam kegiatan penyuluhan adalah biaya operasional (pembuatan/perbanyak/penyebarluasan materi penyuluhan) serta biaya pengadaan perlengkapan (alat bantu dan alat peraga penyuluhan).

Kurangnya kemampuan penyuluh dalam menggunakan media dapat diatasi dengan pelatihan. Lembaga yang menaungi penyuluh pertanian agar melaksanakan pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyuluh dalam menggunakan media penyuluhan. Rendahnya ketersediaan media penyuluhan di Balai-balai penyuluhan, dapat diatasi dengan pemberian bantuan sarana dan prasarana penyuluhan oleh lembaga penyuluhan yang ada ditingkat pusat, atau propinsi kepada Bala Penyuluhan yang ada ditingkat kecamatan. Hal ini dapat mendukung pemanfaatan media oleh penyuluh di lapangan. Hal tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Purwatiningsih dkk (2018) yang menyatakan bahwa kelancaran dalam penggunaan internet oleh penyuluh perlu adanya berbagai dukungan, salah satu dukungan tersebut dapat berasal dari instansi di mana penyuluh tersebut bekerja.

KESIMPULAN

Penelitian tentang pemanfaatan media massa oleh penyuluh pertanian dalam kegiatan penyuluhan pertanian di Kota Padang dapat disimpulkan bahwa rata-rata penggunaan media oleh penyuluh pertanian masih rendah, yang ditunjukkan dari sedikitnya ragam media yang digunakan. Faktor-faktor yang berhubungan dengan

pemanfaatan media oleh penyuluh pertanian adalah intensitas pendidikan non formal yang diikuti penyuluh, status penyuluh dan kemampuan penyuluh dalam memanfaatkan media yang meliputi; ketrampilan menggunakan media dan kemampuan pembiayaan untuk mengakses media penyuluhan.

Pemanfaatan media oleh penyuluh dalam kegiatan penyuluhan pertanian dapat ditingkatkan dengan pemberian pelatihan tentang teknik penggunaan media kepada penyuluh dan memfasilitasi penyuluh agar dapat akses terhadap berbagai media penyuluhan. Peran tersebut dapat dimainkan oleh lembaga yang mengurus pengembangan sumberdaya manusia penyuluhan yang berada dalam sistem penyuluhan pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, O. M. 2010. Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Berbasis Media Massa. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 16, Nomor 6, Nopember 2010
- Enggar Paramita, Endri Martini, James M. Roshetko. 2013. *Media Dan Metode Komunikasi Dalam Penyuluhan Agroforestri: Studi Kasus Di Sulawesi Selatan (Kabupaten Bantaeng Dan Bulukumba) Dan Sulawesi Tenggara (Kabupaten Konawe Dan Kolaka*. Prosiding Seminar Nasional Agroforestri 2013
- Leeuwis, Cees. 2006. *Communication for Rural Innovation. Rethinking Agricultural Extension*. Blackwell Publishing,
- Mardikanto T. 1993. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Surakarta (ID): UNS Press.
- Mardikanto, T. 2009. *Sistem Penyuluhan Pertanian*. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS.
- Purwatiningsih N.A, Fachiya A, Mulyandari RSH. 2018. Pemanfaatan Internet dalam meningkatkan Kinerja Penyuluh Pertanian di kabupaten Cianjur. *Jurnal Penyuluhan* Vol 14 No 1
- Suryantini H. 2004. Pemanfaatan Informasi dan Teknologi Pertanian oleh Penyuluh Pertanian. *Jurnal Perpustakaan pertanian*. Vol.13 No 1. Tahun 20014.
- van den Ban, A. W dan Hawkins, H. S. 1999. *Penyuluhan Pertanian*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.

POTENSI STRATEGIS PENYULUH SWADAYA DALAM PENYULUHAN PERTANIAN PADA PETANI KOPI DI WILAYAH AMSTIRDAM KABUPATEN MALANG

Andi Warnaen^{1*}, dan Sugiyanto²

¹ Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pertanian Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang dan Staf Pengajar Politeknik Pembangunan Pertanian Malang,

² Guru Besar dan Dosen Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang,

*Email: andiwarnaen@polbangtanmalang.ac.id

ABSTRAK

Penyuluh swadaya dapat disebut sebagai sosok yang multiperan, karena dapat melakukan kegiatan penyuluhan dengan motivasi sosial, pelayanan individu, namun sekaligus peran bisnis dan peran agripreneur. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan potensi strategis penyuluh swadaya dalam kegiatan penyuluhan pertanian pada petani kopi di wilayah Amstirdam (*Ampelgading, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo dan Dampit*) Kabupaten Malang. Pendekatan penelitian yang digunakan Deskriptif Kualitatif, adapun informan pada penelitian ini adalah Tokoh Tani Kopi (*Pemuka Tani*) yang juga tercatat serta melakukan penyuluhan rutin kepada masyarakat petani kopi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah Teknik observasi partisipatif moderat, wawancara semi struktur dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik Analisis Interaktif Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan petani kopi robusta di wilayah Amstirdam, selain di dampingi oleh Penyuluh PNS dan Swasta, akan tetapi didampingi juga oleh Penyuluh Swadaya. Potensi strategis penyuluh swadaya diantaranya; dukungan Undang-Undang No. 16 tahun 2006, Kemampuan Petani dalam bidang teknologi Pertanian, Sosial Budaya, Kemampuan Petani dalam memasarkan Produk, Dukungan Sektor pemerintahan dan swasta dan Kemampuan Petani dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi. Peran Penyuluh Swadaya yakni sebagai partner kerja penyuluh PNS ketika penyuluh PNS berhalangan hadir dalam kegiatan pertemuan dengan petani. Potensi strategis dari penyuluh swadaya yakni mampu membina petani dengan berbagai pendekatan.

Kata kunci : Penyuluh Swadaya, Penyuluhan Pertanian, Kopi Dampit, Java Kopi dan Kopi Robusta.

PENDAHULUAN

Keberadaan kopi di Malang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Hal ini dikarenakan, pasar kopi dalam negeri dan luar negeri masih terbuka luas. Peluang ekspor kopi, utamanya jenis robusta sangat terbuka luas, dengan adanya peningkatan permintaan kopi dari Mesir dan permintaan biji kopi dari 42 negara tujuan ekspor selalu tinggi. Java Coffe, masih sangat disukai di luar negeri, pesaing utama Indonesia dalam mengekspor biji kopi jenis robusta adalah Vietnam, Sementara Vietnam, memiliki kekuatan dari sisi penyediaan kuantitas biji kopi. Harga biji kopi di pasar internasional mencapai sekitar USD 1,7/kg. Sementara, untuk harga biji kopi di tingkat petani mencapai sebesar Rp 26.000/kg. Harga biji kopi dari petani ini merupakan harga untuk biji kopi yang belum disortasi. (Aditya, 2018).

Berdasarkan fenomena tersebut, petani kopi di wilayah Amstirdam melakukan kerjasama dengan komunitas Barista, LSM dan eksportir untuk menjaga kualitas dan nilai dari kopi tersebut. Petani malakukan edukasi dan pendampingan terhadap petani kopi lainnya dari mulai on farm sampai ke pemasarannya. Sehingga harga kopi ditingkat petani sangat bervariasi, ada harga kopi kualitas ekspor, harga kopi barista dan harga kopi tengkulak. Petani berdasarkan permintaan dari jenis pasar dapat memilih produksi kopi mana yang akan dipilih, tentunya memiliki prosedur masing-masing. Petani kopi sudah mulai melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada sesama petani berdasarkan standar yang diminta pasar, baik untuk kebutuhan pasar ekspor maupun lokal (barista).

Penomena ini menarik untuk dilihat bahwa peran petani sebagai penyuluh sudah mulai berjalan, dan petani mulai melakukan pendampingan terhadap petani berdasarkan kebutuhan pasar, hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Salah satu sisinya adalah tidak hanya melibatkan petani sebagai objek, namun juga sebagai subjek penyuluhan, yakni dengan mengangkat peran penyuluh swadaya dari kalangan petani itu sendiri. Undang-undang tersebut membagi penyuluh menjadi tiga bagian, yaitu penyuluh PNS, Penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta (Republik Indonesia, 2006). Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh (Indonesia, 2018). Hadirnya penyuluh swadaya di tengah-tengah masyarakat dan jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan penyuluh PNS

harusnya mampu memberi warna baru dalam dunia penyuluhan dengan hadirnya penyuluh swadaya kedepan akan di ramalkan bahwa penyuluh swadaya memiliki peranan penting dalam dunia penyuluhan, sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi strategis Penyuluh Swadaya dalam Penyuluhan Pertanian Pada Petani Kopi Di Wilayah Amstirdam Kabupaten Malang

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Wilayah Amstirdam (Ampelgading, Sumber Manjing Wetan, Tirtoyudo dan Dampit) Kabupaten Malang. Alasan pemilihan Wilayah Amstirdam, dikarenakan wilayah ini memiliki potensi kopi yang sangat bagus, dengan dibuktikan bahwa Kopi Dampit sudah menembus ekspor ke wilayah Eropa. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci.

Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah Tokoh Tani Kopi (*Pemuka Tani*) yang juga tercatat di BPP serta melakukan penyuluhan rutin kepada masyarakat petani kopi di sekitarnya, dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana potensi strategis penyuluh swadaya dalam penyuluhan pertanian khususnya pada petani Kopi Robusta.

Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun informan pada penelitian ini adalah Tokoh Tani Kopi (*Pemuka Tani*) yang juga tercatat di BPP serta melakukan penyuluhan rutin kepada masyarakat petani kopi di sekitarnya, adapun jumlah Tokoh Petani Kopi yang dijadikan sebagai informan sejumlah 4 orang.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah Teknik Triangulasi, diantaranya menggunakan observasi partisipatif moderat, wawancara semi struktur dan dokumentasi.

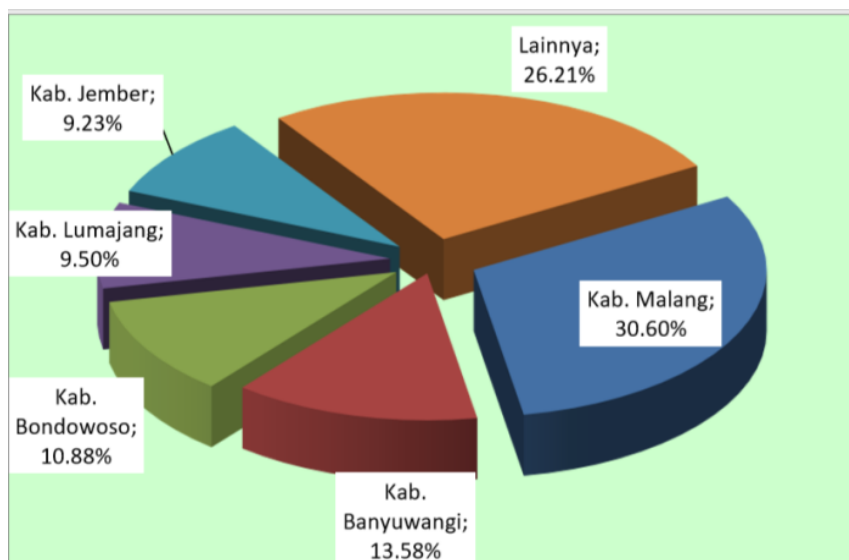
Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif Miled dan Huberman. Menurut Miled dan Huberman dalam Pawito (2007) teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta pengujian kesimpulan (*drawing ang verifying conclusions*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Potensi Kopi Dampit

Produksi kopi robusta dengan wujud produksi kopi berasan dari perkebunan rakyat di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 sebagian besar berasal dari Kabupaten Malang, berkontribusi mencapai 30,60% atau produksi kopi sebesar 8.393 ton (Gambar 1). Sentra produksi lainnya di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Banyuwangi dengan kontribusi sebesar 13,58% atau 3.724 ton, Kabupaten Bondowoso berkontribusi 10,88% (2.985 ton), Kabupaten Lumajang sebesar 9,50% (2.605%), dan Kabupaten Jember sebesar 9,23% (2.532 ton). Secara lengkap data kabupaten sentra produksi kopi robusta di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Gambar 1.



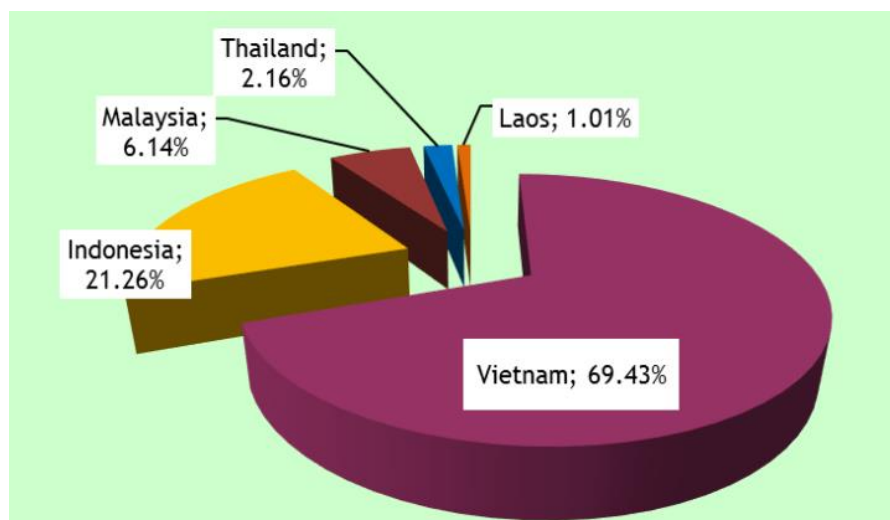
Gambar 1. Kabupaten Sentra Produksi Kopi Robusta Perkebunan Rakyat di Provinsi Jawa Timur, Tahun 2014

Perkembangan harga kopi pada beberapa pasar dalam negeri di Indonesia berdasarkan data BPS tahun 2008-2015, secara umum, harga kopi di Indonesia cenderung meningkat, dengan rata-rata peningkatan sebesar 4,98% per tahun. Dua tahun terakhir harga kopi per kilogramnya terus meningkat, meningkat sebesar 10,24% di tahun 2014 (harga tahun 2013 sebesar Rp. 15.884,- menjadi Rp. 17.510,- di tahun 2014), dan meningkat 9,28% di tahun 2015 menjadi Rp. 19.135,-. Perkembangan volume ekspor kopi Indonesia pada tahun 1980–2015 fluktuatif namun cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,39% per tahun. Jika pada tahun 1980 volume ekspor kopi Indonesia sebesar 238.677 ton dengan nilai ekspor sebesar US\$ 656 juta, maka tahun 2015 volume ekspor meningkat menjadi 502.021 ton atau senilai US\$ 1.198 juta. (Pusdatin, 2016).

Kopi merupakan salah satu produk unggulan tanaman perkebunan di Wilayah Kabupaten Malang. Jenis kopi yang tumbuh subur dan tahan terhadap penyakit saat ini di Wilayah Ampelgading, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo dan Dampit (Amstirdam) adalah Jenis Robusta, Arabica, Exellca dan Liberica. Tanaman perkebunan ini tumbuh subur di ketinggian 300 – 1600 DPL. Kelompok Tani di Wilayah Amstirdam ini rata-rata per kecamatan sebanyak 25-30 kelompok. Sehingga bisa diperkirakan 4 wilayah kecamatan, sebanyak 100-120 kelompok tani. Dengan total area lahan perkebunan kurang lebih 42.000 HA untuk Tanaman Kopi Robusta. Produksi kopi di Wilayah Amstirdam ini dan juga wilayah penghasil kopi di Indonesia, bila dibandingkan dengan wilayah penghasil kopi di negara lain seperti di Vietnam masih cukup rendah. Kopi hasil perkebunan rakyat di Kelompok Tani Amstirdam per hektare rata-rata menghasilkan kopi sebanyak 1 Ton. Padahal di Vietnam bisa mencapai 3 Ton per hektare. Tetapi tentunya banyak faktor yang mempengaruhi hasil produksi kopi di wilayah ini. Selain karena masalah teknis budidaya seperti sistem tanam tumpangsari juga karena perubahan iklim (Madani, 2017). Perlu ada perhatian khusus dari berbagai pihak dalam meningkatkan kuantitas maupun kualitas produk Kopi, salah satunya perlunya pendampingan dari penyuluh, baik penyuluh PNS, Swadaya maupun Swasta.

Jika dilihat berdasarkan rata-rata volume ekspor kopi diantara negara-negara anggota ASEAN, pada tahun 2011-2015 terdapat hanya dua negara yang mampu melakukan ekspor kopi dengan kontribusi di atas 20% terhadap volume ekspor kopi kawasan ASEAN. Kedua negara tersebut adalah Vietnam dan Indonesia (Gambar 2). Pada

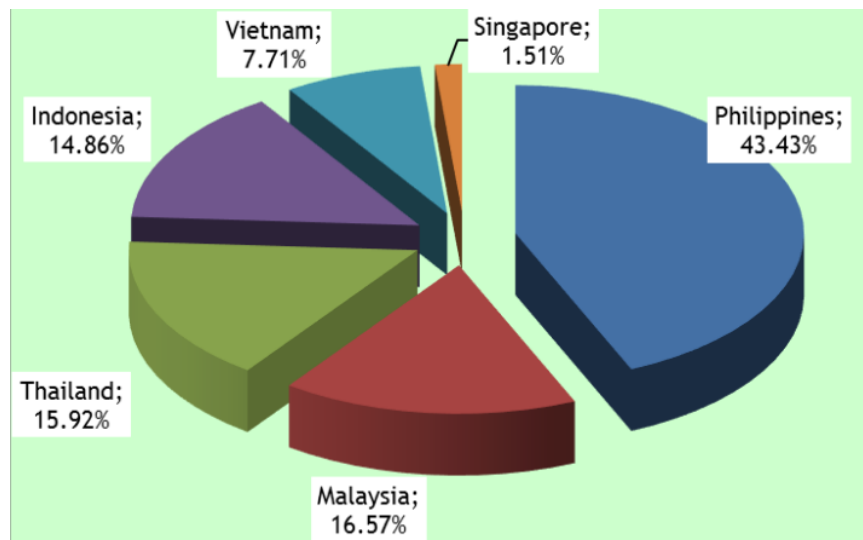
tahun 2011-2015, menurut USDA, Vietnam telah mengekspor kopi per tahun rata-rata mencapai 1.538.592 ton atau 69,43% terhadap volume ekspor kopi dari kawasan ASEAN. Sementara di tahun yang sama, Indonesia tercatat mampu mengekspor rata-rata sebesar 471.240 ton per tahun atau 21,26% dari volume ekspor kopi negara-negara anggota ASEAN. Kedua negara tersebut secara rata-rata pada periode tahun 2011-2015 berkontribusi 90,69% dari total volume ekspor kopi di kawasan ini.



Gambar 2. Negara-negara Eksportir Kopi Terbesar di Kawasan ASEAN, Rata-rata Tahun 2011-2015

Adapun untuk negara importir kopi terbesar di kawasan ASEAN pada periode tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Gambar 3. Berdasarkan data USDA, selama periode 2011-2015, Filipina tercatat sebagai negara terbesar dalam melakukan impor kopi dibandingkan negara-negara lain di kawasan ini. Filipina pada tahun 2015 melakukan impor kopi hingga mencapai 227.400 ton. Secara rata-rata, selama tahun 2011 sampai 2015 Filipina telah melakukan impor kopi sebesar 193.440 ton atau 43.43% dari total impor kopi di ASEAN. Negara ASEAN lain yang melakukan impor kopi dengan kontribusi di atas 10% pada periode yang sama adalah Malaysia dengan jumlah impor kopi rata-rata mencapai 73.800 ton (16,57%), Thailand rata-rata mengimpor sebesar 70.920 ton (15,92%), Indonesia meski tercatat sebagai salah satu eksportir kopi terbesar di kawasan ini, namun disisi lain juga tercatat sebagai negara importir kopi terbesar keempat di

ASEAN. Rata-rata volume impor kopi Indonesia mencapai 66.180 ton (14,86%). Vietnam dan Singapore juga melakukan impor kopi, namun tidak sampai 10%, yakni rata-rata sebesar 34.344 ton (7,71%) dan 6.720 ton (1,51%).



Gambar 3. Negara-negara Importir Kopi Terbesar di Kawasan ASEAN, Rata-rata Tahun 2011-2015

Berdasarkan data tersebut dijelaskan bahwa Indonesia merupakan Negara peng ekspor nomor dua setelah vietnam dikawasan ASEAN dan peng impor kopi nomor empat dikawasan ASEAN. Data ini menjadi menarik untuk diperhatikan bahwa indonesia selain peng ekspor akan tetapi peng impor juga, hal ini menjadi pertanda ada masalah dalam produksi kopi di Indonesia. Hasil diskusi dengan petani dampit Kab. Malang, salah satu penyebab terjadinya impor kopi adalah sulitnya pasokan kopi yang berkualitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Petani kopi lebih senang memproduksi kopi asalan atau tanpa memperhatikan kondisi buah kopi pada saat panen, dikarenakan tidak ribet namun masih laku untuk dijual. Petani melakukan penjualan kopi ke tengkulak yang tidak memperhatikan kualitas, para tengkulak hanya mendampingi petani kopi pada sebatas modal dan pasar saja, yang pada akhirnya para petani dipermainkan harganya oleh para tengkulak kopi.

Potensi Strategis Penyuluh Swadaya dalam Penyuluhan Pertanian Pada Petani Kopi di Wilayah Amstirdam Kabupaten Malang

Kondisi penyuluhan pertanian semakin lama semakin terpuruk, dengan munculnya Otonomi daerah peran penyuluh sangat tergantung kondisi politik diwilayah masing-masing. Setelah berjaya dengan adanya Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan yang mengakibatkan lahirnya lembaga-lembaga penyuluhan di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten, maka dengan undang-undang pemerintah daerah kejayaan itu menurun kembali, sehingga para penyuluh pertanian PNS harus kembali kepangkuan Dinas teknis. Kondisi ini berdampak jumlah PNS yang semakin berkurang dengan luasan wilayah dan jumlah kelompok tani yang harus dibina, dikarenakan pengangkatan penyuluh PNS sangat terganjng kebijakan pemerintah daerah, kondisi ini menjadi potensi yang strategis penyuluh swadaya dalam penyuluhan pertanian sangat besar. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Potensi Strategis penyuluh swadaya sangat besar, adapun potensi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang No. 16 tahun 2006

Undang-undang No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Salah satu sisinya adalah tidak hanya melibatkan petani sebagai objek, namun juga sebagai subjek penyuluhan, yakni dengan mengangkat peran penyuluh swadaya dari kalangan petani itu sendiri. Undang-undang tersebut membagi penyuluh menjadi tiga bagian, yaitu penyuluh PNS, Penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta (Republik Indonesia, 2006). Penyuluh Swadaya dari segi Undang-Undang memiliki kekuatan hukum, sehingga menjadi potensi yang sangat baik dalam mengembangkan penyuluhan pertanian.

b. Kemampuan Petani dalam bidang teknologi Pertanian

Kemampuan petani dalam bidang teknologi pertanian semakin baik, sehingga kemampuan petani lebih baik dikarenakan petani lebih mendalami dan melakukan kajian-kajian secara mandiri mengenai usaha taninya. Hal ini menyebabkan petani akan mudah menjelaskan teknologi yang akan dikenalkan kepada masyarakat, dikarenakan teknologi tersebut sudah dilaksanakan sendiri oleh penyuluh swadaya tersebut, sehingga akan meningkatkan kredibilitas penyuluh sebagai komunikator.

c. Sosial Budaya

Penyuluh swadaya merupakan petani yang sukses dan mau melakukan penyuluhan, oleh karena itu petani yang menjadi penyuluh swadaya tersebut merupakan warga atau masyarakat setempat, sehingga dari segi sosial budaya penyuluh tersebut sudah memiliki potensi pemahaman yang kuat sebagai dasar untuk melakukan pendekatan kepada petani disekitarnya, supaya tidak terjadi konflik yang disebabkan oleh kondisi sosial budaya. Dampaknya ketika petani ingin menjadi penyuluh swadaya harus memiliki reputasi yang baik dimata masyarakat, sehingga tidak menghambat proses penyuluhan.

d. Kemampuan Petani dalam memasarkan Produk

Petani sukses biasanya memiliki akses yang baik terhadap pemasaran, sehingga hal ini menjadi potensi yang baik sebagai seorang penyuluh swadaya dalam memberdayakan petani berdasarkan kondisi pasar, yang pada akhirnya dapat menekan kerugian ditingkat petani. Kasus di Amstirdam bahwa eksportir kopi bekerjasama dengan penyuluh untuk melakukan pendampingan dan pemberdayaan yang dibiayai eksportir dan LSM.

e. Dukungan Sektor pemerintahan dan swasta

Petani yang dijadikan tokoh atau penyuluh swadaya, biasanya memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, dan biasanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah atau swasta ditingkat petani, sehingga dukungan sektor pemerintahan dan sektor swasta dapat menguntungkan petani dalam membangun usahanya. Tidak jarang penyuluh swadaya menjadi pengganti penyuluh PNS dalam melakukan penyuluhan dan pendampingan dan berkolaborasi dengan pihak swasta dalam melakukan penjaminan produk.

f. Kemampuan Petani dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kondisi pada saat ini penggunaan HP android oleh para petani khususnya oleh para tokoh petani sudah banyak digunakan, sehingga akses terhadap informasi dan berkomunikasi dengan dunia luar sangat mudah. Kemudahan akses tersebut digunakan oleh para petani dalam mencari teknologi dan inovasi, membangun jejaring dan

pemasaran. Petani kopi dampit sudah terbiasa menjual kopi keluar provinsi dengan mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut bisnis online pertanian.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa potensi penyuluh swadaya sangat strategis dalam pengembangan penyuluhan pertanian kedepan. Hasil penelitian Peran penyuluh swadaya yang dominan memberikan pengaruh dalam pemberdayaan petani adalah sebagai fasilitator, penganalisis lingkungan, pendamping petani, dan motivator. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran penyuluh swadaya cukup efektif dalam membantu petani memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk usahataniannya, meningkatkan kerjasama diantara petani, dan mampu memilih inovasi yang sesuai dengan spesifik lokasi atau menerapkan inovasi lokal yang ada di wilayahnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peran penyuluh sangat efektif dalam melakukan penyuluhan namun dari segi perhatian pemerintah penyuluh swadaya hanya sebagai pelengkap dari sistem penyuluhan. Program penyuluhan masih di dominasi oleh penyuluh PNS dan pandangan publik terhadap penyuluhan adalah penyuluh PNS. Peran penyuluh swadaya kedepan akan semakin berkembang dan akan menjadi ujung tombak penyuluhan (Haryanto, Sumardjo, Amanah, & Tjitropranoto, 2017). Jenis penyuluh ini melakukan kegiatan penyuluhan dengan motivasi sosial, pelayanan, namun sekaligus bisnis. Banyak penyuluh swadaya yang memiliki bisnis berupa penyedia sarana produksi, serta menampung dan memasarkan hasil pertanian. Sehingga, penyuluh swadaya sesungguhnya menyuluhkan teknologi baru kepada mitra bisnisnya sendiri. Jadi, dalam prakteknya, sosok penyuluh PNS dan swasta saling konvergen dalam diri penyuluh swadaya. Pendekatan dan strategi penyuluhan dari tahun ke tahun mengalami perubahan dari mulai periode bimas sampai pada jaman otonomi daerah (Syahyuti, 2014).

KESIMPULAN

Kompetensi penyuluh swadaya sangat kompeten dalam mendampingi petani kopi maupun dalam berkolaborasi dengan pemerintah maupun swasta. Potensi strategis dari penyuluh swadaya yakni dilindungi Undang-Undang No. 16 tahun 2006, Kemampuan Petani dalam bidang teknologi Pertanian, Sosial Budaya, Kemampuan Petani dalam

memasarkan Produk, Dukungan Sektor pemerintahan dan swasta dan Kemampuan Petani dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kemampuan membina petani dengan dengan berbagai pendekatan yang sering juga dilakukan oleh penyuluh PNS maupun penyuluh swasta.

DAFRAT PUSTAKA

- Aditya. (2018). Pasar Ekspor Kopi Asal Malang Masih Terbuka Lebar. Retrieved January 22, 2018, from <http://agro.kemenperin.go.id/5216-Pasar-Ekspor-Kopi-Asal-Malang-Masih-Terbuka-Lebar>
- Haryanto, Y., Sumardjo, Amanah, S., & Tjitropranoto, P. (2017). Efektivitas Peran Penyuluh Swadaya dalam Pemberdayaan Petani di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, 20(2), 141–154.
- Pawito. 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Lkis: Yogyakarta
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, 03 (2018). Jakarta.
- Pusdatin. (2016). *Outlokk Kopi 2016*. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI tentang Sitem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan., 16 Kementerian Pertanian &(2006). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Syahyuti. (2014). Peran Strategis Penyuluh Swadaya dalam Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 32(1), 43–58.

PERENCANAAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN UNTUK MENGOPTIMALKAN KUALITAS PETANI TEMPATAN DALAM MENGELOLA LAHAN SAWAH BARU DI KABUPATEN LINGGA

MUHAMAD REZA^{1*}

¹Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang

*Email: rezaumsb@gmail.com /muhammadreza@umsb.ac.id

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Lingga pada tahun 2017 melaksanakan program cetak sawah di 13 desa dengan total luasan yang diajukan 1500 Ha. Adapun perkiraan jumlah petani penggarap yang dibutuhkan sebanyak 750 orang jika 1 orang petani menggarap 2 Ha lahan sawah baru atau 1500 orang jika 1 orang petani menggarap 1 Ha lahan sawah baru. Faktanya, calon petani yang tersedia di daerah tersebut adalah masyarakat nelayan dan petani kebun yang belum mengetahui dan memahami menjalankan usahatani padi sawah. Untuk membekali kompetensi calon petani tersebut, dibutuhkan program pendidikan luar sekolah melalui penyuluhan pertanian. Supaya pelaksanaan penyuluhan pertanian dapat berjalan dengan baik, perlu terlebih dahulu disusun perencanaan penyuluhan pertanian. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk menyusun perencanaan penyuluhan pertanian untuk mengoptimalkan kualitas calon petani padi sawah di Kabupaten Lingga. Penelitian ini dilakukan selama satu bulan terhitung semenjak tanggal 1 s.d. 31 April 2019. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Lingga. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Informan penelitian sebanyak 17 orang terdiri dari penyuluh pertanian pada 7 lokasi cetak sawah baru, 1 orang kepala bidang, 1 orang kasi penyuluhan, 1 orang kepala dinas, dan 7 orang pengurus kelompok tani. Keseluruhan informan ditetapkan dengan teknik purposif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, FGD, dokumentasi, dan observasi. Data dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif melalui alat analisisnya teknik interperatif dan sintesis. Kesimpulan yang didapatkan untuk menghasilkan petani padi sawah yang unggul, dibutuhkan program peningkatan kompetensi petani berupa pembekalan, pelatihan, percontohan, dan pendampingan secara simultan oleh tenaga penyuluhan pertanian yang memang memiliki kompetensi handal dalam bidang pertanian padi sawah. Hal ini dikarenakan seluruh calon petani penggarap bukanlah petani padi sawah dan mayoritas belum berpengalaman dalam menjalankan usahatani padi sawah.

Kata kunci: kompetensi petani, pendidikan luar sekolah, program penyuluhan pertanian, calon petani.

PENDAHULUAN

Kabupaten Lingga merupakan salah satu wilayah administratif dari Provinsi Kepulauan Riau. Pada wilayah tersebut, pemenuhan kebutuhan beras masyarakat dipasok dari Batam, Jambi dan Tanjungpinang. Pasokan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha dan pemerintah yang didatangkan setiap minggu melalui kapal perintis atau kapal cepat. Untuk produksi beras lokal, daerah Kabupaten Lingga belum memiliki lahan sawah produktif yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Melihat kondisi ketergantungan daerah ini terhadap beras pada wilayah di luar Kabupaten Lingga sangat tinggi, maka pemerintah setempat semenjak tahun 2016 telah melakukan program pembangunan pertanian dalam bentuk Program Cetak Sawah Baru. Program tersebut didanai oleh pemerintah pusat melalui dana APBN. Adapun target yang ingin dicapai pemerintah setempat adalah tercetaknya sawah baru sekitar ± 1.500 Ha.

Dalam hal ini sawah baru dipahami sebagai sawah yang baru dicetak / dikonstruksi dan belum mengalami pembentukan lapisan tapak bajak (*plow layer*) yang terpenuhi kebutuhan airnya dari sumber air setempat (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 2018). Program cetak sawah baru yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lingga bertujuan untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan masyarakat khususnya pada komoditas beras. Melalui program ini diharapkan pasokan beras untuk masyarakat Kabupaten Lingga dapat terpenuhi dari dalam daerah sebesar 90 % s.d 95%.

Melihat begitu luasnya sawah baru (± 1.500 Ha) yang akan dicetak di Kabupaten Lingga, mengindikasikan kebutuhan Sumber Daya Manusia Pertanian (petani) sebagai pelaku utama cukup banyak. Bila diasumsikan untuk 1 Ha lahan sawah baru dikelola oleh 1 orang petani/1 rumah tangga petani, maka jumlah petani yang dibutuhkan adalah 1.500 orang. Dapat saja jumlah kebutuhan petani dikurangi menjadi 2 Ha/orang petani, maka jumlah kebutuhan petaninya sebanyak 750 orang dengan catatan tersedianya teknologi pengelolaan usahatani padi sawah tersedia cukup untuk setiap petani.

Namun demikian, calon pelaku utama (petani) yang tersedia di Kabupaten Lingga saat ini berada dalam kondisi yang belum memiliki kualitas baik sebagai petani padi sawah. Hasil survei yang dilakukan oleh tim SED dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau bekerjasama dengan tim LPPM Unand,

membuktikan bahwa kualitas dari calon petani penggarap lahan sawah baru berada pada penilaian kurang memenuhi standar (DKPPKH & LPPM UNAND, 2017).

Untuk menghasilkan kualitas calon petani yang dapat menjalankan usahatani padi sawah dengan baik, sehingga tujuan program ini dapat tercapai, maka dibutuhkan program pendamping berupa pendidikan pembangunan pertanian atau penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pelaku utama (petani) dan pelaku usaha pertanian melalui proses pendidikan luar sekolah (non formal) yang difasilitasi oleh penyuluh pertanian. Penyuluhan pertanian dapat juga menjadi syarat pelancar pembangunan pertanian, komunikasi untuk inovasi pedesaan, dan proses pemberdayaan petani dalam pembangunan pertanian (Mardikanto, 2009; Leeuwis, 2009).

Penyuluhan pertanian bertujuan untuk menciptakan perbaikan terhadap pelaku utama pembangunan pertanian yaitu petani, baik perubahan yang bersifat teknis, pengelolaan dan kualitas hidupnya kearah yang sesuai dengan standar kesejahteraan (Mardikanto, 2009). Supaya dapat terlaksananya kegiatan penyuluhan pertanian untuk mencapai tujuannya, dibutuhkan perencanaan program yang baik. Hal ini dikarenakan perencanaan program penyuluhan pertanian bermuara pada pemilihan terhadap prioritas kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian yang sesuai dan diberikan kepada pelaku utama pembangunan pertanian atau petani baik bersifat individu maupun kelompok (Madarisa *et al*, 2018).

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian umumnya mengacu pada dokumen perencanaan program penyuluhan pertanian yang dikenal dengan nama Program Penyuluhan Pertanian (RI, 2016). Melalui perencanaan, penyuluh pertanian diharapkan dapat mengorganisir pengambilan keputusan tentang situasi, masalah, tujuan, memanfaatkan sumberdaya, menyusun skenario program dan kegiatan dan cara mencapai tujuan penyuluhan pertanian (Dirlanudin, 2011; Suparta, Sutrisna & Nuraini, 2009).

Perencanaan program penyuluhan pertanian dapat disusun dari kondisi yang ada saat ini dan permasalahan yang akan diselesaikan melalui kegiatan penyuluhan pertanian. Untuk mencapai tujuan penyuluhan pertanian, dibutuhkan perencanaan program penyuluhan yang disusun secara cermat dengan mempertimbangkan potensi daerah, potensi dan kebutuhan masyarakat dan peran kelembagaan sosial ekonomi yang berkembang diwilayah tersebut. Adanya kelembagaan sosial eknomi seperti kelompok

nelayan dan lembaga perkreditan desa sangat mendukung pelaksanaan program penyuluhan di desa tersebut (Amanah, 2003).

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian, diantaranya adalah a) Bagaimana kondisi eksisting calon pelaku utama padi sawah di Kabupaten Lingga ?; b) Seperti apa rencana program penyuluhan pertanian di Kabupaten Lingga ? Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini diantaranya adalah a) Mengidentifikasi dan mendeskripsikan kondisi eksisting calon pelaku utama pertanian padi sawah sebagai bahan penyusunan perencanaan program penyuluhan pertanian; b) Merumuskan rencana program penyuluhan pertanian untuk mengoptimalkan kualitas petani tempatan di Kabupaten Lingga.

Untuk menjawab tujuan dari penelitian ini perlu terlebih dahulu dipahami tentang perencanaan program penyuluhan pertanian atau lebih dikenal dengan program penyuluhan pertanian. program penyuluhan pertanian merupakan rencana yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Program penyuluhan pertanian yang disusun setiap tahun memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran pada masing-masing tingkatan dengan cakupan pengorganisasian, pengelolaan sumberdaya sebagai pelaksanaan penyuluhan. Program penyuluhan pertanian merupakan suatu bentuk rencana kegiatan penyuluhan pertanian, yang berisikan unsur-unsur keadaan, tujuan, masalah dan cara mencapai tujuan, dan disusun dalam bentuk sistematika yang teratur. Secara skematis, tahapan-tahapan penyusunan program penyuluhan pertanian yaitu; a. identifikasi masalah; b. penetapan tujuan; c. merumuskan cara mencapai tujuan; d. menetapkan keinginan masa depan; e. mengidentifikasi masa sekarang; f. pemetaan keadaan aktual dan potensi; dan g. kembali lagi kepada pengidentifikasian masalah (RI, 2016; Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian, 2003).

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan selama satu bulan terhitung semenjak tanggal 1 s.d. 31 April 2019. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif. Dilihat dari

jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian deskriptif. Secara umum, penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lingga yang difokuskan pada 7 lokasi cetak sawah baru yang tersebar di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Lingga Timur, Lingga Utara, Singkep Pesisir, dan Senayang. Lokasi tersebut ditetapkan dengan teknik purposif yaitu penetapan wilayah penelitian secara sengaja melalui pertimbangan bahwa keempat kecamatan tersebut merupakan wilayah cetak sawah baru yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lingga. Informan penelitian sebanyak 17 orang terdiri dari penyuluh pertanian pada 7 lokasi cetak sawah baru, 1 orang kepala bidang, 1 orang kasi penyuluhan, 1 orang kepala dinas, dan 7 orang pengurus kelompok tani. Keseluruhan informan ditetapkan dengan teknik purposif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, FGD, dokumentasi, dan observasi. Fokus data penelitian ini diantaranya adalah a) kondisi eksisting calon pelaku utama pertanian padi sawah, dimana sub fokus datanya yaitu: kondisi demografi, pengalaman, pengetahuan dan keterampilan calon pelaku utama dalam menjalankan usahatani padi sawah; b) rumusan rencana program penyuluhan pertanian. Data dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif melalui alat analisisnya teknik interperatif dan sintesis. Dalam menyajikan hasil dan pembahasan digunakan pendekatan deskriptif analitik dan dibantu oleh teknik tabulasi data kualitatif (Arikunto, 2010; Moleong, 2010; Ali, 2011; Santana, 2007; Satori & Komariah, 2011; Creswell, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Eksisting Calon Pelaku Utama Pertanian Padi Sawah di Kabupaten Lingga.

Petani merupakan kompinen terpenting dalam pelaksanaan program cetak sawah baru di Kabupaten Lingga. Petani tersebut dikenal dengan nama calon pelaku utama dalam program tersebut. Untuk dapat menghasilkan calon pelaku utama (petani) yang berkualitas, dibutuhkan program pendidikan pembangunan yang dikenal dengan nama penyuluhan pertanian. Seluruh kegiatan penyuluhan pertanian dilaksanakan berdasarkan program penyuluhan pertanian yang telah disusun oleh penyuluh pertanian di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Legalitasnya dapat melalui kelembagaan penyuluhan pertanian yang ada di wilayah tersebut, seperti Dinas Pertanian atau di tingkat kecamatan melalui Balai Penyuluhan Pertanian.

Perencanaan program penyuluhan pertanian dapat tersusun dengan baik, jika ada data dan informasi terbaru terkait objek yang direncanakan. Dalam hal ini perencanaan program penyuluhan pertanian difokuskan pada pengoptimalan kualitas calon pelaku utama (petani) yang akan menggarap lahan sawah baru di Kabupaten Lingga. Adapun data dan informasi yang dibutuhkan pertama yaitu kondisi demografi calon pelaku utama di lokasi cetak sawah baru. Melalui Tabel 1 berikut ini dapat terlihat gambaran keadaan demografinya.

Tabel 1. Kondisi Demografi Calon Pelaku Utama (Petani) Penggarap Sawah Baru di Kabupaten Lingga.

No	Aspek	Indikator	Kondisi Eksisting	Interpretasi
1.	Umur	≤ 17 thn	-	Mayoritas responden masih berada pada usia produktif. Kondisi ini menandakan masih tersedianya tenaga kerja produktif di daerah ini.
		18-35 thn	x	
		36-56 thn	√	
		≥ 57 thn	x	
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki	√	Mayoritas calon pelaku utama (petani) adalah laki-laki yang diberi kode “√” dan sebagian kecil perempuan dengan kode “x”.
		Perempuan	x	
3.	Tingkat Pendidikan	Rendah	√	Mayoritas tingkat pendidikan calon petani adalah rendah (√) yaitu tidak tamat SD dan tamat SD, hanya sebagian kecil saja yang berpendidikan sedang dan tinggi (x).
		Sedang	x	
		Tinggi	x	
4.	Tingkat Pendapatan	< 1 jt/bln	√	Umumnya pendapatan calon petani masih rendah (√) dan tidak ada berpendapatan di atas 3 jt/bln yang mengindikasikan adanya permasalahan permodalan.
		1-3 jt/bln	x	
		> 3 jt/bln	-	
5.	Status Perkawinan	Belum kawin	x	Umumnya calon petani telah menikah, artinya mereka telah memiliki tanggungan ekonomi keluarga.
		Kawin	√	
		Janda	-	
		Duda	-	
6.	Pekerjaan	Petani padi sawah	x	Mayoritas responden bukanlah petani padi sawah. Jika pun ada, hanya sebagian kecil dari total calon pelaku utama yang menjalani usahatani padi sawah. Hal ini memperlihatkan bahwa calon pelaku utama belum memiliki pengalaman dalam berusaha padi sawah.
		Petani Kebun	√	
		Nelayan	x	
		Buruh	x	
		Tidak bekerja	-	
		Lain-lain	x	
7.	Jumlah Anak	≤ 1 orang	x	Umumnya jumlah anak calon pelaku utama 2-5 orang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa mereka memiliki banyak pengeluaran untuk kebutuhan ekonomi keluarga.
		2-5 orang	√	
		≥ 6 orang	-	

Sumber: Hasil sintesis wawancara informan dan FGD, 2019.

Selain kondisi demografi, dibutuhkan juga informasi dan data tentang pengalaman calon pelaku utama (petani) dalam menjalankan usahatani padi sawah. Merujuk pada konsep pendidikan orang dewasa, pengalaman menjadi guru terbaik oleh calon petani dalam menjalankan usahatani padi sawah. Fakta tentang pengalaman calon pelaku utama dalam menjalankan usahatani padi sawah dapat terlihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Pengalaman Calon Pelaku Utama (Petani) Dalam Menjalankan Usahatani Padi Sawah di Kabupaten Lingga.

No	Aspek	Indikator	Kondisi Eksisting	Interpretasi
1.	Pengalaman Bertani Padi Sawah	0 s.d 1 thn	-	Umumnya calon pelaku utama (petani) yang memiliki pengalaman usahatani padi sawah adalah masyarakat transmigrasi. Mereka mendapatkan pengalaman tersebut dikampung halamannya. Namun demikian, tidak banyak (dikode "x") dari mereka yang memiliki pengalaman usahatani padi sawah.
		> 1 thn s.d 3 thn	x	
		> 3 thn	x	
2.	Bertani padi sawah sebagai	Pekerjaan utama	x	
		Sampingan	-	
		Serabutan	-	
3.	Pola Tanam	Monokultur	x	
		Tumpang sari	x	

Sumber: Hasil sintesis wawancara informan dan FGD, 2019.

Sebagai calon pelaku utama (petani) dalam menggarap lahan sawah baru, perlu juga memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang usahatani padi sawah. Adapun kondisi atau gambaran pengetahuan dan keterampilan calon pelaku utama (petani) dalam usahatani padi sawah, dapat terlihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Kondisi Eksisting Pengetahuan Calon Pelaku Utama (petani) dalam Menjalankan Usahatani Padi Sawah di Kabupaten Lingga.

No	Pernyataan Penting	Kondisi Eksisting					
		Pengetahuan			Keterampilan		
		Kurang	Cukup	Tinggi	Kurang	Cukup	Tinggi
1.	Mengolah tanah/ membajak	-	√	-	-	√	-
2.	Benih unggul	√	-	-	√	-	-
3.	Menyemai benih	-	√	-	-	√	-
4.	Cara menanam yang benar	√	-	-	√	-	-
5.	Pengairan sawah	√	-	-	√	-	-
6.	Mmenyiangi gulma	-	√	-	-	√	-
7.	Mengenal jenis hama/penyakit	√	-	-	√	-	-
8.	Mengatasi serangan hama/penyakit	√	-	-	√	-	-
9.	Berbagai jenis pupuk	√	-	-	√	-	-
10.	Dosis dan cara memupuk	√	-	-	√	-	-
11.	Cara memanen padi sawah	-	√	-	-	√	-

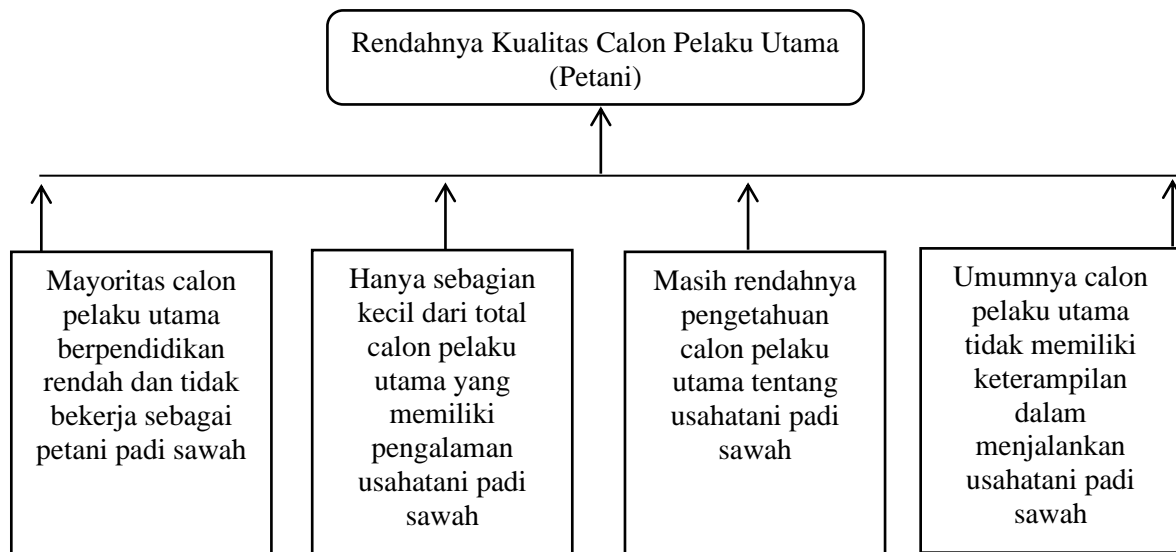
Sumber: Hasil sintesis wawancara informan dan FGD, 2019.

Mengacu pada data di Tabel 3 di atas, terlihat bahwasannya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh calon pelaku utama di Kabupaten Lingga berada pada kondisi masih kurang. Artinya, calon petani yang ada di daerah ini masih membutuhkan peningkatan kualitas dalam menjalankan usahanya.

B. Rumusan Rencana Program Penyuluhan Pertanian untuk Mengoptimalkan Kualitas Petani Padi Sawah Tempatan.

Perencanaan program penyuluhan pertanian yang dikenal dengan nama Program Penyuluhan Pertanian merupakan suatu proses pengambilan keputusan melalui analisis kritis situasi eksisting dan masalah yang dihadapi, mengevaluasi berbagai alternatif untuk memecahkan masalah-masalah, menentukan prioritas penting berdasarkan kebutuhan dan sumberdaya lokal dengan usaha kerjasama baik pegawai maupun non-pegawai dengan tujuan memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan individu dan masyarakat (Lestari *et al*, 2000). Menurut Setiana (2005) Perencanaan program penyuluhan adalah sesuatu yang harus dilakukan, karena untuk mencapai keberhasilan dari program maka fakta-fakta di lapangan perlu diketahui, dihubungkan dan ditarik asumsi-asumsi. Dirlanudin (2011) perencanaan program penyuluhan merupakan proses pengambilan keputusan yang menghasilkan suatu pernyataan tertulis mengenai situasi, masalah tujuan dan cara mencapai tujuan untuk mengubah perilaku kelayan ke arah kehidupan yang lebih baik.

Mengacu pada pemahaman tentang perencanaan program penyuluhan pertanian di atas, terlihat bahwasannya titik masuk untuk dapat merumuskan rencana program penyuluhan pertanian adalah permasalahan yang dihadapi dan yang akan diselesaikan melalui penyuluhan pertanian. Melalui Gambar 1 di bawah ini dapat terlihat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan calon pelaku utama (petani) dalam program cetak sawah baru di Kabupaten Lingga.



Gambar 1. Pohon Masalah Terkait Calon Pelaku Utama (Petani) untuk Menjalankan Program Cetak Sawah Baru di Kabupaten Lingga

Berdasarkan pohon masalah di atas, terlihat bahwasannya permasalahan yang dihadapi terkait kualitas calon pelaku utama (petani) di Kabupaten Lingga cukup menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan pelaku utama menjadi ujung tombak keberhasilan pencapaian tujuan program cetak sawah baru yang diselenggarakan oleh pemerintah. Untuk mengatasi permasalahan di atas, dapat dirumuskan rencana program dan kegiatan penyuluhan pertanian untuk menghasilkan calon pelaku utama (petani) yang berkualitas. Melalui Tabel 4 di bawah ini dapat terlihat rencana program dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas calon pelaku utama (petani) di Kabupaten Lingga.

Tabel 4. Matriks Rencana Program dan Kegiatan Penyuluhan Pertanian untuk Meningkatkan Kualitas Calon Pelaku Utama (Petani) di Kabupaten Lingga

No	Keadaan	Tujuan	Program	Sasaran	Kegiatan Penyuluhan				
					Materi	Metode	Volume	Sumber Biaya	Penanggung Jawab
1.	Pendidikan calon petani masih rendah.	Meningkatkan kualitas pendidikan calon pelaku utama.	Peningkatan kualitas pendidikan calon pelaku utama.	Calon pelaku utama (petani) yang terdaftar di Dinas Pertanian Kab. Lingga.	Kejar Paket Pendidikan Formal (A, B, C)	Pendidikan formal luar sekolah.	Disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku	APBD/ APBN	Dinas pendidikan.
2.	Pekerjaan utama bukan petani padi sawah.	Mengalihkan pekerjaan utama calon pelaku utama ke usahatani padi sawah.	Rekayasa sosial terkait pengalihan pekerjaan utama calon petani.	Calon pelaku utama (petani) yang terdaftar di Dinas Pertanian Kab. Lingga.	Motivasi dan pemberdayaan masyarakat	Bimtek dan gerakan	2 kali/bln	APBD/ APBN	Penyuluh Pertanian, Dinas Tenaga kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa.
3.	Rendahnya pengalaman usahatani padi sawah.	Meningkatkan pengalaman usahatani padi sawah.	Peningkatan pengalaman usahatani padi sawah.	Calon pelaku utama (petani) yang terdaftar di Dinas Pertanian Kab. Lingga.	Belajar dengan pengalaman petani padi yang telah sukses	Anjang sana, Magang, Temu usaha	3 kali/thn	APBD/ APBN	Dinas Pertanian/ Penyuluh Pertanian
4.	Rendahnya pengetahuan tentang usahatani padi sawah.	Meningkatkan pengetahuan tentang usahatani padi sawah.	Peningkatan pengetahuan tentang usahatani padi sawah.	Calon pelaku utama (petani) yang terdaftar di Dinas Pertanian Kab. Lingga.	Pendidikan tentang input produksi, pengolahan lahan, hama penyakit, pengairan, panen, pasca panen, dan pemanfaatan teknologi.	Sekolah lapangan dan pertemuan	1 kali/minggu	APBD/ APBN	Dinas Pertanian/ Penyuluh Pertanian
5.	Tidak terampilnya calon petani dalam menjalankan usahatani padi sawah.	Meningkatkan keterampilan calon petani dalam menjalankan usahatani padi sawah.	Peningkatan keterampilan calon petani dalam menjalankan usahatani padi sawah.	Calon pelaku utama (petani) yang terdaftar di Dinas Pertanian Kab. Lingga.	Peningkatan keterampilan tentang input produksi, pengolahan lahan, hama penyakit, pengairan, panen, pasca panen, dan pemanfaatan teknologi.	Bimtek, pelatihan, demplot	1 kali/minggu	APBD/ APBN	Dinas Pertanian/ Penyuluh Pertanian

KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini, bahwa kondisi sumber daya manusia atau calon pelaku utama (petani) yang nantinya akan menggarap lahan pertanian padi sawah baru berada pada keadaan yang masih kurang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program sawah baru. Dilihat dari aspek demografi, hanya dari segi umur dan jenis kelamin yang berada pada kondisi baik, sedangkan tingkat pendidikan, pendapatan,

pekerjaan, belum berada pada kondisi yang sesuai dengan harapan. Begitu juga dengan kondisi pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan, calon pelaku utama (petani) belum berada pada kondisi yang dapat menjalankan usahatani padi sawah secara langsung. Umumnya calon pelaku utama belum memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan dalam menjalankan usaha tani padi sawah. Untuk mengatasi kondisi tersebut, dibutuhkan program penyuluhan pertanian secara berkelanjutan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Adapun program penyuluhan pertanian yang dapat dilaksanakan, diantaranya adalah program peningkatan kompetensi petani berupa pembekalan, pelatihan, percontohan, dan pendampingan secara simultan terkait dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan calon pelaku utama (petani) dalam menjalankan usahatani padi sawah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. 2011. Memahami Riset Prilaku Dan Sosial. Pustaka Cendikia Utama. Bandung.
- Amanah, S. 2003. Perencanaan Program Penyuluhan Perikanan di Desa Anturan, Buleleng, Bali. Buletin Ekonomi Perikanan Vol.V. No.1 Tahun 2003.
- Arikunto, S. 2010. Manajemen Penelitian. Rineka Cipta. Jakarta.
- Creswell, J.W. 2009. Research Design Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods Approaches. Los Angeles: Sage Publications.
- Dirlanudin. 2011. Perencanaan Program Penyuluhan Kewirausahaan (Pada Pengusaha Mikro Industri Garmen Di Kelurahan Sukawana Kabupaten Serang Provinsi Banten). Jurnal Ilmiah Niagara, Vol 2 No. 1, Januari 2011.
- DKPPKH & LPPM UNAND. 2017. Laporan Akhir Buku 2 Hasil Survei dan Investigasi Kondisi Sosial Ekonomi Calon Petani di Kabupaten Lingga. Tidak dipublikasikan. Tanung Pinang.
- Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian. 2003. Petunjuk Teknis Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Jakarta.
- Leeuwis, C. 2009. Komunikasi Untuk Inovasi Pedesaan Berfikir Kembali tentang Penyuluhan Pertanian. Kanisius. Yogyakarta.
- Lestari SB, et al. 2000. Manajemen dan Komunikasi Penyuluhan. Dipakai untuk Kalangan Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian (PKP) Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Madarisa, F., Anas, A., Reza, M. Anwar, S. 2018. Pengantar Ilmu Penyuluhan Pertanian. Andalas University Press. Padang.
- Mardikanto, T. 2009. Sistem Penyuluhan Pertanian. Sebelas Maret University Press. Surakarta.

- Moleong, L.J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- RI, 2016. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1477 Tahun 2016. Jakarta.
- Santana K.S. 2007. Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Satori. D & Komariah. A. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung.
- Setiana, L. 2005. Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat. Ghalia Indonesia. Bogor.

PERAN PENYULUH DALAM PENGEMBANGAN ENERGI SOSIAL BUDAYA KREATIF DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR HUTAN LINDUNG

Adi Firmansyah^{1*}, Sumardjo²,

¹ Pusat Kajian Resolusi Konflik, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
Institut Pertanian Bogor, Bogor 16144

² Departemen Sains dan Komunikasi Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB

³ Sekolah Pascasarjana IPB, Dramaga, Bogor, 16680

*Email: adifirman@apps.ipb.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan minat masyarakat terhadap kopi ternyata menjadi peluang bagi pengembangan kopi rakyat, namun dihadapkan pada kesiapan masyarakat meraih peluang tersebut. Tantangan bagi penyuluh untuk mengembangkan kopi rakyat secara partisipatif melalui penguatan kapital sosial. Salah satu alternatif solusi untuk keberlanjutan usaha kopi rakyat adalah dengan rekayasa sosial partisipatif berupa pengembangan energi sosial budaya kreatif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran ideal penyuluh dalam keberlanjutan usahatani kopi. Metoda kajian yang digunakan adalah *Participatory Action Research* dengan menempatkan peneliti lapangan yang berperan sebagai penyuluh/fasilitator pemberdaya masyarakat. Data dikumpulkan secara observasi, wawancara mendalam, dan diskusi terfokus (FGD). Lokasi penelitian di kawasan hutan lindung Gunung Puntang, Desa Campaka Mulya Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hasil menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi partisipatif yang difasilitasi penyuluh efektif membangun dialog dalam rekayasa sosial partisipatif diantara para petani. Wujud rekayasa sosial partisipatif tersebut adalah energi sosial budaya kreatif dalam mengembangkan usahatani rakyat. Sinergi komunikasi digital dan penyuluhan kondusif bagi pengembangan keberlanjutan kopi rakyat. Akses *cyber extension* memperkuat dukungan inovasi dalam pemberdayaan usahatani kopi rakyat secara berkelanjutan. Peran ideal penyuluh dalam pemberdayaan masyarakat ternyata adalah mensinergikan komunikasi digital dengan komunikasi konvensional untuk membangun kapital sosial melalui rekayasa sosial partisipatif berupa energi sosial budaya kreatif.

Kata kunci: peran ideal penyuluh, rekayasa sosial, komunikasi partisipatif, energi sosial budaya kreatif, kapital sosial

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pasar kopi dunia masih sangat terbuka namun produktivitas kopi domestik Indonesia rendah dan ada kecenderungan menurun. Indonesia dikenal sebagai penghasil kopi terbaik dunia sejak zaman kolonial. Namun, potensi itu belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik, khususnya sebagai komoditas andalan ekspor. Hal ini disebabkan selain faktor makro dan iklim ternyata tidak luput dari kekurangsiapan kompetensi petani kopi meraih peluang pasar tersebut.

Kecenderungan konsumsi kopi dunia selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Namun, produksi dalam negeri belum mampu mengimbangnya. Konsumsi kopi dunia dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 8,8% per tahun (Heriawan, 2019; ekonomi.bisnis.com). Sebagai contoh, kebutuhan kopi robusta untuk pemenuhan dalam negeri sekitar 11.520 ton atau setara dengan 192.000 karung setiap tahun. Kebutuhan dunia untuk kopi robusta adalah 65 juta karung per tahun dan kebutuhan domestik sekitar 4,8 juta karung. Namun, produksi domestik hanya sekitar 11 juta sampai 11,5 juta karung atau sekitar 650.000 ton sampai 690.000 ton (Heriawan, 2019; ekonomi.bisnis.com). Berdasarkan data tersebut maka terdapat potensi pasar yang besar untuk mengisi kebutuhan kopi, yang salah satunya dapat dipenuhi dari produksi kopi rakyat. Namun demikian, usahatani kopi rakyat seringkali menghadapi masalah terkait dengan pemenuhan volume dan kontinuitas produksi serta kualitas kopi, antara lain karena lemahnya pendampingan terhadap petani kopi rakyat, termasuk di lokasi penelitian ini. Oleh karena itu, sejak tahun 2017, CARE IPB bersama Pertamina EP dan Perhutani mengembangkan program pendampingan bagi petani kopi rakyat di Gunung Puntang, Desa Campaka Mulya. Mengingat tidak ada penyuluh yang berperan sebagai pemberdaya masyarakat dalam meningkatkan kesiapan petani kopi rakyat meraih peluang pasar dunia maka dalam program ini ditempatkan pendamping lapangan yang berperan sebagai penyuluh atau pemberdaya masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi agribisnis petani kopi rakyat.

Menurut Rappaport (1987), pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh control individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-

hak menurut aspek legal yang berlaku. Konsep pemberdayaan tidak terpisah dari pandangan *post-modernisme* yang muncul pada paruh abad ke-20. Pandangan ini menitikberatkan pada sikap dan perspektif yang berorientasi pada jargon antisistem, antistruktur, dan antideterminisme yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan. Konsep pemberdayaan muncul sebagai reaksi terhadap logika, struktur sosial, dan budaya yang ada sebelumnya di suatu kehidupan masyarakat (Pranarka dan Vidhyandika,1996). Pada awalnya, konsep pemberdayaan bertujuan untuk menemukan pilihan-pilihan baru dalam pembangunan masyarakat. Pada dasarnya, proses pemberdayaan dapat dipandang sebagai antitesis terhadap sistem kekuasaan yang absolut, baik dalam aspek intelektual, religious, politik, ekonomi, dan militer. Konsep ini sejalan dengan pandangan fenomenologi, eksistensialisme dan personalisme yang menolak segala bentuk kekuasaan yang bernuansa proses dehumanisasi atas eksistensi manusia. Demikian juga, aliran neo marxis, freudianisme, sosiologi kritis, yang cenderung menolak menguatnya fenomena dominasi industrialisasi, kapitalisme, dan teknologi. Ketiga hal tersebut dapat melemahkan sisi kemanusiaan (humanisme). Aliran-aliran ini terdorong untuk dapat menemukan sistem yang sepenuhnya berpihak kepada manusia dan kemanusiaan (Pranarka Dan Vidhyandika, 1996).

Sumardjo (2017) mendapati indikasi bahwa kegiatan memberdayakan masyarakat akan berlangsung efektif manakala berhasil mengembangkan potensi energi sosial budaya kreatif ini. Menurut Sumardjo (2010), energi sosial budaya kreatif meliputi tiga komponen utama, yaitu: *ideals*, *ideas*, dan *friendship*. Energi sosial adalah sekumpulan dari energi mental yang dalam hal ini didefinisikan sebagai motivasi, emosi dan kesadaran (Faucher, 2010) yang menggerakkan setiap individu untuk bertindak menuju tujuan yang diinginkan. Shove & Walker (2014) mendefinisikan energi sosial sebagai hubungan antara energi dan masyarakat tidak didefinisikan oleh faktor eksternal dan kekuatan pendorong. Menurut Wolf (2009) konsep "energi sosial" dimaksudkan sebagai metafora yang dapat memainkan peran serupa dalam konteks sistem sosioekologi. Alim *et al* (2011) menemukan bahwa energi sosial pada kelompok terwujud dalam berbagai aras meliputi; aras mikro, meso sampai makro. Pada konteks kelompok, energi sosial yang ada meliputi; kekerabatan, lokalitas, kerjasama dengan berbagai pihak, dan kepemimpinan lokal.

Masalah dan Tujuan

Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penyuluh melakukan pendekatan komunikasi yang efektif dalam membangun modal sosial melalui upaya pemberdayaan petani? (2) Bagaimana pemberdayaan telah merespon perkembangan teknologi komunikasi digital dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis kopi rakyat? Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran ideal penyuluh dalam keberlanjutan usahatani kopi rakyat.

METODA PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah kaji tindak partisipatif (*Participatory Action Research*) dengan menempatkan peneliti lapang untuk tinggal di desa selama masa penelitian dan berperan sebagai fasilitator pemberdaya masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ditempuh dengan metode partisipatif. Lokasi penelitian dipilih secara purposive yaitu di Desa Campaka Mulya, Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan desa tersebut merupakan penghasil kopi rakyat yang digemari konsumen namun kualitas dan produktivitasnya masih rendah. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan kesesuaian iklim, baik bagi kopi robusta maupun kopi arabika yang telah ditanam sejak lama, namun produktivitasnya rendah. Selain itu lokasi ini dipilih dengan pertimbangan karena lokasi tersebut merupakan habitat owa jawa yang terancam punah. Data dikumpulkan secara observasi selama masa kajian, wawancara mendalam terhadap figur tokoh yang memahami persoalan usahatani kopi dan pemasarannya, serta kegiatan diskusi terfokus (FGD).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan komunikasi partisipatif

Pendekatan komunikasi partisipatif yang difasilitasi penyuluh ternyata efektif membangun dialog di antara para petani dalam rekayasa sosial partisipatif. Kegiatan kajian yang diawali dengan pemetaan sosial secara partisipatif ternyata menimbulkan kesadaran pada para petani untuk meningkatkan kompetensinya, dengan harapan dapat meningkatkan

produktivitas yang mampu menjawab kualitas dan kebutuhan pasar. Kemudian hal ini ditandai dengan partisipasi mereka dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program yang dilaksanakan dengan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Terjadi proses dialog di antara para petani dalam menentukan tujuan dan cara-cara mencapai tujuan serta inisiatif untuk mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait dalam sistem agribisnis kopi rakyat.

Hasil dari PRA dengan pendekatan komunikasi partisipatif yang difasilitasi oleh fasilitator pemberdaya masyarakat berupa program kerja setahun yang dipahami dan disepakati untuk dilaksanakan bersama. Sebagian program kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. Pendekatan seperti ini tampaknya lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi sumberdaya yang dapat diakses oleh masyarakat dalam meningkatkan kapasitas usahatani kopi rakyat di Desa Campaka Mulya Kawasan Gunung Puntang. Hal ini terbukti dari antusiasme para petani dalam berbagi pengetahuan, pengalaman dan wawasan pengembangan pertanian kopi rakyat, yaitu melalui proses dialog yang segar dan tidak dominatif.

Tabel 1 Progam kerja pemberdayaan masyarakat di Desa Campak Mulya Kawasan Gunung Puntang

No	Kegiatan	Output	Outcome	Waktu	Sasaran
1.	Eduwisata Alam Puntang	Terlatihnya perwakilan anggota kelompok untuk menjadi interpteter dalam eduwisata dan fasilitas pendukung eduwisata	Intepreter mampu menjelaskan tentang potensi yang ada di Program Melintang, Terbentuknya jalur interpretasi eduwisata	Feb-Mar	Kelompok Bukit Amanah
2.	PIRT Koperasi Bukit Amanah	Terbentuknya PIRT Koperasi Bukit Amanah	Nomor PIRT mampu memenuhi legalitas produk olahan	Januari	Kelompok Bukit Amanah
3.	Sekolah Lapang Kelompok Organik	Terlaksananya 4 kali Sekolah Lapang mengenai OPT (Organisme Pengganggu Tanaman)	Masyarakat memahami ilmu tentang bertani organik	Januari, Apri, Agustus, November	2 KTH LMDH Bukit Amanah
4.	Pelatihan budidaya TOGA	Terlaksananya 1 kali pelatihan tentang TOGA	Masyarakat memahami ilmu dan potensi dari Tanaman Obat Keluarga	Maret	LMDH Bukit Amanah
5.	Pengembangan Sarana Prasarana Kelompok Organik	Tersedianya peralatan dan fasilitas pendukung kegiatan Pertanian Organik	Fasilitas untuk bertani organik terpenuhi dengan baik	Februari	LMDH Bukit Amanah



Gambar 1 Aktivitas kelompok petani kopi rakyat dalam mengembangkan energi sosial budaya kreatif dalam perencanaan program pemberdayaan

Kondisi seperti itu menguatkan motivasi para petani untuk meningkatkan kompetensi dan penyelenggaraan program pengembangan usahatani kopi rakyat. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sebelum dan sesudah dilakukan pendampingan pada Tabel 2.

Tabel 2 Kondisi sebelum dan sesudah pendampingan petani kopi rakyat di Gunung Puntang

Aspek	Before (sebelum ada pendampingan)	After (Des 2018)
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai pendapatan anggota kelompok Rp 150.000 • 1 unit koperasi tidak aktif • Variasi penjualan kopi belum ada 	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai pendapatan anggota kelompok Rp 400.000 • 1 unit koperasi diaktifkan kembali dengan anggota yang baru • Terdapat beberapa olahan produk kopi puntang
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kelompok didampingi = 1 kelompok • Jumlah anggota 70 orang • 0 pelatihan/workshop 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kelompok didampingi = 2 kelompok • Jumlah anggota 137 orang • 1 pelatihan tentang Pertanian Organik
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Perambahan hutan • Perburuan liar • Illegal logging 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada kegiatan perusakan hutan

Energi sosial budaya kreatif: wujud rekayasa sosial partisipatif

Melalui proses komunikasi konvergen, kelompok sasaran pendampingan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Bukti Amanah telah sepakat untuk menetapkan kondisi ideal yang ingin diwujudkan bersama (tujuan program) yaitu meningkatnya kapasitas masyarakat dalam meraih peluang pasar kopi rakyat untuk terwujudnya kesejahteraan. Kondisi tersebut disepakati ide (*ideas*) dicapai dengan cara kerjasama kelompok melalui penguatan posisi tawar dengan pihak mitra di sub sistem agribisnis hilir (pengolahan dan pemasaran). Untuk itu disepakati kerjasama dalam pengolahan hasil bermitra dengan Sunda Hejo, dan kerjasama pemasaran dengan pengumpul lokal, sedangkan dalam proses produksi bermitra dengan Perhutani. Secara keseluruhan disepakati bermitra dengan PT Pertamina EP yang bersedia menempatkan program pendampingan dalam rangka CSR di desa itu.

Wujud rekayasa sosial partisipatif tersebut adalah energi sosial budaya kreatif dalam mengembangkan usahatani rakyat. Rekayasa sosial partisipatif terjadi melalui penetapan *ideal*, *ideas*, dan *friendships* oleh masyarakat petani kopi rakyat yang bertindak sebagai pelaku utama sehingga tidak terjadi dominasi dalam proses perencanaan dan evaluasi program, pelaksanaannya, serta pemanfaatan hasil kerjasama. Kondisi seperti ini merupakan gambaran energi sosial budaya kreatif yang disusun secara partisipatif sebagaimana disampaikan oleh Sumardjo (2009; 2010).

Energi sosial budaya kreatif meliputi tiga elemen, yaitu *ideals*, *ideas*, dan *friendships*. *Ideals* adalah kondisi ideal yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam pengembangan masyarakat, yaitu kejelasan tujuan, harapan dan visi atau bahkan cita-cita bersama. *Ideals* ini akan membimbing ke arah kejelasan *ideas*, yaitu cara-cara yang ditempuh bersama untuk mewujudkan *ideals* tersebut, yaitu kejelasan strategi program, kegiatan, metoda atau teknik yang dikembangkan secara kreatif dan tepat guna. *Ideas* menjadi pedoman bagi pihak yang terkait untuk mengembangkan *friendship* yaitu jaringan kerjasama di antara mereka melalui penerapan kemitraan strategis (Sumardjo, 2010).



Gambar 2 *Ideal* dan *ideas* dalam Renstra Pemberdayaan Kopi Rakyat

Dalam jangka waktu lima tahun pemberdayaan kopi rakyat yang disusun oleh petani dan difasilitasi oleh pendamping lapangan dapat dilihat pada Gambar 2. *Ideal* dari pemberdayaan masyarakat ini disepakati adalah “kemandirian kelompok”, tidak hanya dalam budidaya namun juga dalam pengolahan produk dan perluasan pasar. Sedangkan *ideas* nya adalah mulai dari inisiasi program, pengembangan program, penguatan dan pemantapan, yang secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.

Energi sosial budaya kreatif *ideal* ternyata menginspirasi *ideas* dan *ideas* menginspirasi pengembangan *friendships* sebagai bentuk jaringan kerjasama sinergis baik sesama petani maupun dengan pihak lain. Dalam proses pengembangan energi sosial budaya kreatif dalam pemberdayaan petani kopi rakyat, *friendships* ini menggambarkan kualitas modal sosial petani kopi rakyat.

Ke depan tampaknya untuk keberlanjutan upaya penguatan kapasitas petani kopi rakyat ini dibutuhkan penerapan konsep-konsep yang berkaitan dengan kapital sosial tersebut. Kapital sosial pada dasarnya adalah suatu nilai *mutual trust* (kepercayaan) antara anggota masyarakat terhadap pemimpinnya dan terhadap masyarakat lain (Putnam, 1993; Bordeou, 1986; Fukuyama, 1995; Coleman, 1988). Kapital sosial juga merupakan institusi sosial yang melibatkan *networks* (jaringan), *norms* (norma-norma), dan *social trust* (kepercayaan sosial) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan

kooperasi) untuk tercapai kepentingan maupun tujuan bersama. Menurut Sumardjo (2010) untuk memperkuat *social capital* diperlukan penguatan *human capital*, dan penguatan *human capital* ini merupakan hasil dari upaya pemberdayaan masyarakat atau penyuluhan. Oleh karena itu ke depan pendekatan pemberdayaan merupakan cara yang tepat dan perlu ditempuh secara konsisten dalam mengimplementasikan renstra yang telah disusun oleh komunitas petani kopi rakyat di Desa Campaka Mulya, kawasan Gunung Puntang.

Sinergi komunikasi digital dan penyuluhan

Sinergi komunikasi digital dan penyuluhan kondusif bagi pengembangan keberlanjutan kopi rakyat. Sinergi ini berupa keinovatifan petani dalam usahatani kopi rakyat, baik dalam teknologi produksi (budidaya), maupun dalam pengolahan hasil dan pemasaran dilakukan dengan mengikuti informasi dari media komunikasi digital yang dikenal dengan *cyber extension*. Dalam hal ini diawal program, akses media digital masih terbatas oleh pendamping lapangan sebagai pemberdaya masyarakat. Di sini peran pemberdaya masyarakat adalah sebagai penyuluh yang memperoleh inovasi dari media *cyber extension*. Pada tahap selanjutnya ditempuh langkah untuk mengembangkan potensi petani untuk akses komunikasi digital. Peran kelompok tani kopi rakyat adalah sebagai forum media yang menjadi wadah petani saling berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan/pemahaman terkait agribisnis kopi rakyat. Di samping itu kelompok tani kopi rakyat berfungsi juga sebagai media sinergi kerjasama usaha sesama petani.

Peran ideal penyuluh dalam pemberdayaan masyarakat

Peran ideal penyuluh dalam pemberdayaan masyarakat ternyata adalah mensinergikan komunikasi digital dengan komunikasi konvensional untuk membangun kapital sosial melalui rekayasa sosial partisipatif berupa energi sosial budaya kreatif. Salah satu hasil dari sinergi komunikasi digital dan komunikasi konvensional berupa inspirasi tentang Budidaya Kopi Organik dan Eduwisata Minat khusus yang direncanakan akan menjadi inovasi pembelajaran dalam kelompok tani. Budidaya Kopi yang dilakukan dengan metode organik tanpa menggunakan bahan kimia yang berpotensi merusak lingkungan dan unsur hara tanah. Dengan target sasaran LMDH Bukit Amanah dan

keluaran yaitu meningkatnya produksi kopi. Eduwisata minat khusus berupa paket wisata yang menyajikan potensi alam di Gunung Puntang dengan berbagai macam sejarahnya dan kenikmatan Kopi Puntang yang mendunia serta memiliki cita rasa yang khas dicintai para pecinta kopi di Indonesia sampai Mancanegara. Secara rinci, peran nyata pendamping yang bertindak sebagai penyuluh dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Pendamping berperan sebagai dalam pemberdayaan kopi rakyat

Jenis Peran	Indikator	Keterangan
Konsultasi	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kelompok yang didampingi: 2 kelompok Konsultasi melalui pertemuan kelompok tiap bulan 	
Fasilitasi	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan dalam mengikuti lomba: 1. pameran kopi di Cikole, Lembang. 2. PRIA Award 2019 Pengurusan PIRT kelompok Edukasi dalam bentuk sekolah lapang yang bekerja sama dengan pihak Aliksa Organik 	
Supervisi	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring kegiatan Monitoring partisipasif 	Perusahaan, Masyarakat, Stakeholder
Motivasi	<ul style="list-style-type: none"> Inisiasi produk olahan baru: Variasi olahan kopi dan simplisia tanaman obat 	

Sebagaimana dijelaskan dalam alasan pemilihan lokasi pemberdayaan bahwa ada *hidden agenda* yaitu menurunkan tekanan terhadap hewan Owa Jawa yang seharusnya dilindungi. Setelah program ini dikembangkan kecenderungan masyarakat untuk memburu Owa Jawa berkurang, sejalan dengan fokus perhatian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan nafkah bergeser ke kegiatan pengembangan kapasitas usahatani kopi rakyat. Melalui pendekatan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat menyebabkan masyarakat memiliki alternatif gambaran masa depan lingkungan kehidupan yang lebih ramah pada alam. Hal ini terutama setelah pendekatan konsep energi sosial budaya kreatif dicoba diterapkan dalam upaya pemberdayaan masyarakat petani kopi rakyat.

KESIMPULAN

1. Pendekatan komunikasi partisipatif yang difasilitasi penyuluh ternyata efektif untuk membangun dialog dalam rekayasa sosial partisipatif di antara para petani kopi rakyat.
2. Wujud rekayasa sosial partisipatif tersebut adalah energi sosial budaya kreatif dalam mengembangkan usahatani rakyat.
3. Sinergi komunikasi digital dan penyuluhan ternyata kondusif bagi pengembangan keberlanjutan kopi rakyat karena komunikasi digital berkontribusi dalam memberikan inspirasi tentang inovasi dalam pengelolaan agribisnis kopi rakyat.
4. Akses *cyber extension* ternyata memperkuat dukungan inovasi dalam pemberdayaan usahatani kopi rakyat secara berkelanjutan.
5. Peran ideal penyuluh dalam pemberdayaan masyarakat ternyata adalah mensinergikan komunikasi digital dengan komunikasi konvensional untuk membangun kapital sosial melalui rekayasa sosial partisipatif berupa energi sosial budaya kreatif.

Ucapan Terima kasih

1. CARE IPB atas komitmennya terhadap upaya pemberdayaan masyarakat secara partisipatif dan humanis.
2. Pertamina EP sebagai mitra perusahaan yang telah menjadi sponsor pemberdayaan masyarakat
3. Pendamping Lapangan yang telah berperan dalam pengumpulan data
4. Kemenristek Dikti yang telah membiayai kegiatan kajian

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, S. Winaryanto, S.& Mauludin, MA. (2011). Potensi energi sosial budaya kreatif dalam pengembangan kelembagaan peternakan (kasus di Kelompok Tani ternak Harapan Jaya Pamulihan). Bandung: Universitas Padjajaran.
- [CARE IPB]. Center for Alternative dispute Resolution and Empowerment Pusat Kajian Resolusi Konflik Institut Pertanian Bogor, 2017. Pemetaan Sosial di Desa Campakamulya Gunung Puntang. Bogor (ID): CARE IPB

- Bourdieu, P. 1986. "The Forms of Capital." Pp. 241–58 in *Handbook of theory and research for the sociology of education*, edited by J. G. Richardson. New York: Greenwood Press.
- Coleman, James S. (1988). "Social Capital in the Creation of Human Capital". *American Journal of Sociology*. 94: S95–S120. *CiteSeerX* 10.1.1.208.1462. [doi:10.1086/228943](https://doi.org/10.1086/228943). JSTOR 2780243.
- Faucher, Jean-Baptiste P.L. (2010). Reconceptualizing knowledge management: knowledge, social energy, and emergent leadership in social complex adaptive system. A Thesis submit for the degree of Doctor of Philosophy at University of Otago, Dunedin, New Zealand
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190311/99/898159/konsumsi-kopi-global-naik-produksi-masih-terseok-seok>
- Putnam, R. D. (1995). "Bowling alone: Americas's declining social capital". *Journal of Democracy*. 6 (1): 65–78. [doi:10.1353/jod.1995.0002](https://doi.org/10.1353/jod.1995.0002).
- Rappaport, J. (1987) Terms of Empowerment/Exemplars of Prevention: Toward a Theory for Community Psychology. *American Journal of Community Psychology*, 15, 121-148. <https://doi.org/10.1007/BF00919275>
- Rappaport, J., 1984. *Studies in Empowerment: Introduction to the Issue, Prevention In Human Issue*. USA.
- Shove E, Walker G. 2014. What Is Energy For? Social Practice and Energy Demand. Lancaster University (US). *Theory, Culture & Society*. Reprints and permissions: sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav. 31(5) : 41–58.
- Sumardjo. 2009. Peningkatan kapasitas modal sosial dan kualitas pendamping pengembangan masyarakat berkelanjutan. Prosiding Seminar Nasional Komunikasi Pembangunan Mendukung Peningkatan Kualitas SDM dalam Kerangka Pengembangan Masyarakat. Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia, Bogor, 19 November 2009.
- Sumardjo. 2010. Penyuluhan menuju pengembangan kapital manusia dan kapital sosial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Fakultas Ekologi Manusia, IPB Bogor 18 September 2010.
- Sumardjo, Syarif R. Riyanto, S. 2017. Optimalisasi Lahan Pekarangan Sebagai Model Alternatif Pengembangan Komunitas Petani Mewujudkan Kemandirian Pangan Berkelanjutan di Desa Rawan Konflik. Laporan Akhir Tahun Penelitian Perguruan Tinggi tahun 2017. Tidak dipublikasikan. Kerjasama CARE LPPM IPB dengan Kemenristek Dikti.
- Wolf S. 2009. Social Energy and Climate Change Economics. http://www.gsdp.eu/uploads/tx_conturttnews/Wolf_Working_Paper.pdf

HUBUNGAN KARAKTERISTIK PETANI DAN KARAKTERISTIK INOVASI PADI SALIBU TERHADAP KEBERLANJUTAN PENERAPAN TEKNOLOGI PADI SALIBU DI KECAMATAN LIMA KAUM KABUPATEN TANAH DATAR

Sri Wahyuni^{1*}

¹Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Padang 25163, Indonesia

*Email: sriwahyuni@agr.unand.ac.id

ABSTRAK

Keberlanjutan penerapan padi salibu sebagai kearifan lokal masyarakat di Sumatera Barat sangat diperlukan mengingat berbagai keuntungan yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan karakteristik petani, karakteristik inovasi, dan keberlanjutan penerapan teknologi salibu di Kecamatan Lima Kaum, dan 2) menganalisis hubungan karakteristik petani dan karakteristik inovasi terhadap keberlanjutan penerapan padi salibu di Kecamatan Lima Kaum. Penelitian ini dirancang secara kuantitatif menggunakan metode survei. Lokasi penelitian dipilih secara purposif, yaitu di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik petani teknologi salibu umumnya berusia >50 tahun, memiliki tingkat pendidikan formal SMA hingga perguruan tinggi, pendidikan non formal terkait teknologi salibu sebanyak 2 kali sejak tahun 2014, memiliki pengalaman berusahatani 4-6 tahun, tingkat pendapatan rendah hingga sedang, dan luas lahan umumnya >1,4 hektar. Karakteristik inovasi teknologi salibu umumnya tergolong baik, dimana penerapan teknologi salibu memiliki keuntungan relatif, sesuai dengan kebutuhan dan sumberdaya yang dimiliki petani, tidak rumit dan mudah dipraktikkan di lahan kecil, serta dapat diamati pertumbuhan dan hasilnya. Penerapan padi salibu di kedua daerah sudah berkelanjutan baik di setiap musim panen, penambahan luas lahan, hingga keinginan untuk terus menerapkan dan mengembangkan teknologi salibu. Keberlanjutan di Kecamatan Lima Kaum tersebut didukung oleh karakteristik petani dan karakteristik.

Keywords: karakteristik inovasi, karakteristik petani, keberlanjutan, padi salibu

PENDAHULUAN

Berbagai inovasi untuk meningkatkan produktivitas padi dan pencapaian target produksi untuk menyokong upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada dan swasembada berkelanjutan untuk komoditas padi terus dilakukan. Salah satunya adalah teknologi budidaya padi salibu yang berasal dari kearifan lokal (*indigenous knowledge*) masyarakat di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, yang kemudian mulai berkembang kembali di Sumatera Barat sejak diteliti oleh BPTP Kabupaten Solok tahun 2013.

Teknologi ini bahkan telah dicoba di beberapa daerah seperti Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Riau, Aceh, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat dan lain-lain. masyarakat setempat.

Budidaya padi salibu merupakan varian teknologi budidaya ratun, yaitu tunggul setelah panen tanaman utama yang tingginya sekitar 25 cm, dipelihara selama 7-10 hari atau dibiarkan hingga keluar tunas baru. Apabila tunas yang keluar kurang dari 70% maka tidak disarankan untuk dilakukan budidaya salibu. Jika tunas yang tumbuh > 70% maka potong kembali tunas secara seragam hingga ketinggian 3-5 cm, kemudian dipelihara dengan baik hingga panen (Erdiman *et al.*, 2013).

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari penerapan budidaya padi salibu adalah: hemat, tenaga kerja, waktu, dan biaya, karena tidak dilakukan pengolahan tanah dan penanaman ulang, selain itu menekan kebiasaan petani membakar jerami setelah panen (Erdiman *et al.*, 2013). Budidaya padi salibu dapat meningkatkan produktivitas padi per unit area dan per unit waktu, dan meningkatkan indek panen dari sekali menjadi dua sampai tiga kali panen setahun. Jika dibandingkan dengan teknologi ratun konvensional, salibu mampu menghasilkan jumlah anakan yang lebih banyak dan seragam, dan produktivitas bisa sama bahkan lebih tinggi dari tanaman utamanya. Penerapan budidaya padi salibu dengan memanfaatkan varietas berdaya hasil tinggi, tentu akan lebih menggairahkan aktivitas usahatani, karena dapat diperoleh tambahan hasil yang sangat nyata (Erdiman, 2013).

Kabupaten Tanah Datar sebagai daerah asal teknologi budidaya padi salibu telah menerapkan teknik tersebut pada hampir seluruh wilayah sentra produksi padi. Salah satunya adalah Kecamatan Lima Kaum Sumatera Barat sebagai salah satu kecamatan pencetus awal perkembangan teknologi padi salibu. Keberlanjutan penerapan teknologi padi salibu sebagai salah satu bentuk inovasi teknologi berhubungan dengan berbagai faktor, baik faktor fisik dalam budidaya dan karakteristik inovasi teknologi salibu; maupun faktor nonfisik yang berhubungan dengan manusia seperti karakteristik petani. Berbagai penelitian sehubungan dengan karakteristik petani dan karakteristik inovasi terhadap penerapan inovasi teknologi telah banyak dilakukan, seperti hubungan karakteristik petani dalam program SL-PTT (Narti, 2015); pengaruh peran penyuluh terhadap adopsi inovasi padi sawah (Putra *et al.*, 2012); efektifitas AKIS untuk diseminasi inovasi ISFM (*integrated soil fertility management*) di Kenya dan Ghana (Adolwa *et al.*, 2016); serta

penelitian mengenai model alternatif untuk memprediksi tingkat adopsi inovasi petani, dimana beberapa faktor yang menentukan percepatan adopsi teknologi adalah nilai atribut inovasi dan komunikasi interpersonal (Samiee dan Rezaei-Moghaddam, 2017).

Meskipun demikian, penelitian yang berhubungan dengan teknologi salibu lebih banyak mengarah pada teknis budidaya yang merupakan faktor fisik, seperti penelitian yang dilakukan oleh Suwandi *et al.* (2012), Susilawati dan Purwoko (2012), Erdiman *et al.* (2013), Erdiman (2013), Ritonga (2015), Sinaga *et al.* (2015), Dewi *et al.* (2015), dan Herlinda *et al.* (2015). Belum terdapat kajian mengenai faktor nonfisik teknologi salibu seperti karakteristik petani dan karakteristik inovasi untuk keberlanjutan penerapan teknologi salibu. Padahal, karakteristik petani dan karakteristik inovasi memiliki hubungan dan pengaruh terhadap keberlanjutan penerapan suatu inovasi.

Oleh karena itu, secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan karakteristik inovasi dan pola komunikasi terhadap keberlanjutan penerapan teknologi salibu di Kabupaten Tanah Datar. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk 1) mendeskripsikan karakteristik petani, karakteristik inovasi, dan keberlanjutan penerapan teknologi salibu di Kecamatan Lima Kaum, dan 2) menganalisis hubungan karakteristik petani dan karakteristik inovasi terhadap keberlanjutan penerapan padi salibu di Kecamatan Lima Kaum.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Oktober 2017 di Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Penentuan lokasi dilakukan dengan purposif, dengan alasan Kecamatan Lima Kaum di Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu daerah sentra produksi padi dan telah mengembangkan Teknologi Padi Salibu di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dirancang secara kuantitatif menggunakan metode survei dan didukung dengan data deskriptif kualitatif. Populasi penelitian adalah petani yang telah menerapkan teknologi padi salibu di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Sampel untuk penelitian ini diambil secara sensus pada Kelompok Tani Muda Laskar di Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum, yaitu sebanyak 30 orang.

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari responden penelitian dan data sekunder yang terdiri atas data pendukung berupa dokumen-dokumen yang berasal dari lembaga dan instansi terkait. Analisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan statistik inferensia. Analisis statistik inferensia dilakukan dengan menggunakan analisa statistik korelasi (hubungan) menggunakan software SPSS 23.00.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Petani Padi Salibu di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar

Karakteristik petani padi salibu di Nagari Lima Kaum, yakni umur relatif berkisar 45 sampai 60 tahun, sebagian besar berpendidikan SMA, sebagian besar tidak sering mengikuti pelatihan mengenai padi salibu, demikian pula pendapatan sebagian besar berada dalam kategori menengah dan berlahan cukup yakni 0.72 ha sampai 1 ha. Karakteristik petani padi salibu dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Petani Padi Salibu di Nagari Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar

Karakteristik Petani	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Umur	Muda (< 30 tahun)	3	10,0
	Dewasa (30-49 tahun)	13	43,3
	Tua (> 50 tahun)	14	46,7
Tingkat Pendidikan Formal	Rendah (SD)	3	10,0
	Sedang (SMP)	8	26,7
	Tinggi (SMA-Perguruan Tinggi)	19	63,3
Tingkat Pendidikan Non Formal	Rendah (1 kali)	7	23,3
	Sedang (2 kali)	20	66,7
	Tinggi (3 kali)	3	10,0
Pengalaman Berusahatani	Rendah (1-3 tahun)	11	36,7
	Sedang (4 – 6 tahun)	18	60,0
	Tinggi (> 7 tahun)	1	3,3
Tingkat Pendapatan	Rendah (1.200.000 -12.133.333)	13	43,3
	Sedang (12.135.000 – 23.066.666)	9	30,0
	Tinggi (>23.100.000)	8	26,7
Luas Lahan	Sempit (0.15 – 0.76 ha)	6	20,0
	Sedang (0.77 -1,39 ha)	11	36,7
	Luas (>1.40 ha)	13	43,3

Petani padi salibu yang produktif memiliki kemampuan dalam budidaya padi salibu. Hal ini dikarenakan budidaya padi salibu membutuhkan kecermatan dan ketelitian, mulai dari penyiapan lahan, pola tanam sampai pemanenan. Tingkat pendidikan formal petani yang relatif tinggi, yakni tamat SMA memberi dampak pada pemahaman petani dalam mengelola budidaya padi salibu. Sebagian besar petani mengikuti pelatihan mengenai padi salibu, karena padi salibu mulai diperkenalkan tahun 2013, maka pengalaman petani rata-rata 4 sampai 6 tahun. Demikian pula pengalaman petani mengenai padi salibu sejalan dengan perkembangan padi salibu. Pemanfaatan lahan sebagian petani tergolong luas dalam budidaya padi salibu, yakni > 1,40 ha. Hal ini mengindikasikan masyarakat petani memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap padi organik.

Karakteristik Inovasi Padi Salibu di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar

Karakteristik inovasi memiliki pengaruh terhadap adopsi suatu inovasi (Rogers, 2013 dan Senyolo *et al.*, 2017). Keuntungan relatif padi salibu di Nagari Limo Kaum tergolong sedang, artinya petani cukup mendapatkan manfaat dan keuntungan atas penerapan padi salibu. Keuntungan yang didapatkan oleh petani antara lain minimnya biaya produksi karena saat menerapkan padi salibu, petani tidak lagi perlu mengeluarkan biaya benih dan bajak, serta penggunaan tenaga kerja juga berkurang, seperti yang disebutkan oleh Erdiman *et al.* (2013).

Inovasi yang sesuai merupakan inovasi mudah yang diadaptasi oleh masyarakat (Mulyadi *et al.*, 2009). Tingkat kesesuaian inovasi padi salibu di Nagari Limo Kaum tergolong tinggi, artinya inovasi padi salibu sesuai dengan kebutuhan, kebiasaan, sumberdaya, serta keadaan lingkungan petani. Hal ini seperti halnya yang disebutkan oleh Balitbangtan (2015) bahwa teknologi budidaya padi salibu merupakan budidaya padi spesifik lokasi berbasis kearifan lokal.

Tabel 2. Karakteristik Inovasi Padi Salibu di Nagari Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar

Karakteristik Inovasi	Kategori	Frekuensi	Persetase (%)
Keuntungan Relatif	Rendah	-	-
	Sedang	22	73,3
	Tinggi	8	26,7
Tingkat Kesesuaian	Rendah	-	-
	Sedang	2	6,7
	Tinggi	28	93,3
Tingkat Kerumitan Inovasi	Rendah	27	90,0
	Sedang	3	10,0
	Tinggi	-	-
Tingkat Kemudahan	Rendah	-	-
	Sedang	-	-
	Tinggi	30	100,0
Tingkat Keteramatan	Rendah	-	-
	Sedang	1	3,3
	Tinggi	29	96,7
Jumlah		30	100.0

Tingkat kerumitan inovasi padi salibu di Nagari Limo Kaum berada pada kategori rendah, artinya teknologi tersebut tidak sulit baik dari sisi pemahaman secara teori, praktik, maupun akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan. Selanjutnya, tingkat kemudahan penerapan padi salibu tergolong tinggi, dimana praktik budidaya padi salibu jika diusahakan pada lahan skala kecil mudah dilakukan. Tingkat keteramatan inovasi juga tergolong tinggi yang artinya, petani dapat mengamati pertumbuhan, hasil, hingga peningkatan produksi padi salibu dengan mudah. Berdasarkan temuan di lapangan, kemudahan petani dalam mengamati pertumbuhan dan hasil padi salibu tersebut juga menjadi salah satu motivasi petani dalam menerapkan padi salibu, sebagaimana yang juga dinyatakan oleh Sholahuddin *et al.* (2017) bahwa tingkat keteramatan (*observability*) memengaruhi adopsi seseorang terhadap suatu inovasi.

Keberlanjutan Penerapan Teknologi Padi Salibu di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar

Tingkat keberlanjutan penerapan budidaya padi salibu di Nagari Lima Kaum pada umumnya tergolong tinggi. Hal ini berarti bahwa terdapat keberlanjutan petani dalam menerapkan budidaya padi salibu pada setiap musim tanam, keberlanjutan dalam penggunaan lahan baik tetap maupun bertambah, keberlanjutan petani untuk kembali menerapkan budidaya padi salibu di musim tanam berikutnya, hingga keberlanjutan dalam keinginan petani untuk mengembangkan padi salibu.

Tabel 3. Keberlanjutan Penerapan Teknologi Padi Salibu di Nagari Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar

Karakteristik Inovasi	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Keberlanjutan Penerapan padi salibu setiap musim tanam	Rendah	-	-
	Sedang	-	-
	Tinggi	30	100,0
Keberlanjutan Penggunaan lahan	Rendah	-	-
	Sedang	-	-
	Tinggi	30	100,0
Keberlanjutan Pertambahan luas lahan	Rendah	1	3,3
	Sedang	6	20,0
	Tinggi	23	76,7
Keberlanjutan penerapan padi salibu	Rendah	1	3,3
	Sedang	-	-
	Tinggi	29	96,7
Keberlanjutan Pengembangan padi salibu	Rendah	-	-
	Sedang	-	-
	Tinggi	30	100,0
	Jumlah	30	100.0

Berdasarkan pengamatan di lapangan, keberlanjutan penerapan budidaya padi salibu oleh petani didorong utamanya karena berbagai keuntungan padi salibu, seperti hemat dari segi biaya, waktu dan tenaga kerja, serta dapat menambah jumlah produksi dan indek panen, seperti halnya yang juga dijelaskan oleh Erdiman (2013). Namun, masih terdapat beberapa petani yang tidak menerapkan padi salibu secara berkelanjutan, disebabkan petani yang cenderung malas dalam mengatur pengairan padi salibu. Selain itu, pengelolaan padi salibu yang kurang optimal yang kurang optimal juga mengakibatkan

produksi padi yang dihasilkan oleh petani mengalami penurunan, sehingga pada musim tanam berikutnya beberapa petani tidak melanjutkan penerapan padi salibu.

Keberlanjutan penggunaan lahan untuk penerapan padi salibu di Kecamatan Lima Kaum tergolong tinggi. Demikian juga halnya untuk keberlanjutan dalam penggunaan lahan. Adapun petani yang tidak menambah luas lahannya untuk penerapan padi salibu karena petani sudah menggunakan semua lahan sawahnya untuk bertani salibu.

Hubungan Karakteristik Petani dengan Keberlanjutan Penerapan Teknologi Padi Salibu di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan analisa *rank Spearman* umumnya tidak terdapat hubungan nyata pada taraf $p < 0.05$ antara karakteristik petani padi salibu dengan keberlanjutan penerapan teknologi padi salibu di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Tabel 4 memperlihatkan bahwa hampir seluruh indikator pada karakteristik petani tidak berhubungan secara nyata pada taraf $p < 0.05$ dengan keberlanjutan penggunaan lahan, keberlanjutan pertambahan luas lahan, keberlanjutan penerapan padi salibu, dan keberlanjutan pengembangan padi salibu di Kecamatan Lima Kaum.

Tabel 4. Hasil Uji Korelasi Rank Spearman Karakteristik Petani dengan Keberlanjutan Penerapan Teknologi Padi Salibu di Nagari Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar

Karakteristik Individu (X1)	Penerapan padi salibu setiap musim tanam		Penggunaan lahan		Pertambahan luas lahan		Keberlanjutan penerapan padi salibu		Pengembangan padi salibu	
	r_s	Sig. (2-tailed)	r_s	Sig. (2-tailed)	r_s	Sig. (2-tailed)	r_s	Sig. (2-tailed)	r_s	Sig. (2-tailed)
Umur	,586**	,001	,114	,548	,137	,471	,471**	,009	,492**	,006
Gingkat pendidikan formal	-,488**	,006	-,080	,674	-,101	,595	-,271	,148	-,333	,072
Gingkat pendidikan nonformal	,013	,944	-,010	,960	,382*	,037	,275	,141	,066	,729
Pengalaman berusaha	,495**	,005	-,010	,960	,122	,521	,442*	,014	,389*	,033
Gingkat pendapatan	,460*	,011	,320	,085	,158	,405	,273	,144	,239	,204
Luas lahan	,547**	,002	,308	,098	,171	,365	,291	,119	,270	,149

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

Hal tersebut berarti keberlanjutan petani dalam menerapkan budidaya padi salibu tidak tergantung pada unsur-unsur karakteristik petani. Terkait dengan adopsi dan penerapan inovasi, penelitian Lalla *et al.* (2012) juga menunjukkan bahwa beberapa karakteristik petani seperti umur, tingkat pendidikan, pengalaman berusahatani, dan luas lahan tidak berhubungan dengan adopsi inovasi jajar legowo oleh petani padi sawah. Sadono *et al.* (2014) dan Ajak dan Demiryurek (2017) juga menegaskan bahwa karakteristik individu seperti umur, pengalaman berusaha tani, luas lahan, hingga tingkat pendapatan petani tidak berhubungan dan tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan petani, akses informasi, atau bahkan diskriminasi sosial petani.

Hubungan Karakteristik Inovasi dengan Keberlanjutan Penerapan Teknologi Padi Salibu di Nagari Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar

Berbagai literatur dan hasil penelitian seperti yang dikemukakan oleh Rogers (2013), Meulen *et al.* (2016), dan Senyolo *et al.* (2017) menunjukkan bahwa karakteristik inovasi berpengaruh terhadap adopsi suatu inovasi. Berbagai karakteristik inovasi tersebut dapat mendorong kecepatan adopsi inovasi, akan tetapi juga dapat menghambat adopsi inovasi seperti halnya temuan oleh Warnaen *et al.* (2013). Berdasarkan analisa *rank Spearman* umumnya terdapat hubungan nyata pada taraf $p < 0,05$ antara karakteristik inovasi dengan keberlanjutan penerapan padi salibu baik di Kecamatan Lima Kaum. Tabel 5 memperlihatkan terdapat hubungan nyata pada taraf $p < 0,05$ antara hampir seluruh karakteristik inovasi dengan keberlanjutan penerapan padi salibu di setiap musim tanam dan keberlanjutan pengembangan padi salibu. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin bagus karakteristik inovasi padi salibu, maka keberlanjutan petani dalam menerapkan dan mengembangkan padi salibu semakin tinggi.

Tabel 5. Hasil Uji Korelasi Rank Spearman antara Karakteristik Inovasi dengan Keberlanjutan Penerapan Teknologi Padi Salibu di Nagari Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar

Karakteristik Inovasi	Penerapan padi salibu setiap musim tanam		Penggunaan lahan		Pertambahan luas lahan		Keberlanjutan penerapan padi salibu		Pengembangan padi salibu	
	r_s	Sig. (2-tailed)	r_s	Sig. (2-tailed)	r_s	Sig. (2-tailed)	r_s	Sig. (2-tailed)	r_s	Sig. (2-tailed)
Keuntungan Relatif	,178	,347	,047	,805	,414*	,023	,445*	,014	,261	,163
Tingkat Kesesuaian	,309	,096	-,168	,376	,064	,737	,148	,435	,016	,932
Tingkat Kerumitan Inovasi	,496**	,005	,144	,447	,181	,338	,450*	,013	,429*	,018
Tingkat Kemudahan	,426*	,019	-,005	,978	,053	,781	,327	,078	,211	,264
Tingkat Keteramatan	,348	,060	-,181	,338	,019	,922	,170	,370	,094	,620

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

Menegaskan hal tersebut, Tabel 5 juga menunjukkan bahwa tingkat kemudahan inovasi padi salibu juga berhubungan nyata pada taraf $p < 0.05$ dengan keberlanjutan keberlanjutan penerapan padi salibu di Kecamatan Lima Kaum. Berdasarkan observasi, kemudahan penerapan teknologi padi salibu mendorong keberlanjutan penggunaan lahan dan penerapan padi salibu oleh petani. Seperti halnya yang disebutkan oleh Erdiman (2013), kemudahan tersebut salah satunya terlihat dari petani tidak lagi perlu melakukan pembenihan dan pembajakan dalam praktik budidaya padi salibu.

KESIMPULAN

Karakteristik petani teknologi salibu umumnya berusia >50 tahun, memiliki tingkat pendidikan formal SMA hingga perguruan tinggi, pendidikan non formal terkait penerapan teknologi salibu sebanyak 2 kali sejak tahun 2014, memiliki pengalaman berusahatani 4-6 tahun, tingkat pendapatan rendah hingga sedang, dan luas lahan umumnya >1,4 hektar. Karakteristik inovasi teknologi salibu umumnya tergolong baik, dimana penerapan teknologi salibu memiliki keuntungan relatif, sesuai dengan kebutuhan dan sumberdaya yang dimiliki petani, tidak rumit dan mudah dipraktikkan di lahan kecil, serta dapat diamati pertumbuhan dan hasilnya. Penerapan padi salibu di kedua daerah sudah berkelanjutan baik di setiap musim panen, penambahan luas lahan, hingga keinginan untuk terus menerapkan dan mengembangkan teknologi salibu. Keberlanjutan di Kecamatan Lima Kaum tersebut didukung oleh karakteristik petani dan karakteristik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolwa IS, Schwarze IS, Belwood-Howard I, Schareika N, Buerkert. 2016. A Comparative Analysis of Agricultural Knowledge And Innovation Systems in Kenya And Ghana: Sustainable Agricultural Intensification in The Rural–Urban Interface. *Agriculture and Human Values* 34(2): 453-472.
- Ajak JDA, Demiryek K. Agricultural Innovation System: Case of Cassava Producers in Kajo-Keji, South Sudan. *American Journal of Agriculture and Forestry*. 5(4): 94-101.
- [Balitbangtan] Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2015. Panduan Teknologi Budidaya Padi Salibu. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Erdiman. 2013. Teknologi Salibu Meningkatkan Produktivitas Lahan (3-6 Ton/Ha/Tahun) dan Pendapatan Petani (Rp.15-25 Juta/Tahun). Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat.
- _____, Nieldanina, Misran. 2013. Inovasi Teknologi Salibu Meningkatkan Produktivitas Lahan, Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat.
- Herlinda S, Dewi R, Adam T, Suwandi, Wijaya A. 2015. Struktur komunitas laba-laba di ekosistem padi ratun: pengaruh aplikasi *Beauveria bassiana* (Balsamo). *Jurnal Entomologi Indonesia*. 12(2): 91-99.
- Narti S. 2015. Hubungan Karakteristik Petani dengan Efektivitas Komunikasi Penyuluhan Pertanian dalam Program SL-PTT. *Jurnal Professional FIS UNIVED* 2(2): 40-52.

- Putra AWS, Hariadi SS, Harsoyo. 2012. Pengaruh Peran Penyuluh dan Kearifan Lokal terhadap Adopsi Inovasi Padi Sawah di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. *KANAL*. 1(1): 85-101.
- Ritonga ES. 2015. Uji Adaptasi Galur – Galur Padi Ratun Di Lahan Pasang Surut Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. *Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal*.
- Rogers E. 2003. *Diffusion of Innovations Fifth Edition*. New York (AS): The Free Pr.
- Lalla H, Ali MSS, Saadah. 2012. Adopsi Petani Padi Sawah Terhadap Sistem Tanam Jajar Legowo 2:1 di Kecamatan Polongbengkeng Utara, Kabupaten Takalar. *J Sains & Teknologi*. 12(3): 225-264.
- Meulen HVD, Assseldonk MV, Ge L. 2016. Adoption of Innovation in European Agriculture.
- Sadono D, Sumardjo, Gani DS, Amanah S. 2014. Farmer Empowerment in The Management of Rice Farming in Two Districts. *Journal of Rural Indonesia* 2 (1) : 105 – 126.
- Samiee S, Rezei-Moghaddam K. 2017. The Proposed Alternative Model to Predict Adoption of Innovations: The Case of No-Till Technology in Iran. *Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences* 16(3): 270-279.
- Senyolo MP, Long TB, Blok V, Omta O. 2017. How the characteristics of innovations impact their adoption: An exploration of climate-smart agricultural innovations in South Africa. *Journal of Cleaner Production*. 30: 1-16.
- Sholahuddin, Setyawan AA, Trisnawati R. 2017. Pengaruh Karakteristik Inovasi terhadap Niat Mengadopsi Solopos Epaper. *Prosiding Semnas Riset Manajemen & Bisnis*. 63-84.
- Sinaga PH, Trikoesoemaningtyas, Sopandie D, Aswidinnoor H. 2015. Daya Hasil dan Stabilitas Ratun Galur Padi pada Lahan Pasang Surut. *Penelitian Pertanian Tanaman Pangan*. 34(2): 97-104.
- Susilawati, Purwoko BS. 2012. Pengujian Varietas dan Dosis Pupuk untuk Meningkatkan Pertumbuhan dan Hasil Ratun-Padi di Sawah Pasang Surut. *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian*. 15(1): 47-54.
- Suwandi, Ammar M, Irsan C. 2012. Aplikasi Ekstrak Kompos Meningkatkan Hasil dan Menekan Penyakit Padi Sistem Ratun di Sawah Pasang Surut Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Lahan Suboptimal*. 1(2): 116-122.
- Warnaen A, Cangara H, Bulkis S. 2013. Faktor-Faktor yang Menghambat Inovasi pada Komunitas Petani dan Nelayan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Takalar. *KAREBA*. 2(3): 241-249.

PENYULUHAN PEMANFAATAN ASAP CAIR KULIT KAKAO SEBAGAI PESTISIDA ALAMI PADA TANAMAN KAKAO DI KELOMPOK TANI AULIA NATURAL DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

I Ketut Budaraga ^{1*}

¹ Staf Pengajar Fakultas Pertanian Universitas Ekasakti

Jalan Veteran Dalam No. 26 B Padang

*Email : ketut_budaraga@yahoo.com

ABSTRAK

Tanaman kakao merupakan tanaman perkebunan yang menjadi sumber ekonomi bagi petani khususnya di Kabupaten Padang Pariaman. Permasalahan sekarang ini buah kakao banyak terserang oleh hama dan penyakit. Kondisi buah mulai kecil sudah terserang sehingga gagal dipanen. Keberadaan hama dan penyakit yang terdapat pada buah kakao sangat merugikan kondisi petani dan kadang-kadang membuat petani putus asa untuk mencari cara pengendaliannya. Untuk mengatasi masalah ini perlu solusi dengan pemberian asap cair kulit kakao sebagai pestisida alami. Tujuan pengabdian ini adalah 1. Memberikan pengetahuan tentang manfaat pemberian asap cair sebagai anti hama dan penyakit pada tanaman kakao, 2. Petani kakao bisa mengaplikasikan penggunaan asap cair pada tanaman kakao sebagai pestisida alami sehingga diharapkan pendapatan petani kakao meningkat. Metode yang dipergunakan dalam pengabdian ini menggunakan metode ceramah dan demonstrasi berupa aplikasi asap cair kulit kakao pada tanaman kakao. Hasil dari pengabdian ini petani memahami manfaat penggunaan asap cair kulit kakao sebagai pestisida alami. Hasil yang lain petani bisa menerapkan asap cair kulit kakao dengan dosis pemakaian 10 cc/liter dengan cara penyemrotan pada tanaman kakao yang berbuah.

Kata kunci : Asap Cair Kulit kakao, pestisida Alami

PENDAHULUAN

Kakao (*Theobroma cacao* L.) merupakan salah satu tanaman perkebunan memiliki nilai ekonomis dan peluang pasar cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan permintaan pasar dunia yang semakin meningkat dengan rata-rata 1.500.000 ton per tahun. Peluang pasar bagi komoditas ini juga semakin terbuka seiring dengan adanya kemunduran produksi yang dialami oleh negara-negara penghasil kakao (Amran, 2010).

Di perkebunan kakao rakyat seperti di Kabupaten Padang Pariaman, kehilangan hasil akibat serangan penyakit busuk buah kakao diduga lebih tinggi lagi karena kurang intensifnya pemeliharaan tanaman (Rubiyo dkk, 2010). Oleh karena itu peningkatan produksi kakao senantiasa diupayakan. Namun upaya peningkatan produksi kakao mengalami banyak kendala. Salah satu kendala tersebut yaitu adanya serangan hama dan penyakit yang merupakan faktor pembatas penting pada usaha produksi kakao. Salah satu penyakit yang menimbulkan kerugian besar adalah penyakit busuk buah yang disebabkan oleh *Phytophthora* sp. (Pangestu dkk, 2014).

Penggunaan insektisida sintetik lebih disukai petani dengan alasan mudah didapat praktis dalam aplikasi, petani tidak perlu membuat sediaan sendiri, tersedia dalam jumlah yang banyak dan hasil relatif cepat terlihat (Dono, dkk., 2008). Namun, penggunaan insektisida sintetis dapat menimbulkan pengaruh samping yang merugikan, seperti timbulnya resistensi pada hama sasaran, resurgensi hama utama, eksplosi hama sekunder, dan terjadinya pencemaran lingkungan (Tohir, 2010). Upaya untuk mengurangi dampak negatif tersebut diperlukan suatu pemahaman tentang pengelolaan agroekosistem yang berprinsip Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) dan menggunakan pengendalian secara nabati.

Salah satu yang dapat dimanfaatkan yaitu limbah kulit kakao untuk pembuatan asap cair. Asap cair merupakan cairan kondensat uap asap hasil pirolisis kayu yang mengandung senyawa penyusun utama asam, fenol dan karbonil hasil degradasi termal komponen selulosa, hemiselulosa dan lignin. Senyawa asam, fenol dan karbonil dalam asap cair memiliki kontribusi dalam karakteristik aroma, warna dan *flavor* (Girard, 1992).

Penanganan limbah pertanian dan perkebunan sampai saat ini masih merupakan kendala dalam program penanganan limbah di tingkat petani. Masalah ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah keterbatasan waktu, tenaga kerja, dan keterbatasan areal pembuangan. Limbah pertanian dan perkebunan khususnya kulit kakao belum banyak dimanfaatkan walaupun dalam beberapa kondisi memiliki potensi sebagai bahan pakan ternak maupun bahan baku pembuatan kompos, sehingga perlu dilakukan pengolahan untuk bisa memberikan nilai tambah dalam mendukung program pemanfaatan limbah potensial yang dihasilkan oleh tanaman kakao yaitu limbah kulit kakao (Wahyu, 2018)

Penelitian mengenai asap cair dari limbah kulit kakao untuk menghambat pertumbuhan patogen tanaman telah banyak dilakukan. Hasil penelitian Wahyu (2018)

bahwa asap cair kulit kakao hasil pirolisis dapat digunakan sebagai pestisida. Girrad (1992), menyebutkan terdapat lebih dari 3 senyawa aktif yang terdapat di dalam asap cair tempurung kelapa, di antaranya fenol, karbonil, keton, aldehid, asam organik, furan, alkohol, ester, lakton hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon polisiklis aromatis. Senyawa utama yang berperan sebagai antimikrobia pada asap cair adalah fenol dan asam asetat. Fenol merupakan antiseptik dan desinfektan yang efektif terhadap bentuk vegetatif bakteri gram positif dan gram negatif, mikrobakteria, beberapa jamur dan virus tetapi kurang efektif dalam bentuk spora (Sumarni,2010)..Atas dasar penelitian tersebut maka sudah dilakukan pengabdian kepada masyarakat

Tujuan pengabdian ini adalah 1.Memberikan pengetahuan kepada petani kakao tentang manfaat pemberian asap cair sebagai anti hama dan penyakit pada tanaman kakao, 2. Petani kakao bisa mengaplikasikan penggunaan asap cair kakao sebagai pestisida alami sehingga diharapkan pendapatan petani kakao meningkat

METODE PELAKSANAAN

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sudah dilaksanakan mulai April 2019. Acara diawali dengan survey lapangan, sosialisasi dan pertemuan dengan masyarakat petani terdiri dari anggota kelompok petani kakao dan tokoh masyarakat nagari Ambung Kapur Kecamatan Sungai Sariek serta dinas dari BPP Sungai Sariek dilaksanakan di kebun petani kakao Aulia Natural Kabupaten Padang Pariaman. Praktek (uji terap) dilaksanakan di lokasi petani kakao milik kelompok tani seluas (0,25 Ha) yang sudah disiapkan sebelumnya.

Langkah-langkah pelaksanaan

Langkah-Langkah pelaksanaan yang akan dilakukan

Langkah 1. Pengurusan ijin kegiatan kepada aparat nagari Ambung Kapur Kecamatan Sungai Sariek Kabupaten Padang Pariaman yang ditandatangani oleh Ketua LPPM Universitas Ekasakti, ketika surat ijin sudah keluar baru bisa melakukan koordinasi dengan walinagari Ambung Kapur agar berkenan mengundang instansi terkait pada acara sosialisasi kegiatan.

Langkah 2. Sosialisasi Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat bertempat di Kantor Walinagari Ambung Kapur dengan mengundang instansi terkait oleh Walinagari meliputi masyarakat pelaku usaha tanam kakao, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, aparat nagari, kecamatan (penyuluh), pemma Kabupaten Padang Pariaman seperti Dinas Pertanian dan Perkebunan serta dinas peternakan Kabupaten Padang Pariaman. Sosialisasi lebih lanjut akan diintensifkan kepada petani kakao yang akan terlibat dalam kegiatan ini yang sudah bersedia menjadi mitra.

Langkah 3. Persiapan perlengkapan. Perlengkapan yang akan disiapkan perlengkapan dari tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) turun kelapangan seperti gunting, sepatu bot, sarung tangan, topi dan lain-lain. Sedang perlengkapan untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman kakao seperti asap cair kulit kakao sebagai bahan baku pembuatan asap cair sudah disiapkan. Peralatan untuk aplikasi asap cair seperti ember, botol dan alat semprot sudah disiapkan.

Langkah 4. Pembekalan tim teknis. Sebelum tim teknis turun ke lokasi kegiatan sudah diberikan pembekalan dan praktek terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Materi pembekalan dan praktek adalah :

1. Penerapan Teknis budidaya produksi kakao agar sesuai SOP yang penekanannya mulai dari cara pembuatan pembibitan kakao yang baik, teknik pengolahan tanah, budidaya termasuk perawatan tanaman kakao menggunakan asap cair sampai kepada pasca panen.
2. Pengenalan manajemen produksi mulai dari format membuat catatan administrasi pembukuan seperti masalah keuangan, pengarsipan, cara pembuatan usulan program
3. Metode-metode untuk memotivasi petani mau mengadopsi inovasi

Langkah 4. Pelaksanaan di lapangan. Kegiatan yang sudah dilaksanakan dilokasi kegiatan adalah penyuluhan pembuatan asap cair kulit kakao, teknik pengolahan tanah yang baik, cara penanaman kakao yang baik, pembuatan biokatalisator sebagai media pemacu pembuatan pupuk organik dan diaplikasikan untuk

pemupukan tanaman kakao. Kegiatan praktek langsung di dilaksanakan dilahan petani kakao seluas 0,25 Ha. Sebelum kegiatan pelatihan dilakukan, terlebih dahulu dirancang materi pelatihan yang sesuai dengan kegiatan. Hari pertama dilakukan pengenalan cara pembuatan bibit kakao yang bermutu, cara pengolahan tanah yang baik, cara penanaman bibit kakao yang baik, cara pembuatan biokatalisator untuk biang pupuk organik, melalui tatap muka di kelas secara terstruktur. Materi disampaikan oleh nara sumber yang berkompeten di bidangnya. Hari berikutnya praktek langsung dari materi yang sudah diberikan dan pendampingan di lokasi kegiatan. Praktek ini langsung dipandu oleh instruktur yang sudah berpengalaman di bidangnya.

Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah :

1. Metode ceramah : untuk menjelaskan tentang materi yang akan diberikan yaitu mengenai cara budidaya tanaman kakao yang baik, pembuatan biokatalisator sebagai biang pembuatan pupuk organik, pembuatan asap cair sebagai pestisida alami dan cara pemeliharaan kakao dan pasca panen.
2. Metode Demonstrasi : mendemonstrasikan pembuatan bibit kakao yang berkualitas, teknik penanaman dan pemeliharaan bibit padi yang baik, pembuatan biokatalisator sebagai biang pembuatan pupuk organik, cara aplikasi asap cair dengan dosis 1% sebagai pestisida alami, serta cara pasca panen padi.
3. Metode Komando : untuk memberi aba-aba dalam pelaksanaan pelatihan
4. Metode Resiprokal : metode dengan ciri ada pelaku dan pengamatnya, sehingga peserta bisa saling melakukan dan saling menilai terhadap temannya

Langkah 6. Pendampingan petani di lapangan. Tim mendampingi petani langsung di lapangan, tim ikut membantu petani pembudidaya kakao dalam hal pembuatan bibit kakao yang berkualitas, penanaman bibit kakao yang baik, pembuatan biang pupuk untuk pembuatan pupuk organik, pembuatan asap cair kulit kakao untuk pestisida alami, serta panen dan pasca panen kakao. Pendampingan akan dilakukan selama 3 bulan. Tim akan mencatat kondisi sebelum dilakukan pendampingan termasuk hasil kenampakan buah setelah diberikan aplikasi asap cair, selanjutnya tim PKM juga akan mendokumentasikan perubahan hasil selama pendampingan dilakukan.

Langkah 7. Monitoring dan evaluasi

Kegiatan ini akan dimonitoring dan dievaluasi (monev) I dan II baik oleh pemerintah daerah, pihak nagari, fakultas, LPPM Universitas Ekasakti maupun dari LLdikti Wilayah X.

Metode Pendekatan Untuk Menyelesaikan Persoalan Mitra

Berdasarkan permasalahan yang telah di kemukakan, maka dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendidikan orang dewasa, pelatihan produksi dengan penerapan teknologi tepat guna, pelatihan manajemen usaha, dan pendampingan. Dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas dan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, metode pendekatan yang ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut secara operasional adalah sebagai berikut:

- a. Membuat pupuk organik, pestisida nabati dari asap cair kulit kakao dengan metode pendidikan dan pelatihan serta metode pendampingan. Pupuk organik dan pestisida nabati akan membantu petani kakao sehingga dapat pengurangi pengeluaran untuk pembelian saprodi sehingga dapat meningkatkan pendapatan .
- b. Memberikan teknologi tepat guna kepada kelompok tani dengan memanfaatkan potensi yang ada dengan metode pendidikan, pelatihan produksi dan pendampingan. Bahan limbah seperti kulit kakao kalau dibiarkan begitu saja lama kelamaan akan mengalami perubahan akibat pengaruh fisiologis, mekanis, fisis, kimiawi, dan mikrobiologis. Sehingga menimbulkan masalah lingkungan sehingga perlu diberikan penanganan berupa teknologi tepat guna untuk mengolah limbah tersebut menjadi asap cair akan bisa meningkatkan nilai tambah produk.
- c. Memberikan pelatihan manajemen usaha, dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan pemilik usaha (Mitra) dalam menerapkan manajemen di bidang organisasi, produksi, keuangan, administrasi, harga jual produk, konsumen, dan teknik pemasaran.

Untuk mencapai keberdayaan dapat diupayakan dengan : a). Menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan potensinya berkembang, b). Memperkuat potensi yang

telah dimiliki, c) Melindungi dan membuat yang lemah menjadi lebih kuat,d). Melalui latihan praktek secara langsung melalui proses belajar lapangan

Partisipasi Mitra Dalam Pelaksanaan Program

Kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan metode pendidikan, pelatihan produksi, pelatihan manajemen usaha, dan Pendampingan. Rencana kegiatan ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut seperti Tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1. Partisipasi Mitra

No	Aplikasi Kegiatan	Metode Pendekatan	Target	Partisipasi Mitra
1	Membuat pupuk organik dan pengenalan limbah hasil pertanian menjadi pupuk organik	Ceramah, demonstrasi dan pendampingan	Mampu membuat dan mengaplikasikan pupuk Organik pada tanaman kakao	-Aktif dalam mengikuti setiap kegiatan -Menyediakan bahan baku dan mengikuti setiap kegiatan pelatihan dan praktek
2	Membuat pestisida nabati	Ceramah, demonstrasi dan pendampingan	Mampu membuat dan mengaplikasikan Pestisida nabati	Aktif dalam mengikuti setiap kegiatan -Menyediakan bahan baku dan mengikuti setiap kegiatan pelatihan dan praktek
3	Pemberdayaan wanita tani yang kurang memiliki akses	Pendidikan, pelatihan dan pendampingan	Meningkatkan kemandirian, ekonomi produktif berdasarkan atas potensi sumberdaya alam yang tersedia, peluang pasar dan kemampuan penguasaan teknologi oleh mitra	Hadir pada setiap kegiatan, diskusi dan penerapan hasil pengetahuan dan keterampilan
4	Memberikan Materi Manajemen Usaha	Pelatihan dan pendampingan aplikasi manajemen	Mampu Menerapkan manajemen, produksi,	Aktif mengikuti pelatihan manajemen usaha

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Keberlanjutan Program Setelah selesai Kegiatan PKM Dilaksanakan

Rancangan evaluasi pada kegiatan ini yaitu melalui monitoring dan dan pendampingan. Evaluasi pelaksanaan program ini dilihat dari : penguasaan materi, peningkatan kreatifitas, keuletan, peningkatan kemandirian mitra, kemampuan teknologi, wawasan dan keterampilan mitra dalam meningkatkan hasil, peningkatan pemasaran dan peningkatan omzet mitra. Keberlanjutan program, akan dilanjutkan ke Program IPW (Iptek Perberdayaan Wilayah), yang sebelumnya selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terutama dengan Walinagari Ambung Kaur, Camat Sungai Sariek, Dinas Pertanian, perkebunan dan peternakan Kabupaten Padang Pariaman termasuk dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dan petani pembudidaya kakao dalam rangka menyamakan persepsi agar pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada ,masyarakat terus berjalan dengan lancar. Persamaan persepsi dalam keberlanjutan program diperoleh hasil berupa pembagian peran dan tugas yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan. Hasil kesepakatan selanjutnya dimplementasikan dalam bentuk program lanjutan.

Dalam pelaksanaan program pelaksana pengabdian kepada masyarakat, masyarakat dan tim diwajibkan mencatat semua kegiatan dalam bentuk buku harian (*log book*) untuk bahan dasar dalam melakukan evaluasi kegiatan dilapangan. Peserta pengabdian (masyarakat) didorong untuk melakukan pertemuan kelompok dengan masyarakat pembudidaya kakao setiap 2 minggu untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan. Proses evaluasi dilaksanakan dengan melibatkan unsur-unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda maupun perangkat nagari, perangkat camat dan penyuluh di wilayah petani yang merupakan binaannya. Adanya unsur evaluasi yang diadakan secara bersama-sama diharapkan nantinya pelaksanaan program akan semakin baik. Hasil final pelaksanaan program yang sudah dilaksanakan selama ini disosialisasikan lewat media social, koran, lokakarya dengan mengundang stakeholder yang terkait dan dari hasil kesepakatan tersebut dan program lanjutan akan diserahkan kepemerintahan Nagari ambung kapur untuk diteruskan ke pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan dan praktek mulai cara-cara penyiapan bibit coklat berkualitas, cara budidaya (pemeliharaan) kakao yang baik, panen dan pasca panen serta manajemen usaha sudah dilakukan. Untuk permasalahan ini masyarakat sudah dianggap tahu karena sebelumnya sudah mendapat penyuluhan dan praktek dari pendamping-pendamping sebelumnya seperti *swiscontact*. Tim pengabdian banyak bersifat sharing untuk berbagi pengalaman untuk menangani masalah kakao. Alasan tim pengabdian memberikan materi diatas, karena keberhasilan petani kalau mau berhasil dalam budidaya kakao harus menggunakan pendekatan komprehensif. Artinya antara kegiatan satu dengan yang lain harus saling terkait, tidak bisa pendekatan dilakukan dari satu sisi saja.

Permasalahan yang memang tidak bisa diselesaikan oleh petani kakao adalah pengendalian penyakit busuk buah. Selama ini sudah dilakukan usaha-usaha dengan pengendalian kimia, pengendalian hayati, menjaga kebersihan lahan, tetap belum bisa teratasi. Berdasarkan permasalahan tersebut dari hasil survey tim pengabdian fakultas pertanian dan mengambil sampel buah yang terserang penyakit, sudah teridentifikasi jenis jamur yang menyerang buah kakao. Proses identifikasi jamur dilakukan kerjasama dengan labor Mikrobiologi HPT Universitas Andalas. Hasil identifikasi menyebutkan bahwa jenis jamur yang menyerang buah coklat ini adalah jamur *phytophthora* sp. Berdasarkan identifikasi tersebut selanjutnya tim melakukan uji asap cair kulit kakao sebagai anti jamur. Hasil uji anti jamur menyatakan bahwa pada konsentrasi asap cair 1% sudah bisa dianggap sebagai penghambat perkembangan jamur.

Berdasarkan hasil tersebut dicoba diaplikasikan dilapangan. Sekarang masih sedang berlangsung, dan petani kakao bersama tim pengabdian dari fakultas pertanian Universitas Ekasakti secara bersama-sama mengamati hasil dilapangan. Hasil kegiatan penyuluhan tentang penggunaan asap cair kulit kakao sebagai pestisida alami kepada petani kakao berjalan dengan lancar. Peserta mengikuti dengan baik kegiatan dari awal kegiatan sampai berakhir. Pada awal sudah dilakukan sosialisasi untuk menyamakan persepsi mengenai rencana pengabdian yang akan dilaksanakan. Dalam kegiatan ini antara tim pengabdian dari Fakultas Pertanian Universitas Ekasakti dengan masyarakat petani kakao secara bersama-sama mencari solusi untuk menghadapi permasalahan masalah penyakit busuk buah. Intinya tidak ada istilah tim pengabdian dari fakultas Universitas Ekasakti tidak merasa lebih

dibandingkan dengan masyarakat. Karena dasar materi pengabdian yang diberikan berakar dari permasalahan yang dialami oleh petani kakao, maka petani sangat serius mengikuti kegiatan ini.

Berdasarkan permasalahan yang diamati dilapangan, maka sudah dicoba memberikan solusi dengan menggunakan asap cair kulit kakao sebagai pestisida nabati. Kegiatan ini sekarang sedang berjalan, dan akan dibandingkan antara kakao yang diberikan perlakuan asap cair dibandingkan dengan tanaman kakao tidan diberikan perlakuan. Hasil perbandingan ini akan sama-sama dicatat oleh tim pengabdi dan masyarakat dilapangan. Manfaat asap cair sangat banyak bisa berperan sebagai sebagai pengawet pangan karena mempunyai sifat anti mikroba, antioksidan. Keguaan saat ini sudah semakin meluas, salah satunya digunakan sebagai pestisida nabati. Asap cair kulit kakao bisa berperan sebagai anti jamur. Adanya penggunaan asap cair kulit kakao akan bisa mengendalikan jamur yang sering menyerang buah kakao. Hasil yang ditunjukkan dengan pemberian asap cair kulit kakao pada tanaman kakao dengan dosis pemberian 1% sudah mulai menunjukkan hasil yang memuaskan. Kelihatan tanaman kakao yang disemprot dengan asap cair dalam rentang waktu penyemprotan setiap 3 hari sekali pada tanaman kakao berbunga menunjukkan pengaruh yang cukup baik. Artinya tanaman kakao yang berbunga, rata-rata bisa menghasilkan buah. Hasil akan berbeda dengan tanaman kakao dengan tanpa pemberian asap cair kulit kakao, menunjukkan hasil rata-rata bakal buah dari bunga mengering dan ditumbuhi jamur.

Agar lebih efektif dalam melakukan budidaya tanaman kakao khususnya dalam pengendalian hama dan penyakit, maka sangat perlu diperhatikan aspek kebersihan tanaman kakao, perlu juga dilakukan pemangkasan ranting-ranting daun kakao biar tidak rimbun. Tujuan pemangkasan ini adalah untuk mencegah kelembaban dilingkungan tanaman kakao. Adanya cahaya yang masuk pada tanaman kakao akan mengatur kelembaban lingkungan tanaman. Kondisi ini akan berpengaruh dalam pertumbuhan jamur pada tanaman kakao, dalam artian bisa dikurangi dibandingkan dalam kondisi lembab.

KESIMPULAN

1. Asap cair kulit coklat dapat digunakan sebagai pestisida nabati.
2. Konsentrasi asap cair kulit kakao 1% dapat menghambat pertumbuhan jamur *Phytophthora* sp.
3. Penggunaan asap cair kulit kakao sudah diaplikasikan oleh kelompok tani aulia natural .

SARAN

Untuk lebih efektifnya kegiatan pengendalian penyakit yang disebabkan oleh jamur dan sudah dicoba dikendalikan dengan penggunaan asap cair kulit coklat, perlu juga memperhatikan aspek-aspek yang lain seperti cara budidaya yang baik, menjaga kebersihan lahan lingkungan tanaman kakao. Hal lain kalau kegiatan ini agar berhasil perlu adanya kelanjutan pembinaan dari instansi yang terkait, dan keberhasilakn ini bisa terus disosialisasikan kepada petani coklat disekitarnya agar petani kakao semangat kembali untuk menanam kakao.

Ucapan Terima kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sesuai kontrak Penelitian Tahun Anggaran tahun 2019 nomor 005/LPPM-UNES/Kontrak-Penelitian-J/2019. Rektor Universitas Ekasakti, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ekasakti, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Ekasakti, tim dan mahasiswa yang membantu kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran, A. 2010. Studi Evaluasi Gerakan Nasional Peningkatang Produksi dan Mutu kakao (Gernas Kakao) di Kabupaten. E.Journal. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Dono, D., S. Hidayat, C, Nasahi, dan E, Anggraini. 2008. Pengaruh Ekstrak Biji *Barringtonia asiatica* L. (Kurz) (Lecythidaceae) Terhadap Mortalitas Larva dan

- Fekunditas *Crocidolomia pavonana* F. (Lepidoptera : Pyralidae). *Jurnal Agrikultura* Vol. 19, No. 1, ISSN 0853 – 2885.
- Erna Pangestu, Imam Suswanto, Supriyanto, 2014. Uji Penggunaan Asap Cair Tempurung Kelapa Dalam Pengendalian *Phytophthora sp.* Penyebab Penyakit Busuk Buah Kakao Secara Invitro.
- Katja, D.G, E, Suryanto, L.I, Momuat, , Y. Tambunan. 2008. Pengaruh Adsorben Terhadap Aktivitas Antioksidan Dari Asap Cair Kayu Cempaka (*Michelia champaka* Linn). *Chem. Prog.* Vol. 1, No. 1.
- Noveriza, R. dan M. Tombe. 2003. Uji *In vitro* Limbah Pabrik Rokok Terhadap Beberapa Jamur Patogenik Tanaman. *Buletin Tro.* XIV, (2), 1-7.
- Oramahi HA, F. Diba, dan Wahdina. 2010. Efikasi Asap Cair Dari Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) Dalam Penekanan Perkembangan Jamur *Aspergillus niger*. *J. HPT. Tropika.* Vol. 10, No. 2: 146-153.
- Priyanto S, H.A. Oramahi dan F. Diba. 2013. Aplikasi Asap Cair Dari Kayu Leban (*Vitex pubescens* Vahl) Untuk Pengendalian Jamur Pada Benih Tusam (*Pinus merkusii* Jungh et de vriese) Secara In Vitro. *Jurnal Hutan Lestari.*
- Rubiyo, Purwantara A. dan Sudarsono. 2010. Ketahanan 35 Klon Kakao Terhadap Infeksi *Phytophthora palmivora* Bult. Berdasarkan Uji Detached Pod. *Jurnal Littri* Vol. 16 No. 4 : 172 – 178.
- Sumarni. 2010. Pengujian Daya Racun Asap Cair Tempurung Kelapa (*Cocos nucifera* L) Terhadap Serangan Cendawan Pelapuk Kayu *Schizophyllum commune* Fries. Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Pontianak (skripsi).
- Suryandari, K.C. 2010. Uji Efektivitas Asap Cair Tempurung Kelapa Terhadap Jamur Dari Nira Rusak. Seminar Nasional Pendidikan Biologi FKIP UNS. PGSD FKIP UNS. 423 – 430.
- Tohir, A.M. 2010. Teknik Ekstraksi dan Aplikasi Beberapa Pestisida Nabati untuk Menurunkan Palatabilitas Ulat Grayak (*Spodoptera litura* Fabr.) di Laboratorium. *Buletin Teknik Pertanian* Vol. 15, No. 1 : 37 – 40.
- Umrah, A. T., Esyanti, R.R., Aryantha, I.N.P. 2009. Antagonis dan Efektivitas *Trichoderma sp* Dalam Menekan Perkembangan *Phytophthora palmivora* Pada Buah Kakao. *J. Agroland* 16 (1) : 9 – 16, ISSN : 0854 – 641X.

PERAN KELEMBAGAAN DAN ATRIBUT INOVASI PADA ADOPSI TEKNOLOGI PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU PADI SAWAH DI KABUPATEN BANDUNG BARAT DAN SUMEDANG

Lukman Effendy ^{1*}

¹Lektor Kepala pada Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor

*Email: f1515di@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian peran kelembagaan dan atribut inovasi dalam mempengaruhi adopsi Teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu PTT telah dilakukan di beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dan Sumedang Provinsi Jawa Barat. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan peran kelembagaan penyuluhan, kelompok tani, dan atribut inovasi terhadap adopsi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT). Penelitian dengan metode survei ini, menjadikan populasi, adalah seluruh anggota kelompok yang telah mengikuti program peningkatan produksi padi-jagung dan kedelai (Pajale), yang berjumlah 173 orang di KBB dan 143 orang di Kabupaten Sumedang. Sampel berjumlah 124 orang ditetapkan secara acak sederhana (*Simple Random Sampling*) dengan mengikuti rumus Slovin. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa peran kelembagaan penyuluhan, kelompok tani, dan atribut inovasi memperoleh rata-rata skor lebih dari 3,00 yang berarti cenderung berperan baik dalam adopsi PTT. Tingkat kerumitan inovasi, peran kelembagaan penyuluhan dalam memberikan percontohan usahatani, peran kelompok tani sebagai unit produksi, dan penggunaan varietas unggul baru pada teknologi PTT memperoleh nilai rata-rata skor terendah baik di Sumedang maupun di Bandung Barat, yang berarti faktor-faktor tersebut masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan penyuluhan yang lebih intensif. Peranan masing-masing peubah pada adopsi PTT berdasarkan analisis regresi adalah $Y = 0.61 + 0.369X_1 + 0.245X_2 + 0.365X_3$, yang berarti; kelembagaan penyuluhan tingkat kecamatan, kelompok tani, dan atribut inovasi memberikan kontribusi dalam mempengaruhi adopsi PTT di kedua kabupaten.

Kata Kunci: kelembagaan penyuluhan, kelompok tani, atribut inovasi, teknologi PTT

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejak tahun 2015 pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah mencanangkan program untuk meningkat produksi yang disebut dengan Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai. Targetkan produksi masing-masing

komoditas sebanyak 73.4 juta ton, 20 juta ton, dan 1.2 juta ton untuk kedelai. Untuk komoditas padi sawah diterapkan teknologi budidaya dengan pendekatan terpadu yang disebut Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), yaitu sebuah tatis pengeloan tanaman secara intensif untuk meingkatkan produktivitas dan pendapatan petani serta melestarikan lingkungan produksi melalui pengeloan lahan, air, air, tanaman, OPT, dan iklim secara terpadu (Dewi dan Hanifa. 2013)

Sebagai inovasi, PTT terdapat komponen teknologi yang dibagi dalam dua kelompok yaitu komponen teknologi dasar dan komponen teknologi pilihan. Menurut Nurhayati (2016) komponen teknologi dasar adalah teknologi yang sangat dianjurkan untuk diterapkan di semua lokasi, seperti: (1) Penggunaan varietas unggul baru, inbrida atau hibrida, (2) Penggunaan benih bermutu dan berlabel, (3) Pemberian bahan tatis melalui pengembalian jerami ke sawah atau dalam bentuk kompos dan pupuk kandang, (4) Pengaturan jarak tanam secara optimum, (5) Pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman dan status hara tanah, dan (6) Pengendalian OPT dengan pendekatan pengendalian hama terpadu (PHT). Sementara komponen teknologi pilihan yaitu disesuaikan kondisi, kemauan, dan kemampuan petani setempat, antara lain: (1) Pengelolaan tanah sesuai dengan musim dan pola tanam, (2) Penggunaan bibit muda ≤ 21 hari, (3) Tanam bibit 1 -3 batang per lubang, (4) Pengairan secara efektif dan efisien, (5) Penyiangan dengan landak atau gasrok, dan (6) Panen tepat waktu dan gabah segera dirontok.

Sebuah inovasi mesti memiliki daya tarik sehingga masyarakat berminat dan mau untuk menerapkannya. Menurut Rogers dan Shoemaker (1995) ciri inovasi terdiri atas: keuntungan tatis (*relative advantage*), Kompatibilitas (*compatibility*), Kompleksitas (*complexity*), Triabilitas (*trialability*), dan Observabilitas (*observability*).

Berbagai pengkajian terkait diseminasi atau penyebaran PTT sudah banyak dilakukan oleh peneliti, diantaranya karakteristik inovasi yang melekat pada teknologi PTT tanaman jagung yang dilakukan oleh Dewi dan Hanifa pada tahun 2013 dan faktor kelembagaan yang dilakukan Andriyanita dan Hermawan pada tahun 2013. Hasil pengkajian Dewi dan Hanifa tersebut menemukan bahwa karakteristik inovasi yang mempengaruhi adopsi adalah karakteristi dapat diamati, tidak bertentangan dengan kondisi tatis dan budaya masyarakat setempat, tingkat kemudahan diaplikasi. Sementara faktor

kelembagaan yang berpengaruh keberadaan kelompok tani, penyuluh pertanian, dan keberadaan BPTP.

Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan pasal 8, kelembagaan penyuluhan meliputi: (a) Kelembagaan penyuluhan pemerintah, (b) Kelembagaan penyuluhan swasta, dan (c) Kelembagaan penyuluhan swadaya. Kelembagaan penyuluhan tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan atau Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K). BP3K memiliki peran strategis dalam penyebaran inovasi teknologi, terutama melalui kegiatan fasilitasi diseminasi inovasi teknologi dan informasi, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 26 Tahun 2012. Lebih lanjut dalam peraturan tersebut diuraikan peran BP3K seperti: perencana program, menyebarluaskan inovasi informasi dan teknologi melalui kegiatan penyuluhan, menumbuhkembangkan kelembagaan petani, melaksanakan model pembelajaran melalui demplot, dan membangun jejaring kemitraan.

Kelompok Tani merupakan bentuk kelembagaan petani yang dilahirkan oleh petani anggota untuk memperjuangkan kepentingan petani agar usahatani mereka lebih baik sehingga anggota atau petani sejahtera. Menurut Permentan Nomor 82 Tahun 2013, Kelompok tani memiliki tiga fungsi yaitu: (a) Kelas Belajar, merupakan wadah belajar bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap; (b) Wahana Kerjasama: sebagai tempat untuk memperkuat kerjasama baik di antara petani maupun dengan pihak lain; (c) Unit Produksi; anggota kelompok secara keseluruhan merupakan kesatuan usahatani.

Pengkajian terkait interaksi antara peran kelembagaan penyuluhan di kecamatan, kelompok tani, dan atribut inovasi terhadap proses adopsi teknologi PTT belum banyak dilakukan, karena itu untuk mengetahui sejauhmana peran kelembagaan dan atribut inovasi mempengaruhi adopsi PTT padi sawah di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dan Kabupaten Sumedang maka dirancang penelitian ini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka masalah penelitian adalah sejauhmanakah peran kelembagaan penyuluhan tingkat kecamatan, kelompok tani, dan atribut inovasi PTT, dan dalam adopsi PTT padi sawah di KBB dan Sumedang.

Tujuan Penelitian

Penetapan tujuan penelitian diharapkan dapat menjawab rumusan masalah, tujuan penelitian adalah untuk: (1) mendiskripsikan peran kelembagaan penyuluhan tingkat kecamatan, kelompok tani, dan atribut inovasi pada adopsi PTT padi sawah di KBB dan Kabupaten Sumedang; (2) menganalisis faktor yang mempengaruhi adopsi PTT; dan (3) menemukan strategi untuk peningkatan adopsi inovasi PTT padi sawah di KBB dan Kabupaten Sumedang.

Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai: (1) bahan informasi untuk merumuskan strategi dalam peningkatan adopsi teknologi PTT padi sawah di KBB dan Kabupaten Sumedang, (2) kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan utamanya mengenai karakteristik inovasi, peran kelembagaan penyuluhan kecamatan, dan kelembagaan petani, khususnya kelompok tani, (3) dengan penelitian ini diharapkan teknologi PTT dapat tersebar atau terdifusi lebih luas.

TINJAUAN TEORITIS dan KERANGKA BERPIKIR

Inovasi Teknologi

Rogers dan Shoemakers (1995) mendefinisikan inovasi sebagai ide-ide baru, atau obyek-obyek yang dapat dirasakan sebagai suatu yang baru oleh individu atau masyarakat sasaran penyuluhan. Inovasi juga diartikan suatu ide atau gagasan yang dianggap baru meski pun bagi orang lain bukan lagi informasi baru (Rogers. 2003).

Selanjutnya Rogers (2003) menjelaskan kecepatan adopsi inovasi dipengaruhi oleh karakteristik inovasi, berupa: (1) *Relative advantage*; yaitu derajat suatu inovasi dirasakan lebih baik dari pada ide yang digantikannya, derajat keuntungan dapat diukur, secara ekonomis, tetapi faktor kenyamanan dan kepuasan menjadi suatu pertimbangan. Semakin besar keuntungan yang diraskan maka semakin besar pula peluang terjadinya adopsi; (2) *Compatibility* merupakan derajat kesesuaian yang dirasakan dan tetap konsisten dengan nilai-nilai yang ada, nilai-nilai yang dianutnya; (3) *Complexity* adalah derajat kerumitan inovasi atau derajat kemudahan inovasi untuk dipahami dan digunakan; (4) *Trialability* merupakan derajat kemudahan untuk diujicoba sesuai dengan kondisi yang ada; (5) *Observability* adalah derajat kemudahan inovasi segera untuk dilihat dengan kasat mata dan dirasakan hasilnya.

Adopsi Inovasi

Rogers dan Shoemaker (1995) menjelaskan bahwa adopsi inovasi sebagai keputusan meliputi empat tahap, yaitu: (1) tahap pengenalan atau pengetahuan, (2) tahap persuasi, (3) tahap keputusan, dan (4) tahap konfirmasi. Kemudian pada Tahun 2003, Rogers menyempurnakan mendapatnya menjadi: (1) tahap pengenalan, yang mana seseorang mengetahui adanya inovasi dan memperoleh beberapa pengertian tentang bagaimana inovasi tersebut berfungsi, (2) tahap persuasi, di mana seseorang membentuk sikap berkenan atau tidak berkenan terhadap inovasi, (3) tahap keputusan, di mana seseorang terlibat dalam kegiatan yang membawanya pada pilihan untuk menerima atau tidak menerima, (4) tahap penerapan, di mana seseorang telah menggunakan inovasi itu, dan (5) tahap konfirmasi, di mana seseorang mencari penguat keputusan yang telah diambilnya. Pada tahap konfirmasi seseorang bisa saja mengubah keputusannya, apabila ia memperoleh informasi yang bertentangan.

Beberapa penelitian terkait dengan adopsi inovasi telah dilakukan. Burhansyah (2014) menemukan, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi pertanian, yaitu (a) jarak dari pemukiman ke lokasi usahatani, (b) jarak dari pemukiman ke lokasi sumber inovasi, (c) tingkat pendidikan, dan (d) luas lahan usahatani. Demikian juga hasil penelitian Serah (2011) dilaporkan, bahwa karakteristik inovasi, tatis social, dan saluran komunikasi berpengaruh positif pada adopsi teknologi pertanian. Sementara hasil

penelitian Wahyu (2011) menunjukkan, bahwa kecepatan adopsi inovasi ditentukan oleh; (a) karakteristik inovasi, (b) karakteristik calon pengguna, dan saluran komunikasi.

Pengelolaan Tanaman Terpadu

Dalam pengelolaan tanaman secara terpadu (PTT), komponen teknologi dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu komponen teknologi dasar dan komponen teknologi pilihan. Komponen teknologi dasar (*compulsory*) terdiri atas: (1) Penggunaan varietas unggul baru, inbrida atau hibrida, (2) Penggunaan benih bermutu dan berlabel, (3) Pemberian bahan tatist melalui pengembalian jerami ke sawah atau dalam bentuk kompos dan pupuk kandang, (4) Pengaturan jarak tanam secara optimum, (5) Pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman dan status hara tanah, dan (6) Pengendalian OPT dengan pendekatan pengendalian hama terpadu. Sedangkan komponen teknologi pilihan yaitu disesuaikan kondisi, kemauan, dan kemampuan petani setempat, antara lain: (1) Pengelolaan tanah sesuai dengan musim dan pola tanam, (2) Penggunaan bibit muda ≤ 21 hari, (3) Tanam bibit 1 -3 batang per lubang, (4) Pengairan secara efektif dan efisien, (5) Penyiangan dengan landak atau gasrok, dan (6) Panen tepat waktu dan gabah segera dirontok.

Kelembagaan Penyuluhan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang tatis penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan juga menjelaskan secara hirarkis kelembagaan penyuluhan, mulai dari pusat hingga tingkat kecamatan. Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang tersebut menguraikan, bahwa Balai Penyuluhan mempunyai tugas: (a) menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan programan penyuluhan kabupaten/kota, (b) melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan, (c) menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar, (d) memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha, I memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan, dan (f) melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usahatani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Sejalan dengan itu, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan mengamanatkan dijelaskan, bahwa tugas utama Balai Penyuluhan di tingkat kecamatan (BP3K) adalah; 1) menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan yang sejalan dengan program penyuluhan kabupaten atau kota yang merupakan sintesa antara RKPD-RKPD se-kecamatan dan program-program pembangunan pertanian di wilayah kecamatan, yang disusun setiap tahun; 2) melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan yang telah ditetapkan; 3) menyediakan dan menyebarkan informasi tentang teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar; 4) memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha; 5) memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, 6) memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi pelaku utama dan pelaku usaha; dan 7) melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usahatani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Salah satu penelitian terkait dengan peran kelembagaan dilaporkan Suradisastra (2008), yang menyimpulkan bahwa pemberdayaan kelembagaan pertanian dan kelembagaan petani terkait dengan elemen sosio-teknis. Sementara Puyung (2011) melaporkan hasil penelitiannya, bahwa kelembagaan penyuluhan pertanian belum menjalankan fungsi secara maksimal untuk memberikan pelayanan kepada petani.

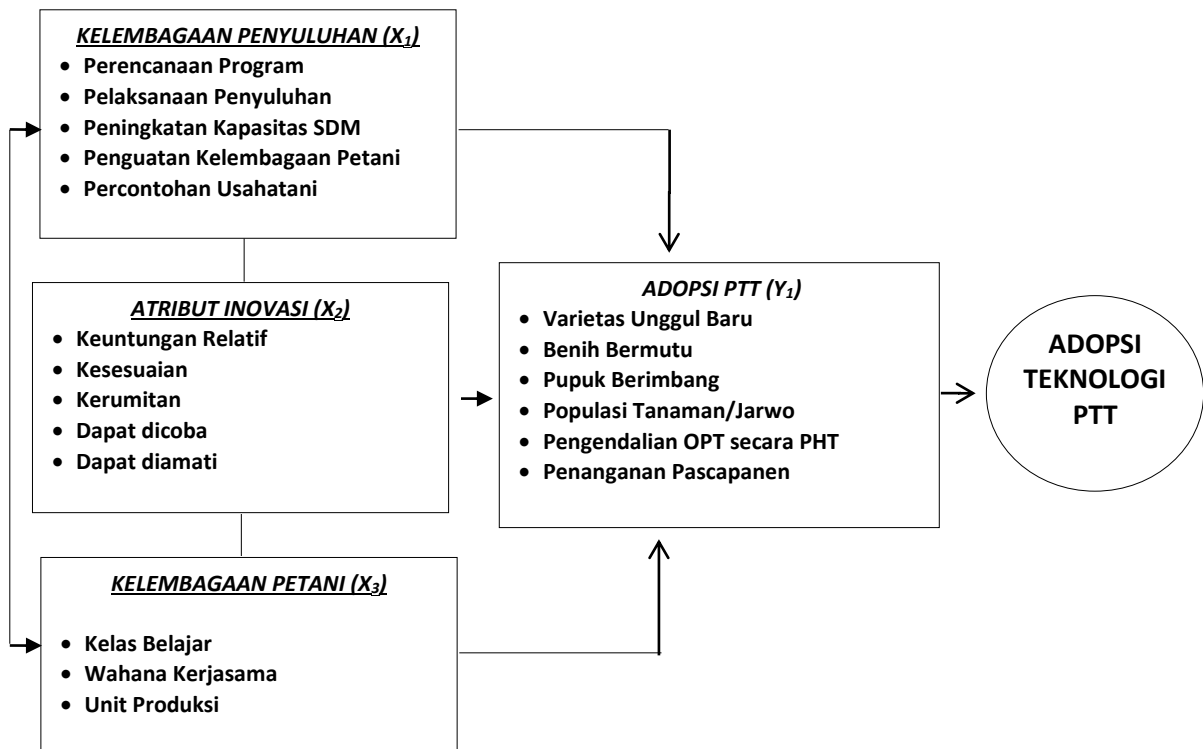
Kelompok Tani

Kelompok Tani merupakan salah satu bentuk kelembagaan petani, yang merupakan lembaga nonformal yang tumbuh dan dikembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani. Kelompok tani pada dasarnya merupakan kelembagaan non-formal di pedesaan yang memiliki memiliki fungsi: (a) Kelas Belajar, yaitu sebagai wadah belajar mengajar bagi anggota guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi usahatani yang mandiri sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik. (b) Wahana Kerjasama, merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama baik di antara tatis petani dalam poktan dan antar poktan maupun dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usahatani lebih efisien dan lebih mampu menghadapi

ancaman, tantangan, hambatan, gangguan serta lebih menguntungkan; dan (c) Unit Produksi, yang mana usahatani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota poktan secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomis usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.

Kerangka Hipotesis Penelitian

Kerangka hipotesis merupakan cerminan faktor-faktor yang diduga saling berhubungan dalam mempengaruhi adopsi PTT padi sawah yaitu: (1) Peran kelembagaan penyuluhan meliputi; perencanaan program, fasilitasi kegiatan penyuluhan, penguatan kelembagaan petani, percontohan, dan penumbuhan jejaring kemitraan; (2) Fungsi kelompok tani; sebagai kelas belajar, wahana kerjasama, dan unit produksi; dan 3) Atribut inovasi terdiri atas, keuntungan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, trialabilitas, dan observabilitas. Secara skematis kerangka hipotetik penelitian tersaji pada gambar berikut:



Gambar 1. Kerangka Hipotetik Peubah Penelitian

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang, di beberapa kecamatan yang merepresentasikan kemampuan kelembagaan penyuluhan kecamatan (BP3K). Jumlah BP3K di Kabupaten Bandung Barat 16 buah yang berada di setiap Kecamatan, sedangkan di Kabupaten Sumedang kelembagaan penyuluhannya berada di bawah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Pengembangan (UPTDP) yang berjumlah 26 buah. Lokasi penelitian untuk Kabupaten Bandung Barat di BP3K Cipongkor, BP3K Sindangkerta, dan BP3K Gununghalu, sedangkan Kabupaten Sumedang di UPTDP Sumedang Selatan dan UPTDP Rancakalong. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan (Mei - Juli 2018).

Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pendekatannya, penelitian ini merupakan bentuk *Ex post facto*, yaitu penelitian menemukan sebab atau faktor yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi. Selanjutnya dilaksanakan dengan metode survei pada sampel yang mewakili populasi.

Populasi dan Sampling

Teknik sampling menggunakan pendekatan *probability sampling*, khususnya dengan *Simple Random Sampling*, yaitu pengambilan sampel secara acak sederhana tanpa memperhatikan strata yg ada dalam populasi. Populasi penelitian adalah petani anggota kelompok yang telah mengikuti program peningkatan produksi padi (UPSUS Pajale) pada beberapa kelompok tani di masing-masing kecamatan. Berdasarkan pendekatan tersebut jumlah populasi di Kabupaten Sumedang sebanyak 142 orang, sedangkan di Kabupaten Bandung Barat berjumlah 173 orang. Mengikuti Slovin diperoleh jumlah sampel sebanyak 124 orang. Rincian jumlah sampel setiap kecamatan dan kabupaten tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3. Kerangka Sampling dan Jumlah sampel setiap Kecamatan dan Kabupaten

No	Kabupaten	Kecamatan	Populasi (orang)	Sampel ¹⁾
1	Bandung Barat	1. Cipongkor	54	20
		2. Sindangkerta	65	25
		3. Gununghalu	54	20
		<i>Jumlah I</i>	173	65
2	Sumedang	1. Sumedang Selatan	70	29
		2. Rancakalong	72	30
		<i>Jumlah II</i>	142	59
Total populasi I + II			315	124

¹⁾ Ditetapkan secara proporsional

Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin. Hasil perhitungan sampel menggunakan rumus Slovin diketahui jumlah sampel dari populasi berjumlah 315 orang adalah sebanyak 124 orang, yang terdiri atas 65 orang sampel dari Kabupaten Bandung Barat dan 59 orang sampel dari Kabupaten Sumedang, dengan rincian seperti pada tati berikut:

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan berupa kuesioner yang berisi pertanyaan atau pernyataan yang berhubungan dengan peubah penelitian. Struktur instrumen dibagi dalam tiga bagian; *Pertama* adalah data dasar, berisikan identitas responden seperti nama, alamat tempat tinggal, dan tipologi daerah, nama enumerator (pencacah), tanggal pelaksanaan wawancara, dan tanda tangan. *Kedua*, berisikan pertanyaan atau pernyataan berkaitan dengan peubah bebas, yaitu: (X₁) Atribut inovasi, (X₂) BP3K sebagai representasi kelembagaan penyuluhan tingkat kecamatan, (X₃) Kelompok Tani sebagai representasi kelembagaan petani, dan peubah terikat (Y) berupa adopsi inovasi PTT.

Reliabilitas instrumen mencerminkan kemampuannya dalam mengukur fenomena secara konsisten. Untuk menguatkan keterandalan instrumen sebelum penelitian, dilakukan: (1) Uji coba, dilakukan terhadap 20 pemuda dari komunitas usahatani cabai Kab. Bogor; (2) Uji reliabilitas menggunakan rumus koefisien *Cronbach Alpha*, dimana instrumen tergolong terandalakan (*reliabel*) bila nilai koefisien antara 0.6 – 1. Hasil uji reliabilitas tersebut diperoleh nilai *Cronbach Alpha* adalah 0.0895, sehingga instrumen yang dibuat dapat digunakan untuk pengumpulan data pada responden sesungguhnya.

Data yang dikumpulkan menggunakan skala interval dengan nilai 1 – 4, yang mana nilai 1 menunjukkan nilai terendak ayng berarti mencerminkan kurang baik/berperan dst, sementara nilai 4 adalah nilai tertinggi yang berarti sangat baik/sangat berperan dst.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan dua cara: 1) analisis deskriptif dilakukan untuk mendiskripsikan peran kelembagaan penyuluhan, kelompok tani, dan atribut inovasi; 2) analisis regresi linier untuk mengetahui pengaruh faktor kelembagaan penyuluhan, kelompok tani, dan atribut inovasi dengan mengikuti persamaan: $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$. Analisis data dibantu program *statistical product solution service (SPSS)* versi 2.1.

HASIL dan PEMBAHASAN

HASIL

Nilai rerata peubah di masing – masing kabupaten

Secara umum hasil penelitian dideskripsikan berdasarkan peubah masing-masing di masing-masing kabupaten. Berikut diuraikan nilai rata-rata dan peringkat masing-masing peubah di Kabupaten Sumedang.

Tabel 4. Nilai rata-rata dan peringkat atribut inovasi di Kab. Sumedang

No	Indikator	Rata-rata	Peringkat
1	Dapat diamati	3.280	1
2	Dapat dicoba	3.104	2
3	Keuntungan relatif	3.080	3
4	Kesesuaian	3.080	4
5	Kerumitan	2.771	5
		<i>Rerata² = 3.063</i>	

Tabel 5. Nilai rata-rata dan peringkat Kelembagaan Penyuluhan di Kab. Sumedang

No	Indikator	Rata-rata	Peringkat
1	Perencanaan Program	3.285	1
2	Pelaksanaan Penyuluhan	3.175	2
3	Peningkatan Kapasitas SDM	3.150	3
4	Penguatan Kelembagaan Petani	3.128	4
5	Percontohan Usahatani	2.930	5
		<i>Rerata² = 3.134</i>	

Tabel 6. Nilai rata-rata dan peringkat Kelembagaan Petani di Kab. Sumedang

No	Indikator	Rata-rata	Peringkat
1	Wahana Kerjasama	3.240	1
2	Kelas Belajar	3.156	2
3	Unit Produksi	3.046	3
		<i>Rerata² = 3.147</i>	

Tabel 7. Nilai rata-rata dan peringkat Tahapan Inovasi di Kab. Sumedang

No	Indikator	Rata-rata	Peringkat
1	Pemupukan berimbang	3.245	1
2	Pengaturan populasi/Jarwo	3.190	2
3	Penggunaan benih bermutu	3.035	3
4	Penanganan pasca panen	3.009	4
5	Pengendalian OPT secara PHT	2.995	5
6	Penggunaan varietas unggul baru	2.900	6
		<i>Rerata² = 3.062</i>	

Berdasarkan rincian Tabel 4 hingga Tabel 7 di atas diperoleh, bahwa nilai rata-rata terendah masing-masing peubah di Kabupaten Sumedang adalah: (1) tingkat kerumitan untuk peubah atribut inovasi, (2) percontohan usahatani untuk peubah peran kelembagaan penyuluhan, (3) unit produksi untuk peubah kelembagaan petani, dan (4) penggunaan varietas unggul baru.

Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kerumitan sebuah inovasi menjadi pertimbangan petani untuk dapat menerima atau adopsi. Demikian halnya peran kelembagaan penyuluhan dalam memberikan percontohan usahatani tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya fungsi kelompok tani sebagai unit produksi kurang berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sementara paket teknologi PTT yang masih kurang diadopsi adalah penggunaan varietas unggul baru. Nilai rata-rata dan peringkat masing-masing peubah di Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 8. Nilai rata-rata dan peringkat atribut inovasi di Kab. Bandung Barat

No	Indikator	Rata-rata	Peringkat
1	Dapat diamati	3.344	1
2	Dapat dicoba	3.273	2
3	Keuntungan relatif	3.180	3
4	Kesesuaian	3.180	4
5	Kerumitan	2.562	5
		<i>Rerata² = 3.108</i>	

Tabel 9. Nilai rata-rata dan peringkat Kelembagaan Penyuluhan di Kab. Bandung Barat

No	Indikator	Rata-rata	Peringkat
1	Perencanaan Program	3.354	1.5
2	Pelaksanaan Penyuluhan	3.354	1.5
3	Peningkatan Kapasitas SDM	3.300	3
4	Penguatan Kelembagaan Petani	3.154	4
5	Percontohan Usahatani	3.101	5
		<i>Rerata² = 3,253</i>	

Tabel 10. Nilai rata-rata dan peringkat Kelembagaan Petani di Kab. Bandung Barat

No	Indikator	Rata-rata	Peringkat
1	Wahana Kerjasama	3.416	1
2	Kelas Belajar	3.232	2
3	Unit Produksi	3.124	3
		<i>Rerata² = 3.257</i>	

Tabel 11. Nilai rata-rata dan peringkat Tahapan Inovasi di Kab. Bandung Barat

No	Indikator	Rata-rata	Peringkat
1	Pengaturan populasi/Jarwo	3.307	1
2	Pemupukan berimbang	3.250	2
3	Pengendalian OPT secara PHT	3.192	3
4	Penggunaan benih bermutu	3.162	4
5	Penanganan pasca panen	3.125	5
6	Penggunaan varietas unggul baru	3.098	6
		<i>Rerata² = 3.189</i>	

Tabel 8 – Tabel 11 di atas menunjukkan, bahwa nilai rata-rata terendah masing-masing peubah di Kabupaten Bandung Barat adalah: (1) tingkat kerumitan untuk peubah atribut inovasi, (2) percontohan usahatani untuk peubah peran kelembagaan penyuluhan, (3) unit produksi untuk peubah kelembagaan petani, dan (4) penggunaan varietas unggul baru. Hasil ini mengindikasikan bahwa tingkat kerumitan sebuah inovasi menjadi pertimbangan petani untuk dapat menerima atau adopsi. Demikian halnya peran kelembagaan penyuluhan dalam memberikan percontohan usahatani tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya fungsi kelompok tani sebagai unit produksi kurang berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sementara paket teknologi PTT yang masing kurang diadopsi adalah penggunaan varietas unggul baru.

Nilai rerata peubah gabungan dua kabupaten

Nilai rata-rata masing-masing peubah gabungan dua kabupaten sebagai berikut.

Tabel 12. Nilai rata-rata dan peringkat atribut inovasi gabungan kabupaten

No	Indikator	Rata-rata	Peringkat
1	Dapat diamati	3.318	1
2	Keuntungan relatif	3.233	2
3	Dapat dicoba	3.204	3
4	Kesesuaian	3.140	4
5	Kerumitan	2.646	5
		<i>Rerata² = 3.108</i>	

Tabel 13. Nilai rata-rata dan peringkat Kelembagaan Penyuluhan

No	Indikator	Rata-rata	Peringkat
1	Perencanaan Program	3.326	1
2	Pelaksanaan Penyuluhan	3.280	2
3	Peningkatan Kapasitas SDM	3.239	3
4	Penguatan Kelembagaan Petani	3.143	4
5	Percontohan Usahatani	3.032	5
		<i>Rerata² = 3.204</i>	

Tabel 14. Nilai rata-rata dan peringkat Kelembagaan Petani

No	Indikator	Rata-rata	Peringkat
1	Wahana Kerjasama	3.363	1
2	Kelas Belajar	3.201	2
3	Unit Produksi	3.099	3
		<i>Rerata² = 3,221</i>	

Tabel 15. Nilai rata-rata dan peringkat Tahapan Inovasi

No	Indikator	Rata-rata	Peringkat
1	Pengaturan populasi/Jarwo	3.260	1
2	Pemupukan berimbang	3.248	2
3	Pengendalian OPT secara PHT	3.113	3
4	Penggunaan benih bermutu	3.111	4
5	Penanganan pasca panen	3.078	5
6	Penggunaan varietas unggul baru	3.018	6
		<i>Rerata² = 3.138</i>	

Tabel 12 sampai dengan Tabel 15 di atas menunjukkan, bahwa nilai rata-rata terendah masing-masing peubah gabungan dua kabupaten, yaitu: (1) tingkat kerumitan untuk peubah atribut inovasi, (2) percontohan usahatani untuk peubah peran kelembagaan penyuluhan, (3) unit produksi untuk peubah kelembagaan petani, dan (4) penggunaan varietas unggul baru.

Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kerumitan sebuah inovasi menjadi pertimbangan petani untuk dapat menerima atau adopsi. Demikian halnya peran kelembagaan penyuluhan dalam memberikan percontohan usahatani tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya fungsi kelompok tani sebagai unit produksi kurang berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sementara paket teknologi PTT yang masing kurang diadopsi adalah penggunaan varietas unggul baru. Nilai rata-rata dan peringkat seluruh indikator setiap peubah tersaji sebagai berikut:

Tabel 16. Nilai rata-rata dan peringkat keseluruhan indikator

No	Indikator	Rata-rata	Peringkat
1	Wahana Kerjasama	3.363	1
2	Perencanaan Program	3.326	2
3	Dapat diamati	3.318	3
4	Pengaturan populasi/Jarwo	3.260	4
5	Pelaksanaan Penyuluhan	3.280	5
6	Pemupukan berimbang	3.248	6
7	Peningkatan Kapasitas SDM	3.239	7
8	Keuntungan relatif	3.233	8
9	Kelas Belajar	3.201	9
10	Dapat dicoba	3.204	10
11	Penggunaan benih bermutu	3.111	11
12	Kesesuaian	3.140	12
13	Pengendalian OPT secara PHT	3.113	13
14	Penguatan Kelembagaan Petani	3.143	14
15	Penanganan pasca panen	3.078	15
16	Unit Produksi	3.099	16
17	Penggunaan varietas unggul baru	3.018	17
18	Percontohan Usahatani	3.032	18
19	Kerumitan	2.646	19

Rerata² = 3.161

Pengaruh, Kelembagaan Penyuluhan, Kelompok Tani, dan Atribut Inovasi

Hasil analisis regresi menunjukkan, bahwa peubah karakteristik pribadi, dukungan eksternal, dan motivasi berpengaruh nyata ($p \leq 0.05$) terhadap adopsi yang ditunjukkan dengan: $Y = 0.61 + 0.369X_1 + 0.245X_2 + 0.365X_3$. Hasil ini mengindikasikan, bahwa apabila kelembagaan penyuluhan (X_1), atribut inovasi (X_2), dan kelompok tani (X_3) bernilai nol (0), maka tingkat adopsi PTT (Y) adalah sebesar 0.61.

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien b_1 adalah sebesar 0.369 yang menjelaskan hubungan antara kelembagaan penyuluhan (X_1) dengan tingkat adopsi PTT (Y), yang artinya bila atribut inovasi (X_2) dan kelompok tani (X_3) konstan, maka setiap kenaikan nilai faktor kelembagaan penyuluh (X_1) sebesar satu satuan akan meningkatkan adopsi PTT (Y) sebesar 0.369 satuan. Kemudian nilai koefisien b_2 adalah 0.245, yang menunjukkan hubungan antara atribut inovasi (X_2) dengan adopsi PTT (Y). Artinya jika faktor kelompok tani (X_3) dan kelembagaan penyuluhan (X_1) konstan, maka setiap kenaikan nilai atribut inovasi (X_2) sebesar satu satuan akan meningkatkan adopsi PTT (Y) sebesar 0.245 satuan. Kemudian diketahuinya nilai koefisien b_3 sebesar 0.365, yang menjelaskan hubungan antara kelompok tani (X_3) dengan adopsi PTT (Y). Artinya jika kelembagaan penyuluhan (X_1) dan atribut inovasi (X_2) tetap, maka setiap kenaikan nilai faktor kelompok tani (X_3) sebesar satu satuan akan meningkatkan adopsi PTT (Y) sebesar 0.365 satuan.

Berdasarkan hasil tersebut di atas, maka tingkat adopsi PTT akan meningkat bila peran kelembagaan penyuluhan (X_1), atribut inovasi (X_2), dan peran kelompok tani (X_3) meningkat. Dengan demikian untuk meningkatkan adopsi PTT, maka peran kelembagaan penyuluhan tingkat kecamatan, penciri inovasi yang dapat mendorong adopsi sebuah inovasi, dan peran kelembagaan perlu ditingkatkan. Peningkatan peran kelembagaan penyuluhan dan peran kelompok tani akan memberikan kontribusi lebih besar dalam peningkatan adopsi PTT di kedua Kabupaten yang diteliti.

Pembahasan

Berdasarkan Tabel 16 di atas diketahui beberapa indikator yang memperoleh nilai rata-rata dan peringkat terendah, yaitu: *kerumitan inovasi* untuk peubah atribut inovasi,

percontohan usahatani untuk peubah peran kelembagaan penyuluhan, *unit produksi* untuk peubah peran kelembagaan petani, dan *penggunaan varietas unggul baru* untuk peubah penerapan teknologi PTT. Kondisi ini terjadi baik secara parsial di masing-masing kabupaten maupun gabungan dua kabupaten.

Hasil ini mengindikasikan, bahwa tingkat kerumitan sebuah inovasi belum menjadi pertimbangan utama petani dalam menentukan untuk mengadopsi sebuah inovasi, baik di Kabupaten Sumedang ataupun di Kabupaten Bandung Barat. Dalam hal ini para petani di kedua kabupaten lebih mengutamakan pertimbangan untuk mengadopsi karena dapatnya diamati baik proses maupun hasil yang dicapai akibat inovasi tersebut. Hasil ini selaras hasil penelitian Fatchiya, Amanah, dan Indah (2016), bahwa proses adopsi sebuah inovasi memerlukan dasar-dasar pertimbangan yang dianggap benar, baik dan layak dilakukan untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Senada juga dengan Zulvera (2014) tingkat adopsi inovasi berhubungan dengan sifat inovasi.

Selanjutnya peran kelembagaan penyuluhan (BP3K) dalam melaksanakan percontohan usahatani di kedua kabupaten masih belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, justru tugas yang utama dilaksanakan adalah perencanaan program. Hasil ini sesuai pula dengan hasil penelitian Zulvera (2014), bahwa dukungan penyuluhan berhubungan dengan tingkat adopsi inovasi pertanian. Senada pula dengan Fatchiya, Amanah, dan Indah (2016), yang menyatakan penerapan inovasi berhubungan erat dengan penyelenggaraan penyuluhan.

Peran kelembagaan petani menjadikan kelompok sebagai unit produksi ternyata belum sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi ini terjadi baik di Kabupaten Sumedang ataupun Kab. Bandung Barat. Sebagaimana diketahui, bahwa kegiatan usahatani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok secara keseluruhan mesti dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan sebagai unit bisnis. Fungsi kelompok yang sudah dilaksanakan rekatif lebih baik adalah menjadikan kelompok sebagai wahana kerjasama. Hasil ini sejalan dengan Hardianto, W, dan Effendy, L. (2014), yang menyatakan bahwa fungsi kelompok tani sebagai wahana kerjasama telah berjalan relatif baik dalam penyusunan program dalam bentuk RDK/RDKK. Dalam sebuah kelompok diharapkan kerjasama yang baik dan adanya kepercayaan antara anggota harus tetap dijaga agar proses adopsi teknologi.

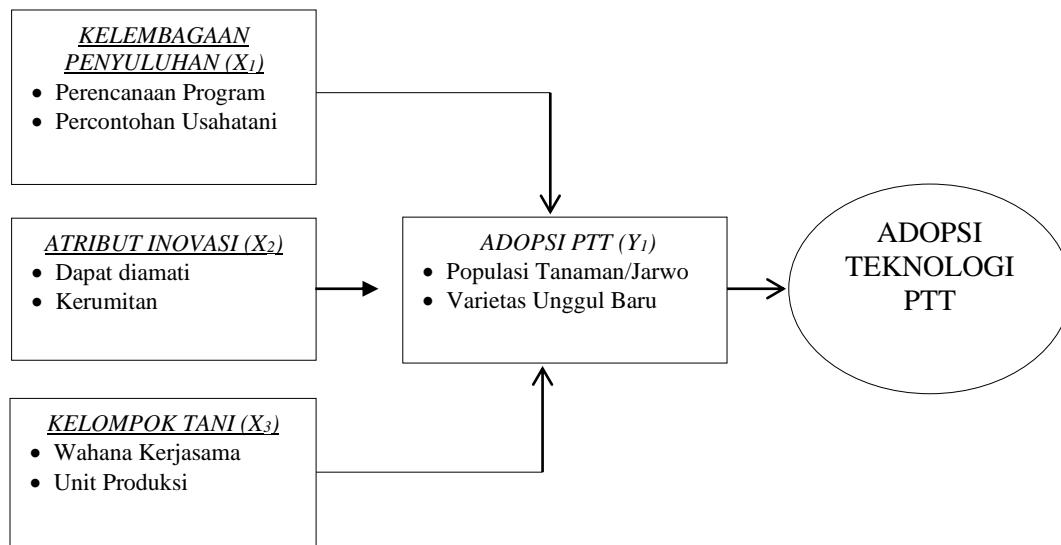
Kemudian untuk komponen teknologi PTT yang masih sangat rendah diadopsi adalah penggunaan varietas unggul bermutu. Komponen teknologi PTT yang lebih sering diadopsi di kedua kabupaten adalah pengaturan populasi tanaman dengan menggunakan sistem jajar legowo dan penerapan pupuk berimbang. Hasil ini sesuai dengan penelitian Fatchiya, Amanah, dan Indah (2016), bahwa proses adopsi sebuah inovasi memerlukan dasar-dasar pertimbangan yang dianggap benar, baik dan layak dilakukan untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya.

Hasil analisis regresi menunjukkan, bahwa $Y = 0.61 + 0.369X_1 + 0.245X_2 + 0.365X_3$. Ini membuktikan bahwa peubah yang diteliti memberikan pengaruh ($R_{\text{square}} = 0.962$) terhadap peningkatan adopsi inovasi baik di Kabupaten Bandung Barat atau pun di Kabupaten Sumedang, dengan demikian adopsi PTT di kedua kabupaten sangat ditentukan adanya peningkatan peran kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan, peningkatan peran kelompok tani, serta ciri inovasi yang dapat mendorong diterima atau tidaknya inovasi PTT.

Strategi Penerapan Temuan

Hasil Penelitian

Sebagaimana diketahui hasil penelitian menemukan, bahwa terdapat 6 indikator dari peubah penelitian yang memperoleh nilai skor tertinggi dan terendah. Nilai tertinggi untuk masing-masing faktor; perencanaan program untuk kelembagaan penyuluhan, dapat diamati untuk atribut inovasi, wahana kerjasama untuk peran kelompok tani, dan pengaturan populasi tanaman dengan jarwo. Sementara skor terendah masing-masing adalah percontohan usahatani, kerumitan inovasi, unit produksi, dan penggunaan varietas unggul, sebagaimana tersaji pada Gambar 2. Dari temuan ini, maka strategi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan adopsi PTT adalah dimulai dengan menyederhanakan inovasi PTT dengan membuat petak percontohan melalui penggunaan bibit unggul, serta peningkatan peran kelompok tani sebagai unit produksi.



Gambar 2. Model Temuan Hasil Penelitian

SIMPULAN dan SARAN

Simpulan

Hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) indikator yang memperoleh nilai rata-rata terendah di kedua kabupaten adalah: (a) tingkat kerumitan untuk peubah atribut inovasi, (b) percontohan usahatani untuk peubah peran kelembagaan penyuluhan, (c) unit produksi untuk peubah peran kelembagaan petani, dan (d) penggunaan varietas unggul baru untuk peubah teknologi PTT; (2) kelembagaan penyuluhan, atribut inovasi, dan kelompok tani memberikan pengaruh signifikan terhadap adopsi inovasi PTT di Bandung Barat dan Sumedang; (3) peran kelembagaan penyuluhan tingkat kecamatan dan peran kelompok tani memberikan kontribusi pengaruh lebih besar, dibandingkan dengan faktor penciri inovasi; dan (4) strategi peningkatan adopsi PTT dapat dimulai dengan menyederhanakan inovasi PTT dengan membuat petak percontohan melalui penggunaan bibit unggul, serta peningkatan peran kelompok tani sebagai unit produksi.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka perlu upaya: (1) mengurangi kerumitan yang terdapat pada teknologi PTT terutama dalam pengaturan populasi tanaman dalam sistem jajar legowo, sehingga lebih mudah ketika penanaman tanpa mengurangi populasi tanaman., (2) selalu dibuat petak percontohan usahatani baik di lingkungan BPP atau pun di lahan milik petani sebagai pelaksanaan fungsi kelembagaan penyuluhan, (3) peningkatan fungsi kelompok tani sebagai sebuah unit produksi, dan (4) penyuluhan untuk penggunaan varietas unggul baru perlu diintensifkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhansyah, R. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Adopsi Inovasi Pertanian pada Gapoktan PUAP dan Non-PUAP di Kalimantan Barat. *Jurnal Informatika Pertanian*. Vol.23 No.1. 2014
- Departemen Pertanian. 2006. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006*. Jakarta: Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Badan Pengembangan SDM Pertanian.
- Departemen Pertanian. 2012. *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2012*. Jakarta: Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Badan Pengembangan SDM Pertanian.
- Dewi, A. Y dan Hanifa, W. V. 2013. Kajian Karakteristik Inovasi Teknologi dan Kelembagaan yang Mempengaruhi Proses Adopsi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT). *Proseding Seminar Nasional Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi*. BBPPTP. Hal 98 – 107
- Effendy, Lukman. 2016. Model Peningkatan Kapasitas Penyuluh dalam Pemanfaatan Informai Iklim di Kabupaten Indramayu dengan Pendekatan Analisis Keberlanjutan. *Jurnal Informasi Pertanian* Vo.25 No.1 Maret 2016
- Fatchiya, A, Amanah, S, Indah, Y.K. 2016. Penerapan Inovasi Teknologi Pertaniandan Hubungannya dengan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani. *Jurnal Penyuluhan* 12 (2): 190-197
- Hardianto, W, dan Effendy, Lukman. (2014) Peran Kelompok Tani Berbasis Padi (*Oryza sativa*. L) Dalam Penyusunan RDKK di Desa Karang Anyar Kecamatan Sikap Dalam (KIPA). Bogor: Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian.
- Kementerian Pertanian. 2012. *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013*. tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Jakarta: Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Badan Pengembangan SDM Pertanian
- Marzuki G, Burhan N. 2000. *Statistik Terapan untuk Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Nurhayati. 2016. Metode Komunikasi Pendiseminasian Teknologi Budidaya Padi Sawah Berbasis Pemetaan Pengguna (disertasi). Bogor (ID): Sekolah Pascasarjana, IPB.
- Puyung, M.J. 2011. Peranan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Penyuluhan dalam Peningkatan Produksi Tanaman Pangan untuk Ketahanan Pangan di Daerah Merauke. Tesis Magister UNPA.
- Rogers E.M. 1995. *Diffusion of Innovations (4-ed)*. New York: The Free Press.
- Rogers E.M. 2003. *Diffusion of Innovations*. 5th Edition. New York (US): The Free Press.
- Serah, T. 2011. Pengaruh Karakteristik Inovasi, Sistem Sosial dan Saluran Komunikasi terhadap Adopsi Teknologi Pertanian. Tesis UNPA.
- Suradisastra, K. 2008. Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Petani. *Jurnal Forum Penelitian Agro-Ekonomi*. Vol.26 No.2. 2008
- Zulvera. 2014. Faktor Penentu Adopsi Sistem Pertanian Sayuran Organik dan Keberdayaan Petani di Provinsi Sumatera Barat (disertasi). Bogor (ID): Sekolah Pascasarjana IPB.
- Wahyu, Y. H. 2011. Adopsi Inovasi Pertanian di Kalangan Petani di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Agrin* Vol.15 No.2 Oktober 2011

Lampiran

Hasil Analisis Regresi

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y	3.1672	.30114	124
X1	3.1087	.28691	124
X2	3.2038	.38304	124
X3	3.2190	.37630	124

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.981 ^a	.963	.962	.05838	.963	1050.935	3	120	.000

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10.745	3	3.582	1050.935	.000^b
	Residual	.409	120	.003		
	Total	11.154	123			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.061	.059		1.036	.302
	X1	.369	.026	.351	14.242	.000
	X2	.245	.020	.312	12.269	.000
	X3	.365	.020	.456	18.232	.000

a. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10.745	3	3.582	1050.935	.000^b
	Residual	.409	120	.003		
	Total	11.154	123			

a. Dependent Variable: VAR00004

b. Predictors: (Constant), Inovasi, Kelembagaan, Kelompok

STRATEGI PENYULUHAN DALAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KELAPA SAWIT RAKYAT DI KAB. DHARMASRAYA

Yulistriani ^{1*}

¹ Fakultas Pertanian Universitas Andalas Kampus III Dharmasraya

*Email: yulistrianidarlis87@gmail.com

ABSTRAK

Penyuluhan merupakan kegiatan pembelajaran bagi petani, mempermudah akses informasi dan teknologi. Di perkebunan kelapa sawit rakyat, permasalahan umum yang sering dihadapi antara lain rendahnya produktivitas dan mutu produksi. Kebun kelapa sawit merupakan salah satu sumber pendapatan Petani Dharmasraya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan strategi penyuluhan dalam meningkatkan produktivitas kelapa sawit rakyat di Kab. Dharmasraya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 30 responden petani kelapa sawit yang mempunyai lahan ≥ 2 Ha. Alat analisis yang digunakan adalah analisis SWOT (*Strengths-weaknesses-opportunities-threats*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya akses informasi petani kelapa sawit rakyat di Dharmasraya mulai dari penyediaan bibit unggul hingga ke manajemen panen. Strategi yang direkomendasikan bagi peningkatan produktivitas kelapa sawit dikelompokkan ke dalam tiga tahapan. Pertama memberikan pelatihan kepada petani terkait dengan pemilihan bibit unggul. Kedua pelatihan terkait dengan pengelolaan dan pemeliharaan tanaman. Ketiga terkait dengan manajemen panen kelapa sawit. Perlu kerjasama seluruh stakeholder dalam peningkatan daya saing agribisnis kelapa sawit di Kab. Dharmasraya.

Kata kunci: penyuluhan, kelapa sawit, produktivitas

PENDAHULUAN

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang memiliki andil besar dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Bruto (PDB), dan kesejahteraan masyarakat (Afifuddin, 2007). Bagi masyarakat di daerah pedesaan, sampai saat ini usaha perkebunan merupakan alternatif untuk merubah perekonomian keluarga, karena itu animo masyarakat terhadap pembangunan perkebunan masih tinggi. Menurut Syahza (2011) usahatani kelapa sawit memperlihatkan adanya peningkatan kesejahteraan petani di pedesaan.

Kelapa sawit yang merupakan produk andalan tanaman perkebunan daerah Dharmasraya, produksinya dari tahun ke tahun selalu terbesar dibandingkan dengan komoditi lain. Namun, pada tahun 2015 terjadi penurunan produksi tanaman kelapa sawit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di perkebunan sawit rakyat, permasalahan umum yang sering dihadapi antara lain rendahnya produktivitas dan mutu produksinya. Produktivitas tanaman kelapa sawit dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor lingkungan, faktor genetik, dan teknik budidaya tanaman. Faktor lingkungan (*enforce*) yang mempengaruhi produktivitas kelapa sawit meliputi faktor abiotik (curah hujan, hari hujan, tanah, topografi) dan faktor biotik (gulma, hama, jumlah populasi tanaman/ha). Faktor genetik (*innate*) meliputi varietas bibit yang digunakan dan umur tanaman kelapa sawit. Faktor teknik budidaya (*induce*) meliputi pemupukan, konservasi tanah dan air, pengendalian gulma, hama, dan penyakit tanaman, serta kegiatan pemeliharaan lainnya. Faktor-faktor tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Secara umum produktivitas yang tinggi dari kelapa sawit dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu pemilihan bibit unggul, pemeliharaan tanaman dan teknologi panen (Pahan, 2010).

Hasil penelitian (Yulistriani dkk., 2017) menunjukkan bahwa kehilangan hasil terbesar di kebun kepala sawit rakyat adalah pada sortasi pabrik dikarenakan petani panen tidak sesuai standar. Oleh karena itu untuk mengurangi resiko kehilangan hasil panen (*loss post-harvest*) kelapa sawit rakyat di Kab. Dharmasraya perlu pendampingan dari Penyuluh lapangan tentang standar kematangan buah karena proses pemanenan sangat menentukan risiko kehilangan produksi sampai pada tahapan-tahapan yang dilalui TBS selanjutnya. Penyuluh di dalam kegiatan penyuluhan merupakan faktor pelancar pembangunan (Mosher, 1978). Hal ini sepadan dengan hasil penelitian Riana *et al.*, (2015) bahwa peranan penyuluh selain berperan dalam membantu peeningkatn produksi dan produktivitas kakao juga sebagai pemberi motivasi dan dukungan dan membantu petani dalam memecahkan masalah.

Penyuluhan dapat mempercepat akses informasi terkait dengan inovasi-inovasi baru dalam pengelolaan kebun kelapa sawit rakyat. Sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi petani dapat teratasi. Berdasarkan permasalahan di atas maka penting dilakukan penelitian tentang Strategi Penyuluhan dalam Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit Rakyat di Kab. Dharmasraya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan strategi penyuluhan yang tepat dalam meningkatkan produktivitas kelapa sawit rakyat di Kab. Dharmasraya. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi petani kelapa sawit rakyat, penyuluhan dan pihak-pihak terkait dalam membuat kebijakan terkait dengan pengembangan sektor perkebunan di Dharmasraya khususnya komoditi kelapa sawit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kab. Dharmasraya selama tiga bulan mulai dari Januari sampai Maret 2019 di Kab. Dharmasraya (Kec. Pulau Punjung, Kec. Koto Besar, Kec. Timpeh dan Kec. Tiumang). Populasi dari penelitian ini adalah petani kelapa sawit di Kabupaten Dharmasraya yang mengelola kebunnya dengan pola kebun rakyat. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode acak sederhana (*simple random sampling*) sebanyak 30 sampel. Sampel diambil secara *purposive* (sengaja) yaitu petani dengan luas lahan ≥ 2 Ha dan tanaman telah menghasilkan.

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui survey dan wawancara langsung terhadap petani kelapa sawit di Kabupaten Dharmasraya. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Nazir (2005), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Data yang telah dikumpulkan di tabulasi kemudian di kelompokkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman). Kemudian dilanjutkan dengan matriks analisis SWOT (*Strengths-weaknesses-opportunities-threats*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Data Responden Penelitian

Kriteria pengamatan	Indikator	Jumlah (%)
Mengikuti pelatihan Sawit		13%
Pendidikan	SD	17%
	SMP	33%
	SMA	23%
	D2	3%
	S1	23%
Umur	<30	10%
	31-40	13%
	41-50	30%
	>50	47%
Bergabung dalam kelompok tani		17%
Petani yang melakukan pemupukan		33%
Produktivitas rata-rata/panen/Ha		1,041.3 kg

Dari tabel 1 di atas dapat di lihat bahwa tingkat pendidikan rata-rata tertinggi petani kelapa sawit rakyat di Kab. Dharmasraya adalah pada tingkat pendidikan SMP yaitu sebesar 33% dari total responden petani. Petani yang mengikuti pelatihan terkait dengan tanaman kelapa sawit ada 13 % yaitu pelatihan pembibitan sawit dan pelatihan di PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit). Petani yang bergabung dalam kelompok tani sebanyak 17%. Dan dari segi umur, rata-rata umur tertinggi adalah pada umur petani di atas 50 tahun. Artinya petani kelapa sawit rakyat di Kab. Dharmarya rata-rata telah masuk usia lanjut. Sehingga dalam pengelolaan kelapa sawit dengan luas lahan >2 Ha lebih banyak menggunakan tenaga kerja luar keluarga. Dengan penggunaan tenaga kerja luar keluarga artinya akan menambah biaya dalam pengelolaan sehingga butuh manajemen yang baik agar produktivitas kelapa sawit rakyat optimal.

Dari hasil survey dan wawancara di lapangan maka di kelompokkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi produksi sawit rakyat di Kab. Dharmasraya sebagai berikut:

Kekuatan (*Strenghts*)

1. Keberadaan agroklimat yang Sesuai untuk Pengembangan kelapa sawit
2. Lahan yang relatif datar sehingga memudahkan proses pengangkutan hasil produksi
3. Dari segi kelembagaan, telah ada beberapa kelompok tani kelapa sawit.

Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Kurangnya pengetahuan petani akan pentingnya penggunaan bibit unggul
2. Jarak tanam kelapa sawit yang diberlakukan petani sawit sebagian besar belum sesuai standar
3. Kurangnya kemauan petani dalam melakukan pemeliharaan (pembersihan gulma, pengendalian hama penyakit dan pemupukan)
4. Kurangnya pengetahuan petani akan standar panen yang baik yang berpengaruh terhadap harga yang diterima petani
5. Produktivitas kelapa sawit rakyat di Kab. Dharmasraya rendah, hanya sebesar 1,041.3 kg/panen/Ha.
6. Petani yang tergabung dalam kelompok tani masih rendah hanya 17% dari total sampel
7. Dari segi SDM (Sumber Daya Manusia), rata-rata pendidikan petani yang tertinggi adalah tingkat pendidikan SMP
8. Petani yang mengikuti pelatihan terkait dengan tanaman kelapa sawit masih rendah yaitu sebesar 13%
9. Umur rata-rata petani kelapa sawit rakyat tertinggi diatas 50 tahun (47%), sehingga tidak termasuk dalam usia produktif.
10. Petani mengelola kebun rakyat kelapa sawitnya hanya berdasarkan pengalaman
11. Belum tersedianya tenaga penyuluhan bidang perkebunan di Kab. Dharmasraya
12. Belum ada kegiatan rutin penyuluh kepada petani kelapa sawit rakyat di Dharmasraya walaupun kelapa sawit merupakan salah satu komoditi unggulan di Dharmasraya.

Faktor-faktor Eksternal**Peluang (*Opportunities*)**

1. Otonomi Daerah.
2. Peluang pasar yang masih terbuka Luas.

3. Adanya dukungan pemerintah dalam pemberian bantuan bibit bagi kelompok tani kelapa sawit yang masuk kategori *replanting* atau tanaman tidak produktif.

Ancaman (*Threats*)

1. Fluktuasi harga kelapa sawit
2. Adanya tengkulak kelapa sawit

Hasil Analisis SWOT

Berdasarkan hasil analisis matriks SWOT didapatkan beberapa strategi Penyuluhan yang perlu dilakukan untuk pengembangan komoditi kelapa sawit rakyat di Kab.Dharmasraya sebagai berikut:

1. Penyuluhan dan pelatihan kepada petani dalam pemilihan bibit unggul dan pembibitan.
2. Penyuluhan dan pelatihan kepada petani dalam penanaman kelapa sawit termasuk *cover crop* (tanaman penutup tanah).
3. Penyuluhan dan pelatihan kepada petani dalam pemeliharaan, berbagai alternatif solusi pengendalian hama dan penyakit, standar pemupukan dan pengendalian gulma.
4. Pelatihan dan penyuluhan terkait dengan pemupukan yang intensif dan sesuai standar.
5. Penyuluhan dan pelatihan kepada petani terkait dengan penentuan standar panen, proses panen, rotasi panen dan memperkecil kehilangan hasil panen.
6. Penyuluhan dan pelatihan kepada petani bagaimana manajemen pengelolaan kebun kelapa sawit mulai dari penyediaan saprodi, penanaman, pemeliharaan, panen, pengangkutan hasil panen dan penjualan hasil panen.
7. Penyuluhan dan pelatihan kepada petani bagaimana pengambilan keputusan dalam setiap tahapan pengelolaan kebun kelapa sawit sehingga meningkatkan produktivitas.
8. Pendampingan penyuluhan yang intensif dan berkelanjutan sehingga setiap permasalahan di lapangan yang dihadapi petani dapat segera diatasi.

9. Kerjasama seluruh stakeholder (peneliti, petani, penyuluh, pemerintah dan pihak terkait lainnya) dalam mempercepat proses transfer inovasi dan teknologi kepada petani.
10. Penerapan pendekatan *smart agriculture* yang berbasis teknologi informasi mempercepat proses transfer inovasi kepada petani.
11. Pelaksanaan proses penyuluhan dan pelatihan yang partisipatif sehingga petani lebih aktif menemukan solusi masalah di lapangan dengan pendampingan dari penyuluh lapangan.
12. Penyuluhan dan pendampingan kepada petani terkait dengan program *replanting* bagi lahan yang tidak produktif lagi sehingga tanaman yang ditanam berproduksi dengan optimal.
13. Penyuluh melakukan pendekatan yang memotivasi petani untuk tergabung dalam kelompok tani sehingga memudahkan transfer inovasi dan teknologi serta informasi.
14. Penyuluh melakukan pendekatan dengan menyesuaikan topik bahasan dan metode penyuluhan yang tepat bagi para petani yang rata-rata pendidikannya masih rendah (33% SMP) dan rata-rata berusia lanjut (>50 tahun) (47%).
15. Penyuluhan melakukan pendekatan untuk membuat petani berpandangan bahwa kegiatan penyuluhan dan pelatihan adalah kebutuhan dasar petani.
16. Penyuluh harus melakukan pendekatan sehingga proses-proses yang merugikan usaha tani kelapa sawit rakyat dapat diminimalisir salah satunya dengan pembangunan koperasi petani sehingga petani mempunyai akses permodalan yang baik.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelapa sawit di Kab. Dharmasraya belum optimal sehingga berimplikasi kepada nilai produktivitas. Secara garis besar ada tiga tahap strategi penyuluhan yang perlu dilakukan. Pertama memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada petani terkait dengan pemilihan bibit unggul. Kedua pelatihan terkait dengan pengelolaan dan pemeliharaan tanaman. Ketiga terkait dengan

manajemen panen kelapa sawit. Perlu dilakukan penyuluhan mulai dari aspek peyediaan saprodi (bibit unggul dan faktor produksi), penyuluhan dan pendampingan terkait dengan pemeliharaan kelapa sawit (pengendalian hama dan penyakit, pembersihan gulma, pemupukan yang tepat) sampai kepada proses panen dan pengangkutan hasil ke pabrik. Dan dibutuhkan pendampingan dan penyuluhan terkait dengan pemanenan sesuai standar. Untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit rakyat di Kab. Dharmasraya dibutuhkan dukungan berbagai pihak. Dibutuhkan kerjasama seluruh stakeholder, baik petani, penyuluh, peneliti, pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, S., Kusuma, SI. 2007. *Analisis Struktur Pasar CPO: Pengaruhnya terhadap pengembangan ekonomi wilayah Sumater Utara*. Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Vol. 2 No. 3. April 2007. Hal 124 – 136.
- Mosher AT. 1978. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian: Cetakan ke-6*. Yasaguna. Jakarta.
- Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Pahan, Iyung. 2010. *Panduan Lengkap Kelapa Sawit. Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga Hilir*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Riana, Purnaningsih N, Satria A. 2015. Peranan Penyuluh Swadaya dalam Mendukung Intensifikasi Kakao di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Penyuluhan*. 11(2):201-211.
- Syahza, Almasdi. 2011. Percepatan Ekonomi Pedesaan Melalui Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Volume 12, Nomor 2, Desember 2011, hal 297-310.
- Yulistriani, Cindy Paloma dan Hasnah. 2018. Analisis Risiko Pasca Panen Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Di Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal AGRIFO*. Vol. 3 No. 1 April 2018. Hal 45-56.

PERAN PENYULUH DALAM MEMFASILITASI PENERAPAN BUDIDAYA PADI ORGANIK DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Zulhafandi ^{1*}, Febriamansyah,R ¹., Tanjung,H.B ¹

¹ Program Pascasarjana Universitas Andalas

*Email: zulhafandi90@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu kabupaten yang menerapkan pertanian organik di Sumatera Barat adalah Kabupaten Padang Pariaman diantaranya terdapat di kecamatan Batang Anai, kecamatan dan kecamatan Ulakan Tapakis. Untuk mewujudkan penerapan budidaya padi secara organik, maka diperlukannya partisipasi penyuluh dalam memfasilitasi petani meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam hal petanian organik. Penelitian bertujuan untuk mendalami peran penyuluh dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran penyuluh dalam memfasilitasi penerapan budidaya padi organik di Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. . Lokasi penelitian dipilih secara *purposive* (sengaja) yaitu ditetapkan secara sengaja oleh peneliti karena dua kecamatan tersebut memiliki Kelompok Tani yang telah melaksanakan kegiatan budidaya padi secara organik. Hasil penelitian menunjukkan Peran satuan tugas (satgas) organik fokus pada pendampingan teknis budidaya padi organik dan menumbuhkan kelompok tani organik. Peran mereka masih sedikit dalam penguatan kelembagaan dan menjembatani hubungan dengan stakeholder lain. Peran penyuluh pertanian lapangan (PPL) ialah memotivasi dan mendampingi satuan tugas organik dalam penyuluhan budidaya padi organik. Peran penyuluh pertanian swadaya (PPS) memotivasi atau mengajak petani agar mau melaksanakan budidaya padi organik. Faktor-faktor yang diidentifikasi mempengaruhi aktivitas peran penyuluh dalam memfasilitasi petani padi organik di Kabupaten Padang Pariaman adalah: kompetensi penyuluh melaksanakan tugas dan fungsi penyuluhan, motivasi penyuluh serta orientasi kelembagaan penyuluhan.

Kata Kunci : Peran, PPL, Satgas organik, Penyuluh Pertanian swadaya (PPS), Padi organik

PENDAHULUAN

Salah satu isu besar di dalam pembangunan pertanian adalah penerapan pertanian berkelanjutan yang lebih memperhatikan aspek ekologis. Sistem pertanian yang merupakan implementasi dari sistem pertanian berkelanjutan adalah pertanian organik. Saragih (2008) mengungkapkan bahwa konsep pertanian organik sudah sering dibahas pada berbagai

pertemuan ilmiah, dan secara teoritis banyak pakar pertanian dan ekologi yang sepaham bahwa sistem pertanian organik merupakan salah satu alternatif solusi atas kegagalan sistem pertanian konvensional yang cenderung tidak lagi memperhatikan kesehatan produk dan keberlanjutan ekosistem disekitarnya.

Pertanian organik muncul sebagai kontra dari revolusi hijau yang terlalu tergantung pada input kimia sintetis yang tinggi, khususnya pupuk kimia dan pestisida sintetis. Carson dalam Suwanto (2008) mengungkapkan pestisida sebagai salah satu paket pertanian modern memiliki dampak toksik bagi organisme lain dan mengganggu ekologi tanaman. Pestisida tidak hanya mematikan hama tanaman tetapi juga memusnahkan banyak kehidupan yang lain. Fenomena ini juga berimplikasi pada kualitas produk pangan yang menjadi kebutuhan primer yang dikonsumsi masyarakat menjadi tidak sehat dan mengganggu kesehatan lingkungan. Tujuan yang hendak dicapai dengan menerapkan sistem pertanian organik menurut *Internasional Federation Organik Movements* (IFOAM) adalah menghasilkan makanan dengan nutrisi yang tinggi serta jumlah yang mencukupi, berintegrasi secara konstruktif dan mendukung kehidupan dengan semua sistem dan daur alami, mendorong dan meningkatkan daur biologi didalam sistem usahatani dengan mengaktifkan kehidupan jasad renik, flora dan fauna tanah, tanaman dan binatang, serta memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah secara berkelanjutan (Untung, 1997). Menurut Nurdin (2002) sistem pertanian organik lebih intensif karena keuntungan persatuan luas lebih tinggi dibandingkan dengan pertanian non organik atau konvensional jika dilihat dari sudut pemanfaatan lahan. Tingkat serangan hama pun relatif lebih rendah pada pertanaman organik dibandingkan konvensional karena pertanaman konvensional adalah pertanaman yang seragam, sehingga tingkat kemampuan penyesuaian hama terhadap inang lebih tinggi.

Pengembangan pertanian organik yang pernah diluncurkan pemerintah adalah melalui komitmen “Go Organik 2010” yang mencanangkan Indonesia menjadi produsen produk pertanian organik pada tahun 2010. Propinsi Sumatera Barat merupakan daerah percontohan pengembangan pertanian organik di Indonesia. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah adalah membentuk kelembagaan penunjang yaitu satuan tugas organik (Satgas Organik) dan lembaga sertifikasi organik (LSO). Kedua lembaga tersebut menjadi bagian dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Barat.

Satgas organik bertugas menangani segala bentuk pelatihan, pembinaan, pengembangan serta evaluasi dan sertifikasi pertanian organik, sedangkan LSO terintegrasi dengan satgas organik yang bertugas mengevaluasi, mensosialisasikan serta mensertifikasi lahan dan usaha pertanian organik.

Dalam penelitian ini, penyuluh yang berperan melaksanakan fasilitasi pertanian organik adalah; *Pertama*, Satgas organik yang berkedudukan di propinsi, *Kedua*, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang terdiri dari penyuluh pegawai negeri sipil dan Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) yang berkedudukan di Balai Penyuluhan Kecamatan, dan *Ketiga* Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) merupakan petani organik yang telah dulu menerapkan sistem budidaya padi organik. Ketiga kelompok tersebut dikatakan sebagai penyuluh karena menjalankan fungsi-fungsi penyuluhan. Hal ini sesuai dengan ungkapan Mardikanto (2009) yang menyatakan bahwa penyuluh adalah seseorang yang telah melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi penyuluhan seperti fungsi : edukasi, diseminasi informasi, fasilitasi, konsultasi, supervisi, pemantauan dan evaluasi.

Salah satu kabupaten yang menerapkan pertanian organik di Sumatera Barat adalah Kabupaten Padang Pariaman. Dari data satgas organik dan LSO, kecamatan yang menerapkan padi organik yaitu Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan Ulakan Tapakis. Untuk mendukung petani dalam menerapkan budidaya padi secara organik, pemerintah memberikan subsidi terhadap komoditas pertanian yang telah bersertifikasi organik, selain itu nilai jual beras organik relatif lebih tinggi dibandingkan beras anorganik. Untuk mewujudkan penerapan budidaya padi secara organik, maka diperlukannya partisipasi penyuluh dalam memfasilitasi petani meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam hal petanian organik.

Berdasarkan diskusi awal yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak-pihak terkait (koordinator penyuluh, penyuluh pertanian lapangan, petani organik dan tokoh masyarakat) terlihat ada proses yang menarik untuk diteliti dan dikaji lebih dalam yaitu fasilitasi yang dilakukan oleh penyuluh terhadap petani, apalagi dilokasi penelitian ada petani swadaya dan satgas organik yang juga membantu memfasilitasi penyuluhan pertanian organik. Pertanyaan yang muncul ialah bagaimana peran penyuluh dalam memfasilitasi penerapan padi organik di Kabupaten Padang Pariaman. Oleh karena itu, secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan peran penyuluh dan faktor-

faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran Penyuluh dalam memfasilitasi penerapan padi organik di Kabupaten Padang Pariaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada dua kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman yaitu : Kecamatan Ulakan Tapakis dan Kecamatan Batang Anai. Lokasi ditetapkan secara sengaja oleh peneliti karena kecamatan tersebut memiliki Kelompok Tani yang telah melaksanakan budidaya padi organik. Penelitian ini dilaksanakan dari Januari 2016- November 2016. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu menggambarkan dengan jelas bagaimana jalannya pelaksanaan pertanian padi organik dan fasilitasi penyuluh dalam budidaya padi organik. Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti ingin mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai peran penyuluh dalam fasilitasi budidaya padi organik di Kecamatan Ulakan Tapakis dan Batang Anai. Informan dari penelitian ini adalah satgas organik yang memfasilitasi budidaya padi organik di Kecamatan Batang Anai dan Ulakan Tapakis, anggota kelompok tani organik yang ada pada Kecamatan Ulakan Tapakis dan Batang Anai. Masing-masing dipilih beberapa petani tiap kelompok yang akan memberikan dan membagikan pengalamannya selama mengikuti penyuluhan tentang padi organik. Selanjutnya dipilih juga informan dari PPL di masing-masing kecamatan yang telah mendapatkan pelatihan tentang budidaya padi organik serta memiliki kelompok binaan dalam penembangan budidaya padi organik di wilayah kerjanya masing-masing, serta penyuluh pertanian swadaya (PPS) yang merupakan petani organik yang ikut membantu memfasilitasi penerapan budidaya padi organik diwilayahnya.

Topik data utama adalah pelaksanaan peran penyuluh menurut Suhardiyono (1992) yaitu : *Pertama*, peran sebagai penasehat, *Kedua*, peran sebagai organisator, *Ketiga*, peran sebagai pendamping teknis, *Keempat*, peran sebagai penghubung. Untuk mendalami informasi terkait topik data yang diamati, Peneliti berpedoman pada panduan wawancara semi terstruktur dengan mengelaborasi pertanyaan-pertanyaan dengan acuan 5W+1H (*What, Who, When, Where, Why* dan *How*), Sehingga data yang diidentifikasi dapat menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan. Informan kunci (key informan)

dalam penelitian ini yakni : Kepala dinas tanaman pangan dan hortikultura kabupaten Padang Pariaman, Kepala BP4KKP, Kepala LSO Sumbar, Satgas Organik, Koordinator BPK, Penyuluh THL, Penyuluh PNS, Penyuluh Swadaya, ketua dan anggota kelompok tani organik, ketua dan kelompok tani konvensional dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Satgas Organik

Berdasarkan observasi dilapangan, peran satgas organik sebagai penasehat diantaranya memotivasi petani agar mau beralih ke pertanian organik dan menyakinkan petani mengenai dampak aplikasi input kimia sintetis dalam pertanian. Satgas menjelaskan dampak bahan kimia sintetis tidak hanya bagi lingkungan akan tetapi juga berpengaruh pada kesehatan petani itu sendiri. Nasehat dan motivasi tidak hanya diberikan saat kegiatan pertemuan kelompok saja, namun juga saat diskusi pribadi diberbagai tempat dengan petani. Hal ini didukung oleh Irsal Las et al. (2006) mengatakan sistem budidaya padi organik yang lebih mengutamakan penggunaan musuh alami dan pestisida hayati. Keuntungan dari rasionalisasi pemakaian pestisida antara lain adalah: 1) mengurangi kerusakan sumber daya lahan, air, lingkungan, dan produk, 2) mengurangi risiko kesehatan bagi manusia, dan 3) meningkatkan keuntungan usaha tani (efisiensi produksi).

Peran satgas organik lebih dominan pada pendampingan teknis atau cara budidaya padi secara organik, mulai dari mendampingi pemilihan lahan, pemetaan lahan, konversi, penyiapan lahan dan pengolahan tanah, sarana dan prasarana, penyiapan benih dan penyemaian, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, pengendalian opt, panen organik, pasca panen. Semua materi disusun dengan petani dan PPL dengan mengacu pada kaidah-kaidah organik menurut SNI 01-6729-2016.

Peranan satgas organik sebagai penghubung (lembaga keuangan) belum optimal, karena usahatani yang dilakukan masih mengandalkan modal pribadi dan pinjaman dari *toke*. Keberadaan *toke* disatu sisi membantu petani mendapatkan modal dan mempermudah menjual hasil pertanian namun disisi lain petani harus menjual dengan harga yang ditentukan oleh *toke* tersebut, seperti yang diungkapkan oleh salahsatu informan : "[Saat ini belum ada yang membantu pembiayaan, kalaupun ada, hanya pinjam ke *toke*, saya rasa

lebih mudah meminjam ke toke dibandingkan ke Bank yang harus pakai jaminan] (“U”, petani Organik Batang Anai). Sementara fasilitasi satgas organik ke lembaga penelitian juga belum optimal. hubungan yang terjalin antara satgas organik dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dan lembaga penelitian di perguruan tinggi masih sebatas hubungan structural fungsional, hubungan yang bersifat kedinasan, belum sampai pada hubungan yang saling mensinergi dalam pengembangan budidaya padi organik. Peran satgas organik cukup baik dalam hal memfasilitasi menghubungkan kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) Sumatera Barat dalam membantu memberi pelatihan-pelatihan dalam penyusunan dokumen organik milik petani.

Peranan satgas organik sebagai organisator adalah menumbuhkan kelompok-kelompok tani organik baru serta mengembangkan kemampuan administrasi Kelompok dalam menyusun dokumen organik yang dibutuhkan untuk sertifikasi produk organik dengan membentuk tim ICS (*Internal Control System*) yang terdiri dari beberapa petani yang diberi pembekalan untuk menjamin kegiatan usahatani petani dan kelompoknya berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah sistem budidaya padi organik.

2. Peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)

Peran PPL sebagai penasehat adalah meyakinkan petani untuk mau berorganik dengan cara memberi gambaran dampak penggunaan bahan-bahan kimia sintetis dalam aktivitas budidaya dan memotivasi atau menyemangati petani untuk mau beralih ke budidaya padi organik. Dalam memberikan nasehat tentang budidaya padi organik, PPL Batang Anai sangat menekankan pada manfaat yang banyak didapatkan dari sistem pertanian ini. Dia menjelaskan budidaya padi organik tidak hanya sebatas meniadakan penggunaan input sintetis, tetapi juga pemanfaatan sumber-sumber daya alam secara berkelanjutan, produksi makanan sehat dan menghemat energi. Selain itu Ia juga mengatakan kebanyakan konsumen akan memilih bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan, sehingga mendorong meningkatnya permintaan produk organik. Hal ini didukung dengan ungkapan Yanti (2005) yang mengatakan bahwa Pola hidup sehat yang akrab lingkungan telah menjadi *trend* baru meninggalkan pola hidup lama yang menggunakan bahan kimia non alami.

Peran PPL sebagai pendamping teknis lebih banyak pada mendampingi satgas organik dalam melakukan penyuluhan, karena peran pendampingan budidaya padi organik telah dilakukan oleh satgas organik. Dari pengakuan PPL dilapangan memang dalam hal-hal teknis budidaya satgas lebih memahami dan mampu menyampaikan dengan lebih baik dibandingkan dengan PPL. Hal ini dikarenakan pengalaman satgas yang panjang dalam hal pendampingan budidaya padi organik dibandingkan dengan pengalaman PPL.

Peran PPL dalam memfasilitasi petani padi organik dalam menghubungkan dengan pelaku usaha/keuangan, pasar dan lembaga penelitian juga belum terlihat. Kerena ketergantungan petani kepada *toke* sangatlah tinggi. Selama ini kegiatan penyuluhan yang dilakukan PPL masih terbatas hal-hal yang bersifat teknis budidaya, minim pada keberdayaan petani dalam mengakses stakeholder diluar pelaku utama.

Peranan PPL sebagai organisator adalah membantu kegiatan pendampingan pertemuan Kelompok Tani, memfasilitasi penyusunan RDK (Rencana Definitif Kelompok) dan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), memfasilitasi kegiatan menumbuhkembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan Kelompok Tani.

Tabel 1. Implementasi yang dapat menilai peran PPL terhadap dinamika Kelompok Tani

Indikator	Definisi	Kecamatan Ulakan Tapakis	Kecamatan Batang Anai
Tujuan Kelompok	Kelompok tani mengadakan pertemuan antara pengurus, anggota kelompok yang didampingi PPL untuk mendapatkan masukan dan saran dalam menyusun tujuan kelompok,	Telah dilaksanakan oleh PPL	Telah dilaksanakan oleh PPL
Struktur Kelompok	mulai disusun dan dirancang dengan melibatkan pengurus, anggota kelompok dan PPL	Telah dilaksanakan oleh PPL	Telah dilaksanakan oleh PPL
Fungsi Kelompok	mulai diaktifkan dengan melibatkan semua anggota kelompok, fungsi kelompok yang sudah berjalan seperti kelompok difungsikan sebagai kelas belajar, pengembangan kemampuan pengetahuan dan keterampilan anggota, dan pengembangan usaha bersama.	Telah dilaksanakan PPL, namun belum maksimal karena kelompok masih berfungsi sebagai objek penerima inovasi dan bantuan. orientasi kelompok belum pada pengembangan usaha. Belum semua anggota Keltan terlibat dalam kegiatan.	Telah dilaksanakan oleh PPL, namun belum optimal karena ada pengembangan kelompok pada kegiatan usaha.

Indikator	Definisi	Kecamatan Ulakan Tapakis	Kecamatan Batang Anai
Mengembangkan dan Memelihara Kelompok	Anggota sudah mengenal dan mengaplikasikan teknologi baru. kelompok tani selalu berusaha memelihara kelompok dengan baik melalui pembagian tugas yang merata sesuai dengan kedudukannya, menumbuhkan norma kelompok (ketaatan anggota terhadap kelompok).	Belum maksimal pada pembagian tugas. Tugas kelompok dilaksanakan oleh pengurus kelompok, selain itu belum semua anggota kelompok yang mau mengaplikasikan budidaya padi organik	Telah dilaksanakan namun masih terkendala pada pembagian tugas yang masih belum merata
Tekanan dan Desakan Kelompok	Ketaatan anggota kelompok terhadap norma-norma kelompok, dan bagi keseragaman dalam aktivitas kelompok.	Masih ada anggota kelompok belum mentaati aturan-aturan yang ada dalam kelompok, misalnya masih ada petani yang mencampur pupuk kimia dengan pupuk organik, selain itu anggota belum konsisten dalam melakukan pembayaran iuran rutin kelompok	Penilaian anggota kelompok terhadap tekanan/desakan kelompok tergolong baik/patuh, namun masih ada sebagian anggota yang belum konsisten dalam menjalankan aturan, misalnya iuran kelompok

Dari tabel 1 dapat dilihat pada fungsi kelompok di Kecamatan Ulakan Tapakis menjadikan kelompok hanya pada objek penerima inovasi dan bantuan, sedangkan di Kecamatan Batang Anai fungsi kelompok belum mampu pada pengembangan usaha petani.

3. Peran Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS)

Peran penyuluh pertanian swadaya (PPS) di Kecamatan Ulakan Tapakis dan Batang Anai dikelompokkan pada dua peran yakni sebagai Penasehat dan memfasilitasi pendampingan teknis budidaya padi organik. Sementara peran PP Swadaya sebagai penghubung, peneliti menemukan belum dilaksanakan oleh PP Swadaya, salah satu alasan yang diungkapkan oleh PPS adalah adanya keterbatasan SDM dan kemampuan menjalin jaringan (*networking*) dengan pelaku utama diluar petani organik. Peran penyuluh pertanian swadaya sebagai organisator belum cukup terlihat, namun peran ini telah digantikan oleh PPL.

Dalam konteks optimalisasi peran penyuluh pertanian swadaya sangatlah diharapkan dalam mendiseminasikan pertanian organik karena anggota komunitasnya sendiri yang telah lama dikenal, PPS lebih mampu mendorong partisipasi petani untuk bersama-sama aktif dalam kegiatan budidaya padi organik. Mardikanto (2009) mengatakan penyuluh pertanian swadaya (PPS) menjadi aktor dalam pembangunan yang partisipatif (*participatory development*).

4. Faktor yang Mempengaruhi Peran Penyuluh dalam Memfasilitasi Penerapan Budidaya Padi Organik di Kabupaten Padang Pariaman

Kehadiran satgas organik, penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan penyuluh pertanian swadaya (PPS) menjadi keterpaduan peranan yang saling melengkapi antar masing-masing agen penyuluhan di tengah-tengah masyarakat tani karena peran serta penyuluh masih sangat dibutuhkan untuk meningkatkan sumber daya manusia (petani) sehingga mampu merubah pola pikir petani dari yang dulu menggunakan usahatani yang konvensional menjadi usahatani yang lebih memperhatikan kelestarian lingkungan. dari penjabaran diatas dapat kita lihat pembagian peran antara satgas organik, PPL dan PPS yang saling melengkapi dalam menjalankan perannya, hal ini dapat terlihat dimana satgas organik lebih dominan menjalankan peran sebagai pendamping teknis budidaya padi secara organik serta memberi motivasi dan semangat kepada petani untuk mau dan mampu melaksanakan budidaya padi organik. PPL lebih banyak memainkan peran sebagai organisator yaitu dengan mengelola kelompok tani menjadi kelompok yang berdaya, disamping juga ikut memberikan motivasi dan semangat kepada petani dalam menjalankan budidaya padi organik. Sedangkan penyuluh pertanian swadaya (PPS) lebih kepada peran memotivasi sesama petani yang diharapkan lebih mudah diterima oleh petani karena sama-sama memiliki latarbelakang petani.

Namun dari hasil observasi peneliti dilapangan ditemukan beberapa faktor-faktor yang diidentifikasi mempengaruhi pelaksanaan peran penyuluh dalam mendampingi petani padi organik di Kabupaten Padang Pariaman, Diantaranya 1) Masih lemahnya kompetensi penyuluh. Kemampuan penyuluh lebih banyak hanya sebatas pendampingan teknis budidaya saja. Padahal Sumardjo (2010) menjelaskan bahwa penyuluh setidaknya

memiliki kompetensi-kompetensi: (a) personal, (b) sosial, (c) andragogik, dan (d) komunikasi inovatif motivasi penyuluh dan orientasi kelembagaan penyuluhan. 2) Motivasi penyuluh ; yang mempengaruhi motivasi penyuluh dilapangan adalah adanya ketimpangan kesejahteraan dan honorarium antara penyuluh yang berstatus Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) dengan penyuluh yang telah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sementara dilapangan jumlah penyuluh yang THL lebih banyak dibandingkan dengan penyuluh PNS. 3) Orientasi kelembagaan penyuluhan ; Kelembagaan penyuluhan lebih banyak berfungsi sebagai wadah “penampung” program-program penyuluhan yang telah ditetapkan oleh pemerintah termasuk program pengembangan padi organik. Kondisi ini berimplikasi pada orientasi petani terhadap program penyuluhan budidaya padi organik bukan lagi pada peningkatan SDM petani dan penguatan kapasitas kelompok namun lebih kepada bagaimana petani mendapatkan bantuan-bantuan melalui program yang dibawa oleh penyuluh melalui kelembagaan penyuluhan tersebut.

SIMPULAN

Peran satuan tugas (satgas) organik fokus pada pendampingan teknis budidaya padi organik dan menumbuhkan kelompok tani organik. Peran mereka masih sedikit dalam penguatan kelembagaan dan menjembatani hubungan dengan stakeholder lain. Peran penyuluh pertanian lapangan (PPL) ialah memotivasi dan mendampingi satuan tugas organik dalam penyuluhan budidaya padi organik. Peran penyuluh pertanian swadaya (PPS) memotivasi atau mengajak petani agar mau melaksanakan budidaya padi organik. Faktor-faktor yang diidentifikasi mempengaruhi aktivitas peran penyuluh dalam memfasilitasi petani padi organik di Kabupaten Padang Pariaman adalah: kompetensi penyuluh melaksanakan tugas dan fungsi penyuluhan, motivasi penyuluh serta orientasi kelembagaan penyuluhan.

DAFTAR PUSTAKA

- IFOAM. 2006. *Organic Agriculture Worldwide Directory of IFOAM Member Organizations and Associates*. Jerman. IFOAM.
- Irsal Las, K. Subagyono, dan A.P. Setiyanto. 2006. *Isu Dan Pengelolaan Lingkungan Dalam Revitalisasi Pertanian*. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Jalan Ir. H. Juanda No. 98, Bogor 16123. *Jurnal Litbang Pertanian*, 25(3), 2006
- Mardikanto, T. 2009. *Sistem Penyuluhan Pertanian*. Surakarta: UNS Press
- Nurdin F. 2002. *Pengaruh Pertanaman Polikultur Serangga Hama dan Musuh Alami. Prosiding Simposium Keanekaragaman Hayati Arthropoda*. 423–426.
- Saragih ES. 2008. *Pertanian Organik, Solusi Hidup Harmoni dan Berkelanjutan*. Penebar Swadaya: Jakarta.
- SNI 01-6729-2016 Sistem pangan organik. 2016. Badan Standardisasi Nasional (BSN).
- Suhardiyono, L. 1992. *Penyuluhan : Petunjuk Bagi Penyuluh Pertanian*. Erlangga Jakarta.
- Sumardjo. 2008. *Penyuluhan Pembangunan Pilar Pendukung Kemajuan dan kemandirian Masyarakat*. Di dalam: Yustina I dan Sudradjat A, penyunting. *Pemberdayaan Manusia Pembangunan yang Bermartabat*. Bogor: Sydex Plus.
- Sumardjo. 2010. *Penyuluhan menuju Pengembangan Kapital Manusia dan Kapital Sosial dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat*. Orasi ilmiah Guru Besar IPB. Bogor.
- Suwantoro. 2008. *Analisis Pengembangan Pertanian Organik di Kabupaten Magelang (studi kasus di Kecamatan Sawangan)* [tesis]. Program Magister Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
- Untung K. 1997. *Pertanian Organik Sebagai Alternatif Teknologi Dalam Pengembangan Peranian. Diskusi Panel tentang pertanian organik*. Lembang: DPD HKTI Jawa Barat.
- Yanti, R. 2005. *Aplikasi Teknologi Pertanian Organik: Penerapan Pertanian Organik. Agraria*. Badan Litbang Pertanian. Bogor.
- Van den Ban AW, Hawkins HS. 1999. *Penyuluhan Pertanian*. Yogyakarta: Kanisius.

ANALISIS DINAMIKA KELOMPOK PADA KELOMPOK TANI DI KELURAHAN LIMAU MANIS KECAMATAN PAUH KOTA PADANG

Ahmad Fachri^{1*}, Zulvera¹, Nuraini Budi Astuti¹

¹ Program Studi Agribisnis Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Andalas

*Email: ahmadfachri96@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang dinamika kelompok pada kelompok tani di Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2018 sampai Februari 2018 pada 5 kelompok tani yang ada di Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Menganalisis dinamika kelompok pada kelompok tani di Kelurahan Limau Manis, dan (2) Menganalisis faktor yang berhubungan dengan dinamika kelompok pada kelompok tani di Kelurahan Limau Manis. Penelitian ini menggunakan metode multi studi kasus dengan melakukan wawancara menggunakan kuisioner kepada anggota kelompok tani di Kelurahan Limau Manis. Variabel yang diamati adalah unsur-unsur dinamika kelompok pada kelompok tani di Kelurahan Limau Manis dan faktor-faktor yang berhubungan dengan dinamika kelompok pada kelompok tani di Kelurahan Limau Manis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kelompok pada kelompok tani di Kelurahan Limau Manis berada pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa belum semua unsur-unsur dinamika kelompok yang diamati sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Faktor yang berhubungan dengan dinamika kelompok pada kelompok tani di Kelurahan Limau Manis adalah gaya kepemimpinan, lama berusahatani, peran penyuluh pertanian, dukungan tokoh masyarakat dan ketersediaan bantuan modal. Untuk meningkatkan dinamika kelompok pada kelompok tani di Kelurahan Limau Manis disarankan bahwa adanya pembagian tugas yang jelas dalam kelompok dan adanya sanksi dan penghargaan dalam kelompok. Selain itu perlunya peningkatan dukungan tokoh masyarakat dan peran penyuluh pertanian serta kelompok disarankan tidak tergantung lagi dengan bantuan dari pemerintah.

Kata Kunci: Kelompok Tani, Dinamika Kelompok, Kelurahan Limau Manis

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris, artinya pertanian masih memegang peranan penting pada seluruh sistem perekonomian nasional. Hal itu dapat ditunjukkan dengan banyaknya penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan produk nasional yang berasal dari pertanian. Berdasarkan data BPS 2016, di Indonesia terdapat 37.770.165 jiwa yang

memiliki pekerjaan utama di sektor pertanian dari 118.411.973 jiwa jumlah penduduk. Dengan demikian, pembangunan pertanian menjadi salah satu hal penting yang harus dilakukan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama yang bekerja di sektor pertanian.

Pembangunan pertanian yang merupakan bagian dari pembangunan nasional menempatkan petani sebagai pelaku utama sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (UU SP3K) no 16 tahun 2006. Sebagai pelaku utama tentu saja petani menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan pertanian. Oleh karena itu pembinaan dan pemberdayaan petani perlu terus dilakukan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan petani adalah dengan mendorong petani untuk berkelompok atau membentuk kelompok-kelompok tani.

Kelompok-kelompok dari sistem sosial termasuk kelompok tani tidak statis tetapi dinamis atau bergerak, hidup, aktif dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sehingga kelompok tani yang baik adalah kelompok tani yang dinamis. Menurut Mardikanto (1993) kedinamisan kelompok tani dapat diukur melalui dinamika kelompok yang memiliki sembilan unsur; tujuan kelompok; struktur kelompok; fungsi tugas kelompok; pembinaan dan pengembangan kelompok; kekompakan kelompok; suasana kelompok; tekanan kelompok; efektivitas kelompok; dan maksud terselubung.

Hariadi (2011) mengemukakan bahwa dinamika kelompok dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal kelompok diantaranya; motivasi kerja anggota; keyakinan diri; kohesi kelompok; sikap; interaksi anggota; norma kelompok; dan gaya kepemimpinan kelompok. Sedangkan untuk faktor eksternal yaitu penyuluhan pertanian dan pembinaan oleh pamong desa. Sementara itu, Lestari (2011) menemukan bahwa dinamika kelompok juga dipengaruhi oleh lamanya berusahatani dan ketersediaan bantuan modal.

Pendekatan kelompok dalam pembangunan pertanian diterapkan pada daerah-daerah yang memiliki kawasan pertanian, dimana sebagian masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani, seperti halnya Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh. Daerah ini merupakan salah satu daerah yang memiliki Rumah Tangga Petani (RTP) terbanyak dan luas areal sawah terluas di Kota Padang (Dinas Pertanian Padang 2013). Sehingga

tidak salah kalau Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah kelompok tani yang banyak di Kota Padang.

Kelompok tani yang berhasil adalah kelompok tani yang mampu mencapai tujuan. Menurut Hariadi (2011) dalam mencapai tujuannya kelompok tani akan didukung oleh empat fungsi yaitu kelompok tani sebagai unit belajar, kelompok tani sebagai unit kerjasama, kelompok tani sebagai unit produksi, dan kelompok tani sebagai unit usaha. Namun berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan di Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh, keempat fungsi kelompok tani untuk mencapai tujuan tersebut belum berjalan dengan optimal. Hal itu ditunjukkan banyaknya petani yang menjadi anggota pada kelompok-kelompok tani hanya aktif dalam kegiatan kelompok saat akan diberi bantuan untuk menjalankan usahatani yang mereka miliki. Sementara itu untuk kegiatan kelompok seperti pertemuan rutin tidak mereka ikuti dengan maksimal. Kondisi ini tentu belum sesuai dengan tujuan kelompok tani. Hal ini diduga berkaitan dengan dinamika kelompok yang ada pada kelompok tani di Kelurahan Limau Manis berada dalam kondisi yang kurang baik.

Berdasarkan pada fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat dinamika kelompok pada kelompok tani di Kelurahan Limau Manis dan menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan dinamika kelompok pada kelompok tani di Kelurahan Limau Manis.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian berada di Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode *multiple case study*. Adapun responden yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 61 orang yang diperoleh menggunakan rumus Slovin. (Prasetyo dan Jannah 2005:135). Pengambilan responden dilakukan dengan teknik *proporsional random sampling*, untuk lebih jelasnya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pengambilan Responden

No	Kelompok Tani	Tahun Berdiri	Kelas	Jumlah Anggota	Pengambilan Responden	Jumlah Responden
1	Koto Marapak	1982	Lanjut	60	60/159 X 61	23
2	Tunas Harapan	1986	Lanjut	30	30/159 X 61	12
3	Koto Panjang	1993	Lanjut	24	24/159 X 61	9
4	KWT Cempaka	2003	Pemula	24	24/159 X 61	9
5	Sumber Makmur	2014	Lanjut	21	21/159 X 61	8
Total				159		61

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari 2 data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan anggota kelompok tani di Kelurahan Limau Manis. Sedangkan data sekunder bersumber dari instansi terkait seperti Kantor Camat Pauh, UPT Pertanian Pauh, Badan Pusat Statistik, serta penelusuran studi pustka yang terkait dengan permasalahan.

Variabel yang diamati untuk menganalisis dinamika kelompok pada kelompok tani di Kelurahan Limau Manis yaitu unsur- unsur dinamika kelompok meliputi: tujuan kelompok; struktur kelompok; fungsi tugas kelompok; pembinaan dan pengembangan kelompok; kekompakan kelompok; suasana kelompok; tekanan kelompok; efektivitas kelompok; dan maksud terselubung Mardikanto (1993). Sedangkan variabel yang diamati untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan dinamika kelompok pada kelompok tani di Kelurahan Limau Manis merujuk pada Hariadi (2011) dan Lestari (2011) meliputi; motivasi anggota; gaya kepemimpinan; lama berusahatani; peran penyuluh pertanian; dukungan tokoh masyarakat; dan ketersediaan bantuan modal .

Untuk menganalisis dinamika kelompok pada kelompok tani di Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang digunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu dengan menggunakan hasil wawancara dari responden selama penelitian. Berdasarkan nilai skor dinamika kelompok pada setiap indikator, kemudian dipersentasikan menggunakan rumus:

$$\text{Tingkat dinamika kelompok} = \frac{\text{total skor yang diperoleh}}{\text{total skor yang diharapkan}} \times 100\%$$

Sehingga persentase tingkat dinamika tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Dinamika kelompok rendah, bila persentase yang diperoleh antara 0 – 33%
2. Dinamika kelompok sedang, bila persentase yang diperoleh antara 34 – 67%

3. Dinamika kelompok tinggi, bila persentase yang diperoleh antara 68 – 100%

Untuk menganalisis faktor yang berhubungan dengan dinamika kelompok pada kelompok tani di Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang dilakukan secara deskriptif kuantitatif. Dalam analisa ini digunakan uji korelasi *Rank Spearman* dengan bantuan aplikasi SPSS 20.

Uji Hipotesis yang dilakukan adalah:

- Ho : tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi anggota, gaya kepemimpinan, lama berusahatani, peran penyuluh pertanian, dukungan tokoh masyarakat, ketersediaan bantuan modal dengan tingkat dinamika kelompok
- H1 : terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi anggota, gaya kepemimpinan, lama berusahatani, peran penyuluh pertanian, dukungan tokoh masyarakat, ketersediaan bantuan modal dengan tingkat dinamika kelompok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Kelompok pada Kelompok-Kelompok Tani di Kelurahan Limau Manis

Penelitian ini mengambil 5 kelompok tani yang mewakili kelompok tani di Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh berdasarkan tahun berdiri, kelas, dan jumlah anggota. Data dinamika kelompok pada Kelompok-Kelompok Tani di Kelurahan Limau Manis disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Data dinamika kelompok pada Kelompok-Kelompok Tani di Kelurahan Limau Manis

No	Unsur-Unsur Kelompok	Dinamika	Persentase Skor (%)				
			Koto Marapak	Tunas Harapan	Koto Panjang	KWT Cempaka	Sumber Makmur
1	Tujuan Kelompok		81,15	88,88	96,29	96,29	89,58
2	Struktur Kelompok		35,96	49,3	76,85	88,88	72,9
3	Fungsi Tugas		51,08	58,33	72,22	72	90,62
4	Pembinaan Pengembangan Kelompok		68,84	90,97	83,33	97,22	81,25
5	Kekompakkan Kelompok		53,98	68,75	88,88	97,22	90,62
6	Suasana Kelompok		64,49	87,5	90,74	96,29	93,75
7	Tekanan Kelompok		0	0	22,22	50	25
8	Keefektifan Kelompok		48,91	68,75	69,44	75	62,5
9	Maksud Terselubung		0,81	1,63	0	0	0,81
Rata-rata			51,31	65,53	76,59	86,86	77,65
Kategori			Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa dinamika kelompok yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tani di Kelurahan Limau Manis beragam. Penjelasan gambaran hasil dinamika kelompok pada masing-masing kelompok tani di Kelurahan Limau Manis yang diamati selama penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

a) Dinamika Kelompok pada Kelompok Tani Koto Marapak

Pada kelompok tani Koto Marapak yang merupakan kelompok tani tertua di Kelurahan Limau Manis memiliki tingkat dinamika kelompok pada persentase angka 51,31% atau masuk dalam kategori sedang. Kondisi kelompok tani Koto Marapak yang ada pada saat ini disebabkan karena dalam beberapa waktu terakhir anggota kelompok kurang antusias dalam mengikuti kegiatan-kegiatan kelompok, sehingga belakangan peran ketua sangat dominan dan anggota berharap dengan berkelompok hanya untuk sarana memperoleh bantuan saprodi saja.

b) Dinamika Kelompok pada Kelompok Tani Tunas Harapan

Kelompok tani ini sudah berdiri sejak tahun 1986, dan merupakan kelompok tani kedua tertua yang diteliti dalam penelitian ini. Tingkat dinamika kelompok pada kelompok tani Tunas Harapan berada pada angka 65,53% atau berada dalam kategori sedang. Kelompok Tani Tunas Harapan beberapa tahun yang lalu sempat meraih masa jayanya karena pernah menjadi salah satu juara kompetisi UPJA tingkat nasional dan diundang ke Istana Negara pada masa itu. Namun seiring berjalannya waktu belakangan kondisi kelompok berada dalam keadaan kurang baik. Penyebabnya sempat terjadi konflik antar anggota yang tidak sepaham dan mengganggu stabilitas kelompok tani ini. Hal ini berimbas pada antusiasme para anggota yang lain untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan internal yang ada pada kelompok tani Tunas Harapan.

c) Dinamika Kelompok pada Kelompok Tani Koto Panjang Saiyo

Kelompok Tani Koto Panjang Saiyo memiliki tingkat dinamika kelompok dengan kategori tinggi dengan persentase 76,59%. Kelompok tani Koto Panjang Saiyo yang berdiri pada tahun 1993 dan sempat vakum sebelum bangkit kembali di tangan generasi baru kelompok tani ini pada tahun 2007, karena anggota terdahulu sudah lanjut usia. Kondisi kelompok tani Koto Panjang yang dinamis disebabkan karena kegiatan kelompok ini telah terjadwal dan rutinnya kelompok dalam melakukan pertemuan serta manajemen kelompok

yang bagus dibawah kendali ketua kelompok dan jajarannya. Selain itu hubungan yang baik antar anggota juga mendukung keharmonisan yang ada dalam kelompok, sebab mayoritas anggota kelompok pada Kelompok Tani Koto Panjang saat ini adalah generasi baru yang mebangkitkan kembali kelompok ini yang dahulunya sempat vakum.

d) Dinamika Kelompok pada Kelompok Wanita Tani Cempaka

KWT Cempaka yang memiliki tingkat dinamika dalam kategori tinggi. Bahkan angka 86,86% yang menjadi persentase dinamika kelompok ini merupakan angka tertinggi banding 4 kelompok lainnya yang diteliti. KWT Cempaka yang diisi oleh ibu-ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai petani dan beberapa diataranya juga ada yang sebagai pedagang. Kondisi ibu-ibu yang ada pada kelompok ini tentu memiliki waktu luang lebih banyak dibanding kaum laki-laki yang mayoritas menjadi anggota kelompok di 4 kelompok tani lainnya yang diteliti. Sehingga kekompakkan dari kelompok ini sangat terlihat, terutama berdasarkan pernyataan responden bahwasanya kelompok ini rutin mengangkat agenda pada setiap periode tertentu.

e) Dinamika Kelompok pada Kelompok Tani Sumber Makmur

Kelompok tani yang terakhir sekaligus kelompok tani termuda yang ada pada Kelurahan Limau Manis adalah kelompok tani Sumber Makmur. Kelompok tani yang baru berdiri pada tahun 2014 ini memiliki tingkat dinamika kelompok yang tinggi dengan persentase 77,65%. Meskipun kelompok tani ini adalah yang paling muda, namun dari wawancara yang dilakukan dengan responden menunjukkan antusiasme dan semangat para anggota kelompok untuk lebih maju serta hubungan anggota yang harmonis sangat terlihat. Hal ini juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya kelompok ini yang tumbuh dari kelompok itu sendiri. Dimana, awalnya kelompok ini bermula dari kelompok julo-julo petani yang kemudian mengembangkan dirinya untuk menjadi kelompok tani guna lebih mudah adalah akses bantuan saprodi sekaligus meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta taraf hidup anggotanya.

2. Analisis Dinamika Kelompok Tani di Kelurahan Limau Manis

Dinamika kelompok pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi hubungan antar satu manusia dalam kelompok guna menyelesaikan

tugas atau pekerjaan dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Kelompok yang dinamis menurut Lewin (1992) dalam Hariadi (3:2011), bahwa perilaku kelompok dalam mencapai tujuan merupakan fungsi dari semua situasi yang ada baik situasi yang ada dalam kelompok maupun di luar kelompok. Nilai dinamika kelompok pada kelompok tani di Kelurahan Limau Manis disajikan pada Tabel 3

Tabel 3. Tingkat dinamika kelompok pada kelompok tani di Kelurahan Limau Manis

No	Unsur-Unsur Dinamika Kelompok	Persentase Skor (%)	Kategori
1	Tujuan Kelompok	88,25	Tinggi
2	Struktur Kelompok	57,24	Sedang
3	Fungsi Tugas	65,77	Sedang
4	Pembinaan dan Pengembangan Kelompok	81,14	Tinggi
5	Kekompakkan Kelompok	73,36	Tinggi
6	Suasana Kelompok	81,42	Tinggi
7	Tekanan Kelompok	13,83	Rendah
8	Keefektifan Kelompok	61,47	Sedang
9	Maksud Terselubung	3,27	Rendah
Rata-rata		66,54	Sedang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kelompok dalam jangka waktu 6 bulan terakhir pada kelompok tani yang ada di Kelurahan Limau Manis berada pada kategori sedang. Artinya dinamika kelompok sebagai kekuatan yang terdapat dalam kelompok berupa unsur-unsur dinamika kelompok yang menentukan atau berpengaruh terhadap perilaku kelompok dan anggotanya dalam mencapai tujuan belum bisa dikatakan baik. Hal ini dikarenakan tujuan berdirinya dari kelompok tani yang ada di Kelurahan Limau Manis itu sendiri belum tercapai sepenuhnya hingga penelitian ini selesai dilaksanakan. Penjelasan tentang masing-masing unsur dinamika kelompok disajikan pada bagian berikut:

a) Tujuan Kelompok

Pada penelitian ini tujuan kelompok yang dinilai berdasarkan tiga aspek, secara umum menunjukkan tujuan kelompok pada kelompok tani di Kelurahan Limau Manis memiliki persentase skor 88,25% atau dalam kategori tinggi. Hasil tujuan kelompok disajikan di Tabel 4.

Tabel 4. Penilaian dinamika kelompok berdasarkan tujuan kelompok

Aspek	Persentase Skor (%)	Kategori
Pengetahuan anggota tentang tujuan kelompok	95,9	Tinggi
Kesesuaian tujuan	93,2	Tinggi
Sosialisasi tujuan kelompok	75,4	Tinggi
Rata-rata	88,25	Tinggi

b) Struktur Kelompok

Struktur kelompok adalah bentuk hubungan antara individu-individu di dalam kelompok yang disesuaikan dengan posisi dan peranan masing-masing individu. Hasil penelitian yang dilakukan pada kelompok tani di Kelurahan Limau Manis diperoleh hasil dari unsur struktur kelompok dengan persentase skor 57,24% atau dalam kategori sedang. Hasil struktur kelompok disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Penilaian dinamika kelompok berdasarkan struktur kelompok

Aspek	Persentase Skor (%)	Kategori
Keikutsertaan dalam pengambilan keputusan	86,06	Tinggi
Keputusan yang sesuai dengan keinginan anggota	79,5	Tinggi
Pembagian tugas	33,6	Rendah
Kepuasan anggota terhadap tugas yang diberikan	31,96	Rendah
Penyebaran informasi	64,75	Sedang
Jadwal pertemuan anggota	47,5	Sedang
Rata-rata	57,24	Sedang

c) Fungsi Tugas

Fungsi tugas adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh kelompok agar kelompok dapat menjalankan fungsinya sehingga tujuan kelompok dapat tercapai (Slamet, 1978 *dalam* Frensiska, 2016). Untuk hasil fungsi tugas yang disajikan pada Tabel 6 Dalam unsur ini, aspek yang dinilai mulai dari keaktifan anggota dalam memberikan saran, pemecahan masalah, koordinasi kelompok, dan mengajak anggota kelompok mengikuti kegiatan. Secara umum diperoleh persentase skor 65,77% atau dalam kategori sedang..

Tabel 6. Penilaian dinamika kelompok berdasarkan fungsi tugas

Aspek	Persentase Skor (%)	Kategori
Keaktifan anggota dalam memberikan saran	83,6	Tinggi
Memecahkan masalah dalam kelompok	80,32	Tinggi
Koordinasi dalam kelompok	58,19	Sedang
Mengajak anggota kelompok mengikuti kegiatan	40,98	Sedang
Rata-rata	65,77%	Sedang

d) Pembinaan dan Pengembangan Kelompok

Pembinaan dan pengembangan kelompok adalah segala macam usaha yang dilakukan kelompok dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan dirinya (Soedarsono, 2005 *dalam* Lestari 2011:23). Pembinaan dan pengembangan kelompok dilakukan dengan cara bertanggung jawab terhadap kegiatan, kelengkapan sarana, usaha untuk menambah anggota baru, fasilitas, kepatuhan terhadap norma yang berlaku dalam kelompok, peluang bagi anggota baru, dan peluang mengembangkan keterampilan. Secara umum pembinaan dan pengembangan kelompok memiliki persentase skor 81,14% atau masuk dalam kategori tinggi. Hasil dari pembinaan dan pengembangan kelompok disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Penilaian dinamika kelompok berdasarkan pembinaan pengembangan kelompok

Aspek	Persentase Skor (%)	Kategori
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan	76,2	Tinggi
Kelengkapan sarana dan prasarana	93,4	Tinggi
Penggunaan sarana dan prasarana oleh anggota	82,7	Tinggi
Kepatuhan terhadap kelompok	77,86	Tinggi
Peluang bagi anggota baru	75,4	Tinggi
Peluang untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan	81,14	Tinggi
Rata-rata	81,14	Tinggi

e) Kekompakkan Kelompok

Kekompakkan kelompok merupakan modal dasar bagi keberhasilan suatu kelompok. Hasil penelitian kekompakkan kelompok disajikan pada Tabel 8. Unsur kekompakkan kelompok berada pada kategori tinggi dengan persentase skor 73,6% atau masuk kategori tinggi.

Tabel 8. Penilaian dinamika kelompok berdasarkan kekompakkan kelompok

Aspek	Persentase Skor (%)	Kategori
Kemampuan ketua menggerakkan anggota dalam mencapai tujuan	79,5%	Tinggi
Anggota merasa bagian dari kelompok	80,32%	Tinggi
Memegang nilai-nilai yang dianut	74,59%	Tinggi
Setiap anggota selalu bekerja sama	54,91%	Sedang
Manfaat dari kerjasama	71,31%	Tinggi
Mengenal antar anggota	79,5%	Tinggi
Rata-rata	73,36%	Tinggi

f) Suasana Kelompok

Slamet (1978) dalam Lestari 2011: 24 Suasana kelompok yaitu lingkungan fisik dan nonfisiki (emosional) yang akan mempengaruhi perasaan setiap anggota kelompok terhadap kelompoknya. Aspeknya adalah bergaul dengan sesama anggota, merasa senang dalam melaksanakan kegiatan, tempat tinggal dekat dengan sekretarian. Secara umum

suasana kelompok memiliki persentase skor 81,42% atau masuk dalam kategori tinggi. Untuk hasil yang diperoleh unsur suasana kelompok yang disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Penilaian dinamika kelompok berdasarkan suasana kelompok

Aspek	Persentase Skor (%)	Kategori
Berinteraksi dengan sesama anggota	81,96	Tinggi
Merasa senang dalam melaksanakan kegiatan	77,86	Tinggi
Tempat tinggal dekat dengan sekretariat	84,42	Tinggi
Rata-rata	81,42	Tinggi

g) Tekanan Kelompok

Tekanan kelompok merupakan tekanan-tekanan atau ketegangan dalam kelompok yang menyebabkan kelompok tersebut berusaha keras untuk mencapai tujuan kelompok. Secara umum unsur tekanan kelompok memiliki persentase skor 13,93% atau masuk dalam kategori rendah. Hasil penelitian yang telah dilakukan aspek dinilai tentang tekanan kelompok disajikan pada Tabel 10

Tabel 10. Penilaian dinamika kelompok berdasarkan tekanan kelompok

Aspek	Persentase Skor (%)	Kategori
Penghargaan dan sanksi dalam kelompok	27,86	Rendah
Tekanan dari luar kelompok	0	Rendah
Rata-rata	13,93%	Rendah

h) Keefektifan Kelompok

Efektifitas kelompok adalah keberhasilan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan cepat dan berhasil baik serta memuaskan bagi setiap anggota kelompok dalam rangka mencapai tujuan berikutnya (Soedarsono, 2005 dalam Lestari 2011:25). Indikatornya adalah ketercapaian tujuan kelompok dan kelompok dikatakan baik dalam mencapai tujuan. Secara umum memperoleh persentase skor 61,47% atau masuk dalam kategori sedang. Untuk hasil penelitian tentang keefektifan kelompok disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Penilaian dinamika kelompok berdasarkan keefektifan kelompok

Aspek	Persentase Skor (%)	Kategori
Ketercapaian tujuan kelompok	50%	Sedang
Kelompok dikatakan baik dalam mencapai tujuan	64,75%	Sedang
Rata-rata	61,47%	Sedang

i) Maksud terselubung

Aspek yang dinilai dalam unsur maksud terselubung yaitu perbedaan tujuan antara anggota dan pengurus. Dimana unsur ini memperoleh skor 3,27% atau masuk dalam kategori rendah. Untuk hasil unsur maksud terselubung disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Penilaian dinamika kelompok berdasarkan maksud terselubung

Aspek	Persentase Skor (%)	Kategori
Perbedaan tujuan antara anggota dan pengurus	3,27%	Rendah
Total	3,27%	Rendah

3. Analisis hubungan faktor-faktor dinamika kelompok yang berhubungan dengan tingkat dinamika kelompok pada kelompok tani di Kelurahan Limau Manis

Dalam penelitian ini faktor-faktor yang dijadikan sebagai variabel yang berhubungan dengan dinamika kelompok ada 6 faktor. Faktor-faktor tersebut adalah motivasi anggota, gaya kepemimpinan, lamanya berusahatani, peran penyuluh pertanian, dukungan tokoh masyarakat, dan ketersediaan bantuan modal. Setelah dilakukan uji korelasi spearman dengan SPSS 20 maka diperoleh hasil yang disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Hasil uji korelasi faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat dinamika kelompok

No	Faktor dinamika Kelompok	Nilai Signifikansi	Keterangan	Koefisien Korelasi
1	Motivasi anggota	0,087	Non Signifikan	0,221
2	Gaya kepemimpinan	0,000	Signifikan	0,593
3	Lamanya berusahatani	0,021	Signifikan	-0,295
4	Peran penyuluh pertanian	0,000	Signifikan	0,599
5	Dukungan tokoh masyarakat	0,003	Signifikan	0,375
6	Ketersediaan bantuan modal	0,003	Signifikan	-0,379

Penjelasan untuk masing-masing faktor dinamika kelompok dijelaskan sebagai berikut:

a) Motivasi Anggota

Motivasi anggota adalah dorongan yang dimiliki dari anggota untuk bergabung dan tetap bertahan dalam kelompok. Dari hasil penelitian, mayoritas anggota kelompok tani yang ada di Kelurahan Limau Manis memiliki motivasi bergabung ke dalam kelompok tani dan tetap bertahan didalamnya hanya untuk mendapatkan bantuan. Berdasarkan Tabel 13 faktor motivasi anggota memiliki nilai signifikansi (0,087) Artinya motivasi anggota pada kelompok tani di Kelurahan Limau Manis tidak memiliki hubungan dengan tingkat dinamika kelompok karena nilai signifikansi ($>0,05$). Rendahnya motivasi anggota tidak ada berhubungan dengan tingkat dinamika kelompok.

b) Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan adalah proses didalam mempengaruhi anggota kelompok terhadap pencapaian tujuan kelompok (Joyce, 1984 *dalam* Astuti, 2010:20). Pada kelompok tani di Kelurahan Limau Manis dalam aspek ketua kelompok mengambil keputusan serta menyelesaikan masalah tetap melibatkan anggota kelompok untuk turun serta walaupun dalam setiap kesempatan tidak selalu semuanya bisa turut hadir berpartisipasi. Berdasarkan Tabel 13 pada faktor gaya kepemimpinan memperoleh nilai signifikansi (0,000). Artinya gaya kepemimpinan dengan tingkat dinamika kelompok pada kelompok tani di Kelurahan Limau Manis memiliki hubungan karena nilai signifikansi ($< 0,05$). Sedangkan untuk koefisien korelasi pada faktor gaya kepemimpinan memiliki nilai positif (0,593) yang menunjukkan semakin baik gaya kepemimpinan maka tingkat dinamika kelompok cenderung semakin tinggi.

c) Lamanya Berusahatani

Mayoritas anggota kelompok tani di Kelurahan Limau Manis sudah berpengalaman dalam berusahatani lebih dari 10 tahun. Berdasarkan Tabel 13 faktor lamanya berusahatani menunjukkan nilai signifikansi (0,021). Artinya antara lamanya berusahatani dengan tingkat dinamika kelompok pada kelompok tani di Kelurahan Limau Manis memiliki hubungan karena nilai signifikansi ($< 0,05$). Sedangkan untuk koefisien korelasi pada faktor lamanya berusahatani memiliki nilai negatif (-0,295) yang menunjukkan semakin lama seorang petani anggota kelompok dalam pengalaman usahatannya maka tingkat

dinamika kelompok yang ada pada kelompok tersebut cenderung semakin rendah. Hal disebabkan karena petani yang sudah lama dalam usahatani cenderung menginginkan keuntungan yang bersifat materil saja ketika bergabung ke dalam kelompok tani dan cenderung mengabaikan fungsi kerjasama yang menjadi alasan dibentuknya suatu kelompok tani tersebut.

d) Peran penyuluh pertanian

Peran penyuluh pertanian pada anggota kelompok tani di Kelurahan Limau Manis meliputi peran mendampingi usahatani, peran memecahkan masalah, dan peran berbagi pengetahuan. Berdasarkan Tabel 13 faktor penyuluh pertanian memiliki nilai signifikansi (0,000). Artinya antara peran penyuluh pertanian dengan tingkat dinamika kelompok pada kelompok tani di Kelurahan Limau Manis memiliki hubungan karena nilai signifikansi ($< 0,05$). Sedangkan nilai koefisien korelasi pada faktor peran penyuluh pertanian bernilai positif (0,599) yang menunjukkan semakin tinggi peran penyuluh pertanian terhadap suatu kelompok tani maka tingkat dinamika kelompok yang ada pada kelompok tani tersebut cenderung semakin tinggi pula..

e) Dukungan tokoh masyarakat

Dukungan tokoh masyarakat kepada anggota kelompok tani di Kelurahan Limau Manis selama ini berupa dukungan moril, semangat, dan gagasan. Sementara untuk dukungan tenaga, materi, maupun finansial tidak ada. Berdasarkan Tabel 13 Pada faktor dukungan dari tokoh masyarakat memiliki nilai signifikansi (0,003). Artinya antara dukungan tokoh masyarakat dengan tingkat dinamika kelompok pada kelompok tani di Kelurahan Limau Manis memiliki hubungan karena nilai signifikansi ($< 0,05$). Sedangkan nilai koefisien korelasi pada faktor dukungan tokoh masyarakat bernilai positif (0,375) yang menunjukkan semakin tinggi dukungan tokoh masyarakat pada kelompok tani maka tingkat dinamika kelompok cenderung semakin tinggi.

f) Ketersediaan Bantuan Modal

Kelompok Tani di Kelurahan Limau Manis selama ini cukup mudah dalam hal mengakses dan memperoleh bantuan modal. Berdasarkan Tabel 13 faktor ketersediaan modal menunjukkan nilai signifikansi (0,003). Artinya antara lamanya berusahatani dengan tingkat dinamika kelompok pada kelompok tani di Kelurahan Limau Manis

memiliki hubungan karena nilai signifikansi ($< 0,05$). Sedangkan untuk koefisien korelasi bernilai negatif (-0,379) yang menunjukkan semakin tinggi ketersediaan modal maka tingkat dinamika kelompok yang pada kelompok tani di Kelurahan Limau Manis cenderung semakin rendah. Dengan lancarnya bantuan modal yang diperoleh petani yang tergabung dalam kelompok maka membuat petani cenderung tidak mencoba sesuatu yang baru dalam kelompok.

KESIMPULAN

Dinamika kelompok pada kelompok tani di Kelurahan Limau Manis yang diukur berdasarkan 9 unsur-unsur dinamika kelompok dengan pendekatan psikososial secara keseluruhan berada dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa belum semua unsur dinamika kelompok yang diamati sesuai dengan kondisi diharapkan dan belum tercapainya tujuan kelompok sepenuhnya. Sementara itu, dari 5 kelompok yang diamati dalam penelitian menunjukkan bahwa 2 kelompok tani yang paling tua dari usia yaitu Kelompok Tani Koto Marapak dan Kelompok Tani Tunas Harapan memiliki unsur dinamika kelompok pada kategori sedang. Sedangkan 3 kelompok lainnya yaitu Kelompok Tani Koto Panjang Saiyo, KWT Cempaka, dan Kelompok Tani Sumber Makmur memiliki unsur dinamika kelompok pada kategori tinggi. Faktor-faktor yang berhubungan dengan dinamika kelompok pada kelompok tani di Kelurahan Limau Manis adalah gaya kepemimpinan, lamanya berusahatani, peran penyuluh pertanian, dukungan tokoh masyarakat, dan ketersediaan bantuan modal.

Untuk meningkatkan dinamika kelompok dari unsur tekanan kelompok dan unsur struktur kelompok, sebaiknya pada kelompok tani yang ada di Kelurahan Limau Manis memberikan penghargaan bagi anggota yang mematuhi aturan dan memiliki prestasi, menegakkan sanksi bagi anggota yang melanggar peraturan, dan memberikan pembagian tugas yang jelas antar anggota. Sedangkan, untuk meningkatkan dinamika kelompok pada kelompok tani di Kelurahan Limau Manis melalui faktor yang berhubungan dengan dinamika kelompok, maka perlu adanya peningkatan peran penyuluh pertanian dan dukungan tokoh masyarakat yang menjangkau seluruh anggota dari kelompok tani, serta sebaiknya kelompok tidak terus bergantung kepada bantuan modal yang diberikan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Aini Nur. 2010. Analisis Efektivitas Kelompok Tani Di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo [Skripsi]. Surakarta
- Badan Pusat Statistik, 2016. Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan Utama. Badan Pusat Statistik. Jakarta
- Frensiska, Ana. 2017. Dinamika Kelompok Wanita Tani (KWT) Srikandi pada Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Hariadi, Sunarru S.2011. *Dinamika Kelompok: Teori dan Aplikasinya untuk Analisis Keberhasilan Kelompok Tani Sebagai Unit Belajar, Kerjasama, Produksi, dan Bisnis*. Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Lestari, Mugi. 2011. *Dinamika Kelompok dan Kemandirian Anggota Kelompok Tani dalam Berusahatani di Kecamatan Poncowarno Kab. Kebumen Prov. Jawa Tengah*. Tesis. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Mardikanto, T 1993. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Acuan untuk Pelajar, Mahasiswa, Dosen, Penyuluh, Pekerja Sosial, Penentu Kebijakan dan Peminat Ilmu/Kegiatan Penyuluhan Pembangunan. Solo: Sebelas Maret University Press.
- Prasetyo, Bambang dan Lina M.Jannah. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

**SEMINAR NASIONAL
PENYULUHAN, KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

TOPIK KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

Daftar Halaman

No.	Judul & Peserta	Halaman
1.	KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN NEGERI PASCA KONFLIK DI KOTA AMBON <i>Andreas Pandiangan</i>	228 - 248
2.	PERAN MEDIA MASSA DALAM PEMBANGUNAN PETERNAKAN AYAM RAS PEDAGING DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA <i>Basril Basyar</i>	249 - 259
3.	KAJIAN TEORITIS MENGENAI PERSEPSI KONSUMEN TENTANG KARAKTERISTIK INOVASI INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA PEMASARAN SAYURAN SECARA ONLINE <i>Edi Dwi Cahyono</i>	260 - 278
4.	TINGKAT ADOPSI INOVASI PADA DAN PEMANFAATAN SUMBER INFORMASI MEDIA MASSA OLEH PETERNAK SAPI PERAH DI KOTA PADANG PANJANG, SUMATERA BARAT <i>Ediset</i>	279 - 289
5.	ANALISIS HUBUNGAN KREDIBILITAS KOMUNIKATOR DENGAN PERILAKU MASYARAKAT TENTANG BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI KELURAHAN AIR MANIS KOTA PADANG <i>Gisky Andria Putra</i>	290 - 304

Sambungan Daftar Halaman

No.	Judul & Peserta	Halaman
6.	JARINGAN KOMUNIKASI ANTAR USAHA KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM PRAKTIK EKONOMI FESTIVAL <i>Iwan Nurhadi</i>	305 - 322
7.	PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN MULTIMEDIA (TIM) : MEDIA VISUAL, AUDIO, DAN AUDIOVISUAL DALAM INTERAKSI KOMUNIKASI MASYARAKAT (STUDI KASUS IBU-IBU MAJELIS TAKLIM MUSHOLA AR-RAHMAN BANDAR LAMPUNG) <i>Kordiyana K Rangga</i>	324 - 331
8.	DAMPAK FAKTOR INTERNAL PETANI UPAYA KHUSUS TANAMAN JAGUNG BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA <i>Marsianus Palo</i>	332 - 351
9.	STRATEGI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN START UP BERBASIS ONLINE SHOP <i>Sulthan Jiyad Muqsith Asmara</i>	352 - 365
10.	OPTIMALISASI APLIKASI TYPEFORM UNTUK EVALUASI KAPASITAS MASYARAKAT TERHADAP BENCANA GEMPA <i>Tedy Wiraseptya</i>	366 - 375
11.	PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KOMUNIKASI PEMBANGUNAN <i>Neni Efrita</i>	376 -392
12.	MENGEMBANGKAN BRAND ASSOCIATION DALAM KAMPANYE KESEHATAN GenRe (Generasi Berencana) <i>Suharyanti</i>	393 - 408

KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN NEGERI PASCA KONFLIK DI KOTA AMBON

Andreas Pandiangan^{1*}; Y. Trihoni Nalesti Dewi²

¹ Program Studi Ilmu Komunikasi UNIKA Soegijapranata

² Program Studi Ilmu Hukum UNIKA Soegijapranata

*Email: pandiangan@unika.ac.id ; trihoni@unika.ac.id

ABSTRAK

Perda Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri mengatur bahwa Kepala Pemerintah Negeri berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat Negeri. Pengaturan demikian merupakan bagian pengakuan atas keunikan Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Fungsi komunikasi pembangunan Pemerintah Negeri tidak lepas dari kebutuhan proses pemulihan dan pembangunan kembali pasca konflik Ambon. Namun kenyataan, fungsi komunikasi pembangunan masih memenuhi kendala. Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran pelaksanaan komunikasi pembangunan serta solusi. Penelitian deskriptif analitis dilakukan terhadap 22 Pemerintah Negeri di Kota Ambon. Penelitian menghasilkan bahwa fungsi komunikasi pembangunan selain didukung kejelasan rumusan kegiatan, juga didukung keberadaan Marinyo sebagai perangkat Pemerintah Negeri dengan tugas khusus kehumasan. Perangkat sekaligus jabatan berdasarkan hak asal usul dan hukum adat selama ini yang berkembang di Kota Ambon. Pengembangan kapasitas Marinyo menjadi kebutuhan dasar agar tugas komunikasi pembangunan Pemerintah Negeri terwujud.

Kata kunci : Pemerintah Negeri, komunikasi pembangunan, Marinyo.

PENDAHULUAN

Kebebasan sebagai konsekwensi kehidupan berdemokrasi dan kemajuan teknologi informasi mendorong terbukanya dan tersedia secara luas akses informasi bagi masyarakat. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia-APJII perihal penetrasi pengguna internet di tahun 2017, mencatat bahwa terdapat 54.68 persen dari jumlah penduduk sebanyak 262 juta orang merupakan pengguna internet. Berarti terdapat sebanyak 143.26

juta orang yang menggunakan internet.¹ Suatu peningkatan jumlah besar dibandingkan dengan di tahun 2016. Terdapat sebanyak 51.8 persen (132.7 juta) dari 256.2 juta penduduk Indonesia sebagai pengguna internet.²

Internet membuka akses sedemikian luas bagi penggunanya. Dengan kemajuan internet saat ini, setiap orang bisa mengakses berbagai informasi tanpa harus bersusah payah mencari atau membelinya. Terobosan terbaru saat ini adalah memberikan kesempatan pada warga biasa untuk ikut menyebarkan berita yang didapatnya. Mereka dapat berpartisipasi untuk membuat berita, termasuk memberitakan berita yang mereka buat.³

Kebebasan akses demikian luas tentunya menimbulkan pertanyaan, apa saja layanan akses yang dimanfaatkan pengguna internet. Ternyata 89.35 persen, pengguna akses lebih ke *chatting*, sisanya kategori media sosial, jual-beli barang, bidang ekonomi, bidang layanan publik, bidang edukasi, dan lain-lain.⁴

Tentunya realita demikian menjadi tantangan komunikasi pembangunan khususnya di daerah pedesaan termasuk di Kota Ambon. Kota Ambon sebagai bagian dari daerah yang pernah mengalami konflik horizontal, saat ini dan di masa yang akan datang sedang melakukan pembangunan secara keseluruhan dari beragam aspek. Belum lagi rekonsiliasi di Ambon masih menyisakan beberapa persoalan, kerusuhan dan konflik yang masih sering terjadi meskipun dalam skala relatif kecil mengindikasikan bahwa proses rekonsiliasi dan dialog yang dibangun oleh pemerintah dan tokoh masyarakat, di kalangan akar rumput belum sepenuhnya selesai.⁵

Di tengah masa transisi pasca konflik menuju pembangunan daerah yang menyeluruh di Kota Ambon, peran komunikasi menjadi sangat penting dalam pembangunan dan perubahan sosial dan masyarakat. Namun yang terjadi, peran

¹Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia-APJII, 2017, *Infografis Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017-survei*, Teknopreneur, hal. 6.

²Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia-APJII, 2016, *Infografis Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2016-survei*, Polling Indonesia, hal. 6.

³Yosep Adi Prasetyo, Ledakan Media Siber di Indonesia dalam Jurnal Dewan Pers, 2017, *Bisnis Media dan Jurnalisme di Persimpangan*, edisi 15-November, (Jakarta: Dewan Pers), hal. 5.

⁴Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia-APJII, 2017, *Ibid*, hal. 28-34.

⁵Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, S.H.,M.Hum, Prof. Dr. Aholiab Watloly, S.Pak. M.Hum, Drs. Andreas Pandiangan, MSi, 2018, *Revitalisasi Lembaga Adat Saniri Seaktualisasi Otonomi Desa Dalam Rekonsiliasi Paska Konflik di Ambon*, Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi-PTUPT, Laporan Akhir Tahun Pertama, (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata), hal. 4.

komunikasi pembangunan tidak maksimal berlangsung karena masyarakat lebih mendapatkan terpaan dan suplai informasi dari pihak-pihak bukan pelaku komunikasi pembangunan sehingga usaha untuk konsolidasi guna persatuan masyarakat dan konsolidasi untuk membangun bersama tidaklah gampang.

Meskipun ada usaha komunikasi pembangunan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon selama ini, namun capai-capai komunikasi pembangunan seperti yang diharapkan belum terealisasikan.

Masalah masih muncul mulai dari pembangunan ekonomi yang terlampau mengejar pertumbuhan telah melupakan pembangunan sosial. Masyarakat mengalami keterasingan (alienasi) dan nilai-nilai moral mengalami penurunan. 'Budaya' kompetisi mengalahkan kerjasama dan toleransi antar sesama warga. Oleh karena itu pembangunan *social capital* menjadi sangat penting sebagai salah satu jalan keluar bagi warga Ambon dari krisis.⁶

Penelitian ini beranjak dari pemahaman bahwa ada masalah komunikasi pembangunan berbasis di Kota Ambon selama ini karena tidak berbasis kearifan lokal. Penelitian ini merupakan bagian kecil dari penelitian Trihoni Nalesti Dewi dkk, ingin mendalami komunikasi pembangunan berbasis kearifan lokal yakni pada Pemerintahan Negeri dengan segala dinamikanya. Termasuk menemukan solusi agar komunikasi pembangunan berbasis kearifan lokal bermanfaat bagi pembangunan Kota Ambon pasca konflik.

Pemerintahan Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Ambon merupakan bagian penyelenggara urusan pemerintahan dan urusan kepentingan masyarakat se tingkat desa/kelurahan. Sehingga penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di Kota Ambon saat ini, selain berbentuk Desa terdapat juga Kelurahan dan Pemerintahan Negeri.

Pemerintah Kota Ambon untuk pertama kalinya dibentuk melalui PP Nomor 15 Tahun 1955⁷ dan setelah 24 tahun dilakukan perubahan batas wilayah karena mengalami perluasan menjadi 3 kecamatan. Masing-masing Kecamatan terdiri dari Lingkungan dan

⁶Tri Ratnawati, 2006, *Maluku dalam Catatan Seorang Peneliti*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Pusat Peneliti Politik LIPI), hal. 53.

⁷Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 Tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, ditetapkan tanggal 31 Mei 1955. Wilayah yang ditetapkan sebagai Kota Ambon adalah daerah bekas "Landschap Kota Ambon tidak sejati yang rendah" tersebut dalam pasal 1 Peraturan Presiden Negara Indonesia Timur tanggal 23-8-1948 No. 3/Pr.V./48 (Lembaran Negara Indonesia Timur No. 30 tahun 1948).

Negeri-Negeri. 3 Kecamatan dimaksud yakni Kecamatan Nusaniwe⁸, Kecamatan Sirimau⁹ dan Kecamatan Teluk Ambon Baguala.¹⁰

Zulkarimen Nasution menyebutkan bahwa konsep komunikasi pembangunan dapat dilihat dalam arti yang luas dan terbatas. Dalam arti luas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal-balik) di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan.¹¹

Dalam konteks ini komunikasi pembangunan dimaksudkan untuk merealisasikan dan mewadahi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat termasuk di wilayah-wilayah Negeri tidak hanya sekadar penonton pembangunan di wilayahnya namun diberikan saluran untuk mengagregasikan dan mengartikulasikan kepentingan pribadi maupun kelompok-kelompok masyarakat yang khas dari sisi adat.

Sementara komunikasi pembangunan dalam arti sempit, merupakan segala upaya dan cara, serta Teknik penyampaian gagasan, dan ketrampilan-ketrampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat luas. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan-gagasan yang disampaikan tadi.¹²

Masyarakat selain diberikan wadah dan saluran, juga diberikan informasi yang cukup perihal pembangunan yang akan dilaksanakan termasuk merespon apakah kebutuhan masyarakat dapat dipastikan ada dalam tujuan pembangunan itu sendiri.

⁸Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon, ditetapkan tanggal 12 Juni 1979. Kecamatan Nusaniwe meliputi Lingkungan dan Negeri-negeri : 1. Lingkungan Sailale. 2. Lingkungan Urimessing. 3. Lingkungan Benteng. 4. Lingkungan Nusaniwe. 5. Negeri Urimessing. 6. Negeri Amahusu. 7. Negeri Eri-Nusaniwe. 8. Negeri Sailale. 9. Negeri Latubolat.

⁹*Ibid*, Kecamatan Sirimau meliputi Lingkungan dan Negeri-negeri: 1. Lingkungan Honipopu. 2. Lingkungan Ahusein. 3. Lingkuntan Uritetu. 4. Lingkungan Amantelu. 5. Negeri Soya, 6. Negeri Ema, 7. Negeri Hukurila. 8. Negeri Naku. 9. Negeri Kilang. 10. Negeri Hatalai. 11. Negeri Batumerah. 12. Negeri Galala. 13. Negeri Hative Kecil.

¹⁰*Ibid*, Kecamatan Teluk Ambon Baguala meliputi Negeri-Negeri: 1. Negeri Passo. 2. Negeri Halong. 3. Negeri Lehari. 4. Negeri Rutong. 5. Negeri Hutumuri. 6. Negeri Rumah Tiga. 7. Negeri Hative Besar. 8. Negeri Tawiri. 9. Negeri Laha.

¹¹Zulkarimen Nasution, 2012, *Komunikasi Pembangunan-Pengenalan Teori dan Penerapannya-edisi revisi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo), hal. 106.

¹²*Ibid*.

Dengan demikian komunikasi pembangunan tidak sekadar komunikasi akan informasi pembangunan satu arah, khususnya dari pelaku pembangunan dalam hal ini Pemerintah ke masyarakat melainkan menciptakan perubahan yang bermanfaat bagi Pemerintah dan masyarakat.

Karena peran komunikasi dalam perubahan masyarakat adalah sebagai penggugah, pengarah, dan pengendali perubahan agar perubahan tersebut tetap bermanfaat dan berlangsung secara teratur.¹³

Dalam konteks Maluku termasuk Kota Ambon, Alo Liliweri menyebutkan bahwa ada 4 ‘konten’ masalah komunikasi pembangunan di Maluku. Pertama, nampaknya terlalu banyak masalah di banyak tempat. Terlalu banyak masalah di semua pulau. Mudah ditebak bahwa informasi tentang pelbagai masalah termasuk masalah pembangunan simpang siur. “Kekacauan” informasi itu bisa karena sumber yang tidak jelas, dari media yang tidak jelas sangat mempengaruhi persepsi dan sikap warga negara. Kedua, masih berkaitan dengan masalah pertama, maka sangat berpengaruh pada sebaran informasi masalah pembangunan Maluku yang sangat simpang siur sehingga kita sulit mengetahui manakah informasi yang benar dan relevan. Ketiga, keberagaman masyarakat dalam sebaran kepulauan yang berbeda-beda telah menciptakan perbedaan persepsi dan sikap tentang apa yang mereka harus kerjakan. Keempat, transformasi structural terus terjadi ketika makin terbukanya isolasi fisik baik berupa hubungan antar pulau, hubungan antar warga dalam satu pulau, maupun didorong oleh perkembangan pemilikan alat-alat komunikasi seperti media baru yang sangat mendukung komunikasi antar warga.¹⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada 21 Pemerintahan Negeri di wilayah Kota Ambon kurun waktu April-Oktober 2018. Marinyo sebagai perangkat Pemerintah Negeri dengan tugas khusus kehumasan merupakan sampel penelitian ini. Di samping, Lembaga Saniri Negeri sebagai Lembaga legislatif di Pemerintahan Negeri-Negeri juga dijadikan sampel.

¹³Sumali Dilla, 2007, *Komunikasi Pembangunan-Pendekatan Terpadu*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media), hal. 37.

¹⁴Alo Liliweri, Komunikasi Ritual sebagai Basis Komunikasi Pembangunan Berwawasan Kepulauan dala Amelia Tahitu dkk (editor), 2016, *Eksistensi Masyarakat Kepulauan Mengkomunikasikan Kesejahteraan (Pendekatan Interdisiplin)*, Menyambut Dies Natalis ke-30 Universitas Kristen Indonesia Maluku, (Mimika Baru: Aseni), hal. 121-123.

Alasannya, salah satu tugas anggota Saniri Negeri yakni menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Negeri.

Penelitian kualitatif ini dengan tujuan mendapatkan gambaran pelaksanaan dan kendala komunikasi pembangunan serta solusi terhadap masalah yang timbul, merupakan penelitian deskriptif analitis.¹⁵ Kelembagaan, tugas dan fungsi komunikasi pembangunan merupakan variabel penelitian. Data sekunder mencakup regulasi seputar Desa, Pemerintahan Negeri, tugas dan fungsi serta realisasi komunikasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintahan Negeri. Sementara data primer mencakup relasi Pemerintahan Negeri dengan Pemerintah Kota Ambon, persoalan dan solusi penyelesaian hambatan komunikasi pembangunan.

Guna melengkapi data sekunder dan mendapatkan data primer, maka dilakukan wawancara dengan jajaran Pemerintahan Negeri. Termasuk wawancara dilakukan guna konfirmasi akan kebenaran dan pendalaman data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seiring dengan rejim pengaturan dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan UU Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, maka status Lingkungan di lingkungan Pemerintah Kota Ambon mengalami perubahan.

Hingga saat ini, perubahan status Lingkungan yakni sebagian besar menjadi Kelurahan dan 8 Lingkungan berubah status menjadi Desa di 5 kecamatan (Periksa Tabel 1). Perubahan status Lingkungan tersebut bersanding dengan tetapnya keberadaan Negeri-Negeri. Maka menjadikan Pemerintah Kota Ambon sebagai pemerintah kota yang unik. Karena secara bersamaan memiliki Kelurahan, Desa dan Negeri-Negeri. Hal yang tidak didapatkan di daerah otonom lainnya (Kabupaten/Kota) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan Negeri-Negeri merupakan bentuk prakarsa masyarakat berdasarkan asal usul dan atau hak tradisional dalam hal mengurus urusan pemerintahan dan kepentingannya. Meskipun diakui bahwa selama pemberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1975

¹⁵Emy Susanti Hendrarso, Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar dalam Bagong Suyanto-Sutinah (editor), 2015, *Metode Penelitian Sosial-Berbagai alternative Pendekatan*, (Jakarta: Prenadamedia Group), hal. 165-1170.

Tentang Pemerintahan Desa hingga terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Negeri-Negeri relatif terabaikan dan nyaris lumpuh menghadapi kuatnya sentralisasi Pemerintah Pusat dalam mengelola tata pemerintahan di tingkat desa.

Terjadi penghancuran mekanisme tradisional. Mulai dari sistem tradisional mengalami degradasi fungsional. ‘Modernisasi’ yang melanda Indonesia (termasuk di bidang komunikasi dan budaya) menjadi salah satu penyebab bergesernya orientasi nilai budaya pela gandong¹⁶ dan hiboalamo (semacam rumah adat di Maluku Utara yang digunakan untuk membicarakan dan mencari solusi dari persoalan yang muncuk di masyarakat), dari yang bersifat kultural-religius, melemah menjadi sesuatu yang bersifat simbolik saja. Hal ini terjadi terutama di kalangan muda.¹⁷

Tabel 1 Kelurahan, Desa dan Negeri-Negeri Di Wilayah Pemerintah Kota Ambon

Kecamatan Nusaniwe		Kecamatan Sirimau		Kecamatan Leitimur Selatan		Kecamatan Baguala		Kecamatan Teluk Ambon		
A. Kelurahan										
No.	Nama	Luas (Km2)	Nama	Luas	Nama	Luas	Nama	Luas	Nama	Luas
1	Silale	0.18	Waihoka	0.75			Lateri	2.01	Tihu	0.33
2	Urimessing	0.27	Amantelu	1.15						
3	Benteng	0.87	Rijali	0.28						
4	Wainitu	0.30	Karang Panjang	0.43						
5	Kudamati	0.67	Batu Meja	0.85						
6	Waihaong	0.15	Batu Gajah	0.45						
7	Mangga Dua	8.00	Ahusen	0.24						
8	Nusaniwe	0.16	Honipopu	0.34						
9			Uritetu	0.35						
10			Pandan Kasturi	4.00						
B. Desa										
1			Galala	0.12			Waiheru	6.00	Wayawe	7.50
2							Nania	0.12	Poka	2.78
3							Negeri Lama	4.50	Hunuth/ Durian Patah	2.00
4							Latta	0.10		

¹⁶ Pela Gandong/pela tumpa darah, hubungan pela yang terlahir karena masyarakat ke dua negri atau lebih merasa berasal dari satu keturunan (seibu-sebapak-atau sebagai kakak beradik dari satu Rahim ibu). Misal, Negeri Asilulu (pulau Ambon) dengan Negeri Paperu dan Tiuw (pulau Saparua), Negeri Hative Kecil dan Hitu Lama (pulau Ambon), dan lain-lain. Alex Robert Tutuhatunewa, SH, 2000, *Budaya Pela di Maluku: Studi Komunikasi Antar Budaya Terhadap Model Komunikasi Antar Negeri Pela dan Implikasinya Bagi Pengelolaan Konflik di Maluku*, Tesis UI, (Jakarta: Pascasarjana Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Komunikasi), hal. 89.

¹⁷Tri Ratnawati, *op. cit*, hal. 55.

A.		Negeri								
1	Amahusu	8.00	Hative Kecil	1.53	Hatalai	5.00	Passo	11.38	Laha	17.00
2	Nusaniwe	16.00	Batu Merah	16.67	Naku	5.00	Halong	16.00	Tawiri	5.68
3	Urimessing	46.16	Soya	59.65	Kilang	5.00			Hative Besar	30.00
4	Latuhalat	13.00			Ema	3.00			Rumah Tiga	28.39
5	Silale	2.41			Hukumuri	7.50				
6					Rutong	15.00				
7					Leahari	5.00				
8					Hukurila	3.00				
Jumlah		88.35		86.81		50.5		40.11		93.68

Sumber: <https://www.ambon.go.id/kecamatan/> (akses 2 April 2019), Dinas Komunikasi Informatika & Persandian Kota Ambon, 2018, *Statistik Sektoral Kota Ambon Tahun 2018*, (Ambon: Dinas Komunikasi Informatika & Persandian Kota Ambon), hal. Vi-vii.

Faktor lain yang memperlemah adat di Maluku adalah birokratisasi pemerintahan desa melalui UU No. 5/1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa. Melalui UU ini terjadi 'Jawanisasi pemerintahan desa'. Sistem pemerintahan adat di desa-desa di Maluku, dan peran elit tradisional lokal (raja-raja dan Saniri Negeri di Negeri-Negeri di Ambon/Maluku Tengah), digantikan oleh Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa. Penyeragaman pemerintahan desa, Golkarisasi, *floating mass*, dan militerisasi desa (lewat intervensi Babinsa, Kapolsek dan Danramil), menyebabkan terkooptasinya sebagian besar elit lokal ke dalam negara.¹⁸

Pasca konflik Ambon dan sekitarnya, timbul kesadaran akan pentingnya keberadaan wadah dan mekanisme partisipasi masyarakat berbasis lokal yakni Negeri-Negeri dalam membangun masyarakat Maluku khususnya Kota Ambon ke arah lebih baik. Kondisi demikian mendorong Pemerintah Provinsi Maluku menginisiatif untuk mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku.

Warna prakarsa masyarakat demikian dikelola dalam kerangka UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan mengakui keberadaan Negeri-Negeri melalui pengaturan tentang Desa. Disebutkan bahwa Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.¹⁹

¹⁸*Ibid*, hal. 55-56.

¹⁹UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 6. Penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat UUD 1945 perihal pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat

Dengan demikian, Negeri yang disetarakan dengan Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁰

Negeri-Negeri sebagai kesatuan masyarakat adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional.²¹ Negeri-Negeri merupakan kesatuan masyarakat yang memenuhi satu dan beberapa unsur seperti: memiliki perasaan bersama dalam kelompok, pranata pemerintahan adat, harta kekayaan dan/atau benda adat dan/atau dan perangkat norma hukum adat. Pranta pemerintahan adat dan harta kekayaan adat dan atau benda adat meliputi: nama teon negeri, baileo, batu pamali, mata rumah asal/asli, soa, upacara adat negeri.²²

Dari sisi antropologis dan sosiologis, Negeri dilihat sebagai suatu kosmos yang merupakan totalitas dari tanah, langit dan isinya. Karena itu ia (negeri atau pedesaan) harus dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Hal inilah yang membuat solidaritas berdasarkan negeri sangat tinggi. Ancaman bagi negeri merupakan ancaman bagi semua warga.²³

Pada dasarnya, negeri-negeri dibentuk berdasarkan segregasi agama, yaitu Islam atau Kristen. Negeri Islam oleh orang Ambon disebut negeri salam, sedangkan negeri Kristen disebut negeri sarani. Terdapat juga negeri yang penduduknya mempunyai hubungan kerabat yang kuat, karena berasal dari nenek moyang yang sama; tetapi, karena

mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan. Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

²⁰Perda Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri Pasal 1 (12). Jauh sebelum UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disahkan, Pemerintah Kota Ambon melalui Perda Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Negeri di Kota Ambon telah mengatur keberadaan Negeri-Negeri. Perda Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 merupakan pengganti Perda Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008.

²¹Perda Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri Pasal 3 (1) ayat a.

²²*Ibid*, Pasal 3 (1) dan (3).

²³H. Luhukay dkk, 1997, *Sejarah Asal-Usul dan Terbentuknya Negeri-Negeri di Pulau Ambon*, (Ambon: Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku), hal. 2.

agama berbeda lalu memisahkan diri dan membentuk negeri sendiri-sendiri, seperti Sirisori Salam dan Sirisori Sarani.²⁴

Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁵ Pemerintahan Negeri terdiri dari Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri.²⁶ Pemerintah Negeri terdiri dari Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri. Pemerintah Negeri berperan sebagai lembaga eksekutif sementara Saniri Negeri merupakan badan legislatif Negeri.

Saniri Negeri sebagai badan legislatif Negeri, berfungsi bersama-sama kepala Pemerintah Negeri membahas dan menyepakati Peraturan Negeri, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan negeri oleh Pemerintah Negeri.²⁷

Sama seperti kondisi Negeri-Negeri lainnya, saat berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pemerintahan Desa, nasibnya Lembaga Saniri Negeri/Saniri Negeri Lengkap, mengalami nasib sama. Ronald Alfredo menjelaskan bahwa seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ini peran dari lembaga ini digantikan oleh Lembaga Musyawarah Desa (LMD), yang meskipun mendapatkan legitimasi secara umum namun tidak oleh masyarakat desa adat sepenuhnya, karena komposisi dari keanggotaan LMD itu yang sudah tidak lagi seperti sedia kala dimana pada waktu sebelumnya saniri beranggota kepala-kepala Soa yang merupakan pemimpin dari tiap-tiap marga yang ada sehingga mereka merasa terwakilkan.²⁸

Lembaga Saniri Negeri terdiri dari 5 hingga 9 sembilan orang dipilih dan ditetapkan Soa dengan memperhatikan keterwakilan wilayah, perempuan, penduduk, susunan atau

²⁴Jacob W. Ajawaila, Orang Ambon dan Perubahan Kebudayaan dalam Jurnal *Antropologi Indonesia*, 61, 2000 (Jakarta: Universitas Indonesia), hal 18. (akses 1 Oktober 2018).

²⁵Perda Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017, *Op. Cit*, Pasal 1 (15).

²⁶*Ibid*, Pasal 25. Sebelumnya Perda Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 mengatur bahwa Pemerintahan Negeri terdiri dari Saniri Rajapatti dan Saniri Negeri Lengkap. Saniti Rajapatti terdiri dari Raja, Para Kepala Soa dan Perangkat Negeri. Sementara Saniri Negeri Lengkap terdiri dari Raja sebagai Ketua dengan anggota-anggota mencakup Wakil dari Soa, Kepala Adat, Tua-Tua Negeri, Kepala Tulang dan Kewang. Periksa Perda Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 Pasal 11.

²⁷*Ibid*, Pasal 1 ayat (20).

²⁸Ronald Alfredo, 2011, *Lembaga Adat "Saniri" Sebagai Forum Komunikasi Dalam Penyelesaian Masalah Publik Di Ambon*, Jurnal Komunikasi KAREBA, No. 3 Vol. 1 Juli-September 2011, (Makassar: Universitas Hasanuddin), hal. 336. (akses 1 Oktober 2018).

pranata adat istiadat, hukum adat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang hidup dan kemampuan Keuangan Negeri.²⁹

Sebagai Lembaga, Saniri Negeri berhak atas 3 tugas yakni:³⁰

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Negeri kepada Pemerintah Negeri,
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, pelaksanaan pembangunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri, dan pemberdayaan masyarakat Negeri, dan
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBNegeri.

Anggota Saniri Negeri dengan masa jabatan 6 tahun paling banyak 3 kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut memiliki kewajiban atas:³¹

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri,
3. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Negeri,
4. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan,
5. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Negeri, dan
6. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga kemasyarakatan Negeri.

Kepala Pemerintah Negeri dikenal sebagai Raja Negeri merupakan hak parentah dari mata rumah parentah di Negeri yang bersangkutan. Dalam hal di Negeri hanya terdapat 1 mata rumah parentah, jabatan Kepala Pemerintah Negeri ditetapkan melalui

²⁹Perda Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017, *Op. Cit.* Pasal 58 (1).

³⁰*Ibid*, Pasal 61.

³¹*Ibid*, Pasal 63.

pengangkatan. Dalam hal di Negeri terdapat 2 atau lebih mata rumah parentah maka jabatan Kepala Pemerintah Negeri ditetapkan secara bergantian. Apabila musyawarah penetapan secara bergantian tidak tercapai maka jabatan Kepala Pemerintah Negeri ditetapkan melalui pemilihan.³²

Sama seperti anggota Saniri Negeri, masa jabatan Kepala Pemerintah Negeri selama 6 tahun. Paling banyak 3 kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Terdapat 17 Kewajiban Kepala Pemerintah Negeri³³ yakni:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika,
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Negeri,
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Negeri,
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan,
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender,
6. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Negeri yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme,
7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Negeri,
8. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Negeri yang baik,
9. Mengelola keuangan dan asset Negeri,
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Negeri,
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Negeri,
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat di Negeri,
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Negeri,
14. Memberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan di Negeri,
15. Mengembangkan potensi sumber daya lama dan melestarikan lingkungan hidup,

³²Perda Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri Pasal 3.

³³Perda Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017, *Op. Cit*, Pasal 33. Kewajiban Pemerintah Negeri sama dengan kewajiban Kepala Desa kecuali pada angka 17 yakni Menetap di Negeri. Periksa UU Desa Pasal 33.

16. Memberikan informasi kepada masyarakat Negeri, dan
17. Menetap di Negeri.

Sejak Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku berlaku maka Pemerintahan Negeri dihidupkan kembali. Legalisasi Lembaga Pemerintah Negeri dan Lembaga Saniri Negeri diawali pembentukan Lembaga masing-masing.

Beragam faktor internal dan eksternal di masyarakat dan di Pemerintah Kota Ambon, mengakibatkan pembentukan ke 2 lembaga sebagai bagian Pemerintahan Negeri-Negeri tidaklah selalu lancar.

Bila dihitung sejak tahun 2005, dengan masa jabatan 6 tahun, seharusnya saat ini di tiap Pemerintahan Negeri telah ada 3 periode Raja Negeri. Namun kondisi dan dinamika sosial politik kemasyarakatan di Negeri, maka di tahun 2018 hanya ada 9 Negeri yang memiliki Raja Negeri. Lainnya, untuk sementara, sekitar 1 tahun, dipimpin Penjabat Raja Negeri. (Periksa Tabel 2).

Salah satunya tugas Penjabat Raja Negeri yakni mempersiapkan pemilihan dan pengangkatan Raja Negeri sebagaimana telah diatur dalam Perda Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri.

Tabel 2. Raja Negeri dan Pejabat Raja Negeri Di Wilayah Pemerintah Kota Ambon (2018)

No.	Negeri	Pimpinan Pemerintah Negeri		Keterangan
		Jabatan	Nama	
1	Amahusu	Pejabat Raja Negeri	Hanock Tomasila	PNS Pemkot Ambon
2	Nusaniwe	Penjabat Raja Negeri	Dominggos Wattilete	PNS Pemkot Ambon
3	Urimessing	Penjabat Raja Negeri	Alfian Lewenussa	PNS Pemkot Ambon
4	Latuhalat	?	?	?
5	Seilale	Penjabat Raja Negeri	Nova Kalasina Erubun, AP, MH	PNS Pemkot Ambon
6	Hative Kecil	Raja Negeri	Ir. Josias J. Murialy	Masa bakti 2015-2019
7	Batu Merah	Penjabat Raja Negeri	Abdulrahman Walla	PNS Pemkot Ambon

8	Soya	Raja Negeri	John Lodewyk Rehatta	Masa bakti 2011-2017, 2017-2023.
9	Hatalai	Raja Negeri	Suzana M. Loppies	PNS Pemkot Ambon
10	Naku	Penjabat Raja Negeri	Corrinus Ririhena	
11	Kilang	Penjabat Raja Negeri	Julia J. Resmol, S. Sos	PNS Pemkot Ambon
12	Ema	Penjabat Raja Negeri	Ivan Erick Pattinama, S. STP	PNS Pemkot Ambon
13	Hukumuri	Penjabat Raja Negeri	Williem Waas	PNS Pemkot Ambon
14	Rutong	Penjabat Raja Negeri	Paulus Anakotta	PNS Pemkot Ambon
15	Leahari	Penjabat Raja Negeri	Dominggas R. Wass, S. Sos	PNS Pemkot Ambon
16	Hukurila	Raja Negeri	John Josepus Marthen	Masa Bakti 2014-2020
17	Passo	Penjabat Raja Negeri	Semuel Akyuwen	PNS Pemkot Ambon
18	Halong	Raja Negeri	Stela G. Tupenelay	Masa bakti 2011-2017
19	Laha	Raja Negeri	H. Said Latutua, SE	
20	Tawiri	Raja Negeri	Jacob Nicolas Tuhuleruw	Masa bakti 2013-2019
21	Hative Besar	Raja Negeri	Johanes Helaha	
22	Rumah Tiga	Raja Negeri	Ir. Novita Silvana da Costa Watimena	

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Perangkat Negeri sebagai unsur pembantu Kepala Pemerintah Negeri terdiri atas: Sekretaris Negeri, Bendahara, Kepala Soa, Marinyo, Kewang, Mauweng dan unsur jabatan adat lainnya berdasarkan hak asal usul dan hukum adat.³⁴

Dalam struktur Pemerintahan Negeri terdapat 2 unsur yang melaksanakan fungsi komunikasi pembangunan yakni Saniri Negeri di sisi legislatif dan Marinyo di sisi eksekutif. Sebagai anggota Saniri Negeri, salah satu kewajibannya adalah menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Negeri.

Salah bentuk komunikasi pembangunan yang dilakukan saat penyusunan Keputusan Saniri Negeri. Seperti yang dilakukan Saniri Negeri (Lengkap) Passo saat melakukan penetapan Mata Rumah Parenta dan Soa Parenta di Negeri Passo. Sebelum diputuskan dalam bentuk suatu keputusan Saniri Negeri, Saniri Negeri, Soa yang ada di

³⁴Perda Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri Pasal 43.

seluruh Negeri Passo diundang untuk bermusyawarah. Disamping Penjabat Raja Negeri dan unsur masyarakat lainnya.

Setelah melakukan dialog dan penelitian atas informasi berdasarkan sejarah asal usul keberadaan Negeri Passo maka melalui Keputusan Saniri Negeri Lengkap ditetapkan Mata Rumah Simau (keturunan Paulus Simauw) dan Mata Rumah Sarimanella (keturuna Alberth Sarimanella) sebagai Mata Rumah Parenta di Negeri Passo.³⁵ Termasuk menetapkan Soa Koli dan Soa Moni sebagai Soa Parenta di Negeri Passo.³⁶

Marinyo adalah pesuruh, petugas atau pembantu raja. Marinyo bertugas sebagai penyampai berita dan titah melalui *tabaos* (pembacaan maklumat) di seluruh negeri kepada warga masyarakat. Linda Fitria menyebutkan bahwa Marinyo merupakan Humas adat. Dulu, seorang Marinyo adalah mereka yang bertugas memberi pengumuman (*tabang*) lewat gong yang ditabuh sebanyak tiga kali sebelum menyampaikan informasi. Berbeda dengan keadaan hari ini yang dimana pengumuman dilakukan melalui pengeras suara. Selain menjadi *tabang*, seorang Marinyo juga bertugas mengantarkan surat dan turut serta menyelesaikan gesekan yang terjadi di masyarakat. Sama seperti *Kewang*, posisi Marinyo tidak diisi oleh marga tertentu. Sebagai imbalan kerja, dulu Marinyo kerap kali diberi lahan tak bertuan milik negeri oleh raja, sebelum akhirnya diberi upah berupa rupiah dari dana desa seperti saat ini.³⁷

Marinyo juga bertugas pada kegiatan yang sifatnya sosialisasi atas keputusan Pemerintah Negeri seperti Alokasi Anggaran Desa/Negeri. Informasi disediakan dalam bentuk pengumuman di baliho dipajang di depan Kantor Pemerintah Negeri, seperti yang dilakukan di Negeri Batu Merah. (Gambar 1).

³⁵Keputusan Saniri Negeri Lengkap Negeri Passo Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Mata Rumah Parenta di Negeri Passo, tanggal 30 Mei 2015.

³⁶Keputusan Saniri Negeri Lengkap Negeri Passo Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penetapan Soa Parenta di Negeri Passo, tanggal 2 Juni 2015.

³⁷Linda Fitria, *Negeri Tiouw dan Singgasana Yang Kosong*, makalah, Antropologi Budaya UGM, hal. 4-5 (akses 1 Oktober 2018).

Gambar 1. Alokasi ADD Negeri Batu Merah Tahun Anggaran 2018

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	2,644,971,842.89
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	45,000,000.00
JUMLAH BELANJA	478,701,284.50
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	321,000,000.00
Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat	3,750,000.00
Tunjangan Kepala Desa & Perangkat	142,300,000.00
Tunjangan Saniri & Anggotanya	69,600,000.00
Kegiatan Operasional Kantor Negeri	400,153,786.90
Kegiatan Operasional BPD/Saniri Negeri	12,000,000.00
Kegiatan Operasional RT/RW	446,400,000.00
Kegiatan Operasional PKK	5,619,900.00
Kegiatan Operasional Kamtibmas	9,000,000.00
Insentif (Operator Siskudes, Guru PAUD & Cleaning Service)	19,800,000.00
Pendataan dan Penyusunan Profil Desa	55,224,194.71
Penyusunan RPJM	16,375,925.25
Penyusunan RKP	15,153,600.25
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	549,666,613.45
Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih	144,897,747.51
Kegiatan Pembangunan Talud	258,141,445.95
Kegiatan Pembangunan Jembatan	122,317,204.21
Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Lingkungan Desa	96,715,055.00
Kegiatan Pembangunan Gorong - gorong	74,479,316.77
Kegiatan rehabilitasi Gedung/Lapangan Olahraga	876,465,855.34
Kegiatan Pembangunan Saluran Air	224,336,601.16
Kegiatan Normalisasi Sungai	297,952,003.50
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	10,000,000.00
Kegiatan Pembinaan Karang Taruna	10,000,000.00

Sumber: dokumentasi pribadi, 28 Juli 2018

Informasi tidak hanya terbatas pada cara-cara konvensional dan statis namun diusahakan melalui teknologi informasi yang telah tersedia. Minimal terdapat 4 Negeri yang memiliki situs dan blogspot (Tabel 3). Informasi yang tersedia masih statis sifatnya dan tidak selalu diperbarui. Meskipun ada juga informasi kegiatan seperti Jumat Bersih yang dilakukan di Negeri Hatalai (Gambar 2).

Tabel 3. Situs/Blogspot Pemerintah Negeri Di Wilayah Pemerintah Kota Ambon (2018)

No.	Negeri	Alamat Situs/Blogspot	Materi
1	Soya-Kecamatan Sirimau	http://soya.desa.id (akses 1 Oktober 2018).	Profil Desa, Kabar Desa, Produk, Potensi, Kependudukan, Anggaran Desa, Kegiatan
2	Negeri Hatalai-Kecamatan Leitimur Selatan	https://negerihatalai.blogspot.com/ (akses 1 Oktober 2018).	Profil, Potret Negeri
3	Negeri Passo-Kecamatan Baguala	http://blog-negeripasso.blogspot.com (akses 1 Oktober 2018).	Daftar Nama RT/RW, Marga-Marga Dalam Soa, Saniri Negeri.
4	Negeri Laha-Kecamatan Teluk Ambon	https://negerilaha.wordpress.com/ (akses 1 Oktober 2018).	Profil, Data/Register Dati, Profil Raja, Seputar Negeri.

Gambar 2. Pengumuman Jumat Bersih Pemerintah Negeri Hatalai 2012

Kamis, 19 April 2012

JUMAT BERSIH

PENGUMUMAN

BAGI SEMUA WARGA KOTA AMBON, KHUSUSNYA WARGA NEGERI HATALAI, SESUAI DENGAN PROGRAM PEMERINTAH KOTA AMBON UNTUK AMBON BERSIH, MAKA DI BERITAHUKAN KEPADA SEMUA WARGA KOTA KHUSUSNYA WARGA NEGERI HATALAI UNTUK PENCANANGAN JUMAT BERSIH PADA BESOK PAGI, JUMAT TANGGAL 20 APRIL 2012.

DIHARAPKAN UNTUK SEMUA WARGA NEGERI HATALAI UNTUK BERPARTISIPASI DALAM MENYUKSESKAN PROGAM PEMERINTAH KOTA AMBON DALAM KERJA BAKTI YANG AKAN DILAKSANAKAN PADA :

HARI JUMAT, 20 APRIL 2012

JAM 08.00 WIT

TEMPAT, SEMUA WILAYAH NEGERI HATALAI

DEMIKIAN PEMBERITAHUAN KAMI, ATAS PERHATIAN DAN PARTISIPASI YANG BAIK DARI SEMUA WARGA MASYARAKAT NEGERI HATALAI, KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH.

TTD

SUZANA M. LOPPIES

RAJA NEGERI HATALAI

<https://negerihatalai.blogspot.com/> (akses 1 Oktober 2018).

Namun fungsi Marinyo masih sangat terbatas. Sehingga banyak informasi pembangunan yang atas inisiatif Pemerintahan Negeri tidak tersampaikan ke masyarakat Negeri. Termasuk informasi pembangunan atas inisiatif Pemerintah Kota Ambon, Pemerintah Provinsi Maluku hingga Pemerintah Pusat.

Keterbatasan fungsi komunikasi pembangunan di lingkup Pemerintahan Negeri tentunya tidak hanya disebabkan faktor internal Pemerintahan Negeri tetapi juga faktor eksternal Pemerintah Negeri.

Kendala dari faktor internal diakui Pemerintah Kota Ambon. Dalam Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 di bagian Capaian Kinerja Pemerintahan disebutkan bahwa “Kurangnya perhatian dari aparatur ditingkat Negeri/Desa/Kelurahan terhadap penyelesaian masalah pemerintahan, menimbulkan persoalan lain yaitu berlarut-larutnya penyelesaian yang memakan waktu panjang, disamping faktor lain seperti kondisi geografis wilayah, tingkat pemahaman terhadap ketentuan, dan minimnya partisipasi. Dalam rangka mewujudkan aparatur yang profesional, masih diperhadapkan pada terbatasnya pengetahuan, wawasan, dan kemampuan apatur. Selain itu masih ditemukan

keterbatasan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang optimalisasi kinerja aparatur dan lembaga.³⁸

Kendala eksternal terutama datang dari Pemerintah Kota Ambon. Letak persoalannya, Pemerintah Kota Ambon belum menempatkan Marinyo yang ada di tiap-tiap Negeri sebagai bagian integral dari tugas Pemerintah Kota Ambon dalam tata kelola layanan informasi publik sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Serta penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang telah diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2017.

Tujuan penyelenggaraan komunikasi dan informatika antara lain yakni:³⁹

1. Meningkatkan pelayanan public,
2. Menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan keputusan public dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informatika,
3. Menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap kebijakan Pemerintah Daerah dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi.

Solusi untuk kendala karena faktor internal adalah penguatan kapasitas birokrasi dan tata kelola. Penguatan kapasitas birokrasi lebih menunjuk kepada kapasitas Marinyo dalam rangka mengembang tugas dan kewajiban dalam rangka komunikasi pembangunan di lingkungan Pemerintah Negeri termasuk terkait dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang menjadi cakupan tugas Pemerintah Kota Ambon.

Menyelenggarakan bimbingan teknis akan pemahaman fungsi Pemerintahan Negeri, regulasi informasi public hingga ketrampilan teknis bagi seorang Marinyo menjadi kebutuhan mendesak.

Sementara solusi karena kendala faktor eksternal yakni memadukan pengaturan Perda Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dengan tugas dan fungsi Pemerintahan Negeri khusus Marinyo. Hal yang

³⁸Peraturan Walikota Ambon Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Ambon Tahun 2016 bagian Evaluasi Pelaksanaan RKPD 2015, dan Capaian Kinerja Pemerintahan, hal. 38.

³⁹Perda Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Pasal 1 (39).

bukan sesuatu baru karena Pemerintah Kota Ambon melalui Surat Keputusan Walikota Nomor 144 Tahun 2016⁴⁰ memosisikan dan mensinergikan antara fungsi Kewang, salah satu unsur perangkat Pemerintah Negeri sama seperti Marinyo, dengan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Ambon dalam bidang lingkungan hidup.

Sangat diperlukan Peraturan Walikota Kota Ambon perihal mensinergikan antara fungsi Marinyo dengan tugas dan fungsi Pemerintahan Kota Ambon dalam bidang layanan informasi publik serta peningkatan peran partisipasi masyarakat, khusus masyarakat Negeri, di bidang pembangunan.

KESIMPULAN

Fungsi komunikasi pembangunan yang telah ada di 22 Pemerintahan Negeri-Negeri di Kota Ambon dilakukan Saniri Negeri dan Marinyo sebagai sebagai perangka Pemerintah Negeri. Namun fungsi tersebut masih memenuhi kendala dari faktor internal dan eksternal.

Diperlukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah internal yakni dengan menyelenggarakan program peningkatan kapasitas dan tata kelola Marinyo. Sementara diperlukan usaha Pemerintah Kota Ambon guna sinergisitas tugas penyelenggaraan komunikasi dan informasi di tingkat Kota dengan Pemerintah Negeri seperti yang telah dilakukan kepada tugas fan fungsi Kewang.

Untuk itu diperlukan penelitian dan usulan regulasi berbentuk Rancangan Peraturan Walikota Kota Ambon perihal mensinergikan antara fungsi Marinyo dengan tugas dan fungsi Pemerintahan Kota Ambon dalam bidang layanan informasi publik serta peningkatan peran partisipasi masyarakat, khusus masyarakat Negeri, di bidang pembangunan.

⁴⁰Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 144 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Kewang Lingkungan Hidup Kota Ambon, tanggal 3 Maret 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Tahitu dkk (editor), 2016, *Eksistensi Masyarakat Kepulauan Mengkomunikasikan Kesejahteraan (Pendekatan Interdisiplin), Menyambut Dies Natalis ke-30 Universitas Kristen Indonesia Maluku*, Mimika Baru: Aseni
- Bagong Suyanto-Sutinah (editor), 2015, *Metode Penelitian Sosial-Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Dinas Komunikasi Informatika & Persandian Kota Ambon, 2018, *Statistik Sektoral Kota Ambon Tahun 2018*, Ambon: Dinas Komunikasi Informatika & Persandian Kota Ambon
- Luhukay dkk, 1997, *Sejarah Asal-Usul dan Terbentuknya Negeri-Negeri di Pulau Ambon*, Ambon: Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku
- Sumali Dilla, 2007, *Komunikasi Pembangunan-Pendekatan Terpadu*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Tri Ratnawati, 2006, *Maluku dalam Catatan Seorang Peneliti*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Pusat Peneliti Politik LIPI
- Jurnal Dewan Pers, 2017, *Bisnis Media dan Jurnalisme di Persimpangan*, edisi 15-November, Jakarta: Dewan Pers
- Jurnal Komunikasi, 2011, *KAREBA*, No. 3 Vol. 1 Juli-September 2011, Makassar: Universitas Hasanuddin, (akses 4 April 2019).
- Jurnal *Antropologi Indonesia*, 61, 2000, Jakarta: Universitas Indonesia, (akses 4 April 2019).
- Alex Robert Tutuhaturunewa, SH, 2000, *Budaya Pela di Maluku: Studi Komunikasi Antar Budaya Terhadap Model Komunikasi Antar Negeri Pela dan Implikasinya Bagi Pengelolaan Konflik di Maluku*, Tesis UI, Jakarta: Pascasarjana Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Komunikasi
- Linda Fitria, *Negeri Tiouw dan Singgasana Yang Kosong*, makalah, Antropologi Budaya UGM, (akses 1 Oktober 2018).
- UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 Tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku.

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika,

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Negeri di Kota Ambon

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri

Peraturan Walikota Ambon Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Ambon Tahun 2016

Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 144 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Kewang Lingkungan Hidup Kota Ambon

Keputusan Saniri Negeri Lengkap Negeri Passo Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Mata Rumah Parenta di Negeri Passo, tanggal 30 Mei 2015

Keputusan Saniri Negeri Lengkap Negeri Passo Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penetapan Soa Parenta di Negeri Passo, tanggal 2 Juni 2015

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia-APJII, 2017, *Infografis Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017-survei*, Teknopreneur

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia-APJII, 2016, *Infografis Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2016-survei*, Polling Indonesia

<https://www.ambon.go.id/kecamatan/> (akses 1 Oktober 2018).

<http://soya.desa.id> (akses 1 Oktober 2018).

<https://negerihatalai.blogspot.com/> (akses 1 Oktober 2018).

<http://blog-negeripasso.blogspot.com> (akses 1 Oktober 2018).

<https://negerilaha.wordpress.com/> (akses 1 Oktober 2018).

PERAN MEDIA MASSA DALAM PEMBANGUNAN PETERNAKAN AYAM RAS PEDAGING DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Basril Basyar^{1*}

¹ Fakultas Peternakan Universitas Andalas

*Email: basrilbasyar@yahoo.co.id

ABSTRAK

Peternakan ayam ras pedaging merupakan salah satu komoditi yang dapat membantu pemenuhan kebutuhan pangan hewani. Untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan peternakan ayam ras pedaging, dibutuhkan instrumen komunikasi massa yang dapat menyuarakan kebijakan pemerintah, inovasi, teknologi, informasi pasar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis media massa, menjelaskan kontribusi dan masalah media massa yang digunakan peternak ayam ras pedaging. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Jumlah responden sebanyak 25 orang peternak ayam ras pedaging yang ditetapkan melalui teknik purposif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner dan observasi non partisipant. Data penelitian dianalisis melalui teknik deskriptif kuantitatif dengan bantuan teknik pengskalaan yaitu skala likert. Umumnya peternak ayam ras pedaging menggunakan media massa berupa media cetak dan media elektronik untuk mendapatkan perkembangan informasi dan inovasi. Kontribusi dari media massa yang digunakan peternak berupa sumber informasi teknologi, harga jual dan beli ternak, harga pakan, pasar, kebijakan pemerintah, dan sumber permodalan. Keterbatasan jumlah media massa, isi informasi dalam media massa masih bersifat umum atau kurang lengkap dan jelas terkait usaha peternakan yang saya jalani, dan penggunaan istilah ilmiah yang terlalu banyak dalam media massa cetak menjadi permasalahan peternak dalam memanfaatkan media massa.

Kata kunci: media cetak, media elektronik, inovasi, informasi, permodalan.

PENDAHULUAN

Pembangunan peternakan merupakan bagian dari pembangunan pertanian untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan masyarakat (Yuwono *et al*, 2011). Keberhasilan pembangunan di sektor pertanian/peternakan pada suatu Negara, dapat tercermin dari kemampuan Negara dalam mewujudkan swasembada pangan (Tambunan, 2010) termasuk juga pangan hewani. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip berkesinambungan terutama dalam menciptakan peternak yang hadal dalam menghasilkan keberlanjutan produktivitas usaha peternakannya.

Salah satu komoditas peternakan yang cukup populer oleh masyarakat Indonesia umumnya, termasuk juga di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu ternak ayam ras pedaging. Merujuk pada data statistik, populasi ternak ayam ras pedaging di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 1.891.435.000 ekor dan di Sumatera Barat sebanyak 26.221.529 ekor (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2018), sedangkan di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat populasinya sebanyak 14.947.100 ekor (BPS Lima Puluh Kota, 2018). Jumlah ini membuktikan bahwasannya ternak ayam ras pedaging telah berkontribusi dalam membantu pemenuhan kebutuhan pangan hewani.

Perkembangan peternakan ayam ras pedaging di tingkat nasional dan daerah tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak baik pemerintah, perusahaan swasta, maupun masyarakat peternak itu sendiri. Salah satu pihak yang diduga telah berperan dalam pembangunan peternakan ayam ras pedaging yaitu media massa. Hal ini dikarenakan semenjak era reformasi, media massa tidak lagi menjadi alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi untuk kepentingan beberapa kelompok saja. Media massa sudah diberikan ruang yang luas untuk menyebarkan informasi untuk kepentingan rakyat. Media massa merupakan alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (menerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, TV dan media online (Cangara, 2002).

Dalam hal ini media massa dapat dimanfaatkan untuk mendorong dalam proses pengambilan keputusan, memperkenalkan usaha modernisasi dan membantu mempercepat proses peralihan masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat yang modern serta menyampaikan pada masyarakat program-program pembangunan nasional. Namun demikian, sampai saat ini belum banyak hasil riset yang dapat membuktikan bahwasannya media massa memiliki peran dalam pembangunan peternakan, khususnya pada sektor peternakan ayam ras pedaging. Pada hal, data dan informasi terkait dengan peran media massa dalam pembangunan peternakan sangatlah dibutuhkan untuk menjadi sumber referensi oleh pemerintah dan pihak lainnya.

Merujuk pada deskripsi latar belakang di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini diantaranya adalah: a) Mengidentifikasi jenis media massa yang digunakan oleh peternak ayam ras pedaging; b) Menjelaskan kontribusi media massa yang digunakan peternak dalam mengembangkan usaha peternakannya; c) Menjelaskan

permasalahan yang dihadapi oleh peternak ayam ras pedaging dalam memanfaatkan media massa.

Penelitian tentang peran media massa dalam pembangunan peternakan bukanlah hal yang baru, namun demikian topik yang diangkat dalam penelitian ini dapat berbeda dengan penelitian terdahulu dari segi lokasi dan komoditi peternakannya. Pada tahun 2006, peneliti yang bernama Saleh telah melakukan penelitian tentang “Tingkat Penggunaan Media Massa dan Peran Komunikasi Anggota Kelompok Peternak dalam Jaringan Komunikasi Penyuluhan Sapi Potong”. Hasilnya membuktikan bahwa telah terjadi pergeseran pola komunikasi peternak anggota kelompok jaringan komunikasi sapi potong dari mengutamakan hubungan komunikasi interpersonal dalam menerima dan menyebarkan informasi ke perilaku komunikasi bermedia, terutama pada perilaku keterdedahan siaran televisi dan surat kabar. Penelitian Mgbakor, Iyobor & Okezie (2013), mengungkapkan bahwa beberapa kendala yang dihadapi terhadap kontribusi media massa dalam pengembangan penyuluhan pertanian, diantaranya adalah tidak memadainya modal dan bahasa yang digunakan untuk memanfaatkan media massa sebagai instrumen dalam penyuluhan pertanian.

Penelitian terdahulu di atas mengungkapkan bahwasannya media massa yang digunakan untuk komunikasi pembangunan belum berjalan dengan baik. Adapun komunikasi pembangunan tersebut dipahami sebagai proses yang mengajak masyarakat untuk berani dan mau meninggalkan sesuatu yang lama (yang telah diketahui kebaikan dan keburukannya) untuk menggantikannya dengan yang baru (yang belum secara pasti diketahui kebaikan dan keburukannya (Susanto 1977 dalam Mardikanto, 2010). Salah satu media komunikasi pembangunan yang digunakan selama ini yaitu media massa. institusi atau lembaga yang berperan sebagai agen of change yaitu sebagai lembaga pelopor perubahan (Soekanto, 1992).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang difokuskan pada Kecamatan

Payakumbuh dan Kecamatan Harau, karena kedua daerah ini memiliki populasi ternak ayam ras pedaging paling banyak. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan terhitung semenjak bulan Juli s.d Oktober 2018. Data primer didapatkan dari hasil pengisian kuesioner dengan responden penelitian sebanyak 25 orang peternak ayam ras pedaging yang ditetapkan melalui teknik purposif. Selain itu, data primer juga didapatkan melalui teknik observasi non partisipant dan data sekunder didapatkan dengan teknik dokumentasi. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis media massa yang digunakan peternak, kontribusi media massa yang digunakan peternak, dan masalah yang dihadapi peternak dalam mengakses dan memanfaatkan media massa. Data penelitian dianalisis melalui teknik deskriptif kuantitatif dengan bantuan teknik pengskalaan yaitu skala likert (Creswell, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Media massa memiliki fungsi utama untuk memberikan informasi pada kepentingan yang menyebarluas dan mengiklankan produk. Ciri khas dari media massa yaitu tidak ditujukan pada kontak perseorangan, mudah didapatkan, isi merupakan hal umum dan merupakan komunikasi satu arah. Peran utama yang diharapkan dihubungkan dengan perubahan adalah sebagai pengetahuan pertama. Media massa merupakan jenis sumber informasi yang disenangi oleh petani/peternak pada tahap kesadaran dan minat dalam proses adopsi inovasi (Fauziahardiyani, 2009). Pada bagian ini dapat terlihat ragam jenis media massa, kontribusi, dan permasalahan yang dihadapi peternak ayam ras pedaging terhadap media massa.

A. Ragam Jenis Media Massa yang Digunakan Peternak Ayam Ras Pedaging di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Peternak ayam ras pedaging yang terdapat di lokasi penelitian pada umumnya adalah peternak plasma. Mereka melakukan kerja sama dengan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Peternak dalam hal ini tidak memiliki kendala dalam mendapatkan informasi dan inovasi terkait dengan usaha yang dijelankannya.

Berbicara media massa, begi peternak ayam ras pedaging di lokasi penelitian adalah

hal yang populer digunakan mereka sebagai media untuk mendapatkan informasi dan inovasi terkait usaha mereka. Melalui tabel berikut ini dapat terlihat jenis media massa yang digunakan peternak.

Tabel 1. Jenis Media Massa yang Digunakan Peternak Ayam Ras Pedaging di Wilayah Penelitian

No	Jenis Media Massa	Persentase (%) Responden Pengguna Media Massa
<i>Media Cetak</i>		
1.	Surat kabar/koran lokal	-
2.	Surat kabar/koran nasional	-
3.	Majalah / Tabloid Peternakan	50
4.	Buku Praktis Peternakan	70
5.	Brosur	50
6.	Poster	70
7.	Spanduk	-
<i>Media Elektronik</i>		
8.	Siaran Radio	20
9.	Siaran TV	20
10.	Video / Film	-
11.	Internet / online:	
	a) Koran online	90
	b) Majalah peternakan online	90
	c) Jurnal peternakan online	30
	d) video online (Utube)	50
	e) Media Sosial (facebook, Instragram, tweeter, dll)	50

Sumber: Hasil Analisis Kuesioner, 2018.

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel di atas, terlihat bahwa peternak ayam ras pedaging memiliki keragaman dalam memanfaatkan media massa untuk mendapatkan informasi dan inovasi terkait usaha yang dilakannya. Media cetak yang banyak digunakan oleh peternak diantaranya adalah sebanyak 70% menggunakan buku praktis peternak dan poster yang didapatkan mereka dari perusahaan inti plasma. Sebanyak 50% responden menggunakan majalah/tabloid peternakan dan brosur yang didapatkan mereka dari perusahaan pakan ternak, perusahaan obat dan vaksin hewan, serta pemerintah.

Media massa dalam bentuk elektronik juga ada digunakan oleh peternak ayam ras pedaging untuk mendapatkan informasi dan inovasi peternakan. Meskipun demikian, tidak banyak dari mereka yang menggunakan media radio dan TV sebagai sarana mengakses informasi dan inovasi peternakan. Hanya 20% dari mereka yang menggunakan media tersebut. Kebanyakan dari mereka menggunakan media online untuk mendapatkan suber informasi dan inovasi. Sebanyak 90% responden mengakui bahwa mereka menggunakan surat kabar online dan majalah online untuk mendapatkan informasi dan inovasi. Selain itu ada juga yang menggunakan jurnal peternakan online, video online dan media sosial untuk mendapatkan informasi dan inovasi peternakan ayam ras pedaging.

Media massa yang digunakan oleh peternak ayam ras pedaging didaerah ini cukup beragam. Hal ini sesuai dengan beberapa jenis media massa yang diungkapkan oleh Liliweri (2001) dan Vivian (2008), diantaranya adalah media yang berorientasi pada aspek (1) penglihatan (verbal visual) misalnya media cetak, (2) pendengaran (audio) semata-mata (radio, tape recorder), verbal vokal dan (3) pada pendengaran dan penglihatan (televisi, film, video) yang bersifat ferbal visual vokal, atau media massa media massa berdasarkan bentuknya menjadi dua yaitu media cetak dan media elektronik.

B. Kotribusi Media Massa yang Dirasakan Peternak Ayam Ras Pedaging di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penggunaan media massa oleh peternak ayam ras pedaging cukup beragam. Mereka ada yang menggunakan media cetak dan ada juga yang menggunakan media elektronik. Media cetak yang digunakan berupa majalah/tabloid peternakan, buku praktis peternakan, brosur dan poster. Untuk media elektronik, peternak ayam ras pedaging menggunakan siaran radio, TV, koran online, majalah peternakan online, jurnal peternakan online, video online dan media sosial untuk mendapatkan informasi serta inovasi tentang peternakan ayam ras pedaging.

Keseluruhan media massa yang digunakan peternak, memiliki kontribusi berbeda-beda seperti yang terlihat pada Tabel 2. Berdasarkan data yang terdapat pada tabel di atas, terlihat bahwa media cetak berupa majalah/tabloid peternakan berkontribusi dalam memberikan informasi dan inovasi tentang teknologi peternakan ayam ras pedaging, harga

pasar, permintaan pasar dan kebijakan pemerintah terkait komoditi ternak ayam ras pedaging. Buku praktis peternakan yang digunakan oleh peternak berkontribusi dalam memberikan pengetahuan kepada peternak terkait dengan teknologi usaha peternakan. Untuk brosur dan poster yang digunakan peternak berkontribusi dalam memberikan informasi teknologi dan kebijakan pemerintah tentang peternakan ayam ras pedaging.

Kontribusi yang diberikan oleh media elektronik seperti siaran radio dan TV adalah informasi teknologi dan kebijakan pemerintah terkait dengan peternakan ayam ras petelur. Untuk media online, peternak mengakui bahwa banyak kontribusi yang diberikan oleh media tersebut, diantaranya adalah:

- a) Sebagai sumber informasi teknologi peternakan.
- b) Sebagai sumber informasi harga jual dan beli ternak
- c) Sebagai sumber informasi harga pakan ternak
- d) Sebagai sumber informasi permintaan pasar terhadap produk usaha ternak
- e) Sebagai sumber informasi tentang kebijakan pemerintah.
- f) Sebagai sumber informasi tentang permodalan

Tabel 2. Kontribusi Media Massa yang Digunakan Peternak Ayam Ras Pedaging di Wilayah Penelitian.

No	Ragam Kontribusi Media Massa	Indikator Jawaban Responden	Persentase (%) Tanggapan Responden Berdasarkan Jenis Media Massa yang Digunakan Peternak										
			Surat kabar lokal/nasional	Majalah/tabloid peternakan	Buku Praktis Peternakan	Brosur	Poster	Spanduk	Siaran Radio	Siaran TV	Video / Film	Internet / Online	
1.	Teknologi usaha peternakan	Setuju	-	90	100	100	100	100	-	-	100	-	100
		Ragu-ragu	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tdk Setuju	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
2.	Harga jual dan beli ternak	Setuju	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		Ragu-ragu	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tdk Setuju	-	80	100	100	100	100	100	-	-	-	-
3.	Harga pakan ternak	Setuju	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		Ragu-ragu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tdk Setuju	-	20	100	100	100	100	100	-	-	-	-
4.	Permintaan pasar terhadap produk usaha ternak	Setuju	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		Ragu-ragu	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tdk Setuju	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-
5.	Kebijakan pemerintah terkait usaha peternakan	Setuju	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		Ragu-ragu	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tdk Setuju	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-
6.	Sumber permodalan	Setuju	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		Ragu-ragu	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tdk Setuju	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-

Sumber: Hasil Analisis Kuesioner, 2018

C. Permasalahan yang Dihadapi Peternak dalam Memanfaatkan Media Massa untuk Mendapatkan Perkembangan Informasi dan Inovasi Peternakan.

Pada kenyataannya, tidak semua peternak ayam ras pedaging yang memanfaatkan media massa sebagai sumber informasi dan inovasi tentang peternakan. Hal ini dikarenakan beberapa peternak merasakan kendala untuk memanfaatkan media massa tersebut. Melalui tabel berikut ini dapat terlihat kendala yang dihadapi peternak ayam ras pedaging dalam memanfaatkan media massa.

Tabel 3. Resume Permasalahan yang Dihadapi Peternak Ayam Ras Pedaging dalam Memanfaatkan Media Massa di Wilayah Penelitian

No	Pernyataan Permasalahan	Persentase (%) Tanggapan Responden Berdasarkan Kelompok Media Massa			
		Media Cetak		Media Elektronik	
		Setuju	Tdk Setuju	Setuju	Tdk Setuju
1.	Terbatasnya sumber media massa	70	30	60	40
2.	Isi informasi dalam media massa masih bersifat umum atau kurang lengkap dan jelas terkait usaha peternakan yang saya jalani.	80	20	30	70
3.	Informasi dan inovasi yang terdapat dalam media massa belum dikemas untuk kebutuhan praktis peternak untuk menjalankan usahanya.	40	60	30	70
4.	Beberapa istilah peternakan yang digunakan dalam media massa kurang dimengerti oleh pengguna (peternak).	70	30	30	70

Sumber : Hasil Analisis Kuesioner, 2018

Mengacu pada persentase tanggapan responden di atas, terlihat bahwa peternak memiliki beberapa kendala dalam memanfaatkan media massa. Baik media cetak ataupun media massa elektronik, responden berpandangan masih terbatasnya sumber yang terkait dengan usaha peternakan mereka. Permasalahan yang paling sedikit ditemukan pada media elektronik.

Permasalahan pertama yang dirasakan oleh peternak ayam ras pedaging yaitu terbatasnya sumber media massa. Hal ini dapat terlihat dari persentase tanggapan responden yang setuju sebesar 70% untuk media cetak dan 60% setuju untuk media elektronik. Dilihat dari segi isi informasi yang terkandung dalam media massa, sebanyak 80% responden menyetujui bahwa isi informasi dalam media massa cetak (koran, majalah) masih bersifat umum atau kurang lengkap dan jelas terkait usaha peternakan yang jalannya. Permasalahan lainnya adalah masih banyak tulisan dalam media massa yang menggunakan kata atau istilah ilmiah, sehingga peternak ayam ras pedaging sulit memahami secara cepat terhadap pesan yang disampaikan dalam media tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya adalah jenis media massa cetak yang banyak digunakan oleh peternak ayam ras pedaging di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu majalah/tabloid peternakan, buku praktis beternak ayam ras pedaging, brosur dan poster tentang jenis penyakit hewan dan obat/vaksin yang didapatkan dari perusahaan plasma peternakan ayam ras pedaging. Untuk media massa yang bersifat elektronik, umumnya peternak ayam ras pedaging menggunakan media massa online seperti koran, majalah, video, dan media sosial. Keseluruhan media massa yang digunakan oleh peternak ayam ras pedaging tersebut berkontribusi sebagai sumber informasi teknologi peternakan, harga jual dan beli ternak, harga pakan ternak, permintaan pasar terhadap daging ayam ras, kebijakan pemerintah, dan sumber permodalan. Namun demikian, peternak ayam ras pedaging mengakui mengalami permasalahan terkait pemanfaatan media massa, diantaranya adalah masih terbatasnya sumber media massa terkait peternakan ayam ras pedaging, isi informasi dalam media massa cetak (koran, majalah) masih bersifat umum atau kurang lengkap dan jelas terkait usaha peternakan yang jalannya, masih banyak tulisan dalam media massa yang menggunakan kata atau istilah ilmiah, sehingga peternak ayam ras pedaging sulit memahami secara cepat terhadap pesan dan informasi yang disampaikan dalam media massa tersebut.

Mengacu pada kesimpulan di atas, disarankan kepada pelaku atau produsen media massa baik media lokal maupun nasional untuk dapat memberikan porsi lebih terkait penyebaran informasi dan inovasi tentang peternakan ayam ras pedaging. Pada pemerintah, khususnya para penyuluh peternakan untuk dapat lebih aktif memberikan tulisan ilmiah praktis terkait peternakan ayam ras pedaging kepada pihak pengelola media massa. Hal ini dikarenakan media massa sebagai instrumen yang dapat digunakan oleh penyuluh peternakan dalam melaksanakan tugasnya.

DAFRAT PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2018. Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka 2018. BPS Kab.Lima Puluh Kota. Payakumbuh.
- Cangara, Hafied.2002.Pengantar Ilmu Komunikasi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Creswell, J.W. 2016. Resarch Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran, Penerjamah: Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari . Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2018. Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2018. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Fauziahardiyan. (2009). Komunikasi dan Media Massa. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Liliweri, A. 2001. Gatra-Gatra Komunikasi antar Budaya. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Mardikanto, T. 2010. Komunikasi Pembangunan. Acuan Bagi Akademisi, Praktisi dan Peminat Komunikasi Pembangunan, UNS Press. Surakarta.
- Mgbakor, M., Iyobor, O & Okezie, P.U. 2013. Contributions of Mass Media to the Development of Agricultural Extension in Ika North East L.G.A of Delta State, Nigeria. *Journal of Plant Sciences* 6 (3): 127-133, 2013.
- Saleh, A. 2006. Tingkat Penggunaan Media Massa dan Peran Komunikasi Anggota Kelompok Peternak dalam Jaringan Komunikasi Penyuluhan Sapi Potong. *Jurnal Media Peternakan*, Vol. 29, No.2, hlm 107-120.
- Tambunan.T. 2010. Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan. UI-PRESS. Jakarta.
- Vivian, J. 2008. Teori Komunikasi Edis Kedelapan. Penanda Media Grup. Jakarta.
- Yuwono.T, Widodo.S dkk. 2011. Pembangunan Pertanian Membangun Kedaulatan Pangan. Gajah Mada University Press.

KAJIAN TEORITIS MENGENAI PERSEPSI KONSUMEN TENTANG KARAKTERISTIK INOVASI INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA PEMASARAN SAYURAN SECARA ONLINE

Edi Dwi Cahyono ^{1*}, Eka Pradesti ¹

¹ Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang

ABSTRAK

Memasuki era information society, media sosial Instagram merupakan salah satu alternatif untuk transaksi produk-produk pertanian yang potensial. Namun penggunaannya untuk alat transaksi online, khususnya untuk komoditas sayuran masihlah samar. Hal-hal apa yang menjadi pertimbangan konsumen potensial untuk mengadopsi platform baru ini? Apakah Instagram akan memberikan manfaat ekonomis, kemudahan bertransaksi, atau status sosial tertentu? Segmen sosial mana yang akan berminat untuk menggunakannya? Tujuan dari penulisan paper ini ialah untuk: 1) membahas prospek Instagram sebagai sebuah platform online baru untuk bertransaksi sayuran; 2) mereview karakteristik inovasi Instagram (keuntungan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, dll) yang kemungkinan dianggap penting oleh konsumen; dan 3) memprediksikan faktor-faktor demografis yang berasosiasi dengan adopsi Instagram. Melalui kajian pustaka, paper ini bermanfaat sebagai wacana untuk memperjelas peran Instagram sebagai platform baru untuk transaksi produk pertanian di cyberspace. Melalui pendekatan difusi inovasi diharapkan paper ini bermanfaat untuk studi lebih lanjut tentang adopsi inovasi sistem e-commerce di bidang pertanian.

Kata kunci: information society, Instagram, transaksi online, persepsi, karakteristik inovasi, sayuran

Masyarakat informasi dan Instagram sebagai inovasi bertransaksi

Saat ini kita telah memasuki sebuah era baru yang disebut dengan masyarakat informasi/*information society* (Buckland, 2017) atau *network society* (Van Dijk, 1999). Information society mengacu pada sebuah masyarakat yang menciptakan, menggunakan, mengintegrasikan, dan memanipulasi informasi untuk berbagai aktivitas masyarakat. Individu-individu yang memiliki teknologi dalam masyarakat seperti ini dikenal sebagai ‘digital citizens’, yang menggunakan Internet secara teratur dan efektif (Rooney, 2014; Asano, 2017). Perilaku ini mendorong hamburan informasi, yang merubah aktivitas dan tatacara dalam bidang-bidang ekonomi, edukasi, kesehatan, kesejahteraan sosial,

pemerintahan, dan demografi (Lenhart, Madden, Smith, Purcell & Zickuhr, 2011; McGilvery, 2012; Mills, 2016; Wartella, Rideout, Montague, Ryan & Lauricella, 2016). Transaksi pertanian juga mengalami perubahan yang dramatis karena transaksi secara online (daring/dalam jaringan atau online marketplace) dianggap produktif (Tan & Chen, 2019), karena mampu meningkatkan hubungan stakeholders dalam kewirausahaan (Morris & James, 2017). Revolusi teknologi komunikasi dan informasi (information and communication technologies/ICT) (Dutton *et al.*, 2010; Amin *et al.*, 2013), memungkinkan terwujudnya komunikasi terpadu dan integrasi telekomunikasi dan komputer (Information and Communication Technology, 2008; Murray, 2011; Kietzmann, Hermkens, McCarthy, & Silvestre, 2011). Konsekuensinya, pasar konvensional (pasar tradisional, minimarket, supermarket) dapat mengalami gangguan (disruption) karena kehadiran pasar baru di ruang cyber.

Hadirnya ICT mendorong terciptanya media sosial, yang telah menjadi bentuk atau metoda berkomunikasi yang penting di seluruh dunia (Lathiya, Rathod, & Choudhary, 2015) karena mampu meningkatkan pengetahuan, gagasan, secara nyata dan relasi yang luas (Balkrishna & Deshmukh, 2017). Media sosial adalah jaringan interaktif berbasis aplikasi Web 2.0 (generasi ke dua world wide web yang interaktif untuk berbagi informasi via media sosial, blogging, dll); user-generated content (isi pesan dibuat oleh penggunanya sendiri); pengguna membuat profil jasa yang spesifik; dan melibatkan jaringan sosial online (Obar & Wildman, 2015; Kaplan & Haenlein, 2010; Boyd & Ellison, 2007). Jaringan dalam media sosial telah merubah cara-cara berkomunikasi (Kietzmann & Hermkens, 2011). Media sosial memungkinkan individu, komunitas, dan organisasi untuk berbagi dan berkreasi bersama. Keterkaitan dalam jaringan sosial secara online memungkinkan orang atau organisasi untuk berkomunikasi dan melakukan jual-beli produk-produk tertentu. Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, LINE, LinkedIn, atau Pinterest adalah contoh media sosial yang sedang populer saat ini. Saat ini, media sosial semakin trendy; rata-rata penggunaannya adalah 3 jam 26 menit per hari, lebih tinggi dibanding dengan waktu untuk melihat televisi, karena kemudahannya diakses dari berbagai perangkat (Zolkepli & Kamarulzaman, 2015; Hootsuite & We Are Social, 2019).

Media sosial menciptakan '*participatory culture*', yang mendorong keterlibatan baik pengguna, konsumen, maupun partisipan lainnya untuk menciptakan inovasi sosial

dan budaya (Fuch, 2017). Terlebih lagi, platform online dalam media sosial memungkinkan orang untuk menjadi peserta aktif komunikasi. Termasuk di antaranya adalah berbagi dan mempertukarkan informasi atau pengalaman; mengumpulkan sumber daya dan bekerjasama; serta membentuk jejaring sosial (social networking) secara virtual (Kaplan & Haenlein, 2011). Media sosial mendorong proses komunikasi untuk mencapai kesepahaman antar pelaku dalam aktivitas pertanian (Balkrishna & Deshmukh, 2017), yang memungkinkan kreasi baru untuk bertransaksi produk dan jasa. Bahkan, media sosial dapat memberikan dampak disruptive (mengganggu) terhadap sistem pemasaran konvensional dan mendorong perbaikan kinerjanya. Dalam jangka panjang, pemasaran melalui media sosial ini adalah terobosan untuk revitalisasi hortikultura.

Salah satu media sosial yang populer untuk bertransaksi online adalah Instagram. Relatif terjangkaunya harga smartphone dan paket data seluler mendorong peningkatan penggunaan Instagram dan Internet. Pada tahun 2019, pengguna Internet di Indonesia mencapai 150 juta, yang mengalami peningkatan sebesar 13% dari tahun sebelumnya; pengguna Internet yang juga mengakses Instagram adalah terbesar, yaitu 80%, tertinggi dibanding dengan platform lainnya (Hootsuite & We Are Social, 2019). Akhir akhir ini beberapa peneliti telah melakukan studi tentang Instagram (Casalo, Flavian & Sanchez, 2017; Abed, 2018; Teo, Leng & Phua, 2018). Namun umumnya studi tersebut adalah mengenai persepsi secara umum tentang penggunaan Instagram. Studi adopsi Instagram untuk alat bertransaksi di Indonesia relatif terbatas. Karena itu, perlu kajian tentang persepsi mengenai karakteristik Instagram sebagai sebuah inovasi.

Konsumen memiliki berbagai pertimbangan subyektif tentang keberadaan media sosial sebagai inovasi untuk bertransaksi. Namun pertimbangan apa yang ada di struktur mental konsumen masih belum jelas saat ini. Berbagai variasi pertimbangan ini perlu dikaji untuk memprediksikan permasalahan dan prospek Instagram untuk alat pemasaran pertanian online. Apalagi kajian ilmiah mengenai potensi media sosial di Indonesia relatif terbatas, khususnya untuk transaksi pertanian. Ilmu penyuluhan dan komunikasi pembangunan pertanian diharapkan dapat memberikan kontribusi terkait dengan proses transformasi menuju era digitalisasi dalam masyarakat pertanian (Dutton *et al.*, 2010; Lathiya, Rathod, & Choudhary, 2015).

Individu dari berbagai segmen sosial telah terpapar dengan media sosial/Instagram. Penyebabnya adalah karena aplikasi Instagram terintegrasi dengan tilpun genggam/tilpun pintar (smartphone). Jumlah pengguna tilpun genggam di Indonesia mencapai 355,5 juta; pemakai tilpun pintar 130 juta. Selanjutnya, pemakai Instagram mencapai 53 juta, dengan peningkatan sebanyak 58.5% sejak awal tahun 2016 (Hootsuite & We Are Social, 2019). Instagram merupakan salah satu media sosial favorit setelah Facebook. Kelebihan Instagram adalah karena user-friendly, dan eye-catching; aplikasinya dapat meningkatkan tampilan visual, seperti dramatisasi foto.

Instagram dalam perspektif difusi inovasi

Difusi inovasi didefinisikan sebagai proses di mana inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam suatu waktu di antara anggota sistem sosial (Rogers, 1995; Kocak, Kaya, & Erol, 2013). Rogers (1995) menegaskan bahwa pada hakekatnya proses difusi adalah sebuah tipe komunikasi yang memaknai ‘pesan’ sebagai suatu entitas yang relatif baru dalam struktur mental seseorang (inovatif). Dalam konteks Instagram sebagai media transaksi online, kebaruannya relatif kompleks. Saat ini telah bermunculan situs-situs online, termasuk Instagram, yang menawarkan berbagai produk pertanian termasuk hortikultura sayuran (Akhmadi, 2018; Safitri & Andriani, 2018). Hal ini berbarengan dengan niat baik pemerintah Indonesia untuk merevitalisasi hortikultura secara nasional (Indonesia’s Horticultural Sector, 2019), yang berpotensi mendorong sistem pemasaran online (Sartup Agribisnis, 2019).

Sebagai sebuah inovasi Instagram dapat menimbulkan dilema. Dalam konteks Instagram sebagai media transaksi online, kebaruannya relatif kompleks. Kebaruan Instagram di antaranya adalah bentuk/pengemasan pesan, cara penyampaian pesan (via online), material (aplikasi Instagram), dan saluran penyampaian pesan (saluran digital). Instagram adalah aplikasi networking sosial yang populer karena penggunanya dapat berbagi pesan yang dapat dikemas dengan kata-kata, emoticon, foto, ataupun video. Inisiator informasi atau administrator terkoneksi dengan para pengikutnya yang terintegrasi secara sukarela, dan tergabung dalam sebuah daftar pengikut (follower list) dalam cyberspace. Individu-individu tersebut dapat melakukan pertukaran informasi yang cepat,

intensif, dan berskala luas. Implikasinya, pasar produk dan jasa menjadi lebih terbuka, kompetitif, dan dinamis. Namun inovasi dapat menimbulkan ketidak-pastian mental bagi adopter potensialnya; semakin tinggi kepastian yang diyakini konsumen tentang Instagram, maka semakin positif pula persepsinya; sebaliknya semakin tinggi ketidak-pastian bisa berasosiasi dengan persepsi negatif tentang inovasi tersebut.

Karakteristik inovasi terbukti relevan untuk mengkaji persepsi dan difusi-adopsi inovasi (Noviyanti & Cahyono, 2016; Malahayatin & Cahyono, 2017; Safitri & Cahyono, 2017; Alawiyah & Cahyono, 2018), termasuk persepsi tentang inovasi di bidang teknologi komunikasi dan informasi (Mannan & Nordin, 2014; Azam, 2015; Eze, Chinedu-Eze & Bello, 2019). Sebagai sebuah inovasi, Instagram merupakan media, platform atau portal (pentas, panggung, lapak) digital yang dianggap baru untuk berkomunikasi dan bertransaksi barang dan jasa (e-commerce). Dalam konteks pertanian, Instagram berfungsi sebagai tempat untuk bertransaksi sayuran online antara penjual dengan pembelinya. Fokus pada e-commerce relevan karena popularitas Instagram dan membaiknya perekonomian Indonesia yang mendorong gaya hidup yang baru. GDP per capita Indonesia tahun 2018 adalah US\$ 3,927 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5.17% pada tahun tersebut (Badan Pusat Statistik, 2018), yang menjadikannya sebagai negara dengan pendapatan menengah atas.

Sistem sosial dalam konteks Instagram juga kompleks. Dibanding media massa, Instagram inovatif karena para pelakunya dapat berpartisipasi penuh layaknya dalam komunikasi antar pribadi. Instagram adalah media hibrida, yang dipandang baru karena mampu mengkombinasikan tipe komunikasi massa yang linier dan interpersonal yang bersifat dua arah, dan menjadi media komunikasi yang interaktif antar manusia untuk bertukar informasi dan ‘berbagi cerita’ (storytelling) secara digital (Lundby, 2008). Peran media hibrida telah mendapat perhatian dalam konteks penyuluhan dan komunikasi pertanian (misalnya Leeuwis, 2003). Instagram sebagai media hibrida dapat menimbulkan “keguncangan” mental, mendorong adaptasi dari sistem sosial terkait, merubah cara-cara berinteraksi, bernegosiasi, dan mengambil keputusan. Sistem sosial dalam Instagram relatif kompleks. Konteks ‘source’ dan ‘receiver’ menjadi kabur, tidak lagi didominasi oleh pemilik lapak; setiap peserta khususnya konsumen memiliki kesempatan besar untuk mentransmisikan informasi, berinteraksi, dan memberikan opini.

Pertanyaannya, sejauhmana calon konsumen tertarik untuk membeli sayuran, khususnya sayuran segar, via Instagram? Lebih khusus lagi, bagaimana persepsi para konsumen potensial tentang Instagram tersebut sebagai alat transaksi inovatif. Konsep karakteristik inovasi yang diusulkan oleh Everett Rogers (2003) dipakai untuk menjawab pertanyaan tersebut. Diseminasi inovasi dapat menimbulkan ketidakpastian mental bagi para adopter potensialnya. Sebagai contoh, ketika dihadapkan dengan ICT, mayoritas agen penyuluhan pertanian menyatakan kurang atau tidak puas dengan keterampilan mereka (Cahyono, 2014; Cahyono & Agung, 2016). Hal ini mengindikasikan rasa ketidaknyamanan atau kegagapan mereka dalam mengoperasikan teknologi baru ini, yang dikenal dengan istilah ‘gaptek’ (gagap teknologi) atau technological shock (Schilling, 2015). Ketidakpastian merupakan hambatan utama untuk adopsi inovasi, karena kurangnya pemahaman tentang kelebihan atau kelemahan suatu inovasi (Rogers, 2003).

Di level konsumen terkait produk-produk pertanian, penelitian mengenai adopsi atau karakteristik ICT/media sosial sebagai sebuah inovasi masih terbatas. Kita dapat berekspektasi bahwa, pertama— konsumen juga akan menghadapi situasi yang sama dengan para penyuluh tadi. Ke dua— kita justru berekspektasi bahwa mereka justru menyambut baik kehadiran media sosial tersebut karena karakteristik inovasinya yang unik. Ke tiga— ekspektasi kita berada di antara ke duanya: mungkin ada segmen sosial yang siap menerima dan mungkin ada yang sebaliknya enggan menerimanya. Oleh karena itu, konsep karakteristik inovasi penting untuk memahami persepsi dan memprediksikan perilaku adopsi konsumen terhadap Instagram. Selanjutnya perlu dikaji segmen sosial mana yang mungkin mengalami hambatan atau sebaliknya dorongan untuk menggunakan Instagram.

Persepsi tentang Karakteristik Instagram

Rogers memiliki proposisi bahwa laju difusi/diseminasi dan keputusan untuk mengadopsi inovasi ditentukan oleh beberapa karakteristik inovasi itu sendiri (Rogers, 1983; 2003). Lima karakteristik inovasi yang diusulkan oleh Rogers adalah: relative advantage (tingkat keuntungan relatif), complexity (kerumitan), trialability (keterujicobaan), observability (keterlihatan), dan compatibility (kesesuaian). Dalam konteks yang

lain, ke lima karakteristik inovasi tersebut dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu faktor ekonomis (*relative advantage/keuntungan relatif*), faktor sosial budaya (*compatibility/kompatibilitas*), dan faktor teknis (*complexity/kompleksitas*, *trialability/trialabilitas*, dan *observability/observabilitas*) (Cahyono, 2013).

Keuntungan relatif— Keuntungan relatif menunjukkan keunggulan suatu inovasi relatif terhadap inovasi terdahulu, yang diukur dengan beberapa indikator. Keuntungan relatif merupakan prediktor penting penerimaan atau adopsi inovasi (Kitchen & Panopoulos, 2010; Ho & Wu, 2011). Tingkat keuntungan relatif biasanya diukur dari efisiensi teknis atau peningkatan nilai ekonomis, dan peningkatan status sosial dari penggunaan inovasi relatif dibanding dengan yang terdahulu. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki keunggulan relatif karena dapat dipasang dan tersinkronisasi dengan berbagai perangkat komunikasi modern seperti tilpun genggam dan komputer dan untuk menemukan teman online (Zolkepli & Kamarulzaman, 2015). Bagaimana dengan media sosial Instagram?

Potensi keuntungan Instagram adalah ketersediaan akses yang terbuka dan bebas terhadap informasi. Bila kita berasumsi bahwa informasi adalah komoditas yang bernilai ekonomis, maka platform Instagram dapat menghemat uang, tenaga, dan waktu untuk mengambil keputusan. Apalagi, dengan semakin banyaknya provider yang tersedia saat ini, maka Instagram dapat digunakan kapanpun dan dimanapun, asal aplikasinya telah dipasang ke sebuah smartphone. Sebagai perbandingan, biaya perjalanan dapat dihemat bila transaksi dilakukan secara online, alih-alih pergi ke pasar konvensional dengan menggunakan kendaraan pribadi atau publik. Instagram juga membantu membandingkan ketersediaan, kualitas, dan harga antar toko/lapak online produk sayuran tertentu, sehingga mempercepat pengambilan keputusan pembelian. Instagram juga platform yang efektif untuk mencari produk sayuran yang sulit dicari di pasar konvensional, misalnya sayuran organik tanpa memperhatikan jarak tempuh, sepanjang produk sayurannya terjangkau oleh jasa transportasi dan masih terjaga kualitasnya saat diterima pembelinya mengingat sifat kerapuhan yang cepat dari sayuran segar. Singkatnya, Instagram dipersepsi positif karena dianggap lebih praktis, lebih beragam pilihannya, dapat saling memberi masukan, menghemat waktu, lebih menarik, dan lebih murah.

Namun transaksi via Instagram juga berpotensi memiliki ‘kerugian relatif’. Masalahnya, kapasitas Instagram relatif besar karena berbagai fitur yang dimilikinya; demikian juga dengan penggunaan kuotanya, yang berimplikasi pada biaya pembelian pulsanya. Selain itu, terdapat biaya pengantaran barang dari titik lokasi penjual ke tempat pembelinya. Apakah hal ini dipandang sebagai faktor kerugian relatif dari Instagram adalah sesuatu isu yang perlu diperhatikan. Terlebih lagi, sayuran adalah produk yang relatif cepat rusak. Jeda waktu antara titik transaksi dan sampai di tangan pembelinya bisa jadi menjadi kendala karena dianggap dapat menurunkan kualitas sayuran, yang secara mental dikonversi sebagai kerugian ekonomis oleh konsumen. Berbeda halnya bila konsumen membeli secara langsung: sayuran dapat langsung dibayar, dibawa sendiri, dan segera dimasukkan ke almari pendingin. Perlu pula diperhatikan bahwa proses transaksi via Instagram tidak melalui lembaga perantara (antara penjual dan pembeli) yang menjamin keamanan transaksi (seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, atau Lazada). Hal ini dapat menimbulkan resiko tersendiri bagi pembelinya bila lapak di Instagram tersebut bertindak curang. Faktor keberatan lainnya adalah kemungkinan biaya transportasi untuk mengirimkan produk dari penjual ke lokasi konsumennya. Oleh karena itu, dari faktor keuntungan relatif, Instagram dipersepsi cukup positif (netral) untuk keperluan transaksi sayuran secara online, mengingat ada keuntungan sekaligus kerugian dalam penggunaannya.

Kompatibilitas—Kompatibilitas inovasi adalah faktor lain yang penting dalam adopsi Instagram. Kompatibilitas inovasi adalah tingkat kesesuaiannya dengan nilai dan keyakinan yang ada, gagasan yang telah dikenal sebelumnya, dan/atau kebutuhan dari adopter potensial terhadap inovasi tersebut (Garcia & Calantone, 2002; Rogers, 2003; Kitchen & Panopoulos, 2010). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum faktor kompatibilitas berhubungan dengan adopsi media sosial (Zolkepli & Kamarulzaman, 2015). Studi lainnya menunjukkan bahwa media sosial dapat meningkatkan jejaring komunikasi sosial (Fuch, 2017) dan berbagi pengalaman dan mempengaruhi pembelian produk pertanian tertentu (Kocak et al., 2013; Cui, 2014). Oleh karena itu, Instagram mungkin menarik karena memiliki kompatibilitas sosial, yaitu keinginan memiliki pengalaman yang sama dengan konsumen lainnya. Selain itu, sebagian konsumen mungkin meyakini bahwa membeli produk sayuran secara online akan dapat membantu

penghidupan petani secara langsung, yang dapat mengindikasikan kompatibilitas dengan nilai-nilai untuk membantu anggota masyarakat yang dianggap termarginalisasi.

Kesesuaian dengan pengalaman terdahulu berpengaruh terhadap adopsi e-commerce (Qi, Zheng, Cao & Zhu, 2019). Dalam konteks transaksi sayuran, Instagram sebagai sebuah inovasi mungkin berlawanan dengan nilai-nilai sosial sebelumnya. Pada pola konvensional, individu membeli secara langsung berbagai produk pertanian di pasar-pasar tradisional atau swalayan. Mereka dapat berinteraksi secara face to face dengan penjual di pasar tradisional sebagai sebuah kebiasaan yang menyenangkan, atau menganggap sebagai sebuah bentuk relaksasi dengan cara belanja secara swalayan di minimarket atau supermarket. Apakah hal ini akan menjadi faktor penghalang yang signifikan bagi calon konsumennya masihlah kabur.

Bagaimana halnya dengan interaksi di dunia maya? Instagram memiliki fitur-fitur tertentu untuk berbagai keperluan sosial. Di antaranya adalah: *homepage*, *followers*, *like*, *caption*, *hashtag*, dan khususnya *comment* yang mempermudah penggunanya untuk berkomunikasi, mengungkapkan emosi (berepresi) melalui emoticon, dan mengembangkan relasi (Nardi, Schiano, Gumbrecht, & Swartz, 2004; Krumm, Davies, & Narayanaswami, 2008; Shao, 2009; White, Meyers, Doerfert, & Irlbeck, 2014; Lathiya, Rathod, & Choudhary, 2015). Hal ini secara psikologis dapat memberi kepuasan, karena selain lebih dikenal, keberadaannya penggunanya juga diakui oleh para netizen/masyarakat online (Kocak *et al.*, 2013). Dalam konteks e-commerce, Instagram disukai karena dengan berpartisipasi dalam transaksi sayuran konsumen dapat mengekspresikan diri dan diterima secara sosial. Pada sisi lain, peluang Instagram untuk diterima relatif besar karena bisa jadi penggunanya telah terbiasa dengan teknologi-teknologi yang mendahuluinya, yaitu tilpun genggam, Internet, dan beberapa aplikasi media sosial lainnya. Dalam prinsip kompatibilitas, seseorang yang terpapar oleh inovasi terdahulu yang mirip akan cenderung mudah mengadopsi inovasi (Rogers, 2003). Transaksi via Instagram hanyalah kelanjutan atau dampak dari kebutuhan untuk memanfaatkan pengalaman menggunakan teknologi yang telah dikuasai untuk, di tingkat selanjutnya, meningkatkan kemudahan hidup sehari-hari. Jadi, dari sisi kompatibilitas, persepsi Instagram untuk transaksi sayuran diduga cukup positif. Pertama, karena konsumen telah terpapar dengan teknologi terdahulu yang relatif

mirip; kedua, inovasi Instagram sejajar dengan kebutuhan konsumen untuk mengikuti zaman/up to date, atau merasa trendy.

Kompleksitas—Tingkat kerumitan dimana suatu inovasi dianggap sulit untuk dipahami atau digunakan. Karakteristik ini juga penting untuk menentukan apakah pengguna potensial Instagram akan mengadopsinya. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya media sosial dianggap mudah penggunaannya, dengan catatan bahwa mereka telah akrab dengannya (Zolkepli & Kamarulzaman, 2015). Namun penelitian lain menunjukkan bahwa inovasi Internet merupakan masalah karena ketidakakraban dari penggunaanya dengan teknologi tersebut (Agunga, Cahyono, Buck, & Scheer, 2016). Media sosial Instagram mungkin tidak kompleks dan barang tertentu dapat dibeli secara langsung via sistem ‘cash and delivery’ (bayar dan diantar). Namun, proses ini membutuhkan waktu untuk sampai di tangan pembeli. Bahkan bila jarak antara pembeli dan penjual relatif jauh, maka sayuran yang dibeli dkuatirkan dapat rusak atau berkurang kesegarannya. Karenanya, hal ini bisa dianggap sebagai sebuah kendala teknis.

Pada sisi lain, Instagram berpeluang untuk diadopsi karena fitur-fiturnya relatif mudah digunakan dan sederhana aplikasinya. Secara teknis, penggunaan Instagram relatif mudah, yaitu hanya sebatas ‘klik’ atau ‘pencet’, yang mungkin mendorong penggunaanya untuk mencoba membeli sayuran via daring/online. Selain itu, bagi sebagian konsumen, Instagram boleh jadi dipersepsi positif karena dianggap mudah penggunaannya; dapat melihat komentar sesama pembeli, transaksinya relatif mudah dan fleksibel/dapat dilakukan setiap saat; mudah bertukar pesan; dan transaksinya relatif cepat. Faktor negatif yang mungkin muncul adalah waktu pengiriman yang cukup lama, dan modus pembayarannya melalui mesin ATM yang mengharuskan konsumen untuk pergi ke luar dari posisinya saat melakukan transaksi online. Selain itu, sebagian penggunaanya mungkin mengalami kesulitan di awal proses transaksi, dan menimbulkan persepsi negatif tentang Instagram.

Triabilitas—Rogers berspekulasi bahwa kemungkinan sebuah inovasi untuk dicoba dalam skala terbatas (ketercobaan) dapat mempercepat proses difusi dan keputusan inovasi (lihat juga: Davis, 1989; Venkatesh et al., 2003). Konsep ini dapat menjelaskan bagaimana para adopter awal memiliki keyakinan diri (self efficacy) untuk menggunakan Instagram sebagai alat bertransaksi secara lebih intensif atau berkelanjutan. Triabilitas memiliki peran penting terutama bagi para adopter awal, karena secara psikologis akan

menciptakan kepercayaan pengguna terhadap Instagram dan mengurangi ketidakpastian (Sahin, 2006; Mannan & Nordin, 2014). Konsep trialabilitas ini sesuai dengan prinsip ‘learning by doing’, dimana seseorang akan mengulang penggunaan suatu inovasi (continuous adoption) bila inovasi tersebut mudah dikerjakan atau sebaliknya dapat terjadi ‘dis-adoption’ bila inovasi tersebut dirasa sulit untuk dicoba (Alsaleh, Elliott, Fu, & Thakur, 2019). Kelebihan Instagram terutama adalah kemampuan mengirim komentar, foto, video dengan mudah, cepat, dan dengan kualitas yang baik; aksesnya bebas (relatif tidak terbatas ruang dan waktu). Faktor-faktor ini kemungkinan mendorong orang-orang untuk mencoba hal-hal baru, termasuk bagi mereka yang sibuk. Oleh sebab itu, diduga Instagram memiliki tingkat trialabilitas yang tinggi karena individu-individu relatif mudah melakukan eksperimen kecil, khususnya untuk membeli barang via online.

Obervabilitas— Inovasi tertentu mudah dilihat, dan sebaliknya inovasi lainnya relatif sulit diamati (Kitchen & Panopoulos, 2010). Secara umum, studi pada media sosial mengungkap adanya hubungan antara adopsi media sosial dengan faktor observabilitas ini; secara umum pengguna media sosial sering beraktivitas di depan publik, dan mereka terhubung dalam jejaring sosial maya (Zolkepli & Kamarulzaman, 2015). Lebih lanjut, fitur-fitur yang tersedia pada Instagram memiliki fungsi yang berbeda-beda, dimana salah satunya adalah fitur *comment*. Fitur ini memudahkan pertukaran informasi; para penggunanya bebas membaca informasi dari pemilik akun/pengguna lainnya (*followers*). Implikasinya, visualisasi gambar dan/atau tulisan di Instagram berpeluang menjadi faktor penentu adopsi Instagram (Kocak *et al.*, 2013), karena dapat menjadi bahan referensi untuk keputusan pembelian. Selain itu, pemilik lapak juga bisa mempromosikan produk-produknya, baik melalui tulisan atau secara visual untuk menarik minat konsumen. Jadi, dari sisi observabilitas Instagram bukanlah sebuah masalah, bahkan diduga menjadi salah satu faktor penentu penting adopsi transaksi sayuran secara online.

Faktor Demografis

Faktor usia— Dikenal dua kelompok sosial antar generasi yang cenderung merespon secara berbeda tentang Internet. Saat lahir, generasi ‘digital native’ (lahir setelah 1990) kehidupannya sudah terinduksi dengan teknologi komunikasi dan informasi

(Premsky, 2001). Sebaliknya, generasi lebih tua, yang disebut dengan ‘digital immigrants’, perlu berjuang untuk terbiasa dengan zaman digital. Dengan demikian, orang yang lebih senior cenderung memiliki lebih sedikit akses ke Internet dibanding dengan yang muda (Zang, 2002; Severin & Tandkard, 2010). Data empiris menunjukkan bahwa generasi digital native dalam waktu 13 tahun telah menggunakan 10,000 jam untuk bermain video game; sebanyak 200,000 pesan singkat dan email yang diterima atau dikirimkan; lebih dari 500,000 iklan yang dilihat; serta lebih dari 10,000 jam digunakan untuk berbicara melalui tilpun pintar/smartphone (Premsky, 2001). Sebaliknya, berbagai tanggung jawab keluarga dan sosial, serta technological shock mungkin akan dialami oleh generasi digital immigrants. Berdasarkan data yang dirilis oleh We Are Social pada tahun 2018, mayoritas pengguna Instagram (59.9%) berusia 18-34 tahun; berikutnya berusia di atas 34 tahun (32.5%); dan di bawah 18 tahun (7.6%) (Kemp, 2018), mengindikasikan dominasi dari segmen sosial yang berusia muda. Dalam sebuah studi ditemukan bahwa anak-anak muda berasosiasi tinggi dengan penggunaan sosial media karena sifat ekstravert mereka (Correa, Hinsley, & de Zúñiga, 2010). Sejalan dengan penelitian ini, terungkap bahwa hanya 35,7% penyuluh pertanian yang merasa ‘puas’ atau ‘sangat puas’ dengan kemampuan mereka dalam menggunakan Intenet; studi ini menunjukkan bahwa rata-rata penyuluh tersebut adalah golongan senior, yaitu telah berumur lebih dari setengah abad (Cahyono, & Agung, 2016), mengindikasikan bahwa mereka adalah kelompok digital immigrants yang gagap teknologi digital. Karena itu, diduga bahwa konsumen muda lebih responsif dibandingkan yang tua untuk melakukan transaksi sayuran secara online.

Faktor jender—Data yang dirilis oleh Hootsuite dan We Are Social pada tahun 2018 menunjukkan bahwa mayoritas pengguna Instagram (51%) adalah perempuan (Kemp, 2018). Secara umum, perilaku perempuan dan laki-laki berbeda di dunia maya, dimana segmen sosial pertama lebih memberikan perhatian terhadap sebuah situs online, sedang yang ke dua cenderung mudah beralih ke situs baru yang dianggap lebih menarik (Zhang, Lee, Cheung, & Chen, 2009). Paralel dengan temuan ini, Fitria (2015) menegaskan bahwa perempuan adalah pengguna aktif Instagram yang kemungkinan lebih konsumtif dibanding laki-laki. Variasi stimulus berupa fitur-fitur dalam Instagram kemungkinan lebih membangkitkan aspek emosional perempuan, dan mendorong mereka untuk membeli produk-produk yang ditawarkan, sekaligus mengikuti gaya hidup yang

sedang trendy. Selanjutnya, Instagram dapat berfungsi sebagai alat edukasi dan entertainment (edutainment) yang mungkin disukai oleh kaum perempuan. Singkatnya, kaum perempuan diprediksi memiliki persepsi yang positif tentang Instagram sebagai alat transaksi sayuran secara online karena kedekatan dengan media sosial secara umum, daya pikat Instagram, rasa ingin tahu, dan keinginan yang tinggi untuk diterima secara sosial (Correa, Hinsley, & de Zúñiga, 2010).

Faktor edukasi— Pada umumnya seseorang yang berpendidikan tinggi cenderung mudah mengadopsi inovasi karena memiliki wawasan yang luas dan rasa keingintahuan yang tinggi. Individu dengan pendidikan lebih rendah cenderung enggan menggunakan Internet, boleh jadi karena terdapat beberapa istilah yang menggunakan bahasa asing (Bahasa Inggris). Selain itu, orang terpelajar baik laki-laki maupun perempuan, cenderung lebih memiliki tingkat kognitif yang lebih baik (Mills, 2016), kosmopolit, atau extravert; mereka lebih proaktif dalam penggunaan inovasi, termasuk media sosial sebagai sebuah media baru untuk berkomunikasi, berinteraksi, maupun bertransaksi (Chen, 2011; Correa, Hinsley, & de Zúñiga, 2010). Wawasan, pengetahuan, maupun keingintahuan konsumen yang terdidik ini membantu menumbuhkan persepsi positif tentang Instagram (Cahyono, Safitri, & Pradesti, 2018). Implikasinya, segmen sosial ini akan dapat beradaptasi untuk menggunakan Instagram sebagai alat transaksi. Namun, dalam sebuah investigasi teoritis dan empiris, Bonfadelli (p. 65) mengabstraksikan temuannya,

More educated people use the Internet more actively and their use is more information oriented, whereas the less educated seem to be interested particularly in the entertainment functions of the Internet.

Temuan ini menunjukkan bahwa lepas dari tingkat pendidikan, individu memiliki ketertarikan dengan Internet, hanya berbeda orientasi pemenuhan informasinya; yang terpelajar mencari pengetahuan, sedang yang kurang terpelajar mencari hiburan. Bonfadelli menyimpulkan bahwa istilah ‘digital divide’ (kesenjangan digital) tidak mudah untuk dipahami dan perlu studi dari perspektif penggunanya. Oleh karena itu, faktor pendidikan kemungkinan tidak berasosiasi dengan persepsi tentang penggunaan Instagram untuk transaksi sayuran, mempertimbangkan bahwa Instagram juga memiliki aspek entertainment yang tinggi.

IMPLIKASI

Dalam paper ini, telah dibahas mengenai persepsi konsumen tentang karakteristik Instagram sebagai platform e-commerce untuk produk sayuran. Berdasarkan kajian pustaka yang telah dipaparkan tersebut, konsep karakteristik inovasi merupakan prediktor penting untuk difusi dan adopsi Instagram. Instagram berpotensi memiliki karakteristik yang positif, khususnya ditinjau dari aspek-aspek ekonomis (keuntungan relatif), teknis (kompleksitas, observabilitas, dan trialabilitas), dan sosio-psikologis (kompatibilitas). Namun diduga struktur persepsi konsumen tersebut kurang solid. Persepsi mereka kemungkinan terbelah karena perbedaan generasi, jender, dan tingkat edukasi penggunaannya. Generasi milenial— the digital native—dan segmen perempuan yang nampaknya berpeluang paling besar untuk mengadopsi Instagram untuk keperluan transaksi sayuran secara online karena adanya persepsi positif yang dimiliki mereka. Diperlukan studi lebih lanjut untuk memastikan kebenaran dari beberapa proposisi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abed, S. (2018). An empirical examination of Instagram as an s-commerce channel. *Journal of Advances in Management Research*, 15(2), 146-160.
- Agunga, A., Cahyono, E. D., Buck, E., & Scheer, S. (2016). Challenges of Implementing Participatory Extension in Indonesia. *The Journal of Communication and Media Research*, 8(1), 20-45.
- Akhmadi, H. (2018). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pemasaran Produk Pertanian (Studi Literatur). JCP Prosiding Seminar Nasional: Dukungan Teknologi Pertanian dan Sumberdaya Finansial dalam Usaha Mencapai Swasembada Pangan. Yogyakarta: UMY Repository.
- Alawiyah, F.M., & Cahyono, E.D. (2018). Persepsi petani terhadap introduksi inovasi agens hayati melalui kombinasi media demplot dan FFD. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 2(1), 57-61. Tersedia di <http://jepa.ub.ac.id/index.php/jepa/article/view/25>
- Alsaleh, D. A., Elliott, M. T., Fu, F. Q., & Thakur, R. (2019). Cross-cultural differences in the adoption of social media. *Journal of Research in Interactive Marketing*, 13(1), 119-140.

- Asano, E. (2017). How Much Time Do People Spend on Social Media? [Infographic]. <https://www.socialmediatoday.com/marketing/how-much-time-do-people-spend-social-media-infographic>
- Azam, M. S. (2015). Diffusion of ICT and SME performance. In *E-Services Adoption: Processes by Firms in Developing Nations*(pp. 7-290). Emerald Group Publishing Limited.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Produk Domestik Regional Bruto Indonesia Tahun 2018. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.
- Balkrishna, B. B., & Deshmukh, A. A. (2017). A study on role of social media in agriculture marketing and its scope. *Global Journal of Management and Business Research: E Marketing*, 17(1), 1-5.
- Bonfadelli, H. (2002). The Internet and knowledge gaps: A theoretical and empirical investigation. *European Journal of communication*, 17(1), 65-84.
- Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. *Journal of computer-mediated Communication*, 13(1), 210-230.
- Buckland, M (2017). *Information and Society*. Cambridge, MA: MIT Press. p. 22.
- Cahyono, E.D. (2014). *Challenges facing extension agents in implementing the participatory extension approach in Indonesia: A case study of Malang Regency in the East Java Region* (Doctoral dissertation, The Ohio State University).
- Cahyono, E.D., & Agung, R. (2016). Policy and practice of participatory extension in indonesia: A case study of extension agents in Malang District, East Java Province. *Journal of International Agricultural and Extension Education (JIAEE)*, 23(3), 38-57
- Direktorat Budidaya Tanaman Hias. (2008). *Petunjuk Lapangan SL GAP/SOP Bunga Potong Krisan*. Direktorat Jenderal Hortikultura. Kementerian Pertanian.
- Cahyono, E.D., Safitri, R., Pradesti, E. (2018, Desember). Persepsi tentang karakteristik teknis instagram sebagai media inovatif dalam transaksi sayuran secara online. Paper dipresentasikan dalam Seminar Nasional Pembangunan Pertanian III: Sumberdaya dan kebijakan Pembangunan Pertanian di Era Revolusi Industri 4.0, Universitas Brawijaya (pp. 259-266). Malang: Badan Penerbit Fakultas Pertanian UB.
- Casaló, L. V., Flavián, C., & Ibáñez-Sánchez, S. (2017). Antecedents of consumer intention to follow and recommend an Instagram account. *Online Information Review*, 41(7), 1046-1063.
- Chen, G. M. (2011). Tweet this: A uses and gratifications perspective on how active Twitter use gratifies a need to connect with others. *Computers in Human Behavior*, 27(2), 755-762.

- Correa, T., Hinsley, A. W., & De Zuniga, H. G. (2010). Who interacts on the Web?: The intersection of users' personality and social media use. *Computers in human behavior*, 26(2), 247-253.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS quarterly*, 319-340.
- Eze, S. C., Chinedu-Eze, V. C., & Bello, A. O. (2019). Determinants of dynamic process of emerging ICT adoption in SMEs—actor network theory perspective. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 10(1), 2-34.
- Fuchs, C. (2017). *Social media: A critical introduction*. Sage.
- Fitria, E.M. (2015). Dampak online shop di instagram dalam perubahan gaya hidup konsumtif perempuan shopaholic di Samarinda. *eJournal Ilmu Komunikasi*, 1(3), 117-128.
- Garcia, R., & Calantone, R. (2002). A critical look at technological innovation typology and innovativeness terminology: a literature review. *Journal of Product Innovation Management: An International Publication of the Product Development & Management Association*, 19(2), 110-132.
- Hootsuite & We Are Social. 2019. <https://andi.link/wp-content/uploads/2019/02/Hootsuite-We-are-Social-Indonesian-Digital-Report-2019-dikompresi.pdf>
- Indonesia's Horticultural Sector. 2019. http://www.gbgingonesia.com/en/agriculture/article/2016/indonesia_s_horticultural_sector_fruitful_opportunities_waiting_to_be_realised_11528.php
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. *Business horizons*, 53(1), 61.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2011). The early bird catches the news: Nine things you should know about micro-blogging. *Business horizons*, 54(2), 105-113.
- Kemp, S. (2018). Digital in 2018: World's internet users pass the 4 billion mark. *We are social*.
- Kietzmann, J. H., Hermkens, K., McCarthy, I. P., & Silvestre, B. S. (2011). Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. *Business horizons*, 54(3), 241-251.
- Kitchen, P. J., & Panopoulos, A. (2010). Online public relations: The adoption process and innovation challenge, a Greek example. *Public Relations Review*, 36(3), 222-229.
- Koçak, N. G., Kaya, S., & Erol, E. (2013). Social media from the perspective of diffusion of innovation approach. *The Macrotheme Review*, 2(3), 22-29.

- Krumm, J., Davies, N., & Narayanaswami, C. (2008). User-generated content. *Pervasive Computing*, 7(4), 10-11.
- Lathiya, A., Rathod, A., & Choudhary, K. (2015). Role of social media in agriculture. international. *Journal of Commerce and Business Management*, 8(2), 268-273.
- Lenhart, A., Madden, M., Smith, A., Purcell, K., Zickuhr, K., & Rainie, L. (2011). Teens, Kindness and Cruelty on Social Network Sites: How American Teens Navigate the New World of " Digital Citizenship". *Pew Internet & American Life Project*.
- Lundby, K. (Ed.). (2008). *Digital storytelling, mediatized stories: Self-representations in new media*. Peter Lang.
- Malahayatin, D.M., & Cahyono, E.D. (2017). Faktor kesesuaian dengan kebutuhan petani dalam keputusan adopsi inovasi pola tanam jajar legowo (Studi kasus petani padi di Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban). *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 2(1), 57-61. Tersedia di <http://jepa.ub.ac.id/index.php/jepa/article/view/9/0>
- Mannan, S., & Nordin, S. M. (2014). The Influence of Innovation Attributes on New Technologies Adoption by Paddy Farmers. *International Review of Management and Business Research*, 3(3), 1379.
- McGilvery, C. 2019. Promoting Responsible and Ethical Digital Citizens. https://www.educationworld.com/a_tech/responsible-student-technology-use.shtml
- Mills, K. L. (2016). Possible effects of internet use on cognitive development in adolescence. *Media and Communication*, 4(3), 4-12.
- Morris, W., & James, P. (2017). Social media, an entrepreneurial opportunity for agriculture-based enterprises. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 24(4), 1028-1045.
- Murray, J. (2011). Cloud network architecture and ICT-Modern network architecture. Retrieved from *TechTarget Expert Community*: <http://itknowledgeexchange.techtarget.com/modern-network-architecture/cloud-network-architecture-and-ict>.
- Nardi, B. A., Schiano, D. J., Gumbrecht, M., & Swartz, L. (2004). Why we blog. *Communications of The ACM*, 47(12), 41-46.
- Noviyanti, & Cahyono, E.D. (2016). *Persepsi dan tipe keputusan petani Madura terhadap inovasi agens hayati-PGPR*. Dalam E.D. Cahyono, dkk. (Eds.). *Proceeding Konferensi Nasional Penyuluhan & Komunikasi Pembangunan* (pp. 284-292). Malang: Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.

- Obar, J. A., & Wildman, S. S. (2015). Social media definition and the governance challenge-an introduction to the special issue. *Obar, JA and Wildman, S.(2015). Social media definition and the governance challenge: An introduction to the special issue. Telecommunications policy, 39(9), 745-750.*
- Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 1. *On the horizon, 9(5), 1-6.*
- Plensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Imigrants. Part II: Do they really think differently?.
- Qi, J., Zheng, X., Cao, P., & Zhu, L. (2019). The effect of e-commerce agribusiness clusters on farmers' migration decisions in China. *Agribusiness, 35(1), 20-35.*
- Rogers, E.M. (1983). *Diffusion of innovations (third edition)*. New York: Free Press.
- Rogers, E. M. (1995). Diffusion of Innovations: modifications of a model for telecommunications. In *Die diffusion von innovationen in der telekommunikation* (pp. 25-38). Springer, Berlin, Heidelberg.
- Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations. Free Press. *New York, 551.*
- Rooney, Jim (2014). Proceedings of the 11th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management and Organizational Learning. UK: Academic Conferences and Publishing International Limited. p. 261. ISBN 978-1-910309-71-1.
- Safitri, R., & Cahyono, E.D. (2017). Adopsi petani padi terhadap agens hayati dengan menggunakan 'mi-lo' (mikro organisme lokal). *Proceeding Seminar Nasional Pembangunan Pertanian II: Arah dan tantangan pembangunan pertanian dalam era SDG's* (pp. 207-212). Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Malang.
- Safitri, R., & Andriani, I. (2018). Pengaruh Pesan pada Instagram terhadap Mina Beli Sayur Organik. *Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi, 2(01), 92-99.*
- Sahin, I. (2006). Detailed review of Rogers' diffusion of innovations theory and educational technology-related studies based on Rogers' theory. *Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 5(2), 14-23.*
- Schilling, M. A. (2015). Technology shocks, technological collaboration, and innovation outcomes. *Organization Science, 26(3), 668-686.*
- Severin, W. J., & Tankard, J. W. J. (2010). Communication theories: Origins, methods and uses in the mass media (5th ed.). New York: Pearson Education Limited.
- Shao, G. (2009). Understanding the appeal of user-generated media: a uses and gratification perspective. *Internet research, 19(1), 7-25.*
- Startup Agribisnis. (2019). <https://jpp.go.id/ekonomi/pertanian/330791-startup-agribisnis-untuk-mendorong-peningkatan-produktifitas-dan-kesejahteraan-petani>

- Tan, S., & Chen, W. (2019). Can members' WeChat engagement affect relational outcomes in community-supported agriculture? Empirical evidence from China. *Agribusiness*, 35(1), 36-52.
- Teo, L. X., Leng, H. K., & Phua, Y. X. P. (2018). Marketing on Instagram: Social influence and image quality on perception of quality and purchase intention. *International Journal of Sports Marketing and Sponsorship*.
- Van Dijk, J. 1999. *The Network Society, Social aspects of the new media*. London: Thousand Oaks - New Delhi: Sage Publications.
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS quarterly*, 425-478.
- Wartella, E., Rideout, V., Montague, H., Beaudoin-Ryan, L., & Lauricella, A. (2016). Teens, health and technology: A national survey. *Media and communication*, 4(3), 13-23.
- White, D., Meyers, C., Doerfert, D., & Irlbeck, E. (2014). Exploring agriculturalists' use of social media for agricultural marketing. *Journal of Applied Communications*, 98(4), 72-85.
- Zang, G. 2002. The impact of the internet on the media ecology. In P.S.N Lee, L.Leung, & C.Y.K. So (Eds.), *Impact and issues in new media: Toward intelligent societies*. Cresskill, N.J: Hampton Press, Inc
- Zhang, K. Z., Lee, M. K., Cheung, C. M., & Chen, H. (2009). Understanding the role of gender in bloggers' switching behavior. *Decision Support Systems*, 47(4), 540-546.
- Zolkepli, I. A., & Kamarulzaman, Y. (2015). Social media adoption: The role of media needs and innovation characteristics. *Computers in Human Behavior*, 43, 189-209.

TINGKAT ADOPSI INOVASI PADA DAN PEMANFAATAN SUMBER INFORMASI MEDIA MASSA OLEH PETERNAK SAPI PERAH DI KOTA PADANG PANJANG, SUMATERA BARAT

Ediset ^{1*}, Amrizal Anas ¹, dan Edwin Heriyanto ¹

¹ Bagian Pembangunan dan Bisnis Peternakan
Fakultas Peternakan, Universitas Andalas, Padang

*Email : edisetjami80@gmailcom

ABSTRAK

Tempat pelaksanaan penelitian adalah daerah sentral peternakan sapi perah Sumatera Barat, yaitu di Kota Padang Panjang. Penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkatan adopsi inovasi pada aspek teknis usaha peternakan sapi perah dan pemanfaatan sumber informasi inovasi dari media massa oleh peternak sapi perah. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode survei dan analisa data sekunder. Sampel penelitian adalah seluruh peternak sapi perah yang ada di Kota Padang panjang, jumlah sampel ditetapkan dengan teknik Sampling Jenuh, dimana semua populasi dijadikan sampel sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 27 peternak. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif yang dihitung dengan menggunakan skala likert, dimana jawaban diberi skor dan persentase dan Selanjutnya nilai skor yang diperoleh akan dibandingkan dengan kategori yang telah ditetapkan oleh Ditjen Peternakan (1992). Penelitian menunjukkan hasil bahwa tingkat adopsi inovasi pada aspek teknis usaha peternakan sapi perah di Kota padang panjang berada pada kategori baik, dengan persentase rataan skor adalah 86.59% dan pemanfaatan sumber informasi inovasi oleh peternak dari media massa, baik media cetak, media elektronik maupun media sosial berada pada kategori sedang, dimana persentase rataan skornya adalah 60.93%.

Kata Kunci : Metode Penyuluhan, Bioteknologi Reproduksi, Usaha Peternakan Sapi,

PENDAHULUAN

Usaha peternakan sapi perah merupakan bagian dari usaha peternakan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memenuhi kebutuhan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan protein hewani dan penyediaan bahan baku bagi industri. Produk sapi perah seperti susu harus terjaga ketersediaannya secara kontinuitas agar terjadi keseimbangan antara permintaan dengan ketersediaannya, oleh karena itu permintaan susu

nasional yang terus meningkat setiap tahunnya, perlu pula diimbangi dengan peningkatan produksi susu secara nasional. Kondisi ini berbanding terbalik dengan situasi pada saat ini dimana Direktorat Jendral Peternakan (2010) mengatakan bahwa permintaan susu nasional sebesar 80% masih di impor dari luar negeri. Hal ini memberikan peluang bagi peternak domestik untuk meningkatkan populasi dan produktivitas sapi perah dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Upaya untuk menjaga produksi susu agar tetap stabil dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah lokasi dan penerapan inovasi. Peternakan sapi perah pada dasarnya tepat di lakukan di di daerah dataran tinggi, karena apabila dilakukan pada daerah dataran rendah akan menyebabkan produksi susu tidak maksimal karena energi ternak terkuras untuk menyesuaikan diri dengan suhu lingkungan , Phillip (2001) mengatakan bahwa salah satu kendala yang menonjol dalam pengembangan usaha sapi perah di daerah dataran rendah adalah faktor suhu udara yang relatif panas dan berdampak negatif terhadap kemampuan produksi sapi perah.

Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa daerah yang berada pada dataran tinggi, diantaranya adalah kota Padang Panjang. Kota padang panjang merupakan daerah sentra peternakan sapi perah di Sumatera Barat dengan pemeliharaan yang intensif dan termasuk skala usaha rakyat dengan kepemilikan kurang dari 20 ekor. Usaha peternakan sapi perah di tempat ini sama halnya dengan kondisi nasional, dimana populasi cenderung mengalami pengurangan dari tahun ke tahun, dimana tahun 2015 jumlah populasi 406 ekor, tahun 2016 berkurang menjadi 374 dan semakin berkurang pada tahun 2017 menjadi 341 ekor (Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang (2018).

Penurunan jumlah populasi seyogyanya akan berdampak terhadap penurunan jumlah produksi susu, untuk itu perlu upaya upaya khusus untuk memoderenisasi peternak sapi melalui adopsi inovasi pada usaha yang dijalani yang terkait dengan aspek teknis dari usaha peternakan sapi perah itu sendiri, baik itu inovasi yang berkaitan dengan bibit, pakan, pengelolaan, perkandangan maupun yang berkaitan dengan kesehatan ternak. Moderenisasi usaha peternakan sapi perah sudah sepatutnya dilakukan agar usaha dapat berjalan efektif dan produktif, efektif dalam usaha dan produktif di hasil usaha.

Keberhasilan usaha pada prinsipnya di tentukan oleh kemauan dari peternak untuk mengembangkan usahanya, disamping di bantu oleh pihak lain. Kemauan untuk memoderenisasi usaha adalah wujud proaktif peternak untuk merevitalisasi usaha secara

swadaya dengan memanfaatkan sumber informasi yang ada. Sumber informasi tentang inovasi seperti media massa merupakan fasilitas informasi yang dapat dimanfaatkan oleh oleh peternak untuk mendukung usahanya, baik itu berupa media cetak, media elektronik maupun yang dalam bentuk media sosial.

Usaha peternakan moderen itu tergambar dari kemauan yang tingi dari peternak untuk menjalankan usaha yang berbasis inovasi dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi untuk mendapat solusi dari permasalahan usaha yang ditemui, melalui pemanfaatan sumber informasi seperti media massa akan mengurangi ketergantungan peternak dari pihak lain sehingga pada gilirannya akan muncul peternak peternak yang tangguh dan mandiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dari penelitian ini, yaitu :

Bagaimana tingkat adopsi inovasi dan pemanfaatan media massa sebagai sumber informasi inovasi oleh peternak sapi perah di Kota Padang Panjang Sumatera Barat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat adopsi inovasi dan pemanfaatan media massa sebagai sumber informasi inovasi oleh peternak sapi perah di Kota Padang Panjang Sumatera Barat.

MATERI DAN METODE

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun 2017 di Kota Padang Panjang. Penetapan daerah ini sebagai lokasi penelitian karena merupakan daerah sentra peternakan sapi perah di Sumatera Barat dengan pemeliharaan yang

Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan variabel penelitian. Data primer adalah data tentang adopsi inovasi pada aspek teknis usaha peternakan sapi perah, seperti adopsi inovasi pada aspek bibit, pakan, pengelolaan, perkandangan dan kesehatan ternak, kemudian data primer tentang pemanfaatan media massa sebagai sumber informasi inovasi, baik itu media cetak, media

elektronik maupun media sosial. Untuk data sekunder dikumpulkan sesuai kebutuhan peneliti yang diperoleh dari instansi terkait dan literatur yang ada. Pengumpulan data dilakukan melalui *Personal Interview* terhadap seluruh responden dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuisisioner) melalui wawancara berstruktur dan dengan pengamatan langsung.

Populasi dan Sampel Penelitian

Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 27 peternak, yaitu seluruh peternak sapi perah yang sudah menjalankan usaha peternakannya secara intensif dan sudah memproduksi susu yang ada di Kota Padang Panjang.

Penentuan sampel dalam penelitian ini, digunakan teknik sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 27.

Metode Pengolahan dan Analisis Data

Untuk menjawab tujuan penelitian ini dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif, yang dihitung dengan menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang untuk kelompok tentang fenomena sosial (sugiyono,2014). Melalui skala likert, variabel akan diukur dan dijabarkan melalui indikator, Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Untuk analisis Kuantitatif maka jawaban diberi skor sebagai berikut :

1. Setuju (ST) : Skor 3
2. Ragu-Ragu (RR) : Skor 2
3. Tidak Setuju (TS) : Skor 1

Data aspek yang diperoleh , dikumpulkan dalam bentuk tabel, kemudian dihitung berdasarkan skor masing – masing sesuai dengan “Pedoman Identifikasi Faktor Penentu

Teknis Peternakan Ditjen Peternakan 1992". Selanjutnya nilai skor yang diperoleh akan dibandingkan dengan kategori yang telah ditetapkan oleh Ditjen Peternakan (1992) yaitu:

- a. Kategori baik, persentase yang diperoleh 81-100%
- b. kategori sedang, persentase yang diperoleh 60-80%
- c. kategori kurang, persentase yang diperoleh kecil dari 60% .

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Adopsi Inovasi Pada Aspek Teknis Usaha Peternakan Sapi Perah

Tabel 1. Persentase Rataan Skor dan Kategori Adopsi Inovasi Pada Usaha Peternakan Sapi Perah

No	Variabel	Skor	Total Skor	% Skor	Kategori
1	Bibit	156	160	97.50	Baik
2	Pakan	102	140	72.86	Sedang
3	Pengelolaan	132	148	89.19	Baik
4	Perkandangan	120	148	81.08	Baik
5	Kesehatan	144	156	92.31	Baik
% Rataan skor				86.59	Baik

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2017

Adopsi Inovasi Pada Aspek Bibit

Penelitian yang dilakukan di Kota Padang Panjang Sumatera Barat menunjukkan hasil bahwa peternak sapi perah sudah melakukan adopsi inovasi pada aspek bibit dengan baik, dimana persentase rataaan skor yang diperoleh adalah 97.50%. Rataan persentase skor ini apabila dibandingkan dengan kategori yang telah ditetapkan oleh Ditjen Peternakan (1992) berada pada kategori Baik, dimana kategori yang ditetapkan itu adalah : Kategori baik dengan persentase 81-100%, kategori sedang dengan persentase 60-80% dan kategori kurang dengan persentase kecil dari 60%.

Adopsi inovasi yang baik pada aspek teknis bibit menunjukkan bahwa peternak sapi perah di daerah penelitian sudah menjalankan usaha peternakannya sesuai dengan pedoman teknis bibit yang telah ditetapkan atau disarankan oleh Dinas pertanian dan Peternakan, dimana aspek teknis itu diantaranya adalah recording pemuliaan bibit, jenis bibit, seleksi bibit serta tampilan fisik dan reproduksi bibit. Kondisi ini menggambarkan

bahwa peternak sudah memiliki pengetahuan tentang bibit, baik yang berdasarkan dari pengalaman beternak maupun dari pengetahuan yang berasal dari pendidikan. Menurut Mardikanto (2009), hakikat pendidikan adalah untuk meningkatkan kemampuan manusia agar dapat mempertahankan atau bahkan memperbaiki mutu keberadaannya menjadi semakin baik.

Adopsi Inovasi Pada Aspek Pakan

Hasil penelitian terkait dengan aspek pakan ini menunjukkan hasil bahwa belum semua peternak sapi perah di Kota Padang Panjang yang mampu untuk mengadopsi inovasi yang terkait dengan pakan, persentase rata-ran skor hasil penelitian adalah 72.86%, hal ini jika dibandingkan dengan ketetapan Ditjen peternakan (1992), maka pada aspek pakan adopsi inovasi oleh peternak hanya berada pada kategori sedang, padahal pakan merupakan aspek yang paling penting dalam menjalankan usaha peternakan sapi. Menurut Sugeng (2004) pakan yang diberikan kepada ternak harus disesuaikan dengan tujuan, yaitu makanan perawatan untuk mempertahankan hidup dan kesehatan, dan makanan produksi untuk pertumbuhan dan penambahan berat.

Adopsi inovasi pada aspek pakan yang belum optimal salah satunya disebabkan oleh rendahnya kontribusi stake holder terkait (penyuluh) dalam mengintroduksi hal-hal yang berkaitan dengan pakan ternak sapi perah seperti: kandungan gizi dari pakan, formulasi pakan, jenis-jenis pakan, komposisi pakan dan inovasi di bidang pakan. Seyogyanya penyuluh peternakanlah yang berperan penting untuk merubah perilaku peternak, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak menerapkan menjadi menerapkan sampai terampil menerapkannya sendiri. Anwar (2009) mengatakan bahwa adopsi inovasi adalah terjadinya perubahan perilaku, baik pada aspek kognitif (pengetahuan), aspek afektif (sikap) maupun aspek psikomotor (keterampilan).

Adopsi inovasi Pada Pengelolaan

Adopsi inovasi pada pengelolaan sudah dilakukan secara baik oleh peternak sapi perah di daerah penelitian, hasil penelitian menunjukkan persentase rata-ran skor adalah 89.19% dan angka ini sudah berada kategori yang baik. Panduan *Good Dairy Farming*

Practices (GDFP) menunjukkan bahwa kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sapi perah adalah membersihkan sapi, membersihkan kandang, cara pemerahan, pemeliharaan pedet dan dara, pengeringan sapi laktasi, pencatatan usaha dan manajemen kotoran

Hasil ini menunjukkan bahwa peternak sudah mengadopsi inovasi berdasarkan panduan GDFP, dimana peternak di daerah penelitian sudah membersihkan kandang, membersihkan sapi, cara pemerahan serta pengelolaan yang baik pada sapi laktasi. Sudono (1999) menyarankan sebelum sapi diperah bagian badan sapi sekitar lipat paha dan bagian belakang harus dibersihkan untuk mencegah kotoran yang menempel pada bagian-bagian tersebut jatuh kedalam susu pada waktu sapi diperah dan cara mengeringkan sapi adalah dengan pemerahan berselang atau penghentian pemerahan secara mendadak.

Peternak di daerah penelitian juga sudah melakukan pencatatan yang baik terhadap usaha yang dijalankan, hal ini tentu sangat berguna untuk ekspansi usaha ke dalam bentuk yang lebih berkembang dan maju. Pencatatan ini juga tidak terlepas dari tujuan usaha yang sudah berorientasi bisnis dan sitem pemeliharaan yang intensif. Pentingnya pencatatan usaha bertujuan agar usaha yang dijalankan dapat terkontrol, terevaluasi dan diketahui perkembangannya (Hertanto *et. al.*, 2012).

Adopsi Inovasi Pada Perkandangan

Peternak sapi perah di daerah penelitian sudah mengadopsi inovasi yang terkait dengan perkandangan secara baik, hasil persentase rata-rata skor untuk perkandangan adalah 81.08%, itu artinya bila dibandingkan dengan pedoman teknis Ditjen Peternakan (1992) maka persentase rata-rata skor tersebut berada pada kategori baik, namun meskipun demikian pada drainase kandang serta peralatan kandang masih belum optimal dan lengkap.

Menurut Sugeng (2004), pembangunan kandang bertujuan untuk melindungi ternak terhadap gangguan luar yang merugikan, baik terhadap karena sengatan matahari, kedinginan, kehujanan, dan tiupan angin kencang. Kontruksi kandang harus kuat dan mudah dibersihkan serta sirkulasi udara yang lancar. Oleh karena itu, dalam pemilihan tempat perlu diperhatikan mengenai arah kandang, ventilasi, atap, dinding, dan lantai kandang.

Adopsi Inovasi Pada Pencegahan Penyakit

Penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil, dimana peternak sapi perah di daerah penelitian sudah melakukan adopsi inovasi pada aspek pencegahan penyakit dengan baik, dimana persentase rataan skor hasil penelitian pada pencegahan penyakit ini adalah 92.31%. Hasil ini menggambarkan bahwa peternak sapi perah sudah memiliki pengetahuan yang tentang hal hal yang berkaitan dengan upaya untuk pencegahan penyakit pada ternak sapi perah yang mereka pelihara, seperti teknik isolasi, kandang karantina, sanitasi dan vaksinasi. Abidin (2006) mengatakan bahwa upaya untuk pencegahan penyakit dapat dilakukan dengan kandang karantina, menjaga kebersihan sapi bakalan dan kandang, serta melakukan vaksinasi secara berkala.

Tingkat adopsi yang baik oleh peternak sapi perah tidak terlepas dari suporting oleh petugas Keswan (kesehatan hewan) yang ada di daerah penelitian, dimana di daerah penelitian terdapat sala satu Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) yang komfatibel di Sumatera Barat, dengan staf yang tersepesialisasi dibidangnya masing masing, terutama staf dengan bidang ilmu kedokteran hewan sebanyak 7 orang. Kehadiran para dokter hewan inilah yang paling banyak memberikan pengetahuan dan pengalaman pada peternak untuk melakukan tindakan pencegahan penyakit.

II. Pemanfaatan Media Massa Sebagai Sumber Informasi oleh Peternak Sapi Perah

Tabel 2. Peranan Media Masa pada Usaha Peternakan Sapi Perah

No	Jenis Media	n	Skor	Total Skor	% Skor	Kategori
1	Media Cetak	8	72	130	55.38	Kurang
	Majalah	6			41.54	
	Seminar	2			13.85	
2	Media Elektronik	13	102	140	72.86	Sedang
	Televisi	1			5.60	
	Internet	2			11.21	
	Televisi dan Internet	10			56.04	
3	Media Sosial	6	60	110	54.55	Kurang
	Facebook	3			27.27	
	BBM	1			9.09	
	Whatshapp	1			9.09	
	Facebook/Whatshapp	1			9.09	
	% Rataan Skor				60.93	Sedang

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2017

Pemanfaatan Media Cetak

Peternak sapi perah kurang memanfaatkan media cetak sebagai sumber informasi dalam menjalankan usaha peternakan mereka, hal ini terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan, dimana hanya 55.38% saja peternak yang memanfaatkan keberadaan media cetak sebagai sumber informasi dan jenis media cetak yang digunakan hanya majalah dan materi seminar, sedangkan surat kabar dan tabloid pertanian tidak sama sekali. Penyebab tidak adanya peternak yang mengakses surat kabar dan tabloid sebagai sumber informasi adalah kurangnya berita yang memuat informasi mengenai bidang peternakan.

Media cetak seperti surat kabar, tabloid, majalah dan materi seminar sebenarnya referensi utama yang semesti dapat dimanfaatkan oleh peternak sapi perah sebagai sumber informasi, karena media cetak dengan berbagai jenis tersebut tidak terlalu menuntut peternak, baik dari segi pengetahuan, biaya maupun waktu. Kelebihan surat kabar yaitu sifat beritanya tercetak, memungkinkan responden untuk membacanya kapan saja, sehingga dapat memanfaatkan waktu luangnya untuk memperoleh berbagai informasi melalui surat kabar (Effendy, 2000).

Pemanfaatan Media Elektronik

Penelitian menunjukkan hasil bahwa sebagian besar peternak sapi perah di daerah ini memanfaatkan media elektronik sebagai sumber informasi untuk mendukung usaha peternakan yang dijalani, hal ini terlihat dari persentase skor hasil penelitian yang diperoleh sebesar 72.86% dan berada pada kategori sedang. Jenis media elektronik yang banyak diakses oleh peternak adalah televisi dan internet dengan pesentase skor 56.04%, sedangkan radio sebagai sala satu jenis media elektronik tidak pernah dipergunakan peternak sebagai sumber informasi yang terkait dengan usaha peternakan sapi perah. Penyebab peternak tidak menggunakan radio sebagai sumber informasi adalah rendahnya minat peternak untuk mendengarkan radio, disamping keberadaan radio itu sendiri yang semakin berkurang di tengah masyarakat dan beritanya juga tidak sesuai dengan kebutuhan peternak.

Televisi dan internet merupakan jenis media elektronik yang sebagian besar dimanfaatkan oleh peternak, namun sudah barang tentu tidak semua peternak yang bisa mengakses kedua jenis sumber informasi tersebut, terutama internet. Internet hanya bisa diakses oleh peternak tertentu saja, maka untuk itu pemerintah harus dapat menyediakan

sumber informasi jenis lain terkait dengan usaha peternakan sapi perah, agar usaha ini dapat selalu berkembang. Ramírez dan Wendy (2004) mengatakan bahwa pemerintah perlu mendorong perluasan jaringan informasi dan penyiaran publik, khususnya di daerah-daerah yang masih terpencil untuk membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang luas secara cepat dan akurat.

Pemanfaatan Media Sosial

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan gambaran bahwa media sosial masih kurang dimanfaatkan oleh peternak sapi perah sebagai sumber informasi, hasil persentase skor penelitian adalah 54.55%. Kurangnya pemanfaatan media sosial ini sebagai sumber informasi tidak lepas dari kondisi dari peternak itu sendiri, dimana sebagian besar peternak sapi perah didaerah ini lebih banyak yang sudah berusia dewasa dan bahkan berusia lanjut, sehingga mereka lebih cenderung memanfaatkan sumber informasi dari sesama peternak saja, atau dari penyuluh atau fasilitator jenis lainnya.

Peternak yang berlandaskan dari pengalaman beternak ini sebaiknya juga berupaya dan belajar untuk memanfaatkan berbagai jenis sumber informasi yang ada, sehingga akan memperkaya referensi dan rujukan yang dipergunakan, dan hal tersebut akan berdampak positif terhadap usaha yang ditekuni. Mardikanto (2010) mengatakan semakin banyak ragam media yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkomunikasi akan memberikan pengaruh yang semakin baik, sebab selain jumlah informasi menjadi makin lengkap, biasanya juga lebih bermutu atau semakin memberikan kejelasan terhadap inovasi yang diterima.

KESIMPULAN

1. Adopsi inovasi pada aspek teknis pakan, bibit, pengelolaan, perkandangan dan pencegahan penyakit pada usaha peternakan sapi perah di Kota Padang Panjang sudah berada pada kategori baik dengan persentase rataan skor adalah 86.59%.

2. Pemanfaatan media massa seperti media cetak, media elektronik dan media sosial sebagai sumber informasi oleh peternak sapi perah di Kota Padang Panjang berada pada kategori sedang dengan persentase rataan skor adalah 60.93%

REFERENSI

- Abidin, Z. 2006. Penggemukan Sapi Potong. PT Agromedia Pustaka, Jakarta.
- Anwar, S; Madariza, F. dan Anas, A. 2009. Ilmu Penyuluhan Pertanian. Universitas Andalas, Padang.
- Ditjen Peternakan . 1992. Pedoman Identifikasi Faktor Penentu Teknis Peternakan . Proyek Peningkatan Produksi Peternakan . Diklat Peternakan. Jakarta.
- Effendy, O.U. 2000. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Citra Aditya Bakti.
- Hertanto, S.B., Widiati, R., Adiarto, 2012. Analisis ekonomi peternakan sapi perah rakyat dan strategi pengembangannya di dataran rendah. Buletin Peternakan 36(2): 129-140.
- Mardikanto. T. 2009. System Penyuluhan Pertanian. UNS Press. Surakarta
- 2010. Komunikasi Pembangunan. Surakarta: Sebelas Maret university press.
- Ramírez, R. and Wendy, Q. 2004. Communication For Development. International Development Research Centre and the Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2004
- Siregar, Basya, S. 2013. Bisnis Penggemukan Sapi. Jakarta Timur: Penebar Swadaya.
- Soedarmanto. 2003. Buku Referensi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Teori dan Penerapannya. Fakultas Pertanian. Universitas Brawijaya. Malang.
- Sudono, A., 1999. Ilmu Produksi Ternak Perah. Bogor. Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.
- Sugeng, Y. B. 2004. Beternak Sapi Potong. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.
- Wirartha, I. M. 2006. Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi. CV. Andi Offset, Yogyakarta.

ANALISIS HUBUNGAN KREDIBILITAS KOMUNIKATOR DENGAN PERILAKU MASYARAKAT TENTANG BENCANA GEMPA BUMI DAN *TSUNAMI* DI KELURAHAN AIR MANIS KOTA PADANG

Gisky Andria Putra, S.I.Kom, M.Si ^{1*}

¹ STIKes Perintis Padang

* Email: gisky.andria@gmail.com

ABSTRAK

Kota Padang memiliki potensi bencana paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang ada di provinsi Sumatera Barat. Letaknya yang berdekatan dengan pantai menjadikan kota ini sangat rentan akan bencana gempa bumi dan tsunami. Dalam hal ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Padang telah membentuk Kelompok Siaga Bencana (KSB) sebagai perpanjangan tangannya di setiap kelurahan. Selain itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bernama Mercy Corps juga bersinergi dengan KSB dalam penyebarluasan informasi tentang bencana gempa bumi dan *tsunami*. Penelitian ini adalah penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif. Responden berjumlah 88 responden. Teknik analisis data menggunakan analisis korelasi Somers'd. Hasil penelitian menunjukkan, penilaian masyarakat atas kredibilitas komunikator termasuk ke dalam kategori baik. Tingkat kognitif masyarakat tentang bencana gempa bumi dan *tsunami* berada pada kategori tinggi, tingkat afektif masyarakat berada pada kategori sangat tinggi, dan tingkat psikomotor masyarakat berada pada kategori sangat tinggi. Kredibilitas komunikator memiliki hubungan signifikan yang positif terhadap psikomotor.

Kata kunci : Kredibilitas Komunikator, Perilaku Masyarakat, Gempa Bumi, *Tsunami*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki wilayah yang luas dan terletak di garis khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera, berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi. Indonesia berada di atas lempeng benua yang aktif dan berjejer deretan gunung api yang sangat aktif yang disebut dengan ring of fire. Kerentanan Indonesia terhadap bencana dipengaruhi oleh berbagai

faktor, antara lain faktor geografi, geologi, hidrometeorologi, demografi, lingkungan hidup, dan tata lahan (Ramli, 2010: 5).

Salah satu daerah yang berada di negara Indonesia yang memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap bencana adalah kota Padang. Kota Padang merupakan kota terbesar di pantai barat pulau Sumatera sekaligus ibu kota dari provinsi Sumatera Barat. Kota ini memiliki wilayah seluas 694,96 km² dengan kondisi geografi berbatasan dengan lautan dan dikelilingi oleh perbukitan dengan ketinggian mencapai 1.853 mdpl (meter di atas permukaan laut). Adapun jumlah penduduk di kota ini pada tahun 2015 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) kota Padang dalam buku Padang Dalam Angka 2016 adalah sebanyak 902.413 jiwa.

Dalam mengurangi risiko (mitigasi) bencana, sangat penting bagi pemerintah beserta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Padang dan juga pihak terkait lainnya untuk dapat melakukan berbagai upaya, seperti pembangunan fasilitas dan lingkungan yang berbasis mitigasi (pengurangan risiko) bencana, serta dukungan dari sektor regulasi dan perencanaan. Di samping pembangunan fisik, pembangunan manusia menjadi hal penting lainnya dalam upaya pengurangan risiko (mitigasi) bencana. Salah satunya adalah dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa saja yang harus dilakukan ketika bencana datang, bagaimana tanda-tanda sebelum bencana datang dan berbagai informasi lain yang bermanfaat bagi masyarakat.

Informasi tentang kebencanaan dapat disebarluaskan melalui kegiatan komunikasi. Sebagai salah satu bentuk upaya pengurangan risiko (mitigasi) bencana, kegiatan komunikasi tentang kebencanaan ini bertujuan untuk menekan atau mengurangi dampak-dampak serta kerugian-kerugian yang disebabkan oleh bencana. Menurut Everett M. Rogers (Cangara, 2013: 33), komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka.

Poin terpenting dalam menyebarluaskan informasi tentang kebencanaan melalui kegiatan komunikasi adalah, komunikator (Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Padang serta pihak-pihak terkait) harus memiliki kredibilitas, agar tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai sepenuhnya. Hal ini perlu untuk di analisis sehingga hasil

penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk melaksanakan kegiatan diseminasi informasi tentang kebencanaan ke depannya.

a. Kredibilitas Komunikator

Sebagai pelaku utama dalam aktivitas komunikasi, komunikator memegang peranan yang sangat penting. Untuk itu, seorang komunikator yang bertindak sebagai ujung tombak suatu program harus terampil dalam berkomunikasi, kaya ide, serta penuh daya kreativitas (Cangara, 2013: 108). Tingkat kepercayaan orang lain kepada dirinya (kredibilitas). Kredibilitas adalah seperangkat persepsi tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki seorang komunikator sehingga bisa diterima oleh target sasaran. Berlo (1962) seorang pakar komunikasi dari *Michigan State University* menambahkan bahwa kredibilitas seorang komunikator bisa timbul jika ia memiliki keterampilan berkomunikasi (*communication skills*), pengetahuan yang luas tentang materi yang dibawakannya (*knowledge*), sikap jujur dan bersahabat (*attitude*) serta mampu beradaptasi dengan sistem sosial budaya (*social and cultural system*) masyarakat yang dihadapinya (Cangara, 2013: 108-109).

b. Perilaku

Benyamin Bloom (1908) seorang ahli psikologi pendidikan membagi perilaku manusia ke dalam tiga domain, ranah, atau kawasan yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor (Notoatmodjo, 2003: 121). Berikut ini penjabaran terhadap masing-masingnya.

1. Ranah Kognitif

Pada ranah ini terdapat tingkatan yang mulai dari hanya bersifat pengetahuan tentang fakta-fakta sampai kepada proses intelektual yang tinggi yaitu dapat mengevaluasi sejumlah fakta (Suparno, 2001: 6).

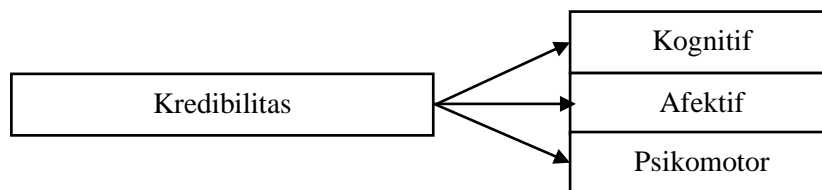
2. Ranah Afektif

Sikap merupakan respon yang masih tertutup dari seseorang, terhadap suatu stimulus atau objek. Dalam taksonomi yang disusun oleh Krathwol dan Bloom & Masia (1964), sikap disusun lagi sedemikian rupa sehingga menunjukkan tahapan yang hierarkis (Suparno, 2001: 11).

3. Ranah Psikomotor

Belajar psikomotor menekankan keterampilan motorik yaitu bekerja dengan benda-benda atau aktivitas yang memerlukan koordinasi syaraf dan otot. Untuk menjelaskan konsep tersebut digunakan contoh kegiatan berbicara, menulis, berbagai aktivitas pendidikan jasmani, dan program-program keterampilan (Suparno, 2001: 11).

Penjabaran konsep di atas dapat di sederhanakan dengan kerangka konseptual seperti di bawah ini.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Pada akhirnya, peneliti tertarik untuk meneliti tentang kredibilitas komunikator serta hubungannya dengan perilaku masyarakat kelurahan Air Manis kota Padang terhadap bencana gempa bumi dan *tsunami*. Peneliti memilih bencana gempa bumi dan *tsunami* dikarenakan oleh bencana tersebut memiliki potensi yang paling tinggi untuk terjadi di kota Padang. Adapun judul penelitian ini adalah **Analisis Hubungan Kredibilitas Komunikator Dengan Perilaku Masyarakat Tentang Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kelurahan Air Manis Kota Padang.**

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penilaian masyarakat terhadap kredibilitas komunikator (Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Padang dan pihak terkait) dalam menyebarkan informasi tentang bencana gempa bumi dan *tsunami* kepada masyarakat di kelurahan Air Manis kota Padang?

2. Bagaimana gambaran perilaku masyarakat tentang bencana gempa bumi dan *tsunami* kepada masyarakat di kelurahan Air Manis kota Padang
3. Bagaimana hubungan kredibilitas komunikator (Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Padang dan pihak terkait) dengan perilaku masyarakat di kelurahan Air Manis kota Padang tentang bencana gempa bumi dan *tsunami*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh deskripsi penilaian masyarakat terhadap kredibilitas komunikator (Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Padang dan pihak terkait) dalam menyebarkan informasi tentang bencana gempa bumi dan *tsunami* kepada masyarakat di kelurahan Air Manis kota Padang.
2. Untuk memperoleh deskripsi perilaku masyarakat tentang bencana gempa bumi dan *tsunami* kepada masyarakat di kelurahan Air Manis kota Padang.
3. Untuk menganalisis hubungan kredibilitas komunikator (Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Padang dan pihak terkait) dengan perilaku masyarakat di kelurahan Air Manis kota Padang tentang bencana gempa bumi dan *tsunami*.

METODE PENELITIAN

A. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kelurahan Air Manis kota Padang. Peneliti memilih kelurahan Air Manis kota Padang sebagai lokasi penelitian dikarenakan lokasi ini merupakan salah satu lokasi yang aktif melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kebencanaan, seperti Kelompok Siaga Bencana (KSB) dan Mercy Corps yang cukup aktif melakukan penyebaran informasi tentang bencana gempa bumi dan *tsunami* melalui kegiatan komunikasi kepada masyarakat setempat. Di samping itu, lokasi ini juga merupakan salah satu lokasi objek wisata yang ada di kota Padang, yaitu batu Malin

Kundang dan pantai Air Manis. Sebagai tempat wisata, tentunya banyak pengunjung yang berdatangan setiap harinya ke lokasi ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun dan Effendi, 1989: 3). Sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika (Azwar, 2007: 5).

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 80). Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian (Riduwan, 2009: 6).

Berdasarkan data penduduk yang diperoleh dari kelurahan Air Manis, kota Padang, jumlah responden yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah laki-laki sebanyak 337 orang dan perempuan sebanyak 395 orang. Jadi total responden yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada lokasi ini adalah $337+395=732$ orang.

2. Sampel

Jumlah besaran sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin. Dengan demikian, maka dari jumlah populasi 732 diperoleh ukuran sampel sebesar 87,98 atau 88 sampel penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yang merupakan bagian dari

nonprobability sampling. Teknik *purposive* sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013: 85). Peneliti menetapkan 1 (satu) pertimbangan atau kriteria bagi responden, yaitu responden yang pernah mengikuti atau menerima informasi tentang bencana gempa bumi dan *tsunami* yang diadakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Padang dan/atau pihak terkait lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data ini berupa informasi yang diperoleh melalui keterangan-keterangan dari masyarakat berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya (Sugiyono, 2013: 142). Jenis kuesioner (angket) pada penelitian ini adalah kuesioner (angket) tertutup, di mana jenis kuesioner (angket) ini mempunyai bentuk-bentuk pertanyaan seperti, ya, tidak, pilihan ganda, skala penilaian dan daftar cek (Usman, 2011: 59).

2. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, *website*, serta bahan acuan lain (jurnal, skripsi, tesis) yang relevan dengan materi penelitian untuk mendukung hasil penelitian ini.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui keterangan-keterangan dari masyarakat berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan atau pernyataan yang diajukan dalam kuesioner diolah dengan menggunakan software SPSS versi 22. Untuk mendeskripsikan setiap variabel menggunakan analisis deskriptif, sedangkan untuk melihat hubungan kredibilitas komunikator dengan perilaku masyarakat, menggunakan analisis Korelasi *Somers'd*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Air Manis terletak di kecamatan Padang Selatan, kota Padang, provinsi Sumatera Barat, negara Indonesia. Secara geografis kecamatan Padang Selatan terletak pada 00 58' lintang selatan dan 1000 21" 11' bujur timur. Kecamatan ini memiliki batas wilayah :

- Utara : Kec. Padang Barat dan Kec. Padang Timur
- Selatan : Samudera Indonesia
- Timur : Kec. Lubuk Begalung
- Barat : Samudera Indonesia

Adapun luas wilayah kecamatan ini adalah 10,03 km², yang terdiri dari 12 kelurahan dengan suhu udara antara 22⁰C – 31,7⁰C serta tinggi daerah antara 0 – 322 mdpl (meter di atas permukaan laut). Kelurahan Air Manis merupakan kelurahan nomor 4 paling luas di kecamatan Padang Selatan dengan luas wilayah 1,19 km². Kelurahan ini terdiri dari 6 RT (rukun tangga) dan 2 RW (rukun warga).

B. Deskripsi Kredibilitas Komunikator (BPBD Dan Pihak Terkait) dan Perilaku Masyarakat

1. Kredibilitas Komunikator

Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat kepercayaan masyarakat kelurahan Air Manis, kota Padang terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Padang serta pihak terkait lainnya (Kelompok Siaga Bencana dan Mercy Corps) selaku komunikator dalam menyebarluaskan informasi tentang bencana gempa bumi dan tsunami, sebanyak 1 responden menilai sangat tidak baik, 3 responden menilai tidak baik, 49 responden menilai baik, dan 35 responden menilai sangat baik. Jika dipersentasekan, maka sebesar 1,1 % menilai sangat tidak baik, 3,4 % menilai tidak baik, 55,7 % menilai baik, dan 39,8 % menilai sangat baik. Responden terbanyak menilai kredibilitas komunikator termasuk ke dalam kategori baik, yaitu sebanyak 49 orang (55,7 %) dan responden paling

sedikit menilai kredibilitas komunikator termasuk ke dalam kategori sangat tidak baik, yaitu sebanyak 1 orang (1,1 %).

Tabel 1. Penilaian responden terhadap kredibilitas komunikator

Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Baik	1	1,1
Tidak Baik	3	3,4
Baik	49	55,7
Sangat Baik	35	39,8
Total	88	100,0

2. Perilaku

a. Kognitif

Dari data yang diperoleh, tingkat kognitif masyarakat kelurahan Air Manis kota Padang tentang bencana gempa bumi dan *tsunami*, sebanyak 4 responden memiliki tingkat kognitif rendah, sebanyak 52 responden memiliki tingkat kognitif tinggi, dan sebanyak 32 responden memiliki tingkat kognitif sangat tinggi. Persentase tingkat kognitif masyarakat kelurahan Air Manis kota Padang adalah sebagai berikut, sebesar 4,5 % memiliki tingkat kognitif rendah, sebesar 59,1 % memiliki tingkat kognitif tinggi, dan sebesar 36,4 % memiliki tingkat kognitif sangat tinggi. Jumlah responden terbanyak memiliki tingkat kognitif tinggi, yaitu sebanyak 52 responden (59,1 %). Sedangkan jumlah responden paling sedikit memiliki tingkat kognitif rendah, yaitu sebanyak 4 responden (4,5 %).

Tabel 2. Tingkat kognitif responden tentang bencana gempa bumi dan *tsunami*

Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Rendah	4	4,5
Tinggi	52	59,1
Sangat Tinggi	32	36,4
Total	88	100,0

b. Afektif

Hasil pengukuran tingkat afektif masyarakat Kelurahan Air Manis kota Padang terhadap bencana gempa bumi dan *tsunami* menunjukkan bahwa, sebanyak 1 responden memiliki tingkat afektif yang rendah, sebanyak 8 responden memiliki tingkat afektif yang tinggi, dan sebanyak 79 responden memiliki tingkat afektif sangat tinggi. Persentase dari pengukuran tingkat afektif ini adalah sebesar 1,1 % memiliki tingkat afektif yang rendah, sebesar 9,1 % memiliki tingkat afektif yang tinggi, dan sebesar 89,8 % memiliki tingkat afektif yang sangat tinggi terhadap bencana gempa bumi dan *tsunami*. Jumlah responden terbanyak memiliki tingkat afektif sangat tinggi terhadap bencana gempa bumi dan *tsunami*, yaitu sebanyak 79 responden (89,9 %). Sedangkan jumlah responden paling sedikit memiliki tingkat afektif rendah terhadap bencana gempa bumi dan *tsunami*, yaitu sebanyak 1 responden (1,1 %).

Tabel 3. Tingkat afektif responden terhadap bencana gempa bumi dan *Tsunami*

Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Rendah	1	1,1
Tinggi	8	9,1
Sangat Tinggi	79	89,8
Total	88	100,0

c. Psikomotor

Dari data yang diperoleh, tingkat psikomotor masyarakat kelurahan Air Manis kota Padang terhadap bencana gempa bumi dan *tsunami*, sebanyak 1 responden memiliki tingkat psikomotor sangat rendah, sebanyak 14 responden memiliki tingkat psikomotor tinggi, dan sebanyak 73 responden memiliki tingkat psikomotor sangat tinggi. Persentase tingkat psikomotor masyarakat kelurahan Air Manis kota Padang adalah sebagai berikut, sebesar 1,1 % memiliki tingkat psikomotor sangat rendah, sebesar 15,9 % memiliki tingkat psikomotor tinggi, dan sebesar 83 % memiliki tingkat psikomotor sangat tinggi. Jumlah responden terbanyak memiliki tingkat psikomotor sangat tinggi, yaitu sebanyak 73

responden (83 %). Sedangkan jumlah responden paling sedikit memiliki tingkat psikomotor sangat rendah, yaitu sebanyak 1 responden (1,1 %).

Tabel 4. Tingkat psikomotor responden terhadap bencana gempa bumi dan *tsunami*

Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Rendah	1	1,1
Tinggi	14	15,9
Sangat Tinggi	73	83,0
Total	88	100,0

C. Hubungan Kredibilitas Komunikator Dengan Perilaku Masyarakat

1. Hubungan Antara Kredibilitas Komunikator Dengan Kognitif

Uji koefisien korelasi yang pertama dilakukan untuk menjelaskan hubungan antara kredibilitas komunikator dengan tingkat afektif masyarakat kelurahan Air Manis kota Padang terhadap bencana gempa bumi dan *tsunami*.

Tabel 5. Hasil analisis korelasi *somers' d* antara kredibilitas komunikator dengan tingkat kognitif masyarakat tentang bencana gempa bumi dan *tsunami*

Kognitif	Kredibilitas				Total	r	sig
	Sangat Tidak Baik	Tidak Baik	Baik	Sangat Baik			
Rendah	0	0	2	2	4	-	0,952
Tinggi	1	3	27	21	52		
Sangat Tinggi	0	0	20	12	32		
Total	1	3	49	35	88		

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa masyarakat kelurahan Air Manis yang memiliki tingkat kognitif rendah tentang bencana gempa bumi dan *tsunami*, menilai bahwa kredibilitas komunikator (BPBD dan pihak terkait) baik adalah sebanyak 2 responden dan sangat baik sebanyak 2 responden. Kemudian, masyarakat yang memiliki tingkat kognitif tinggi, menilai bahwa kredibilitas komunikator (BPBD dan pihak terkait) sangat tidak baik adalah sebanyak 1 responden, tidak baik sebanyak 3 responden, baik

sebanyak 27 responden, dan sangat baik sebanyak 21 responden. Selanjutnya, masyarakat yang memiliki tingkat kognitif sangat tinggi, menilai bahwa kredibilitas komunikator (BPBD dan pihak terkait) baik adalah sebanyak 20 responden dan sangat baik sebanyak 12 responden.

Untuk uji korelasi, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,952 pada tingkat taraf kepercayaan 90% atau taraf kesalahan sebesar 10%. Oleh karena nilai signifikan $0,952 > 0,1$ sehingga H_0 diterima, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kredibilitas komunikator dengan tingkat kognitif masyarakat tentang bencana gempa bumi dan *tsunami*. Artinya, keahlian berkomunikasi (*communication skills*), pengetahuan yang luas (*knowledge*), sikap jujur dan bersahabat (*attitude*), serta kemampuan beradaptasi dengan sistem sosial budaya (*social and cultural system*) yang dimiliki oleh komunikator, tidak berhubungan signifikan dengan tingkat kognitif masyarakat tentang bencana gempa bumi dan *tsunami* di kelurahan Air Manis kota Padang.

2. Hubungan Antara Kredibilitas Komunikator Dengan Afektif

Uji koefisien korelasi yang kedua dilakukan untuk menjelaskan hubungan antara kredibilitas komunikator dengan tingkat afektif masyarakat kelurahan Air Manis kota Padang terhadap bencana gempa bumi dan *tsunami*.

Tabel 6. Hasil analisis korelasi *somers' d* antara kredibilitas komunikator dengan tingkat afektif masyarakat terhadap bencana gempa bumi dan *tsunami*

Afektif	Kredibilitas				Total	r	sig
	Sangat Baik	Tidak Baik	Tidak Baik	Sangat Baik			
Rendah	0	0	0	1	1	-	0,544
Tinggi	1	0	3	4	8		
Sangat Tinggi	0	3	46	30	79		
Total	1	3	49	35	88		

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa masyarakat kelurahan Air Manis yang memiliki tingkat afektif rendah terhadap bencana gempa bumi dan *tsunami*, menilai bahwa kredibilitas komunikator (BPBD dan pihak terkait) sangat baik adalah sebanyak 1

responden. Kemudian, masyarakat yang memiliki tingkat afektif tinggi menilai bahwa kredibilitas komunikator (BPBD dan pihak terkait) sangat tidak baik adalah sebanyak 1 responden, baik sebanyak 3 responden, dan sangat baik sebanyak 4 responden. Selanjutnya, masyarakat yang memiliki tingkat afektif sangat tinggi, menilai bahwa kredibilitas komunikator (BPBD dan pihak terkait) tidak baik adalah sebanyak 3 responden, baik sebanyak 46 responden dan sangat baik sebanyak 30 responden.

Untuk uji korelasi, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,544 dengan tingkat taraf kepercayaan 90% atau taraf kesalahan sebesar 10%. Oleh karena nilai signifikan $0,544 > 0,1$ sehingga H_0 diterima, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kredibilitas komunikator dengan tingkat afektif masyarakat tentang bencana gempa bumi dan *tsunami*. Artinya, keahlian berkomunikasi (*communication skills*), pengetahuan yang luas (*knowledge*), sikap jujur dan bersahabat (*attitude*), serta kemampuan beradaptasi dengan sistem sosial budaya (*social and cultural system*) yang dimiliki oleh komunikator, tidak berhubungan signifikan dengan tingkat afektif masyarakat terhadap bencana gempa bumi dan *tsunami* di kelurahan Air Manis kota Padang.

3. Hubungan Antara Kredibilitas Komunikator Dengan Psikomotor

Uji koefisien korelasi yang ketiga dilakukan untuk menjelaskan hubungan antara kredibilitas komunikator dengan tingkat psikomotor masyarakat kelurahan Air Manis kota Padang terhadap bencana gempa bumi dan *tsunami*.

Tabel 7. Hasil analisis korelasi *somers' d* antara kredibilitas komunikator dengan tingkat psikomotor masyarakat terhadap bencana gempa bumi dan *tsunami*

Psikomotor	Kredibilitas				Total	r	sig
	Sangat Tidak Baik	Tidak Baik	Baik	Sangat Baik			
Sangat Rendah Tinggi	0	0	1	0	1	0,261	0,090
Sangat Tinggi	1	2	7	4	14		
Total	0	1	41	31	73		
	1	3	49	35	88		

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa masyarakat kelurahan Air Manis yang memiliki tingkat psikomotor sangat rendah terhadap bencana gempa bumi dan *tsunami*, menilai bahwa kredibilitas komunikator (BPBD dan pihak terkait) baik adalah sebanyak 1 responden. Kemudian, masyarakat yang memiliki tingkat psikomotor tinggi, menilai bahwa kredibilitas komunikator (BPBD dan pihak terkait) sangat tidak baik adalah sebanyak 1 responden, tidak baik sebanyak 2 responden, baik sebanyak 7 responden, dan sangat baik sebanyak 4 responden. Selanjutnya, masyarakat yang memiliki tingkat psikomotor sangat tinggi, menilai bahwa kredibilitas komunikator (BPBD dan pihak terkait) tidak baik adalah sebanyak 1 responden, baik sebanyak 41 responden, dan sangat baik sebanyak 31 responden.

Untuk uji korelasi, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,090 dengan tingkat taraf kepercayaan 90% atau taraf kesalahan sebesar 10%. Oleh karena nilai signifikan $0,090 < 0,1$ sehingga H_0 ditolak, terdapat hubungan yang signifikan antara kredibilitas komunikator dengan tingkat psikomotor masyarakat terhadap bencana gempa bumi dan *tsunami*. Artinya, keahlian berkomunikasi (*communication skills*), pengetahuan yang luas (*knowledge*), sikap jujur dan bersahabat (*attitude*), serta kemampuan beradaptasi dengan sistem sosial budaya (*social and cultural system*) yang dimiliki oleh komunikator, memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat psikomotor masyarakat terhadap bencana gempa bumi dan *tsunami* di kelurahan Air Manis kota Padang. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,261 menjelaskan hubungan positif atau searah yang rendah. Dengan demikian, maka semakin baik kredibilitas seorang komunikator maka semakin tinggi tingkat psikomotor masyarakat ataupun sebaliknya.

Hasil penelitian terdahulu menyebutkan bahwa kepercayaan (kredibilitas) yang besar akan dapat meningkatkan daya perubahan sikap, sedangkan kepercayaan yang kecil akan mengurangi daya perubahan yang menyenangkan (Effendy, 2003: 44). Berbeda dengan hasil penelitian terdahulu, pada penelitian ini kredibilitas komunikator tidak berhubungan signifikan dengan sikap (afektif), namun berhubungan signifikan yang positif atau searah dengan psikomotor. Hal ini dapat terjadi karena faktor ketakutan ataupun kepanikan yang ada pada diri individu dalam masyarakat, sehingga membuat masyarakat tersebut mampu melakukan tindakan-tindakan mengurangi risiko (mitigasi) bencana gempa bumi dan *tsunami* sesuai dengan instruksi atau pesan yang disampaikan oleh

komunikator tanpa perlu memikirkan dan menyikapi instruksi atau pesan tersebut terlebih dulu.

KESIMPULAN

Mayoritas masyarakat kelurahan Air Manis kota Padang menilai bahwa kredibilitas komunikator berada pada kategori baik. Kemudian, tingkat kognitif mayoritas masyarakat tentang bencana gempa bumi dan *tsunami* masuk ke dalam kategori tinggi, tingkat afektif mayoritas masyarakat masuk ke dalam kategori sangat tinggi, dan tingkat psikomotor mayoritas masyarakat masuk ke dalam kategori sangat tinggi. Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa kredibilitas komunikator memiliki hubungan signifikan yang positif terhadap psikomotor. Artinya, semakin baik kredibilitas komunikator maka semakin tinggi tingkat psikomotor masyarakat dalam upaya mengurangi risiko bencana gempa bumi dan *tsunami* di kelurahan air manis kota Padang. Untuk penelitian selanjutnya, dapat menganalisis hubungan daya tarik komunikator dengan perilaku masyarakat tentang bencana gempa bumi dan *tsunami*.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, S. 2007. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik Kota Padang. 2016. Kota Padang Dalam Angka. Padang: BPS Kota Padang
- Berlo, D.K. 1960. *The Process of Communication : An Introduction to Theory and Practice*. Holt, Rinehart and Winston, New York.
- Cangara, H. 2013. Perencanaan dan Strategi Komunikasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Notoatmodjo, S. 2003. Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ramli, S. 2010. Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management). Jakarta: Dian Rakyat.
- Riduwan. 2009. Pengantar Statistika Sosial. Bandung: Alfabeta.
- Singarimbun, M. dan S. Effendi. 1989. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suparno, A.S. 2001. Membangun Kompetensi Belajar. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Usman, H. dan P.S. Akbar. 2011. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.

JARINGAN KOMUNIKASI ANTAR USAHA KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM PRAKTIK EKONOMI FESTIVAL KABUPATEN BANYUWANGI

Iwan Nurhadi^{1*}, Titik Sumarti²

¹ Mahasiswa Program Doktor Sosiologi Pedesaan - Institut Pertanian Bogor Universitas dan Staf
Pengajar pada Jurusan Sosiologi Universitas Brawijaya

² Dosen Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor

*Email : iwan.nurhadi@ub.ac.id

ABSTRAK

Kabupaten Banyuwangi saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di bidang pariwisata melalui berbagai *event* festival, dampaknya tentunya semakin meningkatnya partisipasi berbagai pihak. Nee (2003) menyatakan bahwa relasi antara lembaga formal dan lembaga non formal sosial ekonomi dapat dilakukan melalui perspektif institusi baru dalam memahami fenomena ekonomi keseharian masyarakat. Tulisan ini mensoroti jejaring komunikasi sosial melalui pendekatan studi kasus masyarakat desa Kemiren, kecamatan Glagah, kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu ikon destinasi wisata di wilayah tersebut. Hasil kajian temporal menunjukkan bahwa nilai-nilai rasionalitas dalam jaringan komunikasi UMKM pada masyarakat di Desa Kemiren tidak saja berkarakter prinsip utilitarian ekonomis, namun lebih dari itu karena adanya dorongan memperkuat identitas etnis. Kekuatan ikatan antar UMKM menunjukkan ikatan yang tergolong kuat, namun yang unik ikatan yang tergolong lemah justru mampu memperkuat kepentingan ekonomi dan menjadi bagian yang saling komplementer dalam pengembangan desa wisata adat Osing di desa Kemiren. Di tingkat meso, agensi aktor pimpinan daerah (Bupati Banyuwangi dan Tokoh Adat Osing) menjadi kekuatan simpul ikatan melalui kebijakannya dan konsolidasi nilai-nilai budaya Osing. Dengan menggunakan perangkat teoritis yang dikemukakan Victor Nee (2003) tentang institusionalisme ekonomi baru, maka jaringan komunikasi antar UMKM di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan karekatersitik *close-coupling* dalam bentuk penyesuaian aturan-aturan fomal dengan nilai adat Suku Osing.

Kata kunci: Jaringan Komunikasi, desa wisata adat Osing, Institusionalisme ekonomi baru.

PENDAHULUAN

Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Propinsi Jawa Timur yang mencakup area 5.782,50 km² dengan karakteristik agroekologi beragam. Kabupaten Banyuwangi merupakan masyarakat multikultural dengan total polulasi tidak kurang dari

1.604.897 jiwa (BPS Kabupaten Banyuwangi, 2018:59). Ada tiga karakteristik kultural yang dilekatkan kepada masyarakat di Banyuwangi yaitu Jawa Mataraman, Madura Pendalungan dan Suku Osing (Sutarto, 2008). Karakter egalitarian menjadi ciri dominan masyarakat Suku Osing yang terlihat dari bahasa yang tidak mengenal hirarki bertingkat. Struktur sosial masyarakat Osing pun tidak berorientasi seperti Jawa Mataraman yang mengenal penyebutan *priyayi*, *kyai* dalam terminologi Madura atau *ksatria* dalam sistem kasta Bali (Sutarto, 2008). Suku Osing adalah penduduk asli Banyuwangi atau juga disebut *larus (lare using)* atau *wong Blambangan* merupakan penduduk mayoritas di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Desa Kemiren Kecamatan Glagah dapat dikatakan sebagai jiwa dari peradaban Suku Osing yang sejak tahun 1995 ditetapkan sebagai Desa Wisata Osing oleh Gubernur Jawa Timur saat itu, Basofi Sudirman. Meski telah menjadi desa wisata namun masyarakatnya memegang teguh adat tradisi dan budaya lokal yang dibawa dari sesepuh terdahulu. Kolektifitas kehidupan masyarakat desa Kemiren nyatanya tidak berbanding lurus dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)⁴¹. Apabila dihitung secara komposit berdasarkan tiga indeks yang terdiri dari indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli. Kemiskinan di Kecamatan Glagah sebagai pusat dari keberadaan masyarakat Suku Osing masih termasuk kategori rendah.

Masyarakat suku Osing mengalami dilemma sebagai akibat kebijakan-kebijakan yang menerpa dan berpengaruh terhadap kehidupan kesehariannya (*lebenswealth*). **Dilema pertama** tergambar dari penelitian yang dilakukan Indrawati (2015) menunjukkan bahwa Desa Kemiren memiliki kekuatan dan peluang yang kuat dalam pengembangan pariwisata. Desa Kemiren diharapkan mampu menerapkan strategi progresif yang memungkinkan untuk pengembangan lebih lanjut dan memperbesar pertumbuhan desa wisata dan meraih kemajuan secara maksimal bagi pembangunan pariwisata berkelanjutan. Yang tidak disadari adalah ancaman yang juga besar terkait dengan pengembangan pariwisata. Pariwisata (internasional) adalah realitas globalisasi budaya yang menurut Chaubet (2013) potensial menimbulkan pemusatan (konvergensi) modal, benturan antar peradaban dan imperialisme budaya disamping tentu saja ada sisi positifnya seperti munculnya hibridasi

⁴¹ Pembangunan (developmentalisme) adalah terminologi yang problematis karena banyak kritik yang dialamatkan kepadanya. Shiva (1998) misalnya mengkritik pembangunan sebagai kepanjangan tangan dari patriarki Barat yang meminggirkan perempuan dari ruang kehidupannya. Akibatnya, kerusakan ekologis massif terjadi sebagai akibat dari dieklusinya perempuan dalam praktik-praktik pembangunan.

budaya dan glokalisasi. Upaya masyarakat adat Osing di Banyuwangi dalam menjalankan pengetahuan warisan leluhur (*weluri*) tidaklah mudah. Gempuran pengaruh-pengaruh dari luar yang gencar seolah memperlihatkan tarik menarik yang tanpa henti dengan sifat lokalitasnya, namun setidaknya hingga hari ini masih kuat tekad mereka untuk menjalankan *weluri*. **Dilemma kedua** muncul dari kebijakan pembangunan infrastruktur yang menyentuh Kabupaten Banyuwangi secara faktual harus dilihat sebagai realitas yang mendua. Infrastruktur⁴² adalah kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik (Damanhuri, 2014: 122). Akselerasi pembangunan infrastruktur⁴³ mengindikasikan perlunya menyeimbangkan penyebaran inovasi potensi ekonomi dengan kesiapan masyarakat untuk memperoleh manfaat pertumbuhan ekonomi yang diperoleh. Kasus pembangunan Jalan Lintas Selatan di Kabupaten Pacitan, misalnya dalam pandangan tradisi kajian agraria menunjukkan efek perubahan tenurial yang nyata bagi masyarakat yang dilintasi. Kerentanan tenurial (*tenurial security*) terlihat dari dengan lepasnya lahan-lahan pertanian untuk kepentingan non pertanian. Konsentrasi tanah pada pihak tertentu segera menjadi sesuatu yang Nampak dari land market yang terjadi di Pacitan (Ridha, 2018). Pandangan kritis lain yang lebih bersifat makro dalam melihat situasi ini dapat merujuk pada pandangan Giddens yang melihat pembangunan yang tidak hanya dilihat memberi dampak konstruktif *an sich*. Pembangunan memberikan konsekuensi lain yang mungkin tidak menguntungkan bagi negara dan masyarakat. Giddens menyebutnya sebagai *unintended*

⁴² Infrastruktur dalam arti yang luas, tidak hanya terkait dengan infrastruktur dalam bentuk fisik, tetapi termasuk di dalamnya infrastruktur sosial dan *soft infrastructure* dalam bentuk hukum dan kelembagaan (Damanhuri, 2014: 122). Bandingkan dengan dokumen Bapeda Provinsi Jawa Timur yang mendefinisikan infrastruktur dalam beberapa kategori yaitu 1) *soft infrastructure* yang berjalinkelindan dengan *Human Development* yaitu pendidikan dan kesehatan 2) *hard infrastructure* yang berkaitan dengan penyediaan energi, transportasi, jalan, sumber daya air dan lingkup pekerjaan Cipta Karya yang terdiri dari SPAM, Sanitasi dan Perumahan.

⁴³ Dilihat dari sudut perspektif ekonomi politik, salah satu eksemplar terbaik dalam mengkaji infrastruktur di Indonesia dapat ditemukan dala karya James S. Davidson (2018). Davidson mengkritik pendekatan *New Institutionalism Economics* (NIE) yang menjadi perspektif *mainstream* dalam melihat ekonomi politik swasta dan negara dalam penyediaan infrastruktur yang hanya dalam tataran legislasi formal tanpa melihat relasi-relasi kelembagaan yang lebih banyak dibentuk dalam relasi informal. Davidson mengajukan pendekatan sosiologi politik untuk mendalami lebih jauh tentang 1) relasi-relasi swasta-pemerintah dan ragam keluaran dari perburuan rente; 2) perumusan kebijakan ekstra parlementer; 3) kontestasi yang mendukung watak pelaksanaan wewenang pengambilalihan tanah (2008: 20).

*consequences*⁴⁴ (Giddens, 1998: 44). Pembangunan infrastruktur sebagai *prime mover* oleh Pemerintahan Jokowi memang memiliki kepentingan atas infrastruktur yang semakin matang. Lebih lanjut Susan (2018) menjelaskan bahwa mobilitas yang cepat di suatu wilayah memberi kemungkinan adanya tindakan ekspansi modal. Situasi ini potensial melahirkan pertarungan antara ekonomi global dengan ekonomi lokal, aktor dengan modal raksasa (global) dan aktor lokal (*indigenous*) yang bermodal kecil namun sayangnya banyak bukti yang memperlihatkan aktor *indigenous* kalah dalam pertarungan ini.

Di tengah tantangan situasi ini, Kabupaten Banyuwangi muncul dengan gagasan ekonomi festival.⁴⁵ Menurut Bupati Abdullah Azwar Anas, sejak 2012, Banyuwangi menggiatkan salah satu turisme baru yang telah menjadi tren di banyak negara, yaitu pariwisata event (*event tourism*) bertajuk Banyuwangi Festival yang mendorong kombinasi aspek budaya, alam dan olah raga untuk menghasilkan model wisata yang unik (Anas dalam Satria, 2018:v). Anas menambahkan bahwa terdapat tiga alasan penting mengapa *event tourism* dalam konsep festival ini digelar. Pertama, soal pemasaran dan promosi wisata daerah. Kedua, festival menjadi sarana efektif mengontrol ekonomi rakyat. Ketiga, festival sebagai sarana konsolidasi sosial-budaya masyarakat untuk merawat kearifan lokal (Anas dalam Satria, 2018:vi-viii). Hasil dari pariwisata secara statistik menunjukkan hadirnya daya ungkit besar dalam kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Pendapatan per kapita pada tahun 2010 berada pada angka Rp. 20,8 juta dan tahun 2017 menjadi Rp. 45 juta per orang per tahun. Angka kemiskinan menurut 8,6 % pada tahun 2016 jauh lebih rendah dibanding sebelumnya yang selalu tumbuh dua digit⁴⁶. Produk Domestik Regional Bruto naik 100% dari Rp. 32,46 triliun menjadi Rp. 72,47 triliun pada tahun 2017. Kenaikan PDRB ini termasuk dampak dari pengembangan pariwisata yang menggerek

⁴⁴ Giddens (2009) mendefinisikan *unintended consequences* sebagai konsep yang mengacu pada konsekuensi-konsekuensi modernisasi yang dibawa dalam ideologi developmentalisme atas akibat-akibat pembangunan yang negatif. Giddens menyebut modernisasi dan atau modernisme diibaratkan seperti mesin besar (*juggernaut*) yang siap menerjang apa saja yang dihadapannya. Giddens (2009) memberikan penekanan terhadap transendensi pengetahuan kehidupan sosial terutama bagi mereka yang menerapkan bagi kepentingan tujuan transformatif.

⁴⁵ Ekonomi Festival adalah aktivitas yang menghubungkan nilai ekonomi dengan penyelenggaraan sebuah event atau festival. Festival menjadi agenda yang sebenarnya telah banyak dikembangkan negara maju sebagai salah satu strategi pembangunan daerah (Satria, 2018:7-8).

⁴⁶ Data BPS Kabupaten Banyuwangi, 2017

kinerja perhotelan, jasa transportasi, restoran, UMKM dan sebagainya (Anas, dalam Satria, 2018:vii).

Pada tingkat masyarakat, berintegrasinya kegiatan budaya dan kegiatan ekonomi tentu disebabkan oleh keterlibatan aktor-aktor yang terlibat dalam jaringan sosial ekonomi. Konsepsi Nee (2003) tentang pendekatan *new institutionalism* mengantarkan pada upaya memahami adanya mekanisme sosial dimana di dalamnya terdapat hubungan keterkaitan dan berkelindan antara unsur formal (*state rules*) dan unsur informal seperti nilai-nilai budaya dan agama (*share belief*), jaringan sosial dan keterlekatan sosial (*social embeddedness*) menurut konteks sosial budaya tertentu. Nee (2003) mengemukakan konsepsi *New Institutionalism* sebagai gabungan dari pemikiran teori pilihan rasional, teori ekonomi institusional dan teori keterlekatan sosial (*embeddedness theory*) yang digagas Granovetter. Dari uraian teoritis tulisan ini mensoroti bagaimana jaringan-jaringan sosial Suku Osing terbentuk dalam tindakan ekonomi pada konteks kekinian?

Jaringan Sosial dan Terbentuknya Institusi Sosial Ekonomi Baru: Sebuah Uraian Singkat tentang Teori dalam Sosiologi Ekonomi

Teorisasi tentang jaringan sosial banyak berhutang pada pemikiran Durkheim⁴⁷. Granovetter mengembangkan konsep jaringan sosial yang secara umum didefinisikan sebagai hubungan sosial antar individu yang relatif stabil. Jaringan sosial adalah bahan dasar pertukaran ekonomi jadi bukan tingkah laku individu (*atomized actor*) yang berorientasi keuntungan seperti yang digagaskan para ekonom lah yang menjadi fundamen dasarnya.

Selanjutnya pemikiran Granovetter (2005) tentang jaringan sosial adalah tentang empat prinsip utama yaitu: 1) *norm* and densitas *network* (norma dan kepadatan jaringan); 2) *the strenght and weak ties* (kuat atau lemahnya ikatan) berupa manfaat ekonomi yang cenderung diperoleh dari jalinan jaringan ikatan lemah; 3) *the important of stuctural holes* yang berkontribusi menjembatani relasi individu dengan pihak luar; 4) *the interpretation of*

⁴⁷ Pendekatan jaringan sosial untuk mempelajari kehidupan ekonomi dewasa ini cenderung berkembang ke arah analisis meso dan mikro, bukan ke arah makro. Kecenderungan ini tidak sejalan dengan analisis Durkheim yang cenderung makro. Namun demikian pendekatan jaringan sosial telah diterima dan memasuki wilayah ilmu pengetahuan lain terutama ilmu ekonomi dan bisnis (Achwan, 2014:32).

economic and noneconomic action, adanya tindakan-tindakan non ekonomi yang dilakukan individu, yang ternyata memberi kemanfaatan bagi tindakan ekonominya.

Granovetter lebih jauh memantapkan konsep jaringan sosial dengan menguraikan konsep keterlekatan relasional dan konsep keterlekatan struktural melalui prinsip-prinsip bekerjanya jaringan sosial, yaitu:

1. Norma dan kepadatan jaringan. Norma sosial dipandang sebagai kesepakatan tentang tingkah laku antar individu. Kepadatan jaringan sosial ditandai oleh tingginya frekuensi dan intensitas hubungan sosial individu. Jaringan sosial yang padat (*network density*) dicirikan oleh kecilnya ukuran kelompok sosial. Kondisi inilah yang memberikan sifat hubungan jaringan dengan konsepsi *bounded social network*.
2. Kekuatan ikatan sosial yang lemah (*strength of weak ties*). Prinsip kedua ini ditandai dengan hubungan antarindividu dengan frekuensi dan intensitas rendah. Situasi ini membuat individu dapat mengembangkan hubungan lebih luas dengan individu lain.
3. Lubang struktural (*structural hole*). Prinsip ini merujuk pada titik nodal tertentu dalam wujud individu, kelompok atau organisasi. Titik nodal ini menghubungkan antara satu atau beberapa kelompok dengan satu atau beberapa kelompok lain. Kelompok ini berfungsi sebagai lubang struktural yang memiliki posisi strategis dalam jalinan antar kelompok dalam mewujudkan tujuan-tujuan kelompok.
4. Kelekatan sosial dalam tindakan ekonomi. Prinsip keempat ini menyatakan bahwa tindakan ekonomi individu atau kelompok terlekat. Prinsip ini mirip dengan pemikiran Weber. Indosianis yang menggambarkan kuatnya aspek kekerabatan dalam tindakan ekonomi misalnya dapat dilacak dari karya Geertz (1971) dalam bukunya *Penjaja dan Raja*, atau Hefner (1989) *Geger Tengger* yang memperlihatkan kuatnya patronase dalam tindakan ekonomi masyarakat dataran tinggi Tengger.

Kajian sosiologi ekonomi yang memfokuskan pada institusi juga berutang pada Victor Nee⁴⁸ sebagai penggagas pendekatan institusionalisme baru. Pendekatannya dalam

⁴⁸ Victor Nee adalah ahli sosiologi ekonomi yang menaruh perhatiannya pada transformasi ekonomi di Rusia dan Cina. Ia telah menerbitkan karya akademiknya di berbagai jurnal berpengaruh mengenai keberhasilan Cina dalam melakukan transformasi dari sistem ekonomi sosialis menuju sistem ekonomi pasar. Tidaklah berlebihan bila Nee mendapat julukan sebagai “juru bicara” sosiologi ekonomi Cina (Achwan, 2013:57).

mempelajari kehidupan ekonomi dipengaruhi oleh pemikiran Bourdieu khususnya tentang Arena (*field*) (Bourdieu, 1980; Webb, 2002; Sibeon, 2004; Fashri, 2014; Haryatmoko, 2016; Giddens, 2017; Riawanti, 2017). Perbedaanya bila Bourdieu yang meletakkan negara sebagai outsider, maka Nee meletakkannya sebagai *insider*.

Menurut Nee, pendekatan Granovetter tidak dapat digunakan untuk mempelajari persoalan keselarasan dan ketidakselarasan antara institusi formal dan informal dalam mengejar kepentingan ekonomi. Tujuan utama pendekatan institusionalisme baru adalah mempelajari mekanisme yang mengatur cara-cara bagaimana kombinasi institusi formal dengan institusi informal dalam mendorong atau menghambat tindakan ekonomi. Nee (2005:55) mendefinisikan institusi sebagai berikut:

“...dominant system of interrelated informan and formal elements - costum, shared believes, convention, norm, rules- which actors orient their actions to when they pursue their interest. Institusional change involves not simply remaking the formal rules but fundamentally requires the realignment (reaarengement of interest, norm and power)...”

Nee menitikberatkan jalinan bagaimana integrasi antara norma-norma yang dianut oleh organisasi atau kelompok (institusi informal) dengan aturan resmi yang ditegakkan oleh negara (institusi formal) dan akibatnya terhadap perkembangan ekonomi. Nee (2005: 27-49) menekankan arti penting hubungan makro-meso-mikro untuk menjelaskan keselarasan dan ketidak selarasan hubungan antara institusi formal dan informal dalam kaitan ini yang memperkenalkan konsep keselarasan (*close-coupling*) dan ketidakselarasan (*decoupling*).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan paradigma post-positivistik, dimana data dipaparkan secara deskriptif kualitatif dimana makna dan proses dalam jaringan komunikasi diperoleh dari kasus yang ada. Lokasi penelitian yakni di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi dengan pertimbangan bahwa desa tersebut menjadi pusat kegiatan desa wisata adat Osing. Tineliti ditentukan secara purposif.

Analisis menggunakan teknik triangulasi dari Miles dan Hubermans yang berisi, pengambilan data, *displaying* data dan pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modernisasi Ekonomi, Infrastruktur dan Transformasi Sosial di Indonesia

Dalam kasus Indonesia, sorotan pada studi perubahan sosial dan modernisasi ekonomi pasca kolonialisme berutang salah satunya pada karya Geertz (1997)⁴⁹ *Peddlers and Princes*. Geertz (1997) menyatakan persamaan-persamaan kelompok entrepreneurs adalah 1) Terjadinya perubahan-perubahan yang memungkinkan munculnya *economic rational*; 2) Timbul suatu proses pertumbuhan dari nilai-nilai baru –semacam *economic ethic*- yang memberikan keleluasaan kepada *economic rationality* untuk memerankan perannya dalam kehidupan masyarakat (Kuntjoro-Tjakti, 1977:xxii dalam Geertz, 1977). Karya Geertz ini setidaknya memberi beberapa *insight* penting yaitu, *pertama*, Bagi Geertz perubahan-perubahan dalam bentukan struktur struktur sosial yang dialami di lokasi penelitiannya menunjukkan sebuah pola *gradual changes*. (Kuntjoro-Jakti, 1977: XXI dalam Geertz, 1977).⁵⁰ *Kedua*, pengkategorian ekonomi bazaar dan ekonomi formal. Ekonomi bazaar adalah keseluruhan kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang berbasis rumah tangga yang meliputi produksi barang, jasa yang dalam pendistribusiannya terjadi dalam stratifikasi masyarakat tertentu, sedangkan ekonomi formal secara struktural dijalankan oleh pemerintah (Susanto, 1989: 147). Tradisi dikotomi ekonomi seperti ini sebenarnya bersumber dari Furnival (2009) dengan gagasan *dual economy*-nya dan

⁴⁹ Clifford Geertz yang menulis *Peddlers and Princess* (1963) berdasarkan penelitiannya di Jawa Timur dan Bali pada tahun 1952-1954 menemukan bagaimana proses stratifikasi sebagai akibat modernisasi ditentukan oleh stratifikasi sosial sebelum modernisasi. Sistem nilai setempat dan hubungan manusia dengan lingkungan fisik alamiah dan sosial sebagai variabel terkontrol dalam membandingkan Mojokuto di Jawa dan Tabanan di Bali dipilih kriteria 1) kota yang merupakan pusat administrasi se tingkat pusat perdagangan dan pendidikan 2) terletak daerah yang subur berpenduduk padat dan kehidupan ekonomi yang ditentukan oleh sektor agraris dan 3) merupakan simbol pertemuan Kebudayaan Barat dan Timur dan sebagai akibatnya mengalami proses perubahan sosial yang fundamental.

⁵⁰ Kuntjoro-Tjakti memberikan ulasan lebih spesifik atas keraguan Geertz dalam pengantar bukunya *Penjaja dan Raja* dengan pernyataan apakah Indonesia telah meninggalkan situasi “equilibrium” masyarakat tradisional menuju ke masyarakat “equilibrium” masyarakat modern (Koentjara-Tjakti, 1977:XXI dalam Geertz, 1977).

diteruskan oleh McGee (1997) dengan ekonomi sirkuit atas dan ekonomi sirkuit bawahnya. Bagi Geertz, ekonomi bazaar tidak hanya diasosiasikan sebagai ekonomi rakyat kecil namun lebih dari itu juga terkait dengan mobilisasi tenaga kerja, gerak mobilitas demografis dari desa ke kota, menjadi solusi pengangguran di perkotaan yang ambivalen dengan proses pemiskinan di perkotaan. *Ketiga*, perubahan-perubahan sosial dihipotesiskan Geertz sebagai berikut:

1. Golongan entrepreneur umumnya muncul dalam lingkungan masyarakat yang homogen
2. Golongan ini umumnya merupakan hasil kristalisasi dari golongan masyarakat yang lebih besar yang memiliki sejarah lama sebagai golongan “luar”
3. Golongan masyarakat yang lebih besar itu sendiri umumnya sedang mengalami proses perubahan yang dramatis
4. Pada tingkat ideologis golongan ini memandang dirinya sebagai wadah yang sempurna dari nilai agama dan moral di tengah masyarakat yang dianggap sesat, kolot atau bersikap masa bodoh
5. Terlepas dari perubahan-perubahan yang terjadi, hambatan utama dari berkembangnya golongan entrepreneur ini umumnya bersifat teknis dan organisatoris
6. Tugas utama para entrepreneur ini dalam masyarakat yang mengalami transisi adalah menggunakan cara-cara tradisional untuk mencapai sasaran-sasaran yang baru (Kuntjoro-Tjakti, 1977:xxii dalam Geertz, 1977).

Konsepsi tentang infrastruktur dikaji oleh beragam disiplin ilmu mulai dari sosiologi, antropologi, ekologi manusia, geografi, arsitektur, ekonomi serta ilmu-ilmu lain. Dalam perspektif sosiologis, kajian infrastruktur menjadi bagian dari *sociology of transportation*. Salah satu penggagasnya yaitu Robert Horton Cooley. Sebelum dikenal sebagai salah satu eksponen teori interaksionisme simbolik Cooley mempublikasikan disertasinya berjudul *The Theory of Transportation* tentang fungsi sosial transportasi dengan setting Amerika Serikat Tahun 1800-an. Cooley melihat perlunya transportasi untuk untuk mendamaikan konflik dalam organisme sosial (masyarakat) dengan industri karena bagi orang-orang yang bekerja di pusat industry yang padat dan manusia butuh

untuk tidak hidup dalam agregat yang padat. Kondisi ini dimaksudkan Cooley bahwa harus ada transportasi penghubungan antara kepentingan orang-orang bekerja dengan domisili tempat tinggalnya. Konsepsi Cooley menguraikan tentang teori transportasi menguraikan tiga mekanisme yang menjadi ciri transportasi yaitu 1) Infrastruktur merupakan cara di mana memudahkan pergerakan; 2) Kendaraan dalam hal ini sebagai alat pembawa hal-hal fisik yang diangkut; 3) Penggerak kendaraan itu sendiri misalnya menggunakan tenaga hewan, kereta api atau kendaraan lain. Cooley berpendapat bahwa ketiga mekanisme ini saling bergantung, karena berkembangnya satu mekanisme dengan sendirinya tergantung pada perkembangan mekanisme lain.

Pandangan sosiologis⁵¹ tentang infrastruktur dapat ditelusuri dari kajian tentang ruang (*space*) yang memiliki beberapa landasan penting sebagai berikut.

“...Spatial sociologists study how society, i.e., individuals and collectivities, transform natural into social space, how they use and exchange it, what social, economic, and other processes and forces come into play in these uses and exchanges, and how both kinds of space affect individuals, collectivities, and social processes and forces...” (Gans, 2002).

Pernyataan dari Gans (2002) di atas memberikan sebuah *insight* bagi para sosiolog untuk melihat ruang dari dua sudut pandang yaitu ruang alam (*natural space*) menjadi ruang sosial (*social space*) dan bagaimana kedua jenis ruang tersebut mempengaruhi individu, kolektivitas, dan proses dan kekuatan sosial. Pemikiran ekonomi politik tentang ruang muncul dalam karya neo-marxian oleh Henri Lefebvre (1991), Manuel Castells dan David Harvey. Para penggagas ekonomi politik ruang melihat bahwa penggunaan lahan terpigura dalam kaca mata kapitalisme⁵².

⁵¹ Kajian tentang spasial (keruangan) dalam perspektif sosiologi dapat dilacak perkembangan awalnya pada Mazhab Chicago (Chicago School) lewat karya etnografer dan geografer seperti Ernest Burgess bertahun 1925 yang bertopik sosiologi perkotaan. Burgess dengan model zona konsentrisnya mungkin dapat dikatakan ketinggalan jaman namun hirarki kelas dan eksklusi rasial terkait dengan struktur penggunaan lahan bagi pemukiman di Amerika Serikat masih sangat relevan saat ini (Gans, 2002).

⁵² Uraian kelemahan dari Lefebvre, lihat Gans (2016:9)

Desa Wisata Kemiren: Suku Osing dalam Pusaran Berbagai Kepentingan

Keberadaan Wong Osing tidak dapat dipisahkan dari kesejarahan Blambangan. Stockdale (2010) menyatakan bahwa Blambangan merupakan bagian dari Kerajaan Mataram yang diberikan kepada Mangkubumi dan diperluas melalui penaklukan (Stockdale, 2010:129). Pihak VOC (*Verenigen Oost Indische Companj*) sangat berkepentingan untuk mengacaukan ketenangan Mataram dan membela Mangkubumi karena wilayah Blambangan di Jawa bagian Timur saat itu dikuasai oleh Inggris. Banyuwangi adalah satu-satunya pos Belanda di sisi Timur pulau Jawa. Fungsinya strategis karena menjadi penghasil lada, kopi dan budidaya nila yang ditanam di perkebunan Socoradijoa⁵³. Dalam catatan Stockdale (2010), Blambangan diperintah oleh seorang tumenggung bernama Joudo-Nogoro (Yudonegoro). Suku Osing merupakan salah satu bagian sub-etnis Jawa. Dalam peta wilayah kebudayaan Jawa, Osing merupakan bagian wilayah Sabrang Wetan yang berkembang di daerah ujung timur pulau Jawa (Suprijanto, 2002:4). Menurut Lecker, orang-orang Osing adalah masyarakat Blambangan yang tersisa. Keturunan kerajaan Hindu Blambangan ini berbeda dari masyarakat lainnya, (Jawa, Madura dan Bali), bila dilihat dari adat-istiadat budaya maupun bahasanya (Stockdale, 2010). Kekuasaan kolonial nampaknya tidak berhasil membuat masyarakat suku Osing meninggalkan kepercayaannya dengan mudah.

Suku Osing saat ini sebagian besar adalah pemeluk agama Islam, yang memiliki latar belakang agama Hindu yang cukup kuat, yaitu pada masa Kerajaan Hindu Siwa. Oleh karena itu, maka tradisi-tradisi yang mengandung nilai-nilai Hindu tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, bahkan ajaran Islam berjalan beriringan dengan adat-istiadat yang ada. Namun agama Islam ini masih dipengaruhi oleh kepercayaan kepada peraluh. Selain pada kepercayaan atau mendatangi makam Mbah Cilik, Suku Using yang ada di Banyuwangi ini terdapat aliran keagamaan diantaranya yaitu Sapto Darmo⁵⁴ dan Pamu⁵⁵.

⁵³ Socoradaija adalah perkebunan tua yang menjadi tempat pembuangan kriminal dari Semarang, Surabaya, Madura dan opsir Belanda yang melakukan tindakan kriminal (Stockdale, 2010: 313-322).

⁵⁴ Tokoh aliran Sapto Darmo adalah Harjo Saputro dari daerah Pare Kediri. Sapto Darmo dalam melakukan peribadatan lebih banyak bersemedi.

⁵⁵ Pamu adalah singkatan dari Purwo Ayu Mardi Utomo, setidaknya telah ada sejak tahun 1930-an. Diawali ketika seorang tokoh desa Mbah Jembul berguru kepada sesepuh aliran Pamu yaitu RM Djojopoernoemo di Dukuh Tojo, Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Peribadatan aliran Pamu lebih banyak melakukan sujud.

Kepercayaan yang sinkretik antara Islam dengan kepercayaan akan roh-roh halus tersebut dikenal dalam sistem keyakinan Agami Jawi (Koentjaraningrat, 1994: 310). Geertz mendefinisikan religi rakyat seperti demikian, yang menitikberatkan pada aspek animisme dari sinkretisme Jawa (penyatuan unsur-unsur pra-Hindu, Hindu dan Islam) dan secara luas berhubungan dengan elemen petani, sebagai Islam Abangan (1989: 29).

Lapangan kerja yang paling dominan adalah di bidang pertanian sawah dan ladang yakni sebagai petani. Karena sebagian besar masyarakat Suku Osing di Desa Kemiren ini bekerja sebagai Petani maka muncul organisasi kelompok tani yang sedikit menonjol dibandingkan dengan organisasi yang lain sampai akhirnya hadir Desa Wisata Adat Osing di Desa Kemiren.

Komunitas Adat Kemiren di Kecamatan Glagah dianggap sebagai salah satu yang paling teguh menjalankan tradisi Osing yang telah diturunkan oleh leluhurnya. Pada tahun 1995, Gubernur Jawa Timur Basofi Sudirman menetapkan desa ini sebagai Desa Wisata Adat Osing. Situasi masyarakat Suku Osing tidak terlepas pula dengan instrument legal formal yang mengatur kehidupan masyarakat desa. White (2017) mensinyalir bahwa idealisasi visi masyarakat desa yang diproyeksikan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) untuk mengukuhkan dan melembagakan prinsip-prinsip demokrasi lokal yang partisipatoris menghadapi dilemma model yang sangat mungkin otoriter, peternalistis dan fasis ketimbang demokrasi lokal yang demokratis (White, 2017:17). Mengutip White (2017:19) siapapun yang pernah terjun melakukan penelitian pada lingkup desa pasti menyoroti akumulasi kekuasaan ekonomi, sosial dan politik di tangan segelintir elit desa yang telah menguasai pemerintah desa, perekonomian desa dan posisi-posisi lain pemimpin kelompok fungsional seperti kelompok tani, kelompok perempuan dan lain-lain serta akses atas sumber kekayaan, kekuasaan dan peluang yang berasal dari luar. Situasi ini bukan tidak mungkin terjadi dalam proses transformasi sosial Masyarakat Adat Desa Kemiren dalam menerima dan mengadaptasikan diri dengan ekonomi festival yang dihela oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Keterlibatan masyarakat Suku Osing dalam ekonomi festival di Kabupaten Banyuwangi tidak terlepas dari relasi antar aktor-aktor di dalam maupun di luar Suku Osing. Relasi-relasi ini harus dimengerti sebagai tindakan-tindakan yang bermakna dalam rasionalitas tindakan yang dilakukan. Nilai-nilai utilitarian dalam rangka mengejar profit

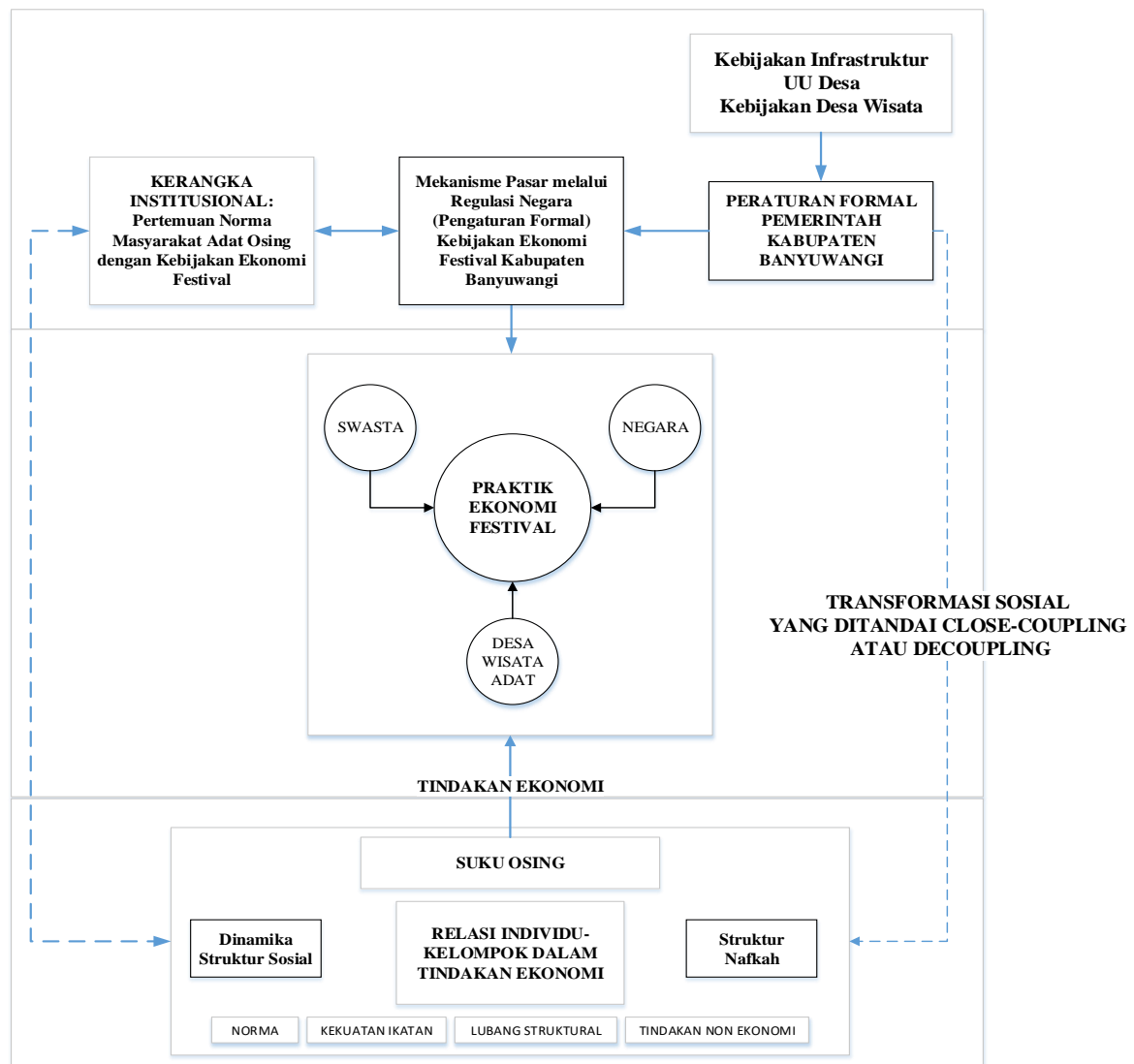
dan keuntungan harus ditempatkan sama pentingnya dengan nilai-nilai budaya, termasuk agama sehingga tidak hanya bermakna tunggal dalam pengertian menjadi referensi dasar hubungan manusia dengan Tuhan namun juga dimengerti sebagai tindakan aktor dalam hubungannya dengan manusia lain dalam mengejar berbagai kepentingan termasuk kepentingan ekonomi. Dapat diasumsikan bahwa tindakan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat berakar dari etika ekonomi yang terinternalisasi di dalam diri aktor-aktor masyarakat Suku Osing.

Struktur sosial masyarakat Suku Osing yang dulu dikenal sebagai masyarakat agraris mentransformasi diri menjadi masyarakat pariwisata. Ekonomi Festival yang gencar dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merupakan salah strategi ekonomi yang membawa serta Suku Osing sebagai bagian dari *branding*, destinasi dan atraksi pariwisata. Dalam pembacaan terhadap transformasi sosial masyarakat Suku Osing, jaringan kerja dan jaringan sosial bekerja mengatur distribusi pembagian kerja, menentukan besaran harga barang dalam hal ini terkait dengan jasa dan komoditas yang disediakan oleh masyarakat Suku Osing bagi wisatawan, meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi melalui prinsip efisiensi dan prinsip saling menguntungkan dan menjadi sumber inovasi dan adopsi teknologi, termasuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan pengembangan UMKM yang mewadahi para entrepreneur sebagai pilar utama kegiatan di Desa Wisata Kemiren. Identifikasi atas munculnya kelompok sosial penggerak perekonomian pariwisata di Desa Kemiren menjadi penting untuk dikedepankan untuk memahami adakah kelas entrepreneur yang menghela transformasi sosial ekonomi pada masyarakat Suku Osing sebagai simbol-simbol jaringan pengikat struktur sosial masyarakat Desa Kemiren.

Situasi masyarakat Suku Osing tidak terlepas pula dengan instrument legal formal yang mengatur kehidupan masyarakat desa. White (2017) mensinyalir bahwa idealisasi visi masyarakat desa yang diproyeksikan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) untuk mengukuhkan dan melembagakan prinsip-prinsip demokrasi lokal yang partisipatoris menghadapi dilemma model yang sangat mungkin otoriter, peternalistis dan fasis ketimbang demokrasi lokal yang demokratis (White, 2017:17). Apakah kekhawatiran White ditemukan dalam realitas masyarakat Desa Kemiren? Bila diuraikan lebih detail, beberapa UU Desa memang masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut bagi

operasionalisasi demokratisasi desa yang dapat diasumsikan sebagai penghela perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa Kemiren. Mengutip White (2017:19) penelitian pada lingkup desa pasti menyoroti akumulasi kekuasaan ekonomi, sosial dan politik di tangan segelintir elit desa yang telah menguasai pemerintah desa, perekonomian desa dan posisi-posisi lain pemimpin kelompok fungsional seperti kelompok tani, kelompok perempuan dan lain-lain serta akses atas sumber kekayaan, kekuasaan dan peluang yang berasal dari luar. Situasi ini terjadi dalam proses transformasi sosial Masyarakat Adat Desa Kemiren dalam menerima dan mengadaptasikan diri dengan ekonomi festival yang dihela oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Kuatnya peran pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setidaknya membuahkan hasil fantastis dengan kenaikan PDB Kabupaten Banyuwangi tahun pada tahun 2017 yang mencapai 100% dibanding pencapaian tahun 2010. Capaian ini mengindikasikan tata kelola institusi dalam mengintegrasikan norma-norma yang dianut oleh organisasi atau kelompok (Desa Wisata Kemiren) dengan aturan resmi yang ditegakkan oleh negara (Pemerintah Kabupaten Banyuwangi maupun Pemerintah Pusat) dan akibatnya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Hubungan makro-meso-mikro untuk menjelaskan keselarasan dan ketidakselarasan hubungan antara institusi formal dan informal dalam kaitan ini bermuara pada dua kemungkinan yaitu keselarasan (*close coupling*) dan ketidakselarasan (*decoupling*). Apabila relasi antar aktor berjalan dengan asosiatif maka dapat dipastikan keselarasan antar pemangku kepentingan dan sebaliknya apabila relasi-relasi sosial berjalan disosiatif maka ketidakselarasan yang justru menghambat transformasi sosial akan terjadi.



Gambar 1. Transformasi Sosial Suku Osing dalam Ekonomi Festival Kabupaten Banyuwangi

KESIMPULAN DAN SARAN

Mengakhiri artikel ini beberapa pernyataan kesimpulan yaitu:

1. Transformasi sosial, ekonomi dan budaya pada Suku Osing terjadi seiring dengan perubahan struktur sosial ekonomi dan sistem penghidupan.
2. Tindakan ekonomi Suku Osing menjangkau dalam jaringan sosial antar aktor dalam bentuk kemitraan dan kerjasama. Jaringan sosial memungkinkan

bertemunya berbagai kepentingan yang dapat dinegosiasikan sehingga muncul institusi-institusi baru sebagai respon atas kebutuhan masyarakat Suku Osing.

3. Keragaman tipologi tindakan ekonomi Suku Osing merupakan hasil rasionalisasi tindakan yang melekat (*embedded*) dengan dimensi sosial, ekonomi politik dan kebudayaan.
4. Bila ruang-ruang ekspresi tindakan ekonomi, kepentingan ekonomi dan pengakuan atas identitas komunal suku Osing tercipta maka hasil dari transformasi sosial Suku Osing akan menghasilkan kesejahteraan, namun sebaliknya bila tindakan ekonomi tidak lagi mempertemukan kepentingan berbagai pihak maka yang akan terjadi adalah kemandegan (*decoupling*) dan bukan tidak mungkin kegagalan Suku Osing menghadapi perubahan-perubahan di sekitarnya.

Saran-saran yang dapat diajukan terkait dengan jaringan komunikasi UMKM pada praktik desa wisata Kemiren adalah:

1. Jaringan komunikasi antar UMKM dalam praktik desa wisata Kemiren harus diupayakan sebagai bagian modal sosial yang bersifat *enabling* sehingga jaringan yang terbentuk tidak hanya bersifat mengikat namun juga menyambungkan kebutuhan antar pemangku kepentingan yang bersifat mengaitkan satu sama lain.
2. Jaringan komunikasi merupakan bagian dari modal sosial. Peran yang dimainkan oleh jaringan sosial dalam pembangunan tidak sama di setiap wilayah karenanya prinsip pengakuan atas hak harus menjadi fundamen penting dalam setiap upaya rekayasa sosial sehingga konsekuensinya jaringan sosial komunikasi harus dianalisis dalam sifatnya yang local indigeneous.
3. Kasus-di desa kemiren merupakan miniatur kondisi sosial budaya Indonesia yang memiliki keragaman struktur maupun kultur, etnis, agama, tidak cukup dianalisis pada taraf mikro saja sehingga seharusnya pengembangan dan pemberdayaan jaringan sosialnya juga relatif berbeda dan terkait dengan sifat ikatan sosial di setiap wilayah. Oleh karenanya sangat penting untuk menganalisis aspek kekuatan ikatan (lemah atau

kuat), aspek menyambung (lemah atau kuat) aspek mengait (lemah atau kuat) dalam pengembangan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Achwan, R. 2014. Sosiologi Ekonomi Indonesia. UI Press. Jakarta
- [BPS] Badan Pusat Statistik, 2018. Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2018, Banyuwangi, BPS Kabupaten Banyuwangi
- [BPS] Badan Pusat Statistik, 2018. Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2018, Surabaya BPS Provinsi Jawa Timur
- Bourdieu, P. 1980. *The Logic of Practise*, Stanford University Press, Chicago
- Chaubet, F. 2013. *Globalisasi Budaya Seri Panduan*. Penerjemah Feybe I. Mokoginta, Jalasutra, Jogjakarta
- Cooley, C.H. *The Theory of Transportation* (1894), in: *Sociological Theory and Social Research*, Henry Holt and Company, New York, 1930, pp. 17e118.
- Damanhuri, D. S., Findi, M. 2014. *Masalah dan Kebijakan, Pembangunan Ekonomi Indonesia*, IPB Press. Bogor
- Davidson, J S. 2018. *Menaja Jalan Ekonomi Politik Pembangunan Infrastruktur Indonesia*, diterjemahkan Achmad Choirudin, Insist Press, Yogyakarta
- _____. 2016. *Eminent domain and infrastructure under the Yudhoyono and Widodo administration dalam Land and Development in Indonesia Searching for the People's Sovereignty*, ISEAS, Singapura
- Geertz, C. 1977. *Penjaja dan Raja* diterjemahkan S Supomo, Gramedia, Jakarta
- Giddens, A dan Philip W Sutton, 2017. *Essensial Concept in Sociology* 2nd edition, Polity Press, Cambridge
- Granovetter, M. 1985. "Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. *American Journal of Sociology*. Vol. 91, pp. 481-510.
- _____. 2005. *The Impact of Social Structure on Economic Outcomes*. *J of Economic Perspectives*. Vol. 19. No. 1.
- Granovetter, M., & Sweddborg, Richard (edit). 1992. *The Sociology of Economic Life*. (edit). Boulder, San Francisco, Oxford (US): Westview Pr.
- Haryatmoko, 2016, *Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post Strukturalis*, Kanisius, Yogyakarta

- Kuntjoro-Tjakti, D, 1977, Pengusaha Pribumi dan Proses Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Sebuah Tanggapan atas Hipotesa-hipotesa Geertz dalam Geertz, Penjaja dan Radja, Gramedia, Jakarta
- Lefebvre, H. 1991. The Production of Space. (D. Nicholson, Ed.). London: University of Minnesota Press.
- McGee, T.G. 1997, Five Decades of Urbanization in South East Asia, Institute of Asia-Pacific Studies, University of Hong Kong, Hong Kong
- Nee, V. 2005. The New Institutionalism in Economics and Sociology. CSES Working paper series, Cornell University, Ithaca
- Riawanti, S. 2017. Teori tentang Praktik: Saduran Outline of a Theory of Practice karya Pierre Bourdieu. Ultimus, Bandung
- Ridha, M, 2018. Melawan Rezim Infrastruktur Studi Ekonomi Politik, Carabaca, Makassar
- Satria, D. Erlando, A. 2017. Ekonomi Festival, Malang, UB Press.
- Shiva, V, 1997, Bebas dari Pembangunan: Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India, diterjemahkan Hira Jhamtami, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Sibeon, R. 2004. Rethinking Social Theory, SAGE, London
- Sumarti, T. 2007. Sosiologi Kepentingan (Interest) dalam Tindakan Ekonomi, Jurnal Sodality Vol 1 No.2 2007 halaman 283-293
- Suprijanto. I, 2002, Rumah Tradisional Osing: Konsep dan Bentuk, *Dimensi Teknik Arsitektur Vo. 30, No. 1, Juli 2002.*
- Susanto, S A, 1989, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, Putra Albadrin, Bandung
- Sutarto. A, Sudika, S. Y, 2008. Pemetaan Kebudayaan di Provinsi JawaTmur, Biro Mental Spiritual Pemerintahan Jawa Timur bekerja sama dengan Kopyawisda Jatim-Jember
- Stockdale. J. J, 2010, Eksotime Jawa Ragam Kehiduoan dan Kebudayaan Masyarakat Jawa 1768-1806, Yogyakarta, Progresif Book
- Webb, J et al, 2002. Understanding Bourdieu. Allen&Unwin, New South Wales
- White, B. 2017. UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa: Pertarungan Visi dan Wacana dalam Penelitian dan Kebijakan. Wacana 36:15-28

**PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN MULTIMEDIA
(TIM) : MEDIA VISUAL, AUDIO, DAN AUDIOVISUAL DALAM
INTERAKSI KOMUNIKASI MASYARAKAT
(STUDI KASUS IBU-IBU MAJELIS TAKLIM MUSHOLA AR-
RAHMAN BANDAR LAMPUNG)**

Kordiyana K Rangga¹, Resti Anggraini¹, Helvi Yanfika¹, Abdul Mutolib¹,

¹ PS Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung,
Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35141,
Telp 08127901014, * *e-mail*: korrangga@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Multimedia (TIM) : Visual, Audio, dan Audiovisual dalam proses Interaksi Komunikasi oleh ibu-ibu majelis taklim mushola Ar-Rahman di Desa Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2018. Populasi pada penelitian ini adalah ibu-ibu anggota pengajian Majelis Taklim Mushola Ar-Rahman. Metode pengambilan sampel yang digunakan ialah metode *simple random sampling*. Metode penelitian adalah metode survei, dengan menggunakan analisis data deskriptif. Hasil penelitian diperoleh bahwa Media Audio, Video, dan Audiovisual sangat membantu proses kegiatan maupun interaksi komunikasi ibu-ibu Majelis Taklim Mushola Ar-Rahman. Penggunaan media visual ibu-ibu tersebut memanfaatkan foto-foto atau gambar-gambar yang menginspirasi mereka terutama pada kegiatan yang islami, seperti *qoutes-qoutes* islam, atau surah-surah. Pada media audio ibu-ibu memanfaatkan pengeras suara maupun tape untuk kegiatan pengajian mereka. Pada media Audiovisual mereka menerapkan video-video baik yang menunjang kegiatan mereka maupun dalam menerima informasi-informasi religius yang bermanfaat seperti ceramah atau khosidah-khosidah.

Kata kunci : Informasi, Media, Teknologi

PENDAHULUAN

Teknologi Informasi Multimedia (TIM) merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data agar menghasilkan informasi yang penggunaannya dapat berupa komputer atau alat bantu (*tool*), koneksi (*link*) dan yang lainnya, sehingga pengguna dapat berinteraksi dan berkomunikasi. Teknologi telah memberikan banyak kemudahan, serta

sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Para ahli pun mulai mengembangkan teknologi sesuai dengan sifat manusia yang serba digital. Penyajian suatu informasi tentu akan lebih menarik apabila ditampilkan dalam suatu media yang dapat menggabungkan berbagai bentuk informasi yang ada (*Anderson, 1994*).

Hasil penelitian Husain (2014), menyatakan bahwa pesatnya kemajuan teknologi tidak bisa dipungkiri semakin memajukan manusia, contohnya dalam hal berkomunikasi. Interaksi yang terjadi dengan adanya bantuan teknologi menjadi semakin mudah dan beragam. Penerapan teknologi informasi dan multimedia dalam kehidupan sehari-hari sangat berpengaruh besar, baik dalam bidang pendidikan, sosial, politik, maupun ekonomi. Teknologi Informasi Multimedia dalam bidang sosial merupakan alat teknologi yang membantu sarana interaksi komunikasi dan sumber informasi yang lebih baik bagi individu, kelompok, maupun masyarakat. Penempatan multimedia dapat diterapkan dimana saja selama masyarakat membutuhkan akses sumber informasi. Peran multimedia juga dapat membantu masyarakat yang memiliki kesulitan dalam menerima informasi analog satu arah, karena informasi akan disajikan lebih menarik secara visual agar pengguna lebih tertarik. Teknologi saat ini telah menggabungkan kemampuan multimedia berupa gambar, audio, video maupun teks yang interaktivitasnya dirancang agar mudah digunakan oleh pengguna untuk memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut merupakan bagian dari fundamental konsep Teknologi Informasi dan Multimedia (TIM). Karena itu penelitian ini membahas bagaimana pemanfaatan TIM : Visual, Audio, dan Audiovisual dalam Proses Interaksi Komunikasi (Studi Kasus Ibu-Ibu Majelis Taklim Mushola Ar-Rahman di Desa Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Gunung Sulah Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (*purposive*). Turun Lapang dilakukan pada bulan Desember 2018. Populasi pada penelitian ini adalah anggota ibu-ibu pengajian Majelis Taklim Mushola Ar-Rahman. Analisis data menggunakan analisis deskriptif melalui wawancara langsung dan kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden

Responden wawancara berjumlah 40 orang ibu-ibu anggota pengajian Majelis Taklim Mushola Ar-Rahman Desa Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kabupaten Lampung Selatan. Mayoritas umur ibu-ibu pengajian Majelis Taklim Mushola Ar-Rahman adalah 40--50 tahun. Tingkat pendidikan terakhir beragam mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai perguruan tinggi. Pekerjaan ibu-ibu adalah ibu rumah tangga, penjual sayur, tukang kredit, dan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti guru.

Gambaran Umum Majelis Taklim Mushola Ar-Rahman

Majelis Taklim Ibu-ibu Pengajian Mushola Ar-Rahman merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang dibentuk dengan tujuan untuk beribadah, meningkatkan silaturahmi, dan mencari pahala serta ridho Allah SWT. Majelis Taklim tersebut dibentuk pada tanggal 24 Maret 2015. Berikut Struktur Organisasi Majelis Taklim Mushola Ar-Rahman pada Gambar 1.

Terdapat beberapa macam kegiatan di dalam Majelis Taklim Mushola Ar-Rahman seperti :

Kegiatan Pengajian Rutin:

1. Pengajian Akbar
2. Infak/Anak Yatim
3. Rukun Kematian
4. Arisan



Gambar 1. Struktur Organisasi Majelis Taklim Musholah Ar-Rahman

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua anggota Majelis Taklim Mushola Ar-Rahman. Selain itu juga dalam suatu majelis pasti selalu ada seseorang yang mengarahkan dan membina majelis tersebut. Pembina Majelis Taklim Mushola Ar-Rahman adalah Bapak Ustad. M. Nur Husain, S.Pd. Mushola Ar-Rahman selalu melakukan kegiatan rutin pengajiannya setiap dua kali dalam satu bulan.

Interaksi Komunikasi

Chen dan Peter (2016) menyatakan bahwa *"information and communication technology (ICT) may overcome the social and spatial barriers of social interaction by enabling easy, affordable communication and activities of multiple forms (ie, textual, audio, and/or visual) anytime and anywhere"*. Hal ini menandakan interaksi komunikasi semakin dimudahkan untuk dilakukan dimana saja dan kapan saja.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam interaksi komunikasi selalu ada peran teknologi. Teknologi selalu membantu dan memudahkan kita dalam pelaksanaan kegiatan maupun saling bertukar informasi. Hal ini juga yang terjadi di Majelis Taklim Mushola Ar-Rahman. Banyak kegiatan Majelis Taklim Mushola Ar-Rahman yang tidak terlepas dari adanya peran teknologi. Majelis Taklim Mushola Ar-Rahman selalu melakukan kegiatan rutin mereka dengan menggunakan teknologi, seperti penggunaan *Microphone*

dan *tape* sebagai penguat suara ketika mereka melakukan pengajian. Kemudian mereka juga menggunakan Teknologi Informasi Internet dalam penyebaran informasinya. Mereka bahkan memanfaatkan teknologi tersebut dengan membuat group percakapan *Whatsup*.

Hasil penelitian mengatakan bahwa dengan adanya group *Whatsup* tersebut memudahkan mereka dalam menerima informasi secara cepat. Jajaran pengurus Majelis Taklim Mushola Ar-Rahman juga mengatakan mereka bisa dengan mudah menyebarkan informasi kepada anggota-anggotanya. Namun tidak semua anggota menggunakan *Handphone* yang sudah canggih seperti sekarang, masih ada beberapa yang menggunakan *Handphone* biasa. Oleh karena itu masih ada beberapa anggota yang menerima informasi tersebut melalui SMS. Kemajuan teknologi ini juga dirasakan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Musolah Ar-Rahman, dalam proses komunikasi dan penyebaran informasi pada media visual.

Menurut penelitian Fitriyadi (2013), teknologi merupakan topik penting yang berkembang dalam berbagai kebijakan publik, Integrasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari mengubah menghubungkan kita dengan informasi dan pengetahuan. Teknologi membantu proses kegiatan informasi setiap masyarakat. Peran TIM dalam bidang informasi sangat besar dampak yang dapat dirasakan. Adanya perkembangan media sosial saat ini bukan tidak mungkin setiap detik setiap pengguna saling bertukar informasi tentang kondisi ataupun kejadian saat itu juga. Manfaat media sosial ini dirasakan melalui kecepatannya dalam menyebarkan informasi. Terlebih dengan menggunakan multimedia, konten informasi dapat diolah sedemikian rupa sehingga menarik dan cepat ditangkap maknanya oleh pengguna.

Media Visual dalam Interaksi Komunikasi

Secara umum, media visual adalah alat atau sarana penyampaian pesan atau informasi dalam kegiatan komunikasi. Media visual adalah media yang dapat dilihat dengan indra penglihatan (mata). Media visual ini juga sering digunakan anggota Majelis Taklim Mushola Ar-Rahman dalam melakukan penyebaran informasi. Mereka banyak membagikan gambar-gambar atau foto-foto penyemangat, *qoutes-qoutes* islami, atau bahkan bacaan surah-surah antar anggotanya.

Menurut Wibawa dan Mukti (1992), media visual dibedakan menjadi dua yaitu: media visual diam dan media visual gerak. Media visual diam antara lain : foto, ilustrasi, *flash card*, gambar pilihan dan potongan gambar, film bingkai, film rangkai, transparansi, proyektor tak tembus pandang, *mikrofis*, *overhead proyektor*, *stereo proyektor*, *mikro proyektor* dan *tachitosopes*, *grafis*, *bagan*, diagram, poster, gambar kartun, peta dan globe. Media visual gerak meliputi gambar-gambar proyeksi bergerak seperti film bisu, dan film kartun Menurut adami dan Arey (2016) media visual juga ada yang berbentuk elektronik contohnya portal-portal berita online, kemudian blog-blog di beberapa situs internet.

Media Audio dalam Interaksi Komunikasi

Media audio, merupakan media yang hanya dapat didengar saja, atau media yang hanya memiliki unsur suara, seperti radio dan rekaman suara. Menurut, Daryanto (2010), audio berasal dari kata *audible*, yang artinya suaranya dapat diperdengarkan secara wajar oleh telinga manusia. Media audio memiliki karakteristik atau ciri khusus berupa : Pesan yang disampaikan berupa lambang lambang auditif, baik verbal (ke dalam kata-kata atau bahasa lisan) maupun non verbal, dapat membangun dan mengembangkan imiginasi, serta cenderung satu arah. Hasil penelitian Gunawan (2016), Media audio merupakan media yang fleksibel karena bentuknya yang mudah dibawa, praktis dan relatif murah (misalnya tape compo dan pengeras suara)

Penggunaan media audio juga diterapkan di Majelis Taklim Mushola Ar-Rahman. Hal ini dibuktikan dengan adanya alat pengeras suara seperti *microphone*, *tape*, dan *speaker*. Biasanya pengajian rutin yang dilakukan menggunakan alat-alat dan teknologi tersebut, yang merupakan fasilitas mushola Ar-Rahman. Peran media audio sangat penting bagi kegiatan tersebut, seperti kegiatan pada saat mengaji bersama, bayangkan bila tidak ada pengeras suara, bisa menyebabkan pelaksanaan kegiatan terhambat, karena tanpa pengeras suara sangat sulit untuk orang lain dapat mendengarkan secara jelas.

Media Audiovisual dalam Interaksi Komuni- kasi

Media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, seperti rekaman video, berbagai ukuran film, *Slide* suara, dan lain sebagainya. Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik, sebab mengandung kedua unsur jenis media yang pertama dan kedua. Media audiovisual adalah media yang mengandalkan indera pendengaran dan indera penglihatan. Menurut Burg (2010), persepsi media audiovisual interaksi yang mempengaruhi dan meningkatkan kemampuan kita dalam mengidentifikasi suatu objek baik objek permasalahan yang kita hadapi dalam keseharian. Menurut penelitian Mustika (2015), teknologi audiovisual merupakan teknologi cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Contoh medianya adalah TV, video, VCD, DVD player, Film Projector, CD/DVD ROM komputer.

Pelaksanaan kegiatan Majelis Taklim Mushola Ar-Rahman juga menggunakan media audiovisual, hal ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh Ibu Eliyana bahwa terkadang mereka juga saling membagikan video-video informatif di group *whatsapp* tersebut. Seperti video-video ceramah oleh para pesohor agama, ulama-ulama, dan lain-lain. Bahkan mereka juga pernah belajar khasidahan/mawalan dari media *youtube*. Jadi mereka melihat khosidahan yang bagus mereka perhatikan bagaimana irama-iramanya gerakan-gerakannya yang banyak ditampilkan di *youtube* tersebut, sehingga mereka terinspirasi untuk dapat latihan dan menampilkan yang baik untuk group mawalan ibu-ibu Majelis Taklim Mushola Ar-Rahman.

Penelitian Putri, Farid, dan Akifah (2017), menyatakan bahwa media audivisual merupakan media yang menarik untuk digunakan karena tampilannya yang tidak monoton, ada gambar, suara, gerak, sehingga membuat masyarakat memahami informasi yang diberikan. Hal ini juga seusai dilakukan pembina kepada Majelis Taklim Mushola Ar-Rahman, Bapak M. Nur Husain membagikan kajian-kajiannya melalui video kepada ibu-ibu pengajian tersebut, ini menandakan bahwa pemberian informasi dapat dilakukan dimana saja kita berada. Hal ini membuktikan bahwa peran audiovisual dalam teknologi infomasi dan multimedia sangat membantu, memudahkan, dan menambah informasi dan pengetahuan bagi kegiatan interaksi komunikasi mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Teknologi Informasi dan Multimedia: Media Audio, Video, dan Audiovisual sangat membantu proses kegiatan maupun interaksi komunikasi Ibu-ibu Majelis Taklim Mushola Ar-Rahman Desa Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung. Penerapan Teknologi Informasi dan Multimedia bagi ibu-ibu Majelis Taklim Mushola Ar-Rahman bukanlah hal yang tabu, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kegiatan-kegiatan mereka yang selalu berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Multimedia tersebut. Dalam Media Visual Ibu-ibu tersebut memanfaatkan foto-foto atau gambar-gambar yang menginspirasi mereka terutama pada kegiatan yang islami, seperti qoutes-qoutes islam, atau surah-surah. Dalam Media Audio ibu-ibu memanfaatkan pengeras suara maupun tape untuk kegiatan pengajian mereka. Dalam Media Audiovisual mereka menerapkan video-video baik yang menunjang kegiatan mereka maupun dalam menerima informasi-informasi religius yang bermanfaat seperti ceramah atau khusidah-khusidah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami, E., dan C Arey . 2016. Special Issue: Social media and the visual. *Journal Sage*. Vol 15 (3). [diakses pada tanggal 17 Desember 2018].
- Anderson, R. H. 1994. *Pemilihan dan Pengembangan media Video. Pembelajaran*. Grafindo Pers. Jakarta.
- Burg EVD. (2010). Efficient Visual Search from Synchronized Auditory Signals Requires Transient Audiovisual Events. *Journal Pone*. Vol 5 (5) page 1-11. [diakses pada tanggal 17 Desember 2018].
- Chen, YR., dan Peter JS. 2016. The Effect of Information Communication Technology Interventions on Reducing Social Isolation in the Elderly: A Systematic Review. *Journal of Medical Internet Research Publications*. Vol 18(1). [diakses pada tanggal 17 Desember 2018].
- Daryanto. 2010. *Media Pembelajaran Peranannya Sangat Penting Dalam Mencapai Tujuan Pembelajaran*. Gava Media. Yogyakarta.
- Fitriyadi, H. 2013. Integrasi Teknologi Informasi Komunikasi Dalam Pendidikan: Potensi Manfaat, Masyarakat Berbasis Pengetahuan, Pendidikan Nilai, Strategi Implementasi Dan Pengembangan Profesional. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*. Vol 21 (3) hal 269-284. [diakses pada tanggal 17 Desember 2018].

- Gunawan, A. 2016. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Melalui Penggunaan Media Pendidikan. *Pedagogi Jurnal*. Vol 3(2). Hal 16-24. diakses pada tanggal 17 Desember 2018].
- Husain, C. 2014. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembelajaran di SMA Muhammadiyah Tarakan. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*. Vol 2 (2) hal 184-192. [diakses pada tanggal 17 Desember 2018].
- Mustika, R. 2015. Media Pembelajaran Sistem Audio Untuk Pemberdayaan Pendidikan Di Komunitas Masyarakat. *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*. Vol 6 (1) hal : 57-68. [diakses pada tanggal 17 Desember 2018].
- Putri, AT., Farit , dan Akifah. 2017. Efektivitas media audiovisual dan leaflet terhadap pengetahuan, sikap, dan tindakan tentang pencegahan penyakit gastritis. *Jurnal Ilmiah mahasiswa Kesehatan Masyarakat*, Vol 2(6) hal 1-11. [diakses pada tanggal 17 Desember 2018].
- Wibawa, B dan Mukti F. 1992. *Media Pengajaran*. Dikti Suryabrata. Jakarta

DAMPAK FAKTOR INTERNAL PETANI UPAYA KHUSUS TANAMAN JAGUNG BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Marsianus Palo^{1*}, Sugiyanto²

¹Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pertanian Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang dan Staf Pengajar Universitas Negeri Timor.

² Guru Besar dan Dosen Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang.

*Email: fallomarsianus@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penerapan komunikasi upaya khusus (Upsus) jagung merupakan program pemerintah Kabupaten TTU, Propinsi NTT dimulai sejak tahun 2015. Sasaran program tahun 2017 yakni pencapaian luas panen jagung 1.550 ha, produksi 5.425 ton dan produktivitas 3.5 ton/ha. Guna mencapai sasaran tersebut, pemerintah memperluas program Upsus dengan melibatkan masyarakat. Kondisi awal petani dengan pola usahatani konvensional, turun temurun didahului upacara ritual sebagai kearifan lokal yang dipercaya dapat berkomunikasi dengan alam dan leluhur sehingga hasil usahatani jagungnya mencapai optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik internal dan eksternal petani dalam hubungannya dengan efektifitas penerapan komunikasi dalam Upsus jagung. Unit analisis ini adalah Petani Peserta Upsus, penentuan responden dengan teknik *Simple Random Sampling*. Pengumpulan data primer melalui kuisisioner dan wawancara, sedangkan data sekunder bersumber dari data proyek Upsus Pajale, BPS dan Instansi terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal petani berhubungan signifikan dengan kegiatan usahatani jagung. Pernyataan Lionberger & Gwin, (1982), Slamet (2007), dan Rogers (2003) bahwa usia, pendidikan, pengalaman, skala usaha, dan perilaku berkomunikasi, dapat mempengaruhi perubahan perilaku petani jagung guna mencapai tujuan jangka panjang yakni menunjang keberhasilan program Upsus Jagung. Dalam penerapan komunikasi Upsus sebagian besar responden masih menggunakan nilai-nilai kearifan lokal, sehingga perlu penanganan yang arif dalam menjalankan program Upsus tersebut.

Kata kunci: Komunikasi, Upaya Khusus Jagung, Kearifan lokal.

PENDAHULUAN

Secara geografis kabupaten TTU memiliki wilayah seluas 2.669,7 km² atau sekitar 5,48% dari luas daratan yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, wilayah laut kurang lebih 950 km² dengan panjang garis pantai kurang lebih 50 km. Secara administratif, Kabupaten TTU terdiri dari 24 kecamatan dan 193 desa/kelurahan (BPS Timor Tengah Utara 2015, 3). Topografi Kabupaten TTU pada umumnya bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian yang bervariasi: 1) 177,60 Km² (6,63 %) memiliki ketinggian kurang dari 100 meter di atas permukaan laut (DPL); 2) 1.499,45 Km² (56,17 %) memiliki ketinggian 100–500 meter DPL; 3) 993,19 Km² (37,20 %) memiliki ketinggian lebih dari 500 meter DPL (Susandi 2014, 17).

Komoditi jagung memiliki peranan pokok sebagai pemenuh kebutuhan pangan, pakan dan industri yang setiap tahunnya cenderung meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan berkembangnya industri pangan dan pakan. Dari sisi ketahanan pangan nasional fungsi komoditi jagung menjadi sangat strategis. Komoditi jagung berperan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pakan ternak yang setiap tahun terus meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pakan tersebut maka Kementerian Pertanian berupaya agar produksi jagung terus meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut maka mulai tahun 2015 Kementerian Pertanian melaksanakan program peningkatan produksi pangan khususnya jagung dalam bentuk program Upaya Khusus (Upsus) padi, jagung, dan kedelai (Pajale) dengan pendekatan perluasan areal tanam, Gerakan Penerapan Pengolahan Tanaman terpadu (GP-PTT), penyediaan benih, pupuk, pestisida, alsintan, dan penanggulangan organisme pengganggu.

Penerapan komunikasi Upsus tanaman jagung di Kabupaten TTU sudah berjalan sejak tiga tahun yang lalu dan disosialisasikan oleh Dinas Pertanian melalui tenaga penyuluh/pendamping kepada petani jagung sesuai dengan potensi lahan yang dimiliki dan inovasinya dapat dikembangkan di lahan masing-masing petani. Sistem komunikasi Upsus jagung yang dikembangkan yakni secara interpersonal karena petani di TTU masih berada dalam kondisi konvensional baik dari segi sumberdaya manusia maupun ketersediaan sarana dan prasarana usahatani yang dimilikinya. Berdasarkan data Dinas Pertanian TTU (2018) bahwa target produksi jagung tahun 2015: 7000 ton, tahun 2016:

10.500 ton, dan tahun 2017: 5.425 ton. Namun hasil yang diperoleh, pada tahun 2015: 1.033,2 ton, tahun 2016: 1.236,7 ton, dan tahun 2017: 1.490 ton, dimana produktivitas yang dicapai rata-rata 2,37 ton/ha.

Memperhatikan data tersebut di atas, menunjukkan bahwa angka harapan terhadap prospek komoditi jagung guna mencapai target meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan dari komoditi jagung tersebut belum berhasil. Rendahnya produksi dan produktivitas jagung di TTU tersebut disebabkan karena beberapa hal antara lain: petani masih menggunakan cara berusahatani konvensional dengan penerapan teknologi budidaya yang kurang intensif, walaupun petani sudah menerima sosialisasi dan bantuan sarana/prasarana dari program Pajale (*tanpa olah tanah, dan atau olah tanah seadanya, tanpa pemupukan, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman belum optimal*). Faktor lainnya yakni, tergerusnya nilai-nilai kearifan lokal dimana pola usahatani yang dilakukan dipandang masih subsisten, sehingga petani kurang termotivasi untuk meningkatkan produksi secara optimal, selain itu adanya kekeringan, kurang ketersediaan benih unggul, pupuk, obat-obatan, tingginya serangan hama penyakit, terbatasnya tenaga kerja, rendahnya diseminasi teknologi, transportasi biaya tinggi, kurang adanya pasar bagi hasil produksi, dan keterbatasan modal, minimnya akses informasi. Berbagai persoalan diatas menyebabkan laju peningkatan areal tanam jagung berjalan lambat yang pada akhirnya berimbas pada rendahnya produksi dan produktivitas jagung yang dicapai

Petani jagung di TTU memiliki karakteristik internal dan eksternal dan masih menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal yang kerap kali kurang mendapat perhatian dalam kegiatan usahatannya, baik aspek umur, pendidikan (*formal dan non formal*), pengalaman berusahatani jagung, luas lahan yang digarap, tingkat kekosmopolitan, dan motivasi dalam berusahatani jagung. Beberapa teori dan hasil penelitian diantaranya, Lionberger & Gwin, (1982) menyatakan bahwa usia, tingkat pendidikan formal, keterampilan dan kemampuan manajemen para petani sebagai *prior condition* yang dapat mempengaruhi perilaku petani guna mencapai tujuan jangka panjang dalam menunjang kegiatan usahatani. Fatchiya, (2010) dalam penelitiannya tentang faktor-faktor karakteristik internal mempengaruhi kapasitas inovasi seseorang petani adalah umur, pendidikan formal, pendidikan non formal, pengalaman kerja, pendapatan, dan luas skala usaha. Rogers (2003) menyatakan karakteristik individu meliputi status sosial ekonomi,

nilai-nilai kepribadian dan perilaku komunikasi merupakan variabel yang mempengaruhi tingkat penerimaan individu terhadap inovasi.

Dalam kaitannya dengan kearifan lokal, Nordholt (1971) menyatakan bahwa dalam usaha pertanian jagung di TTU di wilayah desa Manunain Kecamatan Insana Kabupaten TTU-NTT, terdapat empat belas ritus (kearifan local), yakni (a) memilih sebidang tanah; (b) meminta izin; (c) mengasah parang; (d) menebang pohon; (e) membakar kebun baru; (f) memadamkan obor bambu; (g) membendung erosi; (h) menghindarikemarau panjang dan kegagalan panen; (i) membayar tobe; (j) menjaga tanaman muda; (k) memetik jagung pertama; (l) memanen padi; (m) memanen jagung; (n) kembali ke kampung. Dalam petani Suku *Dawan* di TTU kearifan lokal masih menjadi unsur penting yang perlu diperhatikan karena sudah berlangsung secara turun temurun terutama dalam kegiatan-kegiatan pertanian. Kelalaian petani terhadap tahapan ritual usahatani jagung dapat berakibat terhadap proses usahatani jagung yang dikembangkan. Berkaitan dengan Upsus tanaman jagung yang dikembangkan petani di TTU belum memperhatikan kearifan lokal dari pengolahan lahan hingga panen dan pascapanen. Keraf (2002) bahwa kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia dan alam tempat tinggalnya.

Penerapan program Upsus tanaman jagung di TTU akan dapat berjalan secara efektif apabila proses komunikasi kepada petani harus memperhatikan kearifan lokal yang diyakini petani. Harinta (2010) mengatakan bahwa semakin intensifnya proses komunikasi antara penyuluh dan petani dalam menawarkan inovasi teknologi Upsus, proses adopsi akan makin cepat. Artinya, jika Penyuluh dan Babinsa serta petani mampu berkomunikasi dalam mengenalkan inovasi secara terus-menerus maka proses adopsi akan berlangsung dengan baik sesuai dengan tingkat penerimaan petani, sehingga harapan dari efektivitas komunikasi program Upsus tanaman jagung adalah adanya terjadinya perubahan perilaku petani sehingga mampu meningkatkan produktivitas tanaman jagung secara berkelanjutan.

Dari uraian di atas, maka diperlukan kajian yang mendalam agar dapat menjawab permasalahan terkait Penerapan Komunikasi Upsus Tanaman Jagung di TTU serta bagaimana dampak faktor internal dan eksternal petani Upsus terhadap pelaksanaan usahatani jagung di TTU.

METODE PENELITIAN

Metoda yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif-kualitatif. Penentuan responden dilakukan menggunakan teknik *Simple Random Sampling* dengan pendekatan Rumus Slovin. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara yang dilakukan pada bulan Januari-April 2019 dengan menggunakan instrument kuisisioner terstruktur. Wawancara mendalam dilakukan di desa Manunain Kecamatan Insana Kabupaten TTU-NTT khususnya pada kelompok tani Fatusene. Selain wawancara dengan petani sampel pada anggota kelompok tani Jagung, juga dikumpulkan data yang bersumber dari penyuluh pertanian, Babinsa, tokoh-tokoh adat, dan kepala Desa Manunain. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mempelajari data dari Program Upsus Pajale, BPS dan Instansi yang terkait, selanjutnya Data yang diperoleh diari apangan dilakukan analisis baik secara kualitatif yang terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi maupun analisis kuantitatif dengan menggunakan tabulair analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Komunikasi Upsus Tanaman Jagung di TTU

Komunikasi program Upsus tanaman jagung di TTU telah dilaksanakan secara serentak sejak tahun 2015. Sumber komunikasi berasal dari penyuluh (komunikator) setempat dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi, baik interpersonal/tatap muka, penggunaan leaflet/brosur maupun media massa lainnya berupa pengenalan program-program tanaman padi, jagung, dan kedelai (Upsus Pajale). Pesan-pesan komunikasi yang dimaksud berupa inovasi tentang Gerakan Penerapan Pengolahan Tanaman Terpadu (GP-PPT), Optimasi Perluasan Areal Tanam Kedelai melalui

Peningkatan Indeks Pertanian (PAT-PIP Kedelai), Perluasan Areal Tanam jagung (PAT jagung), penyediaan sarana dan prasarana pertanian (bibit, pupuk, pestisida, alat, dan mesin pertanian), pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), dan dampak perubahan iklim, asuransi pertanian serta pengawalan atau pendampingan.

Tingkat Penerimaan masyarakat terhadap inovasi program Upsus Jagung di wilayah TTU-NTT dapat digambarkan dalam lima tahap penerimaan, yakni sebagai berikut:

- (1) Golongan pelopor atau innovator, yakni golongan masyarakat yang paling cepat menerapkan pengenalan inovasi program Upsus Jagung yang ada. Biasanya golongan ini kurang memperdulikan tawaran penyuluh aktif menyebarluaskan inovasi program Upsus Jagung tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya kepada masyarakat disekitarnya.
- (2) Golongan Pengetrap Dini atau *Early Adaptor*, yakni golongan yang cepat menanggapi dan memberikan respon penerimaan terhadap tawaran program GP-PPT yang berasal dari penyuluh dan mendatanginya secara personal
- (3) Golongan Pengetrap Awal atau *Early Majority*, golongan ini lambat dalam menanggapi suatu tawaran program Upsus Jagung. Biasanya mereka bersedia jika harus ada bukti nyata yang menyatakan bahwa program Upsus Jagung tersebut mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.
- (4) Golongan Pengetrap Akhir atau *Late Majority*, yakni golongan yang sangat lambat dalam menanggapi tawaran adanya program Upsus Jagung tetapi jika mereka yang ada pada golongan ini sudah benar-benar yakin dan telah ditunjukkan adanya bukti nyata dari manfaat program Upsus Jagung, maka mereka pun akan bersedia mengikuti program Upsus Jagung
- (5) Golongan Penolak, golongan ini biasanya kurang mengetahui manfaat dari program Upsus Jagung dan menganggap program Upsus Jagung sama saja dengan program-program yang pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga mereka pada golongan ini akan langsung menolak ketika program Upsus Jagung datang dan menawarkan kepada mereka.

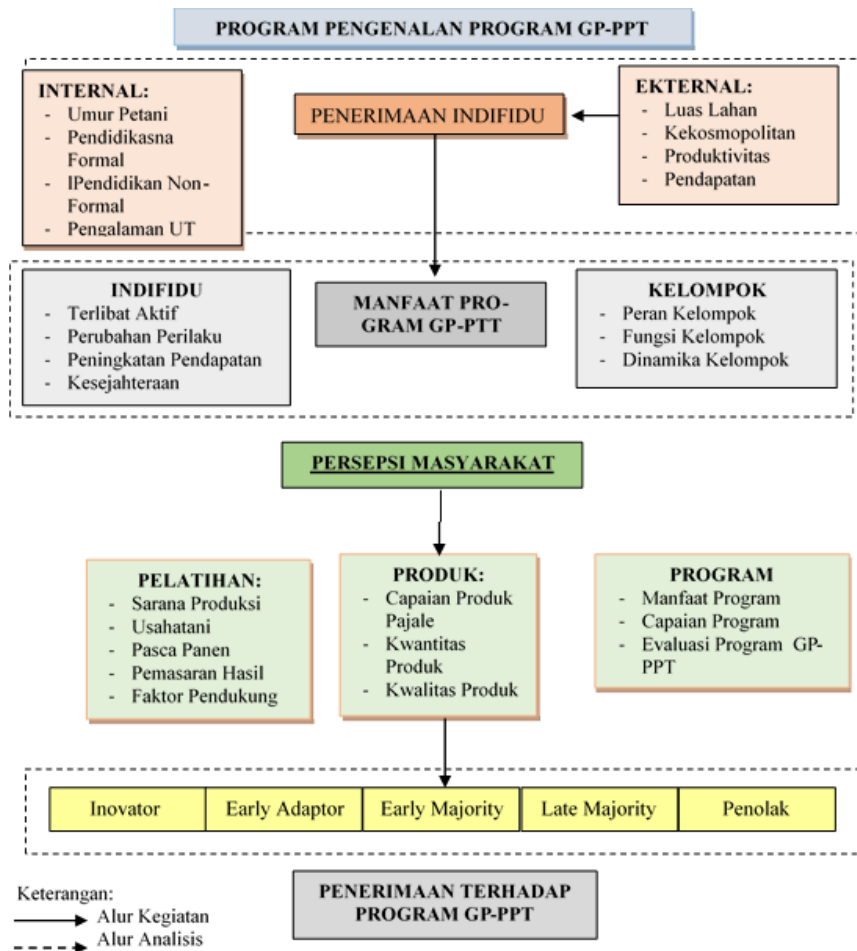
Pada lima golongan diatas makan dapat akan dapat disimpulkan bahwa setiap individu mempunyai tahap penerimaan inovasi program Upsus Jagung, bisa dipengaruhi

oleh kemampuan penyuluh dalam menyampaikan informasi tentang program Upsus Jagung ataupun dipengaruhi oleh internal masyarakat.

Proses Komunikasi Upsus Jagung yang dilakukan petani Kecamatan Insana Kabupaten TTU-NTT umumnya berjalan secara interpersonal, dan hanya beberapa responden yang menggunakan media elektronik seperti HP dan internet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa lokal (*Dawan*) yakni bahasa sebagian besar responden sehari-hari dan Bahasa Indonesia. Berkaitan dengan kegiatan Upsus tanaman jagung mayoritas responden petani menggunakan bahasa *Dawan* sebagai bahasa komunikasi dalam kegiatan tersebut baik diantara mereka maupun dengan para penyuluh, sedangkan bahasa komunikasi dengan pengelola program, baik dari tahap persiapan lahan, pemilihan benih, peanaman, pemeliharaan hingga pengendalian hama dan penyakit serta panen dan pasca panen umumnya responden menggunakan kombinasi antara Bahasa lokal/*Dawan* dengan Bahasa Indonesia..

Umumnya responden petani jagung di Kecamatan Insana Kabupaten TTU-NTT menjlsnkan usahatani jagungnya masih mempertimnbangkan factor kearifan lokal yang ada yakni berupa penggunaan ritual-ritual atau doa-doa kepada para leluhur dan alam semesta, mereka sangat meyakini bahwa melakukan komunikasi dengan para leluhur dan alam semesta secara konsisten maka usahatani meraka dapat berjalan dengan baik serta akan memberikan hasil yang sesuai dengan harapan, sebaliknya jika tidak melaksanakan ritual maka keyakinan mereka pasti mengalami gagal panen bahkan terjadi bencana.

Berdasarkan asumsi tersebut diatas maka secara skematis, kerangka pemikiran ini disajikan pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Tingkat Penerimaan Masyarakat Terhadap Program GP-PPT

Bentuk-bentuk relasi kearifan lokal ini telah mereka jalankan sejak turun-temurun dari awal kegiatan berupa: a) Tfon fani benas (*mengasah kapak dan parang*), b) Ta sine mes ok ni ni (*memohon ijin kepada leluhur*), c) To en aut fine (*memberitahu dan mohon ijin kepada roh alam*), d) Ta meo lele (*membersihkan kebun*), e) Ta poen fini (*mengeluarkan benih*), f) Eka ho'e (*menahan humus tanah*), g) Pena nasuf (*jagung berbunga*), h). At Sek Pena (*pemanenan jagung*), i) Ta sae be noe lopo (*mengembalikan hasil panen ke Lopo/tempan penyimpanan hasil panen*). Dalam melakukan ritual kearifan lokal tersebut biasanya dipimpin oleh ketua adat setempat dengan didampingi oleh kepala keluarga. Seluruh responden petani meyakini bahwa kelalain jika tidak melakukan satu kegiatan ritual saja akan menimbulkan kegagalan panen akibat adanya musibah yang

sering meraka alami berupa angin kencang, gangguan hama belalang, gangguan ternak dan lainnya.

Adanya program Upsus Jagung di Kecamatan Insana Kabupaten TTU yang tidak mempertimbangkan kearifan lokal diyakini berdampak belum meningkatnya produksi yang dicapai petani jagung di Kecamatan Insana Kabupaten TTU-NTT. Perkembangan produksi jagung disajikan pada Tabel 1

Lampiran 1. Target Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung Tahun 2015-2019 di tingkat Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Sasaran	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (ku/ha)	Produksi (Ton)
1	2015				
	Nasional	4.244.976	4.019.360	50,54	20.313.731
	Provinsi	273.694	259.148	28,08	727.790
	Kab.TTU	13.182	13.182	20,01	26.462
2	2016				
	Nasional	4.372.365	4.153.747	51,41	21.353.794
	Propinsi	281.905	267.810	28,57	765.053
	Kab.TTU	13.183	13.133	20.03	26.665
3	2017				
	Nasional	4.470.435	4.246.914	52,65	22.360.000
	Propinsi	288.228	273.816	29,26	801.103
	Kab.TTU	21.401	21.401	32,32	69.184
4	2018				
	Nasional	4.599.208	4.369.248	53,75	23.484.708
	Provinsi	296.530	281.704	29,87	841.398
	Kab.TTU	27.392	27.092	28,29	76.655
5	2019				
	Nasional	4.744.526	4.507.299	54,80	24.700.000
	Proipinsi	305.900	290.605	30,45	884.939
	Kab.TTU	30.134	30.018	30,76	92.348

Sumber: Ditjen Tanaman Pangan, 2019

Dari Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa target luas tanam, luas panen dan produksi jagung baik di kabupaten TTU maupun propinsi NTT masih berada di bawah nasional, hal ini tampaknya program Upsus Jagung tidak memperhitungkan kearifan lokal petani baik pada kegiatan persiapan lahan hingga panen dan pascapanen.

3.2. Analisa Faktor Internal dan Eksternal serta Dampaknya terhadap Efektivitas Penerimaan Komunikasi

1. Umur Petani

Umur dalam penelitian ini adalah jumlah tahun sejak lahir responden hingga penelitian ini dilakukan. Menurut BPS tahun 2018, umur produktif tenaga kerja antara 15-64 tahun. Responden petani di lokasi penelitian tergolong produktif, yang berarti bahwa dari segi kesehatan dan kemampuan bekerja pada program Upsus jagung pada usia produktif mempunyai kemampuan beraktivitas lebih tinggi dibandingkan yang kurang produktif. Dalam hubungan dengan penerimaan inovasi program Upsus jagung, petani produktif cenderung lebih aktif dalam berkomunikasi terutama untuk mendapatkan informasi penting terkait dalam proses usahatani seperti penanaman, perawatan dan pemanenan jagung. Hal ini sejalan dengan penelitian Malta (2008) yang menyebutkan bahwa tingkat penerimaan petani dalam proses adopsi inovasi berada pada usia produktif lebih tanggap dibanding petani yang berumur tua. Pada umur tua umumnya terjadi penurunan kondisi fisik, lambat dalam proses pengambilan keputusan serta penuh pertimbangan dan kehati-hatian. Dengan demikian disimpulkan bahwa umur produktif petani berhubungan nyata dengan efektivitas penerimaan komunikasi pada program Upsus tanaman jagung di Kabupaten TTU-NTT.

2. Pendidikan Formal

Tingkat pendidikan formal informan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa tingkat. Tingkat pendidikan yang berada pada kategori rendah mulai dari tidak sekolah hingga hanya kelas lima Sekolah Dasar atau Sekolah Rakyat, sementara tingkat pendidikan yang tergolong tinggi mencapai perguruan tinggi yaitu hingga Strata satu. Tingkat pendidikan formal terbesar adalah berada pada kondisi sedang dengan rata-rata selama tujuh tahun. Rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar responden disebabkan sulitnya mendapatkan biaya pendidikan dan rendahnya kesadaran serta peran orang tua pada jaman dahulu untuk menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Sebagian besar responden berpendapat bahwa mereka lebih memilih tidak melanjutkan pendidikan melainkan bekerja sejak umur masih sangat muda guna membantu

perekonomian keluarga. Dalam hubungan dengan efektifitas komunikasi, tingkat pendidikan tinggi dapat membantu seseorang memaknai pesan dengan baik. Menurut hasil penelitian Manoppo (2009) bahwa tingkat pendidikan dapat menentukan kemampuan seseorang dalam mencerna informasi yang diberikan berhubungan dengan kualitas kerja dalam melakukan usahatani, wanita tani yang berpendidikan tinggi lebih bisa membudidayakan kakao ke arah agribisnis, bukan sekedar pemenuhan kebutuhan keluarga saja. Kajian-kajian sosial kemasyarakatan seperti yang ditulis oleh Nurmayanti (2010) dalam penelitiannya, bahwa tingkat pendidikan merupakan salah satu dari tiga komponen sosial ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi seseorang pada setiap tahapan kegiatan. Komponen tersebut terdiri dari pekerjaan, pendidikan dan pendapatan. Dengan demikian ada hubungan positif antara tingkat pendidikan seseorang dengan efektivitas komunikasi dalam pelaksanaan Upsus tanaman jagung di TTU.

3. Pendidikan Non formal

Pendidikan nonformal yang diikuti petani jagung program Upsus penelitian adalah dua kali dengan kisaran antara 0-5 kali. Hal ini menunjukkan bahwa petani responden dalam kaitan dengan pendidikan nonformal tergolong rendah. Pelatihan yang diikuti tersebut berupa pelatihan budidaya jagung (pemilihan benih, persiapan tanam, penanaman, pemeliharaan, pengendalian hama dan penyakit serta panen dan pascapanen yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan tingkat Kabupaten TTU. Suratiyah (2006) menyatakan bahwa pendidikan formal yang rendah sangat penting dikembangkan pendidikan nonformalnya misalnya kursus kelompok tani, penyuluhan, demplot, studi banding dan pertemuan lapang akan membuka cakrawala petani, menambah pengalaman petani dalam mengelola usahatannya. Responden yang mengikuti pelatihan lebih dari empat kali adalah pengurus kelompok tani, aparat desa/kelurahan dan petani maju. Hal ini disadari bahwa suatu pelatihan memiliki keterbatasan baik jumlah maupun volume kegiatannya, sehingga pengurus kelompok, aparat desa/kelurahan dan petani maju yang telah memperoleh pelatihan diharapkan dapat meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada anggotanya atau petani lainnya sehingga dapat meluas dan berkembang dari petani yang satu ke petani lainnya.

4. Pengalaman Berusahatani

Pengalaman berusahatani merupakan lamanya waktu (tahun) bekerja dalam kegiatan berusahatani padi. Pengalaman berusahatani cenderung mempengaruhi keputusan yang akan diambil petani pada kegiatan usahatani berikutnya. Petani yang sudah lama bertani akan lebih mudah untuk menerapkan inovasi dari pada petani pemula, hal ini dikarenakan pengalaman yang lebih banyak sehingga sudah dapat membuat perbandingan dalam mengambil keputusan. Pengalaman berusahatani jagung informan di Kelompok Tani Fatusene berada pada kategori lama dalam berusahatani jagung dengan selang antara 15-25 tahun. Hal ini juga menunjukkan bahwa petani di Kelompok Tani Fatusene telah memiliki pengalaman dalam berusahatani jagung. Mardikanto (2009) menyebutkan bahwa pengalaman seseorang akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan, sehingga petani yang memiliki pengalaman berusahatani lebih lama cenderung akan selektif dalam proses komunikasi dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan petani yang memiliki pengalaman yang sedikit.

5. Luas Lahan Garapan

Luas lahan garapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah luas lahan jagung yang dimiliki oleh informan yang digunakan untuk budidaya tanaman jagung pada program Upsus Pajale guna peningkatan produksi baik milik sendiri, sewa, bagi hasil, maupun gilir. Luas lahan yang digarap mempengaruhi sikap dalam melakukan penggarapan lahan tersebut. Menurut Mardikanto (1993) petani yang menguasai lahan yang luas akan memperoleh produksi yang besar dan begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kisaran luas lahan responden berkisar antara 0.25 hektar hingga 2 hektar. Persentase terbesar adalah berada pada kategori sempit yang luasnya hanya berkisar antara 0.25 hektar hingga 1 hektar. Petani yang memiliki atau menguasai lahan di bawah 0.5 hektar dikatakan dengan petani gurem (Sastraatmadja 2006). Kepemilikan lahan rata-rata di bawah 0.5 hektar dan tanpa ditopang adanya manajemen pengelolaan lahan yang memungkinkan tercapainya skala usaha, akan mengakibatkan usahatani menjadi kurang menarik secara ekonomis, karena tidak dapat memberikan jaminan sebagai sumber pendapatan yang mampu memberikan penghidupan yang layak.

6. Kekosmopolitan

Hasil wawancara mendalam dengan petani responden menunjukkan bahwa tingkat kekosmopolitan petani sangat minim atau rendah. Hal ini menunjukkan bahwa responden jarang bepergian keluar desanya untuk mencari informasi tentang sarana prasarana untuk produksi, pasar, dan usaha lain serta teknologi untuk usahatannya. Petani mendapatkan informasi yang diperlukan dari pengurus kelompok dan atau penyuluh serta Babinsa. Dalam kondisi tersebut petani cukup terbuka terhadap adanya informasi dari luar karena didorong oleh keinginan peningkatkan produksi tanaman dan pendapatannya.

Pada petani dengan tingkat kosmolitan tinggi adalah ketua/pengurus kelompok tani, tokoh adat, petani yang memiliki pekerjaan sebagai peternak atau pedagang. Hal ini menunjukkan responden petani mencari informasi pasar dan teknologi untuk mengembangkan usahatannya. Menurut Indraningsih (2010) kekosmopolitan orientasi keluar sistem sosial dengan hubungan interpersonal yang luas. Di lokasi penelitian, petani lebih mudah mendapatkan informasi dari penyuluh dan Babinsa, mereka lebih mempercayai sumber informasi berasal dari penyuluh dan Babinsa tersebut. Hal ini membuat petani lebih fokus dalam melaksanakan usahatani karena untuk melakukan pencarian informasi tersebut dibutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

7. Produktivitas Jagung

Produktivitas petani dalam Upsus tanaman jagung, informan memiliki produktivitas usahatani jagung dengan rata-rata di Kelompok Tani Fatusene mencapai 2,9 ton/ha, sementara target produktivitas jagung nasional sebesar 5,04 ton/ha. Dengan demikian produktivitas jagung di Kelompok Tani Fatusene Desa Manunain^B Kecamatan Insana Kabupaten TTU tergolong rendah. Rendahnya produktivitas disebabkan karena sistem usahatani jagung oleh petani di Kelompok Tani Fatusene masih belum menggunakan introduksi teknologi yang memadai, minimnya pengetahuan petani rendah, kurang memperhatikan kearifan lokal setempat, keterampilan petani rendah akibat adanya pelatihan-pelatihan namun kurang diaplikasikan dalam pemanfaatan teknologi usahatani jagung. Hal ini sejalan dengan pendapat Alfons *et al.* (2003) bahwa petani kurang menggunakan varietas unggul dengan teknologi budidaya kurang intensif (tanpa olah

tanah/olah tanah seadanya, tanpa pemupukan sesuai anjuran, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman belum optimal).

Peningkatan produktivitas usahatani jagung di Kelompok Tani Fatusene Desa Manunain B dapat dilakukan apabila memperbaiki relasi kearifan lokal (leluhur, alam, Sang Pencipta) dan memperbaiki teknik budidaya, penggunaan varietas unggul hibrida dan komposit, pengaturan waktu tanam sesuai dengan kondisi agroekosistem, dan perluasan areal tanam, peningkatan intensifikasi pertanian (IP) pada lahan-lahan yang masih berpeluang untuk dikembangkan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Sulaeman, *et al.* 1987, Pujiharti, *et al.* 2008, Syarifuddin, *et al.* 2004) menyatakan bahwa agar usahatani dapat bersaing di pasar domestik maupun internasional perlu upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas usahatani di barengi oleh peningkatan kualitas produksi. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem usahatani jagung dengan inovasi teknologi berbasis sumberdaya lokal antara lain memodifikasi pertanaman, memanipulasi lingkungan dan sistem tanam serta menerapkan inovasi teknologi secara utuh dan spesifik sesuai kearifan lokal setempat sehingga usahatani lebih optimal

8. Pendapatan Usahatani Jagung

Pendapatan usahatani jagung dihitung berdasarkan pendapatan yang diterima petani responden termasuk yang diperhitungkan dari hasil berusahatani jagung musim tanam 2017/2018 saat penelitian dilakukan belum memperhatikan ritual/doa karena kerap kali bantuan yang diberikan terlambat dan kadang-kadang benih kurang sehat. Pendapatan usahatani jagung anggota kelompok tani Fatusene Desa Manunain^B Kecamatan Insana-TTU rata-rata Rp.2.847.222/tahun yang menunjukkan tergolong rendah karena walaupun mendapat bantuan sarana pupuk, benih, pestisida dan alsintan petani hanya memperoleh pendapatan tersebut. Sehubungan dengan itu, untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari petani dapat berusahata disektor lain seperti beternak, kerja bangunan, ojek, sopir angkot, bahkan menjadi TKI ke Malaysia. Nilai pendapatan yang diperoleh tersebut, dapat memberikan gambaran kemampuan petani dalam menyediakan segala kebutuhan usahatannya dari segi finansial, secara sosial adanya kelompok tani dapat terbantu dalam sebagian sarana produksi yang disediakan oleh pemerintah dan anggota kelompok secara gotong royong, petani hanya dapat menanggung konsumsi dalam pemanfaatan tenaga kerja

yang dibutuhkan. Sehubungan dengan itu, maka kegiatan komunikasi dalam penyuluhan penting dilakukan terus-menerus tidak terbatas pada kegiatan fisik semata tapi juga menyangkut pengelolaan keuangan yang dapat membantu menekan kebutuhan sehingga petani tidak puas dengan kehidupan yang ada saat ini.

3.3. Tingkat Penerimaan Petani terhadap Program Upsus Jagung di TTU

Anggota masyarakat dalam suatu sistem sosial dapat dibagi ke dalam kelompok-kelompok adopter (penerima inovasi) hal ini sesuai dengan tingkat keinovatifan (kecepatan dalam menerima inovasi). Salah satu pengelompokan yang bisa dijadikan rujukan adalah pengelompokan berdasarkan kurva adopsi, yang telah diuji oleh Rogers (1983).



Gambar 2. Kelompok Adopter dalam Sistem Sosial (Rogers, 1983)

Tingkat Penerimaan Masyarakat terhadap Program Upsus Jagung, yang merupakan program Upsus Terpadu Padi, Jagung dan Kedele (Pajale) dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, hasil evaluasi 3 tahun terakhir di beberapa daerah masih kurang mendapat perhatian masyarakat petani. Persepsi masyarakat terhadap program Upsus merupakan salah satu faktor penting terhadap keberlangsungan program Upsus Pajale tersebut. Penelitian ini bertujuan melakukan analisis tentang tingkat penerimaan petani dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat penerimaan petani terhadap Upsus Pajale,

khususnya komoditi Jagung di kabupaten TTU NTT baik sebagai suatu inovasi baru maupun sebagai suatu entitas yang memberikan layanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat terhadap Upsus Jagung di Kabupaten TTU berada dalam kategori cukup baik, yang berarti masyarakat menerima keberadaan Upsus Jagung di lingkungan mereka cukup namun belum optimal dalam pemanfaatannya, seperti yang disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Persentase Perbandingan Klasifikasi Penerimaan antara Hasil Penelitian Rogers (1983) dan Penerimaan Masyarakat terhadap Program Upsus Jagung di Kabupaten TTU-NTT (%)

Tingkat Penerimaan	Presentase Klasifikasi Rogers (1983)	Presentase Klasifikasi Penerimaan Upsus Jagung
1. Innovators	2,50	6,50
2. Early adopters	13,50	15,10
3. Early majority	34,00	39,20
4. Late majority	34,00	28,20
5. Laggards	16,00	11,00
Total	100	100%

Sumber: Data Primer, 2019 (diolah)

Dari tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa perbandingan tingkat penerimaan masyarakat hasil klasifikasi Rogers (1983) dengan tingkat penerimaan petani jagung terhadap program Upsus Jagung di kabupaten TTU NTT. Terdapat perbedaan bentuk kurva penerimaan dari hasil penelitian Rogers (1983), dengan kurva tingkat penerimaan masyarakat terhadap program Upsus Jagung di kabupaten TTU-NTT. Berikut perbandingan capaian antara klasifikasi Rogers dengan tingkat penerimaan masyarakat terhadap program Upsus Jagung.

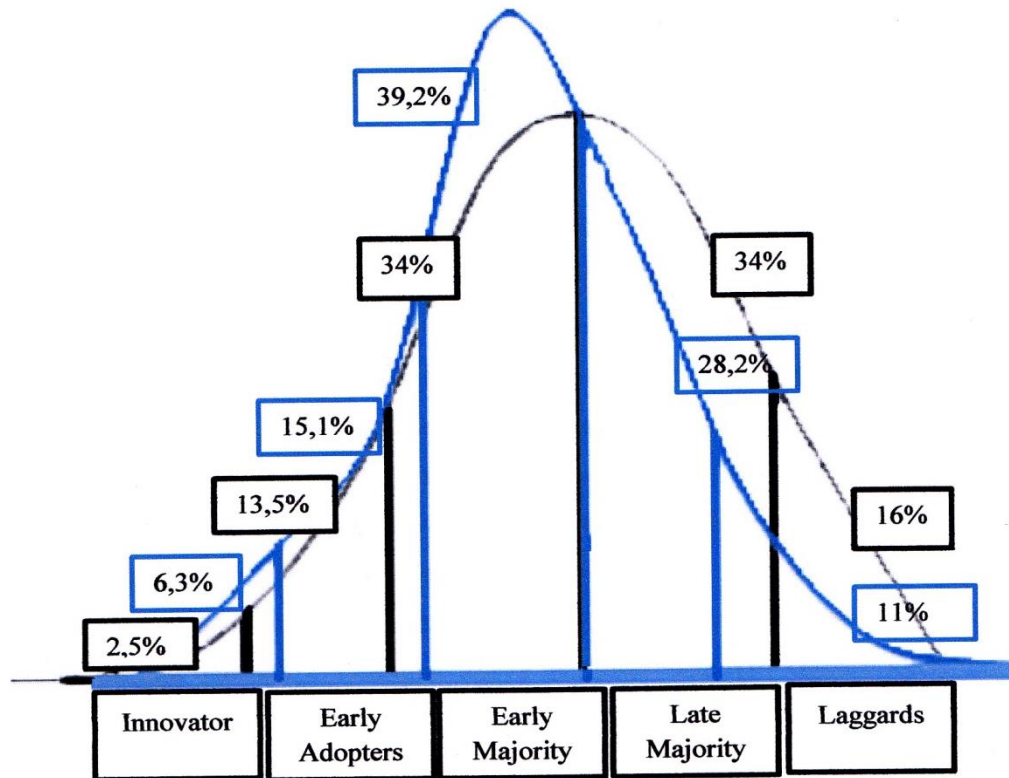
Pada kelompok *Innovator* pada klasifikasi Rogers mencapai sebesar 2,5% sedangkan pada hasil penelitian tingkat penerimaan petani terhadap program Osus Jagung mencapai sebesar 6,3% yang berarti terjadi telah terjadi pergeseran kurva yang dikarenakan petani jagung telah menyadari bahwa mengikuti program Upsus Jagung benar-benar dapat meningkatkan pendapatan mereka. Tanpa adanya penyuluhan tatap muka, kelompok ini memperoleh informasi dari media online.

Pada kelompok *Early Majority* diperoleh pada klasifikasi Rogers mencapai 34% sedangkan penerimaan petani terhadap program Upsus Jagung, mencapai presentase sebesar 39,2%. Hal ini dapat diterangkan bahwa kelompok petani jagung telah menerima program Upsus setelah mereka melihat bukti keberhasilan program dan mereka senantiasa mencari informasi tidak saja dari penyuluh tetapi dari berbagai sumber dan mendengarkan beberapa *testimony* dari petani yang lebih telah terlebih dulu mengikuti program Upsus Jagung.

Kelompok *Late Majority* pada klasifikasi Rogers mencapai nilai 34%, sedangkan pada tingkat penerimaan petani jagung terhadap Program Upsus Jagung mencapai presentase 28,2%. Hal ini berarti terdapat 28,2% kelompok petani jagung yang sebelum menerima program Upsus terlebih dahulu melakukan pertimbangan mendalam dan mencari bukti-bukti keberhasilan program. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa kelompok Petani Penerap Lambat ini masih terkendala dengan factor karakteristik individu dan keterbatasan ekonomi, namun setelah melihat bukti akan manfaat program Upsus Jagung, mereka berminat untuk bergabung dalam program Upsus jagung tersebut

Kelompok *Laggard* pada klasifikasi Rogers mencapai nilai 16%, sedangkan penolakan petani walaupun mereka sudah mengetahui informasi tentang program Upsus Jagung tetapi mereka tetap menolak adanya program Upsus yang mencapai 11%, sehingga tampak bahwa kurva bergeser semakin sedikit masyarakat yang melakukan penolakan program Upsus jagung tersebut.

Hasil perbandingan kurva klasifikasi Rogers dengan hasil penerimaan petani terhadap Program Upsus Jagung di Kabupaten TTU-NTT disajikan pada gambar 3.



Gambar 3. Perbandingan Grafik Klasifikasi Rogers dan Tingkat Penerimaan Masyarakat Terhadap Program Upsus Jagung di Kab.TTU-NTT

Dari Gambar 3 di atas dapat dilihat perbandingan model klasifikasi menurut Rogers (1983) dengan tingkat penerimaan masyarakat terhadap program Upsus Jagung di Kabupaten TTU-NTT, terlihat bahwa adanya pergeseran antara klasifikasi Rogers dengan hasil penelitian. Dikaitkan dengan alasan petani menerima program Upsus Jagung yang paling signifikan yaitu faktor usia, pendidikan formal, informasi dan tanggungan keluarga. Maka dapat dikemukakan bahwa usia paling rendah memiliki tingkat penerimaan yang paling tinggi karena berhubungan dengan akses informasi program Upsus Jagung, sedangkan petani yang memiliki sedikit tanggungan keluarga, semakin aktif dalam mengikuti program Upsus Jagung. Kurva penerimaan petani terhadap program Upsus Jagung di atas menunjukkan kurva yang tidak melengkung sempurna dikarenakan presentase yang didapat pada penerimaan masyarakat, sedangkan kurve klasifikasi Roger merupakan kurve normal karenanya perlu diteliti lebih lanjut faktor-faktor penentu guna mendapatkan kurva normal seperti pada kurva klasifikasi Rogers pada berbagai program berikutnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil Penelitian tingkat penerimaan masyarakat terhadap penerapan Upsus Jagung, dan hasil uji faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap program Upsus Jagung, dapat disimpulkan:

1. Tingkat penerimaan petani terhadap Program Upsus Jagung pada Kelompok tani Fatusene di Desa Manunai B Kecamatan Insana Kabupaten TTU berada pada kategori Cukup Baik, ini berarti masyarakat menerima keberadaan Program Upsus jagung di lingkungan mereka, namun dalam pemanfaatannya masih belum sesuai dengan tujuan program. Hal ini dapat ditunjukkan dari petani dalam berusahatani jagung masih menggunakan pola-pola komunikasi yang berlangsung secara interpersonal dan masih konvensional yakni mereka masih menggunakan nilai-nilai kearifan lokal berupa ritual-ritual atau doa kepada para leluhur dan alam yang dipercayai bahwa mereka dapat berkomunikasi dengan leluhur dan alam secara baik bahkan usahatannya akan berjalan dengan baik serta memberikan hasil yang optimal.
2. Faktor internal dan eksternal petani jagung dalam program Upsus komoditi jagung menunjukkan bahwa umur, pendidikan formal, pendidikan non-formal, pengalaman dalam berusahatani jagung, luas lahan garapan, tingkat kekosmopolitan berdampak positif bagi petani dalam mengembangkan usahatani jagung dan berpartisipasi dalam Program Upsus Jagung secara berkelanjutan.
3. Penerapan komunikasi Upsus komoditi jagung pada Kelompok tani Fatusene Desa Manunai B Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara secara umum petani masih menggunakan pola komunikasi interpersonal dan umumnya mereka dalam berusahatani jagung masih menggunakan kearifan lokal berupa ritual-ritual atau doa kepada leluhur dan alam karena dipercayai bahwa dengan berkomunikasi dengan leluhur dan alam secara baik akan membantu usahatani dapat berjalan dengan baik serta memberikan hasil yang optimal, oleh karenanya peran penyuluh pertanian dan pengelola Program Upsus Jagung untuk memberikan motivasi dan bimbingan agar petani menyadari pentingnya melaksanakan usahatani secara rasional dengan prinsip-prinsip efektif dan efisien. Selain itu juga perlu adanya pendampingan terhadap pelaksanaan usahatani jagung berbasis program secara berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, CR. 2017. Urgensi Komunikasi dalam Kelompok Kecil Untuk Mempercepat Proses Adopsi Teknologi Pertanian. *Jurnal: Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 35 No. 1, Juli 2017: 59-74 DOI: <http://dx.doi.org/10.21082/fae.v35n1.2017.59-74>. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Jawa Barat. Bandung.
- Fatchiya A. 2010. Tingkat kapasitas pembudi daya ikan dalam mengelola usaha aquakultur secara berkelanjutan. *Jurnal Penyuluhan*, 6 (1):11-18
- Harinta YW. 2010. Hubungan Sosial Ekonomi Petani dan Kualifikasi Penyuluh Terhadap Adopsi Teknologi Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu Budidaya Padi (*Oryza sativa*). *Jurnal WIDYATAMA* Vol. 19, No. 2 Tahun 2010. Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo
- Indraningsih KS. 2010. Penyuluhan Pada Petani Marjinal: Kasus Adopsi Inovasi Usahatani Terpadu Lahan Kering di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. [diseriasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. [Internet]. [diunduh tanggal 25 April 2019]. Dapat diunduh dari: <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/55076>
- Koesoemowardani, N., dan Sumardjo. 2008. Peran komunikasi dalam pengembangan kelembagaan ketahanan pangan masyarakat: Kasus lumbung pangan di Ciamis, Jawa Barat, *Jurnal Komunikasi Pembangunan*. 6 (2): 51-65
- Lionberger, Herbert F. and Gwin, Faul H. 1982. *Communication Strategies: A Guide for Agricultural Change Agents*. Interstate Printers and Publishers, Inc. United States Of America.
- Malta. 2008. Kompetensi petani jagung dalam berusahatani di lahan gambut: Kasus petani jagung di lahan Gambut di Desa Limbung Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat. [tesis]. Sekolah Pascasarjana. IPB. Bogor.
- Mardikanto. T.,2009. *Sistem Penyuluhan Pertanian*. Surakarta: Lembaga Pengembangan Pedesaan.
- Nurmayanti I. 2010. Kajian partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Desa Cisadane Hulu [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor
- Rogers EM. 1983. *Diffusions of Innovations*. 5th Edition. New York : Free Press. London Toronto Sydney.
- Slamet M. 2000. Memantapkan Posisi dan Meningkatkan Peran Penyuluhan Pembangunan dalam Pembangunan. *Prosiding Seminar IPB Bogor: Pemberdayaan sumber daya manusia menuju terwujudnya masyarakat madani*. Pustaka Wira Usaha Muda

STRATEGI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN *START UP* BERBASIS *ONLINE SHOP*

Sulthan Jiyad Muqsith Asmara^{1* 56}

¹UIN Imam Bonjol Padang

*Email : sulthanjiyad12345@gmail.com

ABSTRAK

Revolusi industri 4.0 digadang-gadang sebagai revolusi industri yang paling banyak menggantikan atau mengurangi kemampuan manusia untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan kerja. Salah satu ciri revolusi industri 4.0 adalah pemanfaatan teknologi dan digital dalam segala aspek kehidupan industrial, diantaranya kehadiran *Start Up* dalam berbagai basis, sebut saja *Start Up* berbasis *Online Shop*. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangun di bidang industri. Sayangnya disisi lain tidak sejalan dengan pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu pembangunan yang bersifat pemberdayaan. Ketidaksejlanan ini terlihat jelas karena seringkali dihadapkan dengan problema kesejahteraan. Sebagai solusi tentunya masyarakat mesti disiapkan untuk menghadapi revolusi industri ini, sehingga masyarakat paham bagaimana pemanfaatan teknologi dan digital yang menjadi titik tumpu revolusi industri ini. Dewasa ini, tidak dapat dipungkiri bahwa ada masyarakat yang tidak pernah berbelanja atau berjualan di *Online Shop*. Bahkan ada yang sama sekali belum pernah mengakses *Online Shop* yang bersifat *Start Up*. Hal ini tentu berbanding terbalik jika kita lihat dari pendapatan *Start Up* yang terbilang sangat besar. Idealnya, perkembangan *Start Up* yang berbasis *Online Shop* ini mesti sejalan dengan peningkatan kesejahteraan. Sehingga *Start Up* mesti menyiapkan beberapa strategi komunikasi untuk menyebarluaskan Teknologi ini. Penyebarluasan teknologi ini tentunya akan berbarengan dengan peningkatan kesejahteraan. Dalam rangka melihat strategi komunikasi pembangunannya, ilmu komunikasi dianggap mampu menjelaskan itu secara konseptual. Makalah ini akan memaparkan konsep-konsep dan teori-teori strategi komunikasi pembangunan yang mampu meningkatkan integrasi antara *Start Up* dan masyarakat.

Kata kunci: *Strategi, Komunikasi, Pembangunan, Start Up, dan Online Shop.*

A. PENDAHULUAN

Revolusi industri 4.0 digadang-gadang sebagai revolusi industri yang paling banyak menggantikan atau mengurangi kemampuan manusia untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan kerja. Hal ini disebabkan oleh revolusi industri yang bercirikan digital dalam perpaduan teknologi *cyber* dan teknologi otomatisasi, sehingga dalam revolusi industri

⁵⁶ Mahasiswa tingkat akhir UIN Imam Bonjol Padang.

terjadi transformasi secara cepat dalam proses produksi yang mengalihkan tenaga manusia. Perubahan secara besar-besaran di berbagai bidang seperti; pertanian, pertambangan transformasi, manufaktur, pembangunan dan teknologi menandakan revolusi industri. Selain itu revolusi industri mempunyai dampak yang signifikan terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya.

Data besar, pabrik cerdas (*smart factory*), sistem cyber fisik (*cyber physical system*), *IoF* (*internet of thing*), dan interoperabilitas merupakan ciri utama revolusi industri. Kesemua ciri tersebutlah yang kemudian memutlakan kehadiran berbagai Start Up digital sebagai inovasi untuk bersiap menghadapi revolusi industri 4.0 ini.

Doni Wijayanto dalam bukunya meletakkan Google, Twitter, Facebook, Airbnb, dll, sebagai Start Up digital. Buku yang ditulis Doni ini yang kemudian mengalihkan defenisi *Start Up* yang semula merujuk pada perusahaan yang belum lama beroperasi, perusahaan-perusahaan ini sebagian besar merupakan perusahaan yang baru didirikan, dan sedang berada dalam fase pengembangan dan penelitian menjadi *Start Up* merupakan perusahaan digital yang sedang berada dalam fase pengembangan dan penelitian.

Di Indonesia, meskipun *Start Up* dianggap fenomena baru namun telah melahirkan tiga *Unicorn* dengan valuasi diatas 13,5 Triliun Rupiah, yaitu Gojek, Tokopedia dan Traveloka. Tidak hanya itu, *Start Up* seperti Bukalapak, Lazada, KASKUS, dailySocial, AgateStudio, dll, juga menjadikan pemiliknya menjadi Milyader secara cepat. Hal ini tentu memberikan suatu kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Selain kebanggaan, pemerintahan indonesia juga menggantungkan harapan kepada *Start Up* dalam pembangunan berbagai jenis industri, sebut saja *e-commerce* atau biasa disebut *Online Shop*.

Start Up berbasis *Online Shop* memang terbilang sukses dalam pembangunan industri, apalagi industri digital di Indonesia, namun disisi lain tidak sejalan dengan pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu pembangunan yang bersifat pemberdayaan. Ketidaksejlanan ini terlihat jelas karena seringkali dihadapkan dengan problema kesejahteraan. Sebagai solusi tentunya masyarakat mesti disiapkan untuk menghadapi revolusi industri ini, sehingga masyarakat paham bagaimana pemanfaatan teknologi dan digital yang menjadi titik tumpu revolusi industri ini.

Dewasa ini, tidak dapat dipungkiri bahwa ada masyarakat yang tidak pernah berbelanja atau berjualan di *Online Shop*. Bahkan ada yang sama sekali belum pernah

mengakses *Online Shop* yang bersifat *Star Up*. Hal ini memang disebabkan oleh beberapa faktor dimulai dari jaringan internet yang belum menjangkau ke seluruh Nusantara, tingkat kepercayaan konsumen, hingga faktor ekonomi yang menutup kemungkinan konsumen untuk mengaksesnya, atau bahkan justru Informasi terkait ini yang tidak tersebar secara merata keseluruh masyarakat Indonesia.

Lebih kurang faktor informasi yang tidak tersebar luas menjadi faktor terbesar dalam hambatan berbelanja dan/atau berjualan di *Online Shop*. Hal ini tentu berbanding terbalik jika kita lihat dari pendapatan *Start Up* yang terbilang sangat besar. Idealnya, perkembangan *Start Up* yang berbasis *Online Shop* ini mesti sejalan dengan peningkatan kesejahteraan. Sehingga *Start Up* mesti menyiapkan beberapa strategi komunikasi untuk menyebarkan Teknologi ini. Penyebarluasan teknologi ini tentunya akan berbarengan dengan peningkatan kesejahteraan. Dalam rangka melihat strategi komunikasi pembangunannya, ilmu komunikasi dianggap mampu menjelaskan itu secara konseptual.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif. Konsep dan/atau teori strategi komunikasi pembangunan yang mampu meningkatkan integrasi antara *Star Up* dan masyarakat akan dipaparkan. Fokus penulisan ini terletak pada; (1) strategi-strategi berdasarkan media, (2) strategi-strategi desain intruksional, (3) Strategi-strategi partisipatori, dan (4) strategi-strategi pemasaran.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam situs resminya menerbitkan tulisan yang menyatakan bahwa pada tahun 2015 merupakan pembuktian *Start Up* Indonesia di mata dunia. Paling tidak ada 62 *Start Up* dari berbagai industri menerima kucuran dana dari investor luar negeri. Hal ini tentu mewarnai kepercayaan diri bangsa Indonesia.

Start up-start up di Indonesia kini kian menjamur. Ada kalanya *Start Up* meniru model bisnis yang sudah terbukti sukses di pasar lain, ada pula yang membangun ide dari permasalahan yang ada di sekitar kita. Tak sedikit dari startup lokal yang sudah punya *blueprint* untuk membuka cabang ke negara tetangga. Selain itu, tak sedikit pula *Start Up*

asing yang mempercayakan teknologi *back-end* dan pembangunan perangkat lunaknya kepada insinyur lokal.

Dengan segala tantangan dan oportunitas yang ada di hadapan Indonesia, membangun ekosistem teknologi di negara dengan infrastruktur yang masih berkembang tidaklah mudah. Perkembangan ini juga diwarnai berbagai kontroversi dari bisnis konvensional, tantangan mengenai regulasi dan penerimaan masyarakat yang belum seimbang. Cukup jelas bahwa ada gap dalam adaptasi teknologi dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, lahan pendapatan masyarakat di bidang alternatif pun ikut terancam.

Disebabkan oleh pembangunan yang mesti dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan, sehingga perkembangan *Start Up* juga menjadi sesuatu yang diharapkan bagi kesejahteraan masyarakat, tentu ada banyak hal yang mesti disiapkan dalam mengembangkan *Start Up* di Indonesia. Salah satunya; kampanye dalam rangka meningkatkan transaksi *online* bagi masyarakat yang dinilai konservatif yang dikarenakan oleh isu keamanan. Kampanye tersebut tentu tidak serta merta dilukan tanpa strategi komunikasi pembangunan yang jelas.

Sebelum masuk ke strategi komunikasi pembangun perlu kiranya dipahami bahwa strategi komunikasi itu adalah suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar melalui transfer ide-ide baru, pengertian ini dibatasi oleh Roger pada tahun 1982. Seorang pakar komunikasi Middleton (1980) membuat defenisi dengan menyatakan bahwa strategi komunikasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media) penerima sapaai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal.

Menurut AED (1985) ada empat strategi komunikasi pembangunan yang digunakan selama ini, yaitu:

1. Strategi-strategi berdasarkan media;
2. Strategi-strategi desain instruksional;
3. Strategi-strategi partisipatori;
4. Strategi-strategi pemasaran.

Masing-masing strategi mencerminkan suatu rangkaian priotitas tertentu mengenai bagaimana menggunakan komunikasi untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan

pembangunan. Kategori ini sendiri tidak dimaksudkan dalam artian yang kaku, karena dalam kenyataannya bukan sedikit program komunikasi pembangunan yang menggabungkan beberapa strategi. Pada satu sisi, makalah ini akan secara gamblang membahas Strategi berdasarkan media. Dilain sisi, strategi-strategi lain peting dibahas untuk melengkapai semua elem strategi komunikasi pembangunan.

Strategi berdasarkan media; para komunikator yang menggunakan strategi ini biasanya mengelompokkan kegiatan mereka disekitar medium tertentu yang mereka sukai. Strategi ini memang merupakan teknik yang paling mudah, paling populer, dan tentunya yang paling kurang efektif. Strategi media disini secara tipikal memulai rencanya dengan mempertanyakan: “Apa yang dapat saya lakukan dengan menggunakan radio?” Bagaimana caranya agar saya dapat menggunakan televisi untuk menyampaikan pesan saya?” Sejumlah penelitian yang diarahkan pada strategi media tertentu telah dilakukan terutama untuk mengetahui: “Media manakah yang terbaik?” “Media apakah yang murah biayanya?” “Media apakah yang terbaik untuk mempopulerkan, mengajarkan, memantapkan, atau mengingatkan sesuatu hal?”

Membahas strategi-strategi komunikasi berdasarkan media, secara umum strategi komunikasi ini mesti memanfaatkan media. Pemanfaatan media direncanakan secara matang oleh berbagai *Start Up* di Indonesia, dan tentunya relasi bermedia (*media relation*) dianggap yang paling efektif. Secara umum, media relations telah dikelompokkan kedalam dua hal oleh Iswandi (2019), yaitu: strategi *media relations* bersifat langsung dan bersifat tidak langsung.

Strategi *media relations* bersifat langsung memilik empat unsur penting, yaitu: (1) Menyusun *media pitch*, (2) Menyusun *Press Release*, (3) Menyusun lembar fakta, dan (4) Menyusun FAQ dan Strategi wawancara. Strategi media relations bersifat langsung ini berorintasi kepada pemberitaan.

Menyusun *media pitch* adalah menyusun surat atau kisan yang berisi ide tentang hal terkait korporasi yang ingin diliput oleh media massa dengan menggunakan sudut pandang yang menarik minat jurnalis atau media agar tergoda untuk melakukan liputan dan memberitakannya. *Media pitch* sering juga disebut dengan *picth letter*.

Media pitch mesti disusun dengan memperhatikan elemen-elemen pentingnya, seperti *lead* yang efektif, kalimat persuasif, data atau hasil riset, proposisi nilai,

kesimpulan, dan singkat-padat. Selain itu, korporasi atau *Srart Up* berbasis *Online Shop* mesti juga menyusun kisah dalam *pitch letter*. Menyusun kisah ini agar menarik *pitch letter* dapat dimulai sebagai pertanyaan atau fakta menarik yang menghubungkan pesan apa yang ingin disampaikan dengan target khalayak yang diinginkan. Misalnya, “*tahukah anda bahwa tokopedia menjadi unicorn pertama di bidang e-commerce atau Online Shop dan tokopedia juga mendapatkan 100 juta Dolar AS?*” Kemudian pertanyaan tersebut dapat dieksplorasi dengan persuasif. Setelah itu dapat masuk pada nilai apa yang akan ditawarkan, *itulah sebabnya mengapa saya menulis surat ini kepada anda untuk mempertimbangkan menulis artikel atau melakukan cerita terkait perkembangan e-commerce kami sehingga dapat juga memberikan pengaruh positif kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan industri dagang.*

Untuk menghindari penggunaan klise pada *pitch letter*, kisah pada *pitch letter* harus mengalir, bertutur dengan santun tanpa tendensi menggurui, klise atau hiperbola. Harus diingat, korporasi hanya mendapatkan satu kesempatan saja untuk membuat kesan pertama media. Itulah sebabnya kalimat pertama pada *lead* harus mampu menarik perhatian jurnalis atau redaksi media.

Press release adalah sebuah dokumen sederhana berisi informasi yang siap diberitakan melalui media massa. *Press release* yang baik dapat mengacu pada struktur umumnya pada pemberitaan di media massa. Untuk jenis *Straight news* pemberitaan media massa, pemberitaan media massa mengacu pola piramida terbalik dan mengandung unsur 5W+1H.

Lain lagi dengan lembar fakta yang merupakan salah satu dokumen penting yang digunakan untuk memberi informasi terbaru korporasi tentang suatu topik tertentu dalam kontek *media relation*. Lembar fakta juga bisa digunakan sebagai dokumen pendukung dan pelengkap siaran pers, hanya saja mesti dibatasi pada informasi yang relevan dengan siaran pers.

Format yang digunakan oleh lembar fakta biasanya ada tiga format yang populer, yaitu format *Ask-Question* (tanya-jawab), format grafis-deskriptif (gambar-deskripsi), dan format tabulasi-deskriptif. Sedangkan sistematika penulisannya secara sistematis berisi profil singkat korporasi, hal-hal yang telah dicapai, sedang dikerjakan, dan akan

dikerjakan, informasi penunjang yang relevan, dan informasi penutup berupa pihak atau person yang dapat dihunungi untuk informasi yang lebih lanjut.

Sedangkan menyusun FAQ dan Strategi wawancara mesti disiapkan oleh berbagai *Start Up* berbasis *Online Shop* ini. Hal ini disebabkan oleh FAQ (*Frequently Asked Question*) merupakan daftar pertanyaan dan jawaban yang diperkirakan atau paling sering muncul. Dalam konteks public relation dan media relation FAQ disusun untuk mempersiapkan wawancara dengan media atau berbagai kegiatan korporasi yang menghadirkan jurnalis. FAQ berfungsi untuk komunikasi korporasi yang efektif untuk mendapatkan kesan positif dari jurnalis. Sama halnya dengan menyusun Press Release, menyusun FAQ juga mesti memperhatikan dan melihat 5W+1H.

Ada pun strategi wawancara yang mesti disiapkan berkaitan dengan wawancara media. Menjadi narasumber media adalah salah satu langkah kongkrit untuk menambah nilai berita sehingga berita tersebut hadir sebagai berita yang kompleks. Wawancara di Televisi atau radio berbeda dengan wawancara di media cetak koran dan majalah. Wawancara di TV dan Radio lebih menitikberatkan kepada penguasaan teknis broadcasting, sedangkan wawancara di media cetak koran tidak terlalu menitikberatkan kepada penguasaan teknis.

Strategi media relations bersifat tidak langsung tidak terlalu menitikberatkan orientasinya kepada pemberitaan dan publikasi. Tetapi strategi ini bersandar pada pendekatan khusus pada semua level pengelola media. Strategi ini membutuhkan biaya besar, waktu yang lama, tidak dapat terjadi setiap saat, sehingga harus benar-benar selektif memilih media.

Seleksi media sebagai mitra yang disasar korporasinya dapat ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Kekuatan pengaruh media, sasaran khalayak media, dan tingkat hubungan baik/kepercayaan dengan media, menjadi poin penting yang mesti dipertimbangkan. Dari ketiga poin penting tersebut kemudian korporasi dapat menentukan strategi *Media Relations* dengan berbagai kegiatan sebagai berikut;

1. *Media gathering*,

Media gathering merupakan salah satu strategi *media relations* dalam bentuk kegiatan yang dirancang secara khusus untuk mempertemukan jajaran penting korporasi dan pihak media dengan tujuan untuk mempererat dan mengakrabkan

hubungan antara korporasi dan jurnalis suatu media. *Media gathering* biasanya dilakukan dengan format informal.

2. *Media briefing*,

Di Indonesia media briefing sering dipahami tidak tepat sebagai *press conference*. Secara substansi *media briefing* berbeda dengan *press conference*. Media briefing hanya melibatkan pihak *public relations* atau *media relations* dengan pihak media atau jurnalis. Relasi kedua pihak bersifat tertutup dan karena pihak korporasi yang diwakili oleh *public relations* atau *media relations* akan menyampaikan lingkup materi tertentu untuk dipahami media dan jurnalis dalam suatu pertemuan semi formal atau informal, bukan formal seperti pada kegiatan *press conference* dan tidak dimaksudkan untuk bahan pemberitaan.

Media briefing memiliki berbagai bentuk kegiatan, seperti *coffee morning*, *breakfast*, dan sejenisnya. Kegiatan tersebut yang kemudian bermanfaat pada korporasi dan media. Dimulai dari tingkat terendah bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan tujuan bersama korporasi, hingga pada tingkat tertinggi terletak pada produksi program khusus.

Bukalapak, salah satu *e-commerce* terkemuka di Indonesia, yang bekerja sama dengan salah satu televisi Nasional pernah membuat suatu program khusus pada ulang tahunnya. Program ini diproduksi sedemikian rupa untuk menarik masyarakat menggunakan *e-commerce* bukalapak tersebut. Bahkan program tersebut juga mendatangkan Jokowi selaku Presiden RI untuk menyampaikan pidatonya terkait industri *Start Up* ini.

3. *Media tour*,

Media tour adalah satu strategi *Media Relations* yang bersifat langsung dengan mengundang jurnalis atau *blogger* yang sesuai dengan target khalayak yang diinginkan untuk mengunjungi korporasi atau melihat suatu proses kerja yang ingin dipromosikan guna menyebarluaskan pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak yang diinginkan guna meningkatkan kesadaran dan citra positif terhadap korporasi. Hal ini sering dilakukan oleh korporasi dan media di berbagai stasiun TV swasta maupun stasiun TV Nasional.

4. *Media visit*, dan

Berbeda dengan *media tour*, *media visit* justru merupakan sebuah kunjungan yang dilakukan oleh korporasi ke manajemen media massa. Kegiatan ini biasanya diinisiasi oleh *public relations officer* atau *media relations officer* suatu korporasi tersebut. Dalam hal ini, korporasi seringkali membawa gimmick kemudian diharapkan dapat mengelabui atau merayu pihak lain agar mengikuti apa yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Dalam dunia marketing, *gimmick* merupakan strategi pemasan yang dengan melakukan hal atau cara tertentu yang tidak biasa agar sebuah produk dengan cepat dapat dikenal. Dalam dunia produksi atau iklan produk, *gimmick* dapat merujuk pada suatu fitur spesifik dalam sebuah produk yang dapat dengan mudah menarik perhatian konsumen dan digunakan untuk membedakan dengan produk lain. Sedangkan dalam dunia media relation, *gimmick* merupakan strategi korporasi untuk menarik perhatian media agar bersedia bekerja sama.

5. *Media center*, *media darling*, *media partner*, dan *media sponsor*.

Media center dapat dipahami sebagai pusat media dalam suatu korporasi. *Media center* dapat mencakup ke semua aspek media, mulai dari media cetak, media elektronik hingga *new media*. Segala produksi bentuk informasinya diproduksi langsung oleh *media relations* suatu korporasi. Hal ini tentu sudah dimiliki oleh semua *e-commerce* di Indonesia, sehingga dengan leluasa dapat memilih semua media untuk strategi komunikasi pembangunannya.

Media darling merupakan pihak, baik perseorang maupun kelompok, yang lebih disukai oleh media untuk dijadikan narasumber yang kompetibel. Sedangkan *media partner* justru merupakan media yang lebih disukai suatu pihak untuk dijadikan media yang paling tepat dalam melancarkan strategi komunikasinya. Lain lagi dengan *media sponsor* yang mensponsori suatu kegiatan korporasi, tetapi bukan sepenuhnya membiayai kegiatan tersebut, hanya sebatas mensponsori promosi dan pemberitaanya.

Strategi desain instruksional: menggunakan strategi ini pada umumnya adalah para pendidik, mereka itu memfokuskan strateginya pada pembelajaran individu-individu

yang dituju sebagai suatu sasaran yang fundamental. Strategi kelompok ini, mendasarkan diri pada teori-teori belajar formal dan berfokus pada pendekatan sistem untuk pengembangan bahan-bahan (*material*) belajar. Berkat keikutsertaan kalangan pendidikan tersebut di lapangan kegiatan ini, banyak pemahaman yang diperoleh mengenai evaluasi formatif, uji coba, desain program berjenjang (*Sequenced program design*) dan sebagainya.

Para desainer instruksional merupakan orang-orang yang berorientasi rencana dan sistem (*plan and system oriented*). Mereka pertama-tama melakukan identifikasi mengenai: (1) Kriteria yang hendak dicapai, (2) Kriteria keberhasilan, (3) Partisipan, (4) Sumber-sumber (*Resources*), (5) Pendekatan yang digunakan, dan (6) Waktu. Sebagai faktor-faktor yang ditimbang, dianalisis, distrukturkan, dan dikodifikasi dalam suatu petunjuk rencana. Secara tipikal kegiatan mereka dapat digolongkan kedalam tiga tahap yang luas dan saling berkaitan, yakni: tahap-tahap *perencanaan, implementasi, dan evaluasi*.

Setiap Strat Up berbasis *Online Shop* ini atau biasa juga di sebut *e-commerce* merupakan suatu korporasi dagang yang juga mengharapkan keuntungan dan mencegah kerugian. Hal ini yang kemudian menjadi kriteria utama yang hendak dicapai. Keberhasilannya juga ditentukan dengan adanya keuntungan bagi *e-commerce*. Untuk mencapai itu, *start Up* kemudian mengharapkan partisipasi dari masyarakat dalam mengembangkan usaha korporasinya, yang nanti juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Sumber-sumber, pendekatan yang digunakan, dan waktu perlu dipertimbangkan juga sebagai perencanaan.

Secara tipikal dapat dilihat dengan jelas bahwa semua *Start Up* berbasis *Online Shop* di Indonesia telah memiliki perencanaan yang tergolong matang. Hal ini dapat dilihat pada hasil yang memberikan keuntungan untuk korporasi secara khusus dan masyarakat secara umum. Dalam pengimplentasiannya, tentunya masyarakat tidak serta merta langsung memahami teknis pengaplikasian *Start Up* berbasis *Online Shop* tersebut. Masyarakat butuh dibimbing untuk itu, sehingga pengelola *Start Up* ini mesti menyiapkan berbagai teknis dan media pembelajaran. Tidak hanya sampai disitu, pembelajaran yang telah dirancang dan berikan kepada masyarakat ini mesti dievaluasi dan diharapkan dapat diajarkan dan disebarluaskan lagi kepada khalayak yang lebih banyak.

Disamping itu, strategi desain instruksional perlu juga dilakukan secara formal pendidikan kewirausahaan terkadang menjadi solusi untuk memahami dan memberikan

solusi atas fenomena ini. Dewasa ini, pendidikan kewirausahaan telah didapatkan oleh setiap mahasiswa di Indonesia. Hanya saja *Start Up* berbasis *Online Shop* ini belum terlihat berpartisipasi dalam pendidikan ini. Jika memungkinkan, pelaku *Start Up* secara umum dan/atau *e-commerce* secara khusus dapat diikutsertakan dalam menetapkan kurikulum pendidikan kewirausahaannya.

Strategi partisipasi: dalam strategi partisipasi ini, prinsip penting dalam mengorganisasi kegiatan adalah kerjasama komunitas dan pertumbuhan pribadi (*community participation and personal growth*). Yang dipentingkan dalam strategi ini bukan pada berapa banyak informasi yang dipelajari seseorang melalui program komunikasi pembangunan, tetapi lebih pada pengalaman keikutsertaan sebagai seseorang yang sederajat (*equal*) dalam proses berbagai pengetahuan atau keterampilan.

Start Up di Indonesia memang sudah terintegrasi dengan baik. *Start Up* yang berbasis *Online Shop* menyediakan produk di pasar dagang, dan *Start Up* berbasis angkutan umum memberikan mobilitas yang cepat atas logistik tersebut. Intergritas tersebut tentu tidak akan terwujud tanpa adanya partisipasi masyarakat sebagai pelaku usaha. Lantas bagaimana cara peningkatan partisipasi masyarakat tersebut?

Partisipasi mesti ditingkatkan secara kelompok sebagai kerjasama kelompok (*community participation*) dan secara individu sebagai pertumbuhan pribadi (*personal growth*). Partisipasi kerjasama kelompok dan pertumbuhan pribadi merupakan dua sisi yang saling mempengaruhi. Ketika *Start Up* berbasis *Online* ini berpartisipasi atas pembangunan nasional, secara tidak langsung masyarakat juga berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Partisipasi kelompok terjadi pada saat *Start Up* berbasis *Online* ini memberikan layanan penyediaan pasar yang lebih luas kepada masyarakat. Sehingga nantinya masyarakat memperoleh kesejahteraan yang lebih cepat berkembang. Pembangunan ini dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat di bidang industri dagang.

Sedangkan partisipasi masyarakat memang sedikit sulit diharapkan karena tidak semua pelosok negeri mendapatkan layanan internet yang memadai. Untuk memberikan solusi atas ini, partisipasi Pemerintah juga diharapkan dalam pengembangan layanan internet yang lebih luas dan menjangkau ke seluruh pelosok negeri. Jika itu sudah terjawab tentu partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan perdagangan ini dapat

dituntut lebih. Disamping itu layanan internet yang memadai tidaklah cukup tanpa diiringi pengembangan mobilitas. Semua partisipasi ini mesti terintegritas secara sempurna agar terwujudnya tujuan *Start Up* berbasis *Online Shop*.

Strategi pemasaran: strategi ini tumbuh sebagai suatu strategi komunikasi yang sifatnya paling langsung dan terasa biasa. “kalau anda dapat menjual pasta gigi, mengapakan tidak dapat menjual kesehatan, pertanian, dan keluarga berencana?” Itulah prinsip *social marketing* yang menjadi pegangan strategi.

Istilah “4.0” tidak hanya digunakan oleh kata “revolusi industri” saja, tetapi juga digunakan oleh kata “*Marketing*”. Philip Kotler, dkk. memberi judul buku yang mereka tulis dengan judul *Marketing 4.0*. Dasar utama dalam buku ini adalah bahwa pemasaran harus disesuaikan dengan perubahan alami dari jalur pelanggan dalam ekonomi digital. Tentu saja *Marketing 4.0* juga sejalan dengan revolusi industri 4.0. Artinya strategi pemasaran *Start Up* berbasis *Online Shop* ini mesti sesuai juga dengan konsep Revolusi Industri 4.0.

Ada tiga hal penting yang mesti dipahami terkait *Marketing 4.0*, yaitu: (1) tren fundamental yang membentuk pemasaran, (2) kerangka kerja baru pemasaran dalam ekonomi digital, dan (3) penerapan pemasaran taktis di ekonomi digital.

Tren fundamental yang membentuk pemasaran terfokus pada pergeseran kekuatan ke pelanggan terhubung. Dari eksklusif menjadi inklusif, dari vertikal ke horizontal, dan dari individu ke sosial. Para pemasar harus menerima pergeseran ke lanskap bisnis yang lebih horizontal, inklusif dan sosial. Pasar menjadi semakin inklusif. Pelanggan semakin berorientasi secara horizontal terhadap pemasaran merek dan mengandalkan faktor-F (*friends, Family, Fans, dan Followers*).

Marketing 4.0 di ekonomi digital mulai bergerak dari pemasaran tradisional ke digital. Disisi lain, pemasaran tidak serta merta harus ditinggalkan sehingga *Start Up* berbasis *Online Shop* mesti memadukan pemasaran tradisional dan digital. Hal ini seperti yang dilakukan oleh *e-commerce* bukalapak yang mengadakan program kemitraan dengan pebisnis kecil dan menengah. Bukalapak memberikan layanan untuk memudahkan pedagang kecil dan menengah menyiapkan Stok barang untuk pasar tradisionalnya.

Jalur pelanggan baru merupakan kerangka kerja baru pemasaran dalam ekonomi digital. Hal ini mendorong pelanggan dan/atau penjual di berbagai *Start Up* berbasis

Online Shop untuk menyadari hingga menganjurkan, baik itu pasar, produk atau bahkan penjualan di *Online Shop* ini. *Start Up* mesti menyiapkan pasar yang memingginkan untuk pelanggan mulai menyadari, tertarik, bertanya dan menganjurkan, sehingga secara langsung kesejahteraan pedang juga berkembang.

Sedangkan penerapan pemasaran taktis di ekonomi digital merupakan pemasaran yang berorientasikan kepada manusia. Hal ini dapat dipahami dengan memahami manusia menggunakan antropologi digital. Antropologi digital berfokus pada hubungan antara kemanusiaan dan teknologi digital. Teknologi ini menyelidi cara manusia berinteraksi dengan antar muka digital, bagaimana berperilaku dengan kontek teknologi, dan bagaimana teknologi digunakan oleh manusia untuk berinteraksi satu sama lain.

Antropologi digital inilah yang kemudian membangun budaya digital yang berwawasan dan beretika. Sehingga tidak perlu lagi ada kecurigaan dan kucurangan yang selama ini kerap terjadi di pasar *Online*. Budaya digital yang berwawasan dan beretika ini juga hal tentu dalam meningkatkan pembangunan nasional yang bersifat pemberdayaan dan berorientasi kesejahteraan.

Selain itu, pemasaran omnisaluran juga mesti dilakukan untuk pembangunannya. Pemasaran omnisaluran ini yang kemudian bisa dilakukan di berbagai saluran, mulai dari tradisional ke digital, mulai dari media cetak, media elektronik, hingga media baru, mulai dari model komunikasi *one-step-flow*, *two-step-flow*, hingga *multi-step-flow*, atau bahkan bentuk saluran lain. Dalam hal ini teknis terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan memadukan saluran *Online* dan *Offline*.

D. KESIMPULAN

Strategi-strategi yang dipaparkan sesuai dengan fokus penelitian merupakan beberapa strategi komunikasi pembangunan yang jika dilakukan secara terintegritas dianggap mampu memberikan efek positif pada pembangunan. Semua strategi komunikasi pembangunan *Start Up* berbasis *Online Shop* ini mestinya berorientasikan kepada penguasaan media yang sealur dengan fenomena revolusi industri 4.0. Semua strategi itu tidak serta merta berjalan apa adanya tanpa ada dukungan dari berbagai pihak.

Secara konsep semua strategi-strategi komunikasi pembangunan tersebut dianggap mampu menyiapkan pembangunan di Indonesia secara pemberdayaan dan berorientasi kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cangara, Hafied. 2014, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Cetakan kedua. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Harun, Rochajat. 2011, *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Cetakan pertama. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- https://kominform.go.id/index.php/content/detail/6839/Kondisi+dan+Harapan+Bisnis+Startu+p+di+Indonesia/0/sorotan_media, diakses pada Sabtu, 20 April 2019, pukul 14.07 WIB
- <https://www.artikelsiana.com/2019/01/Revolusi-industri-40-pengertian-ciri-dampak-tantangan-industri-40.html>, diakses pada Sabtu, 20 April 2019, pukul 13.22 WIB
- Kotler, Philip, dkk. *Marketing 4.0*. Cetakan pertama. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lili Weri, Alo. 2011. *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Cetakan pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sitompul, Mukhti. 2012, *Konsep-konsep Komunikasi Pembangunan*. --- USU Digital Library.
- Suwarna, Hendra. 2017, *Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental (Jurnal Jati Unik, Vol 1)*
- Syahputra, Iswandi. 2019, *Media Relation: Teori, Strategi, dan Intelijen*. Cetakan pertama. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Wasesa, Silih Agung. 2006, *Strategi public relation*. Cetakan kedua. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wijayanto, Doni. 2018, *Legal In Start Up Business*. Cetakan pertama. Solo: Metagraf.

OPTIMALISASI APLIKASI *TYPEFORM* UNTUK EVALUASI KAPASITAS MASYARAKAT TERHADAP BENCANA GEMPA

Tedy Wiraseptya^{1*}, Rafki Imani², Muhammad Afdhal³

¹Jurusan Disain Komunikasi Visual, Fakultas Disain Komunikasi Visual, Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang

²Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang

³Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang

*Email: tedyibob@yahoo.co.id

ABSTRAK

Kota Padang merupakan wilayah di Sumatera Barat dengan tingkat kegempaan yang cukup tinggi, karena berada pada zona subduksi Megatrust Mentawai dan Sesar Besar Sumatera, dimana di zona-zona tersebut merupakan sumber gempa yang sering melanda Kota Padang. Banyak upaya mitigasi yang telah dilakukan untuk penanggulangan bencana gempa, salah satunya dengan penyebaran kuesioner guna memperoleh informasi berupa data dari masyarakat dengan tujuan mengevaluasi tingkat kesiapan masyarakat dalam menghadapi ancaman gempa. Metode kuesioner yang umum dilakukan sejauh ini masih monoton dan tidak efisien. Dalam penelitian ini *typeform* digunakan sebagai pilihan pengganti model kuesioner pada umumnya, dimana dapat dijadikan sebagai alat pengumpul data terkait informasi kegempaan sehingga data yang telah dikumpulkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk penanggulangan bencana gempa yang akan terjadi di masa mendatang. *Typeform* adalah bentuk percakapan yang didesain secara pribadi dalam bentuk teknologi digital. David Okunieff sebagai pendiri dan CEO *Typeform* membuat obrolan *bot*, asisten suara dan kecerdasan buatan supaya bisa menjadi budaya kenyamanan bagi pengguna. Banyak manfaat yang dapat dilakukan dengan menggunakan *typeform*, salah satunya sebagai pengumpul informasi terkait kapasitas masyarakat tentang kegempaan. Dalam pembuatan desain pada *typeform* berupa informasi kegempaan, yang menjadi bagian terpenting adalah bagian pesan. Apakah pesan itu sampai dan dapat dimengerti oleh audien, pesan visual dijelaskan oleh pesan verbal, pesan verbal juga menjelaskan pesan visual. Kemudian pesan tersebut juga tidak boleh menghindari unsur-unsur desain. Karena unsur desain yang baik harus memenuhi unsur dasar dari keterbacaan berdasarkan fungsi, warna dan gambar yang sesuai.

Kata kunci : Desain komunikasi, gempa, kapasitas masyarakat, dan *typeform*

PENDAHULUAN

Kota Padang yang berada dekat dengan perairan Barat pantai Sumatera, sekaligus merupakan lokasi yang dekat dengan jalur subduksi Megatrust Mentawai, serta dilewati oleh sesar besar Sumatera, telah menjadikan Kota Padang rentan terhadap bahaya gempa bumi yang bisa datang sewaktu-waktu (Ardiansyah, 2014). Kita masih ingat gempa 30 September 2019 silam, telah menyebabkan seribu lebih korban jiwa, 1200 orang luka-luka, dan lebih dari 100 ribu bangunan rusak berat, sedang dan ringan. (Setyonegoro, 2013; Internet-1), seperti yang terlihat pada Gambar 1. Hal ini membuktikan bahwa kesiapan dan kapasitas masyarakat di Kota Padang terhadap gempa saat itu masih sangat rendah.

Fakta menyatakan bahwa banyaknya korban akibat gempa disebabkan lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap kegempaan yang terjadi selama ini, sehingga saat gempa terjadi masyarakat banyak yang mengalami kepanikan. Kurangnya kepedulian terhadap informasi dan sosialisasi yang diberikan selama ini, baik informasi sumber gempa maupun informasi tentang upaya mitigasi yang mungkin dilakukan, telah mengindikasikan menjadi penyebab tingginya tingkat kerugian yang disebabkan oleh gempa (Agustin, 2014).

Berbagai upaya mitigasi telah dilakukan untuk meminimalisir dampak dan bahaya gempa, baik mitigasi terhadap struktur bangunan maupun mitigasi non-struktur seperti peningkatan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan kebencanaan. Mitigasi struktur seperti peningkatan kapasitas bangunan yang ramah gempa tidak akan dapat terlaksana dengan maksimal kalau tidak didukung oleh kapasitas masyarakat yang baik.



Gambar.1 Kerusakan dan runtuhnya bangunan akibat gempa padang 30 September 2009 (Internet-2).

Untuk dapat mengetahui sejauh mana tingkat kapasitas masyarakat tersebut, dapat dilakukan melalui proses penyebaran angket atau kuesioner. Proses penyebaran kuesioner melalui angket berupa pertanyaan-pertanyaan seputar informasi kegempaan, baik berupa informasi mengenai bahaya gempa dan dampaknya maupun berisi informasi mengenai upaya-upaya yang mungkin dilakukan, bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi tingkat pengetahuan dan kapasitas masyarakat tentang kegempaan, agar ke depannya lebih siap terhadap kejadian gempa di masa mendatang.

Pengumpulan data melalui angket atau kuesioner yang umumnya berdasarkan bentuk manual ataupun digital masih belum fleksibel. Dilihat dari lamanya pengumpulan data yang didapatkan hingga bentuk pernyataan yang diberikan kepada responden. Menurut Sugiyono (2011), bentuk anggapan yang perlu dipegang oleh penelitian dalam menggunakan metode *interview* dan kuesioner adalah sebagai berikut :

1. Subjek yang paling mengetahui adalah dirinya sendiri
2. pernyataan yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti benar dan dapat dipercaya
3. Bahwa interpretasi subjek tentang pernyataan yang diberikan peneliti di ajukan dengan pernyataan dengan maksud yang sama.

Dengan bentuk yang dijabarkan dari pernyataan berikut memang bentuk kuesioner yang diajukan kepada responden harus tepat dan sesuai dengan pernyataan pada responden. Bentuk kuesioner juga tidak mengharuskan para peneliti bertemu dengan responden secara langsung. Dengan begitu informasi digital atau lebih tepatnya *form* digital menjadi pilihan bagi beberapa peneliti untuk mengembangkan data. Dalam bentuk yang fleksibel bagi peneliti dan reasponden hal ini juga bertujuan untuk efektifitas dalam pengumpulan data secara cepat sesuai target audien yang dituju.

Pengaruh desain dalam efektifitas pencarian data digital melalui angket atau kuesioner tersebut tentu melihat berbagai prinsip desain yang di hadirkan. Mulai dari *user interface* sampai pada komunikasi tentang pernyataan yang diberikan pada responden. Salah satu aplikasi yang mampu memberikan bentuk desain dan fleksibel kepada responden ialah aplikasi *Typeform*. *Typeform* pada dasarnya penyuguhan aplikasi survei *online* yang mampu dibuat secara menarik dan memudahkan para responden untuk mengisi hasil survei. Robert Munoz dan David Okuniey sebagai pencipta aplikasi tersebut menyajikan kuesioner meluncur ke bawah atau beraturan secara tampilan yang membuat responden ikut terlibat dalam pengisian secara langsung (internet-3). Penggunaan *typeform* sebagai kuesioner atau angket fleksibel dan dapat dijangkau secara cepat ini bisa menjadi solusi untuk optimalisasi evaluasi masyarakat tentang mitigasi kebencanaan terutama informasi bencana gempa.

METODE PENELITIAN

Pengukuran keberhasilan dalam pengumpulan data kuesioner evaluasi masyarakat tentang bencana gempa perlu memperhatikan *maintenance* kuesioner yang disebarkan pada responden. Dalam pengumpulan data kuesioner, responden yang dipilih adalah mahasiswa Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang sebagai masyarakat intelek. Alasan memilih mahasiswa tersebut sebagai responden tentunya melihat faktor intelektualitas sebagai indikator yang mewakili tingkat pengetahuan masyarakat tentang informasi kegunaan. Jumlah responden yang dipilih untuk mengisi kuesioner pada platform ini adalah sebanyak 100 responden, dimana jumlah tersebut sudah dapat mewakili kebutuhan data yang diperlukan.

Data yang digunakan dalam kuesioner berupa data evaluasi gempa terhadap responden terkait informasi tentang kegempaan. Untuk memperoleh data tersebut responden diberikan *link* untuk masuk pada *platform* aplikasi *typeform*. Penggunaan *typeform* dalam pengumpulan data menggunakan pernyataan dan pertanyaan yang sesuai dengan bahasa yang dipahami responden. Pengaruh proses komunikasi ini dapat memudahkan dan memberi kenyamanan responden (mahasiswa) untuk mengisi data angket atau kuesioner.

Pembuatan kuesioner menggunakan tampilan *isometric art* atau gambar tiga dimensi dalam layout dua dimensi pada pembukaan aplikasi. Desain *cover* ini digunakan mempengaruhi emosional responden. Kemudian pada tahap pertanyaan, bahasa yang digunakan sesuai dengan gaya bahasa responden dalam hal ini adalah mahasiswa. Gambar terkait yang menjelaskan pertanyaan juga dihadirkan untuk melibatkan emosional responden ketika menjawab kuesioner. Pernyataan dan pertanyaan itu dibuat beraturan ke bawah dan bisa dibuka pada aplikasi *smartphone*.

Data yang dikumpulkan dalam *database* akan langsung masuk sesuai urutan responden yang mengisi lebih dulu. Data tersebut juga bisa diunduh dan kemudian dicetak seperti data yang telah masuk ke dalam *database*.

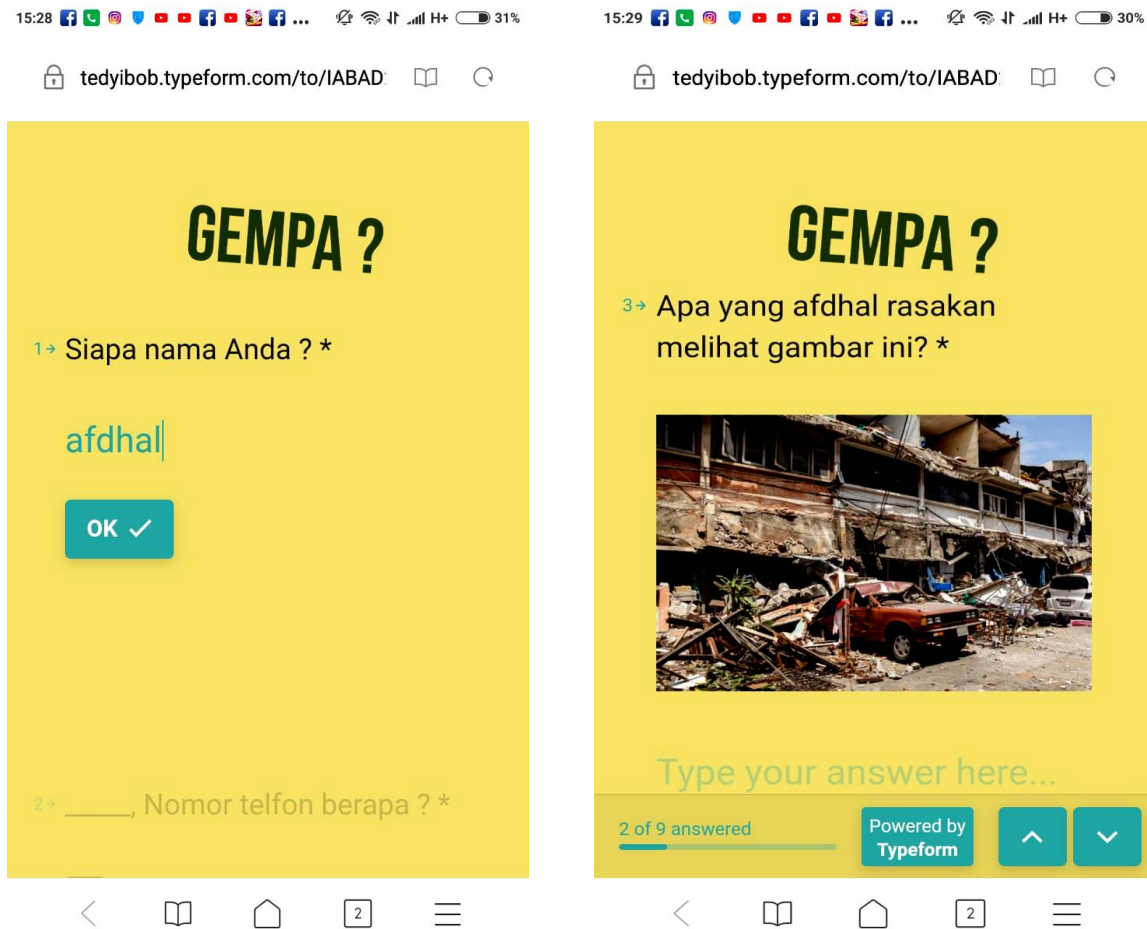
HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk kuesioner yang bisa diisi pada *smartphone* ini menunjukkan bahwa data kuesioner aplikasi *typeform* fleksibel dan mempengaruhi kenyamanan responden. Berikut tampilan dari aplikasi *typeform* saat responden mengisi angket atau kuesioner :



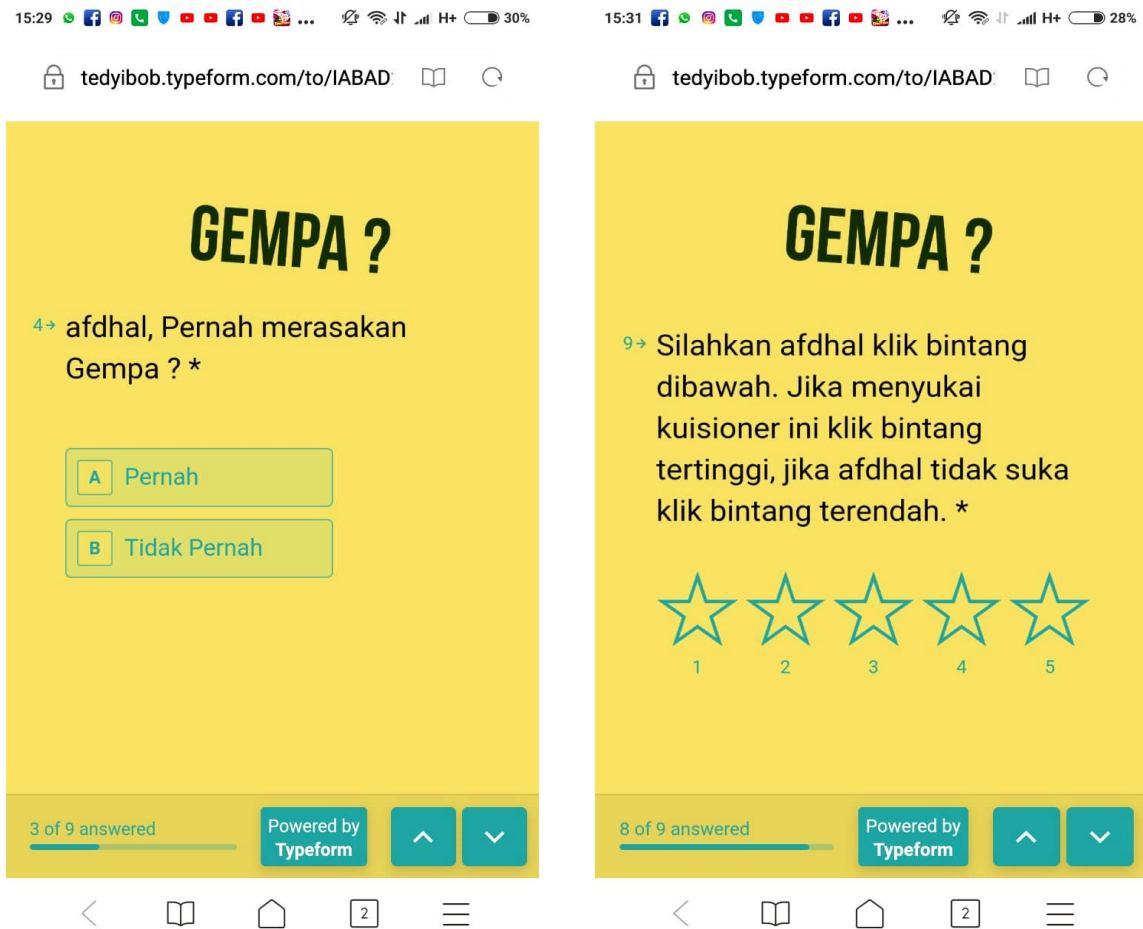
Gambar. 2 Tampilan Awal *Typeform*.

Dari tampilan Gambar. 2 di atas, halaman awal pada aplikasi *typeform* menggunakan *isometric art* yang bertujuan mempengaruhi serta menarik emosional responden dalam mengisi kuesioner halaman berikutnya.



Gambar. 3 (a) Pengisian identitas responden, (b) Tampilan untuk memulai pertanyaan.

Gambar. 3a di atas adalah tampilan untuk mengisi identitas responden. Pada tampilan ini responden diarahkan untuk mulai mengisi identitas diri sebelum melanjutkan ke tahap pertanyaan selanjutnya. Pada Gambar 3b, responden sudah dapat memulai menjawab pertanyaan yang diberikan berdasarkan data yang dibutuhkan. Dengan melakukan pengisian identitas diri kemudian diberikan pertanyaan awal kepada responden, diharapkan kondisi interaktif dapat terjalin dengan nyaman antara responden dengan aplikasi *typeform* yang digunakan.



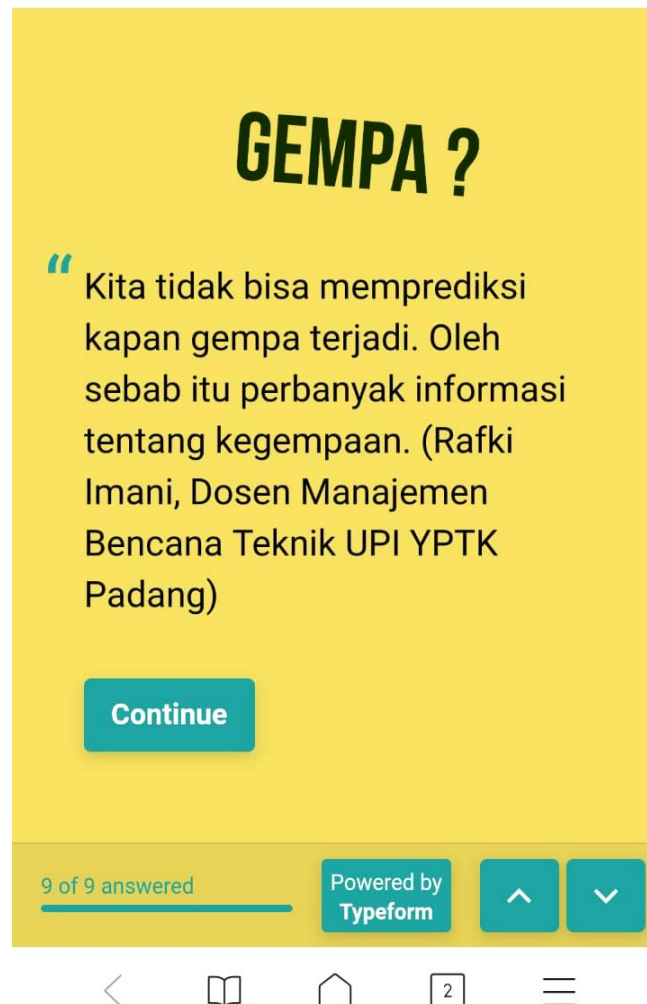
Gambar. 5 (a) Salah satu pertanyaan pada responden, (b) *Rating* bintang untuk kuisisioner.

Pada Gambar. 5a, salah satu contoh pertanyaan ditampilkan. Setelah responden menjawab seluruh pertanyaan yang diberikan dan lalu diikuti oleh jawaban yang diberikan oleh responden, maka pada Gambar. 5b responden diarahkan untuk memberikan respon dan tanggapan berupa kesan terhadap *platform* aplikasi *typeform* yang telah digunakan, untuk mengukur sejauh mana tingkat kenyamanan responden dalam pemanfaatan aplikasi tersebut.

Pada Gambar. 6 di bawah, setelah semua proses tanya-jawab dilakukan oleh responden di dalam *platform* aplikasi *typeform*. Terakhir responden diberikan sebuah *statement* akhir dari ahli manajemen kebencanaan, untuk menegaskan bahwa seluruh pertanyaan tentang informasi kegempaan yang diberikan memiliki kepentingan dan manfaat yang harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas responden (masyarakat) dalam menghadapi bencana gempa yang akan terjadi di masa mendatang.

15:31      28%

 tedyibob.typeform.com/to/IABAD  



Gambar. 6 Statment dari ahli.

KESIMPULAN

Setelah dilakukan pengumpulan data informasi terkait kebencanaan untuk mengevaluasi tingkat kapasitas dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya gempa, dapat disimpulkan bahwa aplikasi *typeform* dapat memudahkan serta mampu memberi kenyamanan kepada masyarakat dalam melakukan pengumpulan data responden terkait kegempaan. Aplikasi *typeform* ini masih bisa dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan

yang akan diteliti. Sementara itu, *maintenance* kuesioner menggunakan aplikasi *typeform* tidak akan efektif jika tidak didukung oleh penggunaan *smartphone*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, H. 2014. Persepsi Masyarakat Nagari Sumani tentang Kesiapsiagaan Bencana Gempabumi (*Perseption of The Society of Sumani Village about Disaster Preparadness*). Jurnal Kesehatan Komunitas, Vo. 2 No. 5
- Ardiansyah, S. 2014. Energi Potensial Gempabumi di Kawasan Segmen Mentawai-Sumatera Barat. Jurnal PSJ, Vol. 2, No. 1
- Internet-1: www.infosumbar.net
- Internet-2: https://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi_Sumatra_Barat_2009
- Internet-3: [https://en.wikipedia.org/wiki/Typeform_\(service\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Typeform_(service))
- Setyonegoro, W. 2013. Gempabumi Padang 30 September 2009 dan Potensi Tsunaminya. Buletin Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Vol. 7 No. 3
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

Neni Efrita^{1*}

¹Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Imam Bonjol

*Email: neniefritawindel@yahoo.com

ABSTRAK

Kajian permasalahan komunikasi pembangunan tidak akan pernah habis-habisnya, karena setiap masyarakat ingin pembangunan yang berkelanjutan. Masyarakat sebagai warga negara ingin hidup sejahtera baik materil dan/atau immateril, secara spiritual ingin hidup damai dan tentram. Selama ini implikasi pembangunan belum menyentuh keinginan dan kebutuhan masyarakat, ini disebabkan oleh belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam komunikasi pembangunan, keterlibatannya hanya dilihat dalam konteks yang sempit dan terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk 1). Menguraikan partisipasi masyarakat dalam komunikasi pembangunan pariwisata di Kota Padang. 2). Menguraikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata Kota Padang. Pendekatan metodologi yang digunakan adalah kualitatif. Alat pengumpulan data observasi partisipasi, wawancara dan dokumentasi, teknik sampling yang digunakan *snowball sampling*, pencatatan dan analisis data; *unitizing* dan *categorizing* sedangkan pengolahan data dilakukan secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam komunikasi pembangunan pariwisata masih kurang Dalam pelaksanaannya bahwa setiap usaha pariwisata harus punya izin usaha, namun masih ada pengelola pariwisata yang belum mengantongi izin usaha dan masih ada masyarakat yang masih belum mengindahkan sapta pesona wisata. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata bisa dikatakan sudah baik, ini terlihat membangun kontak dengan pihak lain melalui medsos, dengan memberikan tanggapan terhadap informasi tentang pariwisata Padang termasuk memelihara, menerima dan mengambil hasil pembangunan dari pariwisata.

Kata kunci: Partisipasi, Komunikasi, Pembangunan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang penelitian

Partisipasi masyarakat dalam menyukseskan pembangunan merupakan suatu keharusan yang perlu dilakukan agar pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan program pembangunan yang sudah direncanakan sehingga masyarakat dapat menikmati hasilnya. Keterlibatan masyarakat merupakan penentu keberhasilan pembangunan, karena

tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Easterly (2007) mengemukakan bahwa tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh sebab itu sangatlah pantas masyarakat dilibatkan.

Pembangunan pada prinsipnya adalah proses perubahan sosial yang mengubah masyarakat dengan mengubah sistem ekonominya, materii maupun spiritualnya menuju ketatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pembangunan sering dirumuskan sebagai proses perubahan yang terencana dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik artinya pembangunan menyangkut proses perbaikan menuju masyarakat yang lebih maju baik pola-pola masyarakat maupun nilai-nilai kemanusiaan. Inayatullah dalam Dilla (2007; 57) menjelaskan bahwa pembangunan menuju perubahan pola-pola masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar dalam lingkungan dan tujuan politiknya, juga memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri.

Penjelasan di atas memberikan suatu pemahaman bahwa pembangunan sebenarnya bukan saja masalah peningkatan ekonomi atau kemajuan sosial saja namun lebih luas dari itu yaitu peningkatan disegala bidang, materiil dan spiritual termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai. Untuk peningkatan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan perlu partisipasi dari suatu masyarakat untuk peningkatan dan kemajuan tersebut. Seperti yang dikatakan Dilla, (2007; 58) dalam Rogers : pembangunan sebagai suatu proses sosial dengan partisipasi yang luas untuk kemajuan sosial dan materiil (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai bagi mayoritas rakyat melauai kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.

Salah satu pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat di Kota Padang adalah pembangunan pariwisata. Pembangunan pariwisata bukan hanya masalah peningkatan ekonomi saja, tapi juga masalah sosial kebudayaan, pelestarian lingkungan, memupuk cinta tanah air, meningkatkan rasa persaudaraan dan persahabatan, meratakan kesempatan berusaha, bekerja, meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pariwisata saperti ini juga telah dilakukan di Kota Padang.

Pemerintah Kota Padang dalam hal ini Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang telah menggalakkan berbagai program pembagunan pariwisata terpadu, baik antar departemen, instansi terkait antar pemerintah pusat dan daerah, antar pemerintah dan swasta ataupun masyarakat dengan mengacu pada pertimbangan aspek sosial budaya dan lingkungan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah telah melakukan komunikasi pembangunan dalam arti telah menyampaikan gagasan secara timbal balik terutama dengan masyarakat dan pemerintah sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembangunan tersebut. Dengan harapan semua pihak terlibat dalam usaha pembangunan pariwisata diantaranya produk usaha perjalanan wisata, industri pariwisata, objek dan daya tarik wisata dapat ikut serta dalam meujudkan tujuan pembangunan pariwisata.

Kajian permasalahan komunikasi pembangunan tidak akan pernah habis-habisnya, karena setiap masyarakat ingin pembangunan yang berkelanjutan. Masyarakat sebagai warga negara ingin hidup sejahtera baik materil dan/atau immateril, secara spirtual ingin hidup damai dan tentram.

Untuk mewujudkan semua itu perlu pembangunan yang berkesinambungan yang implikasinya dapat disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang tentunya disesuaikan dengan rencana pembangunan dan kebijakan pemerintah. Selama ini implikasi pembangunan tersebut belum menyentuh keinginan dan kebutuhan masyarakat, ini disebabkan oleh belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam komunikasi pembangunan, keterlibatannya hanya dilihat dalam konteks yang sempit dan terbatas. Masyarakat belum diberdayakan menjadi kreatif, inovatif dan kritis sehingga masyarakat menjadi pasif.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul: Partisipasi masyarakat dalam komunikasi pembangunan.

B. MASALAH PENELITIAN

Masalah penelitian ini dirumuskan dalam dua pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi komunikasi pembangunan pariwisata Kota Padang?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi komunikasi pembangunan Pariwisata Kota Padang.
2. Mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Pariwisata Kota Padang.

D. Kajian Konseptual.

1. Partisipasi Masyarakat.

Partisipasi masyarakat yang sering disebut keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang ada pada masyarakat tersebut. Pembahasan tentang partisipasi masyarakat berarti berbicara tentang aktifitas yang dilakukan masyarakat tentang keikutsertaannya secara aktif, baik dalam mengidentifikasi berbagai potensi yang ada di masyarakat, memilih dan mengambil keputusan bersama.

Partisipasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tindakan ikut mengambil bagian, keikutsertaan atau ikut serta. Menurut Juliantara (2004:84) partisipasi diartikan sebagai keterlibatan setiap warga negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan dan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif. Menurut Ach Wazir Ws., et al. (1999;29) partisipasi dapat diartikan

sebagai keterlibatan seseorang secara sadar dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu.

Sementara Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan ada yang diberikan dalam bentuk nyata dan tidak nyata, contoh partisipasi nyata adalah harta benda (uang, tanah) dan tenaga serta keterampilan. Sedangkan partisipasi tidak nyata berupa pikiran dalam pengambilan keputusan. Jain (2000) ada tujuh macam tipe partisipasi yang ada pada masyarakat, antara lain

1. Partisipasi pasif, tipe partisipasi yang tidak memperhitungkan tanggapan partisipan dalam pertimbangan dan hasilnya telah terlebih dahulu ditetapkan. Informasi hanya dibagikan pada external institusi;
2. Partisipasi dalam pemberian informasi, orang memberikan jawaban atas pertanyaan dimana mereka tidak punya kesempatan untuk mempengaruhi dalam konteks wawancara dan seringkali hal baru tidak dibagikan;
3. Partisipasi dalam bentuk konsultasi, orang dikonsultankan dan pendapat mereka termasuk ke dalam hitungan tetapi mereka tidak termasuk dalam pembuatan keputusan;
4. Partisipasi aktif, meliputi orang yang memberikan dorongan dalam materi dan dorongan langsung untuk pelayanan yang disediakan. Dalam beberapa contoh kasus, tidak adanya peraturan yang dimasukkan sekalipun dorongan tersebut telah berakhir;
5. Partisipasi fungsional, partisipasi terjadi dengan pembentukan dalam grup dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Seperti partisipasi pada umumnya terjadi hanya setelah keputusan utama telah diambil;
6. Partisipasi interaktif, orang berperan aktif dalam menghasilkan informasi dan analisis berikutnya yang mengarah kepada rencana aksi dan implementasinya. Hal itu melibatkan metodologi yang berbeda dalam mencari bermacam-macam

perspektif lokal. Dengan demikian melibatkan orang dalam pembuatan keputusan mengenai penggunaan dan kualitas informasi; dan

7. Pergerakan pribadi, tipe partisipasi yang bebas dari campur tangan pihak luar. Orang berpartisipasi dan mengambil inisiatif untuk mengganti sistem. Mereka mengembangkan kontak untuk masukan dari luar tetapi tetap menguasai kontrol atas sumberdaya.

2. Komunikasi Pembangunan

Komunikasi pembangunan merupakan disiplin ilmu dan praktikum komunikasi dalam konteks negara berkembang, terutama dalam aktifitas komunikasi untuk perubahan sosial yang berencana. Komunikasi pembangunan dimaksudkan untuk secara sadar untuk meningkatkan pembangunan manusiawi, artinya bahwa komunikasi pembangunan hadir untuk menghapus kemiskinan, pengangguran dan ketidakadilan.

Keutamaan komunikasi pembangunan diperuntukan bagi kegiatan mendidik dan memotivasi masyarakat dengan tujuan untuk menanamkan gagasan-gagasan, sikap mental dan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat di suatu negara. Seperti yang dikatakan oleh Harun dan Ardianto (2011; 161) tujuan komunikasi pembangunan adalah untuk menanamkan gagasan-gagasan, sikap mental dan mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan oleh suatu negara berkembang. Secara praktis dapatlah dirumuskan bahwa komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan rencana pembangunan suatu negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komunikasi pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan diperlukan suatu sistem komunikasi agar terjalin komunikasi yang baik antara pemerintahan dan masyarakat agar tujuan komunikasi pembangunan dapat tercapai untuk meningkatkan pembangunan manusiawi dengan menghapus kemiskinan, pengangguran dan ketidakadilan.

Selain itu tujuan komunikasi pembangunan adalah untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan seperti yang dikatakan oleh Nora, C, QuebraHal 162 buku komunikasi pembangunan.....

Hal itu perlu sekali dilakukan karena proses pembangunan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Komunikasi pembangunan ini harus mengedepankan sikap aspiratif, konsultatif dan relationship. Karena pembangunan tidak akan berjalan dengan optimal tanpa adanya hubungan sinergis antara pelaku dan objek pembangunan. Konsep komunikasi pembangunan sangat membuka peluang untuk mendorong komunikasi intensif melalui dialog dengan kelompok-kelompok masyarakat dalam rangka membangun kemitraan untuk mempengaruhi kebijakan publik sebelum diputuskan, untuk itu pelaku objek pembangunan perlu melakukan sosialisasi tentang rencana pembangunan yang akan dilaksanakan agar semua masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam program pembangunan yang akan dilaksanakan.

Strategi yang menekankan pada perlunya sosialisasi pembangunan kepada para pelaku pembangunan daerah dan masyarakat secara umum melalui berbagai media strategis. Penggunaan media-media strategis tersebut sangat disesuaikan dengan karakteristik khalayak sasaran yang berkepentingan dengan informasi pembangunan daerah (Rosalita Bekti dalam Pranata Pusat Komunikasi Pembangunan Daerah, Bangda Depdagri).

Hedebro (1979: *Communication and social change in developing nation*. Ekonomiska-Institute. Stockholm) dalam Nasution (2004) menyusun peran yang bisa dilakukan komunikasi dalam pembangunan, yakni:

1. Komunikasi dapat menciptakan iklim bagi perubahan dengan membujukkan nilai-nilai, sikap, mental, dan bentuk perilaku yang menunjang modernisasi.
2. Komunikasi dapat mengajarkan keterampilan baru, baca tulis, hingga lingkungan.
3. Media massa dapat bertindak sebagai pengganda sumber-sumber daya pengetahuan.
4. Media massa dapat mengantarkan pengalaman-pengalaman yang seolah-olah dialami sendiri sehingga mengurangi biaya psikis dan ekonomis untuk menciptakan kepribadian yang mobile.
5. Komunikasi dapat meningkatkan aspirasi yang merupakan perangsang untuk bertindak nyata.

6. Komunikasi dapat membantu masyarakat menemukan norma-norma baru dan keharmonisan dari masa transisi.
7. Komunikasi dapat membuat orang lebih condong untuk berpartisipasi membuat keputusan dalam masyarakat.
8. Komunikasi dapat mengubah struktur kekuasaan pada masyarakat tradisional dengan pengetahuan massa. Mereka yang memperoleh informasi akan menjadi orang yang berarti, dan para pemimpin tradisional akan tertantang oleh kenyataan bahwa ada orang-orang lain yang juga mempunyai kelebihan dalam hal memiliki informasi.
9. Komunikasi dapat menciptakan rasa kebangsaan sebagai sesuatu yang mengatasi kesetiaan-kesetiaan lokal.
10. Komunikasi dapat membantu mayoritas populasi menyadari pentingnya arti mereka sebagai warga negara, sehingga membantu meningkatkan aktivitas politik.
11. Komunikasi memudahkan perencanaan dan implementasi program-program pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan penduduk.
12. Komunikasi dapat membuat pembangunan ekonomi, sosial, dan politik menjadi proses yang berlangsung sendiri.

Rogers (1976) mengatakan komunikasi tetap dianggap sebagai perpanjangan tangan para perencana pemerintah, dan fungsi utamanya adalah untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan rencana-rencana pembangunan. Dari pendapat Rogers ini jelas bahwa setiap pembangunan dalam suatu bangsa yang memegang peranan penting adalah masyarakat, dan karenanya pemerintah dalam melancarkan komunikasinya perlu memperhatikan strategi apa yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan sehingga efek yang diharapkan itu sesuai dengan harapan.

Jika melihat rumusan di atas dapat dikatakan bahwa komunikasi pembangunan secara luas meliputi peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktifitas pertukaran timbal balik antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara masyarakat dan pemerintah mulai dari proses

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap pembangunan. Sedangkan secara sempit komunikasi pembangunan segala upaya dan cara serta teknik pencapaian gagasan dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan yang ditujukan kepada masyarakat luas. Kegiatan itu bertujuan agar masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan-gagasan yang disampaikan.

3. Pariwisata.

Pariwisata sebenarnya bukanlah suatu yang baru, tetapi merupakan kegiatan yang sudah ada sejak dulunya. Dalam bentuknya yang sederhana pariwisata dulunya disebut dengan bertamasya dan sejalan dengan perkembangan pengetahuan dan tehknologi maka bentuk kegiatan pariwisata berkembang menjadi suatu kegiatan yang lebih kompleks.

Dewasa ini pariwisata telah berkembang di seluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia dan pariwisata juga telah banyak memberikan sumbangan devisa terhadap Negara. Secara nasional perkembangan sector pariwisata menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Perkembangan ini ditandai dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan diharapkan frekuensi kedatangan wisatawan terus meningkat.

Melihat perkembangan yang dicapai sektor pariwisata terus dipersiapkan sejalan dengan asas dan tujuan pengembangan kepariwisataan nasional seperti tercantum dalam UU no 9 tahun 1990 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk: Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata, memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan rasa persahabatan antar bangsa, memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan memakmurkan rakyat (Dirjen, 2007).

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, berbagai program digalakkan seperti pembangunan objek dan daya tarik baru bagi wisatawan. Dalam pengembangan objek dan daya tarik wisata tetap diperhatikan kemampuan untuk

mendorong peningkatan pengembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya, nilai-nilai agama, adat istiadat serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Di samping itu kelestarian budaya dan lingkungan hidup tetap menjadi prioritas perhatian dalam mendukung kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

Ada beberapa usaha pariwisata yang berkembang dengan produk yang dihasilkan saat itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini yaitu:

**Perusahaan-perusahaan Kelompok Industri Pariwisata
dan Produk Masing-masingnya.**

Jenis perusahaan	Produk yang dihasilkan
1. Travel Agent/Tour Operator	Informasi/Advis/ Paket wisata
2. Perusahaan Penerbangan	Seats dan pelayanan lainnya
3. Angkutan Pariwisata	Pelayanan Transfer ke hotel / air port p-p
4. Akomodasi Hotel	Kssamair dan Pelayanan lainnya
5. Restoran dan sejenisnya	Makanan dan Minuman
6. Impresariat, etc	Entertainment dan Attraksi Budaya
7. Local Tour Operator	City Sightseeing/ City Tour
8. Shoping Centre/ Mall,etc	Cendra Mata dan oleh-oleh lainnya
9. Bank Money Changers	Penukaran Valuta Asing
10. Retail Stores	Macam-macam keperluan wisatawan dalam perjalanan

Sumber: Yoeti (2005)

Kegiatan kepariwisataan tidak terlepas dari semua komponen tersebut di atas, dan untuk itu setiap daerah tujuan wisata harus mampu memberikan daya tarik baik daya tarik politis maupun daya tarik ekonomis kepada wisatawan. “Salah satu kekuatan pariwisata bertujuan untuk memberikan daya tarik politis dan ekonomis” (Yoeti, 2006)

Kepariwisataan berhubungan dengan pariwisata memenuhi syarat sapta pesona pariwisata. Sapta pesona adalah kondisi yang harus diwujudkan dalam

rangka menarik minat wisatawan berkunjung ke suatu daerah atau suatu Negara, betah dan nyaman untuk tinggal serta memperoleh kepuasan atas kunjungannya. (Dirjen Pariwisata Seni dan Budaya 2005). Sapta pesona wisata terdiri dari tujuh unsur pesona wisata itu terdiri dari; aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan

METODE PENELITIAN

A. Metode yang Digunakan.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif.

B. Teknik Sampling

Teknik sampling yang peneliti pakai dalam penelitian ini adalah *snow ball* sampling.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi data yang dikumpulkan dengan teknik ini merupakan data yang berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi komunikasi pembangunan Pariwisata Kota Padang dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Pariwisata Kota Padang.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data ini penulis lakukan dengan cara: penentuan lokasi penelitian, membangun akses, memilih *sampling*, pelaksanaan pengumpulan data, mencatat informasi, memecahkan isu lapangan menyimpan data dan kembali ke langkah awal.

E. Pencatatan dan Analisis Data.

Pencatatan data dalam penelitian ini peneliti lakukan dengan cara *unitizing* dan *categorizing* cara ini dilakukan agar data dapat digambarkan secara deskriptif, kaya data dan bersifat kontekstual.

Pengolahan data dilakukan secara bersamaan dengan menggunakan reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Partisipasi masyarakat dalam komunikasi pembangunan pariwisata Kota Padang.

Partisipasi masyarakat dalam komunikasi pembangunan terlihat dan beberapa kegiatan program perencanaan pariwisata yang telah dirancang oleh pemerintahan Kota Padang dalam hal ini kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang. Pembangunan pariwisata di Kota Padang selama ini telah melibatkan masyarakat yang tentunya mereka yang mewakili dari unsur-unsur masyarakat tersebut, unsur masyarakat yang dilibatkan dalam perencanaan pembangunan pariwisata Kota Padang adalah dari pihak pemerintah yang terkait yang akan melaksanakan proyek wisata, pemuka adat, alim ulama, pengusaha, *bundo kanduang* dan masyarakat yang terlibat langsung dengan aktifitas wisata tersebut. Dalam proses perencanaan tersebut masyarakat keterlibatan masyarakat bisa dikatakan cukup baik apalagi masyarakat yang terlibat langsung dengan kegiatan pariwisata, mereka antusias untuk mendengarkan rancangan pembangunan wisata di Kota Padang. Ketika pemerintah memberi peluang untuk membangun objek wisata dan industri pariwisata yang pengelolaannya bisa dilakukan oleh masyarakat. Dialog yang terjadi antara pemerintahan dan masyarakat sekitar: prosedur mendirikan usaha pariwisata, penelolaan objek wisata dan dampak positif dan negatif dari pariwisata.

Pada pelaksanaan program pariwisata, partisipasi masyarakat sangat tinggi. Masyarakat membantu pengamanan material bahan proyek wisata, ikut terlibat sebagai pekerja proyek, ikut meujudkan pendirian dan pengadaan objek wisata, makanya banyak objek wisata yang dikolola oleh masyarakat yang wujud sebenarnya adalah bentuk partisipasi aktif masyarakat. Di antara objek wisata yang dikelola oleh masyarakat adalah:

Pulau Bintangur, pulau Srendah, Pulau Pasumpahan, Pulau Sibuntua, Pulau Sironjong, Pulau Sinyaru, Pulau Setan, Pulau Setan Kecil, Pulau Kasik, pulau Ular pulau pulau ini terletak di kecamatan Bungus Teluk Kabung dan ada beberapa pulau yang terletak di kecamatan Padang Selatan yaitu: Pulau Taron, pulau Bindulang, pulau Pisang Gadang dan Pulau Pisang Ketek.

Selain wisata bahari tersebut di atas, ada juga beberapa wisata yang dikelola oleh masyarakat diantaranya, wisata alam, wisata belanja (toko Souvenir, restoran, rumah makan dan toko panganan), travel agent, angkutan pariwisata dan lain-lain yang menunjang kegiatan kepariwisataan.

Pada dasarnya partisipasi masyarakat dalam komunikasi pembangunan dengan keterlibatan masyarakat untuk ikut membantu pemerintah dalam mendirikan objek wisata tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu lah pemerintahan melakukan komunikasi pariwisata yang pada dasarnya adalah untuk mendidik dan memberikan motivasi kepada masyarakat dengan tujuan untuk menginformasikan ide dan gagasan, menumbuhkan sikap mental dan memberikan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat, makanya selama ini pemerintahan Kota Padang dalam penyelenggaraan pembangunan melibatkan masyarakat dengan suatu sistem komunikasi agar terjalin komunikasi yang baik, agar terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat demi peningkatan pembangunan manusiawi dengan menghapus kemiskinan, pengangguran dan ketidakadilan.

Pemerintah sudah memberi peluang bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam komunikasi pembangunan dan dalam evaluasi komunikasi pembagunan tingkat kesadaran masih terlihat kurang terutama dalam mengantongi izin usaha wisata, masih banyak diantara masyarakat yang terlibat langsung dengan kegiatan pariwisata yang belum memiliki izin, standar harga padahal pemerintah sudah menginformasikan gagasan bahwa setiap usaha pariwisata perlu mendapat surat izin pengelolaan objek wisata dan cafe dan hologram harga bagi usaha wisata belanja.

Pemerintah Kota Padang sudah menginstruksikan bahwa semua cafe, hotel dan objek wisata serta industri pariwisata lainnya yang dikelola oleh masyarakat harus memiliki izin usaha, namun masih banyak pelaku wisata yang belum mengindahkan

instruksi itu. Pemerintah telah melakukan tindakan bahwa industri pariwisata yang tidak memiliki izin disegel saja, namun masih ada pengelola usaha industri pariwisata yang masih berdalih bahwa izin usaha sulit untuk didapatkan, padahal pemerintah sudah mensosialisasikan pengurusan izin usaha pariwisata sesuai dengan SOP yang ada.

Kendati demikian partisipasi masyarakat untuk mendapatkan izin Tanda Daftar Pariwisata sangat kurang, pada tahun 2017 untuk wisata bahari yang dikelola oleh masyarakat belum ada yang mengatongi izin ini. Dinas pariwisata sudah berulang kali menghimbau pengelola pulau-pulau kecil agar mengurus surat izin, namun pengelola masih belum menampakkan partisipasinya dalam hal ini, kalau izin belum dikntongi oleh pengelola dikhawatirkan kalau terjadi komplain dari wisatawan ataupun pengunjung dinas pariwisata tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak adanya izin usaha.

Selain itu hotel, cafe dan usaha industri wasata lainnya harus taat aturan, Aturan itu yang harus dipedomani oleh pelaku usaha dalam pengelolaan pariwisata ini agar usaha yang dirintisnya tidak kena sanksi oleh pemerintahan. Sanksi yang paling ringan adalah penyegelan dan yang paling berat adalah tidak diperbolehkan melakukan usaha yang bergerak di bidang industri pariwisata.

Industri wisata yang bergerak pada usaha kuliner pemerintah akan membuat standar untuk pelaku usaha satu ini, minimal ada izin usaha, daftar harga, IMB dan membayar pajak. Pengusaha kuliner yang telah memenuhi syarat pemerintah akan memberi stiker hologram tersebut dan akan direkomendasikan oleh kantor pariwisata dan kebudayaan Kota Padang untuk menikmati makanan di tempat-tempat yang sudah memliki hologram.

Partisipasi masyarakat untuk menciptakan sapta pesona masih kurang, terutama dalam pesona bersih dan kenangan, sementara pemerintah telah sering menyampaikan apa itu sapta pesona wisata namun partisipasi masyarakat untuk menciptakan sapta pesona ini masih tetap belum berubah, masyarakat dalam hal ini pelaku usaha pariwisata sering tidak mengindahkan kebersihan.

Masih banyaknya masyarakat yang membiarkan sampah berserakan disepanjang objek wisata, apakah itu objek wisata unggulan di Kota Padang, seperti Pantai Padang, Aia Manih, Pasia Jambak dan masih banyak objek-objek wisata yang mayarakat disekitarnya belum menghiraukan sampah yang berserakan ini, belum lagi prilaku masyarakat yang masih membuang sampah padahal tempat-tempat sampah sudah disediakan. Bagi

pedagang makanan di sekitar objek wisata belum menyajikan makanan yang sehat, masih banyak pedagang kuliner yang tidak menutup dagangannya sehingga mudah kena pulusi udara. Masih terlihat pedagang yang menyajikan makanan dengan peralatan makan yang bahan bakunya plastik yang bisa dicuci dan itu pun masih terlihat tidak bersih.

Pengunjung biasanya setelah menikmati perjalanan wisatanya biasanya akan memiliki kesan dan kenangan atas kunjungannya. Kenangan adalah kesan yang melekat dengan kuat pada ingatan dan perasaan seseorang yang disebabkan oleh pengalamannya yang diperolehnya. Kenangan dapat berupa yang indah dan menyenangkan. Kenangan yang diinginkan diwujudkan dalam ingatan dan perasaan wisatawan dari pengalamannya berpariwisata di daerah tujuan, dengan sendirinya adalah yang indah dan menyenangkan.

Partisipasi masyarakat untuk menciptakan pesona wisata ini juga belum terlihat serius banyak destinasi yang ada di Kota Padang masih belum terlihat bisa menampilkan budaya, menggali dan mengangkat budaya lokal termasuk menyajikan makanan khas daerah di sekitar destinasi wisata dan masih sulitnya wisatawan memperoleh cendera mata yang menarik, kecil dan mungil serta mudah membawanya.

B. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata Kota Padang.

Partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan pariwisata dapat dilihat dalam membangun kontak dengan pihak lain apakah melalui kontak antar pribadi langsung ataupun kontak pribadi tidak langsung melalui media sosial, dialog yang mereka bicarakan sekitar keindahan objek wisata, memperkenalkan bahwa Kota Padang pasca gempa 2009 aman untuk dikunjungi, pariwisata Padang ramah lingkungan, dan masih banyak lagi yang mereka bicarakan. Dalam membangun kontak dengan pihak lain dilakukan dengan tujuan untuk mempromosikan wisata Kota Padang serta merekomendasikan destinasi wisata mana yang perlu dikunjungi kalau berlibur ke Kota Padang.

Selain itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata, masyarakat sering memberikan tanggapan tentang pariwisata Kota Padang. Kalau ada orang lain yang mengatakan tentang citra wisata Padang jelek, maka masyarakat Kota Padang akan memberikan informasi yang sebenarnya tentang pariwisata Kota Padang, mereka banyak

yang tidak mau citra pariwisata Padang tercoreng yang ujung-ujungnya nanti membuat wisatawan tidak melirik Kota Padang sebagai daerah tujuan wisatanya.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata Kota Padang juga terlihat ketika memelihara, menerima dan mengambil hasil pembangunan pariwisata. Wujud nyata dari partisipasi masyarakat adalah keikutsertaannya dalam memelihara objek wisata, masyarakat akan menegur dengan halus kalau ada pengunjung yang merusak lingkungan yang ada di sekitar objek wisata. Dengan demikian masyarakat bisa mengambil manfaat dari pembangunan pariwisata dengan tetap bisa berjualan dan mengelola objek wisata dengan tetap menjaga lingkungan. Selain itu partisipasi masyarakat memelihara pembangunan pariwisata khususnya para pedagang yang ada di sekitar objek wisata, mereka memberlakukan harga makanan sama dengan arti makanan yang sama akan dipasarkan dengan harga yang sama pula.

Berdasarkan data di atas dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata Kota Padang dapat dikatakan sudah tinggi. Dengan demikian masyarakat sudah ikut menjaga dan meningkatkan citra wisata Padang yang tentunya dengan harapan dapat memotivasi wisatawan untuk berkunjung ke Kota Padang serta dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PENUTUP

Partisipasi masyarakat dalam komunikasi pembangunan pariwisata masih kurang, ini terlihat bahwa pemerintah Kota Padang telah menginformasikan pembangunan pariwisata mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam pelaksanaannya bahwa setiap usaha yang akan bergerak menjadi usaha pariwisata harus punya izin usaha, namun masih ada pengelola pariwisata yang belum memiliki izin usaha dan masih ada masyarakat yang masih belum mengindahkan sapa pesona wisata terutama pada pesona bersih dan kenangan.

Sementara partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata di Kota Padang bisa dikatakan sudah baik dan tinggi, ini terlihat membangun kontak dengan pihak lain baik langsung maupun melalui media sosial, dengan memberikan tanggapan terhadap

informasi tentang pariwisata Padang termasuk memelihara, menerima dan mengambil hasil pembangunan dari pariwisata sehingga dapat menopang ekonomi keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan, 2009, *Penulisan Kualitatif* Jakarta Kencana Prenada Media Group.
- Devito, Joseph. A, 1997, *Komunikasi Antar Manusia, kuliah dasar edisi ke 5 penerj : Agus Maulana*, Jakarta, professional Books
- Douglas N dan Doudlas. 1996. *Sosial and cultural Impact of Tourism in the south Pacific*. M. Hall dan Aj. Page. (ed). London: International Thomas Busine Press.
- Flor, Alexander dan Cangara Hafied , 2018, *Komunikas Lingkungan, Penerapan Kasus-kasus Lingkungan Melalui Startegi Komunikasi*, Jakarta: Prenadamedai group.
- Gede, I, Pituna, 2005, *Sosiologi Pariwisata*, Jogjakarta, Andi Offset.
- Gelgel, I Putu. 2006. *Industri Pariwisata Indonesia, Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO) ImplikasiHukum dan Antisipasinya*. Bandung: Rafika Aditama.
- Harun, H. Rochajat. 2008. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Grafindo.
- Nasution,Zulkarimen, 1998. *Komunikasi Pembangunan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Zulkarimen. 2011. *Komunikasi Pembangunan; Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Rochim, Achludin. 2010. *Komunikasi Sosial Pembangunan*. Surabaya: LP21.
- Sad Dian Utomo. 2003. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan Pembangunan*, Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa.
- Slamet. 2003. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.

MENGEMBANGKAN *BRAND ASSOCIATION* DALAM KAMPANYE KESEHATAN GenRe (Generasi Berencana)

Suharyanti ^{1*}

¹Universitas Bakrie

*Email: suharyanti@bakrie.ac.id

ABSTRAK

Makalah ini mengkaji kampanye kesehatan - Generasi Berencana (GenRe) yang diprakasai oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan ditujukan kepada remaja Indonesia untuk mencegah perilaku seks bebas, pernikahan dini dan penyalahgunaan NAPZA. Tujuan makalah ini menjelaskan pentingnya menciptakan *brand association* yang didukung dengan aktivitas di media sosial dalam menciptakan ikatan (*engagement*) dalam kampanye Generasi Berencana yang menysasar remaja di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep *branding* dan media sosial. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan informan yang merepresentasikan khalayak sasaran GenRe. Tantangan dalam melaksanakan kampanye Genre saat ini adalah upaya menciptakan kedekatan (*engagement*) dengan remaja yang menjadi khalayak sasaran. *Brand association* perlu diciptakan agar remaja merasa program Genre merepresentasikan karakter mereka. Pemilihan *platform* digital (media sosial) yang digunakan untuk kampanye Genre sejauh ini sudah tepat, namun konten yang diunggah masih bersifat satu arah dan kurang dapat menciptakan interaksi dan kedekatan yang lebih intens. Dengan mengelaborasi *product related performance association* dan *non product related performance association* secara optimal maka *brand association* yang tepat dapat diciptakan sehingga remaja dapat mempersepsi bahwa program Genre “gue banget”, yang artinya konten pada kampanye GenRe sesuai dengan keseharian dan harapan mereka sebagai remaja.

Kata kunci: *brand association, product related performance association, non product related performance. Association, engagement, media sosial.*

PENDAHULUAN

Anything can be branded, demikian dinyatakan oleh Keller dalam bukunya *Strategic Brand Management* (Keller, 2013). Artinya pemerekan atau lebih lazim disebut *branding* tidak hanya dapat dilakukan untuk produk atau jasa tetapi lebih luas lagi meliputi orang, kelompok, peristiwa, ide dan lain-lain.

Menurut *American Marketing Association* (AMA), *brand* atau merek diartikan sebagai nama, istilah, tanda, simbol, atau kombinasi dari hal-hal tersebut berguna untuk mengidentifikasi produk atau jasa serta untuk membedakan satu dengan yang lainnya (Keller, 2013).

Makalah ini menganalisis kampanye kesehatan Generasi Berencana (GenRe) yang diprakasai oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKKN) yang dianalisis dengan perspektif *branding*, yaitu *brand association*.

Berdasarkan riset UNICEF pada 2014, 52% besar anak dan remaja menyatakan telah terekspos konten pornografi lewat iklan atau tautan. Sedangkan 14% mengaku bahwa mereka mengakses situs porno secara suka rela (https://www.unicef.org/indonesia/media_22167.html, diakses pada 8 April 2019). Secara psikologi, terekspos terhadap pornografi sejak dini dapat memberikan beberapa efek yang tidak diinginkan seperti seks bebas, adiksi, dan kekerasan (<https://www.psychologytoday.com/us/blog/real-healing/201208/overexposed-and-under-prepared-the-effects-early-exposure-sexual-content>, diakses pada 8 April 2019). Salah satu risiko dari seks pranikah atau seks bebas adalah terjadi kehamilan yang tidak diharapkan. (Romauli, 2011: dalam Sari, 2016). Informasi ini didapat berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Jawa Timur yang mencatat ada puluhan permohonan dispensasi pernikahan selama bulan Januari hingga Oktober tahun 2017. Dispensasi nikah yang mereka terima didominasi oleh anak di bawah umur telah hamil sebelum menikah. Padahal, dari segi usia, mereka belum diperbolehkan untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-hamil-duluan-puluhan-anak-di-bawah-umur-minta-dinikahkan>, diakses pada 8 April 2019).

Dari kasus-kasus di atas, maka terlihat bahwa usia remaja adalah usia dimana mereka masih mencari identitas diri dan jika terjebak di lingkungan yang buruk dan tidak dibimbing dengan baik maka akan memengaruhi masa depan mereka. Sementara remaja adalah generasi penerus yang menentukan arah kemajuan suatu bangsa. Hal ini pula yang menjadi pemikiran pemerintah, dalam hal ini BKKBN untuk mengatasi permasalahan remaja. BKKBN mengembangkan suatu program yang bernama GenRe Indonesia (Generasi Berencana Indonesia) yang berfokus pada penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, mengedepankan pembentukan karakter bangsa dikalangan generasi muda agar

tidak melakukan pernikahan dini, seks pra nikah, serta penyalahgunaan Napza (<https://www.bkkbn.go.id>, diakses 28 Maret 2019).



Gambar 1. Salam GenRe: Hindari Seks Pra Nikah, Hindari Pernikahan Dini, Hindari Napza (Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya)

Program dari BKKBN ini menekankan remaja untuk memiliki jiwa berkompetisi secara sehat dan menjadi generasi yang berencana, sehingga keseharian remaja dapat diisi dengan kegiatan positif di sekolah maupun di lingkungan masyarakat (<https://nasional.tempo.co/read/479516/64-juta-remaja-galau-rentan-seks-bebas>, diakses 8 April 2019).

Mengajak remaja untuk memberikan respon positif terhadap program GenRe yang dihadirkan oleh BKKBN bukanlah hal yang mudah. Tentunya perlu dipahami lebih dulu karakteristik remaja sebagai *target adopter program* Genre, sehingga mereka dapat memahami, menerima dan mendukung program GenRe. Kemudian, menciptakan nilai bagi ide GenRe yang disesuaikan dengan kebutuhan, keinginan dan gaya hidup remaja, serta membuat kampanye kesehatan yang disesuaikan dengan ide Genre dan karakteristik remaja. Program GenRe tersebut dilaksanakan melalui pendekatan langsung kepada remaja serta orang tua yang memiliki remaja. Pendekatan kepada remaja dilaksanakan melalui pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) dan pendekatan kepada orang tua yang memiliki remaja, dilaksanakan melalui pengembangan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) (<http://www.genreindonesia.com/pusat-informasi-konseling/>, diakses pada 8 April 2019). Kedua pendekatan ini dilakukan melalui jalur *online* dan *offline*.

Untuk penyebaran program secara *offline*, pihak GenRe banyak melakukan kunjungan ke sekolah, universitas, dan kerja sama dengan komunitas. Sedangkan untuk pelaksanaan program secara *online*, GenRe menggunakan situs dan media sosial. Kampanye program Genre menggunakan *Instagram*, *YouTube*, dan Facebook. Di antara ketiga media sosial tersebut, *Instagram* menjadi *platform* yang paling aktif digunakan.

Terkait dengan *branding* pada kampanye kesehatan, Keller (2013) menjelaskan bahwa baik produk atau jasa dapat di-*branding*, termasuk kampanye kesehatan kesehatan. Namun demikian penelitian terdahulu terkait *branding* untuk kampanye kesehatan seperti program GenRe tidak sebanyak penelitian penelitian *branding* untuk produk atau jasa. Beberapa penelitian tentang *branding* terkait kampanye kesehatan berfokus pada penggunaan media konvensional dan media baru sebagai medium pesan. Dalam upaya menjelaskan kampanye sosial dari sisi komunikasi, para peneliti menggunakan beberapa model dan teori sosial kognitif untuk mengkaji kampanye kesehatan, diantaranya *health believe mode* (HBM), *Fear Apeal-based Extended Parallel Process Model* (EPPM), *Social Learning Theory* (SLT), model *Stages of Change*, model *Diffusion of Innovations*, *Entertainment Education*, dan pendekatan *Social Marketing* (SM) (Basu dan Wang, 2009). Basu dan Wang menjelaskan pada saat HBM dan EPPM membantu untuk memprediksi perilaku kesehatan berdasarkan penilaian kognitif pesan yang tertanam, SLT menjelaskan kemampuan seseorang untuk mengontrol lingkungan, motifasi, dan kapabilitasnya sebagai kekuatan penggerak perilaku sehat.

Di Clemente dan Prochaska (1985, dalam Basu dan Wang, 2009) menjelaskan bahwa model *Stage of Change* menuntut sebuah kampanye harus didesain dengan segala usaha agar dapat menunjukkan tahap perubahan perilaku kesehatan pada khalayak sasaran. Model *Diffusion of Innovations* menggunakan figur dalam komunitas sebagai medium yang memberikan contoh perilaku kesehatan, sedangkan *Entertainment Education* menggabungkan strategi inovasi untuk menggantikan pesan dengan format yang lebih menghibur. Terkait dengan penjelasan di atas, kajian mengenai *brand association* dalam kaitannya dengan kampanye kesehatan belum banyak dilakukan. Dalam penelitian ini, keterkaitan dan pentingnya pengembangan *brand association* pada kampanye kesehatan dalam hal ini kampanye GenRe akan dijabarkan.

Brand Association

Brand association berhubungan dengan kesan yang tersimpan di benak konsumen mengenai produk. *Brand association is related to information on what is in the customer's mind about the brand, either positive or negative, connected to the node of the brain memory* (Emari et.,et al., 2012 dalam Omwenga et.,al., 2016). *Principally, any information come across in brand association is connected to the brand name in consumer recall, and reflect the brand's image* (Keller, 1993; Romaniuk and Sharp, 2003 dalam Sasmita, 2015). Dari ke dua pernyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa semakin kuat konsumen mengasosiasikan suatu merek dengan suatu hal tertentu maka semakin kuat merek tersebut diingat oleh konsumen.

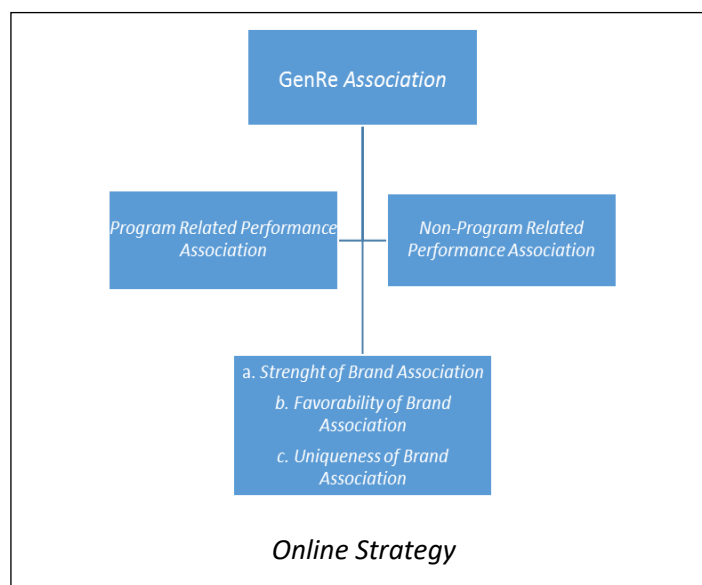
Brand association adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan memori atau ingatan terhadap merek (Aaker, 1996). Asosiasi merek merefleksikan makna unik (*unique meaning*) yang diasosiasikan dengan merek suatu produk (Grime, Diamantopoulus dan Smith, 2010). Restoran cepat saji McDonald's sering diasosiasikan sebagai *happy meal*, keceriaan pesta ulang tahun anak, karakter Ron McDonald's, dan hadiah mainan anak-anak. Selain itu McDonald's juga sering dikaitkan dengan pelayanan yang ramah, burger yang enak, dan serba cepat. Sekumpulan asosiasi atau beberapa asosiasi yang sangat kuat akhirnya akan membentuk citra produk (Aaker, 1996). Kembali pada contoh McDonald's, asosiasi kuat McDonald's dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan anak-anak membuat McDonald's erat dengan citra "restoran *favorite* anak-anak". Dari contoh diatas, dapat disimpulkan bahwa citra merek dapat terbentuk dari bermacam-macam asosiasi.

Keller, juga mengembangkan model *Customer Based Brand Equity* (CBBE) dalam model piramida *Brand Resonance*, yang menyatakan bahwa ekuitas merek yang baik terbentuk dari tingkat kedekatan *customer* dengan merek tersebut. Hal ini dapat dilihat antara lain dengan mengetahui bagaimana *customer* mengasosiasikan merek (Sadek, Elwy, Eldallal 2018). Keller juga menjelaskan bahwa untuk mendapatkan *image* yang positif terhadap suatu produk atau ide diperlukan asosiasi yang kuat (*strong*), disukai (*favorable*) dan unik (*unique*). *Brand association* yang kuat terbentuk jika informasi yang diperoleh oleh khalayak sasaran sesuai dengan pengetahuan (*brand knowledge*) yang sudah tersimpan di benaknya. *Brand association* yang disukai dapat tercipta jika khalayak sasaran menanggapi merek tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.

Sedangkan, *brand association* yang unik terbentuk apabila khalayak sasaran menganggap bahwa merek tersebut memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh merek lain. (Keller, 2013). *Brand association* juga dapat dikategorikan menjadi *product related performance association* dan *non-product related performance association*. *Product related performance association* cenderung pada performa produk yang tangible dan biasanya dikaitkan dengan kualitas dan inovasi. Sedangkan *non-product related performance* lebih kepada atribut-atribut yang sifatnya *intangibile* yang bersifat simbolik. (Keller, 2013).

Mengingat bahwa konsep *branding*, khususnya *brand association* tidak hanya dapat diterapkan untuk produk, namun dapat digunakan untuk menganalisis aspek-aspek yang lebih luas seperti kampanye sosial atau kampanye kesehatan. Maka penelitian ini akan menjelaskan bagaimana *brand association* yang terbentuk pada kampanye Genre dan upaya apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan *brand association* yang tepat. Dalam hal ini, kampanye Genre adalah sebagai produk atau ide sedangkan pelanggan adalah khalayak sasaran kampanye Genre yaitu remaja di Indonesia.

Kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Media Sosial

Media sosial adalah sebuah *group* aplikasi berbasis internet yang dibangun berdasarkan ideologis dan teknologi dari Web 2.0 yang memungkinkan pembuatan dan pertukaran konten yang dibuat pengguna (Kaplan dan Haenlein, 2010, dalam Mahoney dan Tang, 2012). Sebagai *platform* komunikasi, media sosial dapat digunakan baik oleh individu maupun organisasi. Pergeseran khalayak dari media lama seperti televisi, koran, dan radio kepada media sosial menjadikannya sebagai *platform* baru untuk praktisi pemasaran berkomunikasi dan berhubungan dengan khalayak (Patel, 2017:11). Dari sisi kampanye kesehatan, kehadiran media baru ini dapat digunakan sebagai sarana komunikasi.

Media sosial sendiri didesain untuk mengajak khalayak berpartisipasi, tetapi sering kali digunakan sebagai mekanisme penyebaran informasi secara massal oleh organisasi dan praktisi kesehatan publik (Heldman, Schindelar, dan Weaver, 2013). Padahal media sosial dapat dijadikan portal komunikasi dua arah yang efektif dengan khalayak dan secara langsung sebagai media persuasi.

Media sosial yang keunggulannya berpusat pada kostumisasi konten sesuai dengan penggunaannya memberikan kesempatan praktisi pemasaran dan kesehatan untuk menyesuaikan konten dan cara penyampaian pesan agar menarik, mudah diserap, dan dimengerti oleh khalayak. Perlu diingat keunggulan media sosial adalah sifatnya yang sosial —bersifat partisipatif dan timbal balik, meminjamkan diri untuk percakapan dan interaksi antara dan diantara organisasi kesehatan masyarakat dan *audience* yang beragam melalui saluran media sosial (Heldman, Schindelar, dan Weaver, 2013:5). Heldman, Schindelar, dan Weaver mengusulkan tujuh prinsip yang harus menjadi bagian strategi media komunikasi media sosial pada organisasi kesehatan publik.



Gambar 3. Ilustrasi 7 Prinsip Media sosial Schindelar dan Weaver (2013).

1. Menyimak percakapan media sosial

Salah satu bentuk keterlibatan paling mendasar yaitu menggunakan media sosial untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi kesehatan pengguna media sosial. Hal ini diperlukan agar organisasi mengetahui sejauh mana pemahaman terhadap konten edukasi kesehatan yang disampaikan dan sejauh mana konten tersebut sesuai dengan kebutuhan *audiencenya*.

2. Terlibat dengan *influencer* dan percakapannya

Melibatkan diri dengan *influencer* yang sering mengunggah konten kesehatan dan terlibat dalam percakapan mereka beserta *followers*-nya. Dari sini organisasi dapat mengetahui apa yang sedang menjadi isu hangat terkait kesehatan dan bagaimana *influencer* dan *follower* menyikapinya. Jika diperlukan, *influencer* dapat digandeng untuk menjadi mitra dalam melakukan kampanye kesehatan.

3. Merespon pertanyaan atau komen yang diterima lewat saluran media sosial)

Organisasi harus merespon dengan cepat setiap pertanyaan, usulan dan kritikan, penting agar apengguna media sosial merasa diperhatikan dan dihargai sehingga memungkinkan untuk terciptanya engagement yang lebih dalam.

4. Menciptakan kesempatan bagi pengguna untuk lebih terlibat dengan organisasi dan berinteraksi lebih intens dengan sesama pengguna media sosial. Organisasi harus mengidentifikasi peluang untuk terhubung langsung dengan pengguna media sosial dan memudahkan diskusi dan mengarah pada peningkatan keterlibatan diantara *audience* lain. Contohnya, seperti mengunggah satu topik tertentu untuk didiskusikan bersama dan mencari solusi bersama dalam real time interaction melalui media sosial.
5. Mengajak pengguna untuk bersama-sama membuat konten
Memotivasi pengguna untuk berbagi cerita. Dan mengikutsertakan mereka dalam pembuatan pesan, dan berkolaborasi dalam menciptakan ide dan strategi yang dapat dibagikan melalui saluran media sosial untuk meningkatkan keterlibatan dengan pesan kesehatan publik.
6. Menciptakan kesempatan untuk mengintegrasikan kedekatan baik secara *online* maupun *offline*
Mengintegrasikan keterlibatan media sosial dengan pengalaman pribadi memberikan kesempatan bagi pengguna media sosial yang berkomitmen untuk mendapatkan akses yang lebih luas untuk keterlibatan dalam acara kesehatan yang diselenggarakan secara online dan sebaliknya.
7. Memanfaatkan media sosial meningkatkan keterlibatan komunitas
Membidik komunitas-komunitas yang memiliki perhatian terhadap masalah kesehatan dan memberikan peluang kepada komunitas tersebut untuk terlibat dalam kampanye kesehatan selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya; menemukan makna atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif baik berupa gambar, kata,

maupun kejadian dalam *setting* naturalnya (Yusuf, Muri. 2014). Analisis kualitatif melibatkan interpretasi wawancara, observasi, dan dokumen untuk mendapatkan substansi pola dan tema yang berarti (Patton, 2014).

Wawancara mendalam dilakukan dengan narasumber untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan program GenRe yang dilakukan secara online melalui media sosial. Kampanye media sosial yang menjadi fokus penelitian adalah kampanye melalui *Instagram*. Narasumber dalam penelitian adalah enam mahasiswa yang terdiri dari, dua mahasiswa yang mengetahui keberadaan program GenRe secara *offline* maupun *online* (*Instagram*), menjadi *follower* akun GenRe serta menjadi anggota PIK – remaja dan empat mahasiswa yang mengetahui adanya program GenRe melalui Instagram tapi tidak menjadi *follower* akun GenRe. Wawancara mendalam dilakukan kepada enam mahasiswa tersebut untuk menggali secara mendalam sejauh mana kedekatan informan dengan program GenRe untuk mendapatkan *brand association* GenRe.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagian besar konten *Instagram* GenRe berupa informasi dan edukasi terkait aktivitas GenRe untuk menyosialisasikan tiga tujuan utama GenRe yaitu, hindari seks pra nikah, hindari pernikahan dini, hindari napza, dan edukasi tentang kesehatan yang dikemas dalam bentuk animasi dan gaya bahasa anak muda. Diperkenalkan juga beberapa *games* yang diciptakan oleh GenRe yang terkait tiga tujuan GenRe, dan penjualan *merchandise* GenRe seperti topi, tas, dan kaus. Disamping itu, isu-isu yang sedang hangat dibicarakan secara umum juga ditampilkan seperti *stop bullying*, jangan golput dalam Pilpres, ujian nasional, kegiatan remaja yang tergabung dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK), persyaratan menjadi anggota PIK remaja, informasi seputar pemilihan Duta GenRe, serta para pemenang Duta GenRe. Komentar terhadap konten terlihat meningkat menjelang pemilihan Duta Genre. Duta GenRe merupakan perwakilan remaja di seluruh Indonesia yang dipilih oleh BKKBN sebagai *agent of change* yang tugasnya melakukan edukasi tiga tujuan GenRe melalui berbagai aktivitas.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap enamnara sumber, tampak mereka mengetahui dan memahami bahwa program GenRe mengedukasi hal yang

bermanfaat untuk masa depan mereka. Namun terdapat perbedaan antara dua narasumber yang sudah menjadi anggota PIK dan empat narasumber yang tidak menjadi anggota PIK. Narasumber yang tidak menjadi anggota PIK – Remaja dan bukan *follower* akun GenRe mengetahui adanya *Instagram* GenRe secara kebetulan dan tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang program GenRe dengan memperhatikan dan membaca konten-konten yang ditampilkan pada *Instagram* GenRe. Walaupun mendukung program GenRe, narasumber ini tidak tertarik menjadi *follower* atau menuliskan komentar. Mereka juga tidak merasa *engage dengan GenRe* karena menganggap program GenRe sama dengan program-program pemerintah yang lain seperti kampanye jauhi narkoba, kampanye cinta budaya Indonesia, kampanye literasi media, dan lain sebagainya. Walaupun konten sudah sedemikian rupa disesuaikan dengan karakter remaja dengan menggunakan bahasa anak muda dan dikemas dalam visualisasi menarik namun kesan program pemerintah yang cenderung serius dan menggurui tertanam di benak mereka. Konten-konten baik yang secara langsung terkait dengan kesehatan reproduksi remaja maupun isu-isu lain seputar kehidupan remaja seperti *stop bullying*, persiapan ujian nasional terkesan biasa saja dan kurang *fun* serta *bukan gue banget deh*. Bahkan *games* yang diciptakan dan sempat diperlihatkan, walaupun animasinya bagus menurut mereka *ujung-ujungnya tetap menggurui*. Lebih lanjut narasumber menyatakan bahwa konten-konten lainnya cenderung membosankan karena hanya menampilkan wajah-wajah pemenang duta GenRe dari seluruh Indonesia.

Sementara hasil wawancara mendalam dengan dua narasumber yang sudah menjadi anggota PIK Remaja justru menunjukkan bahwa selain mendukung program GenRe mereka juga merasa ada kebanggaan menjadi bagian dari PIK Remaja. Hal ini disebabkan seringnya dua narasumber ini terlibat dengan kegiatan seminar, *talkshow* yang diselenggarakan oleh GenRe.

Menurut mereka, PIK remaja menggambarkan remaja yang serius memikirkan masa depan termasuk bagaimana membangun keluarga yang ideal di masa yang akan datang. Walaupun demikian, kedekatan dengan GenRe terjadi lebih karena karena seringnya mereka dilibatkan dalam kegiatan GenRe, bukan karena aktif memberikan komentar pada *Instagram* GenRe. Bahkan narasumber tergerak untuk menjadi *follower* ketika mereka sudah dinyatakan resmi menjadi anggota PIK Remaja. Lebih jauh lagi, jika

digali lebih dalam bahwa hal yang membuat mereka terlibat dalam PIK Remaja karena ingin menjadi Duta GenRe yang syarat utamanya harus menjadi anggota PIK Remaja.

Pembahasan:

Di bawah ini adalah asosiasi *brand* GenRe berdasarkan hasil wawancara mendalam:



Gambar 4. Brand Association GenRe

Strength of brand association: Semakin dalam khalayak sasaran menganggap bahwa informasi yang diperoleh mengenai GenRe sesuai dengan *brand knowledge* yang dimiliki maka semakin kuat *brand association* yang terbentuk. Narasumber sepakat bahwa dari penamaan Generasi Berencana yang disingkat GenRe sudah cukup menarik, mudah diingat, dan dapat mewakili program yang ditawarkan. Demikian juga jika dilihat dari konten *Instagram* GenRe maka dapat dilihat bahwa informasi mengenai tiga tujuan utama GenRe secara konsisten tersampaikan dan dapat diterima dengan baik oleh narasumber. Namun demikian asosiasi yang kuat akan lebih tertanam apabila khalayak sasaran memiliki pengalaman dengan produk atau ide yang ditawarkan. (Keller, 2013). Narasumber yang sudah menjadi anggota PIK terlihat lebih memiliki pandangan yang

positif mengenai GenRe, apalagi ada rasa kebanggan yang dimiliki sebagai anggota PIK Remaja.

Favorability of Brand Association: Program akan disukai oleh khalayak sasaran jika atribut-atribut yang melekat pada program relevan, sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan dianggap bermanfaat. (Keller, 2013). Walaupun konten *Instagram* GenRe sudah dibuat sedemikian rupa agar sesuai dengan karakter remaja, sebagian narasumber tetap menganggap program GenRe cenderung menggurui karena citra program pemerintah yang melekat pada program GenRe. Mengenai hal ini, narasumber yang sudah menjadi anggota PIK juga menyatakan hal yang sama, khususnya penamaan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja terdengar sangat formal dan “*gak gaul banget*” serta diusulkan untuk mengganti nama. PIK dengan nama yang lebih terkesan *fun* seperti GenRe Squad, Kumpul GenRe, dan lain sebagainya.

Uniqueness of Brand Association: Keunikan yang dimaksud oleh Keller adalah keunikan yang hanya dimiliki oleh produk atau program tersebut (Keller, 2013). Sejalan dengan penjelasan pada *favorability of Brand Association*, bahwa walaupun narasumber seluruhnya setuju dengan apa yang ditawarkan oleh program GenRe, namun program ini belum dapat menciptakan kedekatan yang lebih *intens* dengan khalayak sasarnya. Program GenRe hanya satu dari sekian banyak program atau kampanye yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Secara umum atribut *tangible product /program related performance association*) pada program GenRe yaitu tiga tujuan GenRe yang diunggah pada konten-konten *Instagram* GenRe dapat dipahami dan didukung oleh remaja yang menjadi khalayak sasaran, namun belum cukup menciptakan kedekatan atau *engagement* yang kuat. Agar faktor *Strength of Brand Association*, *Favorability of Brand Association*, dan *Uniqueness of Brand Assocation* dapat tertanam kuat di benak khalayak sasaran dan maka atribut yang sifatnya *intangibile (non-product related imagery association)* harus diperkuat. Keinginan agar program GenRe harus lebih “*gue banget*” perlu dielaborasi lebih jauh untuk menemukan asosiasi-asosiasi yang dapat mewakili karakter remaja sebagai khalayak sasaran.

Beberapa upaya untuk mengembangkan *brand association* yang tepat dapat dilakukan dengan mengadaptasi tujuh prinsip media sosial dari Heldman, Schindelar, dan

Weaver, yang intinya adalah perlunya menciptakan konten-konten yang dapat meningkatkan *engagement* dengan khalayak sasaran (Heldman, Schindelar, dan Weaver, 2013:5). Konten pada *Instagram* GenRe walaupun sudah dibuat sedemikian rupa agar menarik dengan gaya bahasa remaja, namun cenderung bersifat satu arah dimana komentar-komentar yang masuk, walaupun memang hanya sedikit, seringkali tidak direspon atau hanya dalam bentuk respon singkat.

Walaupun demikian, potensi untuk meningkatkan interaksi dengan khalayak sasaran dan *follower* bisa ditingkatkan. Seperti dijelaskan oleh Heldman, Schindelar, dan Weaver bahwa strategi *online* harus didukung dengan strategi *offline* seperti mengoptimalkan peran PIK Remaja sebagai komunitas GenRe yang dibentuk oleh BKKBN, mendorong terjadinya diskusi pada kegiatan seminar, *talkshow*, dan menciptakan komunitas-komunitas baru dengan bekerjasama dengan institusi formal yang relevan dengan program GenRe seperti Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Universitas. Lebih jauh lagi, unyuk lebih mendekati diri dengan remaja GenRe dapat menjadi penyelenggara atau menjadi sponsor pada acara-acara yang sedang diminati remaja seperti kompetisi olahraga, festival musik, lomba debat, *stand up comedy* yang dapat menjadi *alternatif* terobosan untuk meningkatkan keakraban dengan remaja.

Dengan terlibat lebih *intens* dengan khalayak sasaran maka dapat digali *insight* dari remaja yang dapat dikembangkan menjadi asosiasi yang kuat (*Strength of Brand Association*), disukai (*Favorability of Brand Association*) dan unik (*Uniqueness of Brand Association*), sehingga dapat terbentuk asosiasi “GenRe *Gue Banget*”.

KESIMPULAN

Untuk mengembangkan asosiasi yang tepat untuk program GenRe yang membidik khalayak sasaran remaja, diperlukan upaya pendekatan yang *intens* baik secara *offline* maupun *online*. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut yang secara spesifik mengkaji lebih mendalam karakteristik dan gaya hidup remaja di Indonesia untuk mendapatkan *insight* karakteristik remaja di Indonesia agar strategi kampanye yang dilakukan dapat tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaker, David A.(1996). *Managing Brand Equity*. Canada: Maxwell Mc Millan, Inc.
- Basu, A., & Wang, J. (2009). *The Role of Branding in Public Health Campaigns*. *Journal of Communication Management*, Vol.13.
- Baisya, Rajat K. (2013). *Branding in a Competitive Market Place*. Sage: New Delhi,India.
- Dolnicar, S., Hurlimann, A., & Grün, B. (2014). *Branding Water*. *Water research*, 57, 325-338.
- Evans, W. D., Blitstein, J., Vallone, D., Post, S., & Nielsen, W. (2014). *Systematic Review of Health Branding: Growth of a Promising Practice*. *Translational Behavioral Medicine*, 5(1), 24-36.
- Evans, W. D., & Hastings, G. (Eds.). (2008). *Public Health Branding: Applying Marketing for Social Change*. Oxford University Press.
- Freberg, Karen. (2018). *Social Media for Strategic Communication*. Sage: California, USA.
- Grime, Ian, Damantios Diamantopoulos and Gareth Smith (2010).*Consumer Evaluations of Extensions and Their Effects on the core Brand*. *European Journal of Marketing* 36, hlm 1415-1435
- Heldman, A. B., Schindelar, J., & Weaver, J. B. (2013). Social media engagement and public health communication: implications for public health organizations being truly “social”. *Public Health Reviews*, 35(1), 13.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2012). *Social media: Back to The Roots and Back to The Future*. *Journal of Systems and Information Technology*, 14(2), 101-104.
- Kemp, E., Jillapalli, R., & Becerra, E. (2014.) *Healthcare Branding: Developing Emotionally Based Consumer Brand Relationships*. *Journal of Services Marketing*, 28(2).
- Keller, Kevin Lane. (2013). *Strategic Brand Management*. Pearson, Education Limited: Essex, England.
- Mahoney, L Meghan. Tang Tang. (2017.0 *Strategic Social Media: From Marketing to Social Change*. John Wiley & Son: Susssex, UK.
- Omwenga, Jane., Iravo, Mike., Kilei, Peary. (2016). *Role of Brand Associations on Market Brand Performance of Service Brands: Evidential View of Kenya’s Banking Industry*. *Journal of Marketing and Consumer Research* Vol.24.
- Patel, Dhaval. (2017). *Social Media Marketing Fundamentals*. VDS Developer: India.
- Patton, Michael Q. (2015). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. Sage: California, USA.
- Pralea, A. R. (2011). *Branding in Health Marketing*. *Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Economic Sciences. Series V*, 4(2), 65.

- Sari, Danita. 2016. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kehamilan pada Usia Remaja di Puskesmas Ciputat Kota Tangerang Selatan Tahun 2014*. ARKESMAS, 1(1).
- Sasmita, Jumiati. (2015). *Young consumers' Insights on Brand Equity: Effects of Brand Association, Brand loyalty, Brand awareness, and Brand Image.*, International Journal of Retail & Distribution Management., Volume 43.
- Vallone, D., Greenberg, M., Xiao, H., Bennett, M., Cantrell, J., Rath, J., & Hair, E. (2017). *The Effect of Branding to Promote Healthy Behavior: Reducing Tobacco Use among Youth and Young Adults*. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14.
- Yusuf, Muri. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian Campuran*. Kencana: Jakarta
- <https://www.bkkbn.go.id>, diakses 28 Maret 2019.
- <http://www.genreindonesia.com/pusat-informasi-konseling/>, diakses pada 7 April 2019.
- <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-hamil-dulu-anak-di-bawah-umur-minta-dinikahkan>, diakses pada 7 April 2019.
- https://www.unicef.org/indonesia/media_22167.html, diakses pada 9 April 2019.
- <https://www.psychologytoday.com/us/blog/real-healing/201208/overexposed-and-under-prepared-the-effects-early-exposure-sexual-content>, diakses pada 8 April 2019.

SEMINAR NASIONAL
PENYULUHAN, KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TOPIK PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

Daftar Halaman

No.	Judul & Peserta	Halaman
1.	PEMBERDAYAAN PETANI PETERNAK DALAM MENUNJANG PENGEMBANGAN PETERNAKAN BABI BERKELANJUTAN <i>Artise H.S. Salendu</i>	411 - 416
2.	KEBERLANJUTAN PEMBERDAYAAN PETAMBAK UDANG RAKYAT (studi kasus pola kemitraan bagi hasil di bumi dipasena provinsi lampung) <i>Budhi Waskito</i>	417 - 430
3.	PADA PROGRAM DEEPENING RESILIENCE OLEH LSM JEMARI SAKATO DI NAGARI TIKU SELATAN KECAMATAN TANJUNG MUTIARA KABUPATEN AGAM <i>Mega Sri Wardani</i>	431 - 449
4.	MODAL SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ASAP DI RIAU: PENGUATAN KELEMBAGAAN SOSIAL MELALUI PEMBERADAYAAN MASYARAKAT PEDULI API <i>Miftah Faridl Widhagdha</i>	450 - 459
5.	KAJIAN INOVASI MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN DI KAWASAN WISATA AGRO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA <i>Roso Witjaksono</i>	460 - 476

Sambungan Daftar Halaman

No.	Judul & Peserta	Halaman
6.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS MODAL SOSIAL PADA PENGEMBANGAN KAKAO DI TANEN, HARGOBINANGUN, PAKEM, SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA <i>Teguh Kismantoroadji</i>	477 - 490
7.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BIMBINGAN TEKNIS PERBANYAKAN DAN PEMELIHARAAN TANAMAN HIAS DI SUMATERA BARAT <i>Ellya Rosa</i>	491 - 500
8.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BIMBINGAN TEKNIS BUDIDAYA TANAMAN BUAH DALAM POT DI SUMATERA BARAT <i>Ellya Rosa</i>	501 - 509
9.	IMPLEMENTASI <i>COMMUNITY BASED TOURISM</i> DI DESA WISATA PUTON WATU NGELAK KABUPATEN BANTUL <i>Mesalia Kriska</i>	510 - 517
10.	PENGEMBANGAN KELOMPOK USAHA ITIK DI KECAMATAN BERBAK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR <i>Rifli Rindes M</i>	518 - 532
11.	PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI PADI HIBRIDA PADA SAWAH ULTISOL DENGAN SISTEM SBSU <i>M Zulman Harja Utama</i>	533 - 542
12.	PENGEMBANGAN INOVASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENDORONG KEMANDIRIAN PETANI DI KAWASAN PESISIR YOGYAKARTA <i>Harsoyo</i>	543 - 554

PEMBERDAYAAN PETANI PETERNAK DALAM MENUNJANG PENGEMBANGAN PETERNAKAN BABI BERKELANJUTAN

Artise H.S. Salendu^{1*}, A. Makalew¹, Tilly F.D. Lumy¹, Femi H. Elly¹
dan Fietje S.G. Oley¹

¹Fakultas Peternakan Universitas Sam Ratulangi Manado, 95115

*Email: artisesalendu@unsrat.ac.id atau artisesalendu@yahoo.com

ABSTRAK

Usaha peternakan babi adalah usaha yang dijalankan oleh masyarakat di Minahasa baik yang bertujuan untuk pembibitan maupun penggemukan. Ternak ini memiliki keunggulan diantaranya pertumbuhan yang cepat, dapat dijual pada umur 8-9 bulan dengan bobot berat badan mencapai 100 kg. Ternak ini juga memiliki sifat prolifik (anak per kelahirannya banyak). Permasalahannya usaha ternak ini dikembangkan dekat dengan pemukiman penduduk. Kondisi ini tentunya dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengetahuan petani peternak dalam pengembangan peternakan babi yang berwawasan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pengamatan langsung di lapangan. Materi penelitian ini adalah keadaan kandang ternak babi, pakan, bibit, limbah ternak babi. Lokasi adalah kabupaten Minahasa dengan penentuan sampel lokasi adalah secara purposive sampling yaitu kecamatan dan desa yang memiliki populasi ternak babi terbanyak. Responden adalah peternak babi yang telah menjual ternak babi dengan lama usaha di atas 5 tahun. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar lokasi peternakan babi berjarak 1-10 meter dari rumah tempat tinggal petani peternak. Sebagian besar petani belum pernah mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan tentang pengembangan peternakan yang berwawasan lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan petani peternak babi sangat penting berkaitan dengan model pengembangan ternak babi yang berkelanjutan.

Kata Kunci : ternak babi, kandang, model, pengembangan, pemberdayaan

PENDAHULUAN

Peternakan di Sulawesi Utara pada umumnya sebagai penghasil pangan protein hewani yang bernilai gizi tinggi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan peternakan dalam hal ini mempunyai prospek yang baik di masa depan. Hal ini disebabkan karena sekarang ini permintaan terhadap produk ternak terus meningkat.

Terjadinya peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pendapatan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan bergizi tinggi.

Ternak babi merupakan salah satu komoditas peternakan yang dapat diandalkan oleh beberapa masyarakat Sulawesi Utara sebagai sumber pendapatan mereka. Ternak babi selain berperan sebagai sumber pendapatan juga sebagai sumber protein hewani bagi sebagian besar masyarakat di Sulawesi Utara. Usaha ternak babi di Sulawesi Utara memiliki potensi pasar yang sangat menggembirakan. Hal ini karena ternak babi memiliki sifat-sifat dan kemampuan yang menguntungkan (Gobai *et al* 2013), dan sebagai salah satu usaha yang potensial untuk dikembangkan (Aku *et al*, 2013). Usaha ternak babi merupakan peluang bisnis bagi masyarakat Sulawesi Utara. Hasil penelitian Suryadi *et al* (2014) menunjukkan bahwa bisnis ternak babi menguntungkan pengusaha. Menurut Kementerian Pertanian (2012), ternak babi dan atau produk olahannya cukup potensial sebagai komoditas ekspor nasional. Pasar komoditas ternak babi bahkan masih terbuka lebar ke berbagai Negara seperti Singapura dan Hongkong. Keunggulan ternak babi dibanding ternak ayam adalah volume impornya dapat dikatakan nol (Kementerian Pertanian, 2012).

Minahasa adalah salah satu Kabupaten yang terdapat di Sulawesi Utara memiliki potensi pengembangan usaha peternakan babi. Usaha peternakan babi adalah usaha yang dijalankan oleh masyarakat di Minahasa baik yang bertujuan untuk pembibitan maupun penggemukan. Ternak ini memiliki keunggulan diantaranya pertumbuhan yang cepat, dapat dijual pada umur 8-9 bulan dengan bobot berat badan mencapai 100 kg. Ternak ini juga memiliki sifat prolifrik (anak per kelahirannya banyak). Permasalahannya usaha ternak ini dikembangkan dekat dengan pemukiman penduduk. Kondisi ini tentunya dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengetahuan petani peternak dalam pengembangan peternakan babi yang berwawasan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pengamatan langsung di lapangan. Materi penelitian ini adalah keadaan kandang ternak babi, pakan, bibit, limbah ternak babi. Lokasi adalah kabupaten Minahasa dengan penentuan sampel

lokasi adalah secara purposive sampling yaitu kecamatan Tompaso (Desa Tempok) dan Kecamatan Suluun Tareran (Desa Pinapalangkow) yang memiliki populasi ternak babi terbanyak. Responden adalah peternak babi yang telah menjual ternak babi dengan lama usaha di atas 5 tahun. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha peternakan babi merupakan yang sumber pendapatan masyarakat Desa Tempok dan Desa Pinapalangkow, tetapi disisi lain dapat menyebabkan pencemaran lingkungan baik udara, tanah dan air. Hasil penelitian menunjukkan kandang ternak babi berada disamping rumah tempat tinggal (tepatnya disamping dapur) milik peternak bahkan di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Sebagian besar lokasi peternakan babi berjarak 1-10 meter dari rumah tempat tinggal petani peternak. Kotoran ternak babi hanya ditampung di depan dan belakang kandang, seminggu sekali dibawa ke kebun. Peternak yang lain membuang kotoran ternak babi dan urine di kebun yang ada disamping rumah (Gambar 1, 2, 3 dan 4).



Gambar 1. Keadaan Kandang Responden 1 Desa Tempok



Gambar 2. Keadaan Kandang Responden 2 Desa Tempok



Gambar 3. Keadaan Kandang Responden 1 Desa Pinapalangkow



Gambar 4. Keadaan Kandang Responden 4 Desa Pinapalangkow

Gambar 1, 2, 3 dan 4 di atas menunjukkan bahwa kotoran ternak babi disalurkan ke halaman rumah, kolam ikan mujair dan ikan tersebut mengkonsumsi limbah ternak babi. Hal ini tentunya berdampak terhadap pencemaran lingkungan (air dan udara) serta mengganggu kesehatan manusia (termasuk konsumen ikan mujair). Usaha ternak babi membuat kenyamanan masyarakat terganggu karena dampak polusi yang ditimbulkan (Zukri, 2012).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar petani belum pernah mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan tentang pengembangan peternakan yang berwawasan lingkungan. Metode pemberdayaan yang digunakan adalah kombinasi metode aplikasi teknologi tepat guna dengan teknik pembelajaran orang dewasa (andragogik) sehingga lebih memudahkan tercipta mekanisme, prosedur, iklim dan suasana yang mendukung terjadinya proses pembelajaran secara mandiri serta menumbuhkan partisipasi secara maksimal dari petani peternak peternakan babi di Minahasa.

Pemberdayaan terhadap petani peternak dilakukan melalui introduksi teknologi pembuatan reaktor biogas. Menurut Barnhart (2012), teknologi biogas skala rumahtangga digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak menggantikan kayu bakar serta meningkatkan kesehatan manusia dan lingkungan. Biogas adalah salah satu jenis energi dan pembangunan berkelanjutan yang penting untuk energi dan perencanaan lingkungan (Srisertpol *et al*, 2010). Biogas adalah salah satu sumber energi terbarukan yang bisa menjawab kebutuhan akan energi sekaligus dapat menyediakan kebutuhan hara tanah dalam suatu sistem pertanian berkelanjutan. Manfaat yang diperoleh dari pembuatan biogas menurut Elly (2012) adalah mengurangi pengeluaran untuk minyak tanah, mengurangi ketergantungan bahan bakar dari kayu, halaman rumah menjadi bersih, enak dipandang dan mengurangi bau. Pengelolaan limbah babi menjadi energi alternatif sangat menguntungkan berbagai pihak (Mariawan, 2012). Teknologi biogas dapat diterapkan untuk skala rumahtangga, komersial ataupun desa (Eze, 2009).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan petani peternak babi sangat penting berkaitan dengan model pengembangan ternak babi yang berkelanjutan. Saran yang disampaikan bahwa kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan dapat dilakukan secara kontinyu agar pengetahuan masyarakat tentang pengembangan peternakan yang berkelanjutan dapat meningkat.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada Rektor Universitas Sam Ratulangi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dengan dana skim RTUU tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Aku, A.S., T. Saili dan Amiruddin. 2013. Sebaran, Struktur Populasi dan Kinerja Reproduksi Babi Lokal di Kecamatan Tinangge Kabupaten Konawe Selatan. *Agriplus*, Vol.23. No:03 Sept 2013.p:188-192.
- Barnhart, S. 2012. Teaching Sustainability across Scale and Culture: Biogas in Context. *Journal of Sustainability Education* Vol. 3, March 2012.
- Elly, F.H. 2012. Training Programme Biogas to Minimize Environmental Pollution in Tempok Village Sub Tompaso District. *Proceeding : The 2nd International Seminar on Animal Industry 2012 (ISAI) Faculty of Animal Science Bogor Agricultural University*.
- Eze, J.I. and E.O. Uzodinma. 2009. Generation of Methane Gas from Poultry Brooding House. *The Pacific Journal of Science and Technology*. Vol 10. Number 2. Nov 2009 (Fall). p: 942-948.
- Gobai, F., Hartoko dan Rachmawati. 2013. Hubungan antara Periode Beranak dengan Litter Size dan Bobot Lahir Anak Babi di Perusahaan Peternak Babi, Kedungbenda, Kemangkong Purbalingga. *Jurnal Ilmiah Peternakan* 1 (3) Sept 2013.p: 1114-1119.
- Kementerian Pertanian. 2012. Pedoman Pelaksanaan Penataan Usaha Budidaya Babi Ramah Lingkungan. Departemen Pertanian, Jakarta.
- Mariawan, I.M. 2012. IbM Biogas. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. Widya Laksana. Edisi Januari 2012.p37-44.
- Srisertpol, J., P. Srinakorn., A. Kheawnak and K. Chamniprasart. 2010. Mathematical modeling and parameters estimation of an anaerobic digestion of shrimp of culture pond sediment in a biogas process. *International Journal of Energy and Environment*. Issue 4, Vol. 4, 2010. p: 213-220.
- Suryadi, I.M.A., L.E. Tripolupi dan K.R. Suwena. 2014. Analisis Kelayakan Usaha Ternak Babi Sancaya ditinjau dari Metode NPV di Banjar Ponggang, Payangan, Gianyar. *Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia*.
- Zukri, A. 2012. IbM Kelompok Usaha Ternak Babi di Desa Banyuning. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. Widya Laksana. Edisi Januari 2012.p80-89.

**KEBERLANJUTAN PEMBERDAYAAN
PETAMBAK UDANG RAKYAT
(studi kasus pola kemitraan bagi hasil di bumi dipasena provinsi lampung)**

**Budhi Waskito^{1*}, Yusuf Sulfarano Barusman², Indriati Agustina Gultom³,
Ayu Kartika Puspa⁴**

¹Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Bandar Lampung

²Program Studi Manajemen, Universitas Bandar Lampung

³Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Bandar Lampung

⁴Program Studi Sistem Informasi, Universitas Bandar Lampung

*Email: koresponden: budhi.waskito@ubl.ac.id

ABSTRAK

Sistem kemitraan Inti-Plasma sempat menjadikan Bumi Dipasena sebagai sentra utama produksi udang nasional bahkan terbesar di Asia Tenggara. Konflik berkepanjangan antara petambak plasma dan perusahaan inti menyebabkan sistem kemitraan inti-plasma tidak berlanjut dan berakhir pada awal tahun 2011. Persatuan Petambak Plasma Udang Windu (P3UW) eks Dipasena menawarkan kemitraan baru berbasis bagi hasil sebagai upaya untuk mengembalikan kejayaan Bumi Dipasena melalui pemberdayaan petambak plasma eks Dipasena. Sebagian besar petambak eks Dipasena telah mengikuti pola kemitraan bagi hasil untuk menjadikan dirinya sebagai petambak udang rakyat yang mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlanjutan pola kemitraan bagi hasil yang diikuti petambak udang rakyat di Bumi Dipasena Provinsi Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, diskusi kelompok fokus, dan studi literatur. Informan kunci penelitian ini adalah petambak udang rakyat, ketua P3UW, dan tokoh masyarakat. Analisis keberlanjutan pola kemitraan bagi hasil dilakukan dengan menggunakan konsep keberlanjutan 3P (people, profit, dan planet). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan petambak udang rakyat dengan pola kemitraan bagi hasil di Bumi Dipasena Provinsi Lampung memiliki kesesuaian dengan konsep keberlanjutan 3P. Penelitian ini merekomendasikan agar pola kemitraan bagi hasil dapat diadaptasikan pada berbagai komunitas masyarakat agar pola tersebut semakin teruji keberlanjutannya untuk memberdayakan masyarakat.

Kata kunci: Bumi Dipasena, Kemitraan bagi hasil, Konsep keberlanjutan 3P, Pemberdayaan, Petambak udang rakyat

PENDAHULUAN

Penerapan sistem kemitraan Inti-Plasma dalam usaha tambak udang sempat menjadikan Bumi Dipasena yang terletak di Kecamatan Rawajitu, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung menjadi salah satu sentra utama produksi udang nasional, bahkan yang terbesar di Asia Tenggara. Tingkat kesejahteraan petambak plasma yang relatif tinggi telah menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk pergi ke Bumi Dipasena dan menjadi petambak plasma untuk memperbaiki tingkat kesejahtraannya. Namun demikian, sistem kemitraan Inti-Plasma yang diterapkan dalam usaha tambak udang di Bumi Dipasena tersebut menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara petambak plasma dan perusahaan inti. Petambak plasma pada akhirnya terjerat hutang berkepanjangan kegagalan panen dianggap sebagai hutang petambak plasma. Konflik yang berkepanjangan antara petambak plasma dan inti pada akhirnya menyebabkan berakhirnya penerapan sistem inti-plasma dalam usaha tambak udang di Bumi Dipasena pada awal tahun 2011.

Pola kemitraan inti-plasma yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat selama ini telah diterapkan dalam berbagai bidang termasuk pertanian secara luas seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pola kemitraan inti-plasma tidak selamanya menguntungkan. Penerapan pola kemitraan inti-plasma selama ini ada yang memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak (Pintakami *et al.* 2013, Amri *et al.* 2017, Rudiyanto 2014, Suwarta *et al.* 2010), namun ada juga yang memerlukan perbaikan sistem atau pola kemitraan inti-plasma tersebut (Naifuli *et al.* 2017, Dahlan 2010).

Keberdayaan eks petambak plasma Dipasena pasca berakhirnya penerapan sistem inti-plasma dalam usaha tambak udang menjadi semakin terpuruk akibat usaha tambak berhenti dan terbelitnya petambak plasma terhadap hutang sebagai warisan dari penerapan sistem kemitraan inti-plasma. Persatuan Petambak Plasma Udang Windu (P3UW) eks Dipasena menawarkan kemitraan baru berbasis bagi hasil sebagai upaya untuk mengembalikan kejayaan Bumi Dipasena melalui pemberdayaan petambak plasma eks Dipasena. Penerapan pola kemitraan bagi hasil tersebut diharapkan mampu memberdayakan kembali petambak plasma eks Dipasena tersebut sehingga keberdayaan petambak tersebut dapat meningkat kembali mengingat mereka hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sangat baik dalam menjalankan usaha tambak udang.

Konsep kemandirian petambak udang sebagai pengusaha mandiri yang ditawarkan dalam pola kemitraan bagi hasil kepada petambak plasma eks Dipasena merupakan daya tarik yang memikat petambak untuk mengikuti pola kemitraan bagi hasil dalam usaha tambak udang yang ditawarkan P3UW. Walaupun tidak semua petambak plasma eks Dipasena mengikuti pola kemitraan bagi hasil tersebut, namun sebagian petambak udang plasma eks Dipasena telah mengikuti pola kemitraan bagi hasil tersebut untuk menjadikan dirinya sebagai petambak udang rakyat yang mandiri.

Keberlanjutan pemberdayaan petambak plasma eks Dipasena melalui penerapan pola kemitraan bagi hasil, sebagai upaya untuk memberdayakan kembali petambak plasma eks Dipasena dalam rangka mengembalikan kembali kejayaan Bumi Dipasena sebagai sentra udang tersebar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara, dalam hal ini merupakan hal yang sangat penting untuk diwujudkan. Konsep pembangunan berkelanjutan pada dasarnya sudah sangat populer di dunia sejak diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi yang diselenggarakan di Rio de Janeiro tahun 1992. Konsep tersebut saat ini semakin populer seiring dengan kehadiran konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2015. Konsep SDGs merupakan konsep pembangunan berkelanjutan yang mencul sebagai pengganti *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah sejauh mana keberlanjutan pola kemitraan bagi hasil yang diikuti petambak udang rakyat di Bumi Dipasena Provinsi Lampung?

Penelitian terkait dengan keberlanjutan pemberdayaan petambak udang rakyat dalam hal ini masih belum banyak dilakukan. Keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan merupakan pendekatan yang banyak digunakan dalam penelitian guna melihat tingkat keberlanjutan pembangunan (Fauzi & Oxtavianus 2014, Pratiwi *et al.* 2018). Hasil penelitian Fauzi dan Oxtavianus (2014) mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan di Indonesia baru mencapai sekitar dua per tiga dari target maksimum. Kemajuan yang cukup tinggi pada bidang ekonomi dan sosial pada akhirnya terkoreksi oleh degradasi lingkungan. Sementara itu, hasil penelitian Pratiwi *et al.* (2018) menemukan bahwa pembangunan yang dilakukan di Jawa Timur belum sampai pada pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka pencapaian pembangunan berkelanjutan di Jawa Timur dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang berbeda pada masing-masing kelompok wilayah

dalam upaya mempercepat pencapaian titik belok untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Keseimbangan pembangunan lingkungan (Planet), ekonomi (Profit) dan sosial (People) merupakan konsep penting dalam melihat keberlanjutan pembangunan ((Fauzi & Oxtavianus 2014, Pratiwi *et al.* 2018). Konsep keseimbangan pembangunan antara planet, profit dan people (3P) pada dasarnya telah dikenalkan oleh John Elkington sejak tahun 1997 dengan nama konsep *triple bottom line*. Konsep *people* (sosial) menempatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Masyarakat dalam hal ini adalah pemangku kepentingan yang merupakan satu bagian yang penting bagi masyarakat. Dalam konsep *people* ini adalah masyarakat adalah lingkungan terdekat dari sebuah usaha, memberi banyak kontribusi bagi berjalannya sebuah usaha, sehingga pengusahapun sudah selayaknya memberikan kontribusi balik kepada masyarakat disekitarnya. Konsep *profit* (ekonomi) merupakan tujuan dari semua usaha, dan ini adalah bentuk tanggungjawab ekonomi yang paling esensial dalam usahanya menjaga eksistensi dan keberlanjutan usaha. Konsep *planet* (lingkungan) mengatakan bahwa lingkungan adalah hal yang selalu terkait dengan seluruh kegiatan manusia. Hubungan manusia dengan lingkungan adalah hubungan sebab akibat, sehingga sudah selayaknya agar dalam pelaksanaan usaha harus juga memperhatikan aspek perlindungan terhadap lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlanjutan pola kemitraan bagi hasil yang diikuti petambak udang rakyat di Bumi Dipasena Provinsi Lampung. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penelitian lanjutan yang terkait dengan pengembangan konsep keberlanjutan pemberdayaan masyarakat baik pada kasus tambak udang rakyat maupun pada kasus lainnya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran kebijakan bagi peningkatan keberlanjutan pemberdayaan petambak udang rakyat melalui penerapan pola kemitraan bagi hasil di Bumi Dipasena Provinsi Lampung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kasus yang diambil adalah pola kemitraan bagi hasil di Kampung Bumi Dipasena, Kecamatan

Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Kampung Bumi Dipasena terbentuk pada tahun 1991 sebagai akibat adanya tuntutan kehidupan di kawasan pertambakan udang yang menggunakan sistem kemitraan Inti-Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja (DCD). Wilayah Kampung Bumi Dipasena terdiri dari atas Blok 6 dan Blok 7 eks perusahaan Dipasena.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, diskusi kelompok fokus, dan studi literatur. Informan kunci penelitian ini adalah petambak udang rakyat, ketua Persatuan Petambak Plasma Udang Windu (P3UW), dan tokoh masyarakat. Analisis keberlanjutan pemberdayaan petambak udang rakyat dengan pola kemitraan bagi hasil di Bumi Dipasena Provinsi Lampung dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan kerangka konsep keberlanjutan 3P (people, profit, dan planet).

HASIL DAN PEMBAHASAN

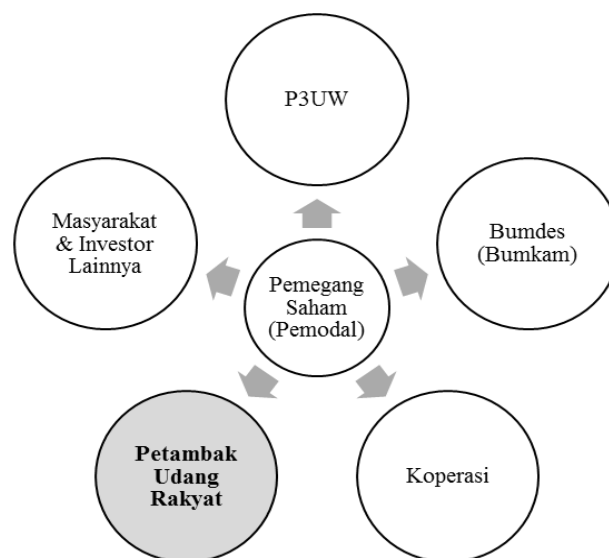
Ketidakberlanjutan sistem kemitraan inti-plasma dalam usaha tambak udang di Bumi Dipasena Provinsi Lampung meninggalkan berbagai permasalahan khususnya bagi petambak plasma. Tunggakan hutang petambak plasma akibat terjadinya gagal panen merupakan salah satu bentuk permasalahan yang mendegradasi keberdayaan petambak udang tersebut. Penerapan pola kemitraan bagi hasil yang diinisiasi oleh Persatuan Petambak Plasma Udang Windu (P3UW) telah memberikan harapan baru bagi petambak plasma eks Dipasena untuk meningkatkan kembali keberdayaan dan kesejahteraannya. Keberlanjutan pemberdayaan petambak udang rakyat dengan pola kemitraan bagi hasil merupakan hal penting agar petambak mampu meraih kembali keberdayaan dan kesejahteraannya yang hilang seiring berakhirnya sistem kemitraan inti-plasma. Hasil analisis keberlanjutan pemberdayaan petambak rakyat dengan pola kemitraan bagi hasil dengan konsep 3P adalah sebagai berikut:

Analisis Keberlanjutan Pemberdayaan Petambak Udang Rakyat dengan Pola Kemitraan Bagi Hasil dari Aspek Sosial (People)

Penerapan sistem kemitraan inti-plasma dalam usaha tambak udang di Bumi Dipasena yang berakhir pada awal tahun 2011 terbukti tidak memberikan manfaat bagi

masyarakat yang ada di sekitar lokasi pertambakan. Manfaat tambak udang dengan sistem kemitraan inti-plasma yang terjadi di Bumi Dipasena pada kenyataannya hanya dinikmati oleh perusahaan inti saja. Petambak udang plasma sebagai mitra yang seharusnya mendapatkan manfaat dari usaha tambak udang tersebut justru mendapatkan permasalahan tagihan hutang yang muncul sebagai akibat terjadinya gagal panen.

Berbeda dengan pola kemitraan inti-plasma, penerapan pola kemitraan bagi hasil dalam usaha tambak udang di Bumi Dipasena Provinsi Lampung terlihat telah menempatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan bagi berjalannya usaha tambak udang tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua P3UW, Pengurus Koperasi, dan petambak udang rakyat diketahui bahwa pola kemitraan bagi hasil tersebut memberikan kesempatan kepada semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha tambak udang melalui penanaman modal dalam bentuk saham. Pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk menanamkan modalnya bagi berjalannya usaha tambak udang rakyat secara langsung akan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanaman modal untuk usaha tambak udang dengan pola kemitraan bagi hasil terdiri atas P3UW, Badan Usaha Miliki Desa (Bumdes) atau Badan Usaha Milik Kampung (Bumkam), koperasi, petambak udang rakyat, masyarakat, dan investor lainnya (Gambar 1).



Gambar 1 Keterlibatan Masyarakat dalam Pemberdayaan Petambak Udang Rakyat di Bumi Dipasena Melalui Penanaman Modal atau Saham

Keterlibatan petambak udang rakyat dalam penanaman modal (saham) dalam penerapan pola kemitraan bagi hasil dalam usaha tambak udang rakyat di Bumi Dipasena (Gambar 1) merupakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh petambak udang rakyat apabila ingin mengikuti pola kemitraan bagi hasil tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan petambak rakyat diketahui bahwa besarnya modal awal petambak udang rakyat untuk dapat mengikuti pola kemitraan bagi hasil tersebut adalah minimal sebesar Rp 3.000.000,00 per petambak. Modal tersebut bagi petambak udang rakyat merupakan nilai yang masih terjangkau mengingat modal yang diperlukan untuk usaha budidaya udang relatif sangat besar untuk satu lot tambaknya (luas 4000 m²) (\pm Rp 70.000.000,00 setiap siklusnya). Satu lot tambak udang yang dikelola petambak udang rakyat terdiri atas dua petak tambak, dimana masing-masing petak memiliki luas 2000 m². Penyertaan modal usaha dari petambak udang rakyat dalam hal ini memberikan motivasi bagi petambak bahwa mereka tidak hanya menjadi mitra saja (sebagai pekerja pada sistem inti-plasma), namun para petambak udang rakyat tersebut juga menjadi bagian dari usaha tambak udang tersebut. Kondisi tersebut mengakibatkan manfaat adanya usaha tambak udang yang balik ke petambak menjadi lebih besar.

Selain memberikan manfaat bagi masyarakat penanam modal (saham), penerapan pola kemitraan bagi hasil dalam usaha tambak udang di Bumi Dipasena Provinsi Lampung secara nyata telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang tidak terlibat secara langsung dalam usaha tambak udang tersebut. Pemotongan infak sebesar 2.5% dari keuntungan kotor (hasil penjualan usaha tambak udang dikurangi dengan biaya budidaya) merupakan hal yang menunjukkan bahwa pola kemitraan bagi hasil yang dilaksanakan pada usaha tambak udang rakyat di Bumi Dipasena tersebut telah memberikan kontribusi nyata pada masyarakat baik yang terlibat langsung (penanam modal) maupun yang tidak terlibat langsung (Tabel 1). Berdasarkan hasil wawancara dengan petambak udang rakyat diketahui bahwa pemotongan infak sebesar 2.5% tersebut digunakan untuk membangun dan memperbaiki fasilitas publik dan sumbangan bagi warga yang sakit di sekitar lokasi pertambakan udang di Bumi Dipasena Provinsi Lampung.

Analisis Keberlanjutan Pemberdayaan Petambak Udang Rakyat dengan Pola Kemitraan Bagi Hasil dari Aspek Ekonomi (Profit)

Jeratan hutang yang dialami petambak plasma eks Dipasena akibat kegagalan panen merupakan persoalan ekonomi yang muncul dalam penerapan sistem kemitraan inti-plasma usaha tambak udang di Bumi Dipasena. Berbeda dengan sistem kemitraan inti-plasma, penanganan gagal panen yang dilakukan petambak merupakan resiko yang harus ditanggung bersama. Kegagalan panen usaha tambak udang rakyat dengan pola kemitraan bagi hasil secara nominal ditutup dengan penggunaan dana Cadangan Resiko Usaha (CRU) yang merupakan bagian dari penerapan pola kemitraan bagi hasil di Bumi Dipasena (Tabel 1). Berdasarkan hasil wawancara dengan petambak diketahui bahwa ketersediaan CRU sangat membantu petambak pada saat terjadi kegagalan panen mengingat usaha tambak udang merupakan usaha yang memiliki tingkat resiko usaha yang sangat tinggi.

Tabel 1 Pola Bagi Hasil dalam Penerapan Pola Kemitraan Bagi Hasil dalam Usaha Tambak Udang di Bumi Dipasena Provinsi Lampung

Komponen	Kode	Uraian	Contoh Perhitungan Bagi Hasil (Rp)
Penjualan	A	Hasil usaha Pembudidaya	100.000.000
Biaya Budidaya	B	Kumpulan dana dr pemodal	50.000.000
Hasil Kotor	C	A dikurangi B	50.000.000
Infaq	D	2,5% dari C	1.250.000
Hasil Sudah Infaq	E	C dikurangi D	48.750.000
Cadangan Resiko Usaha	F	10% dari E	4.875.000
Hasil Para Pihak	G	E dikurangi F	43.875.000
Pembudidaya	H	80% dari G	35.100.000
Pemodal	I	15% dari G	6.581.250
Manajemen Pengurus	J	5% dari G	2.193.750

Penentuan harga acuan hasil panen udang merupakan titik krusial yang menentukan tingkat keuntungan ekonomi bagi petambak udang rakyat. Penentuan harga jual acuan udang hasil panen pada sistem kemitraan inti-plasma ditentukan oleh perusahaan inti

sehingga petambak tidak memiliki daya tawar dan selalu pada posisi yang merugi. Berbeda dengan sistem kemitraan inti-plasma, penentuan harga jual acuan udang hasil panen ditentukan berdasarkan harga udang yang tertinggi yang sedang berlaku pada saat penjualan sehingga posisi tawar petambak udang rakyat menjadi tinggi. Petambak udang rakyat dapat memberikan informasi harga jual udang yang dianggalkan tinggi kepada pengurus sehingga tingkat kerugian ekonomi akibat permainan harga jual udang bagi petambak udang di Bumi Dipasena dapat diminimalkan.

Konflik antara perusahaan inti dan plasma sering terjadi pada saat pembagian hasil panen. Pembagian hasil panen udang pada saat diterapkannya pola kemitraan inti-plasma di Bumi Dipasena sangat diatur oleh perusahaan inti. Petambak udang sebagai plasma tidak mengetahui secara nyata bagaimana proses pembagian tersebut. Berbeda dengan kemitraan inti-plasma, pembagian hasil panen udang dalam pola kemitraan bagi hasil telah ditetapkan sejak awal dan secara transparan terkait dengan persentase bagi hasil bagi pihak-pihak yang terkait. Persentase bagi hasil dari hasil penjualan bersih untuk petambak adalah sebesar 80%, untuk pemodal sebesar 15% dan untuk manajemen Bumkam sebesar 5% (Tabel 1).

Selain mendapatkan bagi hasil sebesar 80% dari hasil penjualan bersih usaha tambak udang, petambak dalam penerapan pola kemitraan bagi hasil juga berperan sebagai pelaku bisnis yang mandiri. Kewajiban penyertaan modal sebagai syarat untuk mengikuti pola kemitraan bagi hasil dalam hal ini memberikan keuntungan bagi petambak sebagai deviden dari penyertaan modal petambak dalam usaha tambak udang. Pembagian hasil usaha dalam bentuk deviden dari hasil usaha tambak udang rakyat dengan pola kemitraan bagi hasil yang diterima petambak udang rakyat dilakukan setiap bulan. Berdasarkan hasil pengamatan rapat bulanan kelompok usaha bersama tambak udang rakyat diketahui bahwa dalam rapat bulanan tersebut dilakukan pelaporan seluruh kegiatan tambak udang rakyat yang dilakukan termasuk pembagian sisa hasil usaha yang berhak diterima oleh petambak dari hasil penanaman modal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara ekonomi penerapan pola kemitraan bagi hasil dalam usaha tambak udang ini memberikan keuntungan ekonomi secara ganda kepada petambak udang rakyat.

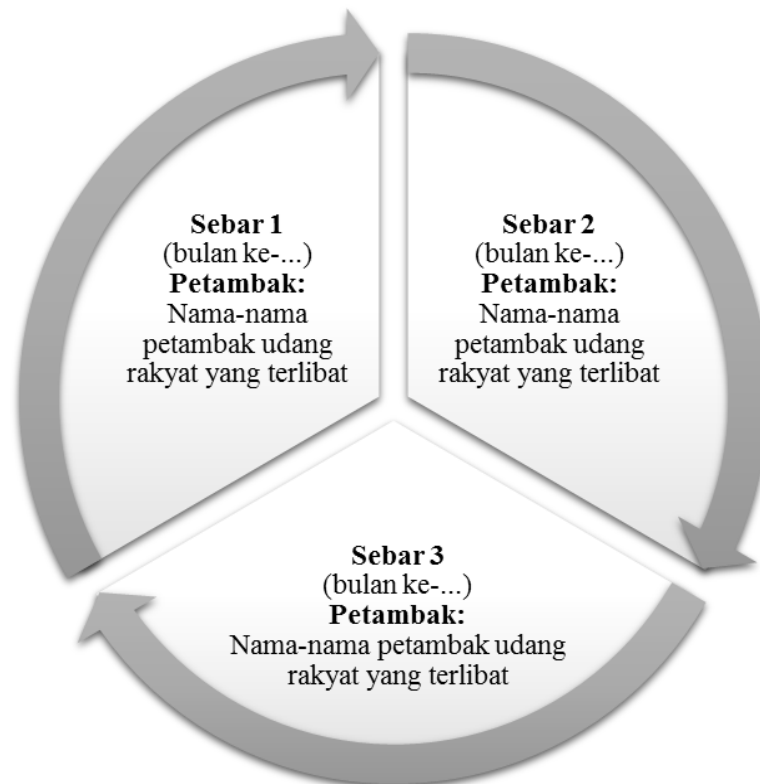
Analisis Keberlanjutan Pemberdayaan Petambak Udang Rakyat dengan Pola Kemitraan Bagi Hasil dari Aspek Lingkungan (Planet)

Konsep pola kemitran bagi hasil dalam usaha tambak udang di Bumi Dipasena menempatkan petambak rakyat tidak hanya sebagai obyek (mitra), namun petambak rakyat juga memiliki posisi sebagai pengusaha. Hal tersebut terjadi karena setiap petambak rakyat yang mengikuti pola kemitraan bagi hasil diwajibkan memiliki modal (saham) yang ditanamkan dalam usaha tambak udang tersebut. Berdasarkan hal tersebut, petambak memiliki kebebasan untuk melakukan proses budidaya yang tidak diperoleh pada masa penerapan kemitraan inti-plasma. Pada penerapan kemitraan inti-plasma, petambak seringkali diposisikan sebagai buruh yang melakukan proses budidaya tambak udang dengan aturan ketat dari perusahaan inti. Berdasarkan hasil wawancara dengan petambak udang rakyat, penerapan konsep petambak udang juga sebagai pengusaha ini memberikan motivasi yang sangat tinggi kepada petambak udang rakyat agar usaha tersebut dapat terus berlanjut sebagai mata pencaharian utamanya.

Berbeda dengan pola kemitraan inti-plasma, usaha tambak udang dengan pola kemitraan bagi hasil di Bumi Dipasena dilakukan pada tambak-tambak yang berstatus hak milik petambak rakyat. Petambak rakyat yang mengikuti pola kemitraan bagi hasil dalam hal ini telah memiliki sertifikat hak milik atas nama petambak sebagai bukti pemilikan lahan tambak yang dikelolanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan petambak udang rakyat diketahui bahwa mengelola usaha tambak udang di lahan milik sendiri lebih memberikan harapan yang lebih baik di masa depan. Berkaitan dengan hal tersebut terlihat bahwa kesadaran petambak udang rakyat terhadap pelestarian lingkungan sekitar tambak lebih tinggi. Petambak udang rakyat sadar bahwa kerusakan lingkungan dapat menyebabkan usaha tambak udang yang mereka usahakan secara perlahan akan hancur yang pada akhirnya akan merugikan petambak udang rakyat itu sendiri. Berdasarkan hasil pengamatan terlihat bahwa lingkungan sekitar pertambakan udang rakyat di Bumi Dipasena dalam kondisi yang sangat baik dalam mendukung keberlanjutan usaha tambak udang rakyat dengan pola kemitraan bagi hasil.

Pelopop penerapan pola kemitraan bagi hasil dalam usaha tambak udang di Bumi Dipasena (P3UW) menyadari bahwa usaha tambak udang memiliki resiko yang sangat tinggi. Perubahan lingkungan (cuaca, iklim, pasang surut air laut, angin) memiliki

pengaruh yang besar terhadap keberhasilan usaha tambak udang. Mengingat budidaya memiliki resiko yang sangat tinggi, maka pola budidaya tambak udang yang dilaksanakan melalui pola kemitraan bagi hasil dilakukan melalui tiga siklus sebar benih, dimana masing-masing siklus memiliki waktu budidaya selama 3 bulan. Waktu sebar benih udang yang dilakukan petambak rakyat di Bumi Dipasena dalam hal ini tidak dilakukan secara bersamaan, namun dilakukan secara bergantian dengan selang waktu satu bulan (Gambar 2).



Gambar 2 Pola dan Siklus Budidaya Udang melalui Pola Kemitraan Bagi Hasil di Bumi Dipasena Provinsi Lampung

Penerapan budidaya udang yang dilakukan petambak udang rakyat dengan pola kemitraan bagi hasil di Bumi Dipasena dengan pola dan siklus budidaya seperti tersaji pada Gambar 2 menunjukkan bahwa penerapan budidaya tersebut telah mempertimbangkan aspek lingkungan khususnya yang berpotensi merusak keberlanjutan budidaya udang tersebut. Pola dan siklus budidaya udang yang membagi waktu sebar menjadi tiga waktu dengan selisih masing-masing selama satu bulan secara konseptual

mampu mencegah penyebaran penyakit yang berpotensi menggagalkan budidaya udang. Waktu budidaya yang diperlukan untuk satu siklus budidaya dalam hal ini adalah selama 3 bulan. Apabila terjadi serangan penyakit pada budidaya udang maka seluruh budidaya udang yang ada tidak secara otomatis terserang penyakit semua. Hal ini terjadi karena selama kurun waktu yang sama terjadi proses budidaya udang yang berbeda-beda. Berdasarkan penerapan pola dan siklus budidaya udang dalam pemberdayaan petambak udang rakyat di Bumi Dipasena dapat dikatakan bahwa penerapan pola kemitraan bagi hasil dalam usaha tambak udang tersebut telah berupaya untuk melindungi kondisi lingkungan dan menciptakan hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar sehingga mampu mendukung keberlanjutan pemberdayaan petambak udang rakyat di Bumi Dipasena.

KESIMPULAN

Pola kemitraan bagi hasil dalam usaha tambak udang di Bumi Dipasena muncul sebagai upaya untuk mendorong terjadinya peningkatan keberdayaan petambak udang rakyat (eks petambak plasma) pasca berakhirnya penerapan kemitraan inti-plasma dalam usaha tambak udang. Pola kemitraan bagi hasil tersebut dimotori oleh Persatuan Petambak Plasma Udang Windu (P3UW). Pemberdayaan petambak udang rakyat dengan pola kemitraan bagi hasil di Bumi Dipasena Provinsi Lampung memiliki kesesuaian dengan konsep keberlanjutan 3P (people, profit, planet).

Penerapan pola kemitraan bagi hasil dalam usaha tambak udang rakyat di Bumi Dipasena memberikan peluang bagi semua pemangku kepentingan untuk mendapatkan manfaat melalui pembagian deviden dari penanaman modal. Selain itu, keberadaan dana infak sebesar 2.5% dari pendapatan kotor dari penjualan hasil usaha tambak udang menjadikan pola kemitraan bagi hasil tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembangunan dan perbaikan berbagai fasilitas publik dan sumbangan bagi warga yang sakit di sekitar lokasi pertambakan.

Pemberdayaan petambak udang rakyat melalui pola kemitraan bagi hasil di Bumi Dipasena secara ekonomi memberikan keuntungan bagi petambak, penanam modal, dan masyarakat sekitar pertambakan. Petambak udang rakyat secara ekonomi memiliki

keuntungan ganda dari hasil panen udang dan pembagian sisa hasil usaha (deviden) dari modal yang ditanamkan pada pola kemitraan bagi hasil. Keberadaan dana Cadangan Resiko Usaha (CRU) secara ekonomi menguntungkan petambak udang rakyat apabila terjadi kegagalan panen. Penentuan harga jual udang acuan pada saat penjualan berpedoman pada harga jual udang yang tertinggi yang sedang berlaku pada saat penjualan sehingga nilai jual yang didapat adalah nilai yang maksimal. Bagi hasil keuntungan bersih antar para pihak telah ditetapkan secara musyawarah mufakat (80% untuk petambak udang rakyat, 15% untuk penanam modal, dan 5% untuk manajemen pengelola) sehingga dapat mengurangi terjadinya konflik ekonomi dalam pembagian keuntungan usaha.

Petambak udang rakyat yang mengikuti pola kemitraan bagi hasil di Bumi Dipasena memiliki kesadaran pengelolaan lingkungan yang mendukung keberlanjutan usaha tambak udang rakyat. Status lahan tambak udang yang merupakan lahan milik petambak (bersertifikat atas nama petambak) merupakan salah satu pendorong petambak rakyat untuk menjaga kondisi lingkungan sekitar agar mampu mendorong keberhasilan dan keberlanjutan usaha tambak udang yang dikelolanya. Penerapan pola dan siklus budidaya udang yang membagi waktu sebar dalam tiga siklus dengan selisih waktu sebar selama satu bulan mampu melindungi kondisi lingkungan dan menciptakan hubungan yang baik dengan lingkungan sebagai syarat terwujudnya keberlanjutan pemberdayaan petambak udang rakyat di Bumi Dipasena.

Mengingat pemberdayaan petambak udang rakyat dengan pola kemitraan bagi hasil yang dilaksanakan di Bumi Dipasena Provinsi Lampung memiliki kesesuaian dengan konsep keberlanjutan 3P (people, profit, planet), maka penelitian ini merekomendasikan agar pola kemitraan bagi hasil tersebut dapat diadaptasikan pada berbagai komunitas masyarakat agar pola kemitraan bagi hasil tersebut semakin teruji keberlanjutannya untuk memberdayakan masyarakat.

DAFRAT PUSTAKA

- Amri KS, Wahyuningsih S, Subekti E. 2017. Analisis Kelayakan Usaha Ayam Broiler Pola Kemitraan Inti-Plasma (Studi Kasus Peternak Plasma PT. Mustika di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal). *Mediagro*. 13 (2): 78-86.
- Dahlan M. 2010. Model Kemitraan Inti – Plasma Ayam Potong (Studi Kasus Di Kabupaten Lamongan). *Jurnal Ternak*. 1 (1): 1 – 11.
- Fauzi A, Oxtavianus A. 2014. Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 15 (1): 68-83.
- Naifuli S, Imang N, Juita F. 2017. Analisis Kemitraan Petani Plasma Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* Jacq) Pada Pt. Cahaya Anugerah Plantation Di Desa Puan Cepak Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ekonomi Pertanian & Pembangunan*. 14 (1): 22 – 32.
- Pintakami LB, Priminingtyas DN, Yuliati Y. 2013. Analisis Kemitraan Antara Pg. Candi Baru Dengan Petani Tebu Rakyat Kerjasama Usaha (TRKSU) Di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*. 10 (1): 27-39.
- Pratiwi N, Santosa DB, Ashar K. 2018. Analisis Implementasi Pembangunan Berkelanjutan di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*. 18 (1): 1-14.
- Rudiyanto AA. 2014. Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Abadi Dalam Meningkatkan Keuntungan Petani Cabai. *JEJAK Journal of Economics and Policy*. 7 (2): 100-202.
- Suwarta, Irham, Hartono S. 2010. Efektifitas Pola Kemitraan Inti-Plasma Dan Produktifitas, Usaha Ternak Ayam Broiler Peternak Plasma Dan Mandiri Serta Faktor Yang Mempengaruhi Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*. 4 (1):53-62.

KAJIAN PEMBERDAYAAN KEPALA KELUARGA (KK) RENTAN PADA PROGRAM *DEEPENING RESILIENCE* OLEH LSM JEMARI SAKATO DI NAGARI TIKU SELATAN KECAMATAN TANJUNG MUTIARA KABUPATEN AGAM

Mega Sri Wardani^{1*}, Ferdhinal Asful¹, Nuraini Budi Astuti¹

¹Fakultas Pertanian Universitas Andalas

Padang, Sumatera Barat

*Email: megasriw99@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan pada proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan KK rentan serta mendeskripsikan persepsi KK rentan tentang penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan pada kegiatan pemberdayaan KK rentan dalam program Deepening Resilience oleh LSM Jemari Sakato di Nagari Tiku Selatan. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mewawancarai informan kunci dan beberapa responden yang dipilih secara sengaja (purposive). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan ini telah menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan dan 85% KK yang diberdayakan telah mengalami peningkatan dari rentan menjadi tangguh. Dari persepsi responden, prinsip pemberdayaan sudah diterapkan sebesar 85,58% dengan rincian: prinsip kesukarelaan terpenuhi 94,23%, prinsip partisipatif terpenuhi dengan persentase paling besar yaitu 96,15%, prinsip keswadayaan terpenuhi 82,69% dan prinsip kebersamaan dengan persentase yang paling kecil dibandingkan dengan prinsip lainnya yaitu 69,23%.

Kata kunci: pemberdayaan, kesukarelaan, partisipatif, keswadayaan, kebersamaan

A. Pendahuluan

Shardlow (2005) dalam Rifa'i (2013) menjelaskan pengertian pemberdayaan pada dasarnya merupakan upaya individu, kelompok maupun komunitas dalam berusaha mengontrol kehidupan mereka dan mengusahakan untuk membentuk masa depan mereka sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya, gagasan ini mengartikan pemberdayaan sebagai upaya mendorong seseorang untuk menentukan sendiri apa yang harus dilakukan dalam menghadapi masalah yang dihadapi, sehingga seseorang tersebut mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk masa depannya. Azwar (2014) menjelaskan

bahwa konsep pemberdayaan masyarakat dapat dikembangkan untuk mekanisme perencanaan dan pembangunan yang bersifat *bottom up* yang melibatkan peran masyarakat untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan perencanaan dan pembangunan. Dengan demikian, program penanggulangan kemiskinan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang artinya, dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan dilakukan penentuan prioritas berdasarkan tingkat kepentingan sehingga implementasi program akan terlaksana secara efektif dan efisien. Melalui pemberdayaan, masyarakat akan mampu menilai lingkungan sosial ekonominya serta mampu mengidentifikasi berbagai bidang yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

Kemiskinan menjadi objek yang mendasari kegiatan pemberdayaan. Menurut Howard Jones (1990:281) dalam Suharto (2009:8) tujuan utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah penanggulangan kemiskinan dan berbagai manifestasinya. Hal ini menekankan bahwa masalah kemiskinan di sini tidak hanya merujuk kepada kemiskinan fisik, melainkan juga secara nonfisik.

Salah satu program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin adalah kegiatan pemberdayaan KK rentan di Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. KK rentan yang dimaksudkan adalah KK yang berada pada kondisi miskin serta memenuhi kriteria keluarga rentan yang ditetapkan oleh penyelenggara kegiatan. Melalui kegiatan pemberdayaan KK rentan ini diharapkan dapat merubah kondisi masyarakat dari kondisi rentan menjadi tangguh, baik secara fisik dan nonfisik. Dengan demikian, pemberdayaan menjadi alat atau sarana yang dapat merubah masyarakat KK rentan menjadi KK tangguh.

Kegiatan pemberdayaan KK rentan ini merupakan salah satu kegiatan pemberdayaan yang ada dalam rangkaian program *Deepening Resilience* yang dilaksanakan oleh LSM Jemari Sakato. LSM Jemari Sakato, dalam program ini, bekerja sama dengan NGO internasional yaitu OXFAM dan *Australian Aid*. Program *Deepening Resilience* ini menyentuh 3 tingkatan, yaitu tingkatan komunitas, tingkatan UMKM dan tingkatan pemerintah yang telah selesai dijalankan selama kurun waktu 4 tahun (2014-2017). Untuk kegiatan pemberdayaan KK rentan sendiri merupakan kegiatan program ditingkatkan komunitas yang dilaksanakan sejak tahun 2015 hingga tahun 2017.

Program pendampingan KK rentan menjadi KK tangguh yang dilakukan oleh LSM Jemari Sakato telah dilaksanakan selama 3 tahun, yakni dari tahun 2015 hingga tahun 2016 dan dilanjutkan sampai tahun 2017. Dalam proses pelaksanaan program pemberdayaan tentunya dilakukan dengan prinsip-prinsip pemberdayaan agar kegiatan pemberdayaan itu berlangsung dengan lancar. Berdasarkan pencapaian program pemberdayaan dan pendampingan masyarakat yang telah selesai dilaksanakan tersebut, peneliti tertarik untuk melihat proses pelaksanaan program sekaligus melihat penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan dalam kegiatan tersebut, yakni dari KK rentan menjadi KK tangguh.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan pada proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan KK rentan dalam program *Deepening Resilience* oleh LSM Jemari Sakato di Nagari Tiku Selatan, dan 2) persepsi KK rentan tentang penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan pada kegiatan pemberdayaan KK rentan dalam program *Deepening Resilience* oleh LSM Jemari Sakato di Nagari Tiku Selatan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*). Informan penelitian yang digunakan ada 2, yaitu informan kunci (*key informan*) dan informan pelaku (*responden*). Responden dipilih secara sengaja berdasarkan kemudahan akses dan kesediannya.

B. Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*). Dalam konteks masyarakat, keberdayaan adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang belum mampu lepas dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan merupakan upaya memampukan dan memandirikan masyarakat (Mardikanto dan Soebiato, 2015:40).

Peran yang dimainkan oleh pemberdayaan pada hakikatnya adalah untuk memperkuat daya agar masyarakat semakin mandiri. Oleh karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses penguatan kapasitas, yaitu penguatan kemampuan setiap individu, kelembagaan, maupun sistem atau jejaring antar individu dan kelompok organisasi sosial, serta pihak lain diluar sistem masyarakat sampai di aras global (Mardikanto dan Soebiato, 2015:69).

Pemberdayaan masyarakat memiliki prinsip-prinsip tertentu. Matheus *dalam* Soetomo (2011:105) menyatakan bahwa “prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan kegiatan secara konsisten”. Prinsip akan berlaku umum, diterima secara umum dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam. Dengan begitu, prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar dalam pelaksanaan program sehingga fasilitator dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik.

C. Kegiatan Pemberdayaan Kepala Keluarga (KK) Rentan Pada Program *Deepening Resilience*

Program memperkuat ketangguhan masyarakat (*Deepening Resilience*) merupakan suatu program yang dipelopori oleh NGO internasional, yaitu OXFAM dan *Australian Aid*, yang kemudian bekerja sama dengan LSM Jemari Sakato. Program ini bertujuan untuk penurunan korban jiwa dan dampak pada mata pencaharian di daerah berisiko gempa dan tsunami di Kabupaten Agam melalui peningkatan kapasitas bertahan dan adaptasi masyarakat, meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan pemerintah, dan meningkatkan strategi adaptasi dari usaha kecil dan menengah. Sedangkan secara khusus di tingkat komunitas, program ini bertujuan untuk memberikan pilihan bagi rumah tangga dan masyarakat yang rentan dalam meningkatkan kapasitas bertahan dan adaptasi serta mengurangi faktor-faktor yang mendasari kerentanan mereka di 5 jorong di Kabupaten Agam pada Juni 2017 (Jemari Sakato, 2016).

Pemberdayaan KK rentan merupakan bagian dari program *Deepening Resilience* di tingkat komunitas yang dimulai sejak tahun 2015. kegiatan ini berupaya untuk memberikan pilihan kepada rumah tangga rentan dan masyarakat untuk meningkatkan *coping* dan

kapasitas adaptasi mereka untuk mengurangi faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan mereka, dengan melakukan kegiatan utama seperti pengkajian terhadap kondisi mata pencaharian keluarga, penyusunan rencana aksi ketangguhan mata pencaharian keluarga, penguatan kelompok siaga bencana, kampanye rumah aman gempa, dan pengembangan bank makanan. upaya-upaya tersebut juga disesuaikan dengan indikator kemiskinan yang menjadi acuan untuk menentukan KK rentan yang akan diberdayakan. Sementara itu, pendampingan intensif dilakukan dalam rencana aksi ketangguhan mata pencaharian keluarga sehingga masyarakat diharapkan dapat mandiri secara ekonomi (tangguh) (Jemari Sakato, 2016).

D. Penerapan Prinsip Pemberdayaan pada Proses Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kepala Keluarga (KK) Rentan dalam Program *Deepening Resilience*

Tabel 1. Indikator Kerentanan

1	Kondisi lokasi tempat tinggal (rumah)	tingkat kerawanan/risiko lokasi terhadap ancaman bencana
		kondisi akses jalur evakuasi
		daya tampung rumah untuk semua anggota keluarga
		kondisi fisik bangunan
		standar kesehatan rumah
		tingkat isolasi lokasi
2	Kondisi sosial budaya	aksesibilitas pengambilan keputusan ditingkat jorong
		akses terhadap bantuan dari pemerintah/lembaga lain
		keikutsertaan dalam anggota kelompok usaha
3	Kondisi mata pencaharian	sumber pendapatan keluarga: ketergantungan pada alam atau tidak
		kemampuan pendapatan keluarga dalam memenuhi kebutuhan primer keluarga
		akses terhadap sumber keuangan
4	Kondisi kesehatan	gangguan kesehatan yang dialami keluarga
		akses pelayanan kesehatan
		jaminan kesehatan
5	Keahlian dalam pengembangan mata pencaharian	keahlian yang dimiliki
		tingkat produktivitas
6	Aset dan penguasaan alat-alat produksi	aset yang dimiliki
		penguasaan terhadap alat-alat produksi
7	Tanggungun	jumlah tanggungan

Dari program ini diharapkan KK rentan (yang dipilih berdasarkan indikator kerentanan) akan berubah menjadi KK tangguh. KK tangguh ditetapkan dengan indikator KK tangguh. Untuk mewujudkannya dilakukan kegiatan pemberdayaan terhadap KK rentan dengan menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan agar kegiatan pemberdayaan berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga KK rentan mengalami peningkatan dan dapat berubah menjadi KK tangguh. Adapun proses yang dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan KK rentan tersebut adalah:

1. Tahap Persiapan

Dalam melaksanakan suatu kegiatan diperlukan persiapan yang matang. Tahap persiapan merupakan tahapan awal yang harus dilakukan dengan baik. Tahap persiapan yang dimaksudkan disini adalah persiapan yang dilakukan ditingkat internal LSM Jemari Sakato. Hal yang dilakukanpun tidak terlalu banyak. Tujuan dilakukannya persiapan adalah untuk penyusunan strategi implementasi kegiatan yang digunakan sebagai panduan yang jelas dalam pelaksanaan setiap kegiatan sesuai dengan *output* yang diharapkan. Pihak yang terlibat dalam tahap persiapan adalah tim Jemari Sakato (fasilitator), pihak OXFAM dan *Australian Aid*.

Kegiatan pemberdayaan KK rentan mulai dipersiapkan setelah 6 bulan program *Deepening Resilience* berlangsung. Tahap persiapan ditingkat internal ini dilakukan di kantor LSM Jemari Sakato. Tepatnya pada Bulan April tahun 2015 kegiatan ini mulai dilaksanakan. Pada tahapan ini masyarakat belum terlibat. Dilihat dari penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan, dalam tahap persiapan ini, LSM Jemari Sakato belum menerapkan secara utuh 4 prinsip yang dilihat. Hal ini karena untuk kegiatan pemberdayaan sendiri belum dimulai, hanya sampai pada penyamaan persepsi dan tujuan program di tingkat internal pelaksana program.

2. Tahap Pelaksanaan

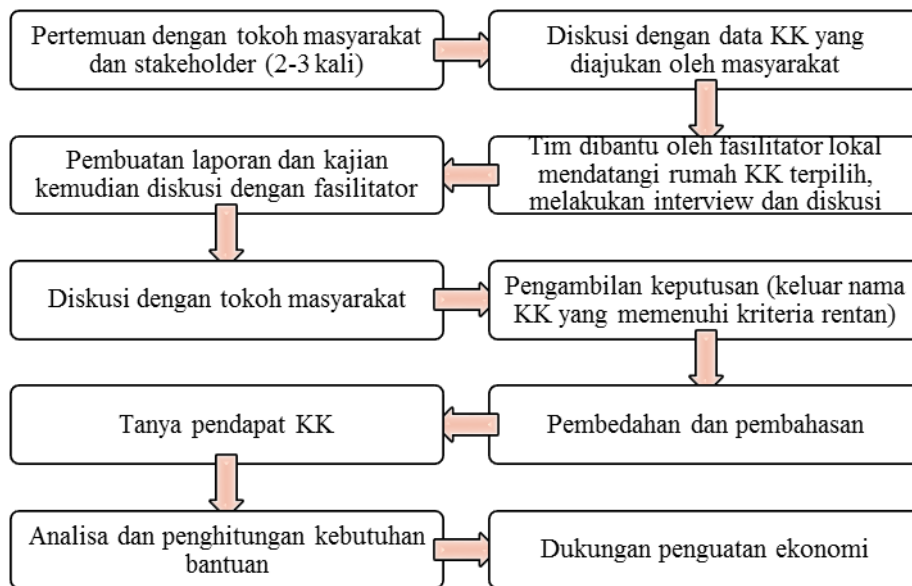
Pelaksanaan program merupakan tahap yang sangat penting dalam pengelolaan program. Dalam kegiatan pemberdayaan KK rentan ini terdapat beberapa tahap. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan *workplan* dan *budget plan* yang telah disesuaikan. Dalam pelaksanaannya Jemari Sakato menggunakan metode fasilitas efektif dalam setiap kegiatan serta melibatkan seluruh *stakeholder* terkait secara partisipatif sesuai

dengan kegiatan. Apapun yang menjadi *output* dalam setiap kegiatan merupakan musyawarah dan kesepakatan bersama, termasuk kesepakatan dari masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Mardikanto dan Soebito (2012:61) menyatakan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu dalam pembangunan.

Dilihat dari penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan, tahap pelaksanaan ini sudah menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Pada tahap ini kegiatan pemberdayaan benar-benar dimulai. Prinsip kesukarelaan diterapkan dengan melibatkan berbagai pihak tanpa adanya pemaksaan. Sebagai penggerak program, fasilitator hanya mengurus perizinan dan menyebarkan undangan kegiatan. Prinsip partisipatif diterapkan dengan keterlibatan semua stakeholders dalam setiap tahapan kegiatan pelaksanaan. Masyarakat dilibatkan dalam setiap kegiatan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. Sementara itu, selain fasilitator, tahap pelaksanaan juga selalu melibatkan pihak nagari dan mitra program. Selanjutnya, prinsip keswadayaan dapat dilihat dari kemampuan masyarakat/KK rentan dalam perumusan kegiatan usaha mata pencariannya sendiri, peningkatan pendapatan usaha dan kebiasaan menabung sementara LSM hanya mendampingi. Melalui kerjasama dengan BPR setempat, KK rentan bisa memiliki tabungan sesuai kemampuannya. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan telah melibatkan banyak pihak yang saling bekerja sama. Tahap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ini dilakukan pula melalui beberapa tahap.

a) Tahap Pengkajian Kondisi Masyarakat secara Partisipatif

Tahap pengkajian kondisi masyarakat yaitu suatu tahap yang dilakukan untuk mengetahui kondisi masyarakat yang sebenarnya



Gambar 1. Tahapan Pengkajian Partisipatif

b) Penyusunan Prioritas Rencana Aksi

Penyusunan rencana aksi merupakan tahapan perencanaan bersama KK rentan. Rencana aksi ini muncul untuk menjawab hasil analisis masalah, tujuan dan stakeholder yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuan penyusunan rencana aksi adalah untuk memastikan jenis mata pencarian yang didukung nantinya tepat sasaran dan memberikan manfaat secara cepat.

Kegiatan pemberdayaan bersifat *bottom up* yang melibatkan peran masyarakat untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan perencanaan dan pembangunan. Dengan demikian, program penanggulangan kemiskinan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga implementasi program akan terlaksana secara efektif dan efisien. Melalui pemberdayaan, masyarakat akan mampu menilai lingkungan sosial ekonominya serta mampu mengidentifikasi berbagai bidang yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan (Azwar, 2014). Dengan penyusunan rencana aksi, KK rentan akan dibantu untuk mendeskripsikan keinginannya dan kemudian didukung sesuai dengan aspirasinya. Prinsip partisipatif diterapkan dalam tahap ini dengan melibatkan KK rentan dalam perencanaan aksi. Bentuk partisipasi KK rentan adalah dengan menyuarakan pendapatnya. Pengambilan keputusan tentang aksi yang akan dilakukan pun tidak menyingkirkan orang-orang tertentu.

Setelah pengkajian lebih lanjut, KK rentan akan memulai aksi pengembangan mata pencariannya dengan dukungan yang sesuai dengan usaha yang dilakukan. Pelatihan dan pengembangan KK rentan dilakukan secara rutin.

Tabel 1. Rencana Aksi Pengembangan Usaha Keluarga

No	Jenis rencana aksi	Jumlah KK
1	Pengembangan usaha ternak (ayam, kambing dan itik, budidaya lele)	18
2	Usaha dagang harian	21
3	Dukungan mata pencarian nelayan	1
Jumlah		40

Sumber: Dokumen Jemari Sakato 2015

c) Penguatan Ketangguhan Mata Pencarian Keluarga

Penguatan ketangguhan mata pencarian keluarga merupakan tahanan puncak dari kegiatan pemberdayaan ini. Setiap KK rentan diberikan dukungan mata pencarian, kemudian didukung dengan berbagai pelatihan dan diskusi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuannya. Masing-masing KK rentan hanya diberikan bantuan atau dukungan mata pencarian berupa materil sebanyak satu kali sebagai modal awal KK untuk menjalankan usaha mata pencariannya. Selanjutnya, pelatihan diberikan secara umum untuk keseluruhan KK rentan dan ada juga pelatihan yang diberikan berdasarkan kelompok usaha. Dengan begitu masing-masing KK mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Pelatihan dan pertemuan dilakukan secara rutin tiap bulannya yang bertempat di mesjid jorong atau di kantor wali nagari. Hal ini dilakukan hingga program berakhir pada tahun 2017.

Berbagai upaya yang dilakukan dalam mendukung ketangguhan KK rentan, yaitu: update pengkajian ancaman, kerentanan dan kapasitas mata pencaharian masyarakat secara partisipatif (*Participatory Vulnerability Capacity Assessment*), update penyusunan rencana aksi, pelaksanaan rencana aksi masyarakat serta penguatan ketangguhan mata pencarian masyarakat dalam bentuk pelatihan manajemen keuangan, pelatihan manajemen usaha serta dukungan terhadap rencana keberlanjutan mata pencaharian.

KK rentan diberdayakan sesuai jenis usahanya. Pelatihan dan *sharing* mengenai segala hal tentang pengelolaan ternak bagi KK rentan yang berusaha ternak dan pelatihan manajemen usaha bagi kelompok KK rentan yang memilih untuk berdagang. Apabila terjadi suati kendala maka akan dicarikan solusi bersama. Selain kegiatan pemberdayaan masyarakat, tim LSM Jemari Sakato juga mencarikan jaringan atau mitra baru yang bisa mendukung kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dari sini dapat dilihat adanya sinergi dan kerjasama antara berbagai pihak yang menunjukkan adanya prinsip kebersamaan. Soedijanto (2001) dalam Mardikanto dan Soebito (2015:108), prinsip kebersamaan merupakan kebersamaan dan saling berbagi rasa dan pengalaman, saling membantu dan saling mengembangkan sinergisme.

Kegiatan pelatihan dan pemberdayaan tidak hanya dilakukan berkaitan dengan jenis usaha masing-masing KK rentan. Akan tetapi juga ada kegiatan pendukung yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Seperti pelatihan keterampilan dan adanya bantuan bibit yang tujuannya untuk mengarahkan KK rentan agar memiliki kebun sendiri di sekitaran rumahnya.

Berbagai upaya peningkatan kapasitas KK rentan dilakukan secara rutin dan berdasarkan kebutuhan. Upaya ini dilakukan untuk menumbuhkan kemampuan KK rentan untuk merumuskan kegiatan dengan penuh tanggung jawab, tanpa menunggu ataupun mengharapkan dukungan pihak lain (Soedijanto (2001) dalam Mardikanto dan Soebito (2015:108). Artinya, dalam kegiatan pemberdayaan ini sudah menerapkan prinsip keswadayaan. Selain itu, dengan adanya partisipasi KK rentan dalam kegiatan pemberdayaan secara rutin dan tanpa adanya paksaan membuktikan bahwa dalam kegiatan pemberdayaan ini juga menerapkan prinsip kesukarelaan dan prinsip partisipatif, yang didukung dengan keterlibatan berbagai pihak yang saling bersinergi (penerapan prinsip kebersamaan).

3. Pelaporan dan monitoring

Pelaporan dan monitoring merupakan tahapan yang menjadi pengukur tercapainya suatu tujuan. Dalam program pemberdayaan KK rentan, setiap suatu kegiatan selesai dilaksanakan akan selalu dibuatkan laporan kegiatannya. Dengan adanya laporan dan monitoring (evaluasi) maka setiap masalah dan kendala yang dihadapi dalam kegiatan pemberdayaan akan dapat ditangani dan dicarikan solusi. Selain itu juga dapat diketahui

sejauh mana pencapaian yang diraih selama pelaksanaan kegiatan. Menurut Mardikanti dan Soebito (2012:264), evaluasi dalam kehidupan sehari-hari sering disebut sebagai padanan istilah “penilaian” yaitu suatu tindakan pengambilan keputusan untuk mengadakan pemenaian terhadap suatu objek, keadaan, peristiwa, atau keadaan tertentu yang diamati.

Penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan juga dilakukan pada tahap pelaporan dan monitoring. Prinsip kesukarelaan dan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak secara sukarela dan tanpa paksaan. Selanjutnya, prinsip keswadayaan diterapkan dengan menjadikan masyarakat/ KK rentan bisa melakukan usahanya sendiri dan memiliki pekerjaan tetap untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya. Sementara prinsip kebersamaan diterapkan dengan menjadikan KK rentan mampu terlibat dalam kegiatan sosial serta mengetahui perkembangan KK lainnya. Selain itu, setiap pertemuan dan pelatihan yang dilakukan, selalu melibatkan berbagai pihak secara bersama, dan KK sendiri juga dituntut untuk saling berbagi.

Dalam pelaporan dan monitoring, pihak yang dilibatkan adalah KK rentan, fasilitator (dari Jemari Sakato dan nagari), dan pihak pemerintah nagari. KK rentan memberikan pelaporan dan informasi usahanya, kemudian dirangkum dan dikumpulkan oleh fasilitator. Pemerintah nagari ikut berperan dalam memberikan dukungan fasilitas atau sarana yang dibutuhkan untuk kegiatan pemberdayaan maupun saat evaluasi.

Perkembangan masing-masing KK rentan tidak sama. Hal ini dipengaruhi oleh besarnya kegigihan yang dimiliki oleh KK dalam manajemen usaha. Jika dilihat dari kategori KK yang sudah dikelompokkan, maka perkembangan KK (termasuk 4 KK rentan disabilitas yang diberdayakan) dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Kategori Perkembangan KK 2015-2017

No	Kategori	Jumlah 2015	Tahun 2016	Jumlah 2017
1	Berkembang	-	-	14
2	Sedang berkembang	-	-	20
3	Kurang berkembang	40	36	6
	Jumlah	40	36	40

Sumber: Data Sekunder Jemari Sakato

Dalam setiap proses kegiatan pemberdayaan yang dilakukan tentunya terdapat beberapa tantangan, hambatan dan pembelajaran yang didapatkan. Hambatan dan tantangan yang ditemui antara lain: (1) efesiensi penggunaan waktu dan implementasi rencana aksi belum mencukupi sesuai dengan yang ada dalam *workplan* program; (2) kondisi dan luasnya lokasi program kurang sebanding dengan jumlah sumberdaya (fasilitator) yang digunakan dalam membantu pencapaian program; dan (3) tidak semua KK bisa di intervensi dengan pemberian bantuan usaha secara langsung, khususnya KK yang masuk ke dalam kategori kurang berkembang. Masalah sosial yang sangat kompleks dari semua sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menjadi faktor penghambat KK untuk berkembang menjadi KK tangguh. Pembelajaran yang didapatkan dari program ini, KK rentan memiliki karakteristik yang bertingkat mulai dari perilaku, cara berfikir, dan faktor-faktor lingkungan yang turut mempengaruhi mereka dalam membangun ketangguhan.

Untuk penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan dlam setiap proses pemberdayaan KK rentan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Penerapan Prinsip-Prinsip Pemberdayaan dalam Proses Pemberdayaan KK Rentan

No	Proses Pemberdayaan	prinsip			
		Kesukarelaan	Partisipatif	Keswadayaan	Kebersamaan
1	Persiapan	-	-	-	-
2	pelaksanaan (pengkajian kondisi masyarakat, penuyusunan RAK, dan penguatan ketangguhan mata pencarian)	√	√	√	√
3	Pelaporan dan monitoring	√	√	√	√

Menurut Tim Delivery (2004) dalam Mardikanto dan Soebito (2015:125), tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat terdiri dari: (1) seleksi lokasi; (2) sosialisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat; (3) proses pemberdayaan (yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu: kajian keadaan pedesaan partisipatif, pengembangan kelompok, penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan serta monitoring dan evaluasi); dan (4) tahapan pemandirian msyarakat. Pada kegiatan pemberdayaan KK rentan oleh LSM Jemari Sakato, tahapan persiapan program dilakukan pada tingkat internal dan belum melibatkan masyarakat yang dilanjutkan dengan sosialisasi program kepada tokoh masyarakat. Kemudian, proses pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan 3 tahapan yaitu: (1) pengkajian kondisi masyarakat yang dilakukn secara partisipatif; (2) penyusunan RAK (Rencana Aksi Keluarga); dan (3) penguatan ketangguhan mata pencarian. Tahapan pelaporan dan monitoring juga dilakukan selama proses pemberdayaan hingga kegiatan pemberdayaan itu berakhir. Selanjutnya masuk pada tahapan pemandirian masyarakat dimana KK rentan telah mengalami peningkatan menjadi KK tangguh dan dilepaskan dari program pemberdayaan.

Berdasarkan rangakaian tahapan dan proses kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM Jemari Sakato ini, dapat dilihat bahwa dari dimulainya proses pemberdayaan hingga pemberdayaan itu selesai, prinsip-prinsip pemberdayaan telah diterapkan. KK rentan telah berpartisipasi dengan baik selama program berlangsung dan menggambarkan bahwa juga ada kesukarelaan dari KK rentan karena tak ada unsur paksaan dalam setiap kegiatan. Prinsip keswadayaan ditujukan agar KK yang diberdayakan diarahkan agar bisa berdaya dan mengambil keputusan sendiri. Masing-masing KK didampingi sehingga mereka mempunyai perencanaan usaha sendiri (dalam hal ini disebut LCP) dan telah berinisiatif memiliki usaha cadangan atau usaha baru. Selanjutnya, prinsip kebersamaan dilakukan dengan adanya sinergi dan kerjasama antar berbagai pihak yang terlibat dalam setiap rangkaian kegiatan. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya penilaian unsur kepedulian sosial yang dimiliki oleh setiap KK sebagai salah satu indikator ketangguhan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan, berdasarkan data sekunder Jemari Sakato, dapat diketahui bahwa *outcome* yang dicapai adalah kegiatan ini telah mampu meningkatkan kehidupan masyarakat dari kondisi rentan kepada kondisi tangguh dengan total 85% KK rentan yang diberdayakan telah mengalami peningkatan dari sebelumnya.

E. Persepsi Responden tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Dalam penelitian ini, ada beberapa prinsip yang dinilai tentang penerapannya selama program dilaksanakan. Pemberdayaan KK rentan dalam program *Deepening Resilience* ini diamati berdasarkan empat prinsip pemberdayaan masyarakat menurut Soedijanto (2001) dalam Mardikanto dan Soebito (2015:108). Berdasarkan wawancara dengan 13 responden, penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan dalam kegiatan pemberdayaan KK rentan di Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Penerapan Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

No	Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat	Total Jawaban responden	Total Jawaban	Persentase (%)	Kriteria
1	Prinsip Kesukarelaan	49	52	94,23	terpenuhi
2	Prinsip Partisipasi	75	78	96,15	terpenuhi
3	Prinsip Keswadayaan	43	52	82,69	terpenuhi
4	Prinsip Kebersamaan	45	65	69,23	terpenuhi
Jumlah		212	260	85,58	terpenuhi

Sumber: Data primer olahan 2018

Tabel diatas menunjukkan rata-rata penerapan prinsip pemberdayaan sebesar 85,58% dengan kriteria terpenuhi. Artinya, penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan dalam kegiatan pemberdayaan KK rentan oleh LSM Jemari Sakato sudah diterapkan dengan baik. Prinsip kesekarelaan diterapkan sebesar 94,23%, prinsip partisipatif sebesar 96,15% prinsip keswadayaan sebesar 82,69%, dan prinsip kebersamaan diterapkan sebesar 69,23%. Dari 4 prinsip yang dilihat, prinsip partisipatif diterapkan dengan persentase paling tinggi. Kesadaran masyarakat untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan KK rentan oleh Jemari Sakato sangat tinggi. Setiap diadakan pertemuan, responden mengakui bahwa mereka akan datang, kecuali pada kondisi yang mendesak. Sebelum pertemuan diadakan, masing-masing KK akan diberikan undangan secara resmi. Hal ini menjadi dorongan tersendiri bagi KK rentan karena merasa dihargai. Pada setiap pertemuan dan pelatihan, KK terlibat

langsung melalui diskusi bersama dan saling berbagi informasi secara aktif. Selain itu, setiap KK rentan memiliki hubungan dan komunikasi yang terjalin baik dengan fasilitator. Sementara itu, prinsip kebersamaan berada pada persentase paling rendah dari prinsip yang lain. Hal ini terjadi karena KK yang diberdayakan belum memiliki inisiatif yang tinggi untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam melakukan usahanya.

Menurut Dusseldrop (1981 *dalam* Mardikanto dan Soebito (2015:85) ada beragam bentuk partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat, yaitu: (1) menjadi anggota kelompok masyarakat; (2) melibatkan diri dalam diskusi kelompok; (3) melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat; (4) menggerakkan sumberdaya masyarakat; (5) mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan; dan (6) memanfaatkan hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, dalam kegiatan pemberdayaan KK rentan oleh LSM Jemari Sakato ini, masing-masing pihak berpartisipasi dalam bentuk-bentuk partisipasinya. KK rentan selaku penerima manfaat program bergabung dalam kelompok keluarga rentan berdasarkan jenis mata pencarian yang didukung untuk memudahkan proses pendampingan. Setiap acara pertemuan rutin kelompok maka masing-masing KK akan berdiskusi untuk mengevaluasi kendala dalam usahanya dan kemudian mencari solusi bersama. KK rentan tidak hanya ikut hadir di setiap kegiatan tapi juga diberikan kesempatan dan ikut mengambil keputusan.

Inti dari kegiatan pemberdayaan yang bertujuan untuk mewujudkan perubahan adalah adanya proses belajar yang mandiri untuk terus-menerus melakukan perubahan (Mardikanto dan Soebito, 2015:68). Dalam proses pemberdayaan KK rentan, pendampingan dilakukan dengan intensif, namun peran fasilitator terus berkurang seiring dengan berjalannya program. Di awal program, fasilitator lokal maupun fasilitator LSM lebih banyak mencari mitra atau *stakeholders* yang bisa mendukung terwujudnya keswadayaan masyarakat.

Dari 4 prinsip yang dilihat, prinsip partisipatif diterapkan dengan persentase paling tinggi. Kesadaran masyarakat untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan KK rentan oleh Jemari Sakato sangat tinggi. Setiap diadakan pertemuan, responden mengakui bahwa mereka akan datang, kecuali pada kondisi yang mendesak. Sebelum pertemuan diadakan, masing-masing KK akan diberikan undangan secara resmi. Hal ini menjadi dorongan

tersendiri bagi KK rentan karena merasa dihargai. Pada setiap pertemuan dan pelatihan, KK terlibat langsung melalui diskusi bersama dan saling berbagi informasi secara aktif. Selain itu, setiap KK rentan memiliki hubungan dan komunikasi yang terjalin baik dengan fasilitator. Sementara itu, prinsip kebersamaan berada pada persentase paling rendah dari prinsip yang lain. Hal ini terjadi karena KK yang diberdayakan belum memiliki inisiatif yang tinggi untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam melakukan usahanya.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kegiatan pemberdayaan KK rentan dalam program *Deepening Resilience* oleh LSM Jemari Sakato di Nagari Tiku Selatan Kabupaten Tanjung Mutiara yang didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan pada proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan KK rentan dalam program *Deepening Resilience* oleh LSM Jemari Sakato di Nagari Tiku Selatan sudah dilakukan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi, dan diakhir kegiatan telah menjadikan 85% KK mengalami peningkatan taraf kehidupan dari KK rentan menjadi KK tangguh.
2. Persepsi KK rentan tentang penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan pada kegiatan pemberdayaan KK rentan dalam program *Deepening Resilience* oleh LSM Jemari Sakato di Nagari Tiku Selatan menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan ini sudah memenuhi penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan, dengan rata-rata persentase sebesar 85,58% prinsip terpenuhi. Prinsip-prinsip pemberdayaan tersebut terdiri dari prinsip kesukarelaan terpenuhi 94,23%, prinsip partisipatif terpenuhi dengan persentase paling besar yaitu 96,15%, prinsip keswadayaan terpenuhi 82,69% dan prinsip kebersamaan dengan persentase yang paling kecil dibandingkan dengan prinsip lainnya yaitu 69,23%.

Selanjutnya, dari penelitian ini disarankan:

1. Untuk kedepannya diharapkan kegiatan pemberdayaan ini bisa *sustainable* dan dilanjutkan oleh nagari dan masyarakat penerima manfaat juga menjaga keberlanjutan program.

2. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian dengan metode yang berbeda dan atau melakukan pengkajian topik lainnya dari program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriza.2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anggraeni, dkk. *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1286-1295. Universitas Brawijaya.
- Azwar, Budi.2014. *Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kampar (Studi Tentang Efektifitas Bantuan Dana Bergulir Sektor Agribisnis)*. Jurnal Kewirausahaan, Vol 13, No.1, Januari- Juni 2014
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam. Kecamatan Tanjung Mutiara dalam Angka 2017. <https://agamkab.bps.go.id/> 17 April 2018
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam. Statistik Daerah Kabupaten Agam 2017. <https://agamkab.bps.go.id/> 1 Januari 2019
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam. Statistik Pertanian Kabupaten Agam 2016: Edisi Tanaman Pangan. <https://agamkab.bps.go.id/> 1 Januari 2019
- Bungin, Burhan.2009. *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontenporer*. Rajawali Pers: Jakarta.303 hal.
- Dartanto.2014. *Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan (PNPM-MP) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Nanggalo*. Volume 2 Nomor 1, Juni 2014 Jurnal Administrasi Pendidikan Hal.108 - 831.
- Fakih, Mansour.1996. *Masyarakat Sipil untuk Transpormasi Sosial, Pergolakan Ideologi LSM di Indonesia*.Yogyakarta: Puataka Belajar.
- Final Report* Program Memperkuat Ketangguhan masyarakat. Jemari Sakato. 2016

- Girsang, Wardis.2009. *Strategi Pengentasan Kemiskinan di Pulau Kecil di Provinsi Maluku*. Universitas Pattimura. Jurnal Agrikultura 2009, 20(3):176-189.
- Hikmat, Harry.2014. *Analisis Dampak Lingkungan Sosial: Strategi Menuju Pembangunan Berpusat pada Rakyat (People Centred Development)*. Andalsos: Staf Ahli bidang Dampak Sosial Kemensos.
- Hermantyo, A Irawati. 2008. *Pengalaman Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Pendampingan dan Pemberdayaan Keluarga Miskin Di Sektor Pertanian (Sebuah Refleksi)* [Abstrak]. Hal 81. Jakarta Pusat: PT. Bina Swadaya Konsultan
- Ife, jim dan Frank Tesoriero.2008.*Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 721 hal.
- Kurnianingsih, Titik.2013. *Dimensi Kemiskinan*. Biro Analisa Pengnggaran dan Pelaksanaan APBN.
- LIPI & BI. 2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Kerja sama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dengan Bank Indonesia.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato.2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. 341 hal.
- _____.2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. 280 hal.
- Nanga, Muana. 2000. *Mencermati Pergeseran Paradigma dalam Pembangunan*. Meditech Vol. 8, No.21, Jantnri - April 2000. hal:67-79
- Nasdian, Fredian Tonny.2014. *Pengembangan Masyarakat*. Bogor: yayasan Pustaka Obor. 317 hal.
- Nikijuluw, Victor P.H.2001. *Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka Dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu*. Makalah pada Pelatihan Pengelolaan Pesisir Terpadu. Proyek Pesisir, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor (IPB). Hotel Permata, Bogor, 29 Oktober 2011
- Nugroho, Rino A. 2007. *Pengantar Teori Pembangunan*. Ver 1.1 Updated 020307
- Pasaribu, Ali Musa.2012. *Perencanaan & Evaluasi Proyek Agribisnis (Konsep & Aplikasi)*.Lily Publisher. Yogyakarta.
- Purwanto, Erwan Agus.2007. *Mengkaji potensi Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN 1,410-4946 Volume 10, Nomor 3, Maret 2007 (295-324). UGM

- Reni, A. 2012. *Pola Pendampingan LSM Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta Bagi Pekerja Rumah Tangga Berbasis HAM*. [Skripsi]. Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta. 174 hal.
- Rifa'i, Bachtiar. 2013. *Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo*. universitas Airlangga. Jurnal. Volume 1, Nomor 1, Januari 2013. ISSN2303-341X
- Rukminto Adi, Isbandi. 2008. *Intervensi Komunitas. Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali. 410 hal.
- Singarimbun, et al. 1987. *Metode Penelitian Survei. Edisi Revisi*. Pustaka LP3S Indonesia: Jakarta.
- Soetomo.2011. *Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antesisnya?*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 280 hal.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 334 hal.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 334 hal.
- Suharto, Edi.2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung, PT Refika Aditama.
- Sukino.2013. *Membangun Pertanian dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani; Terobosan Menanggulangi Kemiskinan*.Yogyakarta.Pustaka baru Press
- Supriyanto.2006. *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan*. Jurnal Ekonomi & Pendidikan , Volume 3 Nomor 1, April 2006
- Supriyanto ,dkk.*Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean*. 32 hal.
- Surakhmad, winarno.2000 .*Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung:Tarsito.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Zubaedi.2007.*Wacana Pembangunan Alternatif.Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Arruz Media Group. 310 hal.

MODAL SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ASAP DI RIAU: PENGUATAN KELEMBAGAAN SOSIAL MELALUI PEMBERADAYAAN MASYARAKAT PEDULI API

Miftah Faridl Widhagha^{1*}, David Marcelinho Haryanto², Wahyu Purwanto¹, Rahmad
Hidayat¹, Budhi Sri Fitria Alhumaira¹

¹Departemen CSR PT Pertamina (Persero) RU II Sungai Pakning,

²Departemen HSSE PT Pertamina (Persero) RU II Sungai Pakning

*Email: arjuna.miftah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan mengenai kondisi penanggulangan kebakaran bencana asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan gambut di Provinsi Riau. Paper ini merupakan penelitian empiris yang terjadi pada upaya penanggulangan bencana asap di Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia selama periode 2017-2019. Beberapa temuan yang disampaikan dalam hasil penelitian ini antara lain adalah Penanggulangan bencana asap dilakukan oleh berbagai pihak termasuk instansi swasta, salah satunya melalui peran CSR PT Pertamina (Persero) RU II Sungai Pakning yang mengembangkan program Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan berbasis Pemberdayaan Masyarakat Peduli Api, beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini antara lain Restorasi Lahan Gambut melalui Pengembangan Arboretum Gambut dan Penanaman kembali lahan gambut dengan tanaman endemik. Keberlangsungan program ini mendorong munculnya penguatan modal sosial seperti pranata sosial (social institution), kepercayaan (trust), jaringan sosial (network), dan hubungan timbal balik (reciprocity) sehingga kegiatan pencegahan penanggulangan bencana asap dapat dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat. Selain itu keberadaan modal sosial di dalam Masyarakat Peduli Api juga telah mendorong terjadinya perubahan tipe relasi modal sosial dari bonding menuju bridging yang membentuk kelembagaan sosial dengan terbentuknya Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Api se-Bukit Batu. Selain itu, pelaksanaan program ini juga berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals (SDGs)* terutama pada tujuan Mencegah Dampak Perubahan Iklim (13), Menjaga Ekosistem Darat (15) dan Pertumbuhan Ekonomi (8).

Kata kunci : Bencana Asap, Modal Sosial, CSR, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), *Sustainable Development Goals (SDGs)*

PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan dalam beberapa tahun ini menjadi salah satu bencana nasional yang ada di Indonesia. Khusus pada lahan gambut, proses pemadaman berlangsung sulit karena api yang menyebar melalui bawah tanah pada lapisan gambut. Salah satu kawasan gambut yang sering mengalami kebakaran lahan dan hutan berada di Provinsi Riau. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi Riau memiliki luas hutan dan lahan terbakar yang cukup luas, pada tahun 2015 saja, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau mencapai 183.808 ha (Sumber: <http://sipongi.menlhk.go.id>) Kebakaran hutan yang terjadi umumnya diakibatkan dua hal, secara sengaja dan tidak sengaja. Kebakaran secara sengaja kebanyakan dipicu oleh pembakaran untuk membuka lahan dan pembakaran karena eksploitasi sumber daya alam. Sedangkan kebakaran tak disengaja lebih disebabkan oleh cuaca yang panas, pembakaran sampah, membuang puntung rokok, dan tindakan kelalaian lainnya. Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi, kebakaran hutan dan lahan di Riau merupakan salah satu bencana tahunan yang disebabkan oleh perilaku manusia. Fakta lapangan menunjukkan bahwa ada faktor kesengajaan membakar hutan dan lahan. Tujuan pembakaran tersebut adalah untuk melakukan pembersihan lahan dalam rangka persiapan pembangunan perkebunan.

Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau tidak hanya menjadi fokus Pemerintah Provinsi Riau saja, namun juga menjadi perhatian pihak swasta yang berada di wilayah tersebut, salah satu pihak swasta nasional yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau adalah PT Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) II Sungai Pakning. Sebagai salah satu perusahaan yang berada di wilayah Provinsi Riau, Pertamina ikut andil dalam upaya penanganan bencana kebakaran lahan dan hutan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan melaksanakan Program Mitigasi Kebakaran Lahan dan Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat terutama pada lokasi Ring 1 perusahaan. Program ini dilaksanakan di 4 desa dan 1 kelurahan yang termasuk dalam Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Keempat desa itu adalah Desa Sejangat, Desa Pakning Asal, Desa Sungai Selari, dan Desa Batang Duku, serta satu kelurahan yaitu Kelurahan Sungai Pakning. Upaya mitigasi ini dilakukan dengan memberdayakan Masyarakat Peduli Api (MPA), sebuah kelompok sukarelawan yang

dibentuk khusus untuk merespon, mencegah dan memadamkan kebakaran hutan dan lahan di tingkat desa (Fauzan, Purwanto, Widhagdha, & Pakpahan, 2017).

Pemberdayaan Masyarakat Peduli Api (MPA) didasarkan pada lemahnya ikatan sosial dan kelembagaan yang ada di antara MPA sehingga upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak dapat dilakukan secara optimal. Terbatasnya sumber daya manusia dan peralatan pemadaman di masing-masing desa menjadi kendala tersendiri dalam upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, penelitian ini akan mengungkapkan upaya Pertamina untuk meningkatkan ikatan sosial dan kelembagaan antar MPA agar penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan secara optimal

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif yang merupakan prosedur penelitian untuk menghasilkan data deskriptif dari obyek penelitian yang diamati. Metode ini melihat pengalaman individu/organisasi secara utuh, sehingga tidak membatasi pernyataan individu/organisasi ke dalam hipotesis tertentu. Sementara pendekatan yang dilakukan adalah studi kasus dengan melihat secara kasuistik mengenai pelaksanaan Program Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau oleh CSR PT Pertamina (Persero) Refinery Unit II Sungai Pakning selama kurun waktu tahun 2018. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan dan Focus Group Discussion (FGD). Informan penelitian dipilih berdasarkan purposive sampling dengan maksud agar informan yang dipilih sudah mengetahui permasalahan secara mendalam sehingga dapat memberikan informasi yang utuh. Informan penelitian adalah ketua dan para tokoh dalam kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Api (FORKOMPA) Bukit Batu dan Koperasi Tani Tunas Makmur yang ada di wilayah Sungai Pakning.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Restorasi Lahan Gambut

Dalam pelaksanaan Program CSR Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) RU II Sungai Pakning, perusahaan mengajak dan memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan kembali lahan bekas kebakaran menjadi lahan produktif dan restoratif dengan melakukan beberapa hal, yaitu pertama, Pertamina mengajak masyarakat untuk menanam pohon khas gambut pada lahan-lahan bekas terbakar. Penanaman lahan bekas terbakar yang ada di Sungai Pakning dilakukan bersama Koperasi Tani Tunas Makmur dan Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) Kelurahan Sungai Pakning. Penanaman pada lahan bekas terbakar ini bertujuan mengubah semak yang rawan terbakar menjadi lahan pertanian yang produktif dan menurunkan tingkat risiko kebakaran lahan. Saat ini, upaya penghijauan kembali lahan bekas terbakar telah mencapai lahan seluas 14,5 ha, yang terdiri dari tanaman nanas serta tanaman keras seperti durian (*Durio Zibethinus*), matoa (*Pometia Pinnata*), jengkol (*Archidendron Pauciflorum*) dan sirsak (*Annona Muricata*). Dipilihnya jenis – jenis tanaman tersebut karena selain bernilai ekonomis juga tidak perlu dilakukan pengolahan lahan lanjutan seperti pembakaran lahan gambut untuk penanaman.

Selain itu, upaya kedua yang bertujuan sebagai kegiatan restoratif adalah dengan mengembangkan Arboretum Gambut. Upaya pengembangan Arboretum Gambut dilakukan dengan kerja sama Masyarakat Peduli Api (MPA) Sungai Pakning dan Koperasi Tani Tunas Makmur ini berada pada lahan asli yang terselamatkan dari kebakaran dengan luas lahan 1,1 Ha. Di Arboretum Gambut ini kelompok bersama PT Pertamina RU II Sungai Pakning mengidentifikasi tanaman khas gambut yang terselamatkan dari kebakaran lahan dan hutan, serta berupaya membudidayakan tanaman khas gambut sehingga tidak terancam dari kepunahan. Beberapa tanaman langka yang konservasi dalam kegiatan ini antara lain Kantong Semar (*nepenthes spectabilis*), Meranti (*Shorea Pinanga*), Jelutung (*Dyera Castula Hook*), Palembang Merah (*Crytoctachys Lakka*). Tanaman-tanaman ini termasuk dalam kategori endemik yang hanya dapat tumbuh dengan baik di lahan gambut. Selain memiliki fungsi restorasi, Arboretum gambut juga memiliki fungsi edukasi dengan menjadi sarana pembelajaran bagi siswa sekolah maupun peneliti dari universitas yang ada

di sekitar wilayah Sungai Pakning sebagai laboratorium pembelajaran lapangan. Secara ekonomi Arboretum Gambut juga memberikan pemasukan tersendiri bagi kelompok pengelola dari hasil penjualan tiket, makanan, maupun tanaman – tanaman hasil budidaya yang bisa dibawa pulang oleh pengunjung.

b. Modal Sosial dalam Penanggulangan Bencana Asap

Penanganan kebakaran hutan dan lahan selain dilakukan melalui kegiatan restoratif juga dilakukan dengan memanfaatkan modal sosial yang ada di masyarakat. Hal ini dikarenakan bentuk dan sifat kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang cenderung didasari pada sikap-sikap kesukarelawanan (Hidayat & Widhagda, 2017), juga karena terbatasnya sumber daya yang ada di masing-masing desa untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di wilayah mereka. Secara sederhana modal sosial merupakan kemampuan masyarakat untuk melakukan koordinasi dan kerja sama antara sekelompok individu dalam memperjuangkan tujuan-tujuan mereka. Menurut Putnam (1993) dalam buku Rahmat Rais (2009) Terdapat beberapa elemen penting dalam modal sosial, seperti pranata sosial (*social institutions*), kepercayaan (*trust*), dan jaringan sosial (*network*) yang saling berkaitan.

Ketiga elemen modal sosial ini berperan penting dalam aktifitas yang dilakukan oleh MPA. Pranata sosial merupakan nilai dan norma yang dijadikan kepercayaan bersama oleh masyarakat, kepercayaan ini akan menentukan terbentuknya jaringan-jaringan sosial antar masyarakat guna memudahkan tercapainya tujuan kelompok (Widhagda, 2018). Elemen-elemen modal sosial tersebut antara lain:

1. Pranata Sosial (*Social Institution*)

Pranata sosial sendiri terbagi atas norma dan sanksi yang merupakan komponen penting modal sosial dan harus diperhatikan jika ingin melihat apakah suatu hubungan bisa tercipta dengan baik atau tidak dalam suatu komunitas atau kelompok masyarakat. Dalam kelompok MPA, setiap desa telah memiliki peraturan guna memenuhi norma, namun perlu disadari pemahaman norma bersama belum cukup menjamin kerjasama antar individu karena selalu saja ada yang tidak taat terhadap norma yang telah disepakati (*moral hazard*). Oleh karena itu dibutuhkan sanksi sosial yang bersifat informal sehingga kualitas

hubungan dan interaksi sosial tetap terjaga dengan baik. Penerapan dari sanksi sosial dalam pranata sosial adalah pada tahun 2018 ketika kelompok MPA dari salah satu desa yakni Desa Batang Duku tidak atau jarang aktif dan berpartisipasi, baik dalam rapat kelompok, kegiatan rutin maupun pemadaman api maka sesuai peraturan yang telah ditetapkan, anggota-anggota kelompok MPA Desa Batang Duku tersebut dikeluarkan dan diganti dengan yang baru yang lebih berkomitmen.

2. Kepercayaan (*Trust*)

Kepercayaan merupakan hal terpenting dalam sebuah hubungan, salah satunya hubungan pada suatu kelompok atau komunitas. Tanpa adanya rasa saling percaya di antara anggota komunitas, maka kerjasama tidak akan tercipta secara baik. Bentuk kepercayaan yang ada pada anggota MPA ini terlihat dari cara mereka saling berinteraksi satu sama lain. Sikap saling percaya antar anggota juga muncul karena MPA didasari pada bentuk-bentuk kesukarelawanan sosial, sehingga masing-masing anggota saling percaya untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

Untuk menjaga sikap saling percaya ini, anggota kelompok menerapkan 3 sikap dasar seperti kejujuran, kedekatan dan keterandalan. Kejujuran dalam bergaul, dimana keterbukaan dan transparansi telah menjadi prinsipnya, mendekatkan diri satu sama lain agar lebih mengerti pribadi dan permasalahan yang dihadapi masing-masing anggota kelompok, sehingga terjalin kedekatan dan keakraban serta mereka saling mengandalkan satu sama lain, dimana terdapat suatu pembuktian apakah mereka dapat memenuhi harapan diri sendiri, anggota kelompok dan masyarakat sekitar dengan terlaksananya kegiatan pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

3. Jaringan Sosial (*Social Network*)

Jaringan sosial merupakan salah satu faktor yang tak kalah pentingnya untuk dapat menunjang keberlangsungan hidup bersama. Pada kelompok MPA sendiri hal yang ditempuh untuk dapat menciptakan jaringan sosial adalah dengan menjalin hubungan yang baik, dengan sesama anggota MPA satu desa, dengan anggota MPA lain desa dan juga dengan masyarakat sekitar. Mereka saling bekerja dan berkoordinasi satu sama lain baik dalam pekerjaan mereka sebagai sukarelawan pemadam api maupun dalam kehidupan

sehari hari. Melalui adanya jaringan sosial ini, efektivitas pemadaman api yang dilakukan sangatlah optimal, terbukti dengan berkurangnya titik api di Kecamatan Bukit Batu pada tahun 2015 dari sebanyak 2972 menjadi 156 titik api (sumber: www.bpbdkabbengkalis.go.id).

Keberadaan jaringan sosial yang menghubungkan MPA antar desa juga mendorong terbentuknya Forum Komunikasi MPA (FORKOMPA) se-Bukit Batu. Forum ini merupakan wadah bersama MPA di Kecamatan Bukit Batu untuk saling berinteraksi, bertukar informasi dan saling membantu sumber daya manusia maupun peralatan ketika desa lain membutuhkan bantuan.

Terbentuknya FORKOMPA ini selain didasari keberadaan ketiga elemen modal sosial yang telah dijelaskan sebelumnya juga karena adanya kebutuhan bantuan sumber daya antar desa sehingga masing-masing anggota desa dalam FORKOMPA saling membutuhkan. Hal ini merupakan bentuk dari Resiprositas (Reciprocity) atau hubungan timbal balik. Resiprositas pada kelompok MPA dinilai cukup baik dimana ketika kebakaran hutan/lahan terjadi disalah satu tempat maka secara otomatis kelompok MPA dari desa manapun turut serta dalam melakukan pemadaman tidak hanya dari kelompok MPA yang desanya terkena kebakaran saja. Resiprositas memungkinkan anggota MPA antar desa saling membantu satu sama lain, memberikan timbal balik dengan menolong desa lain yang terkena kebakaran. Penerapan resiprositas ini adalah pada bulan Maret 2019 ketika Desa Sungai Selari mengalami kebakaran lahan maka tidak hanya MPA desa tersebut saja yang bergerak, mereka mendapat bantuan dari MPA Desa Batang Duku dan Kelurahan Sungai Pakning, begitu juga sebaliknya. Hal ini merupakan bentuk gotong royong yang sudah menjadi prinsip kerja mereka.

c. Relasi dalam Modal Sosial sebagai Faktor Penguat Kelembagaan Sosial

Keempat elemen modal sosial yang telah dijelaskan di atas menjadi dasar penting sebagai penghubung MPA dengan tanggung jawab yang ada sebagai sukarelawan pemadam kebakaran. Modal sosial telah menjembatani mereka untuk semakin dekat dan menimbulkan bentuk-bentuk relasi modal sosial yaitu bonding, bridging serta linking pada hubungan mereka baik dalam pekerjaan maupun kekerabatan (Widhagdha, n.d.).

Bentuk relasi bonding, bridging dan linking ini lebih terasa ketika kelima kelompok MPA ini disatukan atas inisiatif dari PT Pertamina RU II Sungai Pakning sebagai pembina CSR dari MPA. Kelompok MPA ini disatukan dan diberi nama Forum Komunikasi MPA (FORKOMPA), guna memudahkan komunikasi antar anggota kelompok dari berbagai desa. Keberadaan FORKOMPA dirasa tidak hanya menguatkan relasi bonding di dalam masing-masing MPA, namun juga memperkuat relasi bridging antar MPA desa (Widhagda, 2019). Dengan adanya lembaga FORKOMPA, anggota MPA memiliki kekuatan yang lebih untuk berinteraksi dengan lembaga-lembaga lain di luar mereka, termasuk berinteraksi dengan pemerintah desa, TNI/POLRI dan Pertamina.

Setelah terbentuk FORKOMPA, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Pertamina melalui program CSR pun menjadi lebih terarah dan bermanfaat. Beberapa kegiatan yang dilakukan setelah terbentuknya FORKOMPA antara lain Pelatihan Safetyman dan Fireman, Pelatihan Kewirausahaan dan Latihan Gabungan antara FORKOMPA, TNI, POLRI, HSSE Pertamina untuk kesiapan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu dengan terbentuknya FORKOMPA semakin memudahkan anggota untuk berkoordinasi satu sama lain tidak hanya saat pelatihan pemadaman dan kegiatan pemadaman saja namun juga dalam kegiatan rutin sehari-hari seperti pemberian penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan untuk pencegahan kebakaran, patroli lapangan yang dilakukan setiap pagi dan sore, pembuatan sekat kanal, sumur bor, serta kolam penampungan air di titik-titik rawan terbakar. Melihat pada kasus terbentuknya FORKOMPA, keberadaan modal sosial sejatinya merupakan potensi yang ada pada masyarakat dan dapat digunakan sebagai pendorong perubahan ke arah yang lebih baik lagi untuk menyelesaikan berbagai masalah secara kolektif, mendorong roda perubahan di tengah masyarakat, memperluas kesadaran bersama bahwa banyak jalan yang bisa dilakukan oleh setiap anggota kelompok untuk memperbaiki nasib secara bersama-sama.

d. Kontribusi dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Program CSR yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) RU II Sungai Pakning melalui Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang membina Masyarakat Peduli Api (MPA) juga telah berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Setidaknya, program ini telah berperan aktif dalam upaya mencegah terjadinya dampak buruk akibat perubahan iklim (TPB 13) dan menjaga ekosistem daratan (TPB 15) dengan upaya restoratif pada lahan gambut. Upaya ini telah dilakukan melalui pengembangan Arboretum Gambut dan penanaman kembali lahan bekas terbakar dengan tanaman endemik khas gambut. Dari kedua aktivitas ini, telah mendorong pertumbuhan ekonomi (TPB 8) bagi masyarakat di sekitar wilayah pengembangan. Kegiatan ekonomi ini muncul melalui kegiatan pengelolaan arboretum, pertanian nanas, hingga pengolahan nanas menjadi aneka produk bernilai ekonomis sehingga mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaa modal sosial yang ada pada Masyarakat Peduli Api (MPA) telah mendorong terciptanya kelembagaan sosial berupa Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Api (FORKOMPA) yang terbentuk berdasarkan kesamaan pranata sosial (*Social institution*), sikap saling percaya (*Trust*), jaringan sosial (*Networks*), dan hubungan timbal balik (*Reciprocity*). Terbentuknya kelembagaan sosial juga didorong adanya relasi sosial yang telah ada di masyarakat seperti kuatnya bonding di dalam anggota MPA, terjalinnya bridging antar anggota MPA di masing-masing desa, dan menguatnya relasi linking antar MPA dengan pihak-pihak lain. Adanya kelembagaan sosial ini turut mendukung terlaksananya program Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan berbasis Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan restoratif yaitu pengembangan Arboretum Gambut dan kegiatan produktif yaitu penanaman kembali lahan terbakar dengan tanaman-tanaman endemik lahan gambut.

DAFRAT PUSTAKA

- Fauzan, F., Purwanto, W., Widhagdha, M. F., & Pakpahan, D. P. (2017). *Pemetaan Kawasan Rawan Karlahut Berbasis Sistem Informasi Geografi dan Partisipasi Masyarakat di Bukit Batu*. dalam Prosiding Seminar Nasional Geografi: Peran Geografi dalam Pengelolaan Sumberdaya Wilayah NKRI di Era Teknologi (pp. 895–905).
- Hidayat, R., & Widhagdha, M. F. (2017). *Peran Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pembinaan UMKM oleh PT Pertamina RU II Sungai Pakning)*.
- Widhagdha, M. F. (n.d.). *Role of Capital Social Bonding, Bridging and Linking in Community Empowerment (Case Study of CSR Partner PT Pertamina RU II Sungai Pakning)*.
- Widhagdha, M. F. (2018). *Role of Social Capital in Community Empowerment (Case Study of CSR Partner PT Pertamina RU II Sungai Pakning)*.
- Widhagdha, M. F. (2019). *Relasi Sosial dalam Praktik CSR*. (H. I. Wahyuni & M. Sulhan, Eds.). Surakarta: Arjuna Wijaya.

KAJIAN INOVASI MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN DI KAWASAN WISATA AGRO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Roso Witjaksono ^{1*}, Sunarru Samsi Hariadi ^{1,2}, Diah Fitria Widhiningsih¹.

¹Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian UGM

²Sekolah Pascasarjana Prodi Penyuluhan dan komunikasi Pembangunan

*Email: rosowitjaksono@yahoo.co.id

ABSTRAK

Fenomena alih fungsi lahan terjadi di Indonesia yang merupakan negara agraris. Pada tahun 2012 hingga tahun 2015, luas lahan sawah menurun sebanyak 0,48%. Dengan menurunnya luas lahan, pendapatan yang diperoleh dari sektor pertanian pun berkurang. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah menciptakan destinasi wisata agro yang memadukan sektor pariwisata dan pertanian. Di Yogyakarta, terdapat berbagai macam obyek wisata dan bermacam-macam jenis budidaya tanaman misalnya padi, palawija, dan hortikultura. Jenis agrowisata yang dapat ditawarkan antara lain wisata edukasi, budaya, dan wisata kuliner. Di samping itu, demi tercapainya keberlanjutan suatu agrowisata, diperlukan tata kelola kelembagaan yang baik. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menciptakan inovasi pengembangan wisata agro berbasis masyarakat, (2) menciptakan model pemberdayaan masyarakat di kawasan wisata agro untuk kesejahteraan masyarakat, dan (3) mengembangkan kelembagaan wisata agro berbasis masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan mengambil 60 sampel dari Kabupaten Sleman dan Bantul. Digunakan kuesioner untuk mengumpulkan data kuantitatif. Untuk mendukung data kuantitatif, data kualitatif yang diperoleh dengan teknik *Focus Group Discussion dan depth interview* dengan mewawancarai sejumlah pengurus pokdarwis sebagai *key person*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pengembangan wisata agro sudah dilakukan oleh masyarakat desa setempat terkait wisata budaya agro, pendidikan agro, kerajinan pertanian non-pangan dan olahan pangan lokal. Sebagai pemilik wisata agro, warga desa memiliki kesiapan untuk mengelola wisata tersebut. Hal tersebut didukung dengan adanya kelembagaan masyarakat untuk menunjang pengembangan wisata agro. Dari hasil penelitian dapat disarankan bahwa model pemberdayaan masyarakat yang efektif adalah dengan melibatkan kelembagaan masyarakat lokal yang mampu mendukung berkembangnya wisata agro dan pelestarian lingkungan. Selain itu, diperlukan adanya struktur kelembagaan yang jelas dari tingkat kabupaten sampai dengan kelembagaan RT, di bawah koordinasi Dinas Pariwisata dan Dinas Pertanian.

Kata Kunci: Wisata agro, Inovasi, Kelembagaan

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan sektor yang berperan penting menopang kehidupan masyarakat Indonesia. Keberadaan sektor pertanian tidak terlepas dari ketersediaan lahan sebagai media utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Akan tetapi, pada kenyataannya saat ini lahan yang tersedia semakin sempit. Dalam Buku Statistik Lahan Pertanian 2012-2016 yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian (2017) menunjukkan bahwa dari tahun 2012 hingga tahun 2015, luas lahan sawah total menurun 0,48%. Namun demikian, alih fungsi lahan belum mampu dikendalikan seiring dengan peningkatan kebutuhan infrastruktur dan lain sebagainya. Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sempitnya kepemilikan lahan pertanian berbanding lurus dengan menurunnya pendapatan petani.

Salah satu bentuk pengembangan yang dapat dilakukan di sektor pertanian agar dapat memberikan nilai tambah bagi usaha agribisnis dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani adalah pengembangan wisata pertanian atau lebih dikenal dengan agrowisata. Wisata agro dapat menjadi sebuah alternatif untuk meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat lokal. Selain itu, wisata agro juga dapat dikembangkan sebagai bentuk pelestarian lingkungan dan sumber daya lahan yang ada.

Menteri Pertanian telah menetapkan keputusan No. 319/KPTS/KP.150/6/2003 tentang Komisi Wisata Agro yang bertujuan untuk pemanfaatan sumberdaya pertanian sebagai daya tarik wisatawan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional. Tujuan pembangunan pariwisata adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan dan mengatasi pengangguran (Supartini, 2012). Pengelolaan wisata agro secara profesional akan memberikan manfaat bagi peningkatan konservasi lingkungan, peningkatan nilai estetika dan keindahan alam, dan nilai rekreasi (Astuti, 2014). Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan, pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk perusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor. 10 tahun 2012 tentang Kepariwisataan, dijelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki

keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Agrowisata didefinisikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang memanfaatkan usaha agro (usaha pertanian) sebagai suatu objek wisata, dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan pengalaman rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian (Chamdani, 2008). Agrowisata dapat dikelompokkan ke dalam wisata ekologi (*eco-tourism*), yaitu kegiatan wisata yang menaruh perhatian besar terhadap kelestarian sumber daya pariwisata (Damanik dan Weber, 2006). Pada prinsipnya, agrowisata merupakan kegiatan industri yang mengharapkan kedatangan konsumen secara langsung di tempat wisata sedangkan aset yang penting untuk menarik kunjungan wisatawan adalah keaslian, keunikan, kenyamanan, dan keindahan. Pengembangan agrowisata diharapkan dapat memiliki potensi besar sebagai pendorong diversifikasi produk pariwisata dan produk pertanian (Chamdani, 2008).

Desa wisata merupakan integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Nuryanti, 1993). Sementara itu, Edward Inskeep, dalam *Tourism Planning An Integrated and Sustainable Development Approach* (1991) mendefinisikan desa wisata sebagai berikut desa wisata adalah wisata pedesaan dimana sekelompok kecil wisatawan tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional, sering di desa-desa yang terpencil dan belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat

Menurut Hadiwijoyo (1992) dalam Andriani *et al* (2017) desa wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman dan kebutuhan wisata lainnya.

Menurut Murdiyanto (2011), secara esensial desa wisata merupakan pengembangan suatu desa dengan memanfaatkan kemampuan unsur-unsur yang ada dalam masyarakat dan desa yang berfungsi sebagai atribut produk wisata menjadi satu rangkaian aktivitas pariwisata yang terpadu dan memiliki tema tertentu sesuai dengan karakteristik desa. Dari

definisi tersebut dapat dikatakan bahwa suatu desa disebut sebagai desa wisata apabila mampu menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian perdesaan dari segi sosial-ekonomi, sosial-budaya, adat istiadat keseharian warga desa, arsitektur bangunan desa, atau kegiatan-kegiatan keseharian warga desa yang bernilai unik dan menarik, baik berupa atraksi-atraksi, akomodasi, makanan dan minuman, serta keunikan lain yang dimiliki oleh suatu desa, tidak terkecuali potensi dan keadaan pertanian yang ada di desa tersebut.

Dengan demikian permodelan pariwisata perdesaan dapat mengembangkan identitas dan ciri khas daerah sendiri dengan prinsip dan tata cara adat setempat. Adapun caranya adalah dengan mengembangkan mutu produk wisata perdesaan, pembuatan kelompok usaha lokal, dan memberikan kesempatan pada masyarakat setempat untuk ikut mengendalikan strategi dan pelaksanaan kegiatan tersebut (Putra, 2006). Pengemasan mutu produk dapat dilakukan dengan media sosial, salah satunya dengan *web blog* (Fadhila, 2016). *Web blog* sangat membantu pemasaran desa wisata mengingat dunia *digital* sudah menjadi salah satu “kebutuhan pokok” pada masa kini.

Dari uraian di atas terlihat bahwa bicara desa wisata agro tidak lepas dari kondisi sosial, ekonomi, budaya dan lembaga yang ada. Hal ini ditekankan Sunaryo (2012) bahwa konstruksi strategi *public private partnership* (PPP) atau kemitraan pemerintah dan swasta dalam proses pembangunan kepariwisataan merupakan salah satu cara yang sangat strategis dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik, yang dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab dan harus akuntabel bagi penyediaan jasa publik dan tetap menjaga kelangsungan kepentingan publik. Lembaga-lembaga pemerintah dan swasta harus bekerjasama dan berkoordinasi dalam program-program upaya optimalisasi pengembangan desa wisata agro.

Di Indonesia, Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki daya tarik tersebut karena memiliki lahan pertanian, budaya, pendidikan, dan obyek wisata. Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk dapat menciptakan inovasi pengembangan wisata agro berbasis masyarakat, model pemberdayaan masyarakat di kawasan wisata agro untuk kesejahteraan masyarakat, dan pengembangan kelembagaan wisata agro berbasis masyarakat di Yogyakarta

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode survei dengan mengambil sejumlah sampel, yang kemudian digabung dan didukung dengan data kualitatif yang diperoleh dengan teknik: *Depth Interview* pada *Key Person*, serta *Focus Group Discussion*. Penelitian juga menggunakan metode tindakan (*action research*) dengan melibatkan *stakeholder* dalam analisis karakteristik dan permasalahan sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan masyarakat dalam pelestarian lingkungan pertanian melalui wisata agro di wilayah mereka.

Penelitian dilakukan di Desa Wisata Agro wilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Setiap kabupaten dipilih 1 (Satu) Desa Wisata Agro secara *purposive* dengan memilih desa-desa yang paling berhasil mengembangkan wisata agro. Setiap desa diambil 30 sampel masyarakat yang terlibat dalam aktivitas wisata agro secara *simple random sampling*. Dengan demikian, total sampel adalah 60 responden.

Data yang dikumpulkan antara lain inovasi pengembangan wisata agro berbasis masyarakat meliputi novasi wisata budaya agro, inovasi wisata pendidikan, inovasi kerajinan pertanian non pangan, dan inovasi produk olahan pangan lokal; model pemberdayaan masyarakat di kawasan wisata agro meliputi model pemberdayaan masyarakat di kawasan wisata agro secara massal, model pemberdayaan kelompok, dan model pemberdayaan individual; serta pengembangan kelembagaan wisata agro berbasis masyarakat meliputi kelembagaan pertanian, kelembagaan ekonomi, kelembagaan sosial budaya, dan kelembagaan lingkungan hidup. Hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif meliputi tabel, statistik parametrik, dan analisis SWOT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk meningkatkan eksistensinya di tengah perkembangan pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta, Desa Wisata Puton dan Pulesari mengembangkan beberapa keunikan khas yang berasal dari sumberdaya daerah setempat. Mereka mengembangkan potensi lokal dengan cara mengelola sumber daya alam dan sumberdaya manusia di mana masyarakat aktif dalam pengembangan desa wisata. Kedua desa wisata tersebut mengembangkan beberapa kegiatan wisata antara lain wisata budaya agro, wisata

penididkan agro, wisata kerajinan non-pangan, dan wisata olahan pangan lokal untuk menarik daya tarik wisatawan.

Inovasi Wisata Budaya Agro

Desa Wisata Puton dan Pulesari memiliki daya tariknya sendiri dalam menampilkan seni pertunjukkan maupun upacara adat terkait bidang pertanian. Desa Wisata Puton memiliki sejumlah pertunjukkan budaya terkait bidang pertanian di antaranya gejog lesung, wiwitan, dan kirab budaya. Dalam pelaksanaannya, gejog lesung dilakukan oleh ibu-ibu namun terkadang juga dibantu oleh bapak-bapak dalam variasi musik dan tenaga untuk memindahkan lesung ke tempat pertunjukkan. Kegiatan ini selalu ditampilkan dalam setiap pertunjukkan, baik saat kunjungan dari wisatawan, perguruan tinggi, maupun pemerintah. Di samping menjual atraksi wisata, masyarakat pun memberikan pelayanan kepada para wisatawan untuk mencoba memainkan gejog lesung tersebut. Selain itu, terdapat juga wiwitan yang merupakan selamatan atas rasa syukur petani pada Dewi Sri dikarenakan waktu panen telah tiba sebagai bentuk berbagi rejeki dari Sang Pencipta. Keterlibatan wisatawan dalam kegiatan wiwitan masih tergolong rendah dan warga masih dalam proses perencanaan untuk meningkatkan partisipasi aktif wisatawan dalam wiwitan sebagai daya tariknya. Kegiatan lainnya adalah kirab budaya dimana masyarakat mengumpulkan hasil-hasil pertanian berupa sayur-mayur dan buah-buahan yang disusun dalam suatu gunung. Mereka akan berkeliling desa sambil membawa gunung tersebut dan diakhiri dengan aktivitas memperebutkan hasil bumi dalam gunung tersebut. Kirab budaya adalah salah satu kegiatan adat yang menarik minat wisatawan sebab mereka diperbolehkan berebut hasil bumi bersama warga.

Desa Wisata Pulesari mengembangkan seni kerajinan untuk meningkatkan daya tarik wisata. Desa Wisata Pulesari memiliki kesenian yang inovatif yang menjadi khas daerah tersebut yaitu Tari Salak. Tari tersebut merupakan tarian khas dari Desa Pulesari yang dimainkan oleh remaja putra dan putri. Remaja putri menari sambil membawa pelepah salak dan remaja putra yang membawa gunung salaknya. Terdapat burung pungkar di atas gunung tersebut sebagai simbol burung yang identik dengan budidaya salak yakni membantu penyerbukan dan memakan hama tanaman salak. Keunikan lain dari

tarian ini adalah penari pun mengenakan kostum dari pelepah daun salak. Selain itu, seragam yang berwarna hijau juga menggambarkan wisata agro yang ada di Pulesari. Tarian ini diiringi oleh gamelan yang dimainkan oleh masyarakat setempat. Selama ini, tarian Salak dipromosikan melalui *youtube* untuk mengembangkan pemasaran di Desa wisata Pulesari.

Inovasi Wisata Pendidikan Agro

Masyarakat di desa wisata Puton tidak hanya menawarkan keindahan alam berbasis pertanian tetapi juga memfasilitasi kegiatan pendidikan agro misalnya budidaya tanaman pangan dan kebun, budidaya perikanan, dan perawatan ternak. Dalam kegiatan wisata agro, masyarakat berusaha mengembangkan budidaya sayuran organik dengan didampingi oleh PPL. Akan tetapi, dalam perkembangannya hingga tahun ini kegiatan wisata ini belum banyak dilakukan di Puton. Berbeda dengan Puton, Desa Wisata Pulesari lebih mendalami tentang kegiatan wisata agro. Terdapat empat macam kegiatan wisata pendidikan agro di Desa Wisata Pulesari di antaranya budidaya salak, membajak dan menanam padi, memandikan domba atau sapi, dan budidaya ikan. Masyarakat memiliki inovasi yang menggabungkan antara kegiatan pertanian mereka dan kegiatan wisata. Mereka menawarkan kegiatan budidaya salak yang meliputi proses penanaman, pembuahan, pemupukan, dan pemetikan. Selain budidaya tanaman, peternakan pun menjadi perhatian masyarakat untuk dikembangkan. Sebagai hasilnya, mereka membuat program memandikan domba atau Kegiatan wisata tersebut meliputi paket pelestarian ikan, paket menangkap ikan untuk anak dan dewasa, paket memancing, dan paket memasak ikan. Dalam hal ini, terjadi keberlanjutan antar paket. Wisatawan tidak hanya belajar tentang teknik budidaya di lahan tetapi secara tidak langsung mereka juga mendapat pengetahuan tentang proses pasca-panen.

Inovasi Kerajinan Pertanian Non-Pangan

Desa Wisata Puton menyediakan produk kerajinan berupa batik dan kepong. Untuk kerajinan batik, keunggulan produk Desa Wisata Puton adalah menggunakan pewarnaan batik dilakukan secara alami. Bahan-bahan yang digunakan dalam produksi berasal dari

kekayaan alam di Puton. Sementara itu, masih terdapat kelemahan dari segi sumberdaya manusia dalam hal pemasaran khususnya untuk kerajinan kepong. Ketertarikan wisatawan dapat ditingkatkan melalui sosialisasi kepada masing-masing organisasi masyarakat. Kedua kerajinan tersebut dapat digunakan sebagai sarana promosi produk wisata. Di sisi lain, baik untuk batik maupun kepong, terdapat banyak pesaing. Lebih lagi, penggunaan kepong yang kini digantikan oleh terpal membuat permintaan pasar akan kepong menurun drastis. Hal tersebutlah yang menjadi tantangan bagi masyarakat dalam mempertahankan bahkan mengembangkan produk kerajinan unggulan mereka. Di sisi lain, masyarakat Desa Wisata Putlesari membuat berbagai kerajinan dari sampah untuk kemudian dijual kepada wisatawan. Sampah plastik menjadi bahan dasar untuk membuat tas atau dompet yang unik. Akan tetapi, kegiatan tersebut belum mendapatkan fokus utama dari masyarakat dan masih tergolong jarang.

Inovasi Produk Olahan Pangan Lokal

Desa wisata Puton memiliki keunggulan dalam memproduksi olahan pangan lokal aneka keripik. Akan tetapi, kelemahannya terdapat pada sistem manajemen usaha yang masih dikelola secara individu. Sebagian masyarakat pun masih belum memiliki ijin pangan industri rumah tangga (PIRT). Masyarakat pun berupaya untuk menjual produk olahan mereka sendiri dengan cara mendirikan warung-warung di dalam desa wisata yang dikelola oleh pokdarwis. Mereka juga menjual produk tersebut ke warung-warung di desa lainnya di sekitar Puton walaupun terdapat saingan dengan modal besar dan pengepakan menarik yang disertai dengan label. Desa Wisata Pulesari mengembangkan produk olahan pangan lokal berupa olahan salak dan jahe sereh (jeser). Olahan salak tersebut dikelola oleh kelompok dasawisma untuk menjadi beberapa produk inovatif khas Pulesari antara lain bakpia salak, dodol salak, gudeg salak, dan keripik salak. Selain itu, dasawisma pun mengelola jeser yang disajikan sebagai minuman khas Desa Wisata Pulesari. Wisatawan dapat menyaksikan proses pengolahan produk-produk tersebut. Selama ini, olahan salak menjadi daya tarik yang besar bagi wisatawan untuk dikonsumsi dan juga dipelajari proses pengolahannya.

Keterlibatan Masyarakat dan Stakeholders dalam Mengembangkan Inovasi Kegiatan Wisata di Desa Wisata Puton dan Pulesari

Seluruh lapisan masyarakat di desa wisata Puton dan Pulesari mulai dari remaja, dewasa hingga orang tua berpartisipasi dalam kegiatan wisata melalui pokdarwis, kelompok tani, PKK, dan karang taruna. Untuk kegiatan adat, masyarakat pun terlibat dalam persiapan dan juga pelaksanaannya baik di Desa Wisata Puton maupun Pulesari. Di Puton, petani terlibat sebagai tim penyelenggara inti wiwitan dan ibu-ibu membantu mempersiapkan hidangannya. Pemuda biasanya turut membantu sebagai pramusaji kepada para tamu undangan yang hadir. Di Puton, seluruh masyarakat selalu aktif dalam perayaan kirab budaya dan wiwitan. Mereka juga menjalin kerjasama dengan pihak keraton untuk menyemarakkan kirab budaya. Pasukan *lombok abang* dari keraton membantu masyarakat dalam kegiatan baris-berbaris. Desa Wisata Pulesari pun menjalin kerjasama dengan pihak eksternal misalnya mahasiswa ISI untuk pementasan Tari Salak.

Untuk pendidikan agro, tokoh masyarakat di Desa Puton turut melibatkan peran aktif PPL dan pemerintah. Dalam wisata pertanian, tokoh masyarakat terlibat dalam pertemuan rutin yang diselenggarakan setiap bulan dan juga pertemuan di saat insidental. Dalam menjalankan aktivitas pertanian, petani dibantu oleh PPL yang berperan sebagai komunikator, organisator, fasilitator dan motivator serta perantara antara petani dan Dinas Pertanian. Untuk kegiatan wisata pertanian, Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata mengunjungi desa wisata secara rutin paling tidak sekali dalam setahun.

Di Pulesari, masyarakat pun bekerjasama dengan PPL dan kelompok tani untuk seluruh kegiatan wisata pendidikan. Dalam kegiatan budidaya salak, membajak padi, memandikan sapi, dan budidaya ikan, PPL terlibat dalam memberikan penyuluhan dan pelatihan rutin setiap bulannya. Salah satu contoh pendampingan yang dilakukan adalah mendampingi peternak dalam menjaga kesehatan ternak sehingga tidak mudah sakit bahkan mati ketika ternak tersebut dimandikan oleh wisatawan. Selain itu, untuk menjaga keberlanjutan dari kegiatan wisata tersebut, kelompok tani pun berkoordinasi untuk kegiatan budidaya ternak karena dengan bertambahnya jumlah ternak, jumlah wisatawan pun dapat ditingkatkan.

Di antara kedua jenis wisata kerajinan non-pangan, keterlibatan masyarakat dan *stakeholder* lebih banyak terdapat pada kegiatan membatik. Tidak hanya UMKM, Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM pun turut mendukung berjalannya usaha masyarakat Puton. Di bawah UMKM, mereka mengadakan rapat koordinasi yang dilakukan setiap bulan. Pemerintah pun mendampingi mereka untuk saat-saat insidental misalnya untuk memperoleh paten. Di sisi lain, kerajinan kepong masih belum mendapat perhatian yang signifikan dari masyarakat dan pemerintah dan bahkan kurang menarik minat para wisatawan. Pihak yang selama ini terlibat dalam produksi kepong adalah para lansia di Desa Wisata Puton. Alasan mengapa kepong masih diproduksi ialah untuk melestarikan kerajinan daerah dengan sumberdaya alam lokal yang kini mulai tergantikan oleh tikar dari bahan plastik.

Keterlibatan masyarakat dan stakeholder pun terlihat dalam upaya mendukung perkembangan wisata olahan pangan lokal di Desa Wisata Puton dan Pulesari. Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM mendukung masyarakat di desa wisata melalui kemudahan akses informasi, pengembangan, dan pelatihan olahan pangan lokal. Sebagai contoh, Dinas Pertanian pernah memberikan pelatihan yang menunjang pengolahan produk dan bantuan dana bergulir. Masyarakat memperoleh dana dengan jumlah maksimal Rp5.000.000,00 yang diberikan pada seorang pengusaha olahan pangan lokal. Penerima dana harus melunasi bantuan tersebut dalam waktu satu hingga dua tahun. Setelah itu, dana kembali dipinjamkan kepada pengusaha lain yang memerlukan bantuan modal usaha. Sistem tersebut berlaku untuk usaha produk olahan peyek, keripik tempe, dan tempe. Frekuensi keterlibatan masyarakat dalam pengembangan usaha olahan pangan lokal ini sangat tinggi karena setiap hari mereka memproduksi produk pangan lokal dan pemerintah desa pun mendukung akses kegiatan dan juga penyediaan lokasi.

Kelembagaan yang Medukung Desa Wisata

Kelembagaan Pertanian

Kelompok tani merupakan lembaga pertanian unit terkecil yang terdiri dari 20-30 anggota yang berada pada lingkungan yang berdekatan, baik Rukun Tetangga (RT), maupun Rukun Warga (RW). Dalam satu dusun terdapat beberapa kelompok tani, tergantung jumlah petani yang ikut di dalamnya. Kegiatan kelompok tani di desa wisata

sama seperti kegiatan kelompok tani di daerah lainnya, antara lain melakukan rapat rutin, mengadakan diskusi informal, dan mengorganisir pelatihan kelompok. Kesepakatan-kesepakatan yang ada di dalam kelompok tani terkait dengan pengolahan lahan dengan traktor secara bergantian, membuat pupuk dan pestisida organik. Mengingat keberadaan pertanian sebagai sektor terpenting dalam Desa Wisata Agro, pengurus Desa Wisata berkoordinasi dengan kelompok tani terkait wisata petik hasil pertanian secara langsung, kegiatan membajak sawah dengan kerbau, memandikan kambing, dan kegiatan pertanian lainnya yang dirasa unik bagi wisatawan.

Terdapat juga kelompok wanita tani merupakan gabungan petani wanita dan istri petani yang berkelompok untuk membantu usahatani suaminya, baik mengolah hasil pertanian untuk dapat memberikan produk yang lebih bernilai maupun menanam tanaman sayuran di pekarangan. Kegiatan yang ada di dalamnya mendukung bakat perempuan dalam rumah tangga, seperti memasak, membuat makanan untuk bisa disajikan kepada wisatawan, dan mengolah hasil panen untuk bisa menjadi oleh-oleh makanan untuk wisatawan. Selain itu, mereka juga dilatih menanam sayuran di lahan pekarangan untuk menjadi bahan baku panganan olahan mereka.

Di tingkat desa, terdapat Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Sesuai dengan kepanjangannya, lembaga ini merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani di tingkat Desa. Keberadaan Lembaga ini untuk mengkoordinasi bantuan dan keberadaan informasi tentang pertanian di tingkat Desa. Sementara itu, di tingkat kecamatan, Balai Penyuluhan Pertanian secara langsung bertanggung jawab terhadap kegiatan pertanian di sebuah Kecamatan. Terdapat satu Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk satu Desa, dan bertanggungjawab terhadap kegiatan penyuluhan di Desa tersebut. Tugas utama Lembaga ini ada mendiseminasikan informasi inovasi, mengadakan pelatihan-pelatihan yang mendukung kegiatan pertanian, dan melakukan penyuluhan, baik di tingkat kelompok tani maupun gabungan kelompok tani.

Di tingkat yang lebih tinggi yaitu kabupaten, Dinas Pertanian merupakan lembaga yang bertanggungjawab akan ketersediaan bahan baku untuk kegiatan budidaya pertanian di wilayahnya. Selain terkait dengan kegiatan *on- farm*, Dinas Pertanian juga bertanggungjawab untuk kegiatan pascapanen dan pemasaran produk hasil pertanian.

Kelembagaan Ekonomi

Dusun memiliki kelembagaan yang fokus pada kebutuhan ekonomi masyarakat antara lain koperasi, PKK, dan UMKM. Koperasi merupakan lembaga formal masyarakat yang menyediakan permodalan, dan di beberapa tempat juga bertanggungjawab untuk kegiatan pemasaran. Kegiatan utama dari koperasi yaitu keberadaan simpan pinjam, yang dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan modal bagi usahanya, baik usaha pertanian maupun usaha UMKM. Selain itu, terdapat pula PKK yang setara dengan koperasi untuk mengelola arisan warga. Melalui PKK, ibu-ibu yang memiliki tujuan yang sama bergabung untuk mengembangkan UMKM. Unit ini merupakan unit usaha masyarakat dalam memproduksi olahan pangan untuk dapat dijual kepada wisatawan. UMKM juga bertanggungjawab terhadap keberadaan oleh-oleh untuk wisatawan, dengan produk yang terus menerus dibuat. Namun demikian, tantangan utama keberadaan UMKM ini yaitu terkait keberadaan ijin dan serifikasi kesehatan bagi usaha mereka, baik PIRT maupun BPOM.

Di tingkat kabupaten, kelembagaan tertinggi berada pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi. Lembaga ini merupakan Lembaga tingkat Kabupaten yang bertanggungjawab terhadap sertifikasi produk UMKM yaitu PIRT. Kelembagaan ini sangat membantu kelompok wanita tani terkait pelatihan olahan pangan dan membantu pemasaran serta promosi. Dalam hal ini, terdapat keterkaitan antarlembaga.

Kelembagaan Sosial Budaya

Pedukuhan, RT, dan RW merupakan kelembagaan di tingkat dusun yang aktif dalam pengembangan desa wisata baik di Puton maupun Pulesari. Di Kabupaten Sleman pedukuhan membawahi Rukun Warga (RW) yang selanjutnya membawahi beberapa Rukun Tetangga (RT). Akan tetapi, untuk Kabupaten Bantul, pedukuhan langsung membawahi RT tanpa adanya RW. Kelompok lain di tingkat pedukuhan adalah pokdarwis atau Kelompok Sadar Wisata yang bersinggungan langsung dengan kegiatan Desa Wisata. Sesuai dengan Buku Panduan Pokdarwis yang disusun oleh Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2012, keberadaan Pokdarwis dalam konteks pengembangan destinasi pariwisata telah berperan sebagai salah satu unsur penggerak dalam turut mendukung terciptanya lingkungan dan suasana yang

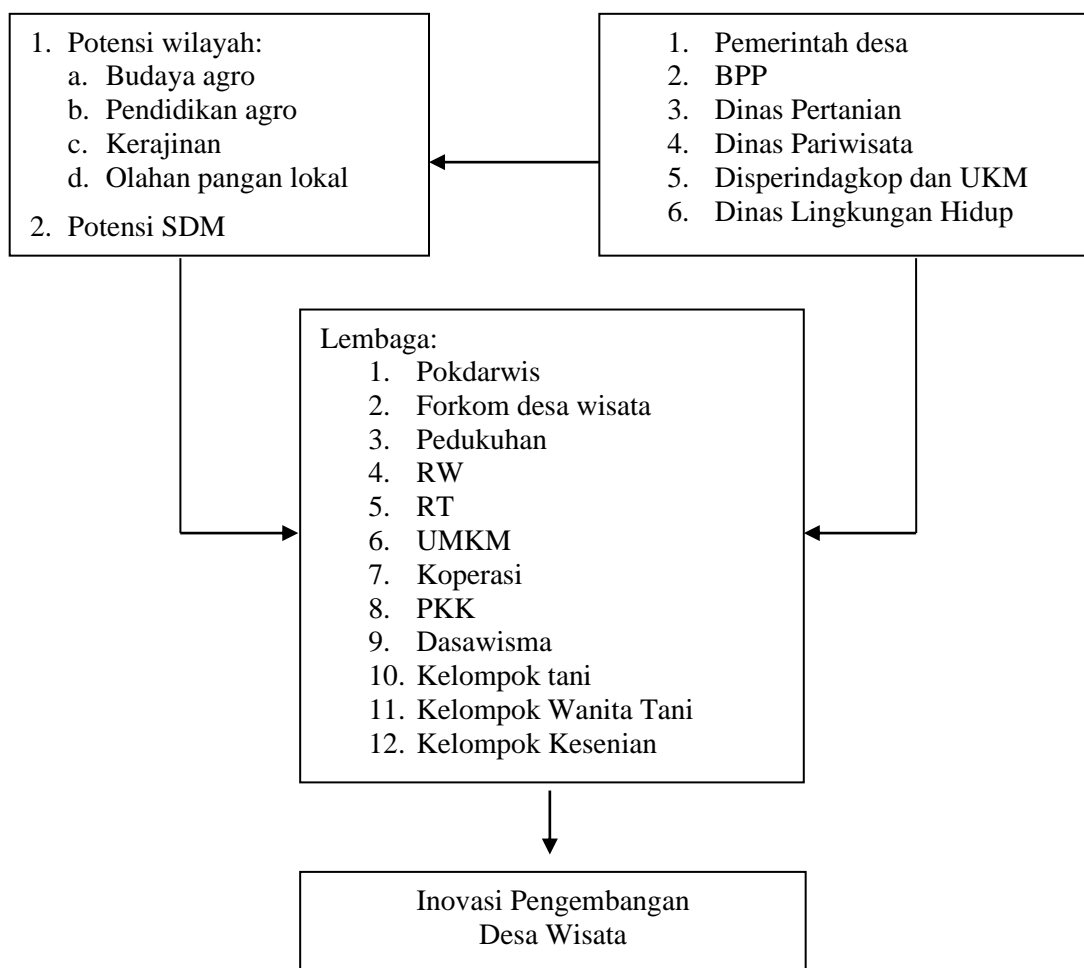
kondusif untuk perkembangan destinasi pariwisata demi terwujudnya Sapta Pesona. Aktivitas sosial pokdarwis berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan, meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan, meningkatkan nilai manfaat kepariwisataan bagi masyarakat/anggota Pokdarwis, dan menyukseskan pembangunan kepariwisataan. Di samping itu, ibu-ibu pun berkoordinasi melalui kelompok Dasawisma yang meliputi 10 kepala keluarga untuk mempermudah jalannya suatu program. Kegiatannya diarahkan pada peningkatan kesehatan keluarga. Bentuk kegiatannya seperti arisan (PKK), pembuatan jamban, sumur, kembangkan dana sehat (PMT, pengobatan ringan, membangun sarana sampah dan kotoran). Kelompok Dasa Wisma adalah kelompok yang terdiri dari 10–20 kepala keluarga (KK) dalam satu RT. Setelah terbentuk kelompok, maka diangkatlah satu orang yang memiliki tanggung jawab sebagai ketua.

Selain mengunggulkan wisata agro, Desa Wisata Agro juga menyajikan kegiatan kesenian sebagai penambah daya tarik bagi wisatawan. Sekelompok masyarakat dengan minat dan bakat yang sama akan menyajikan kegiatan kesenian untuk menjamu wisatawan di Desa Wisata. Kelembagaan sosial budaya tingkat desa yang mendukung kegiatan wisata hanya Forum Komunikasi Desa Wisata. Forum ini terdiri dari pengelola desa wisata pada tingkat Dusun, yang kemudian berdatu di Tingkat Desa. Keberadaan forum ini adalah untuk menselaraskan kegiatan wisata di Tingkat Desa untuk mempermudah komunikasi dan organisasi Desa Wisata oleh Dinas terkait sehingga dapat memajukan Desa Wisata di lokasi masing-masing. Di samping itu, kelembagaan yang terkait dengan keberadaan Desa Wisata di Tingkat Kabupaten yaitu Dinas Pariwisata. Lembaga ini bertanggungjawab langsung terhadap keberlangsungan Desa Wisata, kegiatan yang ada, pendanaan, hingga promosi.

Keberadaan Desa Wisata di suatu wilayah tentu akan mendatangkan wisatawan yang akan datang ke wilayah tersebut. Persoalan sampah menjadi masalah yang umum terjadi, jika dalam sebuah tempat, berkumpul banyak orang dan menyelenggarakan kegiatan tertentu. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran untuk membantu dan mengedukasi pengelola Desa Wisata sekaligus masyarakat yang tinggal di sekitarnya untuk bisa mengelola sampah yang dihasilkan dari kegiatan wisata.

Strategi Pengembangan Inovasi melalui Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata

Untuk menanggulangi kelemahan di masing-masing desa wisata dalam upaya pengembangan inovasi wisata, diperlukan strategi yang dapat diterapkan oleh masyarakat desa wisata. Kegiatan pemberdayaan melalui kelompok menjadi solusi utama dalam pengembangan ini. Lembaga di desa wisata diketahui berperan aktif dalam menghimpun partisipasi masyarakat setempat. Untuk itu, keberadaan dan peran lembaga harus diperkuat. Masing-masing lembaga di desa wisata yang didukung oleh keragaman potensi desa wisata dan potensi sumberdaya manusia didukung oleh stakeholders dan bersama-sama menguatkan kelembagaan yang ada di desa wisata.



Gambar 1. Strategi pengembangan inovasi desa wisata

Dalam hal ini, peran pokdarwis untuk mempersatukan peran masing-masing lembaga dalam koordinasi perlu dilakukan melalui rapat internal masing-masing perwakilan lembaga. Dengan demikian, inovasi yang telah ada dapat dipertahankan di tengah-tengah ancaman eksternal maupun kelemahan internal. Di sisi lain, masyarakat melalui pokdarwis dapat memaksimalkan potensi yang ada dan menciptakan inovasi berikutnya yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan wisatawan. Dengan demikian, diperlukan juga koordinasi yang baik dengan desa wisata lainnya untuk meminimalisir persaingan dan guna meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Inovasi yang dikembangkan di Desa Wisata Puton dan Pulesari meliputi kegiatan wisata agro, pendidikan agro, kerajinan, dan olahan pangan. Wisata agro meliputi kegiatan geog lesung, wiwitan, kirab budaya, tari salak, pagar bumi, dan sadranan. Kegiatan pendidikan agro antara lain budidaya tanaman, budidaya, ternak, dan budidaya ikan. Produk kerajinan yang dikembangkan yaitu batik, kepong, dan aneka olahan sampah plastik. Olahan pangan yang diproduksi antara lain aneka keripik; olahan salak yaitu bakpia, dodol, gudeg, dan keripik; serta minuman jahe sereh. Model pemberdayaan masyarakat di kawasan desa wisata berbasis penguatan kelembagaan yang ada di desa wisata. Kelembagaan internal yang terlibat aktif dalam pengembangan desa wisata antara lain pokdarwis, forkom desa wisata, pedukuhan, RT, RW, UMKM, koperasi, PKK, dasawisma, kelompok tani, kelompok wanita tani, dan kelompok kesenian. Pengembangan kelembagaan di masing-masing desa wisata dipusatkan pada pokdarwis sebagai pusat pengelolaan seluruh kegiatan desa wisata yang dikoordinasikan dengan seluruh kelembagaan desa.

Berdasarkan kesimpulan dan strategi pengembangan inovasi kegiatan desa wisata, pokdarwis dibawah binaan Dinas Pariwisata dan sebagai pengelola utama kegiatan wisata, harus mampu mengelola sumberdayanya dengan baik. Intensitas pelatihan yang melibatkan pihak luar pun lebih dimaksimalkan sebab letihan menjelang pementasan saja tidak cukup. Selain itu, mereka pun harus memiliki rancangan program terkait penciptaan

inovasi atau modifikasi inovasi di setiap tahunnya, agar produk wisata yang dihasilkan tetap unggul dan wisatawan tidak jenuh dengan paket yang ditawarkan.

Model pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata agro adalah melibatkan kelembagaan masyarakat lokal yakni: pokdarwis, forkom desa wisata, pedukuhan, RT, RW, UMKM, koperasi, PKK, dasawisma, kelompok tani, kelompok wanita tani, dan kelompok kesenian. Kelembagaan tersebut disusun dalam struktur organisasi yang jelas dan dari tingkat kabupaten sampai tingkat yang terbawah yakni RT, di bawah koordinasi Dinas Pariwisata (di tingkat kabupaten) dan Kelompok Sadar Wisata (di tingkat desa).

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, AAI., E. Martono., Muhamad. 2017. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata dan implikasinya terhadap ketahanan sosial budaya wilayah (studi di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional* 23(1) : 1-16.
- Astuti, M. T. 2014. Potensi agrowisata dalam meningkatkan pengembangan pariwisata. *Jurnal Destinasi Kepariwisataan Indonesia* 1(1): 51-57.
- Chamdani, Usman. 2008. Aspek komunikasi dalam pengembangan agrowisata. *Jurnal Kepariwisataan Indonesia* 3(3): 381-394.
- Damanik J dan HF Weber. 2006. *Perencanaan Ekowisata*. Yogyakarta : Andi.
- Fadhila, A.P. 2016. Keefektifan Official Weblog sebagai Media Promosi Desa WisataSalak Pondoh Pulesari Kecamatan Turi Kabupaten Sleman
- Inskeep, Edward. 1991. *Tourism Planning An Integrated and Sustainable Development Approach*. New York : Van Nostrand Reinhold.
- Kementerian Pertanian. 2017. *Statistik Lahan Pertanian Tahun 2012-2016*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian, Jakarta.
- Murdiyanto, Eko. 2011. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisataKaranggeneng, Purwobinangun, Pakem, Sleman. *Program Studi Agribisnis UPN' Veteran' Yogyakarta* 7(2): 91-101.
- Nuryanti, Wiendu. 1993. *Concept, perspective and challenges*. Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

- Pitana, Gede dan Gayatri Putu. 2005. Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta : Andi.
- Putra, K. D. C. 2008. Strategi *public relation* pariwisata Bali. Jurnal Ilmu Komunikasi 5(1) : 41-66.
- Sunaryo, Bambang. 2012. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata “Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia”. Yogyakarta : Gava Media.
- Supartini, 2012. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi desa wisata Ketingan Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta. Jurnal Nasional Pariwisata 4(1): 57-71.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS MODAL SOSIAL PADA PENGEMBANGAN KAKAO DI TANEN, HARGOBINANGUN, PAKEM, SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Teguh Kismantoroedji^{1*}, Singgah Sima Dewi¹, dan Nanik Dara Senjawati¹

¹Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

Jalan Pajajaran (SWK 104) Condongcatur, Yogyakarta

*Email : kismantoroedji@upnyk.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengkaji pengembangan kakao di Dusun Tanen, (2) Mengkaji pemberdayaan Kelompok Tani Coklat Tanen (KTC), dan (3) Mengkaji elemen modal sosial pada pemberdayaan Kelompok Tani Coklat Tanen (KTC). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pelaksanaan studi kasus, dan pengambilan informan secara *purposive dan snowball*. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumen. Keabsahan data menggunakan triangulasi. Kesimpulannya bahwa (1) Pengembangan kakao cenderung stagnan, tanaman terserang penyakit, dan produktivitas menurun, (2) Pemberdayaan berdampak pada peningkatan kapasitas dan sarana fisik, namun belum bisa memandirikan Kelompok Tani Coklat Tanen (KTC), (3) Norma, kepercayaan, dan jaringan yang dimiliki oleh anggota Kelompok Tani Coklat Tanen (KTC), Dinas Pertanian Kabupaten Sleman, dan Klinik Agromina Bahari (KAB) bersifat asosiatif dan hubungan ketiganya bermotif redistribusi.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Modal Sosial, Pengembangan Kakao.

PENDAHULUAN

Luas lahan kakao (*Theobroma Cacao*) di Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam beberapa puluh tahun terakhir. Menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan, sampai dengan tahun 2014 area perkebunan kakao tercatat seluas 1.719.087 ha, dengan total produksi 709.331 ton. Total luas lahan kakao tersebut, sebagian besar (87,4%) dikelola oleh rakyat. Selebihnya dikelola perkebunan besar negara (6,0%) dan perkebunan besar swasta (6,7%).

Prospek pengembangan kakao masih sangat cerah karena produktivitas tanaman kakao di Indonesia termasuk rendah, hanya 0,3 ton/hektar/tahun, padahal potensinya bisa mencapai 2 ton/hektar/tahun. (Wirya, 2017).

Melihat potensi kakao yang cerah, salah satu daerah melakukan pengembangan komoditas kakao yaitu Dusun Tanen, Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY. Dusun Tanen saat ini tercatat memiliki lahan kakao seluas 99.200 m² dengan 3.945 pohon.

Ide pengembangan kakao muncul pada tahun 2006 oleh tiga orang visioner yang kemudian menginisiasi masyarakat untuk melakukan penanaman kakao di sela-sela rumah dengan bibit kakao dari Aceh dan membentuk Kelompok Tani Coklat Tanen (KTC).

Penanaman kakao dilakukan dengan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki masyarakat, akibatnya praktik budidaya yang dilakukan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) budidaya kakao yang semestinya yang berpengaruh pada tumbuh kembang tanaman kakao, kemudian salah satu visioner menggandeng pihak-pihak eksternal untuk membantu pengembangan kakao di Dusun Tanen, diantaranya adalah Dinas Pertanian Kabupaten Sleman dan Klinik Agromina Bahari (KAB) yang kemudian memberikan program-program pendampingan dan pembinaan mulai dari budidaya hingga pasca panen.

Namun, yang terjadi anggota Kelompok Tani Coklat Tanen (KTC) belum mandiri. Pendampingan dari Dinas Pertanian Kabupaten Sleman dan Klinik Agromina Bahari (KAB) stagnan pada tahun 2015 dan berhenti pada tahun 2016, sedangkan Kelompok Tani Coklat Tanen (KTC) belum siap dan masih bergantung, sehingga kondisi saat ini keberlanjutan hanya pada pemanfaatan bangunan fisik, motivasi petani masih rendah dan kurang peduli dalam hal pemeliharaan, mereka tidak lagi menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan, pemeliharaan tanaman tidak dilakukan, sehingga tanaman rentan terkena hama dan penyakit yang mengakhibatkan produktivitasnya menurun.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu (1) Bagaimana pengembangan kakao di Dusun Tanen? (2) Bagaimana pemberdayaan Kelompok Tani Coklat Tanen (KTC) yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sleman dan Klinik Agromina Bahari (KAB)? (3) Bagaimana elemen modal sosial pada pemberdayaan Kelompok Tani Coklat Tanen (KTC) yang dilakukan oleh Dinas Pertanian

Kabupaten Sleman dan Klinik Agromina Bahari (KAB)?). Dengan tujuan penelitian yaitu (1) Mengkaji pengembangan kakao di Dusun Tanen (2) Mengkaji pemberdayaan Kelompok Tani Coklat Tanen (KTC) yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sleman dan Klinik Agromina Bahari (KAB) (3) Mengkaji elemen modal sosial pada pemberdayaan Kelompok Tani Coklat Tanen (KTC) yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sleman dan Klinik Agromina Bahari (KAB).

LANDASAN TEORI

Pengembangan Perkebunan Kakao

Pembangunan perkebunan kakao yang berkelanjutan harus mampu meningkatkan kesejahteraan manusia. Peningkatan kesejahteraan dapat dicapai dengan dipenuhinya kebutuhan pangan, pakaian, perumahan, transportasi, kesehatan, dan pendidikan melalui penggunaan sumber daya yang efisien (Harris dalam Damanik, 2010).

Sasaran pembangunan perkebunan kakao adalah meningkatkan pendapatan petani. Berikut ini arahan kebijakan dan langkah operasional yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dan pengembang kakao, (1) Penyediaan teknologi mutakhir secara lokal, (2) Tenaga pembina dan kelembagaannya, (3) Kegiatan pelatihan dan penyuluhan, (4) Dukungan kebijakan pemerintah, (5) Peningkatan produktivitas kebun kakao (6) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani, dan (7) Kelembagaan ekonomi petani.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu memanfaatkan lingkungan untuk mencapai tujuan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*), tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan (Friedman dalam Totok dan Poerwoko, 2012).

Tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat terdiri dari tujuh kegiatan pokok, yakni :

1. Penyadaran

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang “keberadaannya”, baik keberadaannya sebagai individu dan anggota masyarakat, kondisi lingkungan yang menyangkut lingkungan fisik atau teknis, sosial-budaya, ekonomi, dan politik.

2. Menunjukkan adanya masalah

Kondisi yang tidak diinginkan yang kaitannya dengan keadaan sumberdaya, lingkungan fisik atau teknis, sosial-budaya dan politis, kelemahan internal dan ancaman eksternalnya.

3. Membantu pemecahan masalah

Sejak analisis akar masalah sampai pemecahan masalah yang dapat dilakukan sesuai dengan kondisi internal (kekuatan, kelemahan) maupun kondisi eksternal (peluang dan ancaman) yang dihadapi.

4. Menunjukkan pentingnya perubahan

Perubahan yang sedang dan akan terjadi dilingkungannya, baik lingkungan organisasi dan masyarakat (lokal, nasional, regional dan global).

5. Melakukan pengujian dan demonstrasi

Sebagai bagian dari implementasi perubahan terencana yang berhasil dirumuskan. Disamping itu, uji-coba juga diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang beragam alternatif yang paling “bermanfaat” dengan resiko atau korbanan yang terkecil.

6. Memproduksi dan publikasi informasi

Informasi yang berasal dari “luar” (penelitian, kebijakan, produsen atau pelaku bisnis, dll.) maupun yang berasal dari dalam (pengalaman, *indigenous technology*, maupun kearifan tradisional dan nilai-nilai adat yang lain) yang sesuai dengan karakteristik (calon) penerima manfaat.

7. Melaksanakan pemberdayaan atau penguatan kapasitas

Pemberian kesempatan kepada kelompok lapisan bawah (*grassroot*) untuk bersuara dan menentukan sendiri pilihan-pilihannya (Lippit dalam Totok dan Poerwoko, 2012).

Elemen-Elemen Modal Sosial

Modal sosial menciptakan perbedaan dalam kehidupan orang, positif dan negatif. Jika orang ingin membantu sesamanya, mereka perlu merasa senang melakukannya, yang berarti mereka perlu merasa bahwa mereka memiliki kesamaan satu sama lain. Jika memiliki kesamaan nilai, mereka lebih cenderung bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai berikut :

Modal sosial sebagai bagian dari organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma, dan jaringan, yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan terkoordinasi.

(Putnam dalam Field, 2016).

Berdasarkan pernyataan di atas, elemen modal sosial terdiri dari norma, kepercayaan, dan jaringan yang akan diuraikan dibawah ini :

1. Norma

Norma terdiri dari pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang (Komunitas). Norma dapat bersumber dari agama, panduan moral maupun standar-standar sekuler serta halnya kode etik professional (Putnam dalam Wuysang, 2002).

2. Kepercayaan

Elemen modal sosial yang menjadi pusat kajian Fukuyama adalah kepercayaan karena menurutnya sangat erat kaitannya antara modal sosial dengan kepercayaan sebagai berikut :

Unsur terpenting dalam modal sosial adalah kepercayaan yang merupakan perekat bagi langgengnya kerjasama dalam kelompok masyarakat. Dengan kepercayaan orang-orang akan bisa bekerjasama secara lebih efektif.

(Fukuyama dalam Wuysang, 2014).

Dengan demikian kepercayaan bagi kelompok tani adalah menjadi sebuah aset dalam peningkatan aktivitas kelompok tani itu sendiri.

3. Jaringan

Jaringan sosial terjadi berkat adanya keterkaitan antara individu dan komunitas. Jaringan sosial yang kuat antara sesama anggota kelompok mutlak diperlukan dalam menjaga sinergi dan kekompakan (Putnam dalam Wuysang, 2014).

Modal sosial diwarnai oleh 3 pola timbal balik dan saling menguntungkan. Menurut Polanyi (1968) dalam melakukan timbal balik ada 3 motif yang ingin dicapai oleh partisipan yaitu:

- a. Resiprositas, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi, tetapi kebutuhan ekonomi yang tidak dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan komersial.
- b. Redistribusi, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi, tetapi kebutuhan ekonomi yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan komersial.
- c. Pertukaran pasar, yaitu usaha mendapatkan keuntungan komersial, suatu keuntungan yang diperoleh melalui tawar menawar.

Lebih lanjut dikatakan bahwa, resiprositas menjadi ciri sistem ekonomi masyarakat sederhana dan petani tradisional, sedangkan redistribusi menjadi ciri sistem ekonomi masyarakat feodal (Murdiyanto, 2008).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pelaksanaan studi kasus, dan pengambilan informan secara *purposive dan snowball*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumen. Keabsahan data menggunakan triangulasi. Data yang digunakan yaitu data primer meliputi Bendahara Kelompok Tani Coklat Tanen (KTC), Sekretaris Kelompok Tani Coklat Tanen (KTC), Koordinator produksi Kelompok tani Coklat Tanen (KTC), Demisioner Anggota Klinik Agromina Bahari (KAB), dan Staff Bina Usaha Bidang Hortikultura dan Perkebunan Dinas

Pertanian Kabupaten Sleman. Sedangkan data sekunder meliputi arsip Kelompok Tani Coklat Tanen (KTC) dan arsip Klinik Agromina Bahari (KAB).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Kakao di Dusun Tanen

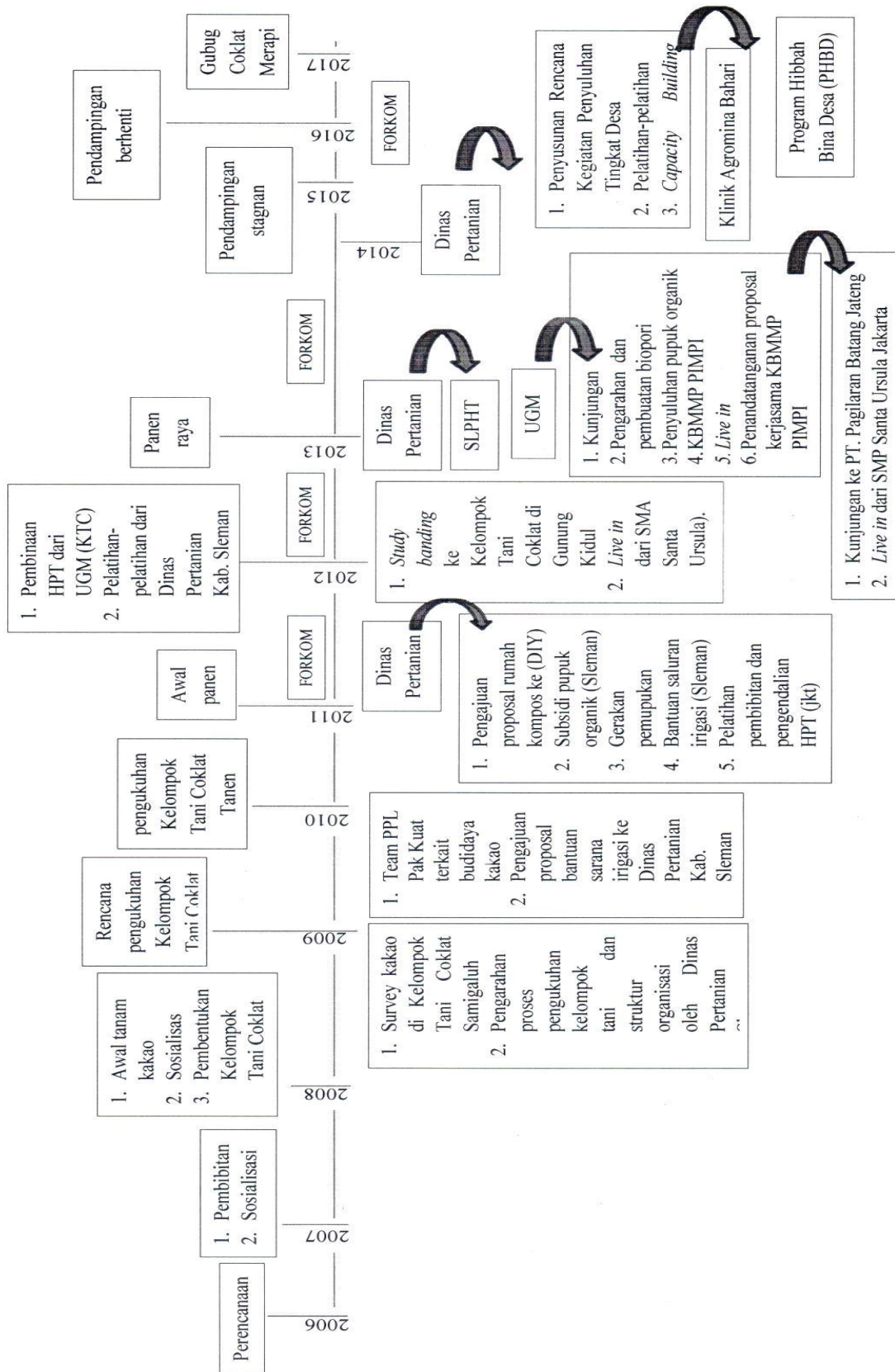
Kegiatan pengembangan kakao berjalan dari tahun 2006 hingga saat ini. Berikut ini **Gambar 1.** adalah *timeline* kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan kakao di Dusun Tanen.

Kegiatan Kelompok Tani Coklat Tanen (KTC) sangat padat di tahun 2013-2014 dengan program-program pembinaan dan pelatihan dari Dinas Pertanian Kabupaten Sleman dan juga kegiatan Kreativitas Bina Masyarakat Mahasiswa Pertanian (KBMMP) dan Program Hibbah Bina Desa (PHBD) yang dilakukan oleh Klinik Agromina Bahari (KAB), tetapi kegiatannya stagnan ditahun 2015 dikarenakan adanya pergantian pendamping lapangan dan pendampingan dari Dinas Pertanian Kabupaten Sleman sempat berhenti satu tahun di tahun 2016.

Pada tahun 2016, Gubug Coklat Merapi mulai di bangun, dan tahun 2017 mulai dibuka untuk pengunjung. Gubug Coklat Merapi merupakan sebuah tempat makan atau tongkrongan yang di buat untuk sentralisasi produk olahan kakao Kelompok Tani Coklat Tanen (KTC) dan target pasarnya adalah para wisatawan. Gubug Coklat Merapi ini berdiri karena semangat dan pemikiran visioner beberapa anggota Kelompok Tani Coklat Tanen (KTC) yang masih bertahan untuk membangun desanya.

Pemberdayaan Kelompok Tani Coklat Tanen (KTC)

Pemberdayaan yang dijalankan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sleman dan Klinik Agromina Bahari (KAB) berdampak pada peningkatan kapasitas Kelompok Tani Coklat Tanen (KTC) dan sarana fisik, tetapi pendampingan terbatas oleh waktu dan SDM, yang dirasakan upaya untuk memberdayakan Kelompok Tani Coklat Tanen (KTC) belum membuat Kelompok Tani Coklat Tanen (KTC) masih bergantung dan belum mandiri sepenuhnya.



Gambar 1. Timeline Kegiatan Pengembangan Kakao di Dusun Tanen

Pendampingan rutin, pelatihan-pelatihan dan pemberian alat-alat budidaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sleman berdampak pada peningkatan kemampuan kelompok tani dalam teknis budidaya kakao begitu juga dengan pelatihan-pelatihan *on farm* sampai dengan *off farm* dan fasilitas bangunan fisik yang dilakukan oleh Klinik Agromina Bahari (KAB). Keberlanjutan hanya pada pemanfaatan fasilitas fisik, sedangkan ilmu yang di berikan pada pelatihan-pelatihan tidak sepenuhnya diterapkan, dan cenderung tidak fokus lagi dalam pemeliharaan kebun.

Pemberdayaan Kelompok Tani Coklat Tanen, dapat dilihat pada **Gambar 2**.

Elemen Modal Sosial Pemberdayaan Kelompok Tani Coklat Tanen (KTC)

Norma

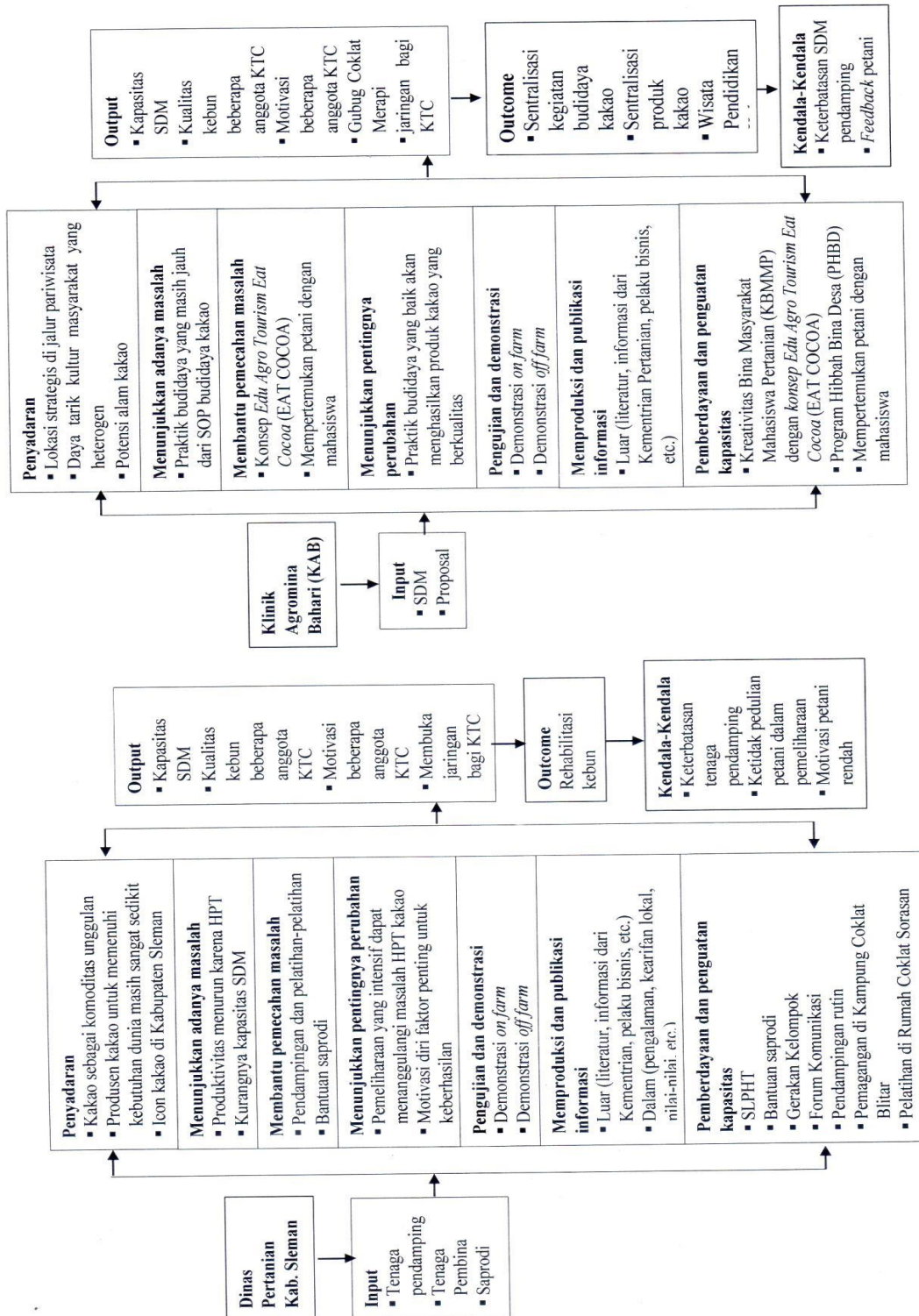
Kelompok Tani Coklat Tanen (KTC), menonjolkan karakter menjunjung tinggi nilai-nilai rukun toleran, cinta kasih, persatuan, kebersamaan dan sistem gotong royong. Kemudian keterbukaan masyarakat dengan orang baru, mereka menerima masukan tetapi ketika ada masukan yang menyimpang dengan budaya, mereka dengan otomatis mereka akan *memprotect*. Selain itu juga rasa keingin tahanan dan belajar yang tinggi, pola pikir yang baik selalu ingin maju dan berkembang, semangat kerja tinggi dan mudah dikoordinasi yang dengan itu mendorong mereka kearah orientasi berkemajuan untuk selalu mencari solusi akan permasalahan yang terjadi terkait dengan pengembangan kakao di Dusun Tanen.

Dinas Pertanian Kabupaten Sleman mempunyai modal sosial berupa norma dalam bentuk kode etik kedinasan begitu juga dengan Klinik Agromina Bahari (KAB) adalah kode etik organisasi berupa bekal arahan untuk menjalin kedekatan bersama masyarakat dengan memposisikan diri menjadi bagian dari masyarakat yang diberdayakan, menjaga sikap dan tingkah laku sehingga terjaga stabilitas hubungan dengan masyarakat Dusun Tanen.

Kepercayaan

Kepercayaan masyarakat terhadap Pengurus Kelompok Tani Coklat Tanen (KTC) dan prospek pengembangan kakao yang dibangun melalui penekanan di pertemuan-pertemuan secara perspektif dan pemberian bukti nyata mengenai keberhasilan beberapa

hal dalam pengembangan kakao, diantaranya meliputi pengolahan produk dan kejelasan harga jual dan pemasaran.



Gambar 2. Pemberdayaan Kelompok Tani Coklat Tanen (KTC)

Masyarakat desa mudah bertumpu dengan Dinas Pertanian Kabupaten Sleman sebagai lembaga formal pemerintahan, sedangkan Klinik Agromina Bahari (KAB) membangun kepercayaan dengan pendekatan secara kultural masyarakat.

Jaringan

Jaringan yang terbangun berupa jaringan-jaringan pemasaran produk kakao dan jaringan pendukung dalam pengembangan kakao yakni instansi dari kedinasan, swasta maupun akademisi.

Elemen-elemen modal sosial yang berupa norma, kepercayaan, dan jaringan dimiliki oleh anggota Kelompok Tani Coklat Tanen (KTC), Dinas Pertanian Kabupaten Sleman, dan Klinik Agromina Bahari (KAB) bersifat assosiatif yang dapat mendekatkan antara ketiganya dalam proses pemberdayaan, dan hubungan antar ketiganya mempunyai motif redistribusi yang membentuk simbiosis-simbiosis yang saling menguntungkan, sehingga penguatan modal sosial sangat penting untuk dilakukan oleh Kelompok Tani Coklat Tanen. Gambaran utuh bisa dilihat pada **Gambar 3**.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Pengembangan kakao cenderung stagnan, tanaman terserang penyakit, dan produktivitas menurun.
2. Pemberdayaan berdampak pada peningkatan kapasitas Kelompok Tani Coklat Tanen (KTC) dan sarana fisik, namun program pemberdayaan belum bisa memandirikan Kelompok Tani Coklat Tanen (KTC).
3. Norma, kepercayaan dan jaringan yang dimiliki oleh anggota Kelompok Tani Coklat Tanen (KTC), Dinas Pertanian Kabupaten Sleman, dan Klinik Agromina Bahari (KAB) bersifat assosiatif dan hubungan antar ketiganya mempunyai motif redistribusi.

SARAN

1. Bagi Kelompok Tani Coklat Tanen (KTC)

Untuk memperbaiki kondisi pengembangan kakao saat ini, beberapa upaya dapat diambil oleh Kelompok Tani Coklat Tanen (KTC), yaitu :

- a. Menjaga keharmonisan internal Kelompok Tani Coklat Tanen (KTC) dengan penguatan modal sosial.
- b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan cara pengurus Kelompok Tani Coklat Tanen (KTC) mengakses kembali program-program sejenis yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sleman dan Klinik Agromina Bahari (KAB) untuk keberlanjutan anggota.
- c. Melakukan pemeliharaan kebun secara rutin dengan meningkatkan peran Pak Jumakir sebagai penyuluh swadaya untuk lebih diintensifkan dalam memberikan pendampingan pada tiap-tiap anggota

2. Bagi Pemerintah

Beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah daerah untuk membantu pengembangan kakao di Dusun Tanen adalah :

- a. Penyediaan alat untuk pengolahan kakao
- b. Penambahan tenaga pembina

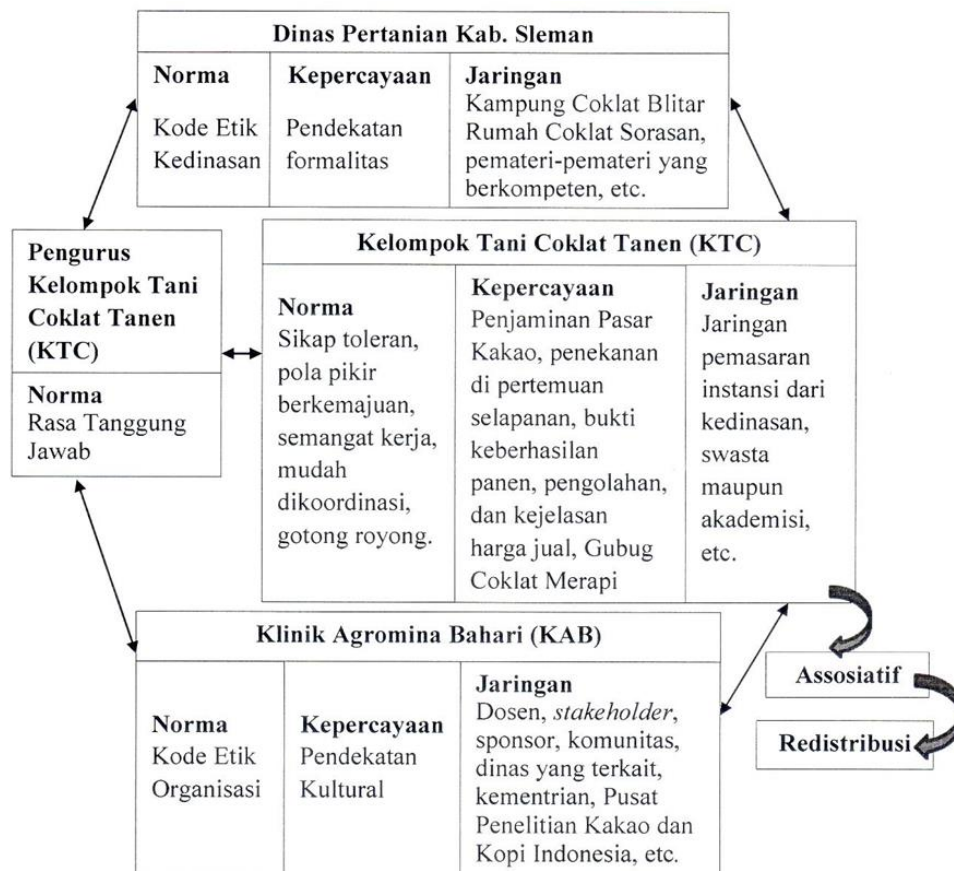
Memperbanyak intensitas penyuluhan untuk kelompok tani coklat

DAFTAR PUSTAKA

- Ambara, Adi. 2016. "Peran Modal Sosial dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa Adat/Pakraman" dalam Jurnal Ilmu Ekonomi. Universitas Brawijaya
- Bakar, Andi A.. 2015. "Analisis Determinan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone". dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 8, Nomor 1, Januari 2015 (51-58) ISSN 1979-5645
- Buchari, Adnan. 2016. Wisata Cokelat Gunung Merapi. <https://m.tempo.co/read/news/2016/08/26/273799136/wisata-cokelat-gunung-merapi>. Diakses Pada tanggal 19 Maret 2017 Pukul 00.32 WIB.
- Creswell.2015. Riset Pendidikan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

- Damanik, 2010. Prospek dan Strategi Pengembangan Perkebunan Kakao Berkelanjutan. *Perspektif* Vol.9 No. 2/ Desember 2010. Hlm 94-105. ISSN : 1412-8004
- Field, John.2016. *Modal Sosial*. Yogyakarta : Kreasi Wacana
- Malik, Abdul.2013.Mengenal Klinik Agromina Bahari https://klinikagrominabahari.wordpress.com/about_us/. Diakses Pada tanggal 19 Maret 2017 Pukul 00.32 WIB.
- Mardikanto,Totok. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Oleh Perusahaan*. UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press). Surakarta
- Malinda. Nova ,2012, *Metode Penelitian Moleong (2010)*. (www.eprints.uny.ac.id) di akses pada tanggal 14 April 2018 Pukul 18.50 WIB
- Murdiyanto, Eko.2008. *Sosiologi Perdesaan*. Yogyakarta : UPN “Veteran” Yogyakarta Press. ISBN 978-979-8918—88-99
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 1999 *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Pontoh, Otniel.2010. “Identifikasi dan Analisis Modal Sosial dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Gangga Dua Kabupaten Minahasa Utara”. dalam *Jurnal Perikanan dan Kelautan tropis* Vol. VI-3, Desember 2010 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. UNSRAT. Manado 95115.
- Raisya dkk..2014.”Peran Modal Sosial dalam Menunjang Kendala Kelompok Peternak Sapi Perah (Studi Kasus di Kelompok 3 TPK Pulosari Pangalengan”. dalam *JURNAL ILMU TERNAK*, JUNI 2014, VOL. 1, NO. 10, 52 – 57. Universitas Padjadjaran
- Santosa, Imam.2008. “Diseminasi Model Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pengelolaan Agrowisata”. dalam *MIMBAR*, Vol. 28, No. 2 (Desember, 2012): 181-190 ‘Terakreditasi’ SK Dikti No.64a/DIKTI/Kep/2010
- Syahra. 2003.“Modal Sosial dalam mengintegrasikan Masyarakat Multietnis pada Masyarakat Desa Pakraman Bali” dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Bali* : Universitas Pendidikan Ganesha.
- Syahyuti.2008. Peran Modal Sosial dalam Perdagangan Hasil Pertanian.dalam *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*. Forum Penelitian Agroekonomi. Volume 26 No.1, Juli 2008 : 32-43.
- Totok dan Poerwoko.2012.*Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

- Santosa, Imam.2008. “Diseminasi Model Pembeedayaan Masyarakat Desa Melalui Pengelolaan Agrowisata”. dalam MIMBAR, Vol. 28, No. 2 (Desember, 2012): 181-190 ‘Terakreditasi’ SK Dikti No.64a/DIKTI/Kep/2010
- Soetomo.2015 Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta : Pustaka Pelajar ISBN : 978-602-9033-29-8
- Sujarwo.2013. Pengembangan Masyarakat berbasis Modal Sosial. Proceeding Seminar Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Negeri Yogyakarta. ISBN : 978-602-99286-2-4
- Wirya, Made. 2018. Prospek Komoditas Kakao. Tabloid Sahabat Petani. <http://sahabatpetani.com/2017/11/22/prospek-komoditas-kakao/> Diakses pada tanggal 17 April 2018 Pukul 04.57 WIB
- Wuysang, Rendy.2014. Modal Sosial Kelompok Tani dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Suatu Studi dalam Pengembangan Usaha Kelompok Tani di Desa Tincep Kecamatan Sonder. Journal “Acta Diurna” Volume III. No.3.



Gambar 3. Elemen Modal Sosial Pemberdayaan Kelompok Tani Coklat Tanen (KTC)

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BIMBINGAN TEKNIS PERBANYAKAN DAN PEMELIHARAAN TANAMAN HIAS DI SUMATERA BARAT

Ellya Rosa ^{1*}, Eva Riza¹, Harmaini dan Zulrasdi¹

¹Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Barat, Jl. Raya Padang-Solok, KM.

40 Sukarami-Solok, 27366,

*Email: ellyayazid7@gmail.com;

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat melalui Bimbingan Teknis Perbanyak dan Pemeliharaan Tanaman Hias telah dilakukan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Untuk mengetahui perubahan perilaku masyarakat tentang Perbanyak dan Pemeliharaan tanaman hias sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) perlu dilakukan evaluasi. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Desember 2018. Rancangan penelitian adalah survei, dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok. Pengamatan yang dilakukan adalah; perubahan perilaku masyarakat (pengetahuan, sikap dan ketrampilan) tentang budidaya tanaman hias, Data ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif.. Pengetahuan peserta sebelum mengikuti bimbingan teknis adalah tidak mengetahui 27% setelah mengikuti bimbingan teknis menjadi 1%, sedangkan penilaian sangat mengetahui sebelum mengikuti bimtek adalah 4%, setelah mengikuti bimtek menjadi 45%. Sikap peserta bimtek tentang perbanyak dan pemeliharaan tanaman hias adalah tidak setuju sebanyak 27% sebelum mengikuti bimtek, tetapi sesudah mengikuti bimtek menjadi 1%. Sikap sangat setuju sebanyak 11% sebelum mengikuti bimtek, tetapi setelah mengikuti bimtek menjadi 46%. Keterampilan peserta bimtek tentang perbanyak dan pemeliharaan tanaman hias adalah tidak terampil sebanyak 45% sebelum mengikuti bimtek, tetapi sesudah mengikuti bimtek menjadi 0%. Sedang sangat terampil sebanyak 3% sebelum mengikuti bimtek, tetapi setelah mengikuti bimtek menjadi 44%. Respon peserta terhadap pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis teknologi Perbanyak dan Pemeliharaan Tanaman Hias adalah; terhadap kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta memberikan respon : sesuai (63,64%) sangat sesuai (36,36%), dan kurang sesuai (0,00%). Terhadap materi , peserta memberi respon : menarik (54,55%) , sangat menarik (45,45%) dan kurang menarik (0%). Terhadap penyampaian materi oleh narasumber, peserta memberikan respon : bagus (69,70%) sangat bagus (30,00%), dan kurang bagus (0,00%) .

Kata kunci: Tanaman Hias, pemberdayaan, bimbingan teknis, perilaku

PENDAHULUAN

Menurut Ketua Asosiasi Tanaman Hias Sumatera Barat (Darniwilis), sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Barat berpotensi untuk pengembangan tanaman hias karena memenuhi syarat letak ketinggian dari permukaan laut, tipe iklim, curah hujan, tipe tanah, kesuburan tanah dan temperatur udara, seperti Padang, Payakumbuh, Padang Panjang, Tanah Datar dan Solok (Miko Elfisa, 2017). Selain syarat iklim, agar tanaman hias bisa berkembang di Sumbar juga perlu dorongan pemerintah..

Menurut Darniwilis, tanaman hias ini selain hobi, juga bisa menjadi bisnis yang mampu membantu perekonomian masyarakat (Miko Elfisa, 2017). Minat masyarakat terhadap tanaman cukup besar, hal ini terlihat ketika Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar yang menggelar pameran dan lomba tanaman hias di lapangan parkir kantor gubernur 16 hingga 21 Oktober 2017, yang diikuti tujuh kabupaten/kota di Sumbar, masing-masing Padangpanjang, Payakumbuh, Tanah Datar, Padang, Kabupaten Solok dan Kota Solok Menurut Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Sumatera Barat, Ir. Candra potensi meningkatnya perekonomian masyarakat melalui jalur pasar tanaman hias di Sumatera Barat tidak kecil perkembangan tanaman hias dari tahun ke tahun terus membaik, tapi belum bisa memenuhi permintaan dari provinsi tetangga (Sisca, 2019).

Berbagai inovasi pertanian hasil penelitian/pengkajian Badan Litbang Pertanian sudah banyak digunakan secara luas dan terbukti menjadi pendorong utama perkembangan usaha dan sistem agribisnis berbagai komoditas pertanian, namun sebagian belum optimal mencapai sasaran utamanya, yaitu para petani (Mulyandari, *dkk.* 2005), sehingga masih perlu dilakukan strategi percepatan/ penderasan dan perluasan adopsi berbagai inovasi pertanian tersebut.

Menurut Undang-undang No.19 tahun 2013 pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani dalam melaksanakan usahatani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, kemudahan akses informasi teknologi serta penguatan kelembagaan petani. Pada intinya pemberdayaan petani merupakan upaya memampukan dan memandirikan petani dengan mendorong, memotivasi dan

membangkitkan kesadaran petani akan potensi yang dimiliki sehingga mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Kemampuan petani dalam menghasilkan produksi pertanian sangat bervariasi tergantung dari berbagai faktor yang mempengaruhinya seperti lahan, teknologi, modal, kepedulian pemerintah dan lain sebagainya (Djoni, 2017). Agar petani menjadi kuat baik dari segi kepemilikan lahan, penguasaan teknologi maupun akses permodalan maka sangat diperlukan pemberdayaan petani (Djoni, 2017). Upaya pemberdayaan petani dapat dilakukan oleh pemerintah, swasta, perorangan, organisasi dan lembaga yang memiliki kemampuan dalam melakukan proses perubahan terhadap petani menuju kualitas yang lebih baik (Djoni, 2017).

Salah satu Kegiatan diseminasi inovasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat pada tahun 2018 adalah diseminasi berupa bimbingan teknis, dengan metoda ceramah dan praktek perbanyakan dan pemeliharaan tanaman hias.

Bimbingan teknis dilakukan dengan maksud untuk memperlihatkan suatu inovasi baru kepada sasaran secara nyata atau konkret. Melalui kegiatan ini sasaran diajarkan mengenai keterampilan, memperagakan teknik-teknik baru termasuk membandingkan keunggulan dibandingkan cara yang lama. Melalui kegiatan bimbingan teknis sasaran diharapkan akan melalui tahapan proses adopsi seperti mengetahui, minat, menilai, mencoba dan menerapkan.

Adopsi teknologi ditentukan oleh manfaat yang diperoleh seperti peningkatan penjualan, peningkatan kualitas produk, peningkatan nilai tambah produk, peningkatan kualitas SDM dan peningkatan teknologi (Taib G dkk, 2017).

Permasalahan penelitian dapat dirumuskan bahwa apakah ada perubahan atau peningkatan kemampuan (pengetahuan, sikap, keterampilan) responden/peserta bimbingan teknis setelah mengikuti bimbingan teknis perbanyakan dan pemeliharaan tanaman hias.

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan responden/peserta bimbingan teknis tentang teknologi perbanyakan dan pemeliharaan tanaman hias setelah mengikuti kegiatan bimbingan teknis.

METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian dilakukan di Laboratorium Diseminasi Padang, Provinsi Sumatera Barat pada bulan Desember 2018, pada acara bimbingan teknis. Rancangan penelitian adalah survey, dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok (Singarimbun, 1995). Responden adalah peserta bimtek yang terdiri dari masyarakat Sumatera Barat yang berminat dan yang telah mendaftar melalui medsos. Bimtek dengan materi Perbanyakkan dan Pemeliharaan Tanaman Hias yang dihadiri oleh 50 peserta yang terdiri dari penyuluh pertanian dan masyarakat umum dari kota Padang, Kabupaten limapuluh Kota dan kabuapten Padang Pariaman. Data yang diambil adalah prilaku (pengetahuan, sikap dan keterampilan) peserta bimbingan teknis dan respon peserta terhadap kegiatan bimtek. Data dianalisis secara deskriptif dan ditabulasi dengan persentase.

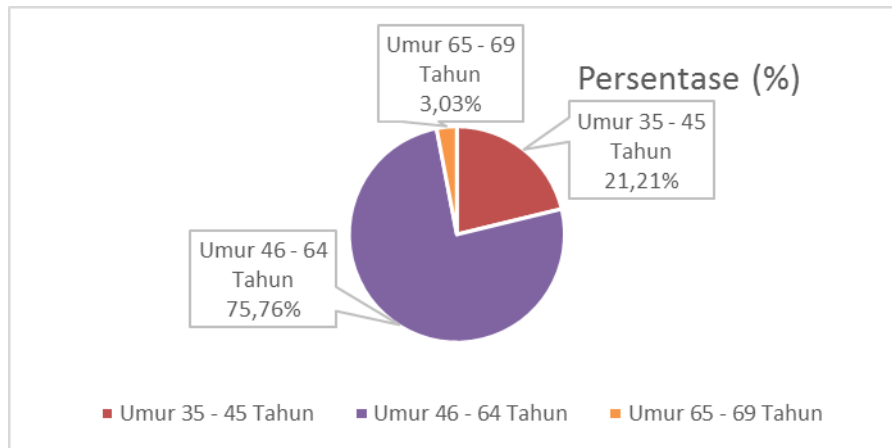
HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Karakteristik Responden

Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui keragaman dari responden berdasarkan umur, pendidikan dan jenis kelamin.. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi dari responden dan kaitannya dengan masalah dan tujuan penelitian.

1.1. Umur Responden

Menurut Prijono Tjiptoherijanto (2001) Dalam analisis demografi, struktur umur penduduk dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu (a) kelompok umur muda, dibawah 15 tahun; (b) kelompok umur produktif, usia 15-64 tahun, dan (c) kelompok umur tua, usia 65 tahun ke atas. Pada kegiatan ini (bimbingan teknis Perbanyakkan dan Pemeliharaan Tanaman Hias) umur peserta (responden) berkisar antara 35-69 tahun.

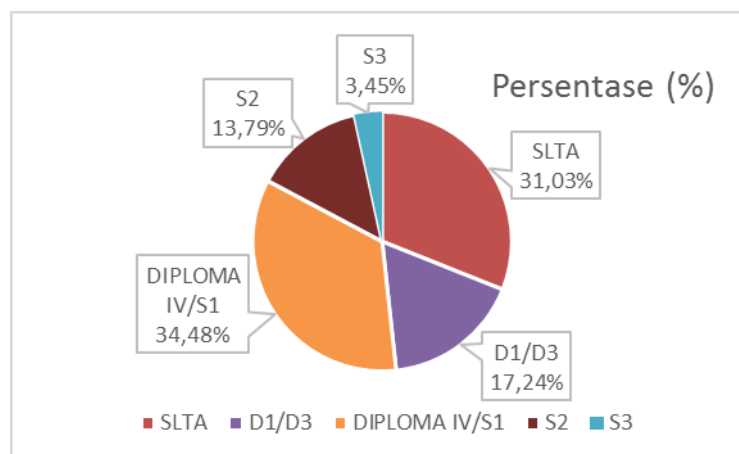


Gambar 1: Umur Responden

Dapat dilihat bahwa yang menjadi responden paling banyak berusia antara 46-64 tahun yaitu sebanyak 75,76% , kemudian usia 35-45 tahun sebanyak 21,21%, kemudian usia 65-69 tahun sebanyak 3,03%. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden termasuk kedalam kategori usia produktif

1.2. Tingkat Pendidikan

Pada pengkajian ini tingkat pendidikan responden dibagi menjadi 5 kategori yaitu SLTA, Diploma I/III, Diploma IV/S1, S2 dan S3. Karakteristik individu yang terkait dengan derajat pengetahuan ditunjukkan oleh basis pendidikan formal yang pernah ditempuhnya.

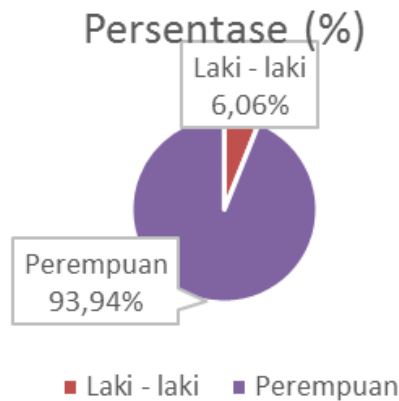


Gambar 2. Tingkat Pendidikan Responden

Sebaran tingkat pendidikan responden yang paling dominan adalah Diploma IV/S1 sebanyak 34,48 %, kemudian, SLTA sebanyak 31,03%, D I/III sebanyak 17,24%, S2 sebanyak 13,79% dan S3 sebanyak 3,45 %. Variabel dalam karakteristik seseorang diantaranya adalah tingkat pendidikan, (Soekartawi, 1988) .

1.3. Jenis Kelamin Responden

Dari diagram venn diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki yaitu 6.06%. Sedangkan responden perempuan sebanyak 93,94%.



Gambar 3 : Jenis Kelamin Responden

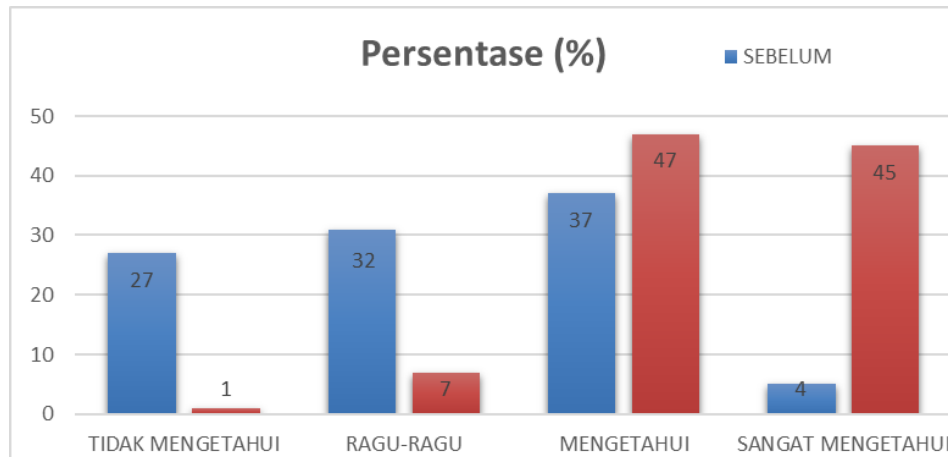
II. Peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta bimtek

Bimbingan Teknis (bimtek) telah dilakukan oleh BPTP Sumbar. Melalui kegiatan ini sasaran diharapkan akan melalui tahapan proses adopsi seperti mengetahui, minat, menilai, mencoba dan menerapkan. Menurut Hendayana R (2016), untuk menganalisis data dapat dilakukan dengan menggunakan persentase atau skor. Pada penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan persentase.

2.1 Peningkatan Pengetahuan Responden /Peserta

Dari hasil evaluasi (Gambar 1) dapat kita ketahui bahwa pengetahuan peserta sebelum mengikuti bimbingan teknis adalah tidak mengetahui 27% setelah mengikuti bimbingan teknis menjadi 1%, sedangkan penilaian sangat mengetahui sebelum mengikuti

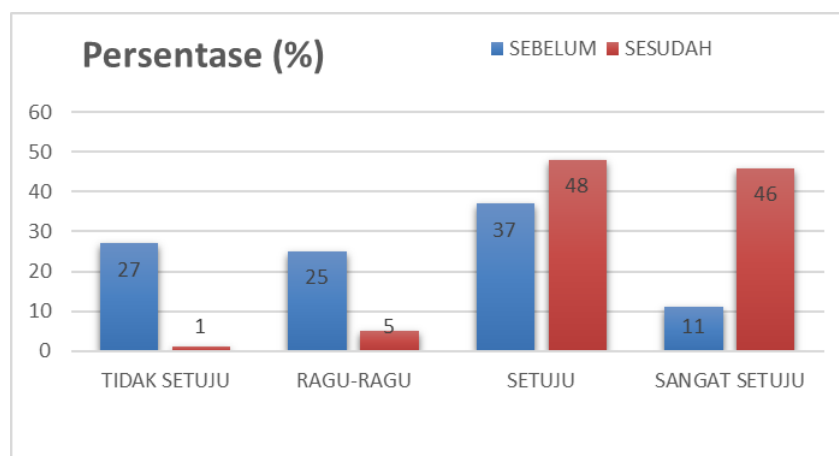
bimtek adalah 4%, setelah mengikuti bimtek menjadi 45%. Jadi ada peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti bimtek.



Gambar 4. Perubahan Pengetahuan Peserta tentang Perbanyak dan Pemeliharaan Tanaman Hias

2.2. Sikap Responden

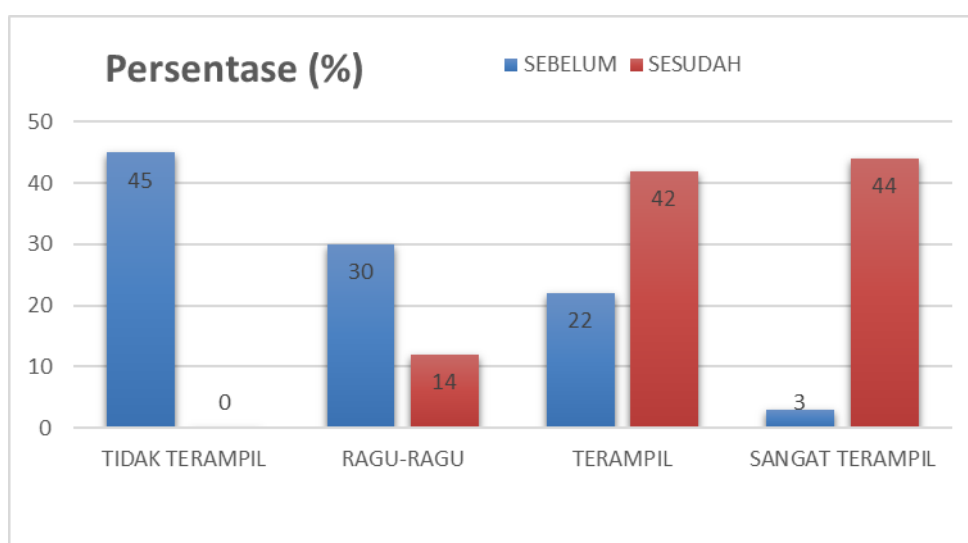
Sikap responden/peserta (gambar 5) bimtek (bimbingan teknis) tentang perbanyak dan pemeliharaan tanaman hias adalah tidak setuju sebanyak 27% sebelum mengikuti bimtek, tetapi sesudah mengikuti bimtek menjadi 1%. Sikap sangat setuju sebanyak 11% sebelum mengikuti bimtek, tetapi setelah mengikuti bimtek menjadi 46%. Hal ini dapat kita katakan bahwa peserta sudah termotivasi untuk mengembangkan tanaman hias.



Gambar 5. Sikap Peserta tentang Perbanyak dan Pemeliharaan Tanaman Hias

2.3. Keterampilan Peserta

Keterampilan responden/peserta bimtek tentang perbanyak dan pemeliharaan tanaman hias (gambar 6) adalah tidak terampil sebanyak 45% sebelum mengikuti bimtek, tetapi sesudah mengikuti bimtek menjadi 0%. Sedang sangat terampil sebanyak 3% sebelum mengikuti bimtek, tetapi setelah mengikuti bimtek menjadi 44%. Hal ini dapat kita katakan bahwa peserta sudah terampil setelah mengikuti bimtek.



Gambarl 6 . Keterampilan Peserta tentang Perbanyak dan Pemeliharaan Tanaman Hias

III. Respon Peserta terhadap pelaksanaan Bimbingan Teknis Inovasi Teknologi Perbanyak dan Pemeliharaan Tanaman Hias

Respon peserta terhadap pelaksanana kegiatan bimbingan teknis eknologi Perbanyak dan Pemeliharaan Tanaman Hias dapat dilihat pada tabel 1 Terhadap kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta peserta memberikan respon : sesuai (63,64%) sangat sesuai (36,36%), dan kurang sesuai (0,00%). Terhadap materi , peserta memberi respon : menarik (54,55%) , sangat menarik (45,45%) dan kurang menarik (0%). Terhadap penyampaian materi oleh narasumber, peserta memberikan respon : bagus (69,70%) sangat bagus (30,00%), dan kurang bagus (0,00%) .

Tabel. 1. Respon Peserta terhadap pelaksanaan Bimbingan Teknis Inovasi Teknologi Perbanyakan dan Pemeliharaan Tanaman Hias mendukung Pemanfaatan Pekarangan

No	Uraian	Respon (%)
1	Penyampaian materi oleh narasumber	<ul style="list-style-type: none"> • Bagus (69,70) • Kurang bagus (0,00) • Sangat bagus (30,30)
2	Kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang sesuai (0,00) • Sesuai (63,64) • Sangat sesuai (36,36)
3	Materi Perbanyakan dan Pemeliharaan Tanaman Hias	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang Menarik (0,00) • Menarik (54,55) • Sangat menarik (45,45)
4	Kemudahan untuk memahami Materi Bimbingan Teknis	<ul style="list-style-type: none"> • Sulit (0,00) • Mudah (78,79) • Sangat mudah (21,21)
5	Ketersediaan sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang memadai (12,12) • Memadai (69,70) • Sangat memadai (18,18)
6.	Pengalaman mengikuti pelatihan perbanyakan dan pemeliharaan tanaman hias	<ul style="list-style-type: none"> • Pernah (12,12) • Belum pernah (87,88)

KESIMPULAN

Pengetahuan peserta sebelum mengikuti bimbingan teknis adalah tidak mengetahui 27% setelah mengikuti bimbingan teknis menjadi 1%, sedangkan penilaian sangat mengetahui sebelum mengikuti bimtek adalah 4%, setelah mengikuti bimtek menjadi 45%. Jadi ada peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti bimtek.

Sikap peserta bimtek tentang perbanyakan dan pemeliharaan tanaman hias adalah tidak setuju sebanyak 27% sebelum mengikuti bimtek, tetapi sesudah mengikuti bimtek menjadi 1%. Sikap sangat setuju sebanyak 11% sebelum mengikuti bimtek, tetapi setelah mengikuti bimtek menjadi 46%. Hal ini dapat kita katakan bahwa peserta sudah termotivasi untuk mengembangkan tanaman hias.

Keterampilan peserta bimtek tentang perbanyakan dan pemeliharaan tanaman hias adalah tidak terampil sebanyak 45% sebelum mengikuti bimtek, tetapi sesudah mengikuti bimtek menjadi 0%. Sedang sangat terampil sebanyak 3% sebelum mengikuti bimtek,

tetapi setelah mengikuti bimtek menjadi 44%. Hal ini dapat kita katakan bahwa peserta sudah terampil setelah mengikuti bimtek..

Respon peserta terhadap pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis eknologi Perbanyak dan Pemeliharaan Tanaman Hias mendukung Pemanfaatan Pekarangan adalah; terhadap kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta peserta memberikan respon : sesuai (63,64%) sangat sesuai (36,36%), dan kurang sesuai (0,00%). Terhadap materi, peserta memberi respon : menarik (54,55%), sangat menarik (45,45%) dan kurang menarik (0%). Terhadap penyampaian materi oleh narasumber, peserta memberikan respon : bagus (69,70%) sangat bagus (30,00%), dan kurang bagus (0,00%) .

DAFTAR PUSTAKA

- Djoni. 2017. Peran Penting Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pemberdayaan Petani. Makalah. Seminar Nasional Pengembangan SDM Pertanian dan Ketahanan Pangan. Faperta UNAND.
- Hendayana, R. 2016. Persepsi dab Adopsi Teknologi, Landasan Teoritis dan Praktik Pengukuran. IAARD Press. Badan Litbang Pertanian. Jakarta
- Miko Elfisa, 2017. Sumbar Berpotensi Kembangkan Tanaman Hias.COPYRIGHT © ANTARA.
- Mulyandari, R.S.H. dan Ananto, E. E. 2005. Teknik Implementasi Pengembangan Sumber Informas iPertanian Nasional dan Lokal P4MI. Informatika Pertanian Vol. 14:2005.
- Prijono Tjiptoherijanto. 2001. Proyeksi Penduduk, Angkatan Kerja, Tenaga Kerja, dan Peran Serikat Pekerja dalam Peningkatan Kesejahteraan. Majalah Perencanaan Pembangunan Edisi 23 Tahun 2001. Jakarta.
- Singarimbun, M. 1995. Metode Peneltian Survey. LP3S. Jakarta.
- Sisca Oktri Santi . 2019. Potensi Pasar Tanaman Hias Sumbar Besar.Copyright Metro Andalas.
- Soekartawi. 1988. Prinsip Dasar Komunikasi Pertanian. Jakarta: UI Press.
- Taib, G, Asmawi, Novi Elian. Kajian Adopsi Teknologi Untuk Meningkatkan Daya Saing Industri Pangan Skala Kecil di Sumatera Barat. 2017. Jurnal Teknologi Pertanian Andalas. Vol.21 No.1.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BIMBINGAN TEKNIS BUDIDAYA TANAMAN BUAH DALAM POT DI SUMATERA BARAT

Ellya Rosa^{1*}, Eva Riza¹, Yohana dan Zulrasdi¹

¹ Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Barat, Jl. Raya Padang-Solok, KM. 40
Sukarami-Solok, 27366,

*Email: ellyayazid7@gmail.com;

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat melalui Bimbingan Teknis Budidaya Tanaman Buah dalam Pot telah dilakukan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Untuk mengetahui perubahan perilaku masyarakat sebelum dan sesudah Bimbingan Teknis Budidaya Tanaman Buah dalam Pot di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan dilaksanakan pada bulan November 2018. Rancangan penelitian adalah survei, dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok. Pengamatan yang dilakukan adalah; perilaku masyarakat (pengetahuan, sikap dan ketrampilan) tentang Teknologi Budidaya Tanaman Buah dalam Pot, dan respon peserta terhadap pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis. Data ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif. Pengetahuan peserta sebelum mengikuti bimbingan teknis adalah tidak mengetahui 28%, setelah mengikuti bimbingan teknis menjadi 1%, sedangkan penilaian sangat mengetahui sebelum mengikuti bimtek adalah 8%, setelah mengikuti bimtek menjadi 45%. Sikap peserta bimtek tentang Teknologi Budidaya Tanaman Buah dalam Pot adalah tidak setuju sebanyak 15% sebelum mengikuti bimtek, tetapi sesudah mengikuti bimtek menjadi 1%. Sikap sangat setuju sebanyak 12% sebelum mengikuti bimtek, tetapi setelah mengikuti bimtek menjadi 49%. Keterampilan peserta bimtek adalah tidak terampil sebanyak 17% sebelum mengikuti bimtek, tetapi sesudah mengikuti bimtek menjadi 0%. Sedang sangat terampil sebanyak 10% sebelum mengikuti bimtek, tetapi setelah mengikuti bimtek menjadi 45%. Respon peserta terhadap pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis teknologi Teknologi Budidaya Tanaman Buah dalam Pot adalah; terhadap kesesuaian materi dengan kebutuhan, peserta memberikan respon : sesuai (73,33%) sangat sesuai (26,67%), dan kurang sesuai (0,00%). Terhadap materi , peserta memberi respon : menarik (80,00%) , sangat menarik (20,00%) dan kurang menarik (0%). Terhadap penyampaian materi oleh narasumber, peserta memberikan respon : bagus (66,67%) sangat bagus (30,00%), dan kurang bagus (3,33%) .

Kata kunci: Tanaman buah, evaluasi, pemberdayaan, bimbingan teknis, perilaku

PENDAHULUAN

Salah satu Kegiatan diseminasi inovasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat tahun 2018 adalah diseminasi berupa bimbingan teknis, dengan metoda ceramah dan praktek tentang budidaya tanaman buah dalam pot (tabulampot).

Bimbingan teknis dilakukan dengan maksud untuk memperlihatkan suatu inovasi baru kepada sasaran secara nyata atau konkret. Melalui kegiatan ini sasaran diajarkan mengenai keterampilan, memperagakan teknik-teknik baru termasuk membandingkan keunggulan dibandingkan cara yang lama. Melalui kegiatan bimbingan teknis sasaran diharapkan akan melalui tahapan proses adopsi seperti mengetahui, minat, menilai, mencoba dan menerapkan.

Menurut Undang-undang No.19 tahun 2013 pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani dalam melaksanakan usahatani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, kemudahan akses informasi teknologi serta penguatan kelembagaan petani. Pada intinya pemberdayaan petani merupakan upaya memampukan dan memandirikan petani dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran petani akan potensi yang dimiliki sehingga mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Upaya pemberdayaan petani dapat dilakukan oleh pemerintah, swasta, perorangan, organisasi dan lembaga yang memiliki kemampuan dalam melakukan proses perubahan terhadap petani menuju kualitas yang lebih baik (Djoni, 2017).

Penyuluhan Pertanian merupakan salah satu kegiatan yang menunjang keberhasilan program perkembangan pertanian. Kegiatan penyuluhan pertanian bertujuan meningkatkan pendapatan petani dan keluarganya melalui peningkatan produksi pertanian.

Setelah melaksanakan kegiatan penyuluhan, perlu dilakukan evaluasi penyuluhan. Evaluasi penyuluhan pertanian adalah kegiatan untuk menilai suatu program penyuluhan pertanian. Evaluasi penyuluhan pertanian dilakukan dengan proses pengumpulan data, penentuan ukuran, penilaian serta perumusan keputusan yang digunakan untuk perbaikan atau penyempurnaan perencanaan berikutnya yang lebih lanjut demi tercapainya tujuan dari program penyuluhan pertanian.

Secara umum manfaat dari hasil supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyuluhan antara lain: menentukan tingkat perubahan perilaku petani, untuk perbaikan program, sarana, prosedur, pengorganisasian, pelaksanaan penyuluhan pertanian, dan untuk penyempurnaan kebijakan penyuluhan pertanian (Kementerian Pertanian, 2010).

Berbagai inovasi pertanian hasil penelitian/pengkajian Badan Litbang Pertanian sudah banyak digunakan secara luas dan terbukti menjadi pendorong utama perkembangan usaha dan sistem agribisnis berbagai komoditas pertanian, namun sebagian belum optimal mencapai sasaran utamanya, yaitu para petani (Mulyandari, *dkk.* 2005), sehingga masih perlu dilakukan strategi percepatan/ penderasan dan perluasan adopsi berbagai inovasi pertanian tersebut.

Adopsi teknologi ditentukan oleh manfaat yang diperoleh seperti peningkatan penjualan, peningkatan kualitas produk, peningkatan nilai tambah produk, peningkatan kualitas SDM dan peningkatan teknologi (Taib G *dkk.* 2017).

Permasalahan penelitian dapat dirumuskan bahwa apakah ada perubahan atau peningkatan kemampuan (pengetahuan, sikap, keterampilan) responden/peserta bimbingan teknis setelah mengikuti bimbingan teknis budidaya tanaman buah dalam pot.

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan responden/peserta bimbingan teknis tentang teknologi budidaya tanaman buah dalam pot. setelah mengikuti kegiatan bimbingan teknis.

METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian dilakukan di Laboratorium Diseminasi Padang, Provinsi Sumatera Barat pada bulan November 2018, pada acara bimbingan teknis. Rancangan penelitian adalah survey, dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok (Singarimbun, 1995). Responden adalah peserta bimtek yang terdiri dari masyarakat Sumatera Barat yang berminat dan yang telah mendaftar melalui medsos. Bimtek dengan materi budidaya tanaman buah dalam pot (tabulampot) dihadiri oleh 70 peserta yang terdiri dari penyuluh pertanian dan masyarakat umum dari kota Padang, Kabupaten limapuluh Kota dan kabuapten Padang Pariaman, Kota Solok, Kabupaten

Mentawai. Data yang diambil adalah prilaku (pengetahuan, sikap dan keterampilan) peserta bimbingan teknis dan respon peserta terhadap pelaksanaan kegiatan bimtak.. Data dianalisis secara deskriptif dan ditabulasi dengan persentase.

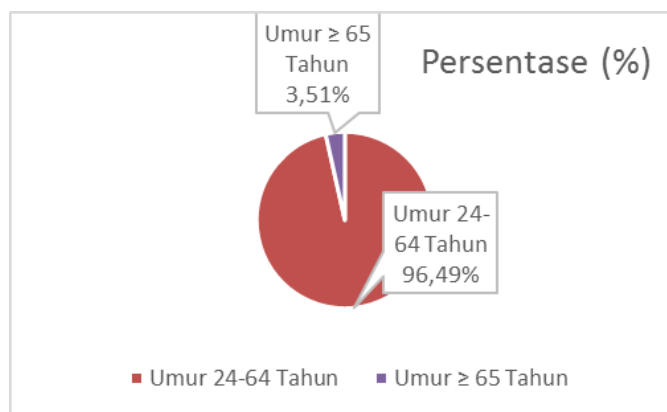
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui keragaman dari responden berdasarkan umur, jenis kelamin, dan pendidikan.. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi dari responden dan kaitannya dengan masalah dan tujuan penelitian.

1.1. Umur Responden

Menurut Priyono Tjiptoherijanto (2001) Dalam analisis demografi, struktur umur penduduk dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu (a) kelompok umur muda, dibawah 15 tahun; (b) kelompok umur produktif, usia 15-64 tahun, dan (c) kelompok umur tua, usia 65 tahun ke atas. Pada kegiatan ini (bimbingan teknis budidaya tanaman buah dalam pot) umur peserta (responden) berkisar antara 24-65 tahun.

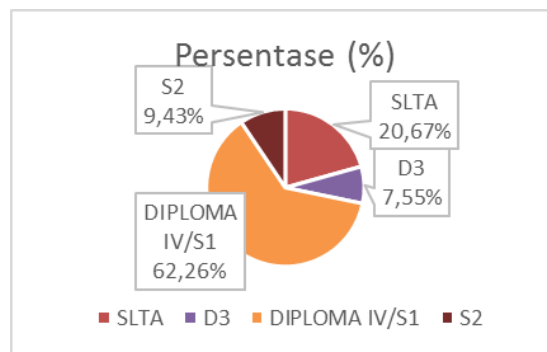


Gambar 1: Umur responden

Dapat dilihat bahwa yang menjadi responden banyak berusia antara 24-64 tahun yaitu sebanyak 96,49% , kemudian usia 65 tahun ke atas sebanyak 3,51%. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden termasuk kedalam kategori usia produktif

1.2. Tingkat Pendidikan

Pada kegiatan ini (bimbingan teknis budidaya tanaman buah dalam pot) tingkat pendidikan responden dibagi menjadi 4 kategori yaitu SLTA, Diploma III, Diploma IV/S1, dan S2. Karakteristik individu yang terkait dengan derajat pengetahuan ditunjukkan oleh basis pendidikan formal yang pernah ditempuhnya.

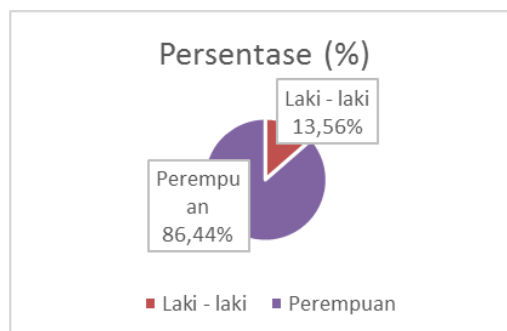


Gambar 2: Tingkat pendidikan responden

Sebaran tingkat pendidikan responden yang paling dominan adalah Diploma IV/S1 sebanyak 62,26 %, kemudian SLTA banyak 20,76%, S2 sebanyak 9,43% dan D3 sebanyak 7,55 %. Variabel dalam karakteristik seseorang diantaranya adalah tingkat pendidikan, (Soekartawi, 1988) . Pendidikan, dapat menciptakan dorongan mental untuk menerima inovasi yang menguntungkan (Soekartawi, 1988).

1.3. Jenis Kelamin

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki yaitu 13,56%. Sedangkan responden perempuan sebanyak 86,44, %.



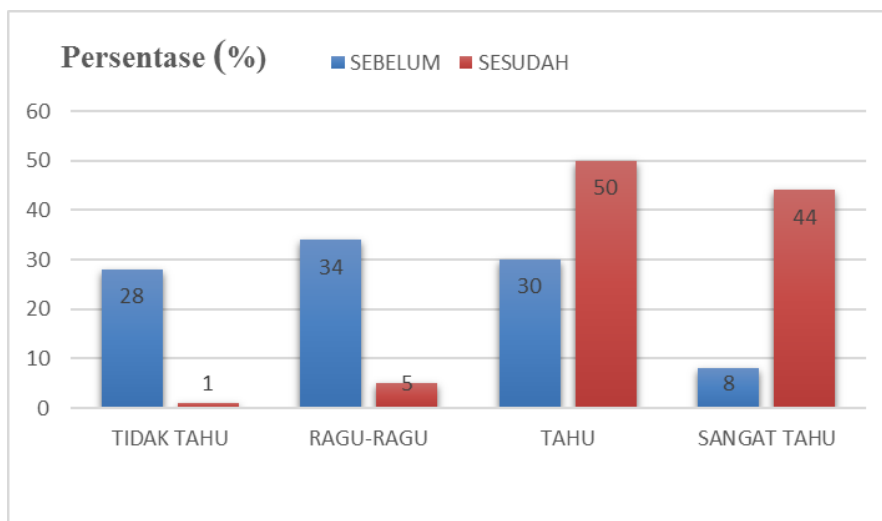
Gambar 3 : Jenis Kelamin Responden

2. Peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta bimtek

Bimbingan Teknis (bimtek) telah dilakukan oleh BPTP Sumbar. Melalui kegiatan ini sasaran diharapkan akan melalui tahapan proses adopsi seperti mengetahui, minat, menilai, mencoba dan menerapkan. Menurut Hendayana R (2016), untuk menganalisis data dapat dilakukan dengan menggunakan persentase atau skor. Pada penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan persentase.

2.1. Pengetahuan Responden/Peserta

Dari hasil evaluasi (Gambar 4) dapat kita ketahui bahwa pengetahuan peserta sebelum mengikuti bimbingan teknis adalah tidak mengetahui 28% setelah mengikuti bimbingan teknis menjadi 1%, sedangkan penilaian sangat mengetahui sebelum mengikuti bimtek adalah 8%, setelah mengikuti bimtek menjadi 44%. Jadi ada peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti bimtek.

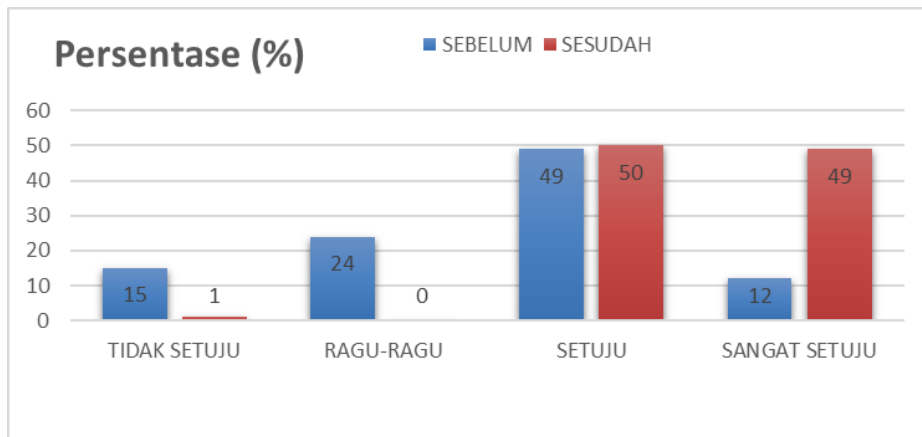


Gambar4. Pengetahuan Peserta tentang Tabulampot

2.2 Sikap Responden/Peserta

Sikap peserta bimtek (Gambar 5) adalah tidak setuju sebanyak 15% sebelum mengikuti bimtek, tetapi sesudah mengikuti bimtek menjadi 1%. Sikap sangat setuju sebanyak 12% sebelum mengikuti bimtek, tetapi setelah mengikuti bimtek menjadi 49%.

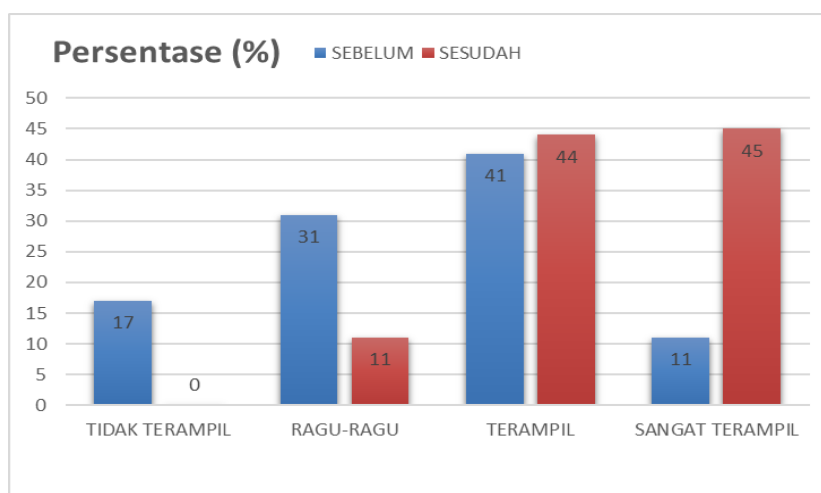
Hal ini dapat kita katakan bahwa peserta sudah termotivasi untuk mengembangkan tanaman buah dalam pot.



Gambar 5. Sikap Peserta tentang inovasi Teknologi Tabulampot

2.3 Keterampilan Responden/Peserta

Keterampilan peserta bimtek (Gambar 6) adalah tidak terampil sebanyak 17% sebelum mengikuti bimtek, tetapi sesudah mengikuti bimtek menjadi 0%. Sedang sangat terampil sebanyak 10% sebelum mengikuti bimtek, tetapi setelah mengikuti bimtek menjadi 45%. Hal ini dapat kita katakan bahwa peserta ada peningkatan keterampilan setelah mengikuti bimtek.



Gambar 6. Keterampilan Peserta tentang inovasi Teknologi Tabulampot

3. Respon Peserta terhadap pelaksanaan Bimbingan Teknis Tabulampot

Respon peserta terhadap pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis tabulampot dapat dilihat pada tabel 1. Terhadap kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta, peserta memberikan respon : sesuai (73,33%) sangat sesuai (26,67%), dan kurang sesuai (0,00%). Terhadap materi tabulampot , peserta memberi respon : menarik (80,00%) , sangat menarik (20,00%) dan kurang menarik (0%). Terhadap penyampaian materi oleh narasumber, peserta memberikan respon : bagus (66,67%) sangat bagus (30,00%), dan kurang bagus (3,33%) .

Tabel. 1. Respon Peserta terhadap pelaksanaan Bimbingan Teknis Tabulampot

No	Uraian	Respon (%)
1	Penyampaian materi oleh narasumber	<ul style="list-style-type: none"> • Bagus (66,67) • Kurang bagus (3,33) • Sangat bagus (30,00)
2	Kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang sesuai (0,00) • Sesuai (73,33) • Sangat sesuai (26,67)
3	Materi Tabulampot	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang Menarik (0,00) • Menarik (80,00) • Sangat menarik (20,00)
4	Kemudahan untuk memahami Materi Bimbingan Teknis	<ul style="list-style-type: none"> • Sulit (0,00) • Mudah (80,00) • Sangat mudah (20,00)
5	Ketersediaan sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang memadai (6,67) • Memadai (73,33) • Sangat memadai (20,00)
6.	Sumber informasi tentang pelaksanaan Bimtek Tabulampot	<ul style="list-style-type: none"> • Teman (53,33) • Media Sosial (46,67)
7.	Pengalaman mengikuti pelatihan Tabulampot	<ul style="list-style-type: none"> • Pernah (3,33) • Belum pernah (96,67)

KESIMPULAN

Pengetahuan peserta sebelum mengikuti bimbingan teknis adalah tidak mengetahui 28% setelah mengikuti bimbingan teknis menjadi 1%, sedangkan penilaian sangat mengetahui sebelum mengikuti bimtek adalah 8%, setelah mengikuti bimtek menjadi 45%. Jadi ada peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti bimtek.

Sikap peserta bimtek tidak setuju sebanyak 15% sebelum mengikuti bimtek, tetapi sesudah mengikuti bimtek menjadi 1%. Sikap sangat setuju sebanyak 12% sebelum mengikuti bimtek, tetapi setelah mengikuti bimtek menjadi 49%. Hal ini dapat kita katakan bahwa peserta sudah termotivasi untuk mengembangkan tanaman buah dalam pot.

Keterampilan peserta bimtek tidak terampil sebanyak 17% sebelum mengikuti bimtek, tetapi sesudah mengikuti bimtek menjadi 0%. Sedang sangat terampil sebanyak 10% sebelum mengikuti bimtek, tetapi setelah mengikuti bimtek menjadi 45%. Hal ini dapat kita katakan bahwa peserta ada peningkatan keterampilan setelah mengikuti bimtek..

Respon peserta terhadap pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis tabulampot adalah; terhadap kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta memberikan respon : sesuai (73,33%) sangat sesuai (26,67%), dan kurang sesuai (0,00%). Terhadap materi tabulampot, peserta memberi respon : menarik (80,00%) , sangat menarik (20,00%) dan kurang menarik (0%). Terhadap penyampaian materi oleh narasumber, peserta memberikan respon : bagus (66,67%) sangat bagus (30,00%), dan kurang bagus (3,33%).

DAFTAR PUSTAKA

- Djoni. 2017. Peran Penting Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pemberdayaan Petani. Makalah. Seminar Nasional Pengembangan SDM Pertanian dan Ketahanan Pangan. Faperta UNAND.
- Hendayana, R. 2016. Persepsi dan Adopsi Teknologi, Landasan Teoritis dan Praktik Pengukuran. IAARD Press. Badan Litbang Pertanian. Jakarta
- Kementerian Pertanian. 2010. Modul Diklat Dasar Penyuluh Pertanian Ahli. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor.
- Mulyandari, R.S.H. dan Ananto, E. E. 2005. Teknik Implementasi Pengembangan Sumber Informasi Pertanian Nasional dan Lokal P4MI. Informatika Pertanian Vol. 14:2005.
- Prijono Tjiptoherijanto. 2001. Proyeksi Penduduk, Angkatan Kerja, Tenaga Kerja, dan Peran Serikat Pekerja dalam Peningkatan Kesejahteraan. Majalah Perencanaan Pembangunan Edisi 23 Tahun 2001. Jakarta.
- Soekartawi. 1988. Prinsip Dasar Komunikasi Pertanian. Jakarta: UI Press.
- Taib, G, Asmawi, Novi Elian. 2017. Kajian Adopsi Teknologi Untuk Meningkatkan Daya Saing Industri Pangan Skala Kecil di Sumatera Barat. Jurnal Teknologi Pertanian Andalas. Vol.21 No.1.

IMPLEMENTASI *COMMUNITY BASED TOURISM* DI DESA WISATA PUTON WATU NGELAK KABUPATEN BANTUL

Mesalia Kriska^{1*}, Dyah Woro Untari¹, Riesma Andhiani², Theresia Gracia Yunindi
Simbolon³

¹Dosen Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Departemen Sosial Ekonomi
Pertanian, Fakultas Pertanian UGM

²Mahasiswa Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, Sekolah Pascasarjana
UGM

²Mahasiswa Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Departemen Sosial Ekonomi
Pertanian, Fakultas Pertanian UGM

*Email: mesalia.kriska@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Desa Wisata Puton Watu Ngelak adalah salah satu desa wisata yang menyajikan keindahan sumber alam berupa Sungai Opak dan situs Watu Ngelak dipadu dengan pertunjukan seni dan budaya yang syarat akan muatan pendidikan. Tingkat keterlibatan masyarakat lokal dalam pembentukan dan perkembangan Desa Wisata Puton Watu Ngelak menjadi menarik untuk dikaji dalam kaitannya sebagai wujud pemberdayaan masyarakat berbasis wisata di pedesaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur implementasi konsep *Community Based Tourism* (CBT) dalam pengembangan Desa Wisata Puton Watu Ngelak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Dusun Puton dengan responden penelitian yaitu warga Dusun Puton. Jenis data yang dianalisis berasal dari hasil observasi dan wawancara dalam bentuk data primer dan data sekunder. Penelitian menunjukkan implementasi konsep CBT di masyarakat terwujud dari keikutsertaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata, pelestarian lingkungan, pelestarian budaya, dan perekonomian masyarakat. Hasil menunjukkan implementasi CBT di masyarakat yang paling tinggi dalam pengelolaan Desa Wisata Puton Watu Ngelak yaitu terkait dengan pelestarian lingkungan yaitu sebesar 73,40%, partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata sebesar 68,12%, pelestarian budaya sebesar 65,91%, dan perekonomian masyarakat sebesar 49,57%.

Kata kunci : Desa Wisata, *Community Based Tourism*

PENDAHULUAN

Prospek pengembangan sektor pariwisata di Indonesia termasuk sangat besar dan menjanjikan mengingat Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Salah satu usaha pariwisata berbasis potensi alam dan budaya yang melibatkan masyarakat sebagai

pelakunya yaitu pengembangan desa wisata. Desa wisata merupakan suatu kawasan pedesaan dengan keseluruhan suasana yang asli dan khas baik dari kehidupan sosial-ekonomi, sosial-budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, kegiatan perekonomian yang menarik, serta memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

Secara konsep, pengembangan desa wisata mempunyai manfaat yang sangat luas baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan lain-lain. Secara ekonomi, pembangunan desa wisata mampu meningkatkan perekonomian nasional, regional, dan masyarakat lokal, di bidang sosial mampu membuka lapangan kerja dan lapangan berusaha bagi masyarakat di desa. Dalam kehidupan sosial budaya, pembangunan desa wisata dapat menggali dan mengembangkan kesenian serta kebudayaan asli daerah yang hampir punah untuk dilestarikan kembali. Pembangunan desa wisata juga merupakan bentuk kesadaran industri yang berorientasi lingkungan karena dianggap mampu menggugah kesadaran masyarakat akan arti pentingnya memelihara dan melestarikan lingkungan bagi kehidupan manusia kini dan masa datang. Konsep pengembangan desa wisata yang mengutamakan aspek-aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan masyarakat ini, dalam kajian-kajian kepariwisataan, biasa disebut sebagai konsep *community based tourism* (CBT). Robinson (2012) mengungkapkan, selain aspek-aspek tersebut, CBT sebagai bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata dengan menitikberatkan pada partisipasi masyarakat serta isu-isu pariwisata lokal dan sebagai manajemen yang berkaitan erat dengan pariwisata berkelanjutan.

Sebagai konsep ideal dalam pengembangan desa wisata, konsep CBT dapat menjadi pedoman dalam mengukur pengembangan suatu pengembangan desa wisata. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat meninjau konsep CBT melalui beberapa prinsip pengimplementasiannya dalam praktik pengembangan desa wisata. Melalui peninjauan terhadap implementasi konsep CBT di suatu desa wisata, maka dapat diketahui aspek-aspek apa yang masih dapat dioptimalkan dalam pengembangan desa wisata agar lebih baik.

Desa Wisata Puton Watu Ngelak sebagai salah satu desa wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan desa wisata yang masih tergolong berkembang. Penggolongan

ditinjau dari pengembangan destinasi wisata, pengembangan industri, kelembagaan wisata, serta pengembangan potensi dasarnya. Pada dasarnya, Desa Wisata Puton Watu Ngelak dikembangkan berdasarkan inisiatif masyarakat dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui adanya potensi-potensi alam dan budaya yang ada. Potensi alam yang menjadi daya tarik utama di Desa Wisata Puton Watu Ngelak adalah Sungai Opak dan Petilasan Watu Ngelak, sedangkan potensi budaya yang menjadi ciri khas di Desa Wisata Puton Watu Ngelak adalah pementasan seni gejog lesung. Melalui penelitian ini, akan dilakukan pengukuran terhadap implementasi konsep CBT dalam pengembangan Desa Wisata Puton Watu Ngelak, sehingga dapat diketahui aspek mana yang sudah unggul dan yang masih dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan kualitas pengembangan desa wisata.

METODE PENELITIAN

Metode dasar yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Hamdi dan Bahruddin (2014), metode deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada secara lengkap baik di masa lampau maupun masa sekarang, baik menggambarkan keadaan saja maupun tahap perkembangan dari suatu keadaan. Pendekatan kuantitatif mengukur fakta-fakta obyektif dimana terjadi pemisahan antara data dan teori yang digunakan dalam penelitian. Umumnya, melalui data-data kuantitatif dapat dibuat suatu gambaran yang lebih luas mengenai kondisi lapangan penelitian.

Penelitian dilakukan di Desa Wisata Puton Watu Ngelak yang secara administratif merupakan sebuah dusun yang terletak di Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari seluruh masyarakat Dusun Puton, diambil 30 orang responden sebagai sampel penelitian yang dipilih secara *random sampling*. Teknik *random sampling* digunakan karena dalam teknik ini, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk dapat terpilih sebagai sampel. Data dihimpun dari responden melalui wawancara terstruktur dengan kuesioner tertutup. Data hasil wawancara kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif, yaitu dengan mengukur skor capaian setiap aspek yang menjadi indikator penelitian, yaitu aspek *community based tourism* yang kemudian dihabarkan melalui prinsip-prinsip implementasi konsep *community based tourism*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan desa wisata di DIY sudah dimulai lama oleh Dinas Pariwisata DIY, salah satunya yaitu di Dusun Puton, yang dijuluki Desa Wisata Watu Ngelak karena keberadaan situs Watu Ngelak yang merupakan peninggalan sejarah petilasan yang pernah disinggahi Sultan Agung. Penetapan dusun ini sebagai salah satu desa wisata dimulai sejak tahun 2010. Awal mula penetapan desa wisata di Dusun ini karena kebutuhan masyarakat Dusun Puton untuk bangkit dan berkembang pasca gempa bumi yang meluluhlantakkan DIY pada pertengahan tahun 2006 lalu. Pengembangan desa wisata juga dilakukan sebagai salah satu alat pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah untuk memberikan alternatif pemecahan yang ada di masyarakat, dengan memanfaatkan keterlibatan anggota masyarakat sebagai sasaran untuk bersama-sama mencari solusi dan melakukan kegiatan pengembangan untuk dirinya sendiri dan keluarganya, dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup.

Terdapat empat tahapan pemberdayaan menurut Wilson (Sumaryadi, 2005). Tahap pertama yaitu seleksi lokasi, disesuaikan dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga dalam hal program pemberdayaan yang akan dilakukan. Tahap kedua yaitu sosialisasi, yang dilanjutkan dengan tahap yang ketiga, yaitu proses pemberdayaan masyarakat dan tahap keempat adalah kemandirian. Proses pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan yaitu untuk meningkatkan kemampuan dan keberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya, serta dilakukan bersama-sama oleh pesertanya. Pada tahapan ini terdapat beberapa langkah, yaitu mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan, potensi, serta peluang; menyusun rencana kegiatan kelompok; melaksanakan rencana tersebut; dan memantau proses serta hasil kegiatan secara terus-menerus. Proses tersebut dilakukan untuk menuju tahapan pemberdayaan yang terakhir, yaitu pemandirian. Keempat tahapan tersebut dilakukan agar dapat memperoleh hasil pemberdayaan yang maksimal serta mencapai tujuan awal kegiatan, yaitu meningkatnya taraf hidup masyarakat secara individu.

Proses pemberdayaan masyarakat melalui adanya kegiatan wisata penting untuk dilakukan karena masyarakat merupakan pemilik dari potensi yang ada di wilayah wisata dan masyarakat yang akan menerima berbagai dampak dari adanya kegiatan wisata di daerahnya. Peran dan partisipasi yang besar dari masyarakat dalam pengembangan desa

wisata diharapkan dapat menciptakan pengembangan wisata yang berkelanjutan, baik secara lingkungan, sosial budaya, maupun ekonomi. Keempat aspek (partisipasi, lingkungan, budaya, dan ekonomi) inilah yang menjadi inti dalam suatu pengembangan desa wisata yang baik dan harmonis, sesuai dengan kosep ideal pengembangan desa wisata, yaitu konsep *community based tourism* (CBT).

Dalam penelitian ini, dilakukan pengukuran terhadap keempat aspek utama konsep CBT tersebut. Masing-masing aspek diukur melalui beberapa indikator dengan hasil tertera pada Tabel 1. Berikut

Tabel 1. Implementasi Konsep CBT dalam Pengembangan Desa Wisata Puton Watu Ngelak

Prinsip Implementasi CBT (Robinson, 2012)	Aspek Pengembangan Desa Wisata Berbasis CBT	Nilai Capaian (%)
Mengenal, mendukung, dan mempromosikan kepemilikan masyarakat dalam pariwisata	Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata	68,12
Melibatkan anggota masyarakat dari setiap tahap pengembangan pariwisata dalam berbagai aspeknya		
Mempromosikan kebanggaan terhadap komunitas bersangkutan		
Meningkatkan kualitas kehidupan	Pelestarian Lingkungan	73,40
Menjamin keberlanjutan lingkungan		
Menonjolkan keaslian hubungan masyarakat dengan lingkungannya		
Melindungi ciri khas (keunikan) dan budaya masyarakat lokal	Pelestarian Budaya	65,91
Mengembangkan pembelajaran lintas budaya		
Menghormati perbedaan budaya dan martabat manusia		
Mendistribusikan keuntungan dan manfaat yang diperoleh secara proporsional kepada anggota masyarakat	Perekonomian Masyarakat	49,57
Memberikan kontribusi dengan persentase tertentu dari pendapatan yang diperoleh untuk pengembangan masyarakat		

Sumber: Analisis Data Primer, 2018

Nilai capaian pada tiap-tiap aspek pengembangan CBT tersebut, apabila dibuat kategorisasi maka dapat dibagi menjadi lima, yaitu 0—20% maka dikatakan sangat rendah, 21—40% rendah, 41—60% sedang, 61—80% tinggi, dan 81—100% sangat tinggi. Berdasarkan hasil capaian pada Tabel 1., maka diketahui bahwa aspek partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata, aspek pelestarian lingkungan, dan aspek pelestarian budaya tergolong tinggi, sedangkan aspek perekonomian masyarakat masih tergolong sedang.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata dalam hal ini ditinjau tiga prinsip implementasi konsep CBT, yaitu mengenali, mendukung, dan mempromosikan kepemilikan masyarakat dalam pariwisata; melibatkan anggota masyarakat dari setiap tahap pengembangan pariwisata dalam berbagai aspeknya; dan mempromosikan kebanggaan terhadap komunitas bersangkutan. Secara keseluruhan, aspek ini sudah memiliki nilai capaian yang tergolong tinggi karena pada dasarnya masyarakat mengenali dan mendukung penuh adanya pengembangan wisata di daerahnya. Dukungan ini salah satunya diwujudkan dengan adanya aset-aset desa wisata yang merupakan kepemilikan masyarakat melalui iuran bersama. Apabila terdapat keuntungan dari penggunaan aset ini dalam kegiatan wisata, maka sebagian keuntungan tersebut juga akan dibagi kepada masyarakat dan sebagian masuk ke dalam kas kelompok pengelola wisata yang biasa disebut kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Salah satu aset bersama yang ada di Desa Wisata Puton Watu Ngelak, yaitu perahu yang digunakan untuk wisata susur Sungai Opak. Seluruh masyarakat di Desa Wisata Puton Watu Ngelak juga sudah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam kegiatan pengembangan desa wisata, baik melalui Pokdarwis, kelompok budaya, kelompok UMKM, ataupun kelompok lainnya yang semua terintegrasi dalam wadah pengembangan desa wisata. Hal ini menimbulkan adanya rasa bangga bagi masyarakat, karena setiap masyarakat merasa bahwa dirinya memiliki berperan dan memiliki ruang untuk menyalurkan kontribusinya dalam pengembangan desa wisata.

Aspek pelestarian lingkungan dalam penelitian ini dilihat melalui tiga indikator yang merupakan prinsip implementasi konsep CBT, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan; menjamin keberlanjutan lingkungan; dan menonjolkan keaslian hubungan masyarakat dengan lingkungannya. Nilai capaian untuk aspek pelestarian lingkungan

merupakan capaian tertinggi, yaitu sebesar 73,40%. Hal ini dikarenakan masyarakat menjaga dengan baik kondisi alam desanya agar tetap sejuk dan asri. Masyarakat melakukan penanaman tanaman pekarangan dan kerja bakti secara rutin. Selain itu, sudah ada upaya pemisahan sampah organik dan anorganik, sehingga sampah dapat diolah kembali, yaitu diolah menjadi pupuk organik atau dijadikan kerajinan, seperti tas dari bekas kemasan plastik atau kain perca.

Aspek pelestarian budaya terindikasi melalui tiga prinsip implementasi konsep CBT, antara lain melindungi ciri khas (keunikan) dan budaya masyarakat lokal; mengembangkan pembelajaran lintas budaya; dan menghormati perbedaan budaya dan martabat manusia. Berdasarkan hasil penelitian yang tertera pada Tabel 1., aspek pelestarian budaya memiliki capaian sebesar 65,91%, yang mana nilai ini sudah tergolong tinggi. Kebudayaan lokal yang menjadi ciri khas masyarakat, yaitu kesenian gejog lesung. Kesenian ini seringkali dipentaskan sebagai penyambutan bagi tamu rombongan wisata ke Desa Wisata Puton Watu Ngelak. Sebagai kawasan wisata, Desa Wisata Puton Watu Ngelak seringkali menerima wisatawan yang berasal dari mancanegara. Kunjungan dari wisatawan asing ini dijadikan masyarakat sebagai ajang untuk mengenalkan budaya khas lokal Dusun Puton sekaligus mempelajari budaya asing dari wisatawan tersebut. Adanya perbedaan budaya ini diakui oleh masyarakat lokal bahwa memang cukup mencolok, tetapi tidak menjadi masalah dan dapat ditoleransi dengan baik karena justru menjadi ajang belajar bagi masyarakat.

Aspek perekonomian masyarakat diukur melalui dua prinsip implementasi konsep CBT, yaitu distribusi keuntungan dan manfaat yang diperoleh secara proporsional kepada anggota masyarakat dan memberikan kontribusi dengan persentase tertentu dari pendapatan yang diperoleh untuk pengembangan masyarakat. Aspek perekonomian masyarakat dalam pengembangan desa wisata masih tergolong sedang, yaitu sebesar 49,57%. Aspek perekonomian masyarakat belum optimal terdampak melalui adanya kegiatan wisata karena keuntungan yang didapat melalui kegiatan wisata sejauh ini sebagian besar masih dikelola oleh kelompok. Adanya beberapa masyarakat yang memiliki hak atas aset desa wisata pun belum banyak merasakan keuntungan. Hal ini dikarenakan intensitas kunjungan yang masih fluktuatif, sehingga desa wisata belum bisa memiliki pemasukan yang tetap dalam jangka waktu tertentu.

KESIMPULAN

Pengembangan Desa Wisata Puton Watu Ngelak secara umum sudah mewujudkan adanya implemantasi konsep CBT sebagai konsep ideal dalam pengembangandes wisata. Aspek utama CBT, yaitu partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata, pelestarian lingkungan, dan pelestarian budaya sudah terimplementasi dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai capaian yang tergolong tinggi pada ketiga aspek tersebut. Namun, aspek perekonomian masyarakat masih tergolong sedang, sehingga dalam hal ini, masih dapat dioptimalkan lagi agar masyarakat dapat mengalami peningkatan perekonomian melalui adanya kegiatan pengembangan desa wisata.

Belum optimalnya aspek perekonomian masyarakat dikarenakan belum adanya pemasukan yang stabil melalui kunjungan atau kegiatan desa wisata lainnya. Sehingga, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan desa wisata adalah dengan adanya kegiatan promosi desa wisata, pembuatan paket wisata yang menarik, dan penyediaan wahana atau atraksi wisata yang lebih beragam. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan segmentasi pengunjung sehingga jumlah kunjungan wisata di Desa Wisata Puton Watu Ngelak dapat meningkat, yang mana diharapkan juga akan berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamdi, A.S., E. Bahruddin. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan. Deepublish, Yogyakarta.
- Robinson, P, 2012, Tourism, the Key Concepts, Routledge, Taylor & Francis Group, New York.
- Sumaryadi, I.N., 2005, Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Jakarta: Citra Utama.

PENGEMBANGAN KELOMPOK USAHA ITIK DI KECAMATAN BERBAK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Rifli Rindes M^{1*}, Pahantus Maruli¹, Firmansyah¹, dan Depison¹

¹Fakultas Peternakan Universitas Jambi

Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi – Muara Bulian KM.15 Mendalo Jambi

*Email : rifli_rindes@yahoo.co.id

ABSTRAK

Salah satu desa yang sangat potensial untuk dikembangkan ternak itik di Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Desa Rantau Makmur karena didukung sumberdaya alam dan sumber pakan ternak. Untuk sumberdaya alam, memiliki parit-parit sehingga sangat cocok untuk budidaya itik, dan potensi sumber pakan ternak terdiri dari limbah pertanian dan perikanan. Program pengabdian kepada masyarakat berupa Pengembangan Kelompok Usaha Itik di Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertujuan penerapan teknologi penetasn telur itik pada kelompok tani ternak itik di Desa Rantau Makmur sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas ternak itik, serta menjadi usaha yang menguntungkan. Permasalahan yang dihadapi mitra adalah untuk mengembangkan populasi ternak itik hanya mengandalkan ternak lain untuk penetasan telur atau tidak menggunakan mesin tetas, rendahnya pengetahuan dan pemahaman petani mengenai teknologi penetasan, sistem pemeliharaan yang ekstensif, penyediaan pakan itik hanya tergantung pada alam, pengetahuan dan ketrampilan anggota kelompok tani mengenai pakan masih rendah, dan kelembagaan kelompok tani belum berkembang. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Kelompok Tani di Desa Rantau Makmur sebagai mitra untuk program pengabdian kepada masyarakat melaksanakan pelatihan dan bimbingan pengoperasian mesin tetas yang benar, melaksanakan penyuluhan tentang telur tetas yang baik, dan demonstrasi pembuatan mesin tetes dari bahan-bahan sederhana.

Kata Kunci : Itik, Penetasan Telur, Kelompok Tani

PENDHULUAN

Latar Belakang

Ternak itik memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan karena itik merupakan salah satu ternak yang memiliki daya adaptasi yang tinggi di daerah pedesaan. Daerah pedesaan merupakan daerah yang tepat untuk mengembangkan ternak itik karena memudahkan dalam pemeliharaan, perawatan, dan daya tahan yang lebih kuat, sehingga ternak itik dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan.

Daerah pedesaan yang memiliki potensi ternak itik salah satunya Kecamatan Berbak, karena didukung oleh tingkat populasi ternak itik yang berkembang lebih cepat yaitu tumbuh 6,01 % per tahun selama periode 2013-2017 (Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka, 2018). Selain itu pada tahun 2017, populasi ternak itik di Kecamatan Berbak yang berjumlah 4.355 ekor atau 12,42 % dari populasi kabupaten (35.072 ekor) menempati posisi ke 3 dari 11 kecamatan. Produksi telur itik di Kecamatan Berbak pada tahun 2017 sebanyak 22.571 kg yang meningkat sangat pesat yaitu 94,88 % per tahun selama periode tahun 2013-2017 jauh melebihi pertumbuhan kabupaten (2,26 %).

Salah satu desa yang sangat potensial untuk dikembangkan ternak itik di Kecamatan Berbak adalah Desa Rantau Makmur karena didukung sumberdaya alam, sumber pakan ternak dan kelembagaan. Untuk sumberdaya alam, secara geografis, Desa Rantau Makmur memiliki luas 33,4 km² (17,18 % dari luas Kecamatan Berbak) dan memiliki parit-parit sehingga sangat cocok untuk budidaya itik. Potensi sumber pakan ternak di Desa Rantau Makmur yaitu terdiri dari limbah pertanian dan perikanan. Luas potensi lahan pertanian di Desa Rantau Makmur adalah 2.340 ha yang terdiri dari 642 ha tanaman padi, tanaman palawija seluas 346 ha, tanaman hortikultura seluas 152 ha, dan 879 ha adalah perkebunan. Selanjutnya, potensi perikanan Desa Rantau Makmur adalah terbesar yaitu 257 kolam (52 % dari 488 kolam yang ada di Kecamatan Berbak) (Kecamatan Berbak Dalam Angka, 2017).

Kelompok tani **Sopo Nyono** adalah satu-satunya kelompok tani yang ada di Desa Rantau Makmur yang seluruh anggota kelompok taninya memelihara ternak itik. Populasi ternak itik pada Kelompok tani Sopo Nyono berjumlah 1.200 ekor yang mengalami perkembangan populasi secara berfluktuasi. Pada tahun 2016, kelompok ini mendapat bantuan ternak itik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam program penyebaran ternak itik. Kelompok tani **Sopo Nyono** akan menjadi mitra yang akan dibina.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat pada Kelompok tani **Sopo Nyono** di Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak mendukung Renstra LPPM UNJA tahun 2016-2021, salah satu temanya adalah Peternakan dengan sub tema peningkatan produksi peternakan, perbaikan teknologi pakan, perbaikan teknologi pengolahan hasil ternak pemasaran dan kelembagaan usaha ternak.

Permasalahan Mitra

Berdasarkan analisis situasi dan diskusi dengan Kelompok Tani Sopo Nyono sebagai mitra untuk program Pengabdian Kepada Masyarakat, maka dapat ditemukan permasalahan utama sebagai berikut :

- a. Pada Kelompok Tani Sopo Nyono, penetasan telur itik hanya mengandalkan ternak lain atau tidak menggunakan mesin tetas sehingga daya tetas telur itik menjadi rendah. Menurut Widodo (1999), penetasan telur merupakan cara untuk mempertahankan kelangsungan hidup Itik itu sendiri dan merupakan proses biologis yang kompleks.
- b. Ternak itik pada Kelompok Tani Sopo Nyono di Desa Rantau Makmur masih dipelihara secara ekstensif sehingga telur yang ditetaskan memiliki daya tetas yang rendah. Kondisi ini sesuai dengan hasil penelitian Darmawati dkk (2016), bahwa persentase fertilitas dan daya tetas telur itik cihateup (yang dipelihara secara ekstensif) lebih rendah dari telur itik alabio (yang dipelihara secara intensif). Pemeliharaan ternak itik yang ekstensif pada Kelompok Tani Sopo Nyono di Desa Rantau Makmur menyebabkan telur yang diproduksi banyak yang kotor sehingga memiliki daya tetas yang rendah. Kondisi ini didukung oleh pendapat Rohaeni *et al.* (2005) bahwa kondisi telur yang kotor memungkinkan peluang masuknya mikroorganisme ke dalam telur melalui pori-pori kerabang yang menyebabkan kematian embrio. Ditambahkan oleh Setiadi *et al.* (1992) yang menyatakan tingginya tingkat kematian embrio salah satu diantaranya adalah faktor kebersihan telur.
- c. Masalah lain yang dihadapi oleh anggota Kelompok Tani Sopo Nyono di Desa Rantau Makmur rendahnya pengetahuan dan pemahaman petani mengenai teknologi penetasan. Menurut Djanah (1984), faktor-faktor yang mempengaruhi daya tetas yaitu teknis pada waktu memilih telur tetas atau seleksi telur tetas (bentuk telur, bobot telur, keadaan kerabang, warna kerabang dan lama penyimpanan) dan teknis operasional menjalankan mesin tetas (suhu, kelembapan, sirkulasi udara dan pemutaran telur), serta faktor yang terletak pada induk yang digunakan sebagai bibit. Ditambahkan Paimin (2004) kegagalan dalam penetasan banyak terjadi pada periode kritis yaitu tiga hari pertama sejak telur dieramkan dan tiga hari terakhir

menjelang menetas. periode kritis ini terjadi akibat perubahan fisiologis embrio yang sudah sempurna menjelang penetasan.

- d. Selanjutnya masalah lain yang dihadapi oleh anggota Kelompok Tani Sopo Nyono di Desa Rantau Makmur terbatas atau kurangnya pengetahuan dan pemahaman petani mengenai pemilihan telur yang baik untuk telur tetas. Menurut Ngepkep Ginting (1995), daya tetas telur juga dipengaruhi oleh kesegaran telur. Telur yang disimpan 4 hari dalam suhu ruang di daerah tropis, waktu tetasnya akan bertambah 30 menit dan daya tetasnya akan berkurang 4%.
- e. Pada waktu musim tanam padi, ternak itik pada Kelompok Tani Sopo Nyono harus dikandangkan. Kondisi ini menyebabkan pakan ternak itik menjadi berkurang sehingga produksi telur itik menurun tajam dan bahkan berhenti sementara. Produksi dan kualitas telur itik sangat dipengaruhi oleh sistem pemeliharaan yang dilakukan peternak (Balitbang Deptan, 2010). Rendahnya tingkat produksi telur itik pada sistem pemeliharaan ekstensif karena itik sangat tergantung pada ketersediaan pakan alami yang ada di sawah pasca panen. Bahan pakan yang dimanfaatkan adalah butir-butir padi yang tercecer, keong, katak kecil, belalang, dan serangga (Setioko dkk.,1985).
- f. Pada waktu musim bukan tanam padi, ternak itik pada Kelompok Tani Sopo Nyono di Desa Rantau Makmur dilepas untuk mencari makanan sendiri. Peternak tidak memperhatikan apa yang dimakan, mulai dari sisa panen pertanian hingga bangkai ikut dimakan sehingga ternak itik banyak yang mati. Menurut Setioko dkk (2000), pemeliharaan secara semi intensif juga sudah banyak dilakukan oleh peternak di pedesaan, pemeliharaan ini biasa dilakukan saat musim panen.
- g. Pada waktu air pasang, sebagian besar lahan pertanian terendam sehingga pakan ternak itik sangat sulit. Tetapi setelah air surut ternyata banyak ditemukan ikan dan keong mas sebagai sumber pakan, namun belum dimanfaatkan sama sekali. Menurut Susilorini dkk (2008), saat itik dilepas, maka itik akan mencari makanannya sendiri yang berada di aliran sungai maupun di sawah yang berupa keong, rumput-rumput, gabah, dan sebagainya.

Solusi Permasalahan

Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Kelompok Tani Sopo Nyono sebagai mitra untuk program Pengabdian Kepada Masyarakat :

1. *Good Hatching Practice*

- a. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan pengoperasian mesin tetas yang benar untuk penetasan telur itik yang terdiri dari teknik pengaturan suhu yang tepat, teknik pengaturan kelembaban yang tepat, tata cara penetasan telur. Dengan pelatihan ini masalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman petani anggota Kelompok Tani Sopo Nyono di Desa Rantau Makmur mengenai teknologi penetasan telur itik dapat diminimalisir.
- b. Melaksanakan penyuluhan tentang telur tetas yang baik yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi daya tetas berupa teknis pada waktu memilih telur tetas atau seleksi telur tetas (bentuk telur, bobot telur, keadaan kerabang, warna kerabang dan lama penyimpanan).
- c. Melaksanakan demonstrasi pembuatan mesin tetes dari bahan-bahan sederhana. Kegiatan ini diharapkan petani anggota Kelompok Tani Sopo Nyono di Desa Rantau Makmur dapat membuat mesin tetes sendiri dengan harga yang murah dan terjangkau sehingga tidak tergantung pada mesin tetas otomatis.

2. Teknologi pengolahan Pakan

- a. Melaksanakan demonstrasi pembuatan pelet pakan ternak itik dari limbah pertanian dan perikanan. Kegiatan ini diharapkan petani anggota Kelompok Tani Sopo Nyono di Desa Rantau Makmur dapat membuat pelet sebagai pakan ternak itik sehingga dapat disimpan pada saat musim tanam dan musin air pasang.
- b. Pengolahan pakan lengkap dalam bentuk pelet merupakan salah satu cara aplikasi teknologi pakan. Keuntungan pakan dalam bentuk pelet antara lain : mengurangi pengambilan pakan secara selektif dan meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi ternak (Santosa, 2008). Ternak yang mengkonsumsi pakan pelet secara umum mempunyai performa yang lebih baik (pertambahan bobot badan dan konversi pakan yang lebih

rendah) dibandingkan ternak yang mengkonsumsi pakan pakan dalam bentuk mash (Widiastuti dkk., 2004). Kualitas fisik pakan pelet yang dapat dijadikan indikator kualitas adalah kadar air (KA), kekerasan dan durabilitas. Penambahan air selama pembuatan pellet akan mempengaruhi kualitas produk, dan dapat mempengaruhi penampakan, tekstur dan cita rasa pakan (Retnani dkk., 2011). Kekerasan dan durabilitas merupakan indikator utama kualitas fisik pelet. Durabilitas pelet merupakan sifat fisik yang menggambarkan kekuatan pelet terhadap beban atau tekanan untuk mengukur kekuatan pelet selama penyimpanan dan distribusi

METODE KEGIATAN

a. Sosialisasi Program

Meskipun ketua Kelompok Tani Sopo Nyono sebagai Mitra sudah menandatangani kesediaan bekerjasama, namun karena kegiatan usaha ternak itik pada Kelompok Tani Sopo Nyono di Desa Rantau Makmur melibatkan berbagai pihak (anggota kelompok tani), maka sosialisasi perlu juga dilakukan terhadap mereka, karena pihak lain akan turut terlibat dalam aktivitas pendampingan, serta secara langsung turut berperan untuk mencapai keberhasilan kegiatan program Pengabdian Kepada Masyarakat.

b. Diskusi tim pelaksana program dengan kelompok tani

Kegiatan diskusi antara tim pelaksana Program Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai *Good Hatching Practice* dengan ketua atau pengurus dan anggota kelompok tani Kelompok Tani Sopo Nyono di Desa Rantau Makmur dimaksudkan untuk membicarakan tujuan dan materi kegiatan, langkah-langkah yang akan dilakukan, peranan kelompok tani dan tim pelaksana program, serta jadwal pelaksanaan program.

c. Kegiatan Penyuluhan *Good Hatching Practice*

Kegiatan penyuluhan oleh tim pelaksana pengabdian Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan materi *Good Hatching Practice* mencakup telur tetas yang baik. Teknis pada waktu memilih telur tetas atau seleksi telur tetas berupa bentuk telur, bobot telur, keadaan kerabang, warna kerabang dan lama penyimpanan. Menurut Djanah (1984), faktor-faktor yang mempengaruhi daya tetas yaitu teknis pada

waktu memilih telur tetas atau seleksi telur tetas (bentuk telur, bobot telur, keadaan kerabang, warna kerabang dan lama penyimpanan). Ditambahkan Shanaway (1994) mengemukakan bahwa bobot telur yang terlalu besar atau terlalu kecil menyebabkan menurunnya daya tetas. Bobot telur yang ditetaskan sebaiknya seragam sesuai dengan bangsa unggas

d. Kegiatan pendampingan dan bimbingan *Good Hatching Practice*

1. Pengoperasian mesin tetas yang benar
 - a) Peletakkan mesin tetas yang benar
 - b) Pengujian (test) fungsi-fungsi mesin tetas agar bekerja secara normal
 - c) Memperhatikan kondisi mesin tetas yang benar (benda berat di atas mesin, serangga masuk mesin
 - d) Tindakan darurat (antisipasi listrik padam). Menurut Prasetyo dan Susanti (2000), hasil tetas telur dipengaruhi oleh faktor : peralatan mesin tetas dalam menciptakan kondisi lingkungan (kelembaban dan temperatur) yang sesuai sebagai persyaratan menetasnya telur, dan faktor lingkungan diluar kemampuan pengelola misalnya terjadi perubahan tegangan listrik maupun pemadaman listrik.
2. Teknik pengaturan suhu yang tepat
 - a) Pengaturan suhu pada mesin tetas berlangsung secara otomatis menggunakan alat yang disebut thermostat
 - b) Peletakkan thermometer pada tempat yang tepat. Menurut Hodgetts (2000), menyatakan suhu yang baik untuk penetasan adalah 37,8°C, dengan kisaran 37,2-38,2°C. Pada suhu ini akan dihasilkan daya tetas yang optimum.
3. Teknik pengaturan kelembaban yang sesuai
 - a) Pengaturan kelembaban pada mesin tetas. Temperatur optimum untuk menetas telur itik yaitu 38-39°C dengan kelembaban 70-85 %, pada kondisi tersebut didapatkan daya tetas dan hasil tetas tinggi dengan mortalitas embrio rendah (Ningtyas, dkk., 2013).
4. Tata cara penetasan yang benar
 - a) Persiapan : menguasai ilmu penetasan, persiapan mesin tetas, persiapan telur tetas

b) Proses Penetasan : pemberian tanda pada kulit telur, penyusunan telur pada rak telur hatcher, pemutaran telur, peneropongan telur, penetasan telur.

Pemutaran telur yang dilakukan peternak selama proses penetasan biasanya sebanyak dua kali/hari. Proses pemutaran telur yang tidak teratur dapat menyebabkan panas yang mengenai telur menjadi tidak merata sehingga embrio akan lengket pada kerabang dan akhirnya menyebabkan kematian embrio (Daulay *et al.*, 2008). Hasil penelitian Abiola *et al.* (2008) menunjukkan bahwa frekuensi pemutaran telur tidak memberikan pengaruh terhadap fertilitas telur.

e. Kegiatan Demonstrasi pembuatan mesin tetes dari bahan-bahan sederhana

Dilakukan demonstrasi pembuatan mesin tetes dari bahan-bahan yang sederhana, harga murah, mudah didapat sehingga tidak tergantung pada mesin tetes otomatis. Kemudian dilakukan penetasan telur itik dengan mesin tetes otomatis dan mesin buatan sendiri. Selanjutnya dilakukan evaluasi penetasan telur. Pada tahap ini dilakukan perbandingan daya tetes telur itik pada mesin tetes otomatis dengan mesin tetes yang dibuat sendiri dari bahan-bahan sederhana.

f. Kegiatan demonstrasi pembuatan pelet pakan ternak itik

Pembuatan pakan dari potensi lingkungan dengan memanfaatkan limbah ikan yang tersedia, dedak padi dan jagung untuk meningkatkan produktivitas ternak unggas air itik yang optimal. Pengetahuan teknologi pakan yang ditawarkan adalah membuat ransum pakan itik yang terdiri dari ikan rica-rica yang cukup banyak tersedia sebanyak 20%, dedak padi sebanyak 40 % dan Jagung sebanyak 40 %. Dari campuran 3 macam bahan penyusun ransum ini dapat dipenuhi protein 17 %, sehingga memenuhi protein minimal pakan sebanyak 16 %.

g. Evaluasi hasil kegiatan *Good Hatching Practice*

Pada akhir kegiatan akan dilakukan diskusi dan evaluasi hasil kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat terutama : 1) gambaran umum hasil kegiatan demonstrasi pembuatan mesin tetes, 2) respon, permasalahan dan harapan petani terkait materi penyuluhan dan paket teknologi *Good Hatching Practice* yang ditawarkan dan

diterapkan; dan 3) evaluasi peluang penerapan teknologi *Good Hatching Practice* selanjutnya oleh kelompok tani dan petani lainnya di Desa Rantau Makmur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan

Kegiatan penyuluhan oleh tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan materi penetasan telur mencakup telur tetas yang baik. Pada Kelompok Tani Sopo Nyono di Desa Rantau Makmur, penetasan telur itik hanya mengandalkan ternak lain atau tidak menggunakan mesin tetas. Kondisi ini mengakibatkan daya tetas telur itik menjadi rendah. Menurut Widodo (1999), penetasan telur merupakan cara untuk mempertahankan kelangsungan hidup Itik itu sendiri dan merupakan proses biologis yang kompleks. Didalam proses penetasan ada dua faktor penting yang tidak dapat dipisahkan yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik ialah faktor yang ada pada telur itu sendiri seperti keadaan (normal atau abnormal) dan asal usul telur (terkawini dengan baik atau tidak). Sedangkan faktor lingkungan, menyangkut masalah penanganan telur sebelum ditetaskan dan tatalaksana penetasannya.



Kegiatan penyuluhan oleh Tim Pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan materi mencakup : 1) arti penting dan peranan tatakelola pemeliharaan ternak unggas air itik yang baik; 2) ketersediaan pakan yang memenuhi standar sepanjang tahun; dan 3)

penetas telur itik untuk pengembangan skala usaha unggas air itik yang efisien dan berkelanjutan serta dapat menjamin peningkatan kesejahteraan.

Bahan/materi penyuluhan disiapkan oleh Tim Pelaksana pengabdian kepada masyarakat berupa *hardcopy* dan diberikan kepada setiap ketua dan anggota kelompok tani sebelum pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Bahan penyuluhan sekaligus sebagai referensi bagi petani dalam rangka pengkayaan pengetahuan dan panduan penerapan teknologi yang ditawarkan sebagai solusi permasalahan petani.

Kegiatan Pendampingan dan Bimbingan penetasan Telur Itik

1. Pengoperasian mesin tetas yang benar
 - c) Peletakkan mesin tetas yang benar
 - d) Pengujian (test) fungsi-fungsi mesin tetas agar bekerja secara normal
 - e) Memperhatikan kondisi mesin tetas yang benar (benda berat di atas mesin, serangga masuk mesin
 - f) Tindakan darurat (antisipasi listrik padam). Menurut Prasetyo dan Susanti (2000), hasil tetas telur dipengaruhi oleh faktor : peralatan mesin tetas dalam menciptakan kondisi lingkungan (kelembaban dan temperatur) yang sesuai sebagai persyaratan menetasnya telur, dan faktor lingkungan diluar kemampuan pengelola misalnya terjadi perubahan tegangan listrik maupun pemadaman listrik.

5. Teknik pengaturan suhu yang tepat
 - a) Pengaturan suhu pada mesin tetas berlangsung secara otomatis menggunakan alat yang disebut thermostat
 - b) Peletakkan thermometer pada tempat yang tepat. Menurut Hodgetts (2000), menyatakan suhu yang baik untuk penetasan adalah 37,8°C, dengan kisaran 37,2-38,2°C. Pada suhu ini akan dihasilkan daya tetas yang optimum.



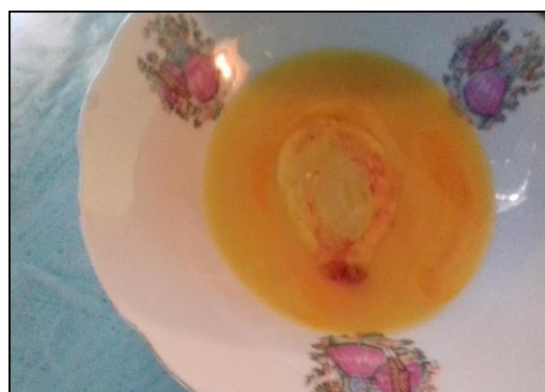
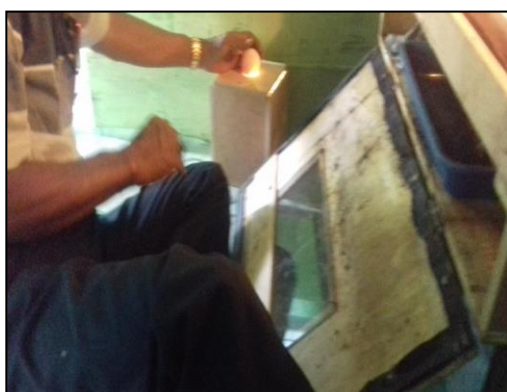
6. Teknik pengaturan kelembaban yang sesuai

Pengaturan kelembaban pada mesin tetas. Temperatur optimum untuk menetas telur itik yaitu 38-39⁰C dengan kelembaban 70-85 %, pada kondisi tersebut didapatkan daya tetas dan hasil tetas tinggi dengan mortalitas embrio rendah (Ningtyas, dkk., 2013).

7. Tata cara penetasan yang benar

- a) Persiapan : menguasai Ilmu penetasan, persiapan mesin tetas, persiapan telur tetas
- b) Proses Penetasan : pemberian tanda pada kulit telur, penyusunan telur pada rak telur hatcher, pemutaran telur, peneropongan telur, penetasan telur.

Pemutaran telur yang dilakukan peternak selama proses penetasan biasanya sebanyak dua kali/hari. Proses pemutaran telur yang tidak teratur dapat menyebabkan panas yang mengenai telur menjadi tidak merata sehingga embrio akan lengket pada kerabang dan akhirnya menyebabkan kematian embrio (Daulay *et al.*, 2008). Hasil penelitian Abiola *et al.* (2008) menunjukkan bahwa frekuensi pemutaran telur tidak memberikan pengaruh terhadap fertilitas telur.





Kegiatan Demonstrasi pembuatan mesin tetes dari bahan-bahan sederhana

Dilakukan demonstrasi pembuatan mesin tetes dari bahan-bahan yang sederhana, harga murah, mudah didapat sehingga tidak tergantung pada mesin tetes otomatis. Kemudian dilakukan penetasan telur itik dengan mesin tetes otomatis dan mesin buatan sendiri. Selanjutnya dilakukan evaluasi penetasan telur. Pada tahap ini dilakukan perbandingan daya tetas telur itik pada mesin tetes otomatis dengan mesin tetes yang dibuat sendiri dari bahan-bahan sederhana.





Kegiatan demonstrasi pembuatan pelet pakan ternak itik

Pembuatan pakan dari potensi lingkungan dengan memanfaatkan limbah ikan yang tersedia, dedak padi dan jagung untuk meningkatkan produktivitas ternak unggas air itik yang optimal. Pengetahuan teknologi pakan yang ditawarkan adalah membuat ransum pakan itik yang terdiri dari ikan rica-rica yang cukup banyak tersedia sebanyak 20%, dedak padi sebanyak 40 % dan Jagung sebanyak 40 %. Dari campuran 3 macam bahan penyusun ransum ini dapat dipenuhi protein 17 %, sehingga memenuhi protein minimal pakan sebanyak 16 %.



Evaluasi hasil kegiatan

Pada akhir kegiatan akan dilakukan diskusi dan evaluasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat terutama : 1) gambaran umum hasil kegiatan demonstrasi pembuatan mesin tetas, 2) respon, permasalahan dan harapan petani terkait materi penyuluhan dan

paket teknologi *Good Hatching Practice* yang ditawarkan dan diterapkan; dan 3) evaluasi peluang penerapan teknologi *Good Hatching Practice* selanjutnya oleh kelompok tani dan petani lainnya di Desa Rantau Makmur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Program pengabdian kepada masyarakat tentang Pengembangan Kelompok Usaha Itik Sopo Nyono di Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh Tim Pengabdian Fakultas Peternakan Universitas Jambi telah dapat membantu menyelesaikan masalah pengembangan populasi ternak unggas itil dengan teknologi mesin tetas dan ketersediaan pakan ternak unggas itik berbasis potensi lokal.

Saran

Diharapkan kerjasama PPL dan PPM peternakan dapat ikut membantu pembinaan kelompok peternakan itik sopoyono setelah kegiatan pengabdian masyarakat oleh Tim Fakultas Peternakan Universitas Jambi selesai. Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini selalu hadir aparat pemerintah desa seperti Lurah, sehingga di masa yang akan datang diharapkan kegiatan ini dapat didukung oleh program pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiola, S. S., A. O. Afolabi and O. J. Dosunmu. 2008. Hatchability of chicken eggs as influenced by turning frequency in hurricane lantern incubator. *Afr. J. Biotech.* 7: 43104313.
- Balitbang Departemen Pertanian. 2010. *Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Unggas*. Departemen Pertanian. Jakarta
- Darmawati, D., Rukmiasih, dan R. Afnan. 2016. Daya Tetas Telur Itik Cihateup dan Alabio. *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan*. Vol. 04 No. 1 Januari 2016. Hal: 257-263
- Daulay, A. H., S. Aris, dan A. Salim. 2008. Pengaruh umur dan frekuensi pemutaran terhadap daya tetas dan mortalitas telur ayam Arab (*Gallus turticus*). *Jurnal Agribisnis Peternakan* 1: 6-10.

- Djanah, D. 1984. *Beternak Ayam dan Itik*. Cetakan Kesebelas. C.V Yasaguna. Jakarta.
- Hodgetts. 2000. *Incubation The Psichal Reuqiments. Abor Acress service Bulletin* No 15, August 1.
- Ngepkep Ginting, 1995. Manajemen Telur Tetas dari Panen hingga DOC. *Poultry Indonesia* bulan Januari. No. 179 : Hal : 11 - 12 .
- Ningtyas, M. S., Ismoyowati dan I. H. Sulistyawan. 2013. *Pengaruh Temperatur Terhadap Daya Tetas dan Hasil Tetas Telur Itik (Anas plathyrincos)*. *Jurnal Ilmiah Peternakan*. Purwokerto.
- Paimin, F.B. 2004. *Membuat dan Mengelola Mesin Tetas*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Prasetyo, L.H. dan T. Susanti. 2000. Persilangan timbale balik antara itik Alabio dan Mojosari Periode awal bertelur. *Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner*, Vol. 5, No. 4 : 210-213.
- Retnani, Y., E.D. Putra dan L. Herawati. 2011. Pengaruh taraf penyemprotan air dan lama penyimpanan terhadap daya tahan ransum broiler finisher berbentuk pellet. *Jurn Agripet* 11 (1) : 23 – 30.
- Rohaeni ES, Subhan A, Setioko AR. 2005. Usaha penetasan itik alabio sistem sekam yang dimodifikasi di sentra pembibitan kabupaten Hulu Sungai Utara. *Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner* [Internet]. [2005 Sep 12-13; Bogor, Indonesia]. Bogor (ID): Puslitbang Peternakan. [diunduh 2018 Agustus 10]. Tersedia pada: <http://peternakan.litbang.deptan.go.id/fullteks/semnas/pro05-121.pdf>.
- Setiadi P, Lasmini A, Setioko AR, Sinurat AP. 1992. Pengujian metode penetasan telur itik tegal di pedesaan. *Pengolahan dan Komunikasi Hasil-hasil Penelitian. Unggas dan Aneka Ternak*;1992 Feb 20-22; Bogor, Indonesia. Bogor (ID): hlm 38-42.
- Setioko, AR, Hetzel DJS, Evans AJ. 1985. *Duck production in Indonesia. In Duck Production Science and World Practice*. Edited by David J, Farrel, Paul Stapleton. The University of New England, p 418-427
- Setioko AR, Iskandar S, Raharjo YC, Soedjana TD, Murtisari T, Purba M, Estuningsih SE, Sunandar N, Pramono D. 2000. Model usaha ternak itik dalam sistem pertanian IP padi 300. *Jurnal Ilmu Ternak*. 5(1):38-45.
- Shanawany. 1994. *Quail Production Systems*. FAO of The United Nations. Rome.
- Susilorini TE, Sawitri ME, Muharliien. 2008. *Budi Daya Ternak Ternak Potensial*. Jakarta (ID). Penebar Swadaya
- Widiastuti , T., C. H. Prayitno dan Munasik. 2004. Kajian kualitas pelet pakan komplit dengan sumber hijauan dan binder yang berbeda. *Journal Animal Production* 6 (1) : 43 - 48
- Widodo, S. 1999. *Tatalaksana Penetasan Telur Itik*. Lokakarya Fungsional Non Peneliti. Balai Penelitian Ternak

PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI PADI HIBRIDA PADA SAWAH ULTISOL DENGAN SISTEM SBSU

M Zulman Harja Utama ^{1*}, Sunadi ¹, Widodo Haryoko ¹

¹ Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Tamansiswa Padang,
Sumatera Barat, Indonesia. JL. Tamansiswa No.9 Padang 25138.

*Email: harja65@yahoo.com

ABSTRAK

Kegagalan panen dan keterbatasan produk beras di pasaran akan dapat mempengaruhi gejala politik, sosial dan ekonomi. Peningkatan produktivitas padi terus diupayakan, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan ketahanan pangan nasional, melalui pemberdayaan. Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan kemampuan dan penguasaan teknologi budidaya, khususnya budidaya tanaman padi. Peningkatan produksi padi akan banyak menghadapi tantangan yang makin kompleks. Terjadinya persaingan dan alih fungsi lahan pertanian dengan berbagai keperluan lainnya seperti prasarana transportasi, perkantoran, waduk, perumahan dan diperparah lagi dengan kondisi cuaca dan lingkungan. Permasalahan lainnya, yang tidak kalah penting adalah terbatasnya varietas padi yang toleran terhadap cekaman lingkungan, terutama cekaman zat besi. Tujuan penelitian mendapatkan pertumbuhan dan produksi beberapa padi hibrida di sawah ultisol dengan sistem SBSU. Percobaan di Koto Baru, Sitiung I Dharmasraya, Sumatra Barat. Percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap, dengan lima ulangan. Faktor tunggal adalah varietas padi, yaitu: Mekongga, Inpari 24, Inpari 27 dan Inpari 28. Lahan sawah yang digunakan mengandung $104.69 \text{ mg kg}^{-1} \text{ Fe}^{2+}$, konsentrasi tersebut sangat mempengaruhi pertumbuhan sehingga menyebabkan keracunan. Produksi gabah kering giling pada semua varietas tetap tinggi walau dalam kondisi tercekam besi, karena jumlah anakan produktif yang terbentuk pada sistem SBSU lebih dari 21 batang per rumpun, dengan produksi GKG $> 5.4 \text{ Mg ha}^{-1}$. Untuk mendapatkan bulir beras kaya akan zat besi dan mampu tumbuh dan berproduksi dengan baik pada kondisi tercekam besi sebaiknya pada kegiatan budidaya menggunakan sistem SBSU dengan varietas Inpari 27 dengan produksi GKG 6.83 Mg ha^{-1} .

Kata kunci: beras; Sistem Bujur Sangkar Utama; Sitiung

PENDAHULUAN

Padi merupakan tanaman pangan yang harus selalu tersedia di pasaran. Kegagalan panen dan keterbatasan produk beras di pasaran akan dapat mempengaruhi gejala politik, sosial dan ekonomi. Peningkatan produktivitas padi terus diupayakan, dalam rangka

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan ketahanan pangan nasional, melalui pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan dan penguasaan teknologi budidaya, khususnya budidaya tanaman padi (Alimoeso, 2014; Utama, 2015).

Peningkatan produksi padi ke depan, akan banyak menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Terjadinya persaingan dan alih fungsi lahan untuk pertanian dengan berbagai keperluan pembangunan lainnya seperti prasarana transportasi, perkantoran, waduk, perumahan dan diperparah lagi dengan kondisi cuaca dan lingkungan yang berkaitan dengan cekaman unsur hara, iklim, gulma, hama dan penyakit. Permasalahan lainnya, yang tidak kalah penting adalah terbatasnya varietas padi yang toleran terhadap cekaman lingkungan, terutama cekaman zat besi (Sahrawat, 2010; Utama *et al.*, 2013; Demidchik *et al.*, 2017).

Ketersediaan lahan subur untuk pertanian sangat terbatas, lahan yang tersedia adalah lahan marginal dengan berbagai permasalahan. Pada tanah mineral masam sering terjadi keracunan besi, yang menyebabkan kerusakan perakaran dan rendahnya ketersediaan hara. Meningkatkan fungsi akar dan menetralkan pengaruh buruk besi menjadi semakin penting, untuk pertumbuhan tanaman padi. Untuk menanggulangi kendala tersebut adalah penggunaan spesies toleran terhadap cekaman (Lestari *et al.*, 2010; Saade *et al.*, 2018). Tanaman toleran mempunyai kemampuan mengembangkan berbagai mekanisme untuk dapat beradaptasi. Mekanisme adaptasi yang dikembangkan tanaman dapat terjadi secara morfologi dan fisiologi (Sunadi *et al.*, 2010; Utama *et al.*, 2017; Gharbi *et al.*, 2017b).

Metode budidaya sangat membantu dalam meningkatkan pertumbuhan, produksi dan kemampuan adaptasi tanaman padi pada cekaman besi. Pada budidaya dengan metode Sistem Bujur Sangkar Utama (SBSU) potensi anakan yang terbentuk mencapai 3.6 juta batang, sedangkan dengan metode konvensional hanya 1.6 juta batang. Terjadi peningkatan jumlah anakan sebesar 125%, jika dibandingkan dengan metode konvensional yang selama ini sering diterapkan oleh petani (Utama *et al.*, 2016; Utama *et al.*, 2017). Upaya untuk menghasilkan varietas toleran, perlu didukung oleh informasi tentang pertumbuhan, produksi dan pola sebaran zat besi pada varietas padi hibrida.

Penelitian tentang Pertumbuhan dan produksi padi hibrida pada sawah ultisol dengan sistem SBSU masih sangat terbatas. Hasil penelitian ini sangat penting untuk rekayasa varietas padi toleran (Shi *et al.*, 2018), khususnya toleran cekaman besi. Selain itu, juga untuk memenuhi kebutuhan beras kaya zat besi dan peningkatan produksi melalui pengembangan metode budidaya.

BAHAN DAN METODE

Percobaan dilaksanakan di sawah tercekam Fe^{2+} di Sitiung I Koto Baru Dharmasraya. Percobaan faktor tunggal menggunakan Rancangan Acak Lengkap, dengan lima ulangan. Faktor tunggal tersebut adalah varietas padi hibrida, yaitu: Mekongga, Inpari 24, Inpari 27, dan Inpari 28.

Benih padi direndam dalam larutan Decis, konsentrasi 3 g l^{-1} dan 1 ml l^{-1} selama 20 menit, dibilas sampai bersih dan direndam selama 24 jam. Perkecambahan dilakukan dengan cara membungkus benih padi dengan kertas merang basah dan ditempatkan dalam baki. Penanaman dilakukan sesuai dengan perlakuan yang ditetapkan. Pemeliharaan dilakukan adalah pemupukan Urea 1/3 dosis, SP 36 dan KCl pada awal penanaman.

Pemberian Urea 1/3 dosis saat berumur 6 minggu dan 1/3 lagi akan memasuki fase generatif. Penyiangian dilakukan pada umur 2 minggu dan umur 6 minggu setelah tanam. Pengairan dilakukan secara bergantian, dan air diusahakan tergenang saat primordial bunga. Pengamatan dilakukan pada setiap unit percobaan, sebanyak tiga sampel untuk setiap unit terhadap karakter agronomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinggi tanaman padi seperti terlihat pada Tabel 1 berkisar antara 64-71 cm, lebih rendah jika dibandingkan dengan deskripsinya, yaitu antara 81-106 cm. Hal ini menunjukkan, bahwa pertumbuhan tinggi varietas padi (Mekongga, Inpari 24, Inpari 27 dan Inpari 28) mengalami hambatan karena adanya cekaman Fe^{2+} . Terhambatnya pertumbuhan tinggi tanaman padi tersebut, diduga karena adanya hambatan dalam pembentukan, translokasi hasil fotosintesis, dan hormon tumbuh yang berfungsi untuk

mendorong pertumbuhan tanaman padi (Demidchik *et al.*, 2017; Saade *et al.*, 2018; Way *et al.*, 2012).

Tabel 1 memperlihatkan bahwa, pertumbuhan anakan yang terbentuk dengan menggunakan Sistem SBSU mampu meningkatkan jumlah anakan sebesar 62-76% (45-65 batang) dengan persentase anakan produktif 34-49 % (21-24 batang), sedangkan pada metode budidaya konvensional, jumlah anakan yang terbentuk sekitar 13-16 batang (Wahab *et al.*, 2017). Banyaknya anakan produktif yang terbentuk karena pada sistem SBSU terdapat empat sub rumpun yang memungkinkan tanaman terhindar dari kompetisi dini pada fase vegetatif sehingga setiap sub rumpun dapat berkembang dengan baik (Utama *et al.*, 2017).

Metode SBSU potensi anakan yang terbentuk mencapai 3.6 juta anakan/batang, sedangkan metode konvensional hanya 1.6 juta anakan/batang (Gambar 1). Terjadi peningkatan 125%, jika dibandingkan dengan metode konvensional yang selama ini sering diterapkan oleh petani. Keunggulan dari sistem ini adalah: 1) pertumbuhan anakan lebih banyak, 2) tidak terjadi persaingan pertumbuhan pada fase vegetatif karena adanya jarak antar bibit dalam satu sub rumpun, 3) populasi per hektar lebih tinggi, 4) meningkatkan produksi per hektar, 5) Umur panen lebih cepat sekitar 90 hari, dan 6) dibudidayakan dengan *System of Rice Intenfication* (Utama, 2015).

Panjang malai terpanjang pada varietas Inpari 24 (24 cm), Inpari 27 (23.8 cm), Inpari 28 (23.3 cm) dan Mekongga (22.2 cm), sedangkan jumlah cabang malai pada setiap varietas tidak memperlihatkan perbedaan yang nyata, yaitu antara 8.2 sampai 8.6 buah. Pembentukan malai merupakan tahapan penting dalam produktivitas padi yang berhubungan dengan pembentukan gabah (Gholizadeh *et al.*, 2017). Bobot gabah per rumpun pada keempat varietas padi tersebut berkisar, antara 58-67.3 g. Secara teori dengan budidaya sistem SBSU akan diperoleh sekitar 90.000 rumpun per ha (Utama *et al.*, 2016), maka bobot GKG yang akan diperoleh berkisar antara 5.22- 6.06 Mg ha⁻¹. Hal ini, tidak berbeda dengan produksi yang diperoleh pada parameter produksi GKG ha⁻¹ (Tabel 2).

Bobot 1.000 gabah varietas (Mekongga, Inpari 24, Inpari 27 dan Inpari 28) yang dibudidayakan pada kondisi tercekam besi berturut-turut adalah 26.5 g; 28.0 g; 27.5 g dan 28.1 g. Bobot gabah tersebut, lebih tinggi jika dibandingkan dengan deskripsinya kecuali

pada varietas Mekongga. Menurut deskripsinya, Mekongga (27-28 g); Inpari 24 (26 g); Inpari 27 (26.7 g) dan Inpari 28 (27.4 g). Tingginya bobot 1.000 gabah menunjukkan bahwa varietas padi tersebut mampu beradaptasi terhadap cekaman, melalui mekanisme translokasi besi yang lebih besar ke bagian akar pada fase generatif sehingga pertumbuhan malai dan gabah dapat berkembang baik (Tabel 2). Produksi GKG tertinggi dari ke empat varietas tersebut adalah Inpari 27, yaitu 6.83 Mg ha⁻¹ selanjutnya Mekongga (6.34 Mg ha⁻¹), Inpari 28 (5.93 Mg ha⁻¹) dan Inpari 24 (5.36 Mg ha⁻¹). Produksi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan deskripsinya, yaitu 5.7- 6.7 Mg ha⁻¹ (Wahab *et al.*, 2017). Tingginya produksi GKG pada percobaan ini walaupun tanaman padi mengalami cekaman besi, karena pada budidaya dengan sistem SBSU mampu menghasilkan anakan produktif yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode konvensional (Utama *et al.*, 2017).

Varietas padi toleran mempunyai kemampuan genetik dalam pengelolaan nutrisi dan pengaruh lingkungan untuk dapat beradaptasi terhadap cekaman hara (Sahrawat *et al.*, 2010; Demidchik *et al.*, 2017). Protein memainkan peran yang berbeda dalam detoksifikasi yang dikodekan dilokalisasi pada semua sel akar (Ma *et al.*, 2014).

Pada semua parameter yang diamati (Tabel 1 dan 2) terlihat bahwa mekanisme dari semua varietas padi hibrida beradaptasi terhadap cekaman besi pada fase vegetatif maupun generatif, terletak pada kemampuannya dalam mengatur pola sebaran zat besi yang diserap bagian akar, batang, daun, gabah dan beras pada fase vegetatif dan generatif.

Mekanisme toleransi tanaman terhadap cekaman, dapat terjadi secara eksternal maupun internal (Utama *et al.*, 2013; Chen *et al.*, 2018; Yang *et al.*, 2002). Mekanisme internal terjadi dengan cara pengaturan serapan dan translokasi zat besi ke bagian akar, batang, daun, gabah dan bulir beras. Pada tanaman toleran terhadap cekaman hara lebih banyak ditranslokasikan ke bagian akar (Byrt *et al.*, 2017) terutama pada fase pertumbuhan generatif. Adaptasi melalui mekanisme eksternal memerlukan adanya mekanisme penghindaran, sedangkan mekanisme internal memerlukan toleransi jaringan yang tinggi terhadap cekaman besi atau penghindaran dari konsentrasi besi yang tinggi pada jaringannya (Gao *et al.*, 2016). Kadar besi yang tinggi sebagai akibat dari pengairan lahan sawah menyebabkan terjadinya reduksi dari Fe³⁺ menjadi Fe²⁺ yang menyebabkan terjadinya keracunan. Permasalahan lainnya, yang sering muncul adalah rendahnya tingkat kesuburan tanah karena terjadinya pengikatan hara oleh logam-logam berat (Utama *et al.*,

2012). Lahan sawah yang mengalami keracunan besi, akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan tanaman terutama pada varietas peka.

Peubah bobot kering akar, merupakan indikator penting untuk melihat toleransi terhadap cekaman dan kemampuannya beradaptasi pada tanah masam. Kerusakan pada sel tudung akar terjadi karena tanaman mengalami defisiensi Ca yang berperan penting pada perkembangan dinding sel tanaman (Byrt *et al.*, 2017). Pada spesies toleran terdapat suatu lapisan lendir (*mucilage*) yang berperan menyerap sebagian besar besi di rhizosfer sehingga tanaman terhindar dari kerusakan akar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, diduga pada tanaman padi juga terdapat kesamaan mekanisme toleransi terhadap kondisi cekaman lingkungan (Utama *et al.*, 2017), seperti cekaman Fe^{2+} . Penelitian ini sangat penting untuk pengembangan teknologi rekayasa pemuliaan terhadap cekaman, khususnya varietas yang dibudidayakan pada lahan tercekam besi dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi padi sebagai sumber pangan. Pada pendekatan rekayasa genetika menargetkan adanya peningkatan penyerapan besi, translokasi, dan penyimpanan di endosperm beras.

KESIMPULAN DAN SARAN

Produksi GKG pada semua varietas masih tetap tinggi walau dalam kondisi tercekam besi, karena jumlah anakan produktif yang terbentuk pada sistem SBSU lebih dari 21 batang per rumpun, dengan produksi GKG $> 5.4 \text{ Mg ha}^{-1}$. Untuk mendapatkan bulir beras kaya akan zat besi dan mampu tumbuh dan berproduksi dengan baik sebaiknya pada kegiatan budidaya menggunakan sistem SBSU menggunakan varietas Inpari 27 yang mampu menghasilkan produksi GKG 6.83 Mg ha^{-1} .

UCAPAN TERIMA KASIH

Disampaikan kepada DRPM, Kemenristekdikti yang telah berkenan membiayai penelitian dengan DIPA-042.06-1.401516/2017 tanggal 7 Desember 2016, dan Dipa No.005/K10/KONTRAKPENELITIAN/2018, tanggal 12 Februari 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimoeso, S. 2014. Jalan panjang menuju kedaulatan pangan. Gibon. Jakarta. 394 halaman.
- Byrt, C.S., R. Munns., R. A. Burton., M. Gilliam., S. Wege. 2017. Root cell wall solutions for crop plants in saline soils. *Plant Science*.
- Chen. G., A. He., W. Wang., S. Peng., J. Huang., K. Cui., L. Nie. 2018. Comparisons of regeneration rate and yields performance between inbred and hybrid rice cultivars in a direct seeding rice-ratoon rice system in central China. *Field Crops Research*. 223:164–170.
- Demidchik. V., E.V. Tyutereva., O.V. Voitsekhovskaja. 2017. The role of ion disequilibrium in induction of root cell death and autophagy by environmental stresses. *Functional Plant Biology*. A-S.
- Gao, L., J. Chang., R. Chen., H. Li., H. Lu., L.Tao., J. Xiong. 2016. Comparison on cellular mechanisms of iron and cadmium accumulation in rice: prospects for cultivating Fe-rich but Cd-free rice. *Rice* 9:39.
- Gharbi E., J.P. Martínez., H. Benahmed., H. Dailly., M. Quinet., S. Lutts. 2017. The salicylic acid analog 2,6-dichloroisonicotinic acid has specific impact on the response of the halophyte plant species *Solanum chilense* to salinity. *Plant Growth Regul.* 82: 517–525.
- Gholizadeh, A., M. Saberioon., L. Boruvka., A. Wayayok., M.A.M.Soom. 2017. Leaf chlorophyll and nitrogen dynamics and their relationship to lowland rice yield for site-specific paddy management. *Information Processing in Agriculture* 4:259–268.
- Lestari, A.P., B. abdullah, A. Junaedi, H. Aswidinnoor. 2010. Yield stability and adaptability of aromatic new plant type rice lines. *J. Agron Indonesia*. 38:199-204.
- Ma, J.F., Z.C.Chen., R.F. Shen. 2014. Molecular mechanisms of Al tolerance in gramineous plants. *Plant Soil* (2014) 381:1–12.
- Saade. S., S. Negrão., D. Plett., T. Garnett., M. Tester. 2018. Genomic and Genetic Studies of Abiotic Stress Tolerance in Barley. Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018 259 N. Stein and G. J. Muehlbauer (eds.), *The Barley Genome, Compendium of Plant Genomes*.
- Sahrawat, K.L. 2004. Iron toxicity in wetland rice and the role of other nutrients. *J.Plant Nutr.* 27: 1471-1504.
- Sahrawat, K.L. 2010. Reducing iron toxicity in lowland rice with tolerant genotypes and plant nutrition. *J. Plant Stress*. 4:70-75.

- Shi. X., S. Chen., Y. Peng., Y. Wang., J. Chen., Z. Hu., B. Wang., A. Li., D. Chao., Y. Li., S. Teng. 2018. TSC1 enables plastid development under dark conditions, contributing to rice adaptation to transplantation shock. *Journal of Integrative Plant Biology*. 60(2): 112–129.
- Sunadi., I. Wahidi., MZH. Utama. 2010. Penapisan varietas padi toleran cekaman Fe^{2+} pada sawah bukaan baru dari aspek agronomi dan fisiologi. *J.Akta Agrosia*. 13 (1):16-23.
- Utama, MZH. 2015. Budidaya padi pada lahan marginal, kiat meningkatkan produksi padi. CV. Andi Ofset Yogyakarta.
- Utama, MZH., I. Wahidi., Sunadi. 2012. Response of some rice cultivars seized with Fe^{2+} new in aperture fields with multi package technology. *J Trop Soils*. 17 (3): 239-244.
- Utama, MZH., Sunadi, W. Haryoko. 2017. Bio fortification iron for brown rice variety on paddy field gripped ferrous. *Journal of agriculture and environmental sciences*. 6 (1): 78-84.
- Utama, MZH., Sunadi., W Haryoko. 2013. Effect to improve modification of the rice technology package production gripped Fe^{2+} . *J Trop Soils*. 18 (3): 195-202.
- Utama, MZH., Sunadi., W. Haryoko. 2016. Cultivation of rice abundance super high levels of iron by the method of biofortification. *Journal of Scientific and Engineering Research*. 3(6):131-138.
- Wahab M.I., Satoto., R. Rachmat., A. Guswara., Suharna. 2017. Deskripsi varietas unggul baru padi, Inbrida Padi Sawah Irigasi (INPARI) Hibrida Padi (HIPA) Inbrida Padi Gogo (INPAGO) Inbrida Padi Rawa (INPARA). Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian. 93 halaman.
- Way, Y., Shohag MU, Yang X, Yibin Z. 2012. Effects of foliar iron application on iron concentration in polished rice grain and its bioavailability. *J Agric Food Chem* 60:11433-11439.
- Yang, J., S. Peng., Z. Zhang., Z. Wang., R.M. Visperas., Q. Zhuand L. Liu. 2002. Grain and dry matter yields and partitioning of assimilates in japonica/indica hybrid rice. *Crop Sci*. 42:766-772.

Tabel 1. Data tinggi tanaman, jumlah anakan, anakan produktif, dan persentase anakan produktif

Varietas Padi	Parameter Pengamatan			
	Tinggi Tanaman (cm)	Jumlah Anakan (batang)	Anakan Produktif (batang)	Anakan Produktif (%)
Mekongga	71a	65a	22a	34b
Inpari 24	71a	63a	23a	39ab
Inpari 27	64b	59ab	24a	42ab
Inpari 28	64b	45b	21a	49a

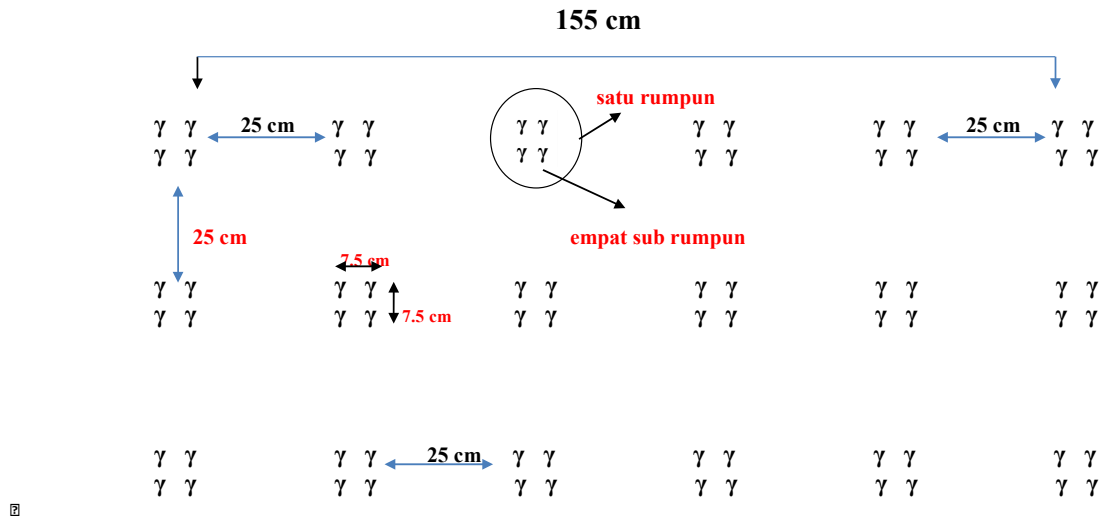
Angka yang diikuti huruf yang berbeda pada parameter yang sama pada masing-masing perlakuan menunjukkan berbeda nyata pada taraf 5% uji LSD

Tabel 2. Data panjang malai, jumlah cabang, bobot 1.000 gabah, bobot gabah/rumpun dan GKG/ha

Varietas Padi	Parameter Pengamatan				
	Panjang malai (cm)	Jumlah Cabang Malai (buah)	Bobot 1000 gabah bernas (gram)	Bobot Gabah/Rumpun (gram)	GKG/ha (Mg)
Mekongga	22.2b	8.5a	26.5a	59.1a	6.34a
Inpari 24	24.0a	8.3a	28.0a	67.3a	5.36a
Inpari 27	23.8a	8.2a	27.5a	58.0a	6.83a
Inpari 28	23.3ab	8.6a	28.1a	67.3a	5.93a

Angka yang diikuti huruf yang berbeda pada parameter yang sama pada masing-masing perlakuan menunjukkan berbeda nyata pada taraf 5% uji LSD

Sistem Bujur Sangkar Utama (SBSU) Tipe 1



Keterangan:

- Jarak Antar Rumpun : 25 cm
- Jarak bibit dalam 1 rumpun : 7.5 cm
- Jumlah Rumpun/Ha : > 90.000 rumpun
- Potensi Jumlah Anakan : 60 s/d 120 anakan
- Jumlah Populasi/ha : > 90.000 rumpun x 4 bibit = 360.000 individu/bibit x (10 anakan) => 3.600.000 anakan
- Anakan Produktif Sistem SBSU : 30-60 anakan
- Konvensional : 25 x 25 cm, maka 1 Ha = 160.000 rumpun x (10 anakan produktif) = 1.600.000 anakan

Gambar 1. Pengaturan jarak tanam Sistem SBSU Tipe 1, pada sistem ini satu rumpun terdiri dari empat bibit/sub rumpun dengan pengaturan

PENGEMBANGAN INOVASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENDORONG KEMANDIRIAN PETANI DI KAWASAN PESISIR YOGYAKARTA

**Harsoyo¹, Subejo², Alia Bihrajihant Raya^{3*}, Inneke Ririn Kurniawati Fajrin⁴,
Devi Muliawati⁵**

^{1, 2, 3, 4, 5} Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Departemen Sosial Ekonomi
Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada

^{2, 3} Program Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan,
Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

*Emali: alia.bihrajihant.r@ugm.ac.id

ABSTRAK

Karakteristik umum kawasan pesisir merupakan kawasan yang memiliki produktivitas lahan lebih rendah dibandingkan dengan kawasan pertanian lainnya. Pemanfaatan lahan di kawasan pesisir menjadi lahan pertanian produktif membutuhkan dukungan berbagai inovasi berkelanjutan sehingga mampu mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Pengembangan inovasi teknologi di kawasan pesisir Yogyakarta, 2) Pengembangan inovasi kelembagaan melalui pemberdayaan masyarakat di kawasan pesisir Yogyakarta dan 3) Dampak pengembangan inovasi teknologi dan inovasi kelembagaan dalam mendorong kemandirian petani di kawasan pesisir Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pengurus kelompok tani/gapoktan dan anggota kelompok tani/gapoktan. Hasil penelitian menunjukkan berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat di kawasan pesisir untuk menemukan, menggunakan dan mengembangkan inovasi teknologi seperti inovasi terkait aktivitas budidaya dan pemasaran cabai. Dalam pengembangan inovasi teknologi, masyarakat telah didukung oleh kelembagaan yang mencakup tingkat kelompok tani maupun gapoktan dengan orientasi pemanfaatan inovasi berkelanjutan. Dampak pengembangan berbagai inovasi teknologi dan kelembagaan terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan petani di kawasan pesisir sehingga mampu menjadi petani mandiri.

Kata kunci: Inovasi, Teknologi, Kelembagaan, Pesisir, Mandiri

PENDAHULUAN

Lahan pasir pantai dapat dikategorikan sebagai lahan marginal mempunyai ciri-ciri tekstur pasiran, struktur lepas-lepas, kandungan hara rendah, kemampuan menyimpan air rendah, suhu sangat panas pada siang hari, kecepatan angin dan laju evaporasi sangat tinggi (Kertonegoro, 2007). Karakteristik tersebut menjadikan lahan pasir pantai termasuk lahan yang memerlukan rekayasa pengelolaan lahan melalui inovasi pertanian. Menurut Supriyanto (2012) pertanian lahan pesisir pantai selatan di wilayah Kulon Progo telah berkembang sejak tahun 1985. Dalam memanfaatkan lahan pesisir pantai tersebut, petani telah berupaya menemukan dan mengembangkan berbagai inovasi sesuai dengan kemampuan pengetahuan mereka dan beradaptasi dari waktu ke waktu. Penelitian Raya (2015) menyebutkan bahwa pada akhir tahun 1981 salah seorang petani mencoba membudidayakan cabai di musim kemarau (Juni-Oktober) dengan cara menggali lahan untuk menemukan air bersih. Pembuatan sumur *bronjong* dan penyiraman menggunakan *gembor* merupakan inovasi pertama petani di lahan pesisir. Pada tahun 2009 diketahui bahwa petani telah mengembangkan teknologi pengairan *sprayer* dengan pompa air yang memberi dampak pada peningkatan efektivitas usahatani serta efisiensi SDM.

Berawal dari beberapa temuan tokoh pionir petani, inovasi pertanian lahan pasir semakin berkembang. Komoditas yang dibudidayakan pada tahap awal masih terbatas mencakup singkong, kacang tanah dan jagung yang ditanam pada musim hujan dan hanya untuk mencukupi keperluan sehari-hari. Dalam perkembangannya, komoditas mencakup beberapa komoditas hortikultura yang memiliki fungsi sebagai sumber penghasilan petani. Masyarakat di lahan pasir pantai mulai tidak bergantung pada alam, tetapi dalam batas tertentu dapat mengendalikan alam dengan dukungan teknologi dan inovasi. Salah satunya terbukti pada hasil usahatani tanaman cabai yang meningkat drastis. Teknologi dan inovasi yang digunakan antara lain varietas unggul cabai (*helix*, *Lado*, dan *Kiyo*), sumur *renteng*, *wind breaker*, mulsa plastik, *power sprayer*, dan lain-lain (Kusumaningrum *et al.*, 2015).

Pada beberapa dekade terakhir, berbagai kalangan semakin menyadari bahwa keberhasilan pembangunan termasuk pembangunan pertanian tidak hanya terkait dengan keberhasilan membangun teknologi dan inovasi produksi namun sangat terkait dengan aspek struktur sosial-budaya dan ekonomi serta kelembagaan atau institusi. Subejo (2015)

memandang aspek dan dinamika kelembagaan sangat strategis karena dapat memainkan peran sebagai wadah dari seluruh rangkaian kegiatan pembangunan pertanian. Meskipun pada suatu kawasan atau suatu masyarakat sudah bisa dikembangkan komoditas pertanian unggulan namun jika fokusnya pada produksi dan penjualan produk langsung (*raw material*) maka peningkatan produksi belum dapat memberikan nilai tambah dan peningkatan pendapatan yang signifikan. Upaya yang harus didorong adalah bagaimana mendukung proses lanjut dari komoditas unggulan menjadi komoditas olahan unggulan. Jika berhasil mengembangkan kelembagaan yang menangani komoditas unggulan maka dampak ikatan akan sangat terbuka karena akan meningkatkan nilai tambah ekonomi ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru yang akhirnya secara berantai akan menggerakkan dinamika dan pertumbuhan ekonomi suatu kawasan.

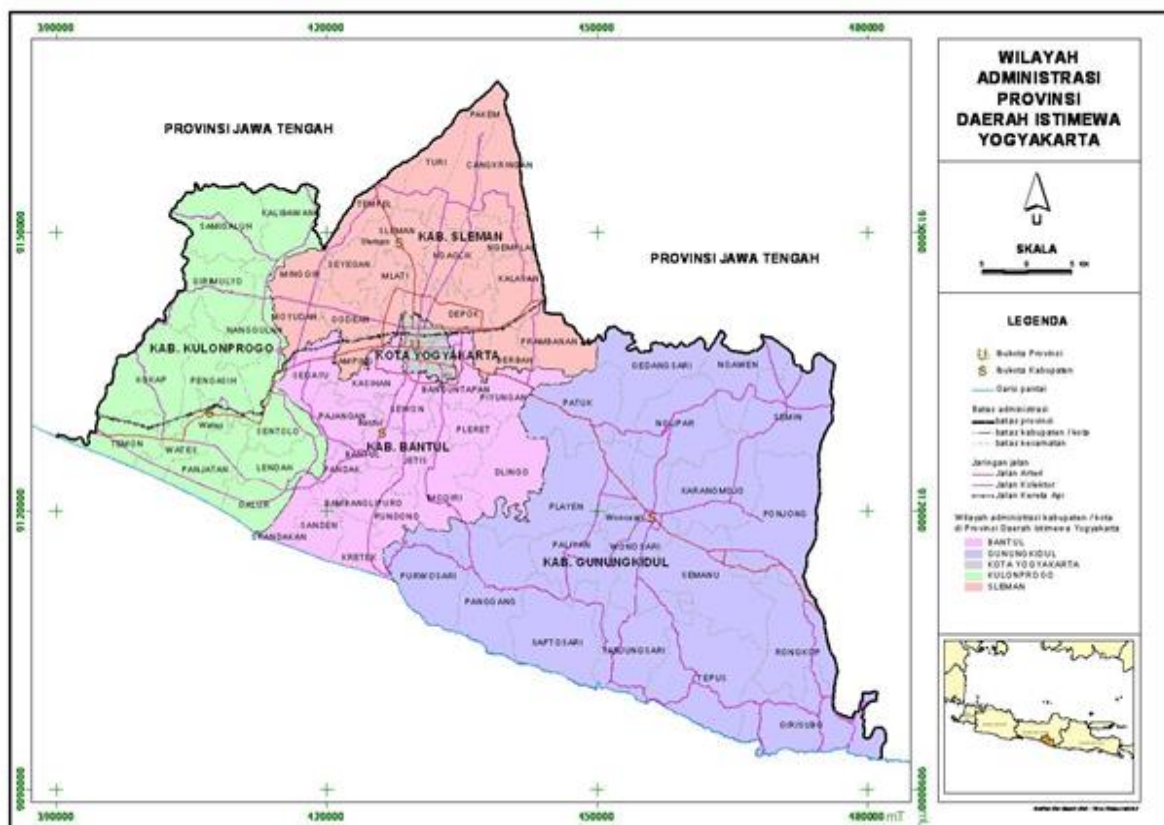
Perkembangan inovasi pertanian di masyarakat dapat terjadi melalui kelembagaan. Seperti yang tertulis dalam penelitian Raya dan Untari (2015) yang menyatakan bahwa proses berkembangnya inovasi pertanian tidak bisa dilepaskan dari munculnya inovasi kelembagaan yang mengatur proses adopsi, difusi, dan keberlanjutan inovasi pertanian di masyarakat. Kajian mengenai perkembangan inovasi, kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat di kawasan pertanian lahan Pesisir Selatan Yogyakarta memiliki posisi dan arti yang strategis dalam kerangka pembangunan daerah dan penguatan kapasitas masyarakat local dan optimalisasi sumberdaya lokal. Kajian tersebut dapat memberikan gambaran dalam mendukung kemandirian masyarakat melalui perkembangan inovasi dan pemberdayaan masyarakat di kawasan pesisir Yogyakarta. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengembangan inovasi teknologi di kawasan pesisir Yogyakarta, pengembangan inovasi kelembagaan melalui pemberdayaan masyarakat di kawasan pesisir Yogyakarta, dan dampak pengembangan inovasi teknologi dan inovasi kelembagaan dalam mendorong kemandirian petani di kawasan pesisir Yogyakarta.

Metode Penelitian

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul dan Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo (Gambar 1). Kedua kawasan tersebut

merupakan wilayah pesisir pantai Yogyakarta dan memiliki potensi besar untuk pengembangan pertanian lahan pasir pantai. Lokasi penelitian dipilih secara *purposive* didasarkan pada inovasi dan kelembagaan pesisir di daerah tersebut merupakan pionir dalam pengelolaan lahan pasir pantai di pesisir Yogyakarta dan inovasi masih terus berkembang hingga saat ini.

Penelitian dilakukan melalui pendekatan survei kualitatif dengan cara melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*), FGD, studi literasi, dan dokumentasi. Informan utama yang dipilih adalah pengurus dan anggota kelembagaan pertanian (kelompok tani dan Gapoktan). Analisis data dilakukan melalui tiga jalur yaitu reduksi data, penyajian data kasar, dan penarikan kesimpulan.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian
(Sumber: Anonim, 2019)

Hasil dan Pembahasan

Lahan pesisir di Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul dan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi sebagai lahan pertanian dengan munculnya berbagai inovasi teknologi pertanian yang didukung dengan pengembangan kelembagaan pertanian di masyarakat. Inovasi teknologi pertanian berperan penting dalam efisiensi budidaya pertanian lahan pesisir dikarenakan banyaknya faktor pembatas. Munculnya inovasi teknologi pertanian di masyarakat pesisir Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dari pengembangan kelembagaan pertanian untuk dapat memberdayakan masyarakat.

1. Perkembangan Inovasi

Perkembangan lahan pasir pantai di pesisir pantai Yogyakarta tidak terlepas dari introduksi dan pengembangan inovasi dan teknologi yang mendukung praktik pertanian di lahan marginal pasir pantai. Inovasi teknologi yang diterapkan di lahan pasir mengalami perbuahan seiring perkembangan waktu. Perkembangan inovasi pertanian di pesisir pantai Kulon Progo dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Proses Pengembangan Inovasi Pertanian di Pesisir Pantai Kulon Progo

No.	Jenis Inovasi	Periode Penemuan	Proses penemuan
1.	Penyiapan lahan a. Traktor 2 roda b. Traktor 4 roda	1999-2018 1990-2018	Bantuan pemerintah Bersama masyarakat dan bantuan pemerintah
2.	Pembibitan a. Bibit hibrida b. Persemaian menggunakan plastik	1990-2018 1990-2018	Bersama masyarakat Bersama masyarakat
3.	Penanaman Mulsa plastik	1990-2018	Bersama masyarakat.
4.	Pemupukan a. <i>Kocoran</i> (pupuk dilarutkan) b. Sistem infus	1985-2016 2000-2018	Diinisiasi oleh ketua kelompok tani

No.	Jenis Inovasi	Periode Penemuan	Proses penemuan
5.	Pengairan a. Selang b. Mesin pompa c. Infus	1995-2018 1992-2018 2008-2018	Bersama masyarakat Bersama masyarakat. Perubahan dari semi <i>jet pump</i> menjadi <i>jet pump</i> pada tahun 2013-2018 Diinisiasi oleh ketua kelompok tani
6.	Pengendalian OPT a. Herbisida b. Pestisida c. <i>Light trap</i> d. Sprayer elektrik	1990-2018 1986-2018 2000-2013 2000-2018	Bersama masyarakat Bersama masyarakat Pemerintah Bersama masyarakat
7.	Pengendalian iklim a. Daun kelapa b. Tanaman jagung c. Paranet	1980-2018 1987-2018 2010-2018	Bersama masyarakat Bersama masyarakat Bersama masyarakat
8.	Panen	Belum ada inovasi, panen masih dilakukan secara manual	
9.	Pasca panen	Belum ada inovasi pada tahap ini	
10.	Pemasaran Pasar lelang	2000-2018	Bersama masyarakat

Sumber: Analisis Data Primer, 2018

Tabel 1 menunjukkan berkembangnya berbagai inovasi teknologi terkait dengan pengelolaan pertanian pesisir pantai Kulon Progo. Inovasi pertanian sebagian besar berada dalam setiap unsur budidaya, kecuali pada tahap panen dan pascapanen. Tahapan panen dan pasca panen masih menggunakan cara manual dan belum ditemukan inovasi yang mendukung proses tersebut. Inovasi pertanian pesisir pantai Bantul juga tidak jauh berbeda dengan inovasi yang digunakan di Kulon Progo. Sebagian besar inovasi pertanian yang diterapkan di pesisir pantai Kulon Progo juga diterapkan di lahan Bantul. Tahap panen dan pascapanen dalam budidaya di pesisir pantai Bantul juga belum terdapat inovasi yang

ditemukan. Secara ringkas, pengembangan inovasi pertanian di pesisir pantai Bantul dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Proses Perkembangan Inovasi Pertanian di Pesisir Pantai Bantul

No.	Jenis Inovasi	Periode Penemuan	Proses penemuan
1.	Penyiapan lahan		
	a. Traktor 2 roda	2003-2018	Bantuan pemerintah. Traktor roda 2 yang digunakan adalah traktor rotari.
	b. Traktor 4 roda	2007-2010	Bersama masyarakat
2.	Pembibitan		
	a. Bibit hibrida	2000-2016	Bersama masyarakat
	b. Persemaian menggunakan plastik	1990-2018	Bersama masyarakat
3.	Penanaman		
	Penanaman serempak	1990-2018	Bersama masyarakat. Waktu dapat berubah sesuai musim dan kesepakatan kelompok
4.	Pemupukan		
	<i>Kocoran</i> (pupuk dilarutkan)	1985-2016	Bersama masyarakat
5.	Pengairan		
	a. Selang	2000-2015	Bersama masyarakat
	b. Mesin pompa	1980-2018	Bersama masyarakat dan pemerintah
	c. Sumur bor	2015	
6.	Pengendalian OPT		
	a. Herbisida	1980-2018	Bersama masyarakat
	b. Pestisida	1989-2018	Bersama masyarakat
	c. Refugia	2016-2017	Bersama masyarakat
7.	Pengendalian iklim		
	a. Daun kelapa	2001-2012	Bersama masyarakat
	b. Tanaman bunga	2016-2017	Bersama masyarakat
	c. Paranet	1995-2018	Bersama masyarakat
	d. Mulsa	2018	Bersama masyarakat
8.	Panen	Belum ada inovasi, panen masih dilakukan secara manual	-
9.	Pasca panen	Belum ada inovasi pada tahap ini	-
10.	Pemasaran		
	Pasar lelang	2003-2018	Bersama msyarakat

Sumber: Analisis Data Primer, 2018

Perbedaan yang menarik pada dua kondisi lahan pasir pantai di dua wilayah seperti ditampilkan pada Tabel 1 dan Tabel 2 adalah pada inovasi pengendalian iklim. Di kawasan pesisir pantai di Bantul, pengendalian hembusan angin menggunakan tanaman bunga matahari. Kawasan pesisir pantai di Bantul yang terletak di pinggir jalan raya lintas selatan Yogyakarta-Jawa Tengah, memberikan keuntungan tersendiri bagi petani di kawasan pesisir Bantul. Dengan menanam bunga matahari sebagai *wind breaker* dapat mempercantik kawasan pesisir dan meningkatkan daya tarik wisatawan. Oleh karena itu, kawasan pesisir Bantul, juga berubah menjadi kawasan agrowisata. Dengan adanya nilai tambah kawasan tersebut menjadi lokasi wisata, maka petani mampu mendapatkan penghasilan tambahan dari pengunjung yang menikmati swafoto di sekitar lahan pertanian.

Sedangkan tanaman pemecah angin yang dipilih di Panjatan Kulon Progo adalah tanaman hortikultura yang mampu memberikan tambahan pendapatan dari hasil penjualan produk hortikultura tersebut. Lokasi kawasan pesisir di Kulon Progo yang jauh dari jalan besar, membuat petani tidak tertarik mengganti tanaman hortikultura dengan tanaman bunga karena tidak mudah mengembangkan lokasi pertanian menjadi kawasan wisata.

2. Pengembangan Kelembagaan Pertanian

Kelembagaan pertanian pesisir Yogyakarta mencakup tingkat kelompok tani dan gabungan kelompok tani (gapoktan). Kelompok Tani dan Gapoktan di Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul dan Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo memiliki struktur organisasi serta regulasi dan norma yang terstruktur. Kelembagaan pertanian pesisir terus berkembang seiring dengan berkembangnya inovasi teknologi pertanian. Kelembagaan berperan dalam pembentukan norma dalam setiap inovasi teknologi pertanian. Secara lebih rinci hubungan kelembagaan pertanian terhadap berkembangnya inovasi teknologi pertanian di Kecamatan Sanden, kabupaten Bantul dapat dilihat pada Tabel 3, sedangkan di Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo dilihat pada Tabel 4.

Tabel 3. Hubungan Kelembagaan Pertanian terhadap perkembangan Inovasi Pertanian di Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul

No.	Jenis Inovasi	Kelembagaan	
		Pranata	Organisasi
1.	Traktor	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan sewa 	Kelompok Tani
2.	Benih hibrida	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan pinjam benih • Peraturan pengembalian benih 	Kelompok Tani
3.	Traktor	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan sewa 	Gapoktan

Sumber: Analisis data primer, 2019

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa Kelompok Tani dan Gapoktan di Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul memiliki hubungan terhadap berkembangnya inovasi pertanian dengan membentuk peraturan terkait inovasi pertanian. Kelompok Tani dan Gapoktan membentuk peraturan sewa terkait peminjaman traktor. Peraturan sewa yang dibuat yaitu setiap petani yang meminjam traktor diwajibkan membayar uang sewa yang digunakan untuk pengelolaan dan kas kelompok. Selanjutnya, peraturan pada benih hibrida yaitu terkait peminjaman yang dilakukan dengan menghubungi pengurus dan pengembalian yang dilakukan sesuai waktu yang ditetapkan.

Tabel 4. Hubungan Kelembagaan Pertanian terhadap berkembang Inovasi Pertanian di Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo

No.	Jenis Inovasi	Kelembagaan	
		Pranata	Organisasi
1.	Traktor	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan harga sewa • Peraturan perawatan 	Kelompok Tani
2.	Benih hibrida	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan pinjam benih • Peraturan pengembalian benih 	Kelompok Tani

Sumber: Analisis data primer, 2019

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa Kelompok Tani di Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo memiliki hubungan terhadap berkembangnya inovasi pertanian dengan membentuk peraturan terkait inovasi pertanian. Kelembagaan membentuk

peraturan sewa dan perawatan untuk pengelolaan inovasi pertanian berupa traktor. Peraturan sewa yang diterapkan yaitu setiap petani yang meminjam traktor diwajibkan membayar uang sewa dan mengisi bahan bakar. Selanjutnya, peraturan terkait benih hibrida yaitu peraturan peminjaman dan pengembalian benih. Peminjaman benih dilakukan dengan mendaftarkan diri kepada pengurus, sedangkan untuk pengembalian dilakukan sesuai waktu yang ditetapkan.

3. Dampak dari Pemberdayaan Masyarakat

Munculnya inovasi teknologi pertanian secara garis besar diinisiasi secara mandiri oleh masyarakat setempat (masyarakat lokal) serta mendapatkan informasi atau melihat penggunaan teknologi pertanian dari petani luar daerah. Petani mengembangkan inovasi teknologi pertanian untuk meningkatkan efisiensi kegiatan budidaya pertanian di lahan pesisir. Inovasi teknologi pertanian dapat digunakan secara berkelanjutan melalui peran kelembagaan pertanian dengan membentuk norma untuk inovasi teknologi pertanian yang berkembang di masyarakat. Kelompok Tani dan Gapoktan di Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul dan Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo merupakan kelembagaan yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri. Meskipun begitu, kelompok tani dan gapoktan dalam menjalankan kegiatan melakukan kerjasama dengan kelembagaan lain baik dari instansi pemerintah maupun di luar instansi pemerintah.

Kawasan pesisir di Bantul dan Kulon Progo, secara empiris terbukti mampu meningkatkan ekonomi petani dan masyarakat di sekitarnya. Orientasi usahatani para petani juga berubah dari sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi berorientasi pada bisnis pertanian. Hal ini terbukti dengan pengembangan pasar pada komoditas cabai yang telah terstruktur menjadi pasar lelang. Dengan adanya pasar lelang, harga cabai menjadi lebih baik dan tidak dipermainkan oleh tengkulak. Selain itu, pengembangan pariwisata berbasis pertanian juga dikembangkan oleh masyarakat dengan melihat potensi dan peluang yang dimilikinya. Pembangunan infrastruktur jalan lintas selatan, meningkatkan jumlah pengguna jalan yang berpotensi menjadi wisatawan di kawasan pesisir pertanian.

Kemandirian petani secara ekonomi dapat tercapai dengan adanya sinergi antara inovasi teknologi dan pengembangan kelembagaan pertanian. Seluruh norma yang dibentuk oleh Kelompok Tani dan Gapoktan di Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul dan

Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo merupakan hasil dari kesepakatan bersama anggota kelompok. Norma tersebut berfungsi untuk mengatur setiap kegiatan dalam kelembagaan, termasuk kegiatan dalam mendukung keberlanjutan suatu inovasi teknologi pertanian agar dapat dipatuhi dan digunakan oleh masyarakat secara terus-menerus. Oleh karena itu, masyarakat memiliki kewajiban untuk mengelola kelembagaan pertanian baik kelompok tani maupun gapoktan agar dapat mendukung inovasi teknologi pertanian secara berkelanjutan dengan membentuk beberapa norma terkait inovasi teknologi pertanian.

KESIMPULAN

Introduksi dan pengembangan berbagai inovasi teknologi pertanian terkait dengan pengelolaan lahan pertanian pasir pantai di Kabupaten Kulon Progo terjadi sejak tahun 1985 hingga 2018, sedangkan di Kabupaten Bantul terjadi pengembangan inovasi teknologi sejak tahun 1980 hingga 2018. Selanjutnya, kelembagaan pertanian baik di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo mendukung perkembangan inovasi teknologi dengan membentuk dan mempraktikkan norma terkait inovasi teknologi yang berkembang dalam masyarakat pertanian. Adanya hubungan kelembagaan pertanian dengan inovasi teknologi pertanian secara berkelanjutan merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat menjadi petani pesisir yang mandiri. Saran yang dapat diberikan yaitu setiap munculnya inovasi teknologi pertanian di masyarakat perlu diikuti dengan pembentukan norma oleh kelembagaan pertanian yang disepakati dan dipraktikkan secara bersama-sama oleh masyarakat sehingga inovasi teknologi yang dikembangkan dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2019. Peta Wilayah Yogyakarta. <http://twinnorsplus.blogspot.com/2016/06/peta-wilayah-administrasi-di-yogyakarta.html>). Diakses 23 April 2019.
- Kertonegoro, B. K., D. Shiddieq, Sulakhudin, dan Ai Dariah. 2007. Optimalisasi Lahan Pasir Pantai Bugel Kulon Progo Untuk Pengembangan Tanaman Hortikultura Dengan Teknologi Inovatif Berkearifan Lokal. Laporan Penelitian. Yogyakarta.

- Kusumaningrum, J. Foor, dan D. Mustafa. 2015. *Social Quality* Masyarakat Lahan Pasir Pantai pada Aspek *Social Empowerment* di Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo. *Agriekonomika* 4(1): 1-9.
- Raya, A.B. 2015. The Performance of Farmer Groups in Yogyakarta Special Region, Indonesia :Organizational Structure and the Role of Leadership, PhD Thesis. <<http://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp>>. Diakses pada 21 Maret 2017.
- Raya, A. B. dan D. W. Untari. 2015. Model Inovasi Kelembagaan Petani Lahan Pasir Pantai di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Seminar Nasional Pemberdayaan dan Perlindungan Pertanian.
- Subejo. 2015. Pemberdayaan Petani Melalui Pengembangan Kelembagaan Petani Kakao Rakyat. Makalah untuk Seminar Nasional Kakao. Puskabun Faperta UGM bekerjasama dengan Dirjenbun Kementerian Pertanian RI.
- Supriyanto, Subejo, Herianto, A.S., Wastutiningsih, S.P., Untari, D.W., Dinarti, S.I., Winanti, L.D., 2012. Strategi Adaptasi Petani Terhadap Perubahan Iklim. Laboratorium Pengkajian Masalah Sosial dalam Pertanian. Fakultas Pertanian UGM. Penerbit PINTAL Yogyakarta.

SEMINAR NASIONAL
PENYULUHAN, KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TOPIK PEMBANGUNAN SOSIAL

Daftar Halaman

No.	Judul & Peserta	Halaman
1.	PEMBANGUNAN DESA WISATA YANG PARTISIPATIF DAN BERBASIS EKOLOGI RELIGIUS (Studi Kasus di Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan) <i>Agung Wibowo</i>	556 - 570
2.	PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN NILAI-NILAI BUDAYA LOKAL DALAM PEMBANGUNAN DESA WISATA GENILANGIT <i>Eny Lestari</i>	571 - 584
3.	PEMBANGUNAN PETERNAKAN SAPI POTONG BERWAWASAN LINGKUNGAN <i>Artise H.S. Salendu</i>	585 - 591
4.	AKSESIBILITAS RUMAH TANGGA MISKIN TERHADAP PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI KAMPUNG KELUARGA BERENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT <i>Rahmat Syahni</i>	592 - 601
5.	KHARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA MISKIN DI KAMPUNG KELUARGA BERENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT <i>Rusda Khairati</i>	602 - 615
6.	PARTISIPASI DAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MANFAAT DANA DESA (Studi Kasus di Desa Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji) <i>Sumaryo Gitosaputro</i>	616 - 631
7.	PERAN PETERNAK AYAM PETELUR MB 402 IMPLIKASI PAKAN BAWANG PUTIH (<i>Allium Sativum</i>) DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN <i>Jein Rinny Leke</i>	632 - 639

**PEMBANGUNAN DESA WISATA YANG PARTISIPATIF
DAN BERBASIS EKOLOGI RELIGIUS
(Studi Kasus di Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan Kabupaten
Magetan)**

Agung Wibowo^{1*}

¹ *Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret. Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta*

*Email: agungwibowo@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Modernisasi dan kemajuan teknologi informasi telah mempengaruhi nilai-nilai dalam segala aspek kehidupan. Pelestarian nilai-nilai budaya lokal sangat penting dilakukan karena menyangkut identitas komunitas lokal. Keterpaduan ekologi religius dan partisipasi masyarakat dalam mendayagunakan potensi lokal menjadi prasyarat dalam setiap perencanaan pembangunan, serta menjadi suatu hal yang sangat urgen untuk menghadapi derasnya arus globalisasi. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana pembangunan yang partisipatif dan berbasis ekologi religius memberikan kontribusi pada pembangunan keberlanjutan di tengah menghadapi derasnya globalisasi. Desa Sumberdodol yang terletak di kaki Gunung Lawu memiliki keragaman budaya lokal dengan keberadaan sumber mata air yang melimpah menjadi setting penelitian ini dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Wisata Sumberdodol merupakan desa wisata yang dibangun secara partisipatif dan berbasis ekologi religius. Hal ini berimplikasi pada keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial budaya dan keberlanjutan lingkungan.

Kata Kunci: desa wisata, ekologi religius, partisipatif, sumber mata air

PENDAHULUAN

Secara etimologis, kata religius berasal dari bahasa Inggris *religion* yang artinya beragama. Percaya kepada Allah yang menciptakan dan menguasai alam semesta serta semua yang ada didalamnya, atau apa saja yang ada hubungannya dengan agama (John M. Ecols dan Hasan Shadily, 2010:476). Sedangkan secara terminologis, *religiøs* dimaknai keadaan dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai kadar ketaatannya terhadap agama. Keseluruhan tingkah laku manusia yang terpuji yang

dilaksanakan untuk memperoleh ridla Allah. Agama yang meliputi keseluruhan tingkah laku itu membentuk keutuhan manusia berbudi luhur (akhlakul karimah), atas dasar percaya atau iman kepada Allah dan tanggungjawab pribadi di hari kemudian (Madjid, 2010:34).

Ekologi adalah hubungan keterkaitan dan ketergantungan antara komponen ekosistem yang harus dipertahankan dalam kondisi yang stabil dan seimbang (*homeostatis*). Perubahan salah satu komponen akan mempengaruhi komponemn yang lainnya. *Homeostatis* adalah kecenderungan sistem biologi untuk menahan perubahan dan selalu berada dalam keseimbangan. Al-Qur'an sebagai sumber moral manusia dengan tegas telah menjelaskan posisi manusia-ekologi. Allah SWT menasbihkan manusia sebagai wakil-Nya di muka bumi (khalifatulah fil ardi) (Q.S. Albaqarah: 30) yang berkewajiban memakmurkan dan membudidayakannya (Q.S. Hud: 61), sekaligus melestarikan dan menjaga keseimbangan (equilibrium) lingkungan" (Q.S. Arrahman: 6-9). Agar peran mulia kekhalifahan dapat berfungsi optimal, dapat mencapai dimensi kualitatifnya yang tinggi, maka manusia (kita) niscaya dengan ikhlas pada saat yang bersamaan harus melibatkan dimensi kesediaan diri untuk menegakkan kebaktian/ibadah ('abdullah). Di antaranya dengan memperlakukan lingkungan dengan penuh tanggung jawab. Karena dalam pandangan Ilahi, alam memiliki hak yang sama dengan manusia (Q.S. Al-Hijr: 86). Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana ekologi religius dan partisipasi ini secara sinergis berperang penting di dalam membangun Desa Wisata Sumberdodol?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada masyarakat di lereng Gunung Lawu sebelah timur tepatnya di Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Berbagai alasan yang menjadi pertimbangan peneliti untuk menetapkan seting penelitian tentang desa wisata: (1) Desa Sumberdodol memiliki potensi sumber mata air dan panorama alam yang sangat menarik; (2) di wilayah tersebut menyimpan kearifan-kearifan lokal yang berperan penting dalam menjaga keharmonisan dan menjaga kelestarian lingkungan. Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yang lebih menekankan pada masalah proses dan makna, maka jenis penelitian yang tepat adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi (Bogdan dan Biklen, 1982). Karena penelitian ini akan

dilakukan di satu kabupaten dan fokus pada permasalahan tertentu, maka teknik analisis yang digunakan adalah analisis kasus tunggal (Yin, 1987). Menurut Miles dan Huberman (1992), dalam analisis kasus tunggal pada tiap kasusnya proses analisis dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif. Dalam model analisis ini, tiga komponen analisisnya yaitu: reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan atau *verifikasi*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Potensi Wilayah Desa Sumberdodol

Desa Sumberdodol merupakan salah satu desa di Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur. Secara geografis wilayah ini berlokasi di sebelah timur lereng Gunung Lawu. Desa Sumberdodol didominasi oleh daratan dengan luas 244,200 Ha terdiri dari 4 dusun yaitu Ngablak, Gelang, Metegal, dan Blanten ,yang terbagi atas permukaan laut dengan suhu harian rata-rata mencapai 28 derajat celcius dan curah hujan 1500 Mm/Th Desa. Desa Sumberdodol ini merupakan salah satu wilayah yang topografi daerah yang memiliki kadar air tinggi dan bersih, di desa Sumberdodol sendiri merupakan daerah yang mendukung dalam pengembangan sektor wisata air untuk memajukan perekonomian warga.

Ada beberapa faktor yang bisa mendorong untuk membangun desa wisata di wilayah tersebut. *Pertama*, Bidang keagamaan, mayoritas penduduk desa Sumberdodol memeluk agama Islam ditandai dengan banyaknya tempat ibadah umat islam yaitu masjid dan mushola. Keberadaan masyarakat yang agamis ini, sangat mudah menjadi mitra untuk dikembangkan dan berharap menjadi desa yang memiliki kemandirian. *Kedua*, bidang sosial budaya, kehidupan masyarakat desa Sumberdodol seperti halnya desa lain yang masih memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal yang telah diwariskan para leluhur, adat istiadat, rasa kekeluargaan, dan semangat gotong royong yang masih dijunjung tinggi. Beberapa kegiatan warga desa yang masih kental dengan unsur adat-istiadat dan masih dijaga kelestariannya secara turun-temurun di antaranya adalah syukuran, dan Yasinan. Selain itu, kesenian yang masih hidup di desa Sumberdodol yaitu, sholawatan, hadroh. *Ketiga*, keberadaan Desa Sumberdodol di lereng Gunung Lawu selain memberikan keindahan alam, menjadikan wilayah ini berkembang menjadi desa wisata yang mampu

menarik para wisatawan. Masyarakat percaya bahwa dengan menjaga lingkungan, sebagai wujud ucapan syukur atas keselarasan antara warga dan lingkungan untuk hidup berdampingan, terutama dengan kekuatan alam di lingkungan tempat tinggal mereka. Kearifan lokal yang ada di Desa Sumberdodol sangat beragam dan bermacam-macam yang dapat menjadi daya tarik para wisatawan untuk berkunjung. Desa Sumberdodol juga memiliki potensi yang bagus untuk dikembangkan terutama dalam usaha peternakan kelinci walaupun keberadaan kelompok peternak kelinci yang ada di desa ini belum menerapkan pengelolaan manajemen keuangan maupun pengolahan produk secara lebih terperinci, mereka belum optimal memanfaatkan potensi yang ada. Oleh karena potensi ini apabila dikembangkan akan mempercepat pembangunan ekonomi lokal.

Desa Wisata Sumberdodol Sangat Potensial sebagai Wisata Sayur Organik

Desa wisata Sumberdodol sangat potensial sebagai wisata sayur organik, ada beberapa hal yang mendukung: (1) sumber mata air yang melimpah sepanjang tahun yang masih alami dan belum tercemar; (2) kondisi alam yang sangat cocok untuk tanaman sayuran; (3) keberadaan peternak yang menghasilkan kotoran ternak untuk pembuatan pupuk organik. Desa wisata berbasis masyarakat bukan berarti bahwa masyarakat akan menjalankan usaha sendiri. Desa wisata Sumberdodol yang berbasis masyarakat adalah desa wisata yang “*Green and Fair*” untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan dan konservasi, yaitu sebuah kegiatan usaha yang bertujuan untuk menyediakan alternatif ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat Sumberdodol, berbagi manfaat dari upaya konservasi secara layak, dan berkontribusi pada konservasi dengan meningkatkan kepedulian dan dukungan terhadap perlindungan bentang lahan yang berkelanjutan, baik dari aspek keberlanjutan ekonomi, Keberlanjutan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Desa wisata Sumberdodol merupakan desa wisata berbasis masyarakat, ada beberapa indikator sebagai berikut: (1) masyarakat Sumberdodol memiliki pengetahuan tentang alam untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim serta mengembangkan budaya lokal; (2) keberadaan *ecotourism* tersebut mengakui hak masyarakat lokal dalam mengelola kegiatan desa wisata di kawasan yang mereka miliki secara adat ataupun sebagai pengelola; (3) mampu menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat Desa Sumberdodol dan mengurangi kemiskinan; (4) mampu mengembangkan jasa-jasa wisata untuk turis; dan (5) mampu

menumbuhkan *religious ecologis* masyarakat setempat dan mampu menumbuhkan jati diri dan rasa bangga antar penduduk setempat yang tumbuh akibat peningkatan kegiatan desa wisata Sumberdodol.

Tataran implementasi desa wisata perlu dipandang sebagai bagian dari perencanaan pembangunan terpadu yang dilakukan di suatu daerah. Implikasinya pelibatan *stakeholder* mulai dari level komunitas, masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan organisasi non pemerintah diharapkan membangun suatu jaringan dan menjalankan suatu kemitraan yang baik sesuai peran dan keahlian masing-masing. Desa wisata Sumberdodol yang berbasis masyarakat dan prinsip *religious ecologis* dapat dijadikan sebagai *best practice* dalam pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat.

2. Keberlanjutan Pembangunan Desa Wisata Sumberdodol

Sejak 1970-an, organisasi konservasi mulai melihat desa wisata sebagai alternatif ekonomi yang berbasis konservasi karena tidak merusak alam ataupun tidak “ekstraktif” dengan berdampak negatif terhadap lingkungan seperti penebangan dan pertambangan. Desa wisata juga dianggap sejenis usaha yang berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan konservasi. Namun agar desa wisata tetap berkelanjutan, perlu tercipta kondisi yang memungkinkan di mana masyarakat diberi wewenang untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan usaha tersebut, mengatur arus dan jumlah wisatawan, dan mengembangkan desa wisata sesuai visi dan harapan masyarakat untuk masa depan. Berkembangnya desa wisata didasarkan atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor: KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) mandiri Pariwisata, dimana desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi; akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Merujuk kepada definisi desa wisata, Desa Sumberdodol bisa dijadikan sebagai desa wisata karena memenuhi persyaratan sebagai berikut: Pertama, aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi. Jalan menuju desa wisata bisa menggunakan kendaraan bus dan moda transportasi lainnya. Di samping itu kondisi jalan yang sudah beraspal dan tidak

begitu terjal memungkinkan semua orang yang mendarai merasa nyaman. Kedua, memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata. Kondisi alam yang berada di kaki Gunung Lawu memiliki panorama yang sangat bagus untuk sekedar *selfie-selfie* untuk diabadikan. Seni budaya yang berkembang gamelan dan ada legenda hubungannya dalam pengelolaan sumber mata air. Makanan lokal yang potensial dikembangkan di wilayah tersebut adalah abon kelinci. Ketiga, masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya. Partisipasi masyarakat di dalam membangun desa wisata dan dukungan dana dari anggaran pemerintah desa menandakan bahwa desa wisata tersebut memang serius untuk dikembangkan. Keempat, keamanan di desa tersebut terjamin. Keramahan warga di wilayah menuju desa wisata menjadikan semua orang yang berkunjung merasa nyaman. Kelima, tersedia telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai. Keenam, beriklim sejuk atau dingin. Kondisi ini menjadikan orang yang berkunjung bisa dijadikan untuk menghilangkan penat atas rutinitas pekerjaan sehari-hari dengan bermain-main air yang jernih dari pegunungan. Ketujuh, berhubungan dengan obyek wisata Telaga Sarangan yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Jarak tempuh dengan telaga sarangan apabila dengan kendaraan membutuhkan waktu 25 menit.

Desa wisata Sumberdodol yang potensial dikembangkan adalah wisata pemandian dengan sumber mata air pegunungan yang berada di wilayah perbukitan. Ini adalah desa wisata yang "*Green and Fair*" untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan dan konservasi, yaitu sebuah kegiatan usaha yang bertujuan untuk menyediakan alternatif ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat Sumberdodol, berbagi manfaat dari upaya konservasi secara layak, dan berkontribusi pada konservasi dengan meningkatkan kepedulian dan dukungan terhadap perlindungan bentang lahan yang berkelanjutan, baik dari aspek keberlanjutan ekonomi, Keberlanjutan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Pertama, keberlanjutan ekonomi. Keberlanjutan ekonomi ini dapat ditunjukkan dalam hal menciptakan lapangan kerja. Pengembangan Desa wisata Sumberdodol ini dijadikan sebagai penampung pekerjaan penduduk di daerah Sumberdodol agar tidak harus pergi ke luar desa dan menumbuhkembangkan warung-warung kecil yang ada di sekitar desa wisata yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Rencana

tindak lanjut yang mencerminkan keberlanjutan ekonomi yakni bahwa kedepan konsep wisata akan dikembangkan menjadi agrowisata sayur organik. Hal tersebut dilandasi karena masyarakat di dekat perbukitan mayoritas bekerja sebagai petani, sehingga hal tersebut dapat menjadi alternatif untuk memajukan tempat wisata dan juga pemasukan tambahan bagi petani. Segmen yang dituju adalah wisatawan yang berasal dari kota yang biasanya tertarik untuk memetik atau memanen sayur organik langsung dari lahan.

Kedua, Keberlanjutan Sosial budaya. Kearifan lokal yang ada di Desa Sumberdodol sangat beragam dan bermacam-macam yang dapat menjadi daya tarik untuk keberlanjutan sosial, Kegiatan yang menonjol antara lain: (a) Mata pencaharian pokok sebagai petani tetap jalan, dan muncul mata pencaharian tambahan dari sektor pariwisata; (b) masyarakat masih tetap berpedoman pada nilai-nilai adat Jawa namun toleransi terhadap masuknya kebudayaan berbeda meningkat; (c) pola pembagian kerja lebih modern dan struktur organisasi juga semakin kompleks; (d) kesenian lokal mulai bermunculan kembali. Sanggar sanggar kesenian semakin aktif. Kesenian lokal semakin sering ditampilkan. Desa Sumberdodol mempunyai kental dengan *religious* yang tinggi membuat desa Sumberdodol memiliki norma-norma adat yang tumbuh dan berkembang diiringi dengan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat.

Ketiga, keberlanjutan lingkungan. Keberadaan Desa Sumberdodol di dekat perbukitan selain memberikan keindahan alam, menjadikan masyarakatnya tidak dapat lepas dari alam sekitar. Masyarakat percaya bahwa dengan menjaga lingkungan, sebagai wujud ucapan syukur atas keselarasan antara warga dan lingkungan untuk hidup berdampingan, terutama dengan kekuatan alam di lingkungan tempat tinggal mereka. Ini berarti bahwa *religious* suatu wilayah akan berdampak pada keberlangsungan budaya yang ada di suatu daerah. *Religious* desa wisata tidak terlepas dari kelestarian lingkungan yang selayaknya dijaga dan tidak di eksploitasi. Di desa Sumberdodol sendiri menganggap bahwa lingkungan sangatlah penting dan perlu dijaga. Hal ini tercermin dalam menjalankan Desa wisata Sumberdodol yang menggunakan kotoran hewan ternak seperti; sapi, kambing, kelinci, dan ayam. Kotoran hewan ternak tersebut digunakan langsung oleh masyarakat lokal sebagai bahan pupuk organik. Keberadaan sarana dan prasaran pengolahan limbah khususnya limbah yang berasal dari kotoran ternak sangat diharapkan masyarakat lokal. Dengan sarana pengolahan limbah ini, limbah tersebut akan

dapat dimanfaatkan secara optional oleh masyarakat lokal untuk digunakan sebagai pupuk organik dan mengurangi biaya pembelian pupuk dari bahan kimia.

3. Membangun desa Wisata Sumberdodol Berbasis Partisipatif

Desa Sumberdodol yang terletak di wilayah perbukitan sehingga alamnya memberikan keindahan dan panorama yang menarik. Masyarakat desa Sumberdodol, melihat keindahan alam ini sebagai sumber daya yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai desa wisata pemandian di sumber air jernih dari pegunungan dan sayur organik yang dapat memberikan manfaat. Masyarakat mulai tergerak untuk berpartisipasi dalam budi daya sayur organik (sawi hijau, selada, bawang merah, bawang putih, kubis, locang, tomat, terong, cabe, boncis dll) karena mereka yakin bahwa sayur organik akan dicari oleh banyak orang sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat.

Namun tidak cukup hanya potensi tersebut, pembangunan desa wisata pada hakikatnya memerlukan sumberdaya serta keunikan komunitas lokal. Hal ini digarisbawahi oleh Murphy (1988) yang menjelaskan bahwa pengembangan kegiatan dan wisata merupakan “kegiatan yang berbasis komunitas”, yaitu sumberdaya dan keunikan komunitas lokal baik komponen fisik maupun non fisik (nilai-nilai, norma-norma, adat istiadat dan tradisi) yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan utama budaya dan tradisi masyarakat itu sendiri. Desa wisata berbasis masyarakat adalah pola pengembangan desa wisata yang mendukung dan memungkinkan keterlibatan penuh oleh masyarakat setempat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan usaha desa wisata dan segala keuntungan yang diperoleh. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Ife (1995) bahwa pentingnya sinergisitas antara tokoh masyarakat dengan lingkungan masyarakat sekitarnya untuk membangun nilai-nilai modal sosial dan memperkuat kelembagaan lokal akan tercipta kemandirian lokal.

Tabel 1. Matrik rencana strategis pengembangan Desa Wisata Sumberdodol

Aspek Potensi Lokal	Rencana Strategis
<p>Potensi Alam dan budaya lokal</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembangunan dan pengembangan konsep desa wisata yang “berbeda” dengan yang sudah ada, yakni sumber air asli dari pegunungan, panora alam yang indah dan berudara sejuk menjadi daya tarik untuk para pengunjung. ➤ Konsep pengembangan obyek wisata berbasis pada potensi hortikultura yang merupakan komoditas unggulan warga lokal (bawang merah, bawang putih, sawi hijau, selada, locang, tomat, terong, cabe, boncis) ➤ Mengangkat dan mengembangkan seni budaya tradisi lokal (hadrah, yasinan) menjadi <i>icon</i> yang unik dan khas bagi pengunjung wisata ➤ Pembangunan dan pengelolaan desa wisata secara partisipatif dengan melibatkan seluruh <i>stakeholder</i>.
<p>Dukungan SDM</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pendidikan dan pelatihan tentang desa wisata, khususnya kepada warga yang berada di sekitar obyek wisata. Tingkat pendidikan masyarakat di desa Sumberdodol relatif baik. Melalui pembinaan yang intensif, sumber daya manusia di desa tersebut dapat didorong untuk terlibat aktif dalam pembentukan desa wisata dan pada akhirnya juga berdampak pada peningkatan peluang usaha. ➤ Pembinaan intensif kepada petani/UMKM lokal tentang budidaya sayur organik ➤ Kursus/pelatihan kewirausahaan berbasis pariwisata kepada penduduk usia produktif dan putus sekolah agar dapat mengembangkan <i>home industry</i>, misalnya dalam pembuatan makanan lokal, kerajinan lokal, souvenir, dll
<p>Motivasi Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membentuk komunitas/paguyuban desa wisata pada simpul-simpul yang <i>concern</i> terhadap pembentukan desa wisata. ➤ Lembaga desa wisata aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang peta potensi sayur organik kepada masyarakat melalui pertemuan-pertemuan dan pengajian.

Hal itu semua dilakukan karena pada dasarnya setiap individu itu memiliki daya, hanya saja kadar daya itu akan berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang saling terkait (*interlinking factor*) antara lain seperti pengetahuan, kemampuan, status, harta, kedudukan dan jenis kelamin. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya (Harry Hikmat, 2001). Dengan demikian diseminasi inovasi dan pengembangan kemitraan merupakan wahana transfer

teknologi tepat guna kepada para pelaku usaha yang tergabung dalam kelompok agar terjadi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi yang bermuara pada peningkatan keuntungan para pelaku usaha.

Kelompok usaha ekonomi produktif merupakan basis di dalam menggerakkan ekonomi lokal. Sebagian besar pelaku usaha pengolahan makanan lokal berada di pedesaan sehingga potensi lokal menjadi salah satu entitas dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi lokal. Konsep pengembangan ekonomi produktif yang dilakukan di pedesaan sudah seharusnya menggunakan pendekatan agroindustri berbasis pedesaan. Sebagai suatu sistem agroindustri pedesaan akan memberikan nilai tambah melalui kegiatan-kegiatan subsistem yang ada di dalamnya.

Tabel 2. Matrik Tahapan Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Sumberdodol

Kriteria	Rencana Strategis
Potensi Produk /daya tarik wisata	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembangunan dan pengembangan konsep desa wisata yang “berbeda” dengan yang sudah ada. ➤ Konsep pengembangan obyek wisata berbasis pada pertanian organik yang merupakan komoditas unggulan warga lokal (jagung manis, sawi daging dll) ➤ Mengangkat dan mengembangkan seni budaya tradisi lokal (kudalumping, pencaksilat, hadrah, bari’an) menjadi <i>icon</i> yang unik dan khas bagi wisatawan ➤ Pengembangan desa wisata secara partisipatif dengan melibatkan seluruh <i>stakeholder</i>, hal ini berpijak dari karakteristik masyarakat yang ramah dan inklusif.
Dukungan SDM	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pendidikan dan pelatihan tentang desa wisata, khususnya kepada warga yang berada di sekitar obyek wisata ➤ Pembinaan intensif kepada petani/UMKM lokal tentang budidaya agro/hortikultura dan pengolahan pasca panen agar memiliki daya saing ➤ Pelatihan kewirausahaan berbasis pariwisata kepada penduduk usia produktif dan putus sekolah agar dapat mengembangkan kerajinan lokal, souvenir, dll
Motivasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membentuk komunitas/paguyuban desa wisata pada simpul-simpul yang <i>concern</i> terhadap pembentukan desa wisata. ➤ Pembentukan Lembaga desa wisata ➤ Lembaga desa wisata aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang peta potensi <i>ecotourism</i> kepada masyarakat melalui brosur dan forum2 warga dan radio lokal sekaligus sebagai <i>tourism education</i>.

Kriteria	Rencana Strategis
Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perencanaan dan pembangunan sarana & prasarana yang disesuaikan dengan konsep dan rencana strategis desa wisata ➤ Lembaga pengelola desa wisata berkoordinasi dengan simpul-simpul komunitas desa wisata secara swadaya membangun sarana-prasarana tradisional yang unik (halte gubug, kompleks/lapak pedagang kaki lima dll) ➤ Memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan untuk memperlancar akses bagi wisatawan menuju ke desa wisata
Fasilitas Pendukung Kegiatan Wisata	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan peran Pusat Informasi Desa Wisata yang bekerjasama dengan biro perjalanan lokal dan tenaga <i>guide</i> ➤ Perencanaan dan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan wisata

Sumber Data: Amalisis Wawancara Mendalam dan FGD

Desa wisata Sumberdodol merupakan desa wisata berbasis partisipatif, ada beberapa indikator sebagai bukti. *Pertama*, masyarakat Sumberdodol memiliki pengetahuan tentang alam untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim serta mengembangkan budaya lokal yang menjadi potensi dan nilai jual sebagai daya tarik wisata, sehingga pelibatan masyarakat menjadi mutlak. *Kedua*, Keberadaan desa wisata tersebut mengakui hak masyarakat lokal dalam mengelola kegiatan wisata di kawasan yang mereka miliki secara adat ataupun sebagai pengelola. Prinsip *local ownership* dipegang teguh pada masyarakat setempat, masyarakat membentuk panitia atau lembaga untuk pengelolaan kegiatan desa wisata di daerahnya, dengan dukungan dari pemerintah dan organisasi masyarakat. *Ketiga*, mampu menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat dan mengurangi kemiskinan. *Keempat*, mampu mengembangkan jasa-jasa wisata untuk turis: *fee* pemandu; ongkos transportasi; menjual kerajinan, dll. *Kelima*, mampu menumbuhkan *religious ekologis* masyarakat setempat dan mampu menumbuhkan jati diri dan rasa bangga antar penduduk setempat yang tumbuh akibat peningkatan kegiatan desa wisata Sumberdodol.

4. Pembangunan Desa Wisata Sumberdodol Berbasis Religius ekologis

Pembangunan desa wisata akan berkelanjutan manakala ada religious ekologis. Religious ecologis hadir sebagai akibat masalah lingkungan pada saat ini yakni masalah penyimpangan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Religious ecologis masih dirasakan di wilayah Sumberdodol di dalam pengelolaan desa wisata, namun demikian perlunya melakukan revitalisasi religious ecologis ini sejalan dengan pengembangan desa wisata Sumberdodol.

Hubungan antara manusia dengan alam dan lingkungan bukanlah merupakan hubungan antara pemangsa dan yang dimangsa tetapi sebenarnya hubungan yang setara karena sama-sama ciptaan Allah SWT. Hal ini karena bagaimanapun juga kemampuan manusia dalam mengelola bukanlah akibat kekuatan yang dimilikinya tetapi akibat anugerah dari Allah SWT. Ini berarti bahwa ketika manusia menanam dengan mendapatkan hasil yang melimpah tidak serta merta manusia tersebut memiliki kemampuan yang luar biasa di dalam mengelola usahatani tetapi itu semua karena Allah SWT. Hal ini tergambar dalam Surat Ibrahim ayat 32: *“Allalah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air dari langit kemudian dengan air hujan itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untUMKMu dan Dia telah menundukan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya dan Dia telah menundukan sunga-sungai bagimu”*

Pesan-pesan Al-Qur’an mengenai lingkungan sangat jelas dan prospektif. Ada beberapa ayat-ayat di Alqur’an terkait dengan lingkungan yang dijadikan sebagai acuan oleh masyarakat setempat di dalam mengembangkan keseimbangan ekologi, yakni: lingkungan sebagai suatu sistem, tanggung jawab manusia untuk memelihara lingkungan hidup, larangan merusak lingkungan sebagaimana terlihat dpada matrik berikut ini.

Tabel 3. Matrik Sikap dan Perilaku Religius dalam Pembangunan Desa Wisata

Surat Dalam Alqur'an	Inti Pesan	Sikap Dan Perilaku Religius
<p>“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu semua” (QS. Al-Baqarah :29)</p> <p>Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan unit UMKM di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakannya pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya.” (QS. 15 : 19-20)</p>	Lingkungan sebagai suatu sistem	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masyarakat memahami bahwa lingkungan terdiri atas unsur biotik dan abiotik ➤ Masyarakat menyadari bahwa tanpa alam dan lingkungan manusia tidak dapat hidup ➤ Memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk digunakan seoptimal mungkin ➤ Masyarakat menanam berbagai macam sayuran organik untuk kebutuhan hidup manusia
<p>“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata : “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) dan lagi memperkenankan (do'a hamba-Nya).” (QS. 11 : 61)</p>	Pembangunan untuk kelestarian lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan cara- cara bertani yang baik yakni sistem pertanian terpadu berkelanjutan ➤ Untuk menjaga keseimbangan ekologis, masyarakat melakukan misalnya pembuatan biopori, ➤ Gaya hidup ramah lingkungan ➤ Mengonsumsi produk ramah lingkungan
<p>“Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah SWT tidak menyukai kebinasaan.” (QS. Al-Baqarah: 2014-2015)</p> <p>“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik.” (QS Al-A'raf : 56)</p>	Larangan merusak lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Larangan membuang sampah disembarang tempat ➤ Pengelompokan sampah berdasarkan jen isnya ➤ Memanfaatkan sampah yang berserakan untuk diolah kembali menjadi pupuk dan gas.

Sumber data: analissi data primer melalui wawancara mendalam

Berdasarkan wawancara dengan beberapa tokoh agama dan juga pengamatan penulis, sikap dan perilaku yang menyandarkan ekologi religius ini didasarkan atas Sabda Nabi Muhammad SAW *"Barang siapa yang telah menanam pohon, dan pohonnya berbuah lalu buahnya dimakan oleh orang atau binatang maka Tuhan memberi pahala yang tiada putus-putusnya."* Manusia dalam rangka menjaga hubungan interaksinya dengan lingkungan sekitarnya, termasuk menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah suatu perwujudan manifestasi dalam hal tahapan manusia menuju tahap akhlaq muhsin yakni: iman, islam, dan ihsan. Terkait dengan menjaga kelestarian lingkungan, Nabi Muhammad SAW juga bersabda sebagai berikut: *"Jauhilah tiga perilaku terlaknat; buang kotoran di sumber air, di pinggir jalan, dan di bawah naungan pohon."* (HR Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Majah).

KESIMPULAN

Modernisasi dan kemajuan teknologi informasi telah mempengaruhi nilai-nilai dalam segala aspek kehidupan. Pelestarian nilai-nilai budaya lokal sangat penting dilakukan karena menyangkut identitas komunitas lokal. Keterpaduan ekologi religius dan partisipasi masyarakat dalam mendayagunakan potensi lokal menjadi prasyarat dalam setiap perencanaan pembangunan, serta menjadi suatu hal yang sangat urgen untuk menghadapi derasnya arus globalisasi. Desa Wisata Sumberdodol merupakan desa wisata yang dibangun secara partisipatif dan berbasis ekologi religius. Hubungan antara manusia dengan alam dan lingkungan bukanlah merupakan hubungan antara pemangsa dan yang dimangsa tetapi sebenarnya hubungan yang setara karena sama-sama ciptaan Allah SWT. Hal ini karena bagaimanapun juga kemampuan manusia dalam mengelola bukanlah akibat kekuatan yang dimilikinya tetapi akibat anugerah dari Allah SWT. Hal ini berimplikasi pada keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial budaya dan keberlanjutan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan dan Biklen, 1982. *Qualitative Research for Education*. United States of America: Mc Graw-Hill, Inc.
- Hikmat, Harry. , 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Ife, Jime. 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives-Vision, Analiysis and practice*. Melbourne: Longman.
- John M. Ecols dan Hasan Shadily, 2010. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Miles, Matthew. B dan Huberman, A. Michael,. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. (Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta : Universitas Indonesia.
- Murphy, P.E., 1988, *Community Driven Tourism Planning, Tourism Management*.
- Yin, Robert.K. 1987. *Case Study Research : Design and Methods*. Beverly Hills. California : Sage Publication.

PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN NILAI-NILAI BUDAYA LOKAL DALAM PEMBANGUNAN DESA WISATA GENILANGIT

Eny Lestari^{1*}, Sugihardjo², and Agung Wibowo²

¹ Program Magister Penyuluhan Pembangunan, Pascasarjan, Universitas Sebelas Maret,

² Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian,
Universitas Sebelas Maret.

*Email: agungwibowo@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Desa wisata bisa dijadikan sebagai pintu masuk berkembangnya industri kreatif di pedesaan, hal ini karena adanya keterpaduan antara berbagai fasilitas yang saling mendukung dan berkelanjutan. Ini berarti bahwa di dalam pembangunan yang berkelanjutan harus mensinergiskan antara budaya lokal dan partisipasi masyarakat. Prasyarat untuk terjadinya partisipasi masyarakat adalah adanya kesempatan, kemauan dan kemampuan. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan pembangunan Desa Wisata Genilangit berbasis budaya lokal; (2) mendeskripsikan peran komunitas lokal dalam pembangunan Desa Wisata Genilangit; (3) mendeskripsikan pembangunan Desa Wisata Genilangit berbasis partisipatif; dan (4) mendeskripsikan keberlanjutan pembangunan Desa Wisata Genilangit. Pengembangan Desa Wisata Genilangit responsive terhadap keberadaan budaya lokal dan partisipasi komunitas lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Desa Wisata Genilangit berbasis partisipatif, ada beberapa indikator sebagai berikut: (1) masyarakat Desa Genilangit memiliki pengetahuan tentang alam untuk mengembangkan budaya lokal; (2) keberadaan desa wisata tersebut mengakui hak masyarakat lokal dalam mengelola kegiatan wisata di kawasan yang mereka miliki secara adat ataupun sebagai pengelola; (3) mampu menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat dan mengurangi kemiskinan; (4) mampu mengembangkan jasa-jasa wisata untuk turis; dan (5) mampu menumbuhkan religious ekologis masyarakat setempat dan mampu menumbuhkan jati diri dan rasa bangga antar penduduk setempat yang tumbuh akibat peningkatan kegiatan Desa Wisata Genilangit. Tataran implementasi desa wisata perlu dipandang sebagai bagian dari perencanaan pembangunan terpadu yang dilakukan di suatu daerah. Untuk itu pelibatan stakeholder mulai dari level komunitas, masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan organisasi non pemerintah diharapkan mampu membangun suatu jaringan dan menjalankan suatu kemitraan yang baik sesuai peran dan keahlian masing-masing. Desa Wisata Genilangit yang berbasis partisipatif bisa dijadikan sebagai *best practice* dalam pengelolaan desa wisata.

Kata Kunci: Budaya Lokal, Desa Wisata, Partisipatif,

PENDAHULUAN

Saat ini di Indonesia masih tersisa beberapa budaya lokal dan kearifan lokal khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Siswadi, dkk (2011), menyebutkan kearifan lokal tersebut meliputi: pengetahuan, nilai-nilai, etika dan moral, dan norma-norma yang berupa anjuran, larangan, dan sanksi, serta ungkapan-ungkapan dipakai sebagai pedoman sikap dan perilaku masyarakat dalam memelihara, menjaga dan melestariakan mata air. Contohnya adalah tradisi nyabuk gunung, susuk wangan, merti desa di Jawa Tengah, Subak di Bali, Sasi di Maluku, senguyun di Kalimantan, dsb. Namun kearifan lokal tersebut saat ini sudah mulai pudar. Akibatnya sumber daya alam tidak lagi terpelihara dengan baik, lahan dan hutan rusak, mata air banyak yang mati. Ini berarti bahwa revitalisasi budaya lokal dan kearifan lokal menjadi hal yang *urgem* untuk dilakukan di dalam membangun *governance* di tingkat lokal. Dengan demikian pentingnya melakukan revitalisasi nilai-nilai budaya lokal dan kearifan lokal dalam pembangunan di segala bidang.

Sejak dikeluarkannya Undang-undang No 6 Tahun 2014, desa bebas berkreasi dan memperbaiki diri. Ditambah lagi bahwa desa memperoleh dana desa sebesar 1 Milyard rupiah yang berasal dari APBN dan APBD. Dana tersebut diperuntukkan untuk pembangunan desa secara menyeluruh. Pemerintah Daerah maupun pemerintah provinsi dapat melakukan penataan terhadap desa. Kemudian Desa juga dapat membuat peaturan tersendiri bersama badan permusyawaratan desa (PP Nomor 43 tahun 2014). Peruntukan dana desa sebesar 1 Milyard tersebut bagi sebagian desa masih dalam sebuah dilema. Sebagian besar desa belum tahu dana tersebut harus bagaimana dan digunakan untuk kepentingan apa. Berpijak dari regulasi tersebut, maka pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan program.

Fasilitator pemberdayaan sangat dibutuhkan dalam menentukan kinerja program dan pelaksanaan program desa. Menurut Anom (2015) misi besar pendampingan desa adalah memberdayakan desa sebagai *self governing community* yang maju, kuat, mandiri dan demokratis. Kegiatan pendampingan membentang mulai dari pengembangan kapasitas pemerintahan, mengorganisir dan membangun kesadaran kesadaran kritis warga masyarakat, memperkuat organisasi-organisasi warga, memfasilitasi pembangunan partisipatif, memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa sebagai arena demokrasi dan

akuntabilitas lokal, merajut jejaring dan kerja sama desa, hingga mengisi ruang-ruang kosong di antara pemerintah dan masyarakat.

Menurut Sumardjo dalam Wibowo (2016) prasyarat untuk terjadinya partisipasi masyarakat adalah adanya kesempatan, kemauan dan kemampuan. Kesempatan yang dimaksud adalah persepsi masyarakat tentang adanya peluang bagi masyarakat untuk ikut serta merencanakan, melaksanakan, menilai hasilnya dan menikmati setiap aktivitas pembangunan di masyarakat. Masyarakat adat menempatkan pemahaman tentang keteraturann alam semesta sebagai kesempatan untuk berpartisipasi berdasarkan persepsi yang terbentuk antara lain dari kepercayaan dan nilai-nilai kearifan lokal yang dipahaminya. Kemauan adalah kecenderungan sikap atau minat masyarakat yang terbentuk dan berkembang karena adanya manfaat dari program dan aktivitas pembangunan di masyarakat, bagi upaya pemenuhan kebutuhan kehidupannya. Kemauan ini tidak lain adalah sikap masyarakat yang dipengaruhi selain oleh nilai manfaat yang dirasakan (lebih personal sifatnya namun sebenarnya dipengaruhi *social value*), juga dipengaruhi oleh keyakinan (*belief*) dan nilai budaya (*value*) yang dimilikinya. Sedangkan kemampuan, adalah penguasaan sumberdaya oleh masyarakat, diantaranya berupa ketrampilan masyarakat untuk dapat ikut serta dalam program dan setiap aktivitas pembangunan di masyarakat. Bila salah satu dari prasyarat tersebut lemah, maka lemah pula partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dikembangkan di masyarakat tersebut.

Sejalan dengan pengembangan partisipasi masyarakat, hasil penelitian Amanah dan Fatchiya (2018) menunjukkan bahwa sistem penyuluhan pedesaan di Indonesia menghadapi fase transisi karena perubahan kebijakan, struktur, organisasi, dan perubahan situasi pedesaan. Pandangan petani dan stakeholder terkait pembangunan pedesaan menganggap bahwa layanan penyuluhan pedesaan sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi *on-farm* dan *off farm* serta layanan harus diintegrasikan dalam suatu sistem untuk memfasilitasi perubahan yang lebih baik. Berpijak dari hasil penelitian ini, maka penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana mengintegrasikan budaya lokal dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Wisata Genilangit.

Pariwisata merupakan salah satu industri yang menyumbang kontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) cukup tinggi yaitu sebesar 9% sehingga menjadikan pariwisata sebagai sektor yang potensial untuk pengembangan ekonomi lokal (Ahmad,

2013). Bila dilihat dalam perspektif yang lebih luas, selama dua puluh tahun terakhir sektor pariwisata mengekspansi dan menjadi industri dengan pertumbuhan yang tinggi di dunia (Liu, Chou, 2016). Buktinya adalah pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2012 jumlah pengunjung di Asia tumbuh dari 55,8 juta menjadi 233,6 juta (Fan, Hsu, 2014). Pariwisata merupakan salah satu industri terbesar di dunia yang memberikan kontribusi 9,5% (US \$7 trillion) untuk global Produk Domestik Bruto (PDB), dan sektor ini telah diidentifikasi sebagai pendapatan potensial (Ahmad, 2013; Cibinskiene, Snieskiene, 2015). Sektor pariwisata juga dipandang sebagai kontributor yang signifikan dalam usaha pemerintah mendiversifikasi ketergantungan terhadap ekspor produk primer (gas alam dan minyak bumi). Oleh karena itu banyak perencanaan pemerintah mengarah pada sektor pariwisata (Scheyvens, Momsen, 2008). Dengan demikian Desa Wisata bisa dijadikan sebagai pintu masuk berkembangnya industri kreatif di pedesaan, hal ini karena adanya keterpaduan antara berbagai fasilitas yang saling mendukung dan berkelanjutan. Ini berarti bahwa di dalam pembangunan yang berkelanjutan harus mensinergiskan antara budaya lokal dan partisipasi masyarakat.

Selama ini banyak kalangan menganggap bahwa faktor penyebab kemiskinan pedesaan khususnya pada masyarakat lereng gunung lebih dominan disebabkan oleh faktor eksternal, misalnya: kesenjangan aksesibilitas teknologi, kesenjangan infrastruktur. Ironisnya, disparitas pembangunan desa kota merupakan persoalan-persoalan yang selalu diangkat untuk mendeskripsikan faktor penyebab kemiskinan di wilayah di lereng gunung. Hal tersebut justru memberikan berbagai dampak negatif pada masyarakat setempat, misalnya: semakin maraknya aksi-aksi anarkhis dari sebagian kelompok masyarakat untuk menuntut kucuran dana untuk pembangunan yang bermuara pada eskalasi konflik yang berujung pada konflik terbuka di permukaan. Penelitian ini akan menelusuri lebih jauh penyebab kemiskinan dari perspektif yang berbeda yakni faktor-faktor internal khususnya budaya lokal untuk diintegrasikan dan ditransformasi menjadi potensi pada diri individu maupun secara kelembagaan untuk mendayagunakan potensi lokal yang ada.

Hasil penelitian Saleh, dkk (2018), menunjukkan bahwa modal sosial melalui dukungan infrastruktur, kelembagaan sosial ekonomi dan dukungan keluarga serta ditunjang adanya kegiatan penyuluhan yang memiliki kesesuaian dengan kebutuhan perempuan pedesaan baik metoda maupun materi yang disampaikannya memberikan

kontribusi pada kemandirian masyarakat khususnya perempuan di pedesaan. Hasil penelitian ini menjadi pijakan peneliti untuk menelusuri modal sosial yang berkembang di masyarakat khususnya pada peran komunitas lokal dalam pembangunan Desa Wisata Genilangit. Penelitian ini juga terinspirasi penelitian yang dilakukan oleh Schipani (2008) tentang keberhasilan pengetasan kemiskinan di Laos dengan pendekatan budaya, dimana pariwisata yang dikembangkan di Luang Namtha, adalah berbasis budaya lokal dan sifatnya yang "pro-miskin", yang berarti bahwa persentase yang tinggi dari manfaat belanja turis orang miskin. Hal ini terjadi pada tiga tingkatan: (1) orang miskin bekerja di posisi tidak terampil dan setengah terampil dalam industri pariwisata, Misalnya: di penginapan khusus, transportasi, restoran, dan hiburan budaya; (2) pada masyarakat berbasis wisata, penduduk desa menyediakan barang dan jasa seperti makanan, transportasi penginapan, dan layanan pemandu secara langsung kepada wisatawan dalam komunitas mereka; dan (3) dengan memasok barang-barang pertanian, bahan baku dan jasa untuk pasar lokal yang melayani kebutuhan wisatawan.

Berpijak dari penelitian-penelitian sebelumnya dan isu-isu yang berkembang sejalan dengan implementasi Undang-Undang Desa, maka tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan pembangunan Desa Wisata Genilangit berbasis budaya lokal; (2) mendeskripsikan peran komunitas lokal dalam pembangunan Desa Wisata Genilangit; (3) mendeskripsikan pembangunan Desa Wisata Genilangit berbasis partisipatif; dan (4) mendeskripsikan keberlanjutan pembangunan Desa Wisata Genilangit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menganut paradigma konstruktivis dimana penelitian ini mengurai lebih detail terkait pengembangan desa wisata berkelanjutan yang berbasis pada budaya lokal dan partisipatif. Penelitian ini dilakukan di lereng selatan Gunung Lawu di Desa Genilangit di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan. Pemilihan wilayah ini dengan pertimbangan: (1) wilayah tersebut berbatasan langsung dengan kawasan hutan milik negara di lereng gunung yang telah terbukti mampu menjaga kelestarian lingkungan; (2) menyimpan banyak kearifan lokal dan budaya lokal; dan (3) peneliti telah melakukan penelitian-penelitian pendahuluan pada masyarakat lereng Gunung Lawu sehingga bisa

dijadikan sebagai pijakan dalam menelusuri budaya lokal masyarakat khususnya dalam membangun Desa Wisata Genilangit

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menurut Daymon & Holloway (2008), metode kualitatif cenderung dihubungkan dengan sifat subjektif dari sebuah realitas sosial secara holistik, sehingga metode ini memiliki kemampuan yang baik untuk menelusuri budaya lokal masyarakat dalam membangun desa wisata. Penelitian ini merupakan studi kasus, dimana menurut Yin (2011) studi kasus merupakan suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata dan multisumber bukti dimanfaatkan. Sumber data penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moeloeng, 2009), yang diperoleh melalui wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi, *focus group discussion* serta analisis dokumen (*content analysis*) dan juga observasi tak berperan (Sutopo, 2002). Unit analisis dalam penelitian ini adalah satu wilayah dan fokus pada pengembangan desa wisata, maka teknik analisis yang digunakan adalah analisis kasus tunggal. Menurut Miles dan Huberman (1992), pada tiap kasusnya proses analisis dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif. Dalam model analisis ini, tiga komponen analisisnya yaitu: reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan atau *verifikasi*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Desa Wisata Genilangit Berbasis Budaya Lokal

Desa Genilangit terletak di lereng gunung lawu sehingga alamnya memberikan keindahan dan panorama yang menarik. Masyarakat Desa Genilangit, khususnya karang taruna, melihat keindahan alam ini sebagai sumber daya yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai taman wisata serta dapat memberikan manfaat. Namun tidak cukup jika hanya potensi tersebut, pembangunan kepariwisataan hakikatnya memerlukan sumberdaya serta keunikan komunitas local. Hal ini digarisbawahi oleh Murphy (1988) yang menjelaskan bahwa pengembangan kegiatan dan pariwisata merupakan “kegiatan yang berbasis komunitas”, yaitu sumberdaya dan keunikan komunitas local baik komponen fisik maupun non fisik (nilai-nilai, norma-norma, adat istiadat dan tradisi) yang melekat

pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan utama budaya dan tradisi masyarakat itu sendiri. Desa Genilangit memiliki beberapa komponen budaya lokal sebagai basis pembangunan desa wisata sebagai berikut:

Tabel 1. Entitas Budaya Lokal dan Perannya dalam Pengembangan Desa Wisata

Komponen Budaya Lokal	Deskripsi	Peran dalam pengembangan desa wisata
Parade kirab 1000 tumpeng	Seluruh masyarakat Desa Genilangit membawa dan mengarak 1000 tumpeng kurang lebih 1,5 Km menuju Taman Wisata Genilangit.	Parade tumpeng menjadi agenda wisata tahunan dan menjadi salah satu alat pemersatu masyarakat Desa Genilangit. Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan taman wisata agar lebih di kenal oleh khalayak luas sehingga kedepannya di harapkan akan semakin populer dan ramai pengunjung.
Seni bela diri / organisasi pencak silat	Kegiatan pencak silat hanya dilakukan sebagai bentuk latihan di Balai desa	Keberadaan organisasi pencak silat merupakan salah satu yang mensupport terbentuknya Taman Wisata Genilangit.
upacara adat yang disebut Wuku Galungan	Acara nyekar ke pemakaman Ki Hajar Wonokoso yang selanjutnya dilanjutkan makan bersama di lokasi sakral tersebut.	Membangkitkan semangat kebersamaan di dalam membangun desa wisata tanpa mengharapkan adanya imbalan
mitos	Adanya misteri siluman Harimau, Sayem sosok wanita idaman dari Wonomulyo	Mtos ini diyakini sesuatu hal yang menjadi inspirasi untuk mengembangkan Desa Wisata Genilangit yakin akan banyak dikunjungi pengunjung
Kesenian reog	Menurut sespuh desa banyak warganya yang menjadi pemain reog dan juga menjadi pelatih	Desa wisata ini akan dikembangkan juga sebagai tempat belajar seni tradisional termasuk diantaranya reog dan tari.

Sumber data: analisis wawancara mendalam dan hasil Focus Group Discussion

Suansri dalam Sunaryo (2013) menyampaikan kepariwisataan yang berbasis masyarakat harus meliputi lima dimensi pengembangan yang merupakan aspek utama dalam pembangunan kepariwisataan yaitu dimensi ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan politik. Kelima dimensi itu telah dimiliki oleh Desa Wisata Genilangit, rasa

kekeluargaan pada momen tujuh belas agustus misalnya, dijadikan sarana untuk mulai menyatukan masyarakat pada saat itu melalui acara hiburan, karena dirasa setiap warga Indonesia secara otomatis pasti mempunyai jiwa nasionalisme. acara sederhana ini berjalan lancar karena pada dasarnya orang menyukai hiburan, meskipun belum keseluruhan (60 anggota). tahun berikutnya diadakan kegiatan yang sama, namun tiap tahun harus ada perkembangan, di tambah lomba misalnya. Hingga tahun 2014, antusias masyarakat bertambah dan mulai berfikir kedepan, jika sudah bisa menyatukan masyarakat, maka harus ada pengembangan lain, dilihat dari kebutuhan manusia yaitu ekonomi yang paling utama. hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Brooks (2010) yang menjelaskan manfaat ekonomi merupakan pertimbangan dan motivasi yang penting dan signifikan bagi sebagian besar masyarakat lokal yang berpartisipasi dalam kegiatan berbasis komunitas.

Pengembangan ekonomi dimulai dari pemberdayaan masyarakat, bagaimana masyarakat bisa mendapat penghasilan dari kegiatannya. Kemudian timbul gagasan pada tahun 2015 mengajukan ke pemerintah desa untuk membuat semacam rumah toko di lapangan desa, karena selama ini lapangan sudah di kelola karang taruna namun baru ditanami rumput yang tiap tahun dijual ke masyarakat (mulai tahun 2012) namun belum disetujui. Tidak berputus asa disitu, melainkan tambah semangat. Kemudian muncul gagasan membuat bumi perkemahan di Taman Wisata Genilangit (tempat persemaian) milik perhutani, di sisi lain masyarakat frustrasi karena tidak ada kegiatan lain sehingga mereka malah semangat datang ke Taman Wisata Genilangit, dengan tujuan awal masih sama yaitu kompak. masyarakat menanamkan bahwa masalah hasil adalah urusan yang di atas yang penting adalah berusaha dan berdo'a.

Selanjutnya jerih payah selama hampir 3 tahun membuahkan hasil. Hutan di Taman Wisata Genilangit di'sulap' oleh masyarakat melalui proses yang sangat luar biasa. Proses ini pun tidak luput dari masalah yang ada, kegiatan memerlukan biaya terutama konsumsi, disiasati dengan membuat jadwal kegiatan RT tiap minggu yang kemudian berputar selama beberapa bulan. Penggalangan dana terus dilaksanakan hanya untuk makan, makan di tekan seminim mungkin yakni sebatas nasi bungkus dengan harga kurang lebih Rp 3.000,00. Kegiatan ini berlagsung hampir 1 tahun. Kemudian pengembangan terus bertambah seperti perluasan lahan, di tahun 2016, dalam 1 minggu ada beberapa hari kegiatan (sudah tidak tiap minggu) kemudian berlanjut setiap hari, otomatis konsumsi pun

setiap hari. Kemudian buper (bumi perkemahan) jadi, di tahun 2016 pertengahan, ada kunjungan calon legislative DPR pusat yang datang karena tertarik kegiatan & sejarahnya, kunjungan ini memberikan pengaruh ke dunia luar yakni semakin dikenal orang luar, sebelumnya belum tujuan ke pengembangan wisata, karena sadar untuk terjun ke ranah wisata memerlukan biaya yang besar.

Keberadaan Desa Genilangit di lereng Gunung Lawu selain memberikan keindahan alam, menjadikan masyarakatnya tidak bisa lepas dari alam sekitar. Mayoritas masyarakat memanfaatkan alam sumber mata pencaharian seperti petani dan peternak. Masyarakat percaya bahwa dengan menjaga lingkungan, sebagai wujud ucapan syukur atas keselarasan antara warga dan lingkungan untuk hidup berdampingan, terutama dengan kekuatan alam di lingkungan tempat tinggal mereka. Pengembangan sumberdaya budaya dan pariwisata responsive terhadap keberadaan dan kebutuhan komunitas lokal. Pengelolaan taman wisata dikelola langsung oleh karang tarunanya, dari mulai ketenagakerjaan, pengembangan taman, penghasilan, hingga galang dana. Koperasi yang dibuat bergerak dibidang jasa, namun keberadaanya menjadi tidak diterima warga sehingga koperasi hanya berjalan setengah tahun. hal ini dikarenakan koperasi tersebut tidak menerima pinjam dari warga, padahal masyarakat awam menganggap koperasi berfungsi untuk bisa dipinjami uang. Tak ingin menyerah sampai disitu, karang taruna mencari solusi, nama di ubah dari koperasi menjadi saham. Solusi ini di butuhkan karena karang taruna tidak ingin ada debat atau perselisihan dengan masyarakat sesuai dengan tujuan awal yakni menyatukan masyarakat bukan menciptakan perselisihan. Solusi saham ini menguntungkan bagi taman wisata karena menjadi suntikan dana juga menguntungkan pengelola sekitar dengan ketentuan pemilik saham harus ber-KTP Genilangit.

Terdapat dua kelompok saham yakni saham lingkungan dan pribadi. Kebijakan ini dibuat mengingat Taman Wisata Genilangit telah lebih dulu disuplai oleh karang taruna yang sudah loyal gotong royong membantu dari awal pembentukan taman wisata agar jangan sampai penyuplai awal tergantikan oleh penyuplai baru. Saham lingkungan adalah penyertaan uang dengan nominal berapapun, kegiatan ini telah lebih dulu di sosialisasikan dengan mendatangi masyarakat satu persatu. Sosialisasi disampaikan sedetail mungkin mulai dari tujuan, hasil, dan arah kedepannya. Saham pribadi adalah penyertaan uang dengan ketentuan nominal yang disamaratakan yakni sebesar 1 juta.

Tabel 2. Konflik Kepentingan Komunitas Lokal dalam Pembangunan Desa Wisata Genilangit

Kategori komunitas lokal	Permasalahan yang dihadapi	Alternatif pemecahan masalah yang sudah dilakukan	Harapan masyarakat
Masyarakat miskin yang tidak mendapat manfaat langsung terhadap keberadaan desa wisata	Penerapan sistem penyertaan uang/saham masih menimbulkan kecemburuan social bagi masyarakat yang sama sekali tidak mampu mengikuti saham, karena tidak mendapatkan keuntungan.	Pendataan KK (kartu keluarga) yang belum ikut tanam saham oleh karang taruna. Nantinya, keuntungan saham dibagi rata tiap KK termasuk yang belum menanam saham, namun tidak langsung dibagikan ke orangnya melainkan dimasukkan sebagai tabungan untuk menutupi saham 1 juta.	Semua elemen masyarakat dapat mengikuti program tanam saham
Masyarakat miskin yang mendapat manfaat langsung terhadap keberadaan desa wisata	Penyamarataan nominal tanam saham sebanyak 1 juta dirasa cukup tinggi oleh masyarakat kurang mampu.	Masyarakat kurang mampu yang tidak mempunyai uang 1 juta, bisa bergabung dengan masyarakat lain hingga mencapai 1 juta, hanya saja saham di atasnamakan 1 orang.	Keuntungan dari saham bisa dikumpulkan menjadi 1 juta sehingga bisa mendaftar tanam saham atas nama pribadi, bukan lagi saham gabungan
Pelaku ekonomi kreatif	Pelaku ekonomi kreatif yang telah berkontribusi langsung merupakan karang taruna yang memiliki keahlian seperti tukang las, kayu, bagian pasar malam keliling yang punya ide membuat mainan sendiri. sedangkan diluar karang taruna seperti petani di sekitar taman wisata belum berperan aktif.	Disosialisasikan kepada pelaku tersebut berupa penawaran program yang pengelolaannya dipusatkan, namun tetap menguntungkan kedua belah pihak.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pengelolaan yang bersifat sentra dapat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola inti ➢ Menciptakan lapangan kerja ➢ Lahan inovasi rekan-rekan karang taruna dengan kegiatan itu bisa muncul ide
Pengusaha lokal	Taman wisata hanya memanfaatkan sumber daya local termasuk sumber daya manusia nya, sehingga pengusaha/pihak luar yang berkepentingan tidak bisa 'masuk' baik sebagai pekerja maupun penanam saham.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Agar dapat terus mengembangkan taman wisata, pengurus melakukan studi banding, kemudian menerapkannya sesuai potensi Desa Genilangit. ➢ - akan dibuka kerjasama dengan pihak luar, namun sifatnya sebagai mitra 	Masyarakat ingin kepengurusan dan kepemilikan terus dikelola oleh masyarakat Desa Genilangit, bukan pihak luar/pengusaha.
Tokoh masyarakat	Pengelola lapang (pengelola yang bertugas di taman wisata) didominasi oleh anggota karang taruna usia muda (<40 tahun)	Diadakan rapat bulanan yang dihadiri oleh seluruh anggota karang taruna termasuk tokoh masyarakat yang membahas hasil & perkembangan taman wisata.	Pengurus ingin tetap terdapat orang tua di dalam keberjalanan taman wisata, karena mereka tidak mau lepas dari pengawasan orang tua / tokoh masyarakat.

Sumber data: analisis wawancara mendalam dan hasil Focus Group Discussion

Masyarakat meyakini selama masih ada kesenjangan di masyarakat, maka akan ‘diangkat’ dengan berbagai solusi. Program ini sebelumnya harus dibuat perjanjian dahulu dengan yang bersangkutan baik tertulis maupun lisan. Masyarakat mengetahui jika sistem saham seperti itu secara teori sebenarnya salah, namun kenyataannya bisa berkembang karena percaya yang perlu dikedepankan sosial & interaksi dengan masyarakat dahulu. “Mengejar berkahnya dulu”. Kedepannya akan dibuat pengembangan pelelangan kelompok saham lain, artinya jika pada jatuh tempo pemilik saham belum bisa membayar, maka akan dilelang kepada orang lain dulu. Kebijakan ini dibuat mengingat kebutuhan masyarakat desa yang bermacam – macam. Contohnya ketika keluarganya akan mengadakan pesta pernikahan, pesta khitanan, atau kerabat sakit, maka prioritasnya menggunakan uang tidak lagi pada saham, hal ini pun sudah dipikirkan oleh teman-teman karang taruna. Namun kesempatan menanam saham akan dibuka lagi di lain kesempatan. Jadi bukan semata – mata sesuai prosedur di mana yang tidak membayar saham tidak bisa ikut lagi/ keluar.

Peran Komunitas Lokal dalam Pembangunan Desa Wisata Genilangit

Komunitas lokal memiliki peranan penting dalam industri budaya dan pariwisata, yakni interaksi antara pembangunan pariwisata berkelanjutan dan warga masyarakat (Tien-Ming Cheng *et al.*, 2017) Apakah warga masyarakat proaktif dan positif dalam hal sikap pembangunan pariwisata berkelanjutan mereka sangat penting untuk pembangunan selanjutnya. Oleh karena itu, pengembangan kegiatan (industri) budaya dan pariwisata di suatu tempat perlu dipastikan dikelola dengan baik dan bersifat berkelanjutan. Hal mendasar yang harus diwujudkan untuk mendukung tujuan tersebut adalah dengan memfasilitasi keterlibatan komunitas lokal secara luas dalam proses pengembangan dan memaksimalkan nilai manfaat sosial dan ekonomi dari kegiatan budaya dan pariwisata. Hasil penelitian Sawerah, dkk (2016) menunjukkan bahwa keberadaan kelompok atau komunitas sangat mempengaruhi terhadap partisipasi. Keterlibatan mereka dapat menambah pengetahuan baru dan sebagai sarana belajar. Penelitian Ramadoan (2013), juga memperkuat adanya hubungan antara keberadaan kelompok dengan partisipasi, dalam penelitiannya menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi dalam pencegahan kebakaran hutan karena rendahnya jejaring kelompok atau komunitas dalam masyarakat.

Tabel 3. Peran Komunitas Lokal dalam Pembangunan Desa Wisata Genilangit

Komponen pemberdayaan	Kegiatan yang sudah dilakukan	Kegiatan yang diharapkan
Pemerataan tingkat pendapatan ekonomi masyarakat local	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pekerja di taman wisata mendapat pendapatan yang sama rata, yang membedakan adalah bonus yang dilihat dari keaktifan nya. ➢ Masyarakat lokal mendapatkan keuntungan dari penanaman saham yang disamaratakan yakni menanam 1 juta rupiah. Penanaman saham yang sudah berjalan diusahakan minimal 1 keluarga 1 saham 	Sistem saham bisa diikuti oleh seluruh masyarakat Desa Genilangit agar ada lagi kesenjangan ekonomi dan sosial
Pengembangan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Saat ini belum terdapat UMKM di Desa Genilangit. ➢ Penjual makanan di taman wisata hanya sekedar kerja karena pegelolaannya disentrakan dan dibagi tanggung jawab per RT. Kebijakan ini dibuat untuk menghindari persaingan. 	Dibuat kelompok yang bertugas menyediakan souvenir oleh – oleh taman wisata. Kelompok tersebut yakni dibidang sablon yang memberdayakan karang taruna non pegawai, kelompok lainnya dibidang makanan khas Genilangit yang memberdayakan ibu- ibu PKK dan dibagi tiap RT, dimana tiap RT harus mengkreasikan makanan yang berbeda.
Pengembangan kapasitas untuk berkompetisi dalam menghadapi persaingan	Dilakukan study banding oleh pengurus baik secara <i>online</i> maupun datang langsung ke tempat wisata. Pembangunan dilakukan dengan memegang prinsip “tidak setengah-setengah”, yakni pembangunan secara totalitas, jika modal belum cukup untuk suatu wahana, maka ditunggu hingga cukup.	Pembangunan tidak hanya berhenti di wahana dan spot foto saja (seperti yang sekarang ada), tapi masuk ke subsector lain seperti peternakan yakni <i>farmhouse</i> , pertanian yakni memetik sendiri buah / sayur yang bisa menjadi oleh-oleh, dan penginapan, yang semuanya tetap dipusatkan pengelolaannya.
Optimalisasi keberadaan desa wisata agar memberikan dampak secara ekonomi kepada masyarakat sekitar	Sistem penyerapan tenaga kerja dibuat selektif, yakni hanya yang ber-KTP Desa Genilangit yang dapat diterima. Sistem saham yang hanya bisa diikuti oleh KK Desa Genilangit. Hingga saat ini sudah ada 500 keikutsertaan saham (500 juta) dan telah berjalan selama satu tahun.	Sosialisasi mengenai saham terus dilakukan dan dengan cara baru yakni sosialisasi <i>door to door</i> berikut solusi bagi yang belum ikut saham, sehingga semua masyarakat dapat menjadi pemegang saham dan mendapatkan keuntungan dari keberadaan taman wisata.

Sumber data: analisis wawancara mendalam dan hasil Focus Group Discussion

KESIMPULAN

Keberadaan Desa Genilangit di lereng Gunung Lawu selain memberikan keindahan alam, menjadikan masyarakatnya tidak bisa lepas dari alam sekitar. Mayoritas masyarakat memanfaatkan alam sumber mata pencaharian seperti petani dan peternak. Masyarakat percaya bahwa dengan menjaga lingkungan, sebagai wujud ucapan syukur atas keselarasan antara warga dan lingkungan untuk hidup berdampingan, terutama dengan kekuatan alam di lingkungan tempat tinggal mereka. Pengembangan Desa Wisata Genilangit responsive terhadap keberadaan budaya lokal dan partisipasi komunitas lokal. Pengelolaan desa wisata dikelola langsung oleh karang tarunanya, dari mulai ketenagakerjaan, pengembangan taman, penghasilan, hingga galang dana. Ini berarti bahwa Desa Wisata Genilangit merupakan desa wisata berbasis partisipatif. Tataran implementasi desa wisata perlu dipandang sebagai bagian dari perencanaan pembangunan terpadu yang dilakukan di suatu daerah. Untuk itu, pelibatan stakeholder mulai dari level komunitas, masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan organisasi non pemerintah diharapkan membangun suatu jaringan dan menjalankan suatu kemitraan yang baik sesuai peran dan keahlian masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., 2013. "The Constraints of Tourism Development for a Cultural Heritage Destination: The Case of Kampong Ayer (Water Village) in Brunei Darussalam." *Tourism Management Perspectives* 8: 106-113.
- Amanah, Siti dan Anna Fatchiya, 2018. Strengthening Rural Extension Services to Facilitate Community towards Sustainable Development Goals in Three Districts in Indonesia. Bogor: Jurnal Penyuluhan. 14(1):134-144
- Anom Surya Putra, 2015. Buku 7 *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Brooks, C. F. (2010). Toward 'hybridised' faculty development for the twenty-first century: Blending online communities of practice and face-to-face meetings in instructional and professional support programmes. *Innovations in Education and Teaching International*, 47(3), 261–270.
- Cibinskiene, A. dan G. Snieskiene., 2015. "Evaluation of City Tourism Competitiveness." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 213: 105-110.

- Daymon, Christine dan Holloway, Immy. 2008. *Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications*. Yogyakarta: Penerbit Bentang.
- Liu, C.-H. S. dan S.-F. Chou., 2016. "Tourism Strategy Development and Facilitation of Integrative Processes among Brand Equity, Marketing and Motivation." *Tourism Management* 54: 298-308.
- Moleong, Lexy, J., 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Miles, Matthew. B dan Huberman, A. Michael., 1992. *Analisis Data Kualitatif*. (Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta : Universitas Indonesia.
- Murphy, P.E., 1988, *Community Driven Tourism Planning, Tourism Management*.
- Ramadoan, s., 2013. Peran PKSM dalam Meningkatkan Fungsi Kelompok Tani dan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Bima NTB. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 10 (3): 199-210.
- Saleh, Khaerul., Sumardjo, Aida Vitalaya S Hubeis, Herien Puspitawati., 2018, Penguatan Modal Sosial Menuju Kemandirian Perempuan Pedesaan Pelaku Industri Rumahan Emping Mlinjo di Provinsi Banten. *Bogor: Jurnal Penyuluhan*. 14(1):43-51.
- Sawerah, Siti., Pudji Muljono, Prabowo Tjiptopropranoto. 2016. Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Penyuluhan*. 12 (1):89-102.
- Scheyvens, R. dan J. Momsen (2008). "Tourism in Small Island States: From Vulnerability to Strengths." *Journal of sustainable tourism* 16 (5): 491-510.
- Schipani, Steven ., 2008. *IMPACT: The Effects of Tourism on Culture and the Environment in Asia and the Pacific: Alleviating Poverty and Protecting Cultural and Natural Heritage through Community-Based* *Desa wisata in Luang Namtha, Lao PDR*. Bangkok : UNESCO.
- Sunaryo, Bambang. 2013, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sutopo, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta : Sebelas Maret University.
- Tien-Ming Cheng, Homer C. Wu, John Ta-Ming Wang & Min-Rong Wu (2017) Community Participation as a mediating factor on residents' attitudes towards sustainable tourism development and their personal environmentally responsible behaviour, *Current Issues in Tourism*, DOI: [10.1080/13683500.2017.1405383](https://doi.org/10.1080/13683500.2017.1405383).
- Wibowo, Agung., 2016. *Partisipasi yang Humanis: Sebuah Refleksi Kearifan Lokal Masyarakat Samin di Bawah Terpaan Globalisasi*. Surakarta: UNS Press.
- Yin, Robert.K. 1987. *Case Study Research : Design and Methods*. Beverly Hills. California : Sage Publication.

PEMBANGUNAN PETERNAKAN SAPI POTONG BERWAWASAN LINGKUNGAN

Artise H.S. Salendu^{1*}, Ingriet D.R. Lumenta¹, Femi H. Elly¹, Anneke K. Rintjap¹
dan Derek Polakitan²

¹Fakultas Peternakan Universitas Sam Ratulangi Manado, 95115

²BPTP Kalasey, Sulawesi Utara

*Email: artisesalendu@unsrat.ac.id atau artisesalendu@yahoo.com

ABSTRAK

Ternak sapi potong adalah salah satu ternak andalan di Provinsi Sulawesi Utara dapat dijadikan sebagai ternak unggulan untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah. Pemerintah terus berupaya meningkatkan populasi dengan cara mencanangkan program melalui introduksi ternak sapi potong. Permasalahannya pembangunan peternakan sapi potong masih diusahakan secara tradisonal dan belum berwawasan lingkungan. Pembangunan peternakan sapi potong yang berwawasan lingkungan adalah pengembangan dengan konsep *LEISA (Low External Input Sustainability Agriculture)*. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas maka perlu dilakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis potensi pembangunan peternakan sapi potong berwawasan lingkungan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan menggunakan metode survey. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive sampling*. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Pembangunan peternakan sapi potong di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak lepas dari pengembangan sektor pertanian. Tetapi pengembangan pertanian tidak harus berorientasi konvensional, karena pertanian yang konvensional menyebabkan degradasi tanaman rumput dan tanah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa populasi ternak sapi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebanyak 14.690 ekor dapat menghasilkan 176.280 kg kotoran padat dan 73.450 liter kotoran cair per hari. Limbah tanaman pangan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pakan ternak sapi. Saran, perlu introduksi teknologi pemanfaatan kotoran sapi sebagai pupuk organik dan pemanfaatan limbah tanaman pangan sebagai pakan.

Kata kunci : Peternakan, sapi potong, lingkungan

PENDAHULUAN

Permintaan terhadap produk ternak sapi potong berupa daging setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi protein hewani asal ternak yang ditunjang dengan

peningkatan pendapatan dan pendidikan masyarakat. Tetapi, fenomena ini belum ditunjang dengan peningkatan populasi dan produktivitas ternak sapi potong. Bamualim *et al* (2008) memprediksi ketergantungan terhadap impor daging secara nasional cenderung meningkat. Impor daging sapi sekitar 35% dari total kebutuhan daging sapi atau sekitar 50% lebih dari jumlah produksi daging sapi nasional yang tersedia (Bamualim *et al.* 2008). Fenomena ini ditunjukkan dari lambatnya laju pertumbuhan produksi dan produktivitas ternak sapi potong dalam memenuhi kebutuhan daging sapi. Pemotongan ternak sapi potong betina produktif yang berlebihan menyebabkan lambatnya laju pertumbuhan ternak sapi potong. Ketersediaan pakan yang tidak kontinyu juga merupakan dalam epningkatan populasi dan produktivitas ternak sapi potong.

Peternakan sapi potong berdasarkan beberapa peneliti sangat memegang peran penting dalam peningkatan pendapatan petani peternak, sumber devisa, sumber protein hewani asal ternak, sumber pupuk organik dan sebagai sumber energi terbarukan.

Ternak sapi potong adalah salah satu ternak andalan di Provinsi Sulawesi Utara dapat dijadikan sebagai ternak unggulan untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah. Pemerintah terus berupaya meningkatkan populasi dengan cara mencanangkan program melalui introduksi ternak sapi potong. Program pengembangannya dilakukan sampai ke daerah-daerah Kabupaten termasuk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Permasalahannya pembangunan peternakan sapi potong masih diusahakan secara tradisonal dan belum berwawasan lingkungan. Pembangunan peternakan sapi potong yang berwawasan lingkungan adalah pengembangan dengan konsep *LEISA (Low External Input Sustainability Agriculture)*. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas maka perlu dilakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis potensi pembangunan peternakan sapi potong berwawasan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan menggunakan metode survey. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive sampling* yaitu Kecamatan Bolangitang Timur, Sangkub dan Bintauna yang melakukan pengembangan sapi potong. Penentuan responden dilakukan dengan menggunakan metode

simple random sampling. Jumlah responden berjumlah 60 petani untuk Kecamatan Sangkub, 28 petani untuk Kecamatan Bintauna dan 41 petani untuk Kecamatan Bolangitang Timur. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan petani peternak. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi yang terkait dengan penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berkaitan dengan pembangunan peternakan sapi potong, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencanangkan berbagai program. Program pemerintah terutama dalam mendorong peningkatan populasi dan produktivitas peternakan sapi potong. Walaupun demikian, menurut Siregar (2012), produksi ternak sapi potong masih rendah sehingga belum dapat mensuplai kebutuhan penduduk Indonesia terhadap protein dan hewani asal ternak.

Pembangunan peternakan sapi potong di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak lepas dari pengembangan sektor pertanian. Tetapi pengembangan pertanian tidak harus berorientasi konvensional, karena pertanian yang konvensional menyebabkan degradasi tanaman rumput dan tanah. Pengembangan sektor pertanian saat ini dilakukan dengan memperhatikan lingkungan dan berkelanjutan. Pendekatan pertanian berwawasan lingkungan adalah pendekatan yang dimulai dengan pendekatan ekosistem. Pertanian dalam hal ini diduga telah memberikan dampak negatif yang cukup besar terhadap fungsi ekosistem (Batie, 2009). Pendekatan ekosistem pertanian menurut Salendu (2012) selanjutnya dikenal sebagai agroekosistem yang menekankan pada prinsip dasar akibat penerapan teknologi. Agroekosistem dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu : (1) persawahan; (2) lahan kering; dan (3) agroekosistem pesisir (Sumaryanto, 2008). Lahan kering terdiri dari lahan kering berbasis tanaman pangan/hortikultura dan lahan kering berbasis perkebunan.

Pembangunan peternakan sapi potong berwawasan lingkungan menunjukkan seluruh potensi sumberdaya yang dimiliki masing-masing usahatani yang terintegrasi dimanfaatkan secara optimal dengan prinsip “*zero waste*” (Salendu, 2012). Artinya dalam pola usahatani yang demikian tidak ada limbah atau hasil samping yang terbuang. Seluruh

kegiatan dalam pola usahatani ini bermuara pada peningkatan efisiensi dan nilai tambah ekonomi.

Menurut Theocharopoulos *et al.* (2012), selama dua dekade terakhir, perhatian Negara-negara industri telah fokus pada pengurangan polusi yang disebabkan oleh penggunaan pupuk dan pestisida sintesis dalam pertanian konvensional. Menurut Lakitan dan Gofar (2013), penggunaan kompos merupakan pilihan dalam mendukung peningkatan produktivitas padi gogo di lahan kering seperti Utisol dan padi sawah pada Inseptisol rawa lebak. Bolaang Mongondow Utara adalah salah satu daerah pengembangan padi ladang. Pemerintah Bolaang Mongondow Utara juga berupaya untuk mengembangkan ternak sapi potong sehingga perlu diketahui sejauhmana potensi daerahnya mendukung pengembangan tersebut. Pengembangan peternakan yang berkelanjutan dapat menunjang pertanian organik.

Populasi ternak sapi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebanyak 14.690 ekor dapat menghasilkan 176.280 kg kotoran padat dan 73.450 liter kotoran cair per hari. Hal ini apabila tidak dikelola dengan baik akan menghasilkan emisi gas rumah kaca. Menurut Ohorella (2012), Pangaribuan *et al* (2012), Rachmadhani *et al* (2014) bahwa kotoran sapi berfungsi sebagai bahan dasar pupuk kompos padat.

Pengembangan usaha peternakan sapi dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan hidup. Kotoran ternak sapi dapat mencemari lingkungan hidup dan berakibat pada menurunnya kualitas fisik lingkungan. Tetapi pencemaran ini dapat diminimalkan dengan menerapkan konsep LEISA, kotoran ternak sapi dapat disiasati sedemikian rupa agar tidak mencemari lingkungan. Pendayagunaan lahan yang kurang tepat menurut Hasnudi dan Saleh (2004) dapat menyebabkan lahan tersebut menjadi rusak (kritis) dan kehilangan fungsinya. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan lahan tidur yang selama ini tidak dimanfaatkan oleh petani. Menurut Nababan (2012) bahwa perubahan fungsi lahan dan iklim membatasi ketersediaan hijauan yang merupakan pakan pokok ternak ruminansia. Lebih lanjut menurut Nababan (2012) bahwa optimasi pemanfaatan limbah pertanian dan agroindustri dapat memperbaiki ketersediaan pakan. Integrasi ternak dengan usahatani tanaman pangan merupakan alternatif untuk pengembangan peternakan yang berkelanjutan.

Permasalahan yang terjadi setelah dilakukan pengembangan usaha ternak sapi potong adalah penambahan lahan untuk penanaman hijauan makanan ternak. Penambahan lahan bagi kegiatan peternakan memunculkan tantangan pelestarian lingkungan hidup (Budiyanto, 2010). Limbah tanaman pertanian yang potensial digunakan sebagai pakan diidentifikasi berdasarkan sisa panen komoditi pertanian. Limbah pertanian dalam hal ini merupakan hasil ikutan dari pertanian yang telah dipanen. Pakan asal limbah pertanian terdiri dari limbah padi sawah, jagung, padi ladang, kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar. Penelitian ini telah dilakukan untuk menganalisis kandungan nutrisi limbah tanaman pangan tersebut. Salah satu limbah yang sering digunakan sebagai pakan oleh peternak sapi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah limbah jagung. Hasil analisis proksimat jerami jagung dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisis Proksimat Jerami Jagung di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Kecamatan dan Jerami Jagung*)	BK	PK	Lemak	SK	Kadar Abu	Karbohidrat
1. Bintauna	79,30	5,33	5,37	38,38	8,64	62,96
2. Sangkub	87,88	3,11	2,00	29,07	9,82	72,95
3. Bolangitan Timur	52,65	2,21	1,88	14,95	6,14	42,42

Keterangan : *) Analisis Balai Riset dan Standardisasi Industri, Manado (2017)

BK = Bahan Kering

PK = Protein Kasar

SK = Serat Kasar

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 1 menunjukkan bahwa limbah jagung memiliki potensi sebagai penunjang ketersediaan pakan ternak sapi potong. Tetapi, potensi wilayah tersebut tergantung pada beberapa faktor di antaranya faktor luas area, umur panen, kesuburan tanah dan produksi tanaman padi. Produksi tanaman jagung yang semakin tinggi berdampak terhadap tingginya produksi kering. Wulandari (2014) menyatakan bahwa tanaman jagung dapat ditanam di lahan sub optimal dengan berbagai macam penanganan. Pemanfaatan limbah dapat dilakukan dalam memenuhi kebutuhan ternak sapi potong di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang memiliki potensi dilihat

dari pengembangan tanaman pangan. Hal ini dapat dilakukan mengingat beberapa kajian yang telah dilakukan Salendu *et al* (2012) dan Susanti *et al* (2013), bahwa hijauan merupakan masalah bagi petani di berbagai daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa populasi ternak sapi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebanyak 14.690 ekor dapat menghasilkan 176.280 kg kotoran padat dan 73.450 liter kotoran cair per hari. Limbah tanaman pangan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pakan ternak sapi. Saran, perlu introduksi teknologi pemanfaatan kotoran sapi sebagai pupuk organik dan pemanfaatan limbah tanaman pangan sebagai pakan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada Kemenristekdikti yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh penelitian melalui skim Strategis Nasional tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Batie, S.S. 2009. Green Payments And The Us Farm Bill: Information And Policy Challenges. J. *Frontiers in Ecology and the Environment*. Volume 7, Issue 7 (September 2009). p : 380-388.
- Bamualim, A.M., A. Thalib., Y.N. Anggraeni dan Mariyono. 2008. Teknologi Peternakan Sapi Potong Berwawasan Lingkungan. *Wartazoa* Vol 18 No. 3 p: 149-156.
- Budiyanto, F. 2010. Mengembangkan Peternakan Terintegrasi Dengan Konsep LEISA. Kementerian Lingkungan Hidup.
http://www.mediaindonesia.com/webtorial/klh/?ar_id
- Hasnudi dan E. Saleh. 2004. Rencana Pemanfaatan Lahan Kering untuk Pengembangan Usaha Peternakan Ruminansia dan Usaha Tani Terpadu di Indonesia. Digitized by USU Digital Library. <http://www.library.usu.ac.id/download/fp/ternak-eniza4.pdf>.
- Lakitan, B dan N. Gofar. 2013. Kebijakan Inovasi Teknologi untuk Pengelolaan Lahan Suboptimal Berkelanjutan. Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal “Intensifikasi Pengelolaan Lahan Suboptimal dalam Rangka Mendukung Kemandirian Pangan Nasional”. Palembang 20-21 September 2013. p.5-14.

- Nababan, W.S. 2012. Analisa Potensi Limbah Tanaman Pangan sebagai Pakan Ternak Sapi di Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai. Skripsi. Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Ohorella, Z. 2012. Pengaruh Dosis Pupuk Organik Cair (POC) Kotoran Sapi Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Sawi Hijau (*Brassica sinensis L.*). Jurnal agroferentri. Vol. VII. No. 1 Maret 2012. p:43-49.
- Pangaribuan, D.H., M. Yasir dan N.K. Utami.2012. Dampak Bokashi Kotoran Ternak Dalam Pengurangan Pemakaian Pupuk Anorganik pada Budidaya Tanaman tomat. J. agron. Indonesia 40 (3). p: 204-210.
- Rachmadhani, N.W., Koesriharti dan M. Santoso. 2014. Pengaruh Pupuk Organik dan Pupuk Anorganik Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Buncis Tegak (*Phaseolus vulgaris L.*). Jurnal Produksi Tanaman. Vol. 2 No. 6 sept 2014. p:443-452.
- Salendu, A.H.S. 2012. Perspektif Pengelolaan Agroekosistem Kelapa-Ternak Sapi di Minahasa Selatan. Disertasi Doktor. Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Malang.
- Salendu, A.H.S., Maryunani., Soemarsono and B. Polii. 2012. Integration of Cattle-Coconut in South Minahasa Regency. Proceeding : The 2nd International Seminar on Animal Industry 2012 (ISAI) Faculty of Animal Science Bogor Agricultural University.
- Siregar, G. 2012. Analisis Kelayakan dan Strategi Pengembangan Usaha Ternak Sapi Potong. Jurnal Agrim, Vol 17 No 3.p:192-201.
- Sumaryanto. 2008. Kinerja Lahan dan Tenaga Kerja Dalam Mendukung Ketahanan dan Swasembada Pangan. Makalah dipresentasikan dalam Seminar Nasional “Kebijakan dan Peta Perjalanan Pembangunan Pertaniandalam Rangka Ketahanan dan Swasembada Pangan” yang diselenggarakan oleh kerjasama BAPPENAS-CARE, IPB pada 17 November 2008 di Bogor.
- Susanti, A.E., A. Prabowo dan J. Karman. 2013. Identifikasi dan Pemecahan Masalah Penyediaan Pakan Sapi Dalam Mendukung Usaha Peternakan Rakyat di Sumatera Selatan. Prosiding. Seminar Nasional Peternakan Berkelanjutan. Inovasi Agribisnis Peternakan Untuk Ketahanan Pangan. Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, Bandung. p:127-132.
- Theocharopoulos, A., S. Angelopoulos., P. Papanagiotou., K. Melfore and E. Papanagiotou. 2012. Sustainable Farming System vs Conventional Agriculture : A Socioeconomic Approach. Sustainable Development- Education, Business and Management- Architecture and Building Construction-Agriculture and food Security. www.intechopen.com. p:249-272.
- Wulandari, W.A. 2014. Integrasi Sapi dengan Jagung pada Lahn Sub Optimal di Provinsi Bengkulu. Laporan. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Bengkulu.

AKSESIBILITAS RUMAH TANGGA MISKIN TERHADAP PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI KAMPUNG KELUARGA BERENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT

Rahmat Syahni^{1*} dan Rusda Khairati¹

¹Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas, Padang

*Email: rsyahni@yahoo.com

ABSTRAK

Kemiskinan adalah suatu kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal yang layak bagi kehidupannya. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan warga negara. Dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan, pemerintah wajib memberikan prioritas utama pelayanan dasar kepada masyarakat miskin. Diantara pelayanan dasar adalah pelayan pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aksesibilitas rumah tangga miskin terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan pada Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) Provinsi Sumatera Barat. Penelitian dilakukan di 17 kampung KB pada 5 kabupaten kota di Sumatera Barat. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala keluarga di Kampung KB dari bulan Juli sampai September 2018. Variabel yang digunakan adalah pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Data dianalisis dengan analisis statistik deskriptif menggunakan tabulasi silang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas rumah tangga miskin di kampung KB terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan masih sangat rendah.

Kata kunci: aksesibilitas, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, rumah tangga miskin, kampung KB

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah suatu kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal yang layak bagi kehidupannya (BPS, 2008). Bank Dunia (2002) mengemukakan bahwa kemiskinan adalah suatu ketidakcukupan atau kekurangan akan aset-aset penting dan peluang-peluang dimana setiap manusia berhak memperolehnya. Masalah kemiskinan merupakan masalah utama negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Pada saat ini angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi. Pada bulan September 2017

tercatat jumlah penduduk miskin mencapai 26,58 juta orang atau 10,12 persen dari jumlah penduduk Indonesia (BPS, 2018). Demikian pula di Sumatera Barat, angka kemiskinan masih relatif tinggi. Pada bulan September 2017 tercatat Penduduk miskin sebanyak 359.990 orang atau 6,75% penduduk Sumatera Barat (BPS Sumatera Barat, 2018).

Telah banyak upaya yang ditempuh untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Upaya-upaya tersebut relatif telah berhasil menurunkan persentase penduduk miskin baik di pedesaan maupun di perkotaan. Berdasarkan data perkembangan penduduk 10 tahun terakhir, terlihat bahwa upaya-upaya pengentasan kemiskinan telah membuahkan hasil. Persentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2007 sebesar 16,58% telah turun menjadi 10,12% tahun 2017.

Demikian pula di Sumatera Barat, program penanggulangan kemiskinan telah dapat menurunkan persentase penduduk miskin dari 11,90% tahun 2007 menjadi 6,75% tahun 2017. Walaupun demikian angka tersebut masih menyisakan jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi. Apalagi bila dilihat dalam 5 tahun terakhir tingkat kemiskinan di Sumatera Barat relatif stagnan, malahan pada tahun 2016 angka kemiskinan di Sumatera Barat naik dari 6,71% tahun 2015 menjadi 7,14% tahun 2016, atau dengan kata lain masih tersisa penduduk miskin sebanyak 351.510 jiwa.

Dalam rangka pengendalian penduduk dan sekaligus pengentasan kemiskinan pemerintah telah mencanangkan sebuah langkah inovatif dengan memusatkan perhatian pada lokus pembangunan yang disebut Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB). Kampung KB adalah suatu wilayah setingkat desa atau jorong yang dipilih dengan kriteria tertentu untuk dijadikan titik sasaran program pengendalian penduduk dan sekaligus peningkatan kesejahteraan Penduduk (BKKBN, 2015). Diantara kriteria pembentukan kampung KB adalah tingkat kemiskinan yang tinggi. Dengan kondisi yang serba kekurangan di kampung KB, berbagai program pembangunan lintas sektor difokuskan untuk mengubah keadaan dari kondisi semula menjadi kondisi yang lebih baik. Keberhasilan pembangunan di kampung KB, akan menjadi keberhasilan program pembangunan di tingkat desa, kecamatan, dan tingkat kabupaten. Melalui Kampung KB, diharapkan muncul keluarga-keluarga yang berkualitas yang menghasilkan generasi cemerlang yang berguna bagi masa depan bangsa (YCCP, 2017).

Pemerintah telah mencanangkan sebanyak 208 kampung KB pada 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Namun sampai saat ini belum ada informasi dasar mengenai kondisi masyarakat di kampung KB, termasuk aksesibilitas rumah tangga miskin terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, pertanyaan yang perlu dijawab adalah bagaimana aksesibilitas rumah tangga miskin terhadap pelayan dasar di kampung KB. Untuk menjawab pertanyaan tersebut telah dilakukan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang memuat kondisi awal dari penduduk miskin di kampung KB yang berhubungan dengan aksesibilitas keluarga miskin terhadap pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan.

METODA PENELITIAN

Permasalahan kemiskinan dapat didekati melalui empat karakteristik (Haughton dan Khandker, 2010), yaitu: karakteristik wilayah, karakteristik masyarakat, karakteristik rumah tangga dan karakteristik individu. Penelitian ini menekankan pada karakteristik masyarakat dari sisi aksesibilitas terhadap pelayanan dasar yang diterima masyarakat, khususnya rumah tangga miskin. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan warga negara (Kementrian Hukum dan Ham, 2018). Diantara pelayanan dasar yang utama adalah pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan (Kementrian Dalam Negeri, 2018). Aksesibilitas terhadap pelayanan dasar dapat diukur dari jumlah dan jarak fasilitas pelayanan yang tersedia terhadap tempat tinggal penduduk.

Aspek yang dikaji dalam penelitian ini adalah pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Untuk pelayanan pendidikan digunakan variabel jumlah fasilitas pendidikan yang tersedia dan jarak rumah tangga miskin terhadap fasilitas pendidikan. Sedangkan pelayanan kesehatan adalah jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia dan jarak rumah tangga miskin terhadap fasilitas kesehatan.

Data dikumpulkan melalui survei dengan instrument berupa daftar pertanyaan yang dilaksanakan dengan wawancara dengan keluarga miskin di Kampung KB. Pengumpulan data dilakukan dari bulan Juli sampai September 2018. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui publikasi resmi instansi terkait, baik ditingkat provinsi maupun di

tingkat kabupaten/kota. Untuk pengambilan data primer berupa data keluarga miskin di kampung KB dilakukan pada kampung KB yang telah terbentuk.

Pengambilan sampel keluarga miskin di Kampung KB dilakukan dengan Teknik Sampling Acak Bertahap (*Multistage Random Sampling*). Tahap pertama memilih kabupaten kota, tahap kedua memilih kampung KB sampel pada kabupaten/kota terpilih, dan tahap ketiga memilih keluarga miskin sampel pada kampung KB terpilih. Dengan demikian satuan penarikan sampel terkecil adalah keluarga miskin.

Dari 12 kabupaten dan 7 kota di Sumatera Barat, terpilih 3 kabupaten dan 2 kota berdasarkan jumlah dan wilayah penduduk miskin. Kabupaten dan kota dipilih secara purposif, dengan kriteria kabupaten/kota yang dapat mewakili wilayah daratan dan pesisir. Kabupaten yang mewakili daratan adalah Kabupaten Agam dan Kabupaten Solok, sedangkan kabupaten yang mewakili pesisir adalah Kabupaten Pesisir Selatan. Kota daratan adalah Payakumbuh, dan Kota yang mewakili pesisir adalah Padang.

Pada setiap kabupaten/kota terpilih, dipilih kampung KB sampel sekitar 20% dari jumlah kampung KB di kabupaten/kota tersebut. Pemilihan kampung KB dilakukan secara acak. Pemilihan keluarga pada setiap kampung KB sampel ditetapkan secara kuota sebanyak 10 keluarga miskin yang dapat ditemui secara aksidental, sehingga total sampel rumah tangga miskin sebanyak 175 rumah tangga, yang dirinci menurut kabutaen kota adalah: Kabupaten Agam 65 orang, Kabupaten Solok 30 orang, Kabuoaten Pesisir Selatan 30 orang, Kota Padang 30 orang, dan Kota Payakumbuh 20 orang.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan tabel sebaran frekuensi dalam tabulasi silang (cross tabulation) yang dilengkapi dengan nilai presentasi untuk setiap angka yang terdapat dalam sel tabel. Frekuensi dan frekuensi relatif yang muncul pada tabel dibandingkan antara satu kategori dengan kategori lainnya sehingga diperoleh gambaran menyeluruh dari aksesibilitas rumah tangga miskin terhadap pelayan pendidikan dan kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identitas Responden

Secara keseluruhan sampel rumah tangga miskin dari kelima kabupaten/kota adalah sebanyak 175 orang. Berdasarkan jenis kelamin terdapat sebanyak 120 (68,6%) orang laki-laki dan 55 (31,4%) orang perempuan. Berdasarkan umur, responden sangat bervariasi mulai dari umur 25 sampai 72 tahun. Responden terbanyak berada pada kisaran umur antara 30 sampai 59 tahun sebanyak 154 orang (87,9%), sedangkan responden pada umur di bawah 30 tahun hanya 5 orang (2,9%) dan umur 60 tahun ke atas sebanyak 16 orang (9,1%). Pada masing-masing kabupaten kota, jumlah responden juga terkonsentrasi pada kisaran umur antar 30 sampai 59 orang, sebanyak 56 orang (86,2%) di kabupaten Agam, 27 orang (90,0%) di kabupaten Pesisir Selatan, 27 orang (90,0%) di kabupaten Solok, 26 orang (86,7%) di kota Padang, dan 18 orang (90%) di kota Payakumbuh. Dari data tersebut, diketahui responden yang diwawancarai berada dalam rentang usia produktif (Tabel 1).

Berdasarkan jenis pekerjaan, responden dapat dikategorikan ke dalam jenis pekerjaan utama sebagai petani, nelayan, dagang, tukang, pegawai atau karyawan, buruh, wirausaha, guru, sopir, pensiunan, dan rumah tangga. Sebagian besar responden yang diwawancara berprofesi sebagai petani (48,6%), sebagai buruh (12,5%), dan berdagang (8,6%).

Tabel 1. Identitas Responden Berdasarkan Umur

Kategori Umur	Kota /Kabupaten					Total
	Agam	Pessel	Solok	Padang	Payakumbuh	
20-29 Tahun	3.1%	0.0%	6.7%	3.3%	0.0%	2.9%
30-39 Tahun	24.6%	40.0%	40.0%	30.0%	30.0%	31.4%
40-49 Tahun	43.1%	33.3%	40.0%	36.7%	40.0%	39.4%
50-59 Tahun	18.5%	16.7%	10.0%	20.0%	20.0%	17.1%
60 tahun atau lebih	10.7%	10.0%	3.3%	10.0%	10.0%	9.1%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

2. Akses Terhadap Pelayanan Pendidikan

Akses terhadap fasilitas pendidikan bagi rumah tangga miskin di kampung KB dapat dilihat dari jumlah rumah tangga yang didaerahnya tersedia lembaga pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA yang dapat diakses. Terdapat sekitar 76,6% rumah tangga yang dapat mengakses 1 PAUD, jumlah rumah tangga yang dapat mengakses 2 PAUD ada sekitar 5,7%, dan mengakses 3 PAUD skitar 5,7%. Secara umum sudah tersedia minimal 1 PAUD pada kelima kabupate/kota, kecuali kabupaten Agam sekitar 16,% rumah tangga tidak dapat mengakses PAUD dan di Solok 33,3% (Tabel 2).

Demikian pula untuk fasilitas pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), terdapat sekitar 42,9% rumah tangga yang dapat mengakses 1 TK dan 22,9% dapat mengakses 2 TK di lingkungan kampung KB tersebut. Namun demikian masih ada sekitar 34,3% rumah tangga yang belum dapat mengakses sekolah TK. Hal ini terdapat di kabupten Agam, kabupaten Pesisir Selatan, kabupaten Solok, dan kota Padang.

Tabel 2. Rumah Tangga yang Dapat Mengakses Fasilitas Pendidikan

Jumlah Sekolah	Fasilitas Pendidikan				
	PAUD	TK	SD	SMP	SMA
Tidak ada	12.0%	34.3%	5.7%	45.7%	68.6%
1 buah	76.6%	42.9%	64.6%	28.6%	25.7%
2 buah	5.7%	22.9%	18.9%	19.4%	4.0%
3 atau lebih	5.7%	0.0%	10.9%	6.3%	1.7%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Untuk pendidikan Sekolah Dasar (SD) terdapat 64,6% rumah tangga yang dapat mengakses sekolah SD, 18,9% 2 SD, dan 6,3% 3 SD atau lebih. Hanya sekitar 5,7% yang tidak dapat mengakses sekolah SD. Untuk sekolah SMP terdapat 28,6% yang dapat mengakses 1 SMP, 19,4% 2 SMP, dan 6,3% 3 atau lebih SMP. Namun terdapat sekitar 45,7% yang tidak dapat mengakses sekolah SMP. Demikian pula untuk SMA, terdapat sekitar 25,7% rumah tangga yang dapat mengakses 1 SMA dan 68,6% rumah tangga miskin yang tidak dapat mengakses SMA di lingkungan kampung KB.

Dari rumah tangga yang dapat mengakses fasilitas pendidikan terdapat sekitar 26,9% rumah tangga yang dapat mengakses Pendidikan Usia Dini (PAUD) dengan jarak kurang dari 0,5 km dan 18,3% yang dapat mengakses dengan jarak lebih dari 2 km. Sedangkan untk sekolah SD hanya 17,7% yang dapat mengakses SD dengan jarak dibawah 0,5 km dan masih terdapat 34,9% yang tidak dapat mengakses SD atau dengan jarak lebih dari 2 km (Tabel 3).

Tabel 3. Jarak Rumah Tangga ke Fasilitas Pendidikan Terdekat

Jarak	Tingkat Pendidikan				
	PAUD	TK	SD	SMP	SMA
Kurang dari 0.5 km	26.9%	17.7%	28.6%	4.6%	2.9%
0.5 - < 1.0 km	30.9%	28.0%	27.4%	10.9%	5.7%
1.0 < 2.0 km	24.0%	19.4%	29.1%	22.9%	18.9%
Lebih dari 2.0 km	18.3%	34.9%	14.9%	51.7%	72.6%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Untuk pelayanan pendidikan SMP, hanya 4,6% yang berjarak dibawah 0,5 km sedangkan lebih dari 2 km cukup nbanyak yaitu 51,7%. Untuk fasilitas pelayanan pendidikan SMA hanya 2,9% yang berjarak dekat dengan SMA, sedangkan 72,6% berjarak lebih dari lebih dari 2 km.

3. Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan

Akses terhadap fasilitas kesehatan bagi rumah tangga miskin di kampung KB dapat dilihat dari jumlah rumah tangga yang didaerahnya tersedia lembaga kesehatan mulai dari Posyandu, Pustu, Puskesmas, klinik, dan bidan. Terdapat sekitar 58,3% rumah tangga yang dapat mengakses 1 Posyandu, 19,4% 2 posyandu, dan 21,7% 3 atau lebih posyandu. Hanya 0,6% saja rumah tangga miskin yang tidak memiliki akses ke posyandu. Sedangkan untuk Pustu terdapat 65,1% rumah tangga yang dapat akses ke 1 Pustu. Terdapat 42,3% rumah

tangga miskin yang dapat mengakses 1 Puskesmas, namun terdapat 57,7% tidak memiliki akses puskesmas di kampung KB (Tabel 4).

Tabel 4. Rumah Tangga yang Dapat Mengakses Fasilitas Kesehatan

Jumlah Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Kesehatan				
	Posyandu	Pustu	Puskesmas	Bidan	Klinik
Tidak ada	0.6%	29.1%	57.7%	38.9%	93.7%
1 buah	58.3%	65.1%	42.3%	45.1%	1.7%
2 buah	19.4%	5.7%	0,0%	16.0%	4.6%
3 buah atau lebih	21.7%	0.0%	0,0%	0.0%	0.0%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Secara umum rumah tangga miskin di kampung KB tidak mempunyai akses ke klinik terdekat. Akan halnya praktek bidan, terdapat 45,1% rumah tangga yang dapat mengakses 1 praktek bidan dan 16,0% mengakses 2 praktek bidan di kampung KB. Selebihnya sekitar 38,9% tidak mempunyai akses ke praktek bidan karena tidak terdapatnya praktek bidan di kampung KB dan sekitarnya. Sementara untuk klinik, hanya 6,3% saja rumah tangga yang memiliki akses ke klinik, dan selebihnya sekitar 93,7% tidak mempunyai akses ke klinik.

Dari rumah tangga yang dapat mengakses fasilitas kesehatan terdapat sekitar 41,7% rumah tangga yang dapat mengakses posyandu dengan jarak kurang dari 0,5 km dan 6,3% yang dapat mengakses dengan jarak lebih dari 2 km (Tabel 5).

Tabel 5. Jarak Rumah Tangga ke Fasilitas Kesehatan Terdekat

Jarak	Pelayanan Kesehatan				
	Posyandu	Pustu	Puskesmas	Bidan	Klinik
Kurang dari 0.5 km	41.7%	21.7%	4.0%	18.3%	3.4%
0.5 - < 1.0 km	33.1%	22.3%	6.3%	19.4%	2.3%
1.0 - <2.0 km	18.9%	20.0%	21.1%	9.7%	0.0%
Lebih dari 2.0 km	6.3%	36.0%	68.6%	52.5%	94.3%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Sedangkan untuk puskesmas pembantu (pustu) sekitar 21,7% rumah tangga yang dapat mengakses pustu dengan jarak kurang dari 0,5 km, dan sekitar 36,0% yang mengakses dengan jarak diatas 2.0 km. Untuk akses terhadap pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) hanya 4,0% yang dapat mengakses puskesmas dengan jarak kurang dari 0,5 km dan lebih dari 68,6% dapat mengakses puskesmas dengan jarak lebih dari 2,0 km.

Dari rumah tangga miskin yang dapat akses terhadap praktek bidan, hanya 18,3% rumah tangga yang dapat mengkses bidan dengan jarak kurang dari 0,5 km dan sekitar 52,5% rumah tangga yang mengakses lebih dari 2,0 km. Klinik juga merupakan fasilitas kesehatan yang sulit diakses karena lokasinya yang jauh. Hanya sekitar 3,4% rumah tangga yang dapat mengakses klinik dengan jarak kurang dari 0,5 km, yang hanya terdapat di perkotaan, sedangkan 94,3% rumah tangga yang dapat mengakses dengan jarak lebih dari 2,0 km atau tidak dapat mengakses klinik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa aksesibilitas rumah tangga miskin di kampung KB di Sumatera Barat terhadap pelayanan pendidikan dasar dan menengah masih sangat rendah. Persen rumah tangga miskin di kampung KB yang tidak dapat mengakses fasilitas pendidikan adalah terhadap PAUD 12,0%, TK 34,3%, SD 5,7%, SMP 45,7%, dan terhadap SMA 68,6%. Persen rumah tangga miskin di kampung KB yang tidak memiliki akses atau berjarak lebih dari 2 km ke fasilitas pendidikan adalah terhadap PAUD 18,3%, TK 34,9%, SD 14,9%, SMP 51,7%, dan terhadap SMA 72,6%.

Demikian pula aksesibilitas rumah tangga miskin di kampung KB di Sumatera Barat terhadap pelayanan kesehatan masih sangat rendah. Persen rumah tangga miskin di kampung KB tidak memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan adalah terhadap Posyandu 0,6%, Pustu 29,1%, Puskesmas 57,7%, Bidan 38,9% dan terhadap Klinik 93,7%. Persen rumah tangga miskin di kampung KB tidak memiliki akses atau berjarak lebih 2 km terhadap ke kesehatan adalah terhadap Posyandu 6,3%, Pustu 36,0%, Puskesmas 68,6%, Bidan 52,5% dan Klinik 94,3%.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2015. Juknis Kampung Keluarga Berencana. BKKBN, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2008. Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2008. BPS, Jakarta,
- Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Indonesia 2018. BPS Sumbar, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. 2018. Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2017. BPS Sumbar, Padang.
- Bank Dunia. 2002. Dasar-dasar Analisis Kemiskinan. Edisi Terjemahan. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Departemen Sosial. 2005. Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan 2006-2010. Direktorat Bantuan dan Jaminan Sosial Republik Indonesia, Jakarta.
- Haugthon, J. and Khandker, S.R. 2009. Handbook on Poverty and Inequality. World Bank, Washington.
- Kementrian Hukum dan Ham. 2018. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Jakarta.
- Kementrian Dalam Negeri. 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018, tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Jakarta.
- Yayasan Cipta Cara Padu. 2017. Kampung Keluarga Berencana, Upaya Nyata Membangun Bangsa. YCCP, Jakarta.

KHARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA MISKIN DI KAMPUNG KELUARGA BERENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT

Rusda Khairati^{1*} dan Rahmat Syahni¹

¹ Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas

*Email: ruskhairati@yahoo.co id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik rumah tangga miskin di Kampung Keluarga Berencana (kampung KB) Provinsi Sumatera Barat. Penelitian dilakukan di 5 (lima) kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan dengan metoda survei melalui wawancara dengan kepala keluarga di Kampung KB dari bulan Juli sampai dengan September 2018. Variabel yang digunakan adalah: umur kepala keluarga, pendidikan kepala keluarga, pekerjaan utama, keterampilan, pemilikan aset, status pemilikan lahan, lama bekerja, pendapatan per kapita, keikutsertaan dalam program KB, jumlah anggota keluarga, dan jumlah anak. Metoda analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga miskin di Kampung KB memiliki anak lebih dari 2 orang (62,8%), anggota keluarga lebih dari 4 orang (56,6%), hanya sebagian (49,1%) yang ikut KB, dan pendapatan/kapita dibawah Rp. 400 ribu/bulan (85,7%). Kepala rumah tangga umumnya berumur antara 30-50 tahun (70,3%), berpendidikan SD (54,8%), pekerjaan bertani (57,1%), tidak memiliki lahan sendiri (57,0%), tidak memiliki aset (65,1%), tidak memiliki keterampilan khusus (84,6%), dan bekerja selama 5-8 jam sehari (83,4%).

Kata kunci : karakteristik sosial ekonomi, rumah tangga miskin, kampung KB

PENDAHULUAN

Pada saat ini angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi, dimana pada tahun 2017 tercatat jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,58 juta (BPS, 2018), diantaranya terdapat 364 ribu merupakan penduduk miskin di Sumatera Barat (BPS Sumatera Barat, 2018). Program-program penanggulangan kemiskinan yang sudah dilakukan pada era orde reformasi, setelah terjadinya krisis moneter diantaranya adalah : program jaringan pengaman sosial, bantuan beras untuk orang miskin, bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin, program-program pemberdayaan masyarakat seperti

program PNPM dan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan data perkembangan penduduk 10 tahun terakhir, terlihat bahwa usaha-usaha pengentasan kemiskinan telah memberikan hasil. Persentase penduduk miskin di Inodnesia pada tahun 2007 sebesar 16.58% telah menurun menjadi 10.12% pada tahun 2017 (Gambar 1). Demikian pula di Sumatera Barat, program penanggulangan kemiskinan telah dapat menurunkan persentase penduduk miskin dari 11.90% tahun 2007 menjadi 6.75% tahun 2017.

Dibandingkan dengan persentase kemiskinan pada tingkat nasional di Indonesia, angka kemiskinan di Sumatera Barat jauh lebih rendah. Walaupun demikian angka tersebut masih menyisakan jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi. Apalagi bila dilihat dalam 5 tahun terakhir tingkat kemiskikan relatif stagnan. Walaupun ada penurunan namun tidak terlalu signifikan, bahkan pada tahun 2016 angka kemiskinan di Sumatera Barat naik dari 6.71% tahun 2015 menjadi 7.14% tahun 2016, sehingga masih tersisa sebanyak 351.510 jiwa penduduk miskin.

Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Barat dan di Indonesia Tahun 2007-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018.

Berdasarkan angka-angka di atas masih diperlukan program penanggulangan kemiskinan dengan terobosan baru yang menggunakan pendekatan integratif dan komprehensif sehingga dapat menekan angka kemiskinan secara lebih signifikan.

Penduduk miskin, yaitu penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, mencapai 26,58 juta orang atau 10,12 persen dari jumlah penduduk Indonesia (BPS, 2018). Jumlah penduduk miskin Sumatera Barat, relatif lebih rendah dari tingkat nasional, namun masih relatif tinggi dimana pada September 2017 mencapai 359.990 orang atau 6,75 persen dari seluruh penduduk Sumatera Barat (BPS Sumatera Barat, 2018).

Salah satu program yang telah dicanangkan oleh Presiden dalam rangka pengendalian penduduk dan sekaligus pengentasan kemiskinan adalah pembangunan Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB). Kampung KB adalah suatu wilayah setingkat desa atau jorong yang dipilih dengan kriteria tertentu untuk dijadikan titik sasaran dalam melaksanakan program pengendalian penduduk dan peningkatan kesejahteraan Penduduk (BKKBN, 2015). Salah satu kriteria pemilihan kampung KB adalah tingkat kemiskinan yang tinggi. Dengan kondisi kampung KB yang serba kekurangan tersebut, berbagai program pembangunan lintas sektor dilaksanakan untuk mengubah keadaan menjadi kondisi yang lebih baik. Diharapkan keberhasilan pembangunan di kampung KB, akan berakumulasi menjadi keberhasilan pembangunan di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten secara berjenjang. Di Sumatera Barat saat ini telah dicanangkan sebanyak 208 kampung KB pada 19 kabupaten/kota yang ada, namun ada informasi awal mengenai kondisi sosial ekonomi rumah tangga miskin di kampung KB.

Sehubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, dapat dikemukakan pertanyaan penelitian yang perlu dijawab adalah bagaimana karakteristik sosial ekonomi rumah tangga miskin di kampung KB Provinsi Sumatera Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik sosial ekonomi kemiskinan rumah tangga di kampung KB Provinsi Sumatera Barat.

Menurut Badan Pusat Statistik (2008) kemiskinan merupakan kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal yang layak bagi kehidupan seseorang. Definisi kemiskinan ini mengalami perkembangan sesuai dengan penyebabnya yaitu, pada awal 1990-an definisi kemiskinan telah diperluas tidak hanya berdasarkan tingkat pendapatan, tapi juga mencakup ketidakmampuan di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, dan sebagainya.

Akhir-akhir ini pengertian kemiskinan telah mencakup dimensi kerentanan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi. Oleh karena itu definisi orang miskin tidak cukup hanya dilihat dari sudut pemenuhan konsumsi saja karena: (1) pengertian ini sering tidak berhubungan dengan definisi kemiskinan yang dimaksud oleh orang miskin itu sendiri, dan tidak cukup untuk memahami realitas kemiskinan; (2) pengertian tersebut dapat menjerumuskan kepada kesimpulan yang salah, bahwa menanggulangi kemiskinan cukup hanya dengan menyediakan bahan makanan yang memadai, dan (3) pengertian tersebut telah terbukti tidak bermanfaat bagi pengambil keputusan ketika merumuskan kebijakan lintas sektoral dan bisa kontra produktif (Smeru, 2016).

Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Indonesia pada tahun 2016 adalah sebesar Rp354.386 per kapita per bulan pada Maret 2016. Garis kemiskinan di perkotaan secara nasional Rp 364.527 per kapita per bulan dan di perdesaan secara nasional Rp 343.646 per kapita per bulan pada Maret 2016 (Badan Pusat Statistik, 2017). Dalam penghitungan setiap provinsi menggunakan garis kemiskinan masing-masing provinsi yang besarnya bervariasi sesuai dengan harga komoditas bahan pokok makanan dan bukan makanan.

Haughton dan Khandker (2009) melihat pola kemiskinan berdasarkan empat karakteristik, yaitu : 1) karakteristik wilayah; 2) karakteristik masyarakat; 3)

karakteristik rumah tangga, dan 4) karakteristik individu. Karakteristik wilayah yang mempengaruhi adalah adanya perbedaan wilayah yang terisolasi dan terpencil yang dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Karakteristik masyarakat dilihat dari akses terhadap pelayanan dan infrastruktur dasar, yang dapat diukur jumlah dan jarak infrastruktur dasar yang tersedia dan dapat dijangkau masyarakat. Sedangkan karakteristik rumah tangga yang mempengaruhi peluang rumah tangga miskin adalah: umur kepala rumah tangga, pendidikan, pekerjaan, keterampilan, pemilikan aset, lama bekerja, jumlah anak, jumlah anggota rumah tangga, dan pendapatan per kapita.

Kampung KB adalah satu kesatuan wilayah setingkat dusun/RW dengan kriteria tertentu dimana terdapat program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi. Kampung KB dicanangkan oleh Presiden Jokowi pada bulan Januari 2016, yang diharapkan akan menjadi miniatur pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di tingkat terendah. Sampai saat ini sudah terbentuk sebanyak 208 Kampung KB di Sumbar. Kampung KB bertujuan untuk membumikan secara total program KKBPK dalam kehidupan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

Kampung KB merupakan salah satu upaya penguatan program KKBPK yang dikelola oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk pelayanan program KKBPK sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas. Selain bertujuan untuk memusatkan pengendalian jumlah penduduk, kampung KB juga merupakan wadah sasaran dalam menanggulangi masalah kemiskinan dalam wilayah terkecil atau wilayah pinggiran.

METODA PENELITIAN

Variabel karakteristik sosial ekonomi rumah tangga miskin yang akan dilihat terdiri dari : Umur Kepala Rumah Tangga, Pendidikan Kepala Rumah Tangga, Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga, Keterampilan Yang Dimiliki Kepala Rumah Tangga, Pemilikan Aset Rumah Tangga, Pemilikan Lahan Rumah Tangga, Lama Bekerja Kepala Rumah Tangga, Pendapatan Per Kapita Keluarga, Jumlah anggota keluarga, Jumlah anak,

dan Keikutsertaan Program KB. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan instrumen daftar pertanyaan yang dilakukan terhadap keluarga miskin di kampung KB. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui publikasi resmi instansi terkait, baik ditingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.

Untuk pengambilan data primer berupa data keluarga miskin di kampung KB dilakukan dengan mengambil Kampung KB yang telah terbentuk di seluruh kabupaten/kota. Pengambilan sampel keluarga miskin di Kampung KB dilakukan dengan Teknik Penarikan Sampel Bertahap (*Multistage Random Sampling*). Tahap pertama adalah memilih kabupaten kota, tahap kedua memilih sampel kampung KB pada kabupaten/kota terpilih, dan tahap ketiga memilih keluarga miskin pada kampung KB terpilih. Dengan demikian satuan penarikan sampel terkecil yang digunakan adalah keluarga miskin. Dari 12 Kabupaten dan 7 Kota di Sumatera Barat, diambil 3 kabupaten dan 2 kota dari seluruh kabupaten kota berdasarkan jumlah penduduk miskin terbanyak dan wilayah daratan dan pesisir. Pemilihan kabupaten dan kota dilakukan secara purposif, dengan kriteria terdapat kabupaten kota yang mewakili daratan dan mewakili pesisir. Kabupaten yang mewakili daratan yang terpilih adalah Kabupaten Agam dan Kabupaten Solok, sedangkan kabupaten yang mewakili pesisir adalah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Sampel Kampung KB

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Populasi Kampung KB	Jumlah Sampel Kampung KB	Sampel Keluarga Miskin
1	Kabupaten Agam	32	6	65
2	Kab Solok	14	3	30
3	Kab Pesisir Selatan	16	3	30
4	Kota Padang	11	3	30
5	Kota Payakumbuh	7	2	20
	Sumatera Barat	80	17	175

Kota yang mewakili daratan adalah kota Payakumbuh, dan kota yang mewakili pesisir adalah Kota Padang. Pada setiap kabupate/kota terpilih, dipilih sampel kampung KB sekitar 20% dari jumlah kampung KB di kabupaten/kota tersebut. Pemilihan kampung

KB dilakukan secara acak. Sedangkan pemilihan keluarga pada setiap kampung KB sampel ditetapkan kuota sebanyak 10 keluarga miskin yang dapat ditemui secara aksidental. Rekapitulasi penetapan sampel keluarga miskin pada kampung KB dapat dilihat pada Tabel 1.

Untuk menjawab tujuan penelitian ini, data dianalisis dengan analisis deskriptif berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah ditabulasi dan diringkas menurut variabel yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Rumah Tangga

Kepala rumah tangga miskin pada kampung KB umumnya berada pada usia dewasa dan produktif, yaitu antara 30 sampai 59 tahun. Sebanyak 30,9% berada pada rentang usia 30-39 tahun, 39,4% berada pada rentang usia 40-49, dan 20,0% pada rentang usia 50-59 tahun. Hanya sedikit (1,7%) yang berada dibawah 30 tahun dan 6,3% pada usia 60 tahun keatas. Hal yang sama juga dijumpai pada masing-masing kabupaten/kota dimana usia kapala rumah tangga berada pada usia dewasa atau usia produktif. (Tabel 2.).

Tabel 2. Umur Kepala Rumah Tangga Miskin di Kampung KB

Umur kepala Keluarga	Kota /Kabupaten					Total
	Agam	Pessel	Solok	Padang	Payakumbuh	
20-29	3.1%	0.0%	3.3%	0.0%	0.0%	1.7%
30-39	24.6%	36.7%	40.0%	33.3%	25.0%	30.9%
40-49	43.1%	33.3%	36.7%	36.7%	45.0%	39.4%
50-59	18.5%	23.3%	16.7%	23.3%	20.0%	20.0%
60 tahun lebih	10.7%	6.6%	3.3%	6.7%	10.0%	8.0%
Total	65	30	30	30	20	175
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Dilihat dari segi pendidikan sebahagian besar kepala rumah tangga miskin di kampung KB masih berpendidikan rendah. Dimana lebih dari separuh (54,8%) kepala rumah tangga miskin berpendidikan tamat SD dan tidak tamat SD, 22.9% berpendidikan

tamat SMP, dan hanya 22.3% tamat SMA. Dari data per kabupaten/kota angka tersebut terlihat hampir sama, dimana di kabupaten Agam kepala rumah tangga yang berpendidikan tamat SD dan tidak tamat SD mencapai 64,6%, di kabupaten Solok 76,6%, dan di kota Payakumbuh 65,0%.

Tabel 3. Pendidikan Kepala Keluarga Rumah Tangga Miskin di Kampung KB

Pendidikan Kepala Keluarga	Kota /Kabupaten					Total
	Agam	Pessel	Solok	Padang	Payakumbuh	
Tidak Tamat SD	20.0%	13.3%	46.7%	10.0%	20.0%	21.7%
Tamat SD	44.6%	20.0%	30.0%	16.7%	45.0%	33.1%
Tamat SMP	20.0%	20.0%	20.0%	36.7%	20.0%	22.9%
Tamat SMA	15.3%	46.7%	3.3%	36.7%	15.0%	22.3%
Total	65	30	30	30	20	175
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Sementara di kabupaten Pesisir Selatan angka ini agak rendah yaitu kepala keluarga rumah tangga miskin Tamat SD dan Tidak Tamat SD sebanyak 33,3% dan di kota Padang 26,7%. Namun demikian di Pesisir Selatan terdapat 46,7% kepala rumha tangga miskin yang berpendidikan SMA dan di kota Padang sebanyak 36,7% (Tabel 3).

Hasil penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian Rejekiningsih (2011) yang dilakukan di Kota Semarang, dan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Rini, A. S dan Lilik S (2016). Penelitian Rejekiningsih yang menunjukkan bahwa di kota Semarang, ciri warga miskin antara lain adalah rendahnya pendidikan kepala rumah tangga (tamat SD). Sedangkan penelitian Rini, A.S dan Lilik S menunjukkan bahwa kepala rumah tangga dengan pendidikan rendah memiliki kemungkinan miskin lebih tinggi. Hasil penelitian Nopriansyah *et all*, juga menunjukkan hasil yang sama, bahwa karakteristik rumah tangga miskin di Provinsi Jambi mayoritas dari kepala rumah tangga berpendidikan rendah (di bawah SMP).

Pekerjaan kepala keluarga rumah tangga miskin di kampung KB umumnya adalah bertani dimana lebih dari separuhnya yaitu (57,1%). Hal ini ditemui terutama di wilayah kabupaten, dimana di Kabupaten Agam sekitar 69,2% pekerjaan kepala keluarga rumah tangga miskin adalah bertani, di kabupaten Pesisir Selatan sebesar 90,0% dan di Solok

86,7%. Sementara di perkotaan, di kota Padang pekerjaan kepala keluarga umumnya adalah tukang 30%, dan dagang 20% dan di kota Payakumbuh pekerjaan kepala keluarga rumah tangga miskin umumnya juga berdagang dan bertukang (Tabel 4).

Tabel 4. Pekerjaan Utama Kepala Keluarga Rumah Tangga Miskin di Kampung KB

Pekerjaan Utama Kepala Keluarga	Kota /Kabupaten					Total
	Agam	Pessel	Solok	Padang	Payakumbuh	
Tani	69.2%	90.0%	86.7%	0.0%	10.0%	57.1%
Nelayan	7.7%	0.0%	0.0%	10.0%	0.0%	4.6%
Dagang	3.1%	3.3%	0.0%	20.0%	25.0%	8.0%
Tukang	7.7%	0.0%	0.0%	30.0%	30.0%	11.4%
Pegawai	1.5%	6.7%	0.0%	6.7%	0.0%	2.9%
Buruh	4.6%	0.0%	10.0%	20.0%	20.0%	9.1%
Lain-lain	6.2%	0.0%	3.3%	13.2%	15.0%	6.9%
Total	65	30	30	30	20	175
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Hasil penelitian ini tidak berbeda dengan hasil penelitian Nopriansyah et all (2015), dan penelitian Saputro, A.E.S (2010). Dari hasil peneitian Nopriansyah di Provinsi Jambi ditemukan bahwa mayoritas kepala rumah tangga miskin bekerja di sektor pertanian. Demikian juga penelitian Saputro, yang melakukan penelitian di 15 Provinsi di Indonesia pada tahun 2007 juga menemukan bahwa sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor pertanian.

Dari sisi keterampilan kepala rumah tangga keluarga miskin, sebahagian besar (84,6%) kepala keluarga rumah tangga miskin tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk bekerja. Secara rinci bila dilihat di masing-masing kabupaten dan kota yang diteliti terlihat kecenderungan yang sama, dimana tingginya angka kepala keluarga rumah tangga miskin yang tidak memiliki keterampilan : di kabupaten Pesisr Selatan terdapat sekitar 96,6% 96,7%, di Kabupaten Solok 96,7%, di kota Padang 79,9%, dan di kota Payakumbuh 80,0%. Terdapat beberapa jenis keterampilan yang dimiliki oleh kepala keluarga seperti keterampilan listrik, montir, menjahit, dan lain-lain, akan tetapi jumlahnya sangat sedikit sehingga pendapatan yang diterima dari pekerjaan yang tidak memerlukan

keterampilan khusus tidak memadai untuk menghidupi keluarga. Seperti di kabupaten Agam, Pesisir Selatan, dan kota Payakumbuh ada beberapa kepala keluarga miskin yang memiliki keterampilan menjadi montir yang dapat melayani perbaikan mobil atau sepeda motor, namun hanya sekitar 4,0% yang memiliki keterampilan tersebut. Demikian pula keterampilan bertukang sekitar 5%, dan keterampilan membawa kendaraan atau sopir 4,0% (Tabel 5).

Tabel 5. Keterampilan Kepala Keluarga

Keterampilan Kepala Keluarga	Kota /Kabupaten					Total
	Agam	Pessel	Solok	Padang	Payakumbuh	
Montir	7.7%	3.3%	0.0%	0.0%	5.0%	4.0%
Tukang	1.5%	0.0%	0.0%	20.0%	15.0%	5.7%
Sopir	9.2%	0.0%	3.3%	0.0%	0.0%	4.0%
Listrik	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%
Menjahit	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%
Tidak Ada	76.6%	96.6%	96.7%	79.9%	80.0%	84.6%
Total	65	30	30	30	20	175
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Dilihat dari pemilikan aset rumah tangga, diantara aset yang diharapkan dimiliki rumah tangga antara lain adalah tanah, warung, bengkel, dan kendaraan berupa motor. Dari keseluruhan rumah tangga miskin yang menjadi sampel dalam penelitian ini hanya sedikit yang memiliki aset tersebut. Sebahagian besar (65,1%) tidak memiliki aset dan sekitar 25,1% yang memiliki aset berupa tanah. Hanya beberapa persen saja yang memiliki warung (2,9%), bengkel (0,6%), dan motor (6,3%). Dapat dilihat bahwa di setiap kabupaten/kota dari sampel, sebahagian besar rumah tangga tidak memiliki aset tertentu untuk meningkatkan pendapatan mereka. Sementara itu kepemilikan aset bagi rumah tangga miskin merupakan faktor yang sangat penting dalam menopang mata pencaharian mereka. Pada umumnya di kabupaten kota aset yang dapat diandalkan adalah tanah untuk berusaha tani. Namun luasan lahan yang mereka miliki tidaklah begitu luas sehingga tidak mencukupi untuk menghidupi keluarga mereka (Tabel 6).

Tabel 6. Pemilikan Aset Rumah Tangga Miskin

Aset Dimiliki	Kota /Kabupaten					Total
	Agam	Pessel	Solok	Padang	Payakumbuh	
Tanah	24.6%	36.7%	53.3%	0.0%	5.0%	25.1%
Warung	1.5%	3.3%	0.0%	3.3%	10.0%	2.9%
Bengkel	0.0%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%
Motor	7.7%	0.0%	0.0%	10.0%	15.0%	6.3%
Tidak Ada	66.2%	56.7%	46.7%	86.7%	70.0%	65.1%
Total	65	30	30	30	20	175
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Kepala rumah tangga petani miskin yang memilliki lahan pertanian hanya sekitar 36,0%, selebihnya menyewa lahan (32,0%), dan meminjam lahan (25,0%). Terdapat sekitar 7,0% kepala rumah tangga yang tidak mempunyai lahan. Pemilikan lahan peranian ini di Kabupaten Pesisir Selatan relatif agak tinggi (40,7%), demikian juga dengan di kabupaten Solok (50,0%). Sedangkan yang menyewa lahan lebih banyak terdapat di kabupaten Agam (42,2%) dan di Pesisir Selatan (44,4%) , seperti terlihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Kepemilikan Lahan Keluarga Miskin

Kepemilikan Lahan	Kabupaten/Kota				Total
	Agam	Pessel	Solok	Payakumbuh	
Milik Sendiri	26.7%	40.7%	50.0%	0.0%	36.0%
Disewa	42.2%	44.4%	3.8%	0.0%	32.0%
Dipinjam	26.7%	7.4%	34.6%	100.0%	25.0%
Tidak Ada	4.4%	7.4%	11.5%	0.0%	7.0%
Total	45	27	26	2	100
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Dari kharakteristik lama bekerja dalam sehari pada umumnya kepala keluarga menggunakan waktu selama 5-8 jam dalam sehari (83,4%). Namun terdapat juga kepala rumah tangga yang bekerja lebih dari 8 jam dalam sehari terutama di kota Padang (46,7%) dan di kota Payakumbuh (20,0%). Sedikit sekali (2,3%) yang menggunakan waktu bekrja

di bawah 4 jam dalam sehari (Tabel 8). Walaupun mayoritas kepala rumah tangga bekerja menggunakan waktu 5-8 jam per hari, namun tidak menjamin pendapatan mereka tinggi.

Tabel 8. Lama Bekerja Kepala Keluarga Miskin Dalam Sehari

Lama Bekerja	Kota /Kabupaten					Total
	Agam	Pessel	Solok	Padang	Payakumbuh	
1-4 Jam	0.0%	0.0%	6.7%	3.3%	5.0%	2.3%
5-8 Jam	92.3%	93.3%	93.3%	50.0%	75.0%	83.4%
9-12 Jam	7.7%	6.7%	0.0%	46.7%	20.0%	14.3%
Total	65	30	30	30	20	175
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Dilihat dari sisi pendapatan per kapita keluarga miskin per bulan, terlihat bahwa pendapatan per kapita keluarga miskin dalam sebulan relatif rendah (Tabel.9). Sebagian besar rumah tangga (68,0%) berpendapatan per kapita di bawah Rp 300,00 per bulan. Hanya sekitar 17,7% berpendapatan per kapita Rp. 300 ribu , dan hanya 6,8% berpendapatan per kapita di atas Rp. 500 per bulan.

Tabel 9. Pendapatan Per kapita Keluarga Per bulan

Pendapatan Perkapita	Kota /Kabupaten					Total
	Agam	Pessel	Solok	Padang	Payakumbuh	
50-<200 Ribu	33.8%	20.0%	53.3%	13.3%	20.0%	29.7%
200-<300 Ribu	44.6%	50.0%	26.7%	30.0%	30.0%	38.3%
300-<400 Ribu	16.9%	20.0%	16.7%	13.3%	25.0%	17.7%
400-<500 Ribu	1.5%	10.0%	3.3%	20.0%	10.0%	7.4%
500-<600 Ribu	1.5%	0.0%	0.0%	6.7%	0.0%	1.7%
600-<700 Ribu	1.5%	0.0%	0.0%	16.7%	15.0%	5.1%
Total	65	30	30	30	20	175
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Dari segi keikutsertaan dalam program keluarga berencana, terlihat bahwa lebih dari separuh (50,9%) rumah tangga miskin tidak ikut program keluarga berencana. Hal ini hampir merata pada setiap kabupaten/kota yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Di

kabupaten Agam sekitar 44,6% tidak ikut KB, di kabupaten Pesisir Selatan 66,7%, di kabupaten Solok 53,3%, di kota Padang 56,7%, dan di kota Payakumbuh 35,5% (Tabel 10). Hal ini dapat dijadikan sebagai indikator bahwa ketidakikutan ber KB merupakan faktor yang membuat jumlah anggota keluarga banyak sehingga jumlah pendapatan yang diperoleh kepala keluarga tidak cukup untuk membiaya semua anggota keluarga sehingga rumah tangga ini termasuk dalam rumah tangga miskin. Rendahnya keikutsertaan ber KB bagi rumah tangga miskin ditemukan juga pada penelitian Saputro (2010), dimana secara makro di 15 Provinsi di Indonesia tahun 2007 sebagian besar penduduk miskin belum menggunakan alat KB.

Tabel 10. Keikutsertaan Rumah Tangga Miskin Dalam Program Keluarga Berencana

Keikutsertaan Ber KB	Kota /Kabupaten					Total
	Agam	Pessel	Solok	Padang	Payakumbuh	
Tidak Ikut KB	44.6%	66.7%	53.3%	56.7%	35.0%	50.9%
Ikut KB	55.4%	33.3%	46.7%	43.3%	65.0%	49.1%
Total	65	30	30	30	20	175
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

KESIMPULAN

Rumah tangga miskin di kampung keluarga berencana di Sumatera Barat umumnya memiliki anak lebih dari 2 orang (62,8%), anggota keluarga lebih dari 4 orang (56,6%), hanya sebagian (49,1%) yang ikut KB, dan pendapatan/kapita dibawah Rp. 400 ribu/bulan (85,7%). Kepala rumah tangga umumnya berumur antara 30-50 tahun (70,3%), berpendidikan SD (54,8%), pekerjaan bertani (57,1%), tidak memiliki lahan sendiri (57,0%), tidak memiliki aset (65,1%), tidak memiliki keterampilan khusus (84,6%), dan lama bekerja 5-8 jam sehari (83,4%).

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2015. Juknis Kampung Keluarga Berencana. BKKBN, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2008. Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2008. BPS, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2017. Statistik Indonesia 2017. BPS, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2018. Statistik Indonesia 2018. BPS, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 2018. Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2017. BPS Sumbar, Padang
- Badan Perencana Pembangunan Nasional, 2004. Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. Bappenas, Jakarta.
- Haughton, J. and Khandker, S. R. 2009. Hand book on Poverty and Inequality. World Bank, Washington.
- Isdijoso, W., Asep, S dan Akhmadi. 2016. Kertas Kerja Smeru. Penetapan Kriteria dan Variabel Pendataan Penduduk Miskin yang Komprehensif dalam Rangka Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota. The Smeru Research Institute.
- Nopriansyah., J. dan Umiyati, E. 2015. Determinan Kemiskinan Rumah Tangga di Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan & Pembangunan Daerah. Volume 2, No.3. Januari-Maret. 2015. ISSN : 2338-4603.
- Rejekiingsih, T. W. 2011. Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Kota Semarang Dari Dimensi Struktural. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Volume 12, Nomor 1, Juni 2011, hal. 28-44.
- Saputro, A. E. dan Utomo, A. P. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Secara Makro di 15 Provinsi pada tahun 2007. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 6, Nomor 2, September 2010, hal. 89-100.

**PARTISIPASI DAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
MANFAAT DANA DESA
(Studi Kasus di Desa Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang,
Kabupaten Mesuji)**

Sumaryo Gitosaputro^{1*}, Abdul Mutolib²

^{1,2}Program Studi Penyuluhan Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung,

Bandar Lampung, 35145

*Email: mario_papapanji@yahoo.com

ABSTRAK

Program Dana Desa bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya kepada masyarakat pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pasca adanya Program Dana Desa, dan menganalisis persepsi masyarakat terhadap manfaat dari Program Dana Desa. Penelitian dilaksanakan di Desa Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Lokasi ditentukan dengan sengaja dengan pertimbangan Desa Wira Bangun telah menerima program Dana Desa dalam 4 (empat) tahun terakhir sejak tahun 2015. Pengambilan data dilaksanakan pada bulan November dan Desember 2018. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data lapangan diperoleh dengan cara: 1) Observasi terhadap manfaat dari program Dana Desa; 2) *Focus Group Discussion* (FGD) dengan aparat desa, tokoh masyarakat, dan warga; 3) Wawancara mendalam kepada informan terpilih; dan 4) Wawancara rumah tangga dengan responden sebanyak 20 rumah tangga. Informan penelitian berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari Kepala Desa/Sekretaris Desa, Ketua Badan Pemberdayaan Desa, Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda. Penentuan informan menggunakan teknik *snowball sampling*. Analisis data menggunakan teknik tabulasi dan analisis interaktif yang terdiri: 1) Pengumpulan data; 2) Reduksi data; 3) Penyajian data 4) Penarikan simpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Wira Bangun dalam empat tahun terakhir sejak bergulirnya Program Dana Desa relatif stagnan, karena banyak masyarakat yang tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan desa. Masyarakat merasakan manfaat dari Program Dana Desa yang meliputi: 1) kemudahan aksesibilitas wilayah, 2) peningkatan kelancaran komunikasi, 3) peningkatan perdagangan dan ekonomi masyarakat, 4) manfaat pembangunan infrastruktur, dan 5) peningkatan kepuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan semenjak bergulirnya Program Dana Desa.

Kata Kunci: Program Dana Desa, Partisipasi, Persepsi, Desa Wira Bangun

PENDAHULUAN

Pembangunan desa akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai saat ini masih belum beranjak dari profil lama yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun hal yang lainnya. Padahal kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berdiam didaerah pedesaan dan berprofesi sebagai petani dan nelayan (Sofiyanto, Mardani, Salim, 2017). Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia (Hernowo, 2004).

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang Bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka (Atmojo, *et al.* 2017). Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa (Sofiyanto, Mardani, Salim, 2017).

Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa dukungan keuangan yaitu Dana Desa yang adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No 8 2016 Tentang Dana Desa).

Pada prinsipnya program Dana Desa merupakan bentuk perpanjangan dari otonomi Daerah yang mana daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku (Putra, Pratiwi, & Suwondo, 2015). UU Nomor 6 Tahun 2014 mengangkat Desa menjadi subjek pemerintahan, yaitu dari sekedar objek pembangunan (Praditya, 2014). UU tersebut memiliki komitmen untuk melindungi dan memberdayakan

masyarakat yang dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju yang adil, makmur dan sejahtera (Banurea dan Mahmudin, 2018).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa pasca adanya program Dana Desa menjadi sangat penting. Partisipasi masyarakat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Program Dana Desa. Dari latar belakang yang telah dijelaskan, tujuan penelitian ini adalah 1) Mengidentifikasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pasca Program Dana Desa, dan 2) Menganalisis persepsi masyarakat terhadap manfaat dari Dana Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Desa Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kecamatan Mesuji, Lampung. Lokasi ditentungan dengan sengaja dengan pertimbangan Desa Wira Bangun telah menerima program Dana Desa dalam 4 (empat) tahun terakhir sejak tahun 2015. Pengambilan data dilaksanakan pada bulan November dan Desember 2018.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memaparkan serta menjelaskan kegiatan atau objek yang diteliti yang berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena yang lain (Denzin dan Lincoln, 2009). Data lapangan diperoleh dengan cara: 1). Observasi terhadap manfaat dari Program Dana Desa; 2). Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) terhadap aparat desa, Tokoh masyarakat, dan warga 3). Wawancara mendalam kepada informan terpilih dan 4) Wawancara rumah tangga yang berasal dari minimal 3 (tiga kelas) kemiskinan. Informan dalam penelitian berjumlah 5 (lima) ini meliputi Kepala Desa/Sekretaris Desa, Ketua Bapan Pemberdayaan Desa, Krtua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Tokoh Masyarakt, dan Tokoh Pemuda. Penentuan infroman menggunakan teknik *snowball sampling* (peneliti memilih informan secara berantai). Responden dar kelompok rumah tangga berjumlah 20 responden yang berasal dari kelompok sanmiskin sebanyak 6 orang, kelompok sejahtera I dan II sebanyak 10 rumah tangga, dan responden dari kelompok sejahtera III sebanyak 4 rumah tangga.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tabulasi dan model analisa interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Hubermann (2007) yang terdiri: 1) Pengumpulan data; 2) Reduksi data; 3) Penyajian data 4) Penarikan simpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Responden

1. Jenis Kelamin dan Usia Responden

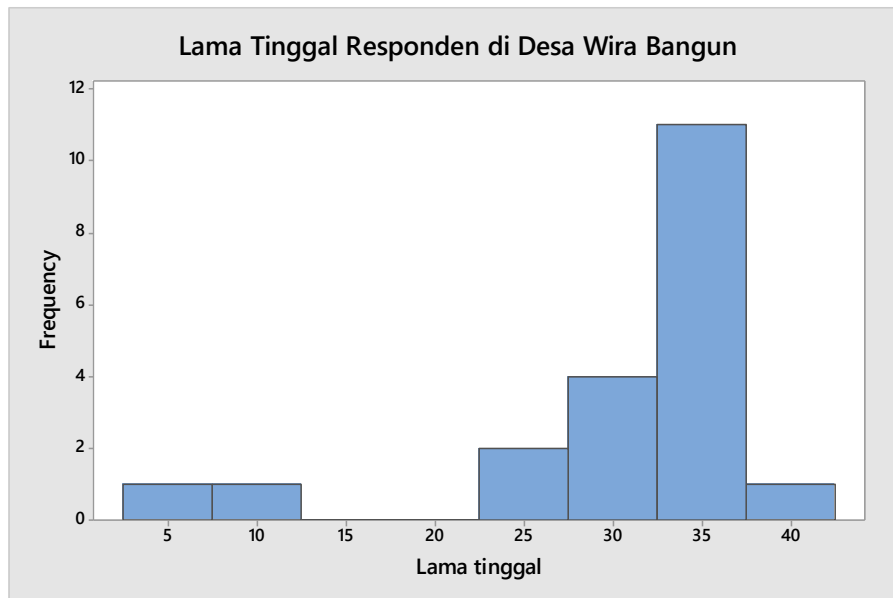
Responden di Desa Wira Bangun yang berjumlah sepuluh orang, terdiri dari responden laki-laki berjumlah delapan koma sembilan (8,9) orang dan responden perempuan berjumlah satu koma satu (1,1) orang. Responden adalah warga Desa Wira Bangun menerima bantuan dana desa di Desa Wira Bangun.

Umur responden di Desa Wira Bangun bervariasi, dari rentang umur 35 tahun sampai dengan rentang umur 80 tahun. Pengelompokan rentang umur yang bervariasi itu dimaksudkan untuk memetakan karakteristik responden berdasarkan umur, sehingga diharapkan dapat menjangkau beragam karakteristik responden berdasarkan umur. Rentang umur yang sama atau seragam selain tidak akan menghasilkan informasi yang kemungkinan sama karena sifat homogenitas data yang sama. Pengelompokan umur dengan beragam varian diharapkan akan menghasilkan informasi yang berbeda, informasi itu dapat diperoleh dari pengalaman hidup responden dengan umur yang lebih tua.

2. Lama Mukim Responden

Responden pada Desa Wira Bangun rata-rata sudah lama tinggal dan menetap di desa , dari masa mukim atau tinggal paling kecil, selama lima (5) tahun sampai dengan masa mukim terlama yaitu empat puluh (40) tahun, dan paling banyak telah tinggal selama tiga puluh lima (35) tahun. Lama tinggal responden pada desa Sidang Muara Jaya ini dengan masa tinggal yang lama akan memudahkan peneliti untuk menggali informasi tentang desa Wira Bangun, baik dari sisi sejarah, aspek sosiologis dan aspek psikologis masyarakat Desa Wira Bangun. Penggalan informasi terkait desa Wira Bangun akan

memberi informasi tambahan yang penting terkait dampak dan manfaat dana desa dari sudut pandang responden yang sudah menetap dan tinggal dalam jangka waktu yang lama di Desa Wira Bangun.

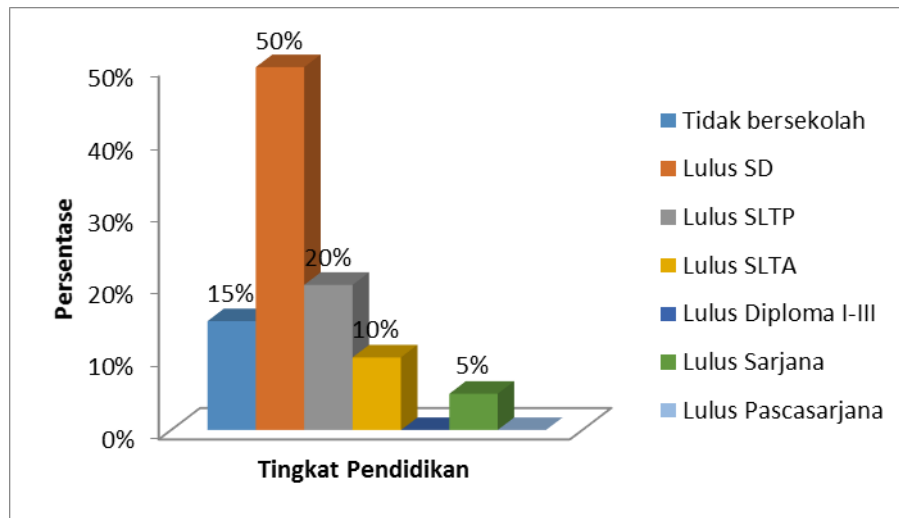


Gambar 1. Lama Tinggal Responden di Desa Wira Bangun

3. Pekerjaan dan Pendidikan Responden

Responden di Desa Wira Bangun secara keseluruhan bekerja disektor pertanian, data ini merepresentasikan dengan baik bidang pekerjaan utama masyarakat Desa Wira Bangun yang mengandalkan sektor pertanian sebagai penunjang utama aktifitas dan pekerjaan masyarakat Desa Wira Bangun.

Responden di Desa Wira Bangun terdapat 15% tidak bersekolah. Sebagian besar lulusan Sekolah Dasar (SD) sebesar 50 %, sebagian responden lainnya lulusan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP) sebesar 20 %, sisanya sebesar 10 % lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) setingkat SMA atau SMK. Responden yang lulus dari jenjang pendidikan strata satu (S1) sebesar 5% , dan tidak ada responden yang lulus strata dua (S2) ataupun strata 3 (S3).



Gambar 2. Pendidikan Responden

4. Jumlah Anggota Keluarga Responden

Jumlah anggota keluarga di Desa Wira Bangun, sebanyak 38% terdiri dari tiga (3) orang anggota keluarga, 31% lainnya terdiri dari lima (5) orang anggota keluarga, sebesar 23% terdiri dari empat (4) anggota keluarga, Dan sebesar 8% terdiri dari enam (6) anggota keluarga.

B. Pemanfaatan Dana Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Wira Bangun terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, PAD Desa, Bagi Hasil pajak dan retribusi Kabupaten Mesuji, Bantuan Keuangan Kabupaten, Bantuan Keuangan Provinsi dan sumber pendapatan lain desa yang sah. Sejak bergulirnya program Dana Desa tahun 2015, jumlah Dana Desa yang diperoleh Desa Wira Bangun hingga tahun 2018 cenderung meningkat. Pada tahun 2015, APBDes Desa Wira Bangun sebesar Rp. 672,019,734,00. Dari total APBDes, sebesar 49 persen (Rp. 329.708.7344,00) digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa. Sebesar 43 persen (Rp.286.291.000,00) digunakan untuk Pembangunan fisik/infrastruktur. Sisanya sebesar 8 persen digunakan untuk bidang pembinaan masyarakat dan bidang pemberdayaan masyarakat. Bidang pembangunan fisik dan infrastruktur desa menjadi prioritas pemerintah Desa Wira Bangun.

Pada tahun 2016 anggaran yang dikeluarkan untuk Bidang Pembangunan adalah Rp. 573,949,900,00 (53 persen), tahun 2017 anggaran Bidang Pembangunan sebesar Rp. 799,121,850,- (59 persen), dan pada 2018 sebesar Rp. 718,205,400 (59 persen). Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun 2016 menghabiskan APBDesa sebesar Rp. 386,543,373,00 (36 persen), tahun 2017 sebesar Rp. 342,459,872,00 (25 persen), dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 262,975,932,00 (22 persen). Alokasi APBDesa Wira Bangun tahun 2015 hingga 2018 ditampilkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wira Bangun 2015-2018

Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)
Pendapatan Desa	672,635,000	1,085,957,373	1,345,874,133	1,290,870,108
Belanja Desa				
a. Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	329,708,734	386,543,373	342,459,872	262,975,932
b. Bid. Pembangunan	286,291,000	573,949,900	799,121,850	718,205,400
c. Bid. Pembinaan Masyarakat	37,020,000	26,600,000	194,960,000	214,000,000
d. Bid. Pemberdayaan Masyarakat	19,000,000	96,344,100	13,000,000	27,456,628
e. Bidang tak Terduga	-	787,225	-	-
Jumlah Belanja	672,019,734	1,084,224,598	1,349,541,722	1,222,637,960

Sumber: APBDes Wira Bangun 2015-2018

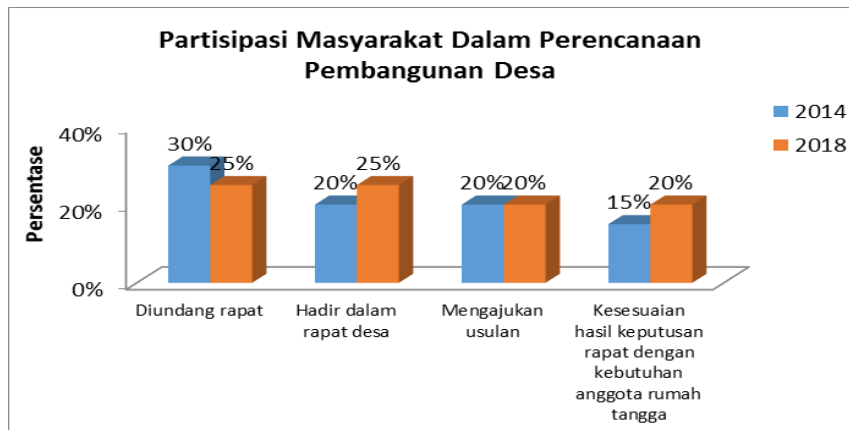
Pendapatan Desa Wira Bangun sebagian besar dialokasikan untuk Bidang Pembangunan Desa, baru kemudian bidnag kesejahteraan masyarakat yang umumnya menjadi prioritas kedua dalam pemanfaatan Dana Desa (Mahfudz, 2009; Meutia & Liliana, 2017). Bidang Pembangunan menjadi prioritas sesuai instruksi Bupati Mesuji untuk memperbaiki infrastruktur di Mesuji hingga ke tingkat desa. Bidang pembangunan infrastruktur menjadi prioritas sesuai dengan kondisi geografis Kabupaten Mesuji yang didominasi tanah liat sehingga akan sulit dijangkau ketika musim hujan. Bidang Pembangunan Infrastruktur menjadi fokus utama untuk memudahkan akses dalam mendukung pembangunan.

Pembangunan jalan desa menjadi prioritas dalam bidang pembangunan. Jalan merupakan kebutuhan vital dalam upaya mempercepat pembangunan desa. Fasilitas jalan yang baik akan memudahkan akses masyarakat untuk mendukung perekonomian, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan hal lainnya yang berkaitan dengan efisiensi akses. Selain jalan, bidang infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan adalah gorong-gorong/jembatan, saluran drainase dan Tembok Penahan Tanggul (TPT). Fasilitas tersebut dibangun sebagai upaya untuk memelihara kualitas jalan yang telah dibangun. Pembangunan jalan yang tidak disertai pembangunan saluran drainase dan TPT akan menyebabkan jalan lebih cepat rusak akibat terjangan air. Jenis batu yang digunakan dalam pembangunan jalan di Desa Wira Bangun adalah batu sabes. Batu sabes dipilih untuk memperkuat jalan yang pondasi batunya telah ada. Saat ini baru sekitar 80 persen jalan di Desa Wira Bangun telah diperbaiki/dibangun menggunakan APBDesa. Dibutuhkan 2 sampai dengan 3 tahun untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur di Desa Wira Bangun. Lamanya pembangunan infrastruktur disebabkan Desa Wira Bangun memiliki wilayah yang luas.

C. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan desa sebagai sebuah keharusan dalam meningkatkan kinerja pembangunan didesa. Pembangunan yang direncanakan adalah sepertiga dari sebuah keberhasilan dilihat dari aspek manajemen yaitu; perencanaan yang matang, pelaksanaan atau implementasi kegiatan dan evaluasi dari kegiatan.

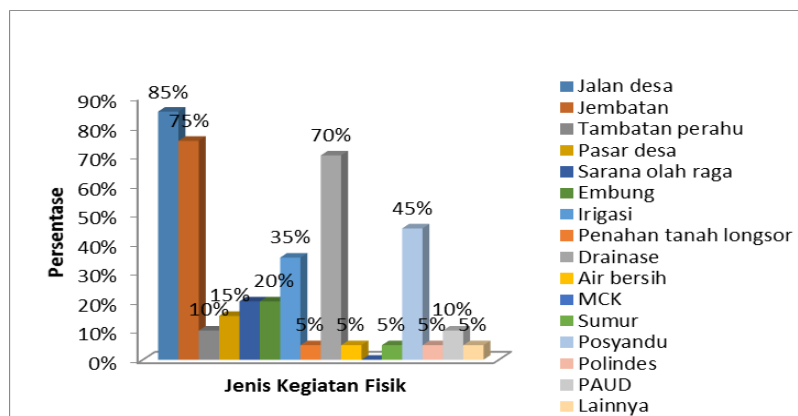
Dari gambar 3 menunjukkan bahwa pada tahun 2014 masyarakat Desa Wira Bangun yang terlibat dalam rapat perencanaan pembangunan sebesar 30 % dan menurun menjadi 25 % pada tahun 2014. Partisipasi masyarakat dalam kehadiran dalam rapat desa besar 20 % pada tahun 2014 dan mengalami peningkatan menjadi 25 % pada tahun 2018. Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengajukan usul perencanaan pembangunan tidak mengalami perubahan yaitu tetap pada tingkat 20 % pada tahun 2014 dan tahun 2018. Tingkat kesesuaian hasil keputusan rapat dengan kebutuhan anggota rumah tangga meningkat dari sebesar 15% ditahun 2014 menjadi 20% ditahun 2018.



Gambar 3. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Wira Bangun

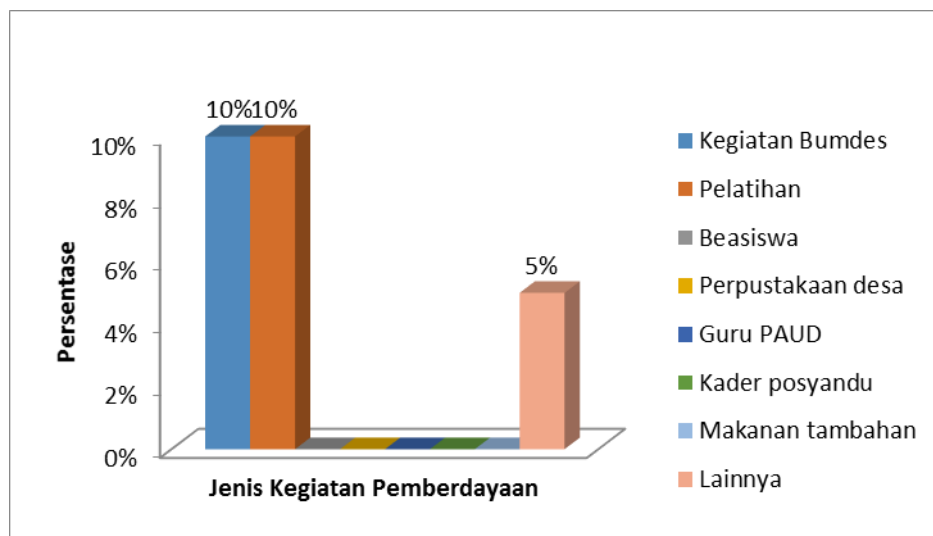
D. Pengetahuan Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Dana Desa

Ragam jenis kegiatan fisik yang dilakukan oleh warga Desa wira jaya berasal dari dana desa adalah sebagai berikut ; 85 % penggunaan untuk jalan desa, 75 % penggunaan untuk pembuatan jembatan didalam desa, kemudian 10% digunakan untuk tambatan perahu, 15% digunakan untuk pembuatan pasar desa, sarana olah raga dan embung memiliki nilai persentase yang sama yaitu 20%, selanjutnya 35% untuk irigasi dalam rangka pengairan, 5% untuk kebutuhan penahanan tanah longsor, 70% digunakan untuk drainase, 5% untuk air bersih, 5% digunakan untuk pembuatan sumur untuk pemenuhan kebutuhan warga desa. Selain itu dana desa digunakan pelaksanaan program pos pelayanan terpadu (posyandu) sebesar 45%, dan terakhir digunakan untuk menunjang kegiatan Pendidikan anak usia dini (PAUD) sebesar 10%.



Gambar 4. Pengetahuan masyarakat terhadap jenis pembangunan fisik dari Program Dana Desa

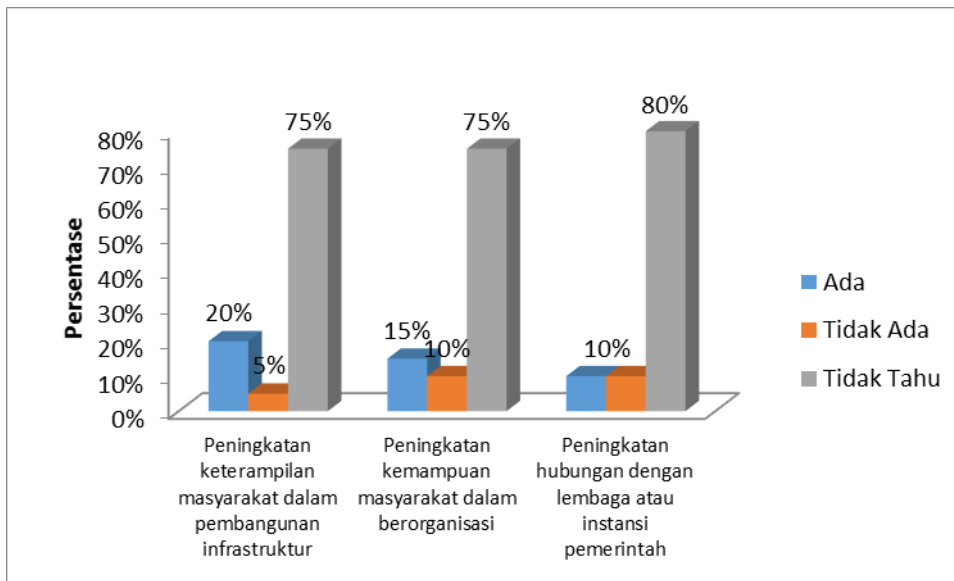
Kegiatan pemberdayaan dari dana desa di Desa Wira Bangun meliputi berbagai hal, diantaranya adalah; kegiatan BUMDes dan pelatihan Desa Wira Bangun yang memiliki jumlah persentase yang sama yaitu sebesar 10% dari keseluruhan dana desa yang di gunakan. Sedangkan sisanya lagi sebesar 5 % dipakai untuk kegiatan lainnya di Desa Wira Bangun.



Gambar 5. Pengetahuan masyarakat terhadap kegiatan pemberdayaan yang berasal dari Dana Desa

E. Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Dana Desa

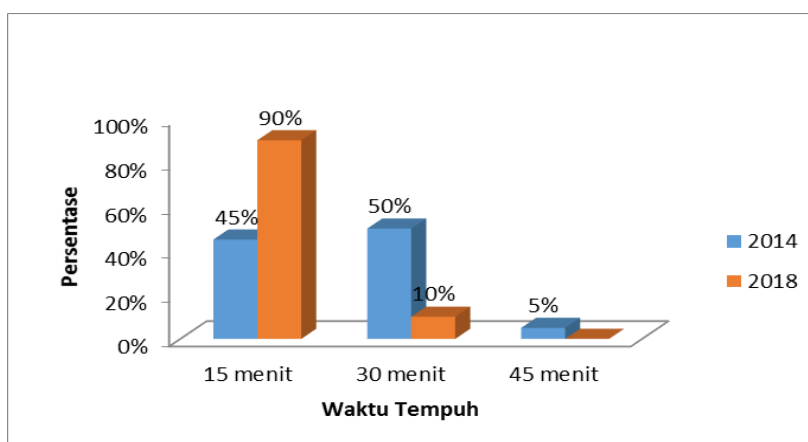
Tingkat kemampuan masyarakat Desa Wira Bangun dalam hal peningkatan keterampilan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur yang memiliki kemampuan sebesar 20%, sedangkan 5 % tidak ada keterampilan dan sebesar 75% masyarakat tidak tahu. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam berorganisasi yang memiliki kemampuan menurun sebesar 15%, sedangkan yang menjawab tidak ada peningkatan sebanyak 10% dan sebesar 75% menjawab tidak tahu. Tingkat kemampuan masyarakat Wira Bangun dalam hal peningkatan hubungan dengan Lembaga atau instansi pemerintah sebesar 10% merasa ada peningkatan, sedangkan 10 % menjawab tidak ada peningkatan, sisanya sebesar 80 % menjawab tidak tahu. Data tersebut menunjukkan kepada kita bahwa dana desa tidak membawa perubahan kemampuan keterampilan masyarakat Desa Wira Bangun.



Gambar 6. Persepsi Masyarakat terhadap Peningkatan keterampilan infrastruktur, organisasi dan hubungan lembaga dari Program Dana Desa

1. Manfaat Dana Desa Terhadap Akses dan Jarak Tempuh Wilayah

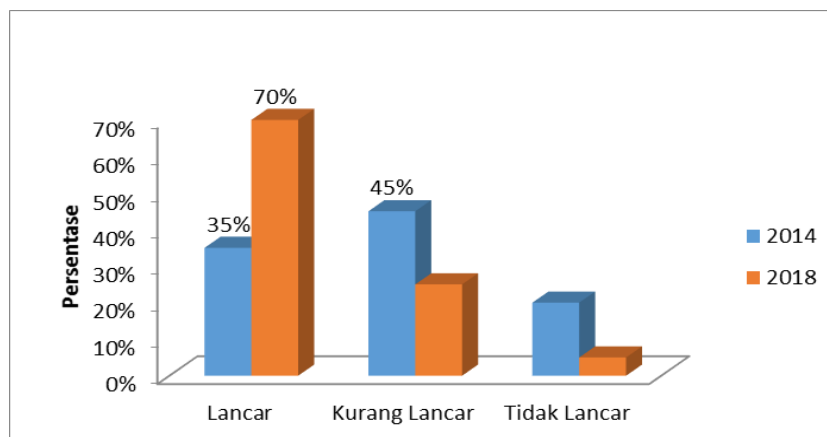
Waktu tempuh dari desa Wira Bangun ke ibukota Kecamatan . Jarak tempuh 15 menit pengguna akses jalan sebesar 45% ditahun 2014 dan berubah menjadi 90% ditahun 2018. Untuk waktu 30 menit , sebanyak 50% pengguna akses jalan yang mampu menempuhnya ditahun 2014 dan menjadi 10% di tahun 2018, Untuk waktu 45 menit hanya sebesar 5% di tahun 2014 dan pada tahun 2018 sudah tidak ada lagi waktu tempuh dari desa Wira Bangun ke kota kecamatan dengan waktu selama itu.



Gambar 7. Persepsi masyarakat terhadap manfaat dana desa terhadap aksesibilitas wilayah

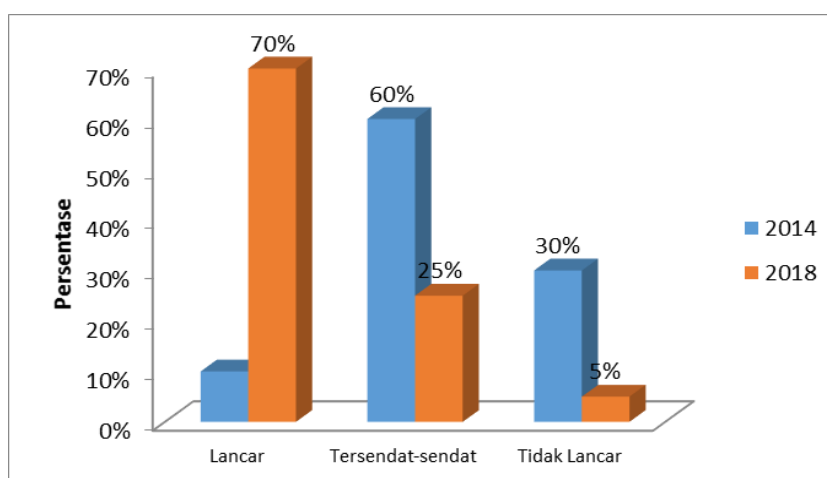
2. Manfaat Dana Desa Terhadap Komunikasi

Komunikasi antar daerah di Desa Wira Bangun ditahun 2018 mengalami kenaikan, ditahun 2014, 35% yang menyatakan bahwa komunikasi lancar, sedangkan ditahun 2018 sebanyak 70% yang menyatakan komunikasi lancar. Responden yang menyatakan komunikasi kurang lancar juga menurun ditahun 2014 sebesar 45% sedangkan ditahun 2018 menurun menjadi 25 %, dan yang menyatakan komunikasi tidak lancar pada tahun 2014 sebesar 20%, namun pada tahun 2018 hanya 5% yang menyatakan komunikasi tidak lancar. Artinya dalam kurun waktu empat tahun terakhir akses komunikasi antar daerah di Desa Wira Bangun mengalami kenaikan.



Gambar 8. Persepsi masyarakat terhadap manfaat Dana Desa dalam bidang komunikasi

3. Manfaat Dana Desa Terhadap Perdagangan dan Ekonomi

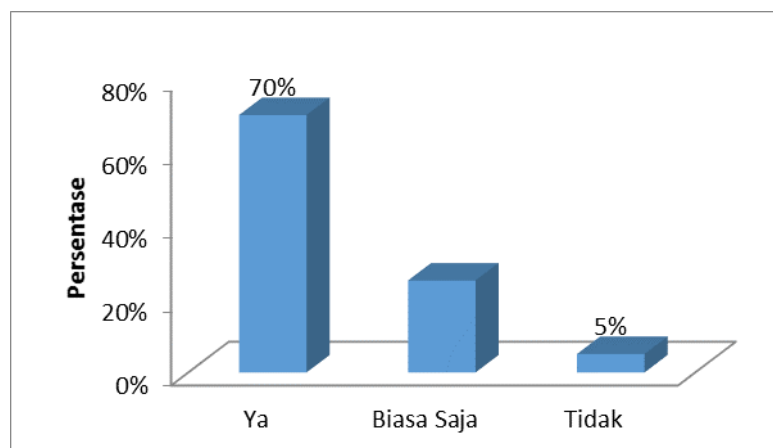


Gambar 9. Manfaat Program Dana Desa terhadap Pembelian Barang Dagangan

Peningkatan penjualan dalam kegiatan perdagangan di Desa Wira Bangun juga menunjukkan peningkatan, sebanyak 65% responden menyatakan bahwa ada peningkatan. Sedangkan sebesar 25% menyatakan tidak tahu dan sisanya 10% menyatakan tidak ada peningkatan. Pembelian barang dagangan di Desa Wira Bangun juga menunjukkan peningkatan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, data menunjukkan bahwa saat tahun 2018 sebanyak 70 % pembelian barang dagangan sangat lancar, dibandingkan 10% lancar ditahun 2014. sedangkan pada pembelian barang tersendat sendat ditahun 2014 sebesar 60% dan pada tahun 2018 berubah menjadi 25%. Kemudian tahun 2014 yang menyatakan tidak lancar sebesar 30% dan pada tahun 2018 hanya 5% yang menyatakan pembelian barang dangangan yang tidak lancar.

4. Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Pembangunan Infrastruktur

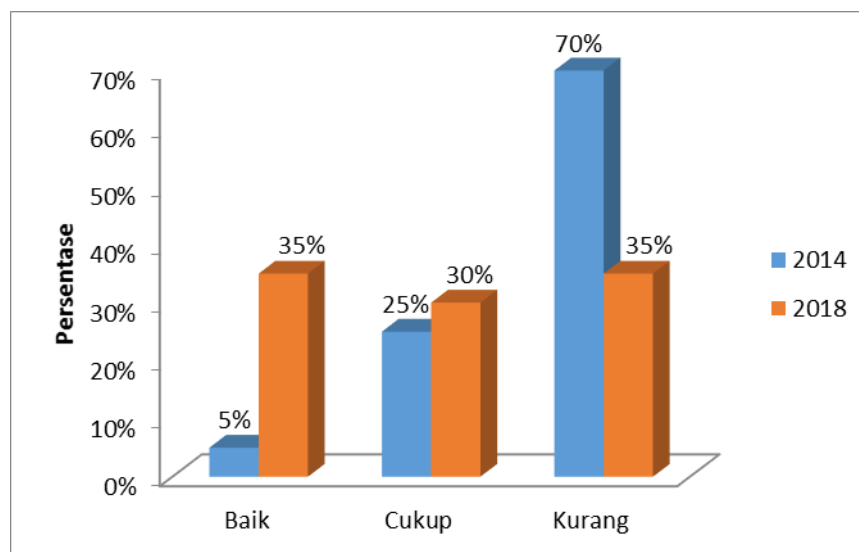
Pembangunan infrastruktur di Desa Wira Bangun menghasilkan keuntungan yang besar bagi warga masyarakat, sebanyak 70% yang menyatakan ada keuntungan yang signifikan dari pembangunan infrastruktur, seperti waktu tempuh, jarak tempuh, keuntungan ekonomi dan keuntungan lainnya, dan yang menyatakan biasa saja sebesar 25%. Sedangkan sisanya yang menyatakan tidak ada keuntungan dari pembangunan infrastruktur sebesar 5%.



Gambar 10. Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Pembangunan Infrastruktur

5. Kepuasan Masyarakat terhadap Hasil Pembangunan Infrastruktur

Evaluasi kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Wira Bangun. Pada tahun 2014 lalu hanya sebesar 5% yang menjawab hasil pembangunan infrastruktur baik dan pada tahun 2018 menjadi 35%. Kemudian pada tahun 2014 yang menyatakan hasil pembangunan infrastuktur cukup 25% dan berubah menjadi 30% ditahun 2018. Sedangkan yang menjawab kurang baik pada tahun 2014 sebesar 70 %, data ini berarti di tahun 2014 lalu secara umum pembangunan infrastruktur tidak cukup baik dan dirasa kurang disebabkan kualitas pembangunan yang tidak sesuai dengan standar kriteria yang dtetapkan. Namun, ditahun 2018 data menunjukkan bahwa kualitas pembangunan infrastruktur di Desa Wira Bangun sudah meningkat, yaitu dengan data yang menyatakan kurang baik hanya baik 35%.



Gambar 11. Kepuasan Masyarakat terhadap Hasil Pembangunan Infrastruktur dari Program Dana Desa

KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Wira Bangun dalam empat tahun terakhir sejak bergurirnya Program Dana Desa relatif stagnan, yang mana banyak masyarakat yang tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan desa. Pada tahun 2014, masyarakat Desa Wira Bangun yang trelibat dalam rapat perencanaan

pembangunan sebesar 30 % dan menurun menjadi 25 % pada tahun 2014. Partisipasi masyarakat dalam kehadiran dalam rapat desa besar 20 % pada tahun 2014 dan mengalami peningkatan menjadi 25 % pada tahun 2018. Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengajukan usul perencanaan pembangunan tidak mengalami perubahan yaitu tetap pada tingkat 20 % pada tahun 2014 dan tahun 2018. Tingkat kesesuaian hasil keputusan rapat dengan kebutuhan anggota rumah tangga meningkat dari sebesar 15% ditahun 2014 menjadi 20% ditahun 2018. Persepsi masyarakat terhadap manfaat dari Program Dana Desa relatif baik atau memberi dampak bagi kehidupan masyarakat desa. Masyarakat merasakan manfaat dari Program Dana Desa yang meliputi 1) kemudahan aksesibilitas wilayah karena peningkatan pembangunan jalan desa, 2) peningkatan kelancaran komunikasi sejak bergulirnya Dana Desa, 3) peningkatan perdagangan dan ekonomi masyarakat karena peningkatan pembangunan jalan desa, 4) manfaat pembangunan infrastruktur meliputi jalan, gedung PAUD, saluran drainase, dan *jogging track*, dan 5) masyarakat merasa puas dengan kualitas pembangunan dari Program Dana Desa dalam empat tahun terakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmojo, M.E., Fridayani, G.D. Kasiwi, A.N., Pratama, M.A. 2017. Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo. 5 (1): 126-140.
- Banurea, D. & Mahmuddin. 2018. Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Suatu penelitian di Desa Perolihen Kec. Sitellu Tali Urang Jehe, Kab. Pakpak Bharat). *Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah*, 3 (1): 1-14.
- Hernowo, Basah. 2004. Kajian Pembangunan Ekonomi *Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan. Artikel Jurnal*, Vol. 1, No. 1
- Mahfudz. 2009. Analisis dampak alokasi dana desa (ADD) terhadap Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 5 (1):10-22.
- Meutia, I., & Liliana. 2017. Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 8 (2): 227-429.
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa

- Praditya, Didit. (2014). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Tingkat Pemerintahan Desa. *Jurnal Penelitian Komunikasi*. 17 (2): 129-140.
- Putra, CK., Pratiwi, RN., Suwondo. 2015. Pengelolaan ADD Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Administrasi*. 1 (6). [Http://administrasipublik.ub.ac.id/jurnal](http://administrasipublik.ub.ac.id/jurnal)
- Sofiyanto, M., Mardani, R.M., dan Salim, M.A. 2017. Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. *Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen*. 3 (1): 28-38.
- Denzin, K, Norman. dan Lincoln, Yvonna S. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Penerjemah: Dariyatno, Badrus Samsul dkk. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Miles, M.B. dan Huberman, A. 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia.

PERAN PETERNAK AYAM PETELUR MB 402 IMPLIKASI PAKAN BAWANG PUTIH (*Allium Sativum*) DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN.

Jein Rinny Leke^{1*}, Erwin Wantasen¹, Florencia. N Sompie¹

Fakultas Peternakan Universitas Sam Ratulangi Manado

*Email: rinileke@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui peran peternak ayam petelur MB 402 implikasi pakan bawang putih (*Allium Sativum*) dalam mendukung ketahanan pangan. Pangan merupakan komoditas penting dan strategis bagi bangsa Indonesia mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama sama. Ketersediaan pangan dipedesaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam mencukupi gizi yang seimbang melalui penyiapan telur ayam. Komposisi telur yang dapat dikonsumsi berat telur 60 gram, mengandung protein 6.4 – 7.0 gram, putih telur 3.3 – 4 gram protein, dan kuning telur 2,7 – 3,2 gram. Kuning telur sebagai sumber lemak dan juga sumber protein yang berkisar 15 – 16 % dan vitamin A (40.000 IU per 100 gram). Lemak dalam kuning telur tidak bersifat bebas, akan tetapi terikat dalam bentuk partikel lipoprotein. Lipoprotein kuning telur terdiri atas 85 % lemak dan 15 % protein. Metode yang digunakan deskriptif argumentasi , studi literature. Peran peternakan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan ayam petelur MB 402 dibutuhkan fungsi penyuluh lewat industri 4.0 dalam pemenuhan ketahanan pangan Di Provinsi Sulawesi Utara. Kesimpulan : Pemberdayaan ayam petelur sebagai upaya pemenuhan Gizi Masyarakat.2.Pemilihan bahan pakan lokal sebagai sumber pangan 3. Adanya penyuluhan lewat digital melayani lewat kampanye kebutuhan gizi masyarakat.

Kata Kunci : Ayam Petelur, Ketahanan Pangan.

PENDAHULUAN

Provinsi Sulawesi Utara saat ini masih belum mampu menyiapkan akan kebutuhan ayam petelur bagi masyarakat yang ada karena pemenuhan pada hari hari raya tertentu masih di supply dari Daerah DKI Jakarta dan Daerah Surabaya. Sekitar 60 % kebutuhan daging dan telur Nasional telah dipenuhi oleh Produk perunggsan. Data statistika dan Kesehatan Hewan (2017) menunjukkan nilai investasi peternakan khusus unggas tahun 2012 yaitu 1.575 US dolar, tahun 2013 yaitu 9.473 US dolar, tahun 2014 yaitu 13.784 US Dolar, tahun 2015 yaitu 62.232 dolar, tahun 2016 yaitu 25.374 dolar. Harga rata rata telur

ayam ras di tingkat konsumen tahun 2014 sebesar Rp.20.063.00 per kg. Tahun 2015 meningkat 9.34 persen menjadi sebesar Rp.21.936.000 , selanjutnya tahun 2016 sebesar 23.384.000 per kg meningkat 6.60 persen. Produksi telur pada tahun 2016 sebanyak 2.0 juta ton yang terdiri dari telur ayam buras 0,2 juta ton, ayam ras petelur 1,5 juta ton. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan telur ayam dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga perlu upaya antara masyarakat, peternak dan pemerintah dalam mendukung ketersediaan telur .

Pembangunan peternakan memegang peranan penting sebagai penghasil telur dan daging. Pemeliharaan ayam petelur mempunyai juga beberapa aspek masalah di Provinsi Sulawesi Utara yaitu bahan pakan ayam petelur dikirim dari Japva, atau pokphan dari Jakarta atau Surabaya menyebabkan harga bahan pakan berada sekitar Rp. 450 .000 / karung. Harga jual telur tidak seimbang dengan biaya pakan dan tenaga kerja. Pemeliharaan ayam petelur di masyarakat Daerah Sulawesi Utara masih minim. Hal ini menyebabkan minimnya pemeliharaan ayam petelur MB 402 maka diperlukan peran pemerintah dalam menggerakkan perusahaan swasta dan lembaga lembaga. Peran perusahaan dan lembaga lembaga agribisnis ini sangat membantu petani/peternak yakni dalam menyiapkan sarana produksi berupa bibit, pakan, obat obatan , vaksin, vitamin dan pemasaran hasil peternak dengan pola kemitraan (salam dkk., 2006).

Sumardjo , (2006) ketahanan pangan sebagai berikut : 1.Rumah tangga sebagai unit perhatian terpenting pemenuhan kebutuhan pangan Nasional maupun komunitas dan individu, 2. Kewajiban Negara untuk menjamin hak atas pangan setiap warganya yang terhimpun dalam satuan masyarakat terkecil untuk mendapatkan pangan bagi keberlangsungan hidup. 3. Ketersediaan pangan mencakup aspek kecukupan jumlah pangan (*food sufficiency*) dan terjaminnya mutunya (*food quality*). 4. Produksi pangan yang sangat menentukan jumlah pangan sebagai kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan. 5. Mutu pangan yang nilainya ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standart perdagangan terhadap bahan makanan, 6.Keamanan pangan (*food safety*) adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu , merugikan dan membahayakan keadaan manusia. 6.Keterjangkauan pangan

: Kemudahan rumah tangga untuk memperoleh pangan dengan harga terjangkau. Sektor peternakan merupakan sektor penting dalam menunjang ketahanan pangan. Telur merupakan bahan pangan yang mudah dapat dan dijangkau dari masyarakat pedesaan sampai perkotaan disamping itu harganya murah. Protein hewani merupakan kebutuhan pokok untuk memenuhi Gizi masyarakat yang berasal dari pangan asal hewani. (Warsito, 2010).

Dukungan mengakses informasi teknologi, permodalan, pasar dan informasi lain sesuai kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas membutuhkan penyuluh peternak yang mampu menciptakan sentra pengembangan peternakan ayam petelur di Sulawesi Utara, sehingga pemenuhan ketahanan pangan dapat tercapai. Kemampuan merupakan wujud perilaku dalam melaksanakan tugas dalam pengembangan sektor perunggulan khususnya ayam petelur. Kemampuan dalam pengetahuan, skill merupakan tugas dan ketrampilan seorang yang diberi tugas sebagai penyuluh. Tugas pokok dan fungsi penyuluh pertanian dalam merencanakan, mengorganisasi dan mengevaluasi program penyuluh pertanian (Bahua dkk., 2010).

Pengembangan penelitian yang sudah dilakukan pada ayam petelur belum juga dapat mensuplai permintaan telur di kota Manado. Salah satu peternak yang berada di Kota Manado adalah peternak Gunawan, usaha peternakannya sudah berlansung selama 30 tahun. Skala pemeliharaan 50.000 ekor per periode dengan model peternak ayam petelur jenis ayam MB 402. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran peternak ayam petelur MB 402 impilikasi pakan bawang putih (*Allium Sativum*) dalam mendukung ketahanan pangan.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2019 sampai April 2019 Di peternak ayam petelur MB 402 Kecamatan Mapanget Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif, yaitu jenis penelitian yang sifatnya menggambarkan peternakan Gunawan ayam petelur MB 402 Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Wawancara yaitu pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan peternak yang menjadi sampel penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Peternakan Ayam Petelur Gunawan

Berdasarkan hasil penelitian pada Peternakan ayam petelur Gunawan dalam mendukung ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Kondisi Peternakan Ayam Petelur Gunawan Provinsi Sulawesi utara.



Suplai telur dari kegiatan penelitian yang dilakukan dengan pemberian bahan pakan tepung bawang putih dapat memberikan suplai protein hewani. Telur yang dihasilkan di masukkan pada beberapa swalayan yang ada dikota Manado Provinsi Sulawesi Utara seperti swalayan Hypermart, Multimart, Fiesta Ria, Fresh mart. Rata rata suplai telur 25 .000.000 butir /hari. Menurut Sauveur (1988) komposisi telur yang dapat dikonsumsi (g) berat telur 60 gram dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Komposisi telur yang dapat dikonsumsi (g) berat telur 60 gram.

Material	Komplit	Putih Telur	Kuning Telur
Total	53,5 – 55	35 – 37	17 – 18,5
Air	39,5 – 41,5	30 – 33	8 – 9,2
Bahan Kering	13 – 14,5	3,8 – 4,5	8,7 – 10
Protein	6,4 – 7,0	3,3 – 4	2,7 – 3,2
Lemak	6,1 – 6,9	-	6,0 – 6,8
Jenuh	2,3 – 2,5	-	2,1 – 2,4
Tidak Jenuh	3,5 – 4,0	-	3,3 – 3,8
Kolesterol	0,24 – 0,27	-	0,24 – 0,27
Glukosa	0,15 – 0,2	0,12 – 0,16	0,03 – 0,05
Abu	0,45 – 0,55	0,16 – 0,24	0,2 – 0,3
Karori	88 – 95	14 – 18	74 – 80

Keterangan Berat Kerabang 10 – 13 %

Sumber : Sauveur .1988.

Dari tabel 2. Menunjukkan bahwa putih telur mengandung protein lebih tinggi dari pada kuning telur. Putih telur menempati 54 % total protein putih telur. Total rata rata produksi telur Petelur Gunawan adalah 25.000.000butir/hari, sehingga suplai protein telur sebesar 54 % maka rata rata protein telur yang disumbangkan dari ayam petelur Gunawan untuk masyarakat kota Manado sebesar 13.500.000 protein telur/hari.

Sumbangan protein telur dari produksi peternakan ayam petelur menunjukkan bahwa peternakan ayam petelur ini telah membantu gizi bagi anak anak mulai balita sampai dewasa. Peran peternak dan pemerintah serta penyuluh pertanian perlu di kembangkan program “*Family Poultry*” untuk mengatasi malnutrisi. Menurut Anwas (2013) untuk meningkatkan kompetensi banyak upaya yang dapat dilakukan diantaranya melalui peningkatan pendidikan , pelatihan, diskusi antar penyuluh, penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan yang diasumsikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kompetensi penyuluh pertanian. Diperlukan program penyediaan sumber protein hewani dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui bahan yang mudah, murah, terjangkau dan bernilai gizi tinggi dalam keluarga. “*Family Poultry* layak di timbang sebagai sebuah solusi mengatasi terjadinya malnutrisi, efektif dalam pengentasan

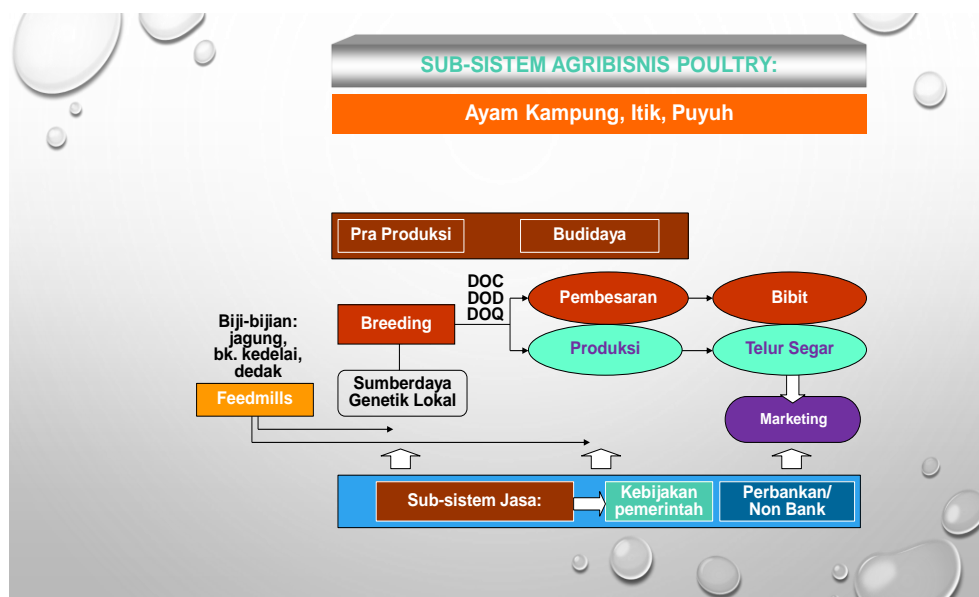
kemiskinan, menjaga ketahanan pangan. (Rusfidra, 2005d). Ketahanan pangan suatu Negara akan tercipta bila sudah ada kedaulatan pangan dan krisis pangan suatu bangsa bermula dari situasi yang tidak berdaulat atas pangan (Waridin, 2008).

Menurut Anwas (2013) meningkatkan kompetensi banyak upaya yang dapat dilakukan diantaranya melalui peningkatan pendidikan, pelatihan, diskusi antar penyuluh, penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan yang diasumsikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kompetensi penyuluh pertanian.

2. Sistem Pengembangan Unggas

Sistem pengembangan unggas dalam proses produkis dan budidaya dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Sistem Pengembangan Unggas.



Dari gambar 1. menunjukkan sistem pengembangan unggas. Ayam ras petelur merupakan hasil persilangan berbagai perkawinan silang dan seleksi yang sangat rumit dan diikuti dengan upaya perbaikan manajemen pemeliharaan secara terus menerus. Ayam petelur memiliki sifat *Nervous* (mudah terkejut), bentuk tubuh ramping, produksi telur rata-rata (200 butir/ekor/tahun), efisien dalam penggunaan ransum untuk membentuk telur,

tidak memiliki sifat mengeram. Produksi telur kurang lebih 200 butir per tahun (Kartasudjana dan Suprijatna , 2006)

Peternakan ayam petelur Gunawan Kota Manado memberikan ransum pada ayam petelur berupa konsentrat dari perusahaan, jagung, bekatul, grit. Menurut Leke (2016) pada fase layer ayam cukup mendapatkan pakan berkadar protein 17 % - 19 % dan Energi metabolisme 2700 Kkal/kg., imbangannya protein berdasarkan iso kalori dan energi sehingga produksi telur dapat meningkat dan pertumbuhan berada pada kisaran normal. Keseimbangan energi dan protein ransum akan menentukan kualitas ransum. Kebutuhan nutrisi untuk ayam petelur menurut SNI (2006) tertera pada Tabel 3.

Tabel 3. Kebutuhan nutrisi ayam petelur fase layer

Nutrien	Persyaratan
Energi metabolis (kkal/kg)	Min 2.650
Kadar air (%)	Maks 14
Protein Kasar (%)	Min 16.0
Lemak Kasar (%)	Min 7.0
Serat kasar (%)	Maks 7.0
Abu (%)	Maks 14.0
Kalsium (Ca) (%)	3,25 – 4,25
Fosfor (P) (%)	0,60 – 1,00

Sumber : Standar Nasional Indonesia (2006)

Kualitas warna kuning telur dapat ditentukan secara visual yaitu membandingkan dengan warna standart dari kipas warna Roche yolk colour fan dengan skor 1- 15 dari warna pucat sampai orange tua. Hasil warna kuning telur pada peternakan ayam petelur skor rata rata 8 – 9.

KESIMPULAN:

1. Pemberdayaan ayam petelur sebagai upaya pemenuhan Gizi Masyarakat.
2. Pemilihan bahan pakan lokal sebagai sumber pangan
3. Adanya penyuluhan lewat digital melayani lewat kampanye kebutuhan gizi masyarakat

Ucapan Terimakasih

Terimakasih disampaikan kepada Penelitian DPRM Dikti tahun 2019 melalui kegiatan penelitian Riset Terapan Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang telah memfasilitasi penelitian sehingga adanya luaran penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas OM., 2013. Pengaruh Pendidikan Formal, Pelatihan, dan Intensitas Pertemuan Terhadap Kompetensi Penyuluh Pertanian. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. 19 (1): 50 – 62.
- Bahua MI, Jahi A, Asngari PS, Saleh A, Purnaba IGP. 2010. Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Penyuluh Pertanian dan Dampaknya pada Prilaku Petani Jagung Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Agropolitan* . 3(1): 293 – 303.
- Leke.J.R, J.Mandey, Fredy Nangoy. 2015. Nutrients and cholesterol of Eggs Affected by Dried Tomato Meal in Laying Hens Diet. *International Journal on Advanced Science , Engineering Information Technology*. Vol.5. (2015) 3.pages 178-180.
- Kartasudjana.R. dan E. Suprijatna. 2006. *Manajemen Ternak Unggas*. Penebar Swadaya Unggas.
- Rusdifa. 2005d. KLB Wabah Flu Burung. Artikel ipteks dimuat di harian Sinar Harapan Jakarta. (30 September 2005).
- Salam, T., M., dan A.E.N. Rumengan . 2006. Analisis finansial usaha peternakan ayam broiler pola kemitraan . *Jurnal Agrisistem* 2(1); 32 – 39.
- Sauveur,B. 1988. *Reproduction des Volailles et Production d’Oeufs*.INRA-Paris.
- Sumardjo , (2006). Penduduk, Pangan, dan Permasalahan pembangunan pertanian. *Jurnal Penduduk dan pembangunan* . 6(1). 25- 35.
- Warsito, S.H. 2010. Analisis Finansial Resiko dan Sensitivitas Usaha Peternakan Ayam petelur (Survei pada kelompok Peternakan Gunungrejo Makmur Kabupaten Lamongan (Tesis). Universitas Brawijaya.
- Waridin. 2008. Pembangunan Pertanian dalam mewujudkan Ketahanan pangan dan Pengentasan Kemiskinan. Makalah Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Ekonomi. Universitas Diponegoro. Semarang.

**SEMINAR NASIONAL
PENYULUHAN, KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

TOPIK PELATIHAN MASYARAKAT

Daftar Halaman

No.	Judul & Peserta	Halaman
1.	EFEKTIVITAS PELATIHAN DALAM PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN DI BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI <i>Yunisa Tri Suci</i>	641 - 650
2.	KONSEP DIKLAT PENYULUH DAN PELAKU UTAMA PERTANIAN YANG SINERGIS DAN KOLABORATIF <i>Hery Bachrizal Tanjung</i>	651 - 674

EFEKTIVITAS PELATIHAN DALAM PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN DI BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI

Yunisa Tri Suci^{1*}, Ahmad Syariful Jamil , Adhis Millia Windhy

¹Balai Pelatihan Pertanian Jambi Jl Jambi-Palembang Km 16 Muara Jambi Jambi

*Email: yunisa@pertanian.go.id

ABSTRAK

Sebagai salah satu unit pelaksana Teknis Kementerian Pertanian, Balai Pelatihan Pertanian Jambi (BPP Jambi) memastikan bahwa SDM Pertanian di wilayah kerjanya mampu meningkatkan kompetensinya. Peningkatan kompetensi tersebut merupakan indikator utama keberhasilan UPT Pelatihan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan (1) Mengidentifikasi karakteristik peserta pelatihan di BPP Jambi, (2) Menganalisis efektivitas peningkatan kompetensi SDM pertanian melalui pelatihan di BPP Jambi. Penelitian ini menggunakan data primer berupa data pre test dan post test dari peserta beberapa pelatihan di BPP Jambi. Penentuan responden tersebut ini menggunakan teknik random sampling dengan sampling frame berjumlah 120 orang. Analisis normalitas dan *paired t test* digunakan untuk menjawab tujuan penelitian. Sebesar 50% responden merupakan peserta berusia muda, sementara sisanya masing-masing sebesar 30% berusia dewasa dan 20% berusia tua. Berdasarkan pendidikannya, mayoritas peserta pelatihan merupakan lulusan Strata 1/D4 dan SLTA (40%). Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data telah menyebar normal. Berdasarkan uji t mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan nyata antara nilai *pre test* dan *post test* dari peserta pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa metode pelatihan yang dilaksanakan di BPP Jambi telah mampu meningkatkan kompetensi peserta pelatihan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa diperlukan penelitian lanjutan mengenai dampak keikutsertaan peserta terhadap kinerja dari peserta pelatihan.

Kata kunci : efektifitas, pelatihan, BPP Jambi

PENDAHULUAN

Kompetensi sumber daya manusia pertanian merupakan kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan didukung oleh sikapnya yang dituntut dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Sumber daya manusia pertanian memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan pertanian, sebagai salah satu aspek utama yang menjadi penentu keberhasilan pertanian karena sumber daya manusianya yang akan menjalankan segala kegiatan yang ada dalam usaha pertanian. Usaha petanian tidak akan berjalan apabila tidak ada sumber daya manusia pertanian yang menggerakkan roda kegiatan

pertanian. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pertanian sebagai salah satu upaya yang dapat diambil untuk mewujudkan profesionalisme sumber daya manusia pertanian dalam mendukung pembangunan pertanian (Faqih, 2015).

Tolak ukur sumber daya manusia pertanian yang memiliki kompetensi yang baik adalah sumber daya manusia yang dapat memberdayakan atau meningkatkan partisipasi dalam pertanian seluas-luasnya untuk menjadi subjek dalam usaha pertaniannya (Sumardjo, 2008). Peningkatan sumber daya manusia pertanian dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Salah satu contoh faktor eksternal yang dapat mempengaruhi peningkatan kompetensi sumber daya manusia pertanian adalah keikutsertaan dalam suatu pelatihan, dimana melalui pelatihan diharapkan organisasi/instansi dapat mempertahankan sumber daya manusia pertanian yang berpotensi dan berkualitas. Pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia baik secara intelektual dan kepribadian. Pelatihan (*training*) merupakan suatu usaha peningkatan pengetahuan dan keahlian seseorang untuk me ngerjakan suatu pekerjaan tertentu. Menurut Soenaryo (2014) pelatihan merupakan suatu proses penyampaian pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan sikap dan kepribadian para pekerja atau calon pekerja yang dilaksanakan dengan cara terbimbing dan sistematis, serta dengan menggunakan metode yang relevan.

Dengan adanya peningkatan keahlian, pengetahuan, wawasan, dan sikap seseorang dapat meningkatkan kinerja seseorang. Hal ini sejalan dengan pemikiran dari Sudiro (2009) yang menyatakan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia organisasi ialah melalui program pendidikan dan pelatihan dalam organisasi adalah perbaikan kinerja yang meliputi pengetahuan dan keterampilan yang mendukung, serta pembentukan sikap seseorang.

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian, Balai Pelatihan Pertanian Jambi (BPP Jambi), memastikan bahwa sumber daya manusia pertanian di wilayah kerjanya mampu meningkatkan kompetensinya. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pertanian tersebut merupakan salah satu indikator utama keberhasilan unit pelaksana teknis pelatihan. Kompetensi peserta pelatihan diharapkan dapat meningkat melalui keikutsertaannya dalam suatu pelatihan. Terdapat tiga hal yang umumnya dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan satu pelatihan. Ketiga tolak ukur tersebut adalah yaitu pembentukan pola pikir atau *mind set*, peningkatan pengetahuan dan kemampuan,

serta sikap dan perilaku yang telah berubah menjadi lebih efektif dan lebih mendukung visi dan misi yang telah ditentukan.

Oleh karena itu efektivitas suatu pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pertanian pada era milenial sangat diperlukan. Salah satu indikator pelatihan efektif adalah dengan adanya peningkatan pengetahuan dari peserta pelatihan yang dapat dilakukan dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai. Hal tersebut dilakukan untuk mempersiapkan sumber daya manusia pertanian dalam menghadapi persaingan global.

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengidentifikasi karakteristik peserta pelatihan di Balai Pelatihan Pertanian Jambi (BPP Jambi) (2) Menganalisis efektivitas pelatihan dalam peningkatan sumber daya manusia pertanian di Balai Pelatihan Pertanian Jambi (BPP Jambi).

METODE PENELITIAN

Responden dalam penelitian ini sejumlah 40 orang peserta pelatihan yang telah mengikuti pelatihan di Balai Pelatihan Pertanian Jambi. Penentuan responden dilakukan menggunakan metode *random sampling* dengan *sampling frame* seluruh peserta pelatihan pada beberapa pelatihan yang telah diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Pertanian Jambi pada periode Januari-Maret 2019. Beberapa pelatihan yang dijadikan contoh dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1 Daftar pelatihan di Balai Pelatihan Pertanian Jambi periode Januari-Maret 2019

No	Nama Pelatihan	Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Asal peserta
1	Pelatihan Teknis Budidaya Buah Naga bagi Penyuluh Pertanian	12 s.d 18 Februari 2019	30	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau dan Jambi
2	Pelatihan Teknis Budidaya Jamur bagi Penyuluh Pertanian	12 s.d 18 Februari 2019	30	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau dan Jambi
3	Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Bagi Penyuluh Pertanian Swadaya	29 s.d 4 Februari 2019	30	Prov Jambi
4	Pelatihan Teknis Budidaya Kelapa Sawit bagi Penyuluh Pertanian	12 s.d 18 Maret 2019	30	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau dan Jambi

Data yang dianalisis merupakan data primer berupa data karakteristik seperti jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan pelatihan yang pernah diikuti serta daftar nilai *pre-test* dan *post-test* peserta pelatihan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan analisis deskriptif dalam rangka untuk mendukung dan memberi makna data kuantitatif. Analisis deskriptif tersebut digunakan dalam mengklasifikasikan karakteristik responden penelitian. Metode kuantitatif yang digunakan adalah analisis statistik uji normalitas dan uji t untuk dua sampel berpasangan (*paired sample t test*).

Pada penelitian ini dilakukan observasi awal melalui *pre test* dan observasi akhir melalui *post test*. Hal tersebut dimaksudkan agar peneliti dapat melihat perubahan yang terjadi saat setelah responden mengikuti pelatihan. Dengan kata lain, pada penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap responden mengenai apakah setelah mengikuti pelatihan mengalami penurunan, sama atau peningkatan kompetensi. Melalui hasil *pre test* dan *post test* tersebut kemudian dilakukan analisis statistik uji t sampel berpasangan pada rata-rata masing masing hasil *pre test* dan *post test* responden. Namun sebelum melakukan uji beda, data *pre test post test* diuji normalitasnya. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak. Kriteria yang digunakan adalah jika nilai signifikansi atau *Asymp. Sig.* > 0.05 maka dapat diartikan data terdistribusi secara normal, sebaliknya apabila nilai *Asymp. Sig.* < 0.05 maka data tidak terdistribusi secara normal.

Data yang telah menyebar normal dilakukan pengujian menggunakan uji t untuk dua sampel berpasangan. Santoso (2003) dalam Desky (2013) menyatakan bahwa Uji T dua sampel yang berpasangan diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Hipotesis (H1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan nyata antara rata-rata pre test dan post test responden penelitian. Adapun asumsi dalam pengujian hipotesis adalah jika nilai sig. (*2-tailed*) < 0.05 atau t hitung $> t$ tabel, maka H_0 ditolak dan dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan antara kedua rata-rata tersebut. Sebaliknya apabila nilai sig. (*2-tailed*) > 0.05 atau t hitung $< t$ tabel maka terima H_0 atau tidak terdapat perbedaan antara kedua rata-rata tersebut. Analisis *paired sample t test* tersebut dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 21.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Peserta Pelatihan

Karakteristik peserta pelatihan yaitu berbagai persepsi orang-orang yang dilatih tentang karakteristik-karakteristik lingkungan pelatihan dan pekerjaan yang mempengaruhi keyakinan mereka untuk bisa menerapkan hasil-hasil pelatihan pada pekerjaan (Jamaludin, 2012). Karakteristik peserta pelatihan merupakan unsur yang ada pada diri peserta, seperti kemampuan yang ditunjang oleh tingkat pendidikan, usia, dan pengalaman kerja peserta, kepribadian (yaitu keinginan berprestasi dari peserta dan motivasi yang mendukung keikutsertaan mereka dalam kegiatan pelatihan dan merupakan faktor penting dalam mempengaruhi keberhasilan transfer) (Hariyatie, 2005), jenis kelamin, keterlibatan dalam kelompok (Mardiyanto dan Prastuti 2009). Menurut Gita dan Sariyathi (2016) karakteristik peserta pelatihan berupa kepribadian yang dimiliki peserta pelatihan dapat mempengaruhi program pelatihan yang dirancang.

Responden penelitian merupakan peserta dari beberapa pelatihan yang diselenggarakan di Balai Pelatihan Pertanian Jambi periode Januari-Maret 2019 sejumlah 40 orang. Karakteristik responden peserta pelatihan meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pelatihan yang pernah diikuti. Berdasarkan jenis kelamin (Tabel 1), responden peserta pelatihan didominasi oleh laki-laki (57.5%), sementara sisanya (42.5%) berjenis kelamin perempuan. Lebih banyaknya laki-laki yang mengikuti pelatihan di Balai Pelatihan Pertanian Jambi diduga disebabkan laki laki memiliki waktu lebih untuk bekerja di luar rumah dibandingkan dengan perempuan yang memiliki kewajiban lebih dalam merawat anak dan rumah tangga (Moordiani dan I 2018).

Tabel 1 juga menunjukkan bahwa seluruh responden masuk ke dalam usia produktif yang didominasi oleh responden yang berusia muda (50%). Menurut Mardiyanto dan Prastuti (2016) usia produktif lebih cenderung memiliki sifat keinovasian dan motivasi yang tinggi dalam adopsi inovasi teknologi baru. Usia Produktif juga menguntungkan bagi pelaksana pelatihan karena peserta cenderung akan lebih aktif dan memiliki keingintahuan yang besar. Pada usia dewasa, seseorang telah memiliki kestabilan dalam mengelola pekerjaan, berkonsentrasi penuh dalam mencari penghasilan dan juga tergolong pada usia yang produktif (Kurnianingtyas, 2009).

Tabel 1 Karakteristik responden di Balai Pelatihan Pertanian Jambi periode Januari-Maret 2019

Characteristic	Number	Percentage
Jenis Kelamin		
a. Laki-laki	23	57.5 %
b. Perempuan	17	42.5 %
Usia		
a. 23-37 tahun (muda)	20	50 %
b. 38-48 tahun (dewasa)	8	20 %
c. >38 tahun (tua)	12	30 %
Pendidikan		
a. SLTP	5	13 %
b. SLTA	16	40 %
c. DIII	3	8 %
d. DIV/S1	16	40 %
Status pekerjaan		
a. Penyuluh Pertanian (PNS)	21	52,5 %
b. Penyuluh Pertanian (THL-TBPP)	9	22,5 %
c. Petani	10	25 %
Jumlah pelatihan yang pernah diikuti		
a. 0 kali	18	45 %
b. 1 kali	9	22.5 %
c. 2 kali	3	7.5 %
d. >3 kali	10	25 %

Berdasarkan tingkat pendidikannya, sebesar 40 % responden berpendidikan D4/S1 dan SLTA sisanya adalah SLTP (13%), dan D3 (8%). Pola pikir seseorang dalam memahami dan menyelesaikan suatu masalah akan dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Suhariyanto *et al.* (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tinggi rendahnya pendidikan akan berpengaruh terhadap adopsi inovasi teknologi, dimana semakin tinggi pendidikan umumnya mereka akan semakin cepat mengadopsi teknologi baru. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi efektivitas pelatihan karena akan mempermudah penerimaan materi pelatihan yang disampaikan (Moordiani dan I, 2018). Tingkat pendidikan formal tinggi membantu penyuluh dalam menyelesaikan tugas fungsi pokoknya, sehingga mempengaruhi kinerja penyuluh. Semakin baik pendidikan kinerja penyuluh pertanian makin tinggi (Arifianto, 2017).

Selain itu, Responden penelitian ini 52,5 % terdiri dari penyuluh (PNS), selanjutnya adalah THL-TBPP dan petani. Berdasarkan pelatihan yang pernah diikuti, terdapat sekitar

45% dan 22.5% responden masing-masing yang belum pernah dan 1 kali mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Pertanian Jambi. Besarnya proporsi responden yang belum pernah disebabkan karena wilayah kerja BPP Jambi yang terdiri dari 6 Provinsi yang membina penyuluh 9.286 dan Poktan, Gapoktan, dan P4S, sementara kesempatan untuk mengikuti pelatihan sangat terbatas. Hal tersebut berakibat pada kondisi kecilnya kesempatan penyuluh pertanian dan petani yang berada di wilayah binaan Balai Pelatihan Pertanian Jambi untuk bisa mendapatkan pelatihan setiap tahun secara merata.

Efektivitas Pelatihan

Hickerson dan Middleton (1975) dalam Putri (2016) mendefinisikan pelatihan sebagai proses belajar, tujuannya untuk mengubah kompetensi kerja seseorang, sehingga berprestasi lebih baik dalam melaksanakan pekerjaannya. Pelatihan dilaksanakan sebagai usaha untuk memperlancar proses belajar seseorang, sehingga bertambah kompetensinya melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikapnya. Pelatihan pada dasarnya dimaksudkan dalam rangka memperoleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang baik dalam melaksanakan pekerjaan.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya perubahan kompetensi diukur berdasarkan jawaban responden pada saat *pre test* dan *post test*. Evaluasi berupa pertanyaan seputar materi pelatihan diberikan sebelum materi pelatihan diberikan (*pre test*) dan setelah materi pelatihan selesai diberikan (*post test*). Hasil *pre test* dan *post test* ditunjukkan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2 Statistika deskriptif data nilai *pre test* dan *post test* peserta pelatihan

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std.Deviation
Post test	40	28.00	83.33	2474.82	61.8705	13.73905
Pre test	40	7.00	73.33	1413.48	35.3370	17.9105

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai minimum pada *pre test* sebesar 7.00, sedangkan nilai maksimum sebesar 73.33. Sementara itu, nilai minimum dan maksimum untuk nilai *post test* masing-masing sebesar 28.00 dan 83.33. Rata-rata nilai *pre test* sebesar 35.34, dengan standar deviasi sebesar 17.91. Sementara itu, rata-rata *post test* sebesar 61.87,

dengan standar deviasi sebesar 13.74. Hal tersebut mengindikasikan adanya peningkatan rata-rata kompetensi peserta pelatihan sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan.

Data *pre test* dan *post test* tersebut kemudian dilakukan uji normalitas. Hasil uji normalitas menggunakan software SPSS versi 21 disajikan pada Tabel 3. Berdasarkan uji normalitas menggunakan *Kolmogorc-Smirnov* menunjukkan bahwa baik nilai signifikansi *pre test* maupun *post test* lebih besar dari taraf signifikansi 0.05. Nilai *pre test* dan *post test* peserta pelatihan masing-masing sebesar 0.499 dan 0.588. Hal tersebut menyimpulkan bahwa terima H_0 , dimana H_0 adalah data tersebut telah terdistribusi secara normal. Kondisi tersebut merupakan syarat cukup untuk dilakukan pengujian hipotesis dengan *paired sample t test*.

Tabel 3 Hasil uji normalitas data pre test dan post test peserta pelatihan

Indikator	Nilai signifikansi		Taraf signifikansi	Kesimpulan
	<i>Pre test</i>	<i>Post test</i>		
Uji normalitas	0.499	0.588	0.05	Normal

Berdasarkan uji t test untuk sampel berpasangan menunjukkan nilai signifikansi kurang dari taraf signifikansi ($0.00 < 0.05$). Hal tersebut menyimpulkan bahwa tolak H_0 , yang berarti terdapat perbedaan nyata antara nilai rata-rata pre test dan post test responden. Dengan kata lain, kegiatan pelatihan yang diselenggarakan di Balai Pelatihan Pertanian Jambi efektif dalam meningkatkan kompetensi dari peserta pelatihan setelah mengikuti pelatihan.

Tabel 4 Hasil uji t sampel berpasangan

	T	Df	Sig. (2-tailed)
Pre test & post test	-10.875	39	.0000

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sebesar 50% responden merupakan peserta berusia muda, sementara sisanya masing-masing sebesar 30% berusia dewasa dan 20% berusia tua. Berdasarkan pendidikannya, mayoritas peserta pelatihan merupakan lulusan Strata 1/D4 dan SLTA (40%). Berdasarkan uji t mengindikasikan bahwa terdapat

perbedaan nyata antara nilai *pre test* dan *post test* dari peserta pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa metode pelatihan yang dilaksanakan di BPP Jambi telah mampu meningkatkan kompetensi peserta pelatihan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa diperlukan penelitian lanjutan mengenai dampak keikutsertaan peserta terhadap kinerja dari peserta pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Desky, H. 2013. *Efektivitas dan Manfaat Program Pembangunan Masyarakat Mulia Sejahtera (PMMS) (Studi di Kabupaten Aceh Utara)*. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 7(2): 343-362.
- Faqih, A, Dukat dan R. Susanti. 2015. *Efektivitas Metode Dan Teknik Penyuluhan Pertanian Dalam Penerapan Teknologi Budidaya Padi Sawah (Oryza Sativa L) Sistem Tanam Jajar Legowo 4:1 (Studi Kasus Di Kelompok Tani Silih Asih Desa Ciomas Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan)*. J. Agrijati.
- Putri, I. W. 2016. *Pengaruh Pelatihan Non Teknis Terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian BP4K di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi*. Sekolah Pascasarjana IPB [Tesis]. Bogor: IPB.
- Soenaryo, Rachman. 2014. *Studi Deskriptif Pelatihan Karyawan pada PT. Graha Cendana Abadi Mitra*. AGORA. 2(1): 1-11
- Sumardjo, 2008. *Penyuluhan Pembangunan: Pilar Pendukung Kemajuan dan Kemandirian Masyarakat Dalam Pemberdayaan Manusia Pembangunan yang Bermartabat*. Sydex Plus. Bogor.
- Hutchins, Holly M. 2009. *In the Trainer's Voice : A Study of Training Transfer Practices. Performance Improvement Quarterly*, pg. 69.
- Jamaludin. 2012. *Meningkatkan Dukungan Atasan Melalui Pengembangan Komunikasi Untuk Memperbaiki Transfer Of Training Pada Instansi Pemerintah 'X'*. Tesis Fpsi UI.
- Gita, I Gusti Ayu Agung Aspirila Rona, dan Sariyathi, Ini Ketut. 2016. *Pengaruh Lingkungan Kerja, Self-Efficacy, dan Karakteristik Peserta Pelatihan Terhadap Transfer Pelatihan pada Karyawan Pt. Indonesia Power*. E-jurnal Manajemen Unud, Vol 5:7. 4602-4629. ISSN : 2302-8912

- Mardiyanto, T.C dan T.R. Prastuti. 2016. *Efektivitas Pelatihan Teknologi Budidaya Bawang Putih Varietas Lokal Ramah Lingkungan dengan Metode Ceramah di Kabupaten Karanganyar*. Jurnal Agraris 2 (1) : 61 – 68.
- Hariyatie, Nira. 2005. *Analisis Pengaruh Input Pelatihan Terhadap Pembelajaran Dan Generalisasi : Studi Kasus Pelatihan Manajemen Keuangan Pengusaha Kecil*. INASEA, Vol. 6:1. pp : 11-26.
- Rivai, Veithzal & Sagala, Ella Jauvani. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia (cet.13)*, Jakarta:PT Bumi Askara.
- Arifianto, S, S. Satmoko, B.M. Setiawan. 2017. Pengaruh Karakteristik Penyuluh, Kondisi Kerja, Motivasi Terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian Dan Pada Perilaku Petani Padi Di KabupatenRembang. *J.Agrisociomics* 1(2): 159-173.
- Suhariyanto, Guntoro, S dan Rinaldi, J. 2009. *Kelayakan Ekonomi Model Integrasi Usahatani Kopi-Kambing di Kabupaten Buleleng*. Prosiding Seminar Nasional Inovasi Untuk Petani dan Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian. Balai Pengkajian Pertanian, Jawa Timur. Malang.
- Kurnianingtyas. 2009. *Penerimaan Diri pada Wanita Bekerja Usia Dewasa Dini Ditinjau dari Status Pernikahan*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UMY.
- Moordiani, R, I Noviani, C. 2018. Prosiding Seminar Nasional Dalam Rangka Dies Natalis UNS Ke 42 Tahun 2018 “peran Keanekaragaman Hayati untuk Mendukung Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia”. Vol 2:1. E-ISSN: 2615-7721.

KONSEP DIKLAT PENYULUH DAN PELAKU UTAMA PERTANIAN YANG SINERGIS DAN KOLABORATIF

Hery Bachrizal Tanjung^{1*}, Fuad Madarisa¹

¹ Program pascasarjana Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat

*Email : hbtanjung@agr.unand.ac.id; hbtanjung25@yahoo.com; fmadarisa@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan tidak boleh meremehkan dan mengabaikan kualitas SDM dan solidaritas sosial para pelakunya. Sebab negara menjamin kehidupan yang layak bagi rakyatnya. Maka, kualitas SDM dan solidaritas sosial dapat dibina dan difasilitasi melalui UPT Diklat untuk penyuluh dan pelaku utama. Tujuannya untuk meningkatkan mutu dan kompetensi pelaku pembangunan tersebut. Untuk itu ditawarkan pendekatan pendidikan dan pelatihan yang sinergis dan kolaboratif dalam perspektif pembangunan pedesaan dan penyuluhan berkelanjutan di Sumatera Barat. Hal ini ditempatkan sebagai UPT Diklat pada Bakorluh tahun 2015. Meski tidak sempat untuk diwujudkan dalam bentuk pembentukan lembaga/ organisasi, karena terbentur peraturan, sebagai naskah akademis, konsep itu tetap relevan untuk dikaji bersama.

Kata kunci; UPT Diklat BPP, penyuluhan pertanian, pelatihan sinergis dan kolaboratif

PENDAHULUAN

Kondisi objektif dan lingkungan strategis pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan (termasuk di dalam sub-sektor perkebunan dan peternakan) berubah dengan cepat. Beberapa hal menyumbang pada dinamika perubahan itu; pengaruh iklim global, tindak lanjut pergeseran kebijakan publik, tuntutan kondisi teknis, dan syarat minimal kegiatan ketiga sektor dalam suatu kawasan. Untukantisipasi dan menyiasati situasi, maka kompetensi pelaku utama (petani, pekebun, peternak, petambak, nelayan, dan masyarakat sekitar hutan) dan pelaku usaha mesti pro-aktif, kreatif, dan peduli. Jadi, orientasi pengembangan kapasitas pelaku dan institusi pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan ialah mencapai syarat mutu itu. Hal ini menjadi tugas pokok dan fungsi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, perikanan dan kehutanan, (Bakorluh).

Orientasi perbaikan kompetensi pelaku utama dan pelaku usaha serta kinerja institusi pelaku pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan ada tiga. *Pertama*, mencegah terjadinya kondisi agar tidak sampai dibawah ambang batas toleransi kelangsungan aktivitas pembangunan. *Kedua*, mengatasi resiko keadaan yang tidak cocok lagi untuk menjalankan pembangunan. *Ketiga*, bersenyawa terhadap kondisi kritis yang ada, dengan tekad melakukan apa saja yang masih bisa. Jadi, ketiga opsi ini bermuara pada kebutuhan kinerja institusi dan kompetensi pelaku utama dan pelaku usaha serta pihak yang terkait untuk menjaga pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan.

Untuk maksud itu dilakukan satu kajian akademis. Ruang lingkup kajian mencakup pengertian, tujuan dan mekanisme perbaikan kompetensi pelaku utama dan pelaku usaha pada pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan dengan ketentuan, sebagai berikut:

1. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.

Panakiak pisau sirauik; Panungkek batang Lintabung; Satitiak jadikan lauik; Sakapa jadikan gunuang; 'Alam takambang jadi guru. Uraian ini merupakan **landasan filosofis** untuk pengembang kompetensi penyuluh dan pelaku pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di Sumatera Barat. Kemampuan menempatkan alam yang luas dan berkembang serta pengalaman menjadi sumber pembelajaran, merupakan esensi proses perbaikan mutu.

Kapasitas mendayagunakan filosofi alam berkembang menjadi guru membutuhkan beberapa kecakapan. *Pertama*, kearifan untuk mampu membaca yang tersirat terhadap situasi dan kondisi serta lingkungan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan. Hal ini disertai dengan kemampuan merumuskan tindak pencegahan, mengatasi, dan menggunakan segala potensi yang tersedia.

Kedua, kapasitas membaca yang tersurat, sistematis, jelas dan rinci. Kemampuan ini diikuti dengan kepedulian dan cakupan jaringan kerja untuk memberi tanggapan terhadap kebutuhan pembangunan yang jitu. Oleh karena, aktivitas pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan perlu 'sinkron' antara satu unit, komponen, dengan ketersediaan alat serta bahan, yang kerap justru dikendalikan oleh pihak yang berbeda.

Ketiga, kreatifitas membuka kesempatan ditengah kesempitan yang terjadi sesuai kondisi lokalnya. Kompetensi untuk menjaga agar pertanian, perikanan dan kehutanan

dapat bertahan. Kemudian memenuhi kebutuhan bahan pangan dan upaya perbaikan tingkat kesejah-teraan pelaku utama dan pelaku usaha. Jadi landasan filosofisnya, ialah ‘alam takambang jadi guru’. Atau pembelajaran, pendidikan dan latihan yang interaktif dengan potensi lingkungan lokalita yang tersedia, dengan kemampuan membaca yang tersirat dan tersurat secara kreatif.

Secara sosiologis, masyarakat Sumatera Barat umumnya masuk dalam kategori agraris; walaupun sebenarnya juga memiliki bentangan garis pantai yang cukup panjang menandakan luasan laut yang tersedia serta belantara hutan yang memadai. Kedepan, sebagian besar kondisi masyarakat tetap bersandar pada produksi dari rantai usaha pertanian, perikanan dan kehutanan. Meskipun juga sudah ada yang mengalami variasi dan perubahan bentuk produknya sepanjang rantai nilai yang ada. Buktinya, sawah, ladang, kebun, hutan, sumber air, malah sampai kepasar masih dominan sebagai hak ulayat rakyat (*common property*).

Ketika ada pengenalan bioteknologi dan hak privasi, sosio-masyarakat tetap mempertahankan adat dan budaya yang tidak lapuk kena hujan, dan tidak lekang lantaran panas. Nilai tambah dari bio-teknologi terdistribusi melewati donasi, wakaf, dan bantuan, termasuk melalui jalur nilai matrilineal. Memang ada orientasi dan daya tarik kepada dinamika usaha ekonomi kapitalisme, namun nilai nilai budaya Minangkabau, masih kukuh bertahan untuk tidak masuk dalam ranah kemiskinan absolut.

Kemudian, akses pada sumberdaya milik bersama sebagai basis aktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan tetap menjadi tumpuan. Introduksi kredit dan bioteknologi – yang memang perlu kecocokan kompetensi sumberdaya manusia pelaku utama dan pelaku usaha – ternyata tidak banyak merubah situasi dan kondisi sosiologis masyarakat. Intinya, boleh ada yang berubah, namun tidak dalam perspektif sosiologis yang merujuk kepada adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah’. Misalnya kredit peternak tidak perlu lagi agunan. Jadi, kondisi sosiologis masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha yang kukuh bertahan, meski ada terpaan, menjadi basis untuk mengembangkan kompetensi pelaku utama dan pelaku usaha.

Secara yuridis, penumbuhan UPT Diklat Bakorluh, dimungkinkan dengan sejumlah alasan yaitu: *Pertama*, Undang Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Peraturan ini memberi pilihan kepada pelaku utama dan

pelaku usaha untuk mengakses informasi dan data teknologi. Kemudian, mewajibkan lembaga penyuluhan memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha. Pengakuan tiga pelaku ini menuntut kearifan dan praktek penyuluhan dan pembelajaran yang kolaboratif, sinergis serta cocok dengan kebutuhan lokal.

Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota; serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, yang salah satu pasalnya mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah diperkenankan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) secara selektif sebagai pelaksana teknis tertentu dari suatu OPD (Dinas dan Badan) untuk kepentingan daerah. Ketentuan ini kemudian diperjelas dan diatur lebih rinci oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007.

Ketiga, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2013, tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga lain, khususnya bab V pasal 10 dinyatakan, Sekretariat Bakorluh (Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, perikanan dan kehutanan) merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi kepada Bakorluh. Pasal 11 ayat (2) huruf (e) dan huruf (f) dari Perda itu menyebutkan untuk melaksanakan tugas pokok Sekretariat Bakorluh menyelenggarakan fungsi pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta. Selanjutnya fasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Dengan demikian, Sekretariat Bakorluh wajib melaksanakan peningkatan kapasitas SDM penyuluh PNS, pelaku utama dan pelaku usaha, penyuluh swasta, sekaligus mengembangkan kelembagaannya.

Keempat, rincian pengertian istilah yang terkait dengan penumbuhan dan pengembangan UPT Diklat Bakorluh sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 120/2014 tentang pendidikan dan pelatihan serta kompetensi pelaku utama dan pelaku usaha. Permentan ini telah menjabarkan mekanisme penyelenggaraan diklat. Sebagian istilah yang disebutkan di dalamnya cocok dengan kepentingan UPT itu sendiri, seperti: (a).Pendidikan adalah proses pembelajaran yang terencana dan terstruktur untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam rangka pengembangan

kompetensi. (b). Pelatihan adalah kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan kompetensi kerja pada tingkat keterampilan atau keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pekerjaan. (c). Permagangan adalah salah metode pelatihan yang diselenggarakan dalam situasi nyata dibawah bimbingan pelaku utama dan pelaku usaha yang lebih berpengalaman, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. (d). Bimbingan lanjutan adalah suatu kegiatan bimbingan untuk membantu purnawidya menerapkan pengetahuan, sikap positif dan keterampilan yang dipelajari selama pelatihan pada situasi nyata tempat mereka berusaha.

2. Fakta empiris

Realitas pembangunan pertanian, perikanan, kehutanan, peternakan, dan perkebunan Sumatera Barat memberikan dua kondisi yang berbeda. Khususnya antara usaha pertanian, perikanan dan kehutanan rakyat dan usaha besar yang komersil. Walaupun keduanya dapat memenuhi konsumsi dalam dan luar propinsi, malah luar negeri, tetapi usaha pertanian, perikanan dan kehutanan rakyat umumnya kebanyakan belum tersentuh teknologi pengolahan. Sedangkan hasil dari usaha besar cenderung keluar sebagai bahan setengah jadi. Kondisi ini menempatkan pelaku utama dan pelaku usaha sebagai tiada opsi, dengan struktur *'price taker'* yang perlu perbaikan.

Perhatikan produksi dan distribusi tanaman pangan, sayuran dan hortikultura. Simak produksi perikanan dan peternakan. Memang, ada produk rendang dan kuliner yang piawai dan terkenal, tapi perlu upaya terus-menerus untuk mempertahankannya. Ada pula produksi semen beku sapi dan kerbau, namun pemasarannya terkendala dari persaingan kebijakan nasional.

Hasil perkebunan seperti gambir, kulitmanis, coklat, kelapa sawit, dan hasil hutan memang masih tersedia. Cuma, pelaku utama tetap berada pada posisi lemah dan kurang berdaya berhadapan dengan struktur pasar. Kedepan hendaknya komposisi hasil pertanian, perikanan dan kehutanan semakin beragam dengan pembukaan kebun diperbatasan propinsi. Hanya saja produk perkebunan rakyat cenderung kurang beragam yang bakal melemahkan daya tawar pelaku utama.

Pengenalan pertanian terpadu semisal integrasi sapi dengan sawit, tumpang sari tanaman pangan, pemanfaatan sumberdaya air, menambah efisiensi usaha. Buat sementara bencana alam dari pemanfaatan sumberdaya air masih memberi peluang kepada produksi. Akan tetapi dalam jangka panjang bencana justru bisa berasal dari wilayah ini. Simak, gerak usaha non-pertanian sekitar daerah sumberdaya air, seperti aktivitas penambangan “sirtukil” dan emas dialiran sungai yang menghancurkan tata kehidupan perikanan dan pertanian tanaman pangan. Pengalihan fungsi sumberdaya air dan lahan untuk kepentingan non-pertanian dan perikanan menambah tajamnya kompetisi mempertahankan produksi dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha.

Kesemua fakta empiris semakin mempertegas pentingnya upaya peningkatan kualitas dan kompetensi SDM penyuluh, para pelaku utama dan pelaku usaha. Baik sebagai fungsi produsen, pemasaran, dan juga sebagai penyuluh swadaya, serta penyuluh swasta. Caranya melalui program dan kegiatan pendidikan latihan yang berkelanjutan pada banyak aspek; pra-produksi, produksi, pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hasil.

Masalah dasar untuk menumbuhkan UPT Diklat Bakorlu pada Sekretariat Bakorlu Sumatera Barat ialah, *ditengah liberalisasi pelaku yang sedang berlangsung deras ini, bagaimana upaya mengatasi kesenjangan kualitas, kapasitas dan kompetensi penyuluh serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka menunjang pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan secara terpadu serta sesuai dengan potensi lokal*. Pada satu sisi terjadi diseminasi teknologi untuk meraih nilai tambah usaha pertanian, perikanan dan hasil hutan non kayu, dengan dukungan kinerja kelembagaan yang memadai. Namun dilain pihak, penyuluh serta pelaku utama dan pelaku usaha mesti menikmati kesejahteraan dari jerih payah usahanya secara fair. Maka, ada sejumlah masalah; *Pertama*, identifikasi kebutuhan perbaikan kompetensi penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha yang bisa mengatasi masalah. Kemudian berada pada arah yang benar menuju target program pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan. Selanjutnya konsistensi ukuran keberhasilan paket diklat yang mengisi kesenjangan kompetensi penyuluh serta pelaku utama dan pelaku usaha. Akhirnya ketepatan mengatasi masalah sesuai dengan ruang lingkup dan tuntutan teknis pertanian, perikanan dan kehutanan itu sendiri.

Kedua, penerapan paket diklat dengan suasana kondusif yang memungkinkan untuk menyelenggarakan pendekatan pendidikan orang dewasa. Arahnya ialah penyelesaian

masalah, melalui petikan peajaran dan hikmah dari pengalaman, yang diraih secara kreatif, sadar, peduli dan bertanggungjawab. Ada jalinan optimal, sinergis, dan kolaboratif diantara para pelaku yang menyumbangkan kemampuan, jejaring kerja, dan komitmen. Bentuk kontribusi lain ialah penyediaan alat alat, bahan, metode, sarana praktek dengan sumberdaya optimal untuk mendukung diklat.

Ketiga, persoalan pemantauan dan evaluasi (monev) penyelenggaraan diklat dalam bentuk output (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat) dan impact (dampak). Monev juga bisa disimak dari aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Kemudian, umpan balik pada ukuran keberhasilan yang disusun ketika merencanakan diklat sesuai identifikasi kebutuhan program. Sehingga, monev berguna untuk memperbaiki paket diklat berikutnya.

Keempat, secara eskternal OPD terkait dengan fasiltasi pembangunan pertanian belum optimal menyediakan fasiltas selevel UPTD Diklat. Akibatnya kementerian yang tugas dan fungsinya berhubungan dengan pelatihan penyuluh tidak dapat mengalokasikan dana pelatihan, baik melalui DAK dan tugas pembantuan.

3. Tujuan, keluaran dan ruang lingkup

Tujuan penumbuhan UPT diklat P2K ialah *memfasilitasi perbaikan kesenjangan kompetensi penyuluh serta pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan*. Pertimbangan memperbaiki kesenjangan kompetensi adalah: (1) pergeseran orientasi penyuluh dari monopoli Pemda kepada beragamnya kebutuhan dan karakter pelaku sasaran, (2) watak aktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan yang amat berbeda antara satu lokasi dengan yang lainnya, (3) orientasi, tujuan dan jenis usaha pertanian, perikanan dan kehutanan yang berlainan, (4) budaya dan nilai nilai yang dianut oleh penyuluh serta pelaku utama dan pelaku usaha yang khas, (5) perkembangan dan kebutuhan bioteknologi serta dukungan dari lembaga. Jabaran lebih lanjut dari hal di atas adalah:

a. Tujuan

Penumbuhan UPT Diklat Bakorluh bertujuan untuk:

1. Menjadi rumah pertemuan para pelaku penyuluhan (penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta) untuk berkontribusi menyiapkan input dan bahan pembelajaran (dan diklat) untuk mengatasi diskrepansi kompetensi dan kapasitas para penyuluh serta pelaku utama dan pelaku usaha.
2. Menjadi rumah pertemuan staf dari SKPD lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan secara horizontal dan vertikal tingkat propinsi untuk memberikan input guna memperkaya kompetensi penyuluh serta pelaku utama dan pelaku usaha.
3. Menjadi rumah pertemuan fungsional yang kreatif untuk proses akselerasi bagi perbaikan kompetensi dan kapasitas penyul- serta pelaku utama dan pelaku usaha.
4. Menghasilkan paket diklat yang kreatif dan solutif sesuai dengan proses identifikasi kebutuhan masing masing lokasi, jenis dan tujuan usahanya.
5. Menyelenggarakan paket diklat bagi penyuluh serta pelaku utama dan pelaku usaha secara professional agar (a) *terampil secara teknis dan administratif*, (b) *mempunyai integritas* dan (c) *mempunyai kepedulian*.

b. Keluaran

Bertolak dari basis kerjasama sinergis atau kolaborasi pelaku kegiatan penyuluhan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan, maka keluaran UPT Diklat Bakorluh Sumatera Barat ialah:

1. Paket dan modul diklat yang secara terpadu dan sesuai dengan ciri khas daerah serta komoditas yang mampu meraih tujuan dan mengatasi masalah pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan Sumatera Barat
2. Peserta diklat mewakili pelaku pembangunan pertanian, perikanan dan kehutananserta perdesaan pada umumnya yang meningkat kompetensinya serta cakap melaksanakan program pembangunan pertanian, perikanan dan kehutananyang berke-lanjutan.

3. Gaya dan suasana pendidikan dan pelatihan yang kreatif dengan membina jejaring kerja dan komunikasi sampai pada pelayanan, proses magang dan penerapan pelatihan.

c. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup kajian akademis merupakan cakupan untuk merinci tugas pokok dan fungsi UPT Diklat Bakorluh Sumatera Barat. Merujuk kepada Permentan Nomor 120/2014 tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh serta pelaku utama dan pelaku usaha terdiri dari beberapa aspek. Rinciannya ialah pelatihan produksi, pengolahan dan pemasaran produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan serta peternakan dan kesehatan hewan. Kemudian, serta pengembangan dan penguatan dinamika kelembagaan dan kepemimpinan, keterampilan komunikasi dan pengembangan jaringan mitra.

METODE KAJIAN

Sejumlah tahapan kerja untuk menyelesaikan dokumen kajian akademis penumbuhan UPT Diklat Bakorluh ini, terdiri dari:

1. Penjelasan lingkup pekerjaan menyusun kajian akademis. Tujuannya untuk memahami batasan dan sifat pekerjaan. Hasilnya tersedia kerangka acuan kerja (KAK) sebagai pedoman melaksanakan kegiatan.
2. Penyepakatan administrasi pelaksanaan pekerjaan. Tujuannya untuk memastikan proses dan keluaran pekerjaan. Hasilnya tersedia kontrak kerja, sebagai dasar sah pelaksanaan pekerjaan.
3. Pertemuan anggota tim teknis. Tujuannya untuk memantapkan pemahaman pekerjaan. Hasilnya ialah terjadi pengertian job description yang ditindaklanjuti tim pelaksana.
4. Pengumpulan data sekunder. Tujuannya menghimpun informasi yang cocok bagi penyusunan kajian akademis. Hasilnya tersedia data tertulis tentang kondisi eksisting dan kebijakan terkait dengan pelatihan, dan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di Sumatera Barat.

5. Pengumpulan data primer. Tujuannya menghimpun data dari pelaku usaha, pelaku utama dan pengambil kebijakan. Hasilnya informasi tersedia melalui (1). Diskusi mendalam dengan pelaku utama dan pelaku usaha dan pengambil kebijakan; (2). Diskusi kelompok terfokus dengan pelaku utama dan pelaku usaha dan penyuluh dan (3). Kunjungan ke lokasi usaha.
6. Pengolahan data primer dan sekunder. Tujuannya untuk menyusun data agar bisa diambil makna dan implikasinya. Caranya dengan memilah dan memisahkan data sesuai outline dan tujuan penyusunan kajian akademis.
7. Penulisan draft kajian akademis dan peraturan gubernur. Tujuannya menghasilkan satu draft dokumen kajian akademis untuk mendukung peraturan gubernur tentang penumbuhan satu UPT Diklat Bakorluh Sumbar.
8. Pembahasan draft kajian akademis dengan para pihak terkait. Tujuannya supaya draft tersosialisasi dan menerima masukan yang bernas untuk perbaikan kajian akademis ini.
9. Perbaikan kajian akademis sebagai laporan akhir. Tujuannya memastikan masukan perbaikan dari diskusi masuk kedalam dokumen. Sehingga, draft kajian akademis cocok pengalaman dan pemahaman para pihak terkait.
10. Perbanyak dan menyerahkan laporan akhir kajian akademis kepada sekretariat Bakorluh Sumatera Barat. Tujuannya untuk memenuhi aturan kontrak penyelesaian pekerjaan. Hasilnya tersedia dokumen kajian akademis dan peraturan gubernur tentang penumbuhan satu UPT Diklat BakorluhSumbar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Diklat dalam perspektif pembangunan pedesaan dan penyuluhan berkelanjutan

Pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan serta pedesaan merupakan dua sisi dari satu mata uang koin. Fungsi kedua kategori pembangunan itu tidak hanya boleh fokus menyediakan bahan pangan, melainkan juga mengurangi angka kemiskinan dan perbaikan mutu kehidupan keluarga. Persoalan pembangunan pedesaan juga semakin melebar, seperti; penyelesaian sengketa, akses pada sumberdaya, jaminan pasokan air dan pangan serta

dampak dari perubahan iklim. Semua persoalan perlu penyelesaian jitu yang butuh kompetensi tertentu secara kreatif.

Upaya meraih kompetensi dan menelorkan kreatifitas untuk mengatasi persoalan tersebut, tiada pilihannya, kecuali melalui pendidikan dan latihan. Uniknya, Sumatera Barat memiliki ciri khas sendiri berupa dominasi asset milik bersama (*common property*) dan nilai-nilai matrilineal atau garis keturunan ibu. Kompetensi tersebut meliputi perbaikan produktifitas, peningkatan daya lentur terhadap tantangan perubahan dan krisis, fasilitasi perbedaan gaya hidup dan pengendalian resiko bencana. Pada intinya ialah persiapan keterampilan untuk bertahan hidup. Jadi, pendidikan dan pelatihan merupakan esensi bagi pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan dan pedesaan Sumatera Barat.

Dalam kaitan itu, secara konsepsional, penyuluhan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan boleh disebut sebagai nama lain dari pendidikan dan latihan pembangunan pedesaan. Ketika pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan berkelanjutan menjadi opsi dalam pengambilan kebijakan, maka penyuluhan mesti berkelanjutan pula. Dengan itu, esensi pendidikan dan pelatihan semakin tepat sebagai proses untuk mewujudkan penyuluhan berkelanjutan dalam rangka pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan berkelanjutan.

2. Pembangunan pedesaan dan penyuluhan berkelanjutan

Aspek bekerlanjutan, baik untuk pembangunan pedesaan atau bagi penyuluhan, intinya meliputi perhatian untuk generasi masa depan. Bahwa anak cucu dan kemenakan mendapatkan jaminan akses pada aset dan sumberdaya guna melangsungkan kehidupan lebih baik. Mereka juga menikmati sumberdaya alam yang masih bermutu dan tidak terdegradasi kualitasnya.

Memang, daya tarik pemenuhan kebutuhan, peluang dan kendala dari pasar, tantangan persaingan kehidupan, dan berbagai krisis memicu perubahan. Kemudian, komitmen kebijakan yang memungkinkan, ada fasilitasi dan sumberdaya serta infrastruktur memadai juga akan lebih mempercepat perubahan. Belakangan ini jejaring kerja interaksi para pihak yang berbeda watak, peran serta pihak swasta, kemajuan dari pendidikan dan teknologi serta dukungan skim kredit menuntut aksi perubahan lebih deras.

Hanya saja kendala juga bisa menghadang dari dimensi kebijakan dan birokrasi, atau dari pasar, budaya dan perilaku, kapasitas infrastruktur, sumberdaya, serta saling keterkaitan dari semuanya. Dalam konteks semacam itu, komitmen keberlanjutan dan visi perwujudan pembangunan pedesaan dan penyuluhan yang khas Sumatera Barat yang membutuhkan kerjasama. Esensinya semacam kolaborasi yang sinergis dalam proses pendidikan dan latihan dari para pelaku yang berbeda wataknya. Secara bersama, para pihak bertekad mewujudkan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan, pedesaan secara berkelanjutan. Namun, bagaimana mekanismenya ?.

3. Pendidikan dan latihan (DIKLAT) yang kolaboratif

Mekanisme meraih pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan melalui penyuluhan yang berkelanjutan adalah melewati diklat kolaboratif yang sinergis diantara para pelakunya. Belakangan, kolaborasi tidak saja dibidang pendidikan dan latihan, tapi juga menjadi kecendrungan interaksi bidang pemerintahan dan dunia usaha.

Zarei dan Tavakkol (2012) menulis, bahwa kolaborasi belajar memiliki beberapa prinsip, seperti: (1) kesamaan tujuan dan hasil belajar bersama dari proses berbagi dalam kelompok. (2) kegiatan yang membina saling percaya, rencana bersama, dan mengerti tentang manfaat kelompok serta perilaku kerjasama. (3) adanya saling tergantung secara positif lantaran adanya tujuan bersama, melalui akuntabilitas pribadi, peran dan tekad untuk menyelesaikan tugas.

Kolaborasi belajar mengganti pola diklat, dimana pelatih menjadi fasilitator dan peserta berperan aktif dalam prosesnya. Peserta kurang mampu bisa lebih cepat mengerti tentang konsep melalui partisipasi dalam kelompok belajar. Pendekatan kolaborasi itu menguntungkan, lantaran berbasis pada kondisi sosial budaya lokal. Apalagi, kolaborasi itu memusat tidak hanya pada hasil melainkan justru juga pada proses belajar. Kolaborasi mendorong pengembangan pemikiran kritis dan kemampuan merenungkan hasil belajar sendiri. Oleh karena itu, kolaborasi belajar mampu mengaktifkan peserta menyiapkan diri mengha-dapi tantangan kehidupan.

Dari dunia usaha, kolaborasi merupakan opsi sesudah paket *outsourcing*. Intinya, kolaborasi membutuhkan strategi dan titik masuk dalam berusaha. Kemudian, memastikan

target, kepedulian karyawan, dan dukungan dari manajemen puncak. MacCormack, dkk (2007) menguraikan kolaborasi sebagai tindakan terbaik sebagai strategi pengembangan usaha.

Dari kalangan pemerintahan, Miles dan Trott (2011) menulis, walaupun berat untuk berbagi kuasa, kolaborasi lebih efektif dan bermakna. Sebab, kolaborasi memiliki tujuan bersama, pendekatan sistem, berbagi kewenangan dan menempatkan pelayanan sebagai pemicu perubahan. Donahue dan Zeckhauser (2006) menulis fungsi kolaborasi dipemerintahan, seperti menimbang harapan dan perbedaan efisiensi antara kinerja langsung pemerintahan dengan pemberian wewenang kepada pihak swasta, pada fungsi tertentu.

Dengan demikian, apa pengertian kolaboratif ?. Lai (2011) dan Anon (2010) merumuskan kolaborasi sebagai interaksi hubungan sepadan antara dua atau lebih lembaga untuk mengatasi persoalan bersama. Hubungan lembaga ini terkoordinasi baik dengan memasukkan aspek struktur, tekad, tanggungjawab, kewenangan dan jelasnya jalan menuju sukses. Aspek koordinasi mencakup berbagi sumberdaya dan penghargaan. Lai (2011) menambahkan bahwa kolaborasi ialah kesepakatan yang sepadan (*mutual engagement*) dari para pihak yang terkoordinasi untuk mengatasi masalah bersama. Simak Tabel 1. Anon (2010) menambahkan definisi kolaborasi, sebagai berikut.

“Collaboration is a mutually beneficial and well defined relationship entered into by two or more organisations to achieve common goals. This relationship includes a commitment to mutual relationships and goals, a jointly developed structure and shared responsibility; mutual authourity and accountability for success; and sharing of resources and rewards”. (Anon; 2010, halaman 1).

Tabel 1. Pengertian tentang kolaborasi

No	Kriteria	Uraian pendekatan kolaboratif
1	Pelaku	Dua atau lebih lembaga atau organisasi
2	Tujuan	Adanya konsensus atau kesepakatan bersama, meski bisa pula ada yang sendiri
3	Komitmen	Adanya hubungan kolaborasi, tujuan bersama, berbagi tanggungjawab, kewenangan, keterbukaan, jalan jelas menuju sukses, berbagai sumberdaya dan apresiasi.
4	Keuntungan	Lebih cepat meraih akses pada pelayanan
		Pengurangan tumpang tindih pelayanan
		Pengembangan kebijakan dan praktek baru
		Mengurangi kekhawatiran karyawan
		Meningkatkan mutu pemantauan dan dukungan para pihak
		Lebih efektif menggunakan sumberdaya yang terbatas

No	Kriteria	Uraian pendekatan kolaboratif
		<p>Pengambilan keputusan lebih baik</p> <p>Pesan yang konsisten dari semua pihak</p> <p>Memastikan kebutuhan para pihak tidak saling bertabrak</p> <p>Meningkatkan kapasitas memenuhi fasilitas dan sumberdaya dengan tepat waktu</p>
5	Syarat mutlak	<p>Adanya jaring komunikasi yang efektif dari tim kerja dalam membina dan memelihara hubungan kerjasama secara terbuka</p> <p>Adanya pemahaman pada beragam peran dan tanggungjawab dari para pihak</p> <p>Senantiasa memperbarui informasi tentang para pihak terkait</p> <p>Jelasnya aturan, proses pengambilan keputusan dan harapan pada peran satu pihak</p> <p>Adanya nilai nilai dan etika untuk kolaborasi yang diikuti oleh para pihak</p>
6.	Peran perorangan	<p>Mempelajari peran dan tanggungjawab instansi atau pihak terkait</p> <p>Memberi informasi peran dan tanggung jawab pada pihak yang berkolaborasi</p> <p>Memastikan informasi sampai untuk bisa menghadiri rapat</p> <p>Melakukan perenungan atau refleksi dan mengkaji ulang kepercayaan diri sendiri.</p>
7	Peran lembaga	<p>Mendorong staf memahami ruanglingkup kolaborasi dengan menghadiri rapat dan berperan aktif dalam berbagi pemahaman serta praktek terbaik.</p> <p>Memastikan efektifnya petunjuk, pihak yang dihubungi, kesamaan orang yang hadir, pemahaman pada instansi lain dan perannya, memasukan rapat dalam system manajemen para pihak terkait</p> <p>Menghargai pentingnya pelatihan bersama</p> <p>Pastikan adanya kontak person yang cakap</p> <p>Gunakan teknologi komunikasi telepon, internet untuk berbagi sumberdaya</p>
8	Peran pemda	<p>Pemda punya peran penting dalam kolaborasi pada aspek biaya dan sumber daya dukungan pegawai, pemakaian aset, pelayanan yang cocok dengan kebutuhan</p> <p>Perumusan dukungan aturan dan kebijakan dengan pertimbangan pada aspek berbagi informasi, rahasia, masalah pribadi.</p>
9	Kendala	<p>Saling percaya yang belum terbina lantaran kurangnya komunikasi</p> <p>Komunikasi tidak efektif membawa pada ketidaksiapan untuk berubah dan mengatasi konflik. Intinya saling percaya mesti dibina dengan bukti nyata berupa koordinasi, negosiasi, pengambilan keputusan dan bisa mengatasi masalah.</p>
10	Peran perorangan	Ketidak siapan untuk bekerja, berbagi informasi dan belajar memahami pihak lain

No	Kriteria	Uraian pendekatan kolaboratif
		Sulit dan tidak dapat diakses dengan bukti, peduli, tanggap dan respek.
11	Peran lembaga	System komunikasi berjalan tidak lancar antar pihak terkait
		Mestinya lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan peserta ketimbang masalah perbedaan watak antar kita.
		Tidak menggunakan bukti untuk memastikan masalah bisa diatasi
		Karyawan kurang bersemangat untuk bekerja kolaborasi
		Kurang optimis mengatasi tantangan pada peran baru yang mesti ada
		Kurang menggunakan data untuk memastikan biaya dan sumberdaya tersedia
12	Peran pemda	Kepemimpinan dan tekad yang kurang kuat dari pengambil keputusan
		Tidak adanya kepastian alur distribusi sumberdaya dan biaya
		Belum adanya prosedur pemantauan bersama dan koordinasi untuk mengatasi masalah yang muncul selama pelaksanaan kolaborasi
13	Faktor penentu	Watak peserta, watak tugas atau pekerjaan dan komposisi kelompok
14	Kesimpulan	Komunikasi adalah inti untuk berkolaborasi dengan berbedanya peran pihak terkait
		Bukti lapangan mesti menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dan menghindari kekeliruan yang tidak diduga
		Mengatasi kendala kolaborasi butuh kreasi dan strategi khusus ketimbang meremehkannya sebagai kerja sederhana.

Sumber: Diolah dari Lai (2011) Anon (2010) dan berbagai bahan (2015).

Bagaimana kolaborasi untuk proses pelatihan ?. Pemahaman pelatihan kolaboratif dapat disimak dari pengertian kolaborasi sebagai '*mutual engagement of participants in a coordinated effort to solve a problem together*' (Lai, 2011) tulisan Buckley dan Caple (2009) tentang pelatihan:

A planned and systematic effort to modify or develop knowledge/skill/attitude through learning experience, to achieve effective performance in an activity or range of activities. Its purpose, in the work situation, is to enable an individual to acquire abilities in order that he or she can perform adequately a given task or job and realize their potential (Buckley dan Caple; 2009: 9).

Dengan demikian pelatihan kolaboratif ialah upaya mengembangkan kompetensi peserta secara terencana dan sistematis melalui pengalaman belajar yang dikelola secara bersama oleh sejumlah pihak terkait. Akibatnya, pelatihan kolaboratif membutuhkan diversifikasi kompetensi, yang cocok dengan tuntutan pemikiran dan aplikasi pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan. Bagaimana fungsi diklat dalam pembangunan dan penyuluhan berkelanjutan ?.

4. Fungsi DIKLAT dalam pembangunan pedesaan dan penyuluhan berkelanjutan

Esensi pembangunan dan penyuluhan berkelanjutan adalah proses perubahan menuju pembelajaran (*learning*), yang berbeda dengan pengajaran (*teaching*). Proses belajar mesti menghasilkan tindak perubahan yang cenderung tidak formal dan dengan senang hati. Dalam konteks penyuluhan berkelanjutan terjadi transformasi dari pola ‘transfer teknologi’ kepada ‘pemberdayaan’ yang ditandai dengan diklat partisipatif. Perhatikan Tabel 2, kolom empat.

Tabel 2. Pelatihan dalam penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan.

No	Kriteria	Pelatihan untuk transfer teknologi	Pelatihan dan Magang partisipatif
1	2	3	4
1	Tujuan utama	Memindahkan teknologi	Memberdayakan dan memperkuat pelaku utama dan pelaku usaha
2	Analisa kebutuhan, prioritas pelaku utama & pelaku usaha	Pihak luar	Pelaku utama dan pelaku usaha dengan bantuan pihak luar
3	Isi / materi pelatihan	Perintah dan paket langkah kegiatan	Prinsip prinsip, metode dan sekeranjang pilihan pilihan
4	Menu pelatihan	(di) tetap (kan)	Sesuai dengan pilihan peserta
5	Perilaku pelaku utama dan pelaku usaha	Mendengar pesan, bertindak sesuai perintah menerima, menyesuaikan atau menolak paket kegiatan	Menggunakan metode, menerapkan prinsip dan menseleksi dari sejumlah pilihan penelitian
6	Hasil yang diharapkan pihak luar	Penyebaran adopsi paket pekerjaan	Pilihan pelaku utama dan pelaku usaha lebih luas dan kemampuan adaptasinya meningkat
7	Model utama	’dari penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha’	Dari pelaku utama dan pelaku usaha kepada pelaku utama dan pelaku usaha
8	Peran tenaga pelatih atau penyuluh	Guru dan pelatih	Fasilitator, peneliti dan penyedia serangkaian ’pilihan’

Sumber : FAO (2001)

Kemudian, pembelajaran untuk penyuluhan berkelanjutan mesti merubah tujuan, strategi, teori, kompetensi, untuk agribisnis yang profesional. Intinya ada empat landasan untuk menuju berkelanjutan : (1) sistem informasi yang mendorong daya tanggap terhadap kondisi lingkungan, (2) kerangka konsep mengenai proses bersiklus dari aneka aktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan, (3) kompetensi baru dalam mencermati berbagai resiko usaha agribisnis, dan (4) pengelolaan yang lebih sistematis dan tidak hanya aspek '*on farm*'.

Sehubungan dengan itu, fungsi diklat, bagi pembangunan pedesaan berkelanjutan sangat nyata. Khususnya pada perbaikan kualitas SDM, produktifitas, kompetensi bertahan hidup, dan keamanan bahan pangan. Secara rinci diklat saling berkait dengan jejaring kerja sosial, proses pengembangan teknologi, skim kredit, infrastruktur pedesaan dan modal usaha. Sebab, peserta diklat mengalami perbaikan kompetensi secara tidak formal. Maka, diversifikasi kecakapan yang mereka raih membekali daya tahan terhadap bencana, dan mengurangi resiko yang diterima.

5. Koordinasi, sinergi dan kolaborasi pengelolaan program diklat

Koordinasi, sinergi dan kolaborasi merupakan kerjasama antara para pihak terkait dalam menyelenggarakan diklat di UPT. Sesuai dengan permentan nomor 7 tahun 2015, kerjasama bisa dengan pihak dalam negeri atau luar negeri. Merujuk undang undang nomor 16 tahun 2006, tiga watak lembaga (pemerintah, swasta dan masyarakat) dapat bekerjasama.

Hanya saja yang penting diingat, prinsip dari kerjasama adalah saling memberi manfaat, menguntungkan dan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian, perikanan dan kehutanan serta meningkatnya kinerja. Kemudian juga, prinsip atas dasar persamaan kedudukan yang saling menguntungkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Untuk sinergi dan kolaborasi cenderung berlangsung pada tiga kategori lembaga swasta, masyarakat dan pemerintah. Oleh karena tiap lembaga mempunyai sifatnya sendiri, dan masing masing institusi memiliki kelebihan dan kekurangan. Sehingga sinergi dan kolaborasi merupakan sintesis untuk mendapatkan proses dan hasil optimal. Disini, tiap lembaga menyumbang kemampuan dan kompetensi berupa uang, tenaga/SDM, waktu,

lokasi/lahan, informasi, alat, teknologi, bahan bahan, metode, kebijakan dan tekad untuk sampai pada hasil.

Sinergi dan kolaborasi, oleh karena itu, adalah proses kombinasi dan belajar bersama yang berorientasi proses dan hasil. Sinergi dan kolaborasi adalah suatu keterpaduan sumberdaya yang efisien dan efektif, antar lembaga demi sebuah tujuan bersama. Sinergi dan kolaborasi memiliki tiga ukuran, yaitu :tepat, cepat dan hemat. (1) 'tepat' adalah tepat sasaran, tepat waktu dan tepat guna (efektif), (2) 'cepat' adalah efisiensi proses dan hasil dalam dimensi waktu,serta (3) 'hemat' adalah hemat biaya, tenaga, alat alat dan bahan serta fasilitas lainnya.

Bentuk bentuk aktivitas yang relevan dengan sinergi dan kolaborasi adalah : (a) integrasi waktu, (b) integrasi tempat, (c) integrasi peserta, pelatih, pelaku usaha, penyelenggaraan dan tenaga administrasi, (d) integrasi biaya, dan (e) integrasi kegiatan (alat, bahan, fasilitas, metode, hasil dan laporan). Terakhir, untuk sampai menghasilkan sebuah proses sinergi dan kolaborasi maka sejumlah hal perlu persiapan, seperti :

1. Komitmen para pengambil kebijakan pada tiap lembaga terkait untuk sebuah tekad mencapai tujuan bersama yang terumuskan secara bersama pula.
2. Pembentukan tim teknis pelaksana yang tangguh berbasis pada kompetensi dan semangat untuk bekerja secara total dalam mencapai tujuan.
3. Alokasi dukungan sumberdaya yang memadai secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna.
4. Keterbukaan proses, hasil dan komunikasi antara berbagai unsur terkait dimana kendala teknis dan administrasi bisa dirundingkan penyelesaiannya secara fleksibel.

6. Azas-azas Diklat dalam penyusunan norma hukum

UPT Diklat Bakorluh Sumbar mesti memegang sejumlah azas dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Beberapa azas tersebut adalah :manfaat, peduli, pemberdayaan, kolaboratif, profesional, efisien, transparan, dan bertanggung-jawab. Rincian azas meliputi:

1. UPT memberi pengalaman dan kesan yang baik dalam proses menyelenggarakan pelatihan dan magang.

2. UPT menggunakan pendekatan *andragogy*, *experiential learning*, interaksi partisipatif dan sistematis dalam melaksanakan pelatihan dan magang.
3. Fasilitator UPT profesional dalam menguasai materi atau subjek dan fokus untuk mencapai tujuan, termasuk menyimpulkan dan mengevaluasi proses pelatihan dan magang.
4. Fasilitator UPT mengetahui kemampuan dan latar belakang peserta dengan baik, yang menjadi dasar untuk mempersiapkan bahan, alat dan fasilitas pelatihan dan magang dengan seksama. Intinya, mereka mencermati dan memastikan fasilitas lokasi pelatihan dan magang memadai untuk mencapai tujuan.
5. Fasilitator UPT menerapkan keseimbangan antara teori, latihan dan praktek, sehingga menumbuhkan suasana pelatihan yang hidup, bergairah dan gembira. Intinya fasilitator mampu berkomunikasi yang berujung pada ketertarikan peserta dengan materi dan topik latihan.
6. Fasilitator mendorong peserta untuk pro-aktif dan kreatif dalam proses diklat. Kemudian menerapkan disiplin dengan tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat guna. Sehingga diklat dan magang memang benar dan nyata hasilnya (input-proses-output dan ukuran kinerjanya). Kemudian meneguhkan integritas, kepedulian dan pengetahuan serta keterampilan baru.
7. Peserta pelatihan dan magang menghasilkan visi dan rencana tindak lanjut diklat untuk diterapkan ditempat masing masing dengan sebaik baiknya.

7. Kelembagaan balai Diklat yang sesuai di sekretariat Bakorluh

UPT Diklat Bakorluh berada dibawah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) Sumatera Barat. UPT merupakan unit teknis untuk menyelenggarakan perbaikan kompetensi sumberdaya penyuluh serta pelaku utama dan pelaku usaha, juga SDM institusi pertanian, perikanan dan kehutanan. Posisi unit yang sesuai dengan fungsi UPT ini adalah setingkat dengan eselon III.

Lingkup kerja UPT ini mencakup dua aspek, yaitu *spasial dan fungsional*. Secara spasial (lokasi) UPT melayani seluruh daerah dalam propinsi Sumatera Barat. Sedangkan dari sisi fungsional lingkup pekerjaan UPT adalah pendidikan dan pelatihan serta

permagangan dalam sektor pertanian, perikanan dan kehutanan. Pengertian pertanian, perikanan dan kehutanan dalam arti dan makna luas yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan, serta perikanan dan kehutanan.

Teladan dari pendidikan dan pelatihan tersebut terdiri dari; pelatihan kepemimpinan dan manajemen termasuk pemberdayaan lembaga pelaku utama dan pelaku usaha dan manajemen usaha tani. Secara teknis ada pelatihan benih dan perbibitan, teknologi produksi atau budidaya; penanganan panen dan pasca panen; teknologi pengolahan dan pemasaran hasil. UPT juga melayani paket-paket pelatihan khusus lain yang sesuai dengan kebutuhan spesifik suatu wilayah.

Khusus untuk para penyuluh pada penyuluhan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan, beberapa aspek menjadi lingkup tugas UPT yaitu ;menyusun programa penyuluhan; menyiapkan materi penyuluhan; menggunakan media penyuluhan; menerapkan metode penyuluhan; mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan; meng-evaluasi dampak penyuluhan; melaksanakan pengkajian penyuluhan; dan melaksanakan jasa konsultasi agribisnis.

Akhirnya, untuk menunjang semua lingkup pekerjaan, fungsi UPT tersebut meliputi :

1. Mengidentifikasi berbagai kebutuhan *stakeholders* dalam kaitannya dengan persiapan dan **perencanaan program** penye-lenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi sumberdaya pelaku utama dan pelaku usaha dan penyuluh serta institusinya.
2. **Menyelenggarakan** paket **diklat** bagi penerima manfaat dan merumuskan tindak lanjut serta supervisi yang sesuai bidangnya.
3. Mempromosikan dan **membangun jaringan diklat** dengan para pihak terkait, sebagai identitas UPT untuk berperan dalam pengembangan SDM dan penguatan kelembagaan penyuluh dan pelaku utama pelaku usaha, serta ikutserta melakukan pemering-katan lembaga lembaga diklat terkait lainnya.

Memperhatikan semua uraian di atas, maka struktur organisasi yang sesuai adalah :

(a) Satu Kepala UPT, (b) Satu Sub-Bagian Tata Usaha dan Keuangan, (c) Satu Seksi Perencanaan Program dan Evaluasi, (d) Satu Seksi Penyelenggaraan Program, (e) Satu Seksi Pengembangan Kerjasama Kemitraan dan Kolaborasi.

KESIMPULAN

UPT Diklat Bakorluh yang mewujudkan konsep sinergis dan kolaboratif adalah suatu kebutuhan daerah untuk menjalankan teknis operasional secara efektif dan efisien sebagian fungsi Sekretariat Bakorluh Sumatera Barat. Khususnya dalam penyelenggaraan peningkatan pendidikan dan pelatihan serta permagangan bagi penyuluh serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan, untuk mendukung pembangunan daerah. Oleh karena itu direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah Sumatera Barat untuk membentuk UPT Diklat pada Sekretariat Bakorluh Sumbar dengan dasar Peraturan Gubernur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. 1995. *Sembilan Puluh Tahun Penyuluhan Pertanian di Indonesia*. dalam Dinamika dan Perspektif Penyuluhan Pertanian pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua. Prosiding Lokakarya 4-5 Juli 1995. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Altieri, Miguel dan Peter Rosset, 1999. Ten reasons why biotechnology will not ensure food security, protect the environment and reduce poverty in the developing world. *AgBioForum – Volume 2, Number 3 & 4 – 1999 – Pages 155-162*
- Anonimous. 2004. *Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta.
- Anonimous. 2006. *Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan*. Jakarta.
- Anonimous. 2007. *Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*.
- Anonimous. 2007. *Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah*.
- Anonimous. 2010. *Interagency Collaboration: Making it work. Lessons from the literature. Research to Practice Note*. NSW Human Service, Community Services. Sydney.

- Asosiasi Pemandu Latihan (APL), 1982. *Petunjuk Dasar Untuk Pemandu*. Divisi Produksi. Indonesian Society for Andragogy. Jakarta.
- Buckley, Roger dan Jim Caple. 2009. *The Theory and Practice of Training*. 6th ed. Kogan Page. London dan Philadelphia.
- Donahue, Jhon dan Richard Zeckhauser. 2006. Public-Private Collaboration, dalam Moran, Michael; Martin Rein dan Robert Goodin (eds.), *The Oxford Handbook of Public Policy*; Oxford University Press, Oxford. Halaman: 496-525.
- Hill, Catherine. 2006. *On Common Ground: A Joint Donor Concept on Rural Development*. *Global Donor Platform for Rural Development*, c/o Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) Adenauerallee 139-141, 53113 Bonn, Germany. www.donorplatform.org. Downloaded, Mei 26; 2009; 8:22 AM.
- Jarmie, M. Y. 1994. *Sistem Penyuluhan Pembangunan Pertanian Indonesia*. Disertasi Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor. (tidak diterbitkan).
- Juma, Calestous. 2005. Biotechnology in a Globalizing World: The Coevolution of Technology and Social Institutions. *BioScience*: Vol. 55, No. 3, pp. 265-272.
- Kilelu, Catherine; Laurens Klerkx, Cees Leeuwis dan Andy Hall. 2011. Beyond knowledge brokerage: An exploratory study of innovation intermediaries in an evolving smallholder agricultural system in Kenya. Maastricht Economic and social Research institute on Innovation and Technology (UNU-MERIT) email: info@merit.unu.edu.
- Lai, Emily. 2011. Collaboration: A Literature Review. Research Report. Always Learning, Pearson Research Report. <http://www.pearsonassessment.com/research>.
- Luijendijk, Jan dan Diego Velez. 2005?. Knowledge Networks for Capacity Building. A Tool for Achieving the MDGs. UNESCO-IHE Institute for Water Education P.O. Box 3015, 2601 DA Delft, the Netherlands.
- MacCormack, Alan; Theodore Forbath; Peter Brooks dan Patrick Kalaher, 2007. From Outsourcing to Global Collaboration: New Ways to Build Competitiveness. Harvard Business School Working Paper 07-079. Boston.
- Miles, M. B dan Huberman, A. M. 1984. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Sage Publication. London.

- Miles, Emily dan William Trott, 2011. Collaborative Working: How publicly funded services can take a whole systems approach. Institute for Government. London
- Peterlin, Marko. 2012. Policy coordination, territorial governance – towards a better development decisions. Institute for Spatial Policies. Attract-SEE Conference, 13 December 2012. Mestni muzej Ljubljana.
- Pretty, Jules. 2006. Agroecological Approaches to Agricultural Development. This paper is part of a series of contributions by Rimisp-Latin American Center for Rural Development (www.rimisp.org) to the preparation of the World Development Report 2008; Agriculture for Development. University of Essex; Department of Biological Sciences. jpretty@essex.ac.uk
- Rajalahti, Riikka. 2011. Agricultural Innovation System: An Investment Sourcebook. An overview. World Bank. Washington DC.
- Slamet, M. 2001a. *Menata Sistem Penyuluhan Pertanian menuju Modern*. Makalah dipersiapkan untuk Tim 12 Departemen Pertanian, Jakarta; lihat juga dalam Yustina, Ida dan Sudrajat, Adjat. 2003. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Penerbit IPB Press. Bogor.
- , 2001b. *Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian di Era Otonomi Daerah*. Makalah disajikan pada Seminar PERHIPTANI di Universitas Siliwangi Tasikmalaya 21 Oktober 2001.
- Spielman, David dan Regina Birner. 2007. How innovative is your agri-culture ?. A framework for designing an-agricultural innovation indicator system. International Food Policy Research Institute, A 6th Meeting of the AC on S&T, Wageningen, November 12-16, 2007
- Sumardjo. 1999. *Transformasi Model Penyuluhan Pertanian Menuju Pengembangan Kemandirian Petani*. Disertasi Program Pasca-sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor. (tidak diterbitkan).
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Tanjung, H. B. 2013. *Studi Interaksi Fungsional antar Komponen di dalam Penyuluhan Pertanian : Menuju Model Kelembagaan Penyuluhan Berkelanjutan di Sumatera Barat*. Draft Disertasi. Program Pascasarjana, Universitas Andalas. (tidak dipublikasi)
- Vorley, Bill. 2002. Sustaining Agriculture: Policy, Governance, and the Future of Family-based Farming. A Synthesis report of the colla-borative research project 'policies

that work for sustainable agri-culture and regenerating rural livelihoods. International Institute for Environment and Development 3 Endsleigh Street, London; e-mail: bookshop@iied.org

- Watts, J; R. Mackay, D. Horton, A. Hall, B. Douthwaite, R. Chambers, dan A. Acosta. 2003. *Institutional Learning and Change: An Introduction*. ISNAR Discussion Paper No.03-10, Oct 2003. Inter-national Service for National Agricultural Research (ISNAR). Downloaded; November 10; 2009; 5:59 AM.; <http://www.isnar.cgiar.org/>
- Wielinga, Eelke. 2000. *Rural Extension in Vital Networks : Changing Roles of Extension in Dutch Agriculture*. Paper presented at the 14th European Association of Extension Education (ESEE) Conference; Cracow Poland; September 1999. Journal of Inter-national Agricultural and Extension Education. Spring 2000.
- Zarei, AA dan M. Tavakkol, 2012. The Effects of Collaborative Versus Non-collaborative Massed and Distributed Presentation on the Comprehension and Production of Lexical Collocations. *The Journal of Teaching Language Skills (JTLS)* 4 (3), Fall 2012, Ser. 68/4. ISSN: 2008-8191. pp. 127-145.

**SEMINAR NASIONAL
PENYULUHAN, KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

TOPIK KEWIRAUSAHAAN SOSIAL

Daftar Halaman

No.	Judul & Peserta	Halaman
1.	KEWIRAUSAHAAN SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN AGROWISATA UNTUK MENSEJAHTERAKAN HIDUP MASYARAKAT DARI TENGGULAK <i>Lina Asnamawati</i>	676 - 694
2.	POTENSI PENGEMBANGAN EKONOMI PRODUKTIF DI DESA SAMBIREJO, KECAMATAN NGAWEN, KABUPATEN GUNUNGKIDUL <i>Ratih Ineke Wati</i>	695 - 704

KEWIRAUSAHAAN SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN AGROWISATA UNTUK MENSEJAHTERAKAN HIDUP MASYARAKAT DARI TENGGULAK

Lina Asnamawati ^{1*}, Jose Rizal ²

¹ Universitas Terbuka; ² Universitas Bengkulu

*Email: linaas@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

Kewirausahaan sosial diperuntukkan memajukan perubahan sistemik pada lingkungan sosialnya dengan cara mengubah perilaku dan pemahaman atau kesadaran orang-orang di sekitarnya. Peran serta masyarakat merupakan hal yang penting untuk memajukan sebuah objek wisata di suatu daerah, masyarakat yang terlibat dalam pembangunan akan memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan masyarakat. Agro wisata merupakan rangkaian kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi pertanian sebagai obyek wisata, baik potensi berupa pemandangan alam kawasan pertaniannya maupun kekhasan dan keanekaragaman aktivitas produksi dan teknologi pertanian serta budaya masyarakat petani. Kewirausahaan sosial membuat perubahan sosial dalam tataran sistem melalui gagasan baru, produk, jasa, metodologi, dan perubahan sikap. Masyarakat pedesaan perlu dibina secara berkesinambungan dalam agrowisata untuk menjadi sumber pendapatan yang dapat diandalkan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Populasi penelitian merupakan masyarakat Petani di Kecamatan Selupu Rejang, Sampel ditentukan dengan mengambil sampel 20% dari populasi dari 1,081 populasi, yang menjadi sampel penelitian sebanyak 213 orang. Hasil penelitian menunjukkan faktor eksternal yang terdiri dari letak geografis, sarana dan prasarana, dana dan anggaran, kondisi iklim, penyuluhan dan kebijakan pemerintah memberikan kontribusi lebih dari faktor internal yang berupa motivasi, sikap dan pengetahuan baik secara simultan maupun secara parsial. Adapun variabilitas yang dapat dijelaskan oleh variabel eksternal terhadap variabel Y adalah sebesar 17,8%. Sedangkan variabilitas yang dapat dijelaskan oleh variabel internal terhadap variabel Y adalah hanya sebesar 4 %. Secara umum indikator-indikator yang mempengaruhi nyata dari variabel Y adalah : dari variabel X_1 adalah indikator Sikap, sedangkan variabel X_2 adalah indikator sarana dan prasarana, kondisi iklim, dan kebijakan pemerintah.

Kata Kunci: Kewirausahaan Sosial, Peran Serta Masyarakat, Agrowisata

PENDAHULUAN

Kewirausahaan sosial adalah sebuah bisnis dengan misi, yang memiliki orientasi berkelanjutan, melakukan pemberdayaan, dan memberi dampak positif pada permasalahan sosial yang ada. Kewirausahaan sosial mencakup bidang industri kreatif, pertanian, dan pendidikan. Wirausaha sosial dapat memberi dampak yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi nusantara melalui penyediaan akses kebutuhan dasar seperti energi, pendidikan, dan pangan berkelanjutan. Upaya penyelesaian masalah sosial dengan menggunakan pendekatan kewirausahaan merupakan cara yang baik. Cara yang dapat dilakukan untuk masyarakat petani dalam rangka mengentaskan emiskinan yaitu dengan agrowisata.

Agrowisata merupakan salah satu bentuk *rural tourism* yang menawarkan kegiatan pertanian sebagai daya tarik wisata. Agrowisata merupakan rangkaian kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi pertanian sebagai obyek wisata, baik potensi berupa pemandangan alam kawasan pertaniannya maupun kekhasan dan keanekaragaman aktivitas produksi dan teknologi pertanian serta budaya masyarakat petani. Kegiatan agro wisata bertujuan untuk memperluas wawasan pengetahuan, pengalaman rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan. Disamping itu yang termasuk dalam agrowisata adalah perhutanan dan sumber daya pertanian.

Agrowisata atau *agroturisme* didefinisikan sebagai sebuah bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro (agribisnis) sebagai objek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi, dan hubungan usaha di bidang pertanian. Agrowisata merupakan bagian dari objek wisata yang memanfaatkan usaha pertanian (agro) sebagai objek wisata. Agrowisata perlu melibatkan penduduk lokal dalam perencanaan untuk memperoleh hasil yang maksimal, ketika semua komponen dapat dan mau berperan serta dalam pembangunan.

Masyarakat perlu diberdayakan untuk mengurangi angka kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu bentuk ketidakberdayaan, baik karena hambatan kultural yang dipengaruhi kondisi sosial budaya secara turun temurun, maupun hambatan struktural dalam masyarakat karena tatanan sosial-ekonomi yang kurang akrab terhadap masyarakat miskin dalam mengakses faktor produksi maupun sarana sosial-ekonomi lainnya. Masyarakat

miskin tidak selalu merupakan kelompok yang homogen, bisa heterogen dalam hal kondisi lokal, potensi, pengaruh sosial budaya, dan dukungan pemuka masyarakat yang peduli dan kompeten. Pemberdayaan yang tidak sesuai dengan kearifan dan atau kebutuhan lokal akan sulit berhasil.

Masyarakat lapisan bawah perlu ditingkatkan ekonominya dengan kegiatan pembangunan yang maksimal. Salah satu meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu dengan pelibatan masyarakat yang tinggal di daerah potensial dalam pengembangan agrowisata.

Kegiatan pengembangan masyarakat tersebut dalam upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di masyarakat. Keberadaan pemuka masyarakat yang peduli dan memiliki kompetensi untuk meyakinkan keluarga miskin akan adanya harapan masa depan yang lebih baik melalui pengembangan prakarsa, kerja keras sesuai potensi yang dimiliki serta dilakukan dengan penuh dedikasi, kesabaran dan perhatian yang tinggi, sangat menentukan.

Salah satu prinsip pengembangan agrowisata yang berkelanjutan adalah adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Masyarakat lokal, terutama penduduk asli yang bermukim di kawasan wisata, menjadi salah satu pemain kunci dalam pariwisata, karena sesungguhnya mereka yang akan menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata (Damanik dan Weber, 2006). Peran serta masyarakat ini menjadi satu hal yang penting dalam upaya menjaga keutuhan alam dan sebagai salah satu alternatif dalam merespon tuntutan dan urgensi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Pendekatan pengembangan agrowisata berbasis komunitas adalah dengan desa wisata. Pengembangan wilayah perdesaan tidak lagi hanya mengandalkan sektor pertanian secara murni, tetapi berkembang ke arah penyajian kegiatan wisata di sektor pertanian. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata membuat suatu program yang bernama Pariwisata Inti Rakyat (PIR) atau dengan istilah lainnya yaitu *community-based tourism*. Menurut PIR, Desa Wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik.

Daerah yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi agrowisata salah satunya yaitu di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu memiliki beberapa daerah wisata yang potensial yaitu kebun jeruk kirana, kebun strobery, kebun bunga syandana, danau mas. Agowisata di kabupaten rejang lebong belum melibatkan peran serta masyarakat secara maksimal sehingga kurang berkembang. Upaya pengembangan agro wisata pedesaan yang memanfaatkan potensi pertanian, dan melibatkan masyarakat pedesaan, dapat berfungsi sebagai pemberdayaan masyarakat selaras dengan pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata (*community based tourism*). Akpinar *et al.* (2005) bahwa konsep promosi agrowisata mencakup harapan pada peningkatan pengetahuan wisatawan dan realisasi pada konservasi lingkungan serta kualitas penduduk dalam hal perbaikan hidup terutama di negara-negara berkembang yang sektor pertanian merupakan strategi penting dalam pembangunan pedesaan.

Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengikutsertakan peran dan aspirasi masyarakat pedesaan selaras dengan pendayagunaan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Masyarakat pedesaan perlu dibina secara berkesinambungan, agar potensi-potensi yang dimiliki daerah digali secara optimal, sehingga dapat memberikan hasil maksimal bagi petani, masyarakat desa, pengusaha dan menjadi sumber pendapatan yang dapat diandalkan. Masyarakat sekarang ini banyak tergantung dengan tengkulak yang membeli hasil pertanian mereka yang jauh dibawah standar Sehingga hal yang menarik untuk dilakukan penelitian berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam pengembangan agrowisata di Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Pengembangan agrowisata akan menciptakan lapangan pekerjaan, karena usaha ini dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat pedesaan, sehingga dapat menahan atau mengurangi arus urbanisasi yang semakin meningkat saat ini. Pengembangan potensi pariwisata masih menempatkan masyarakat sebagai objek bukan sebagai subjek atau pelaku penting dalam pengembangan pariwisata. Hal ini menyebabkan masyarakat lokal belum menerima nilai manfaat pengembangan pariwisata secara optimal dan memadai. Oleh karena itu, dalam pengembangan pariwisata harus menjadikan pemberdayaan masyarakat sebagai modernisasi dengan prasarana pendukung yang lebih lengkap.

Masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* pembangunan memiliki peran strategis tidak saja sebagai penerima manfaat pengembangan, namun sekaligus menjadi pelaku yang mendorong keberhasilan pengembangan kepariwisataan di wilayahnya masing-masing. Oleh karena itu peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan hal yang penting. Peran serta masyarakat merupakan rangkaian kegiatan masyarakat yang dilakukan berdasarkan gotong royong dan swadaya masyarakat dalam rangka menolong mereka sendiri mengenal, memecahkan masalah, dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat. Dengan pengembangan agrowisata diharapkan masyarakat memiliki kemandirian ekonomi. Manfaat ekonomi merupakan aspek penting dalam pengembangan agrowisata, selain aspek kelestarian alam, sosial dan budaya.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi sehingga menarik untuk diketahui yaitu 1) Bagaimana kewirausahaan sosial yang terjadi pada masyarakat desa Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong; 2) Bagaimana peran serta masyarakat dalam pengembangan agrowisata di Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu; 3). Faktor-faktor apa saja yang mendukung dalam pengembangan agrowisata di Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu; 4). Bagaimana pengaruh peran serta masyarakat dalam pengembangan agrowisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan metode survei, Lokasi penelitian bertempat di Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong. Waktu penelitian April s.d Desember 2018. Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat di kecamatan selupu rejang berjumlah 1.081 orang.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini sampel acak sederhana yaitu sampel yang diambil dari suatu populasi dengan cara memilih individu yang dijadikan anggota sampel atas dasar sesuatu. Dengan metode Slovin Sampel ditentukan dengan mengambil sampel 20% dari populasi dari 1,081 populasi, yang menjadi sampel penelitian sebanyak 213 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui teknik pengumpulan data dalam bentuk kuesioner, wawancara dan observasi langsung. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi Dinas Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong.

Pengolahan dan Analisis Data

Pendekatan kuantitatif terdapat variabel x yang mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat yaitu faktor pengembangan agrowisata yang mencakup (a) program-program pemberdayaan masyarakat (b) keterlibatan masyarakat di dalam proses perencanaan pengembangan agrowisata, (c) sarana dan prasarana pendukung pengembangan Agrowisata, (d) promosi agrowisata, dan (e) mendorong tumbuhnya *partnership* (kemitraan). (2) Faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan agrowisata di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, yang meliputi: (a) faktor pendukung yang terdiri dari: 1) faktor pendukung internal berupa: letak geografis, kondisi iklim, transportasi, kemampuan masyarakat dalam kepariwisataan 2) faktor pendukung eksternal berupa: keramahmataman penduduk dan keamanan; kebijakan antara pemerintah dengan masyarakat, dan kekuatan hukum.

Serta variabel Y merupakan peran serta masyarakat yang meliputi peran serta masyarakat yang mencakup partisipasi, peran kualitas pendamping, pemberdayaan masyarakat, promosi agrowisata, upaya tumbuhnya mitra. Sedangkan pendekatan kualitatif dengan melakukan analisis deskriptif terhadap data dan hasil pengamatan untuk mengukur keberhasilan peran serta masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda untuk mengukur pengaruh peran serta masyarakat dengan keberhasilan peran serta masyarakat yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Analisis regresi adalah untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas (x) terhadap variabel terikat (Y). Persamaan regresi digunakan untuk memprediksi nilai Y untuk nilai X tertentu (Nazir 2011). Hasil uji akan diukur pada spss statistic 20.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan selupu rejang merupakan daerah yang memiliki banyak objek wisata sehingga menarik dijadikan temat peelitian yang berkaitan dengan agrowisata. Objek wisata yang ada berupa kebun teh, danau, taman bunga, taman jeruk, air terjun dan lainnya. Di Kabupaten rejang lebong memiliki masyarakat adat yaitu suku rejang yang memiliki empat petulai yaitu joorcalang (juru kalang), beremanni (bermani), selopo (selupu), dan tooby (tubay).

Penelitian ini, telah disebar kuesioner penelitian ke 213 responden. Berikut disajikan informasi umum dari responden yang di deskripsikan berdasarkan kategori yang ditentukan:

- 1) Dari segi latar belakang pendidikan, lulusan Sekolah Dasar sebesar 32% sedangkan sisanya merupakan lulusan Sekolah Menengah Pertama sebesar 24%, lulusan Sekolah Menengah Umum 39 %, dan Diploma 5%.
- 2) Dari segi umur, umur responden didominasi umur rentang 41-50 tahun sebesar 43%. Sedangkan rentang umur responden dari 20-30 dan 31-40 tahun berturut-turut sebesar 23% dan 21%, sisanya berada di umur <20 tahun sebesar 2% dan di atas 51 tahun 11%.
- 3) Dari segi pendapatan responden perbulan, memiliki pendapatan di antara 1-2 juta hampir 57% lebih,. berpenghasilan di bawah 1 juta 36%, dan yang berpenghasilan di atas 2 jt. Hanya 7 %
- 4) Dari status kepemilikan lahan, diantaranya merupakan hak milik 72%, lahan sewa 21% merupakan bagi hasil. Sebesar 8%

Kewirausahaan Sosial

Kewirausahaan sosial merupakan sebuah gerakan dengan misi sosial, dengan inovasi dan proses belajar yang tiada henti serta kesiapan untuk bertindak tanpa dukungan sumber daya yang memadai. Austin (2006) menekankan ada dua elemen penting kewirausahaan sosial, yaitu inovasi dan penciptaan nilai sosial (social value creation). Inovasi mengacu pada konsep

kewirausahaan yang menekankan pentingnya aktivitas inovasi dalam upaya memanfaatkan setiap peluang untuk menghasilkan sesuatu yang baru

Kewirausahaan sosial memanfaatkan prinsip kewirausahaan untuk mengatasi masalah sosial. Kewirausahaan yang dilakukan yaitu dengan pengembangan di Desa Selupu Rejang yaitu pengembangan agrowisata untuk meningkatkan usaha petani sehingga tidak dimanfaatkan oleh tengkulak. Kegiatan agrowisata yang diusahakan untuk membantu para petani yang memiliki penghasilan yang kurang memadai agar terhindar dari tengkulak. Pengembangan agrowisata diperlukan karena petani dapat berusaha mengembangkan usahanya dengan mendapatkan pendapatan langsung dari pengunjung. Kesuksesan kewirausahaan sosial adalah bukan dengan menghitung jumlah profit yang dihasilkan, melainkan pada tingkat dimana mereka telah menghasilkan nilai-nilai sosial (social value).

Penyuluh pertanian berusaha membantu petani dalam rangka menghindarkan petani dari para tengkulak. Wirausaha sosial yang dilakukan diharapkan mampu: mengadopsi sebuah misi untuk menciptakan dan mempertahankan nilai-nilai sosial; mengenali dan mengusahakan peluang-peluang baru untuk menjamin keberlangsungan misi tersebut; melibatkan diri dalam sebuah proses inovasi, adaptasi dan belajar yang berkelanjutan. Kewirausahaan sosial diharapkan dapat memajukan perubahan sistemik pada lingkungan sosialnya dengan cara mengubah perilaku dan pemahaman atau kesadaran para petani.

Model Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Agrowisata Di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu

Peran serta masyarakat dalam pengembangan agrowisata yaitu melakukan suatu proses aktif yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan pengembangan agrowisata. Masyarakat secara swadana mengembangkan lahan pertanian mereka untuk pengembangan agrowisata.

Analisis Deskriptif Variabel Independet

Variabel Independent dalam penelitian ini, terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal didefinisikan dengan “ X_1 ” dan faktor eksternal di notasikan dengan “ X_2 ”..

- 1) Variabel independent “ X_1 ” (faktor internal) memiliki 3 indikator, yakni motivasi, sikap, dan pengetahuan.
 - a. X_{11} Motivasi
Kelima indikator pernyataan dari variabel ini dipersepsikan setuju oleh responden penelitian.
 - b. X_{12} Sikap
Kelima indikator pernyataan dari variabel ini dipersepsikan kurang setuju oleh responden penelitian.
 - c. X_{13} Pengetahuan
Kedua indikator pernyataan dari variabel pengetahuan ini dipersepsikan kurang setuju oleh responden penelitian.
- 2) Variabel “ X_2 ” (faktor eksternal) memiliki 6 indikator.
 - a. X_{21} Letak Geografis
Ketiga indikator pernyataan dari variabel Sumber Daya Manusia ini dipersepsikan kurang setuju oleh responden penelitian.
 - b. X_{22} Sarana dan Prasarana
Keempat indikator pernyataan dari variabel Sarana dan Prasarana ini dipersepsikan cukup beragam, namun demikian masih didominasi jawaban kurang setuju oleh responden penelitian.
 - c. X_{23} Dana dan Anggran
Kedua indikator pernyataan dari variabel Dana dan Anggaran ini dipersepsikan cukup beragam, namun masih di atas 80% responden penelitian menjawab kurang/tidak setuju.

d. X_{24} Kondisi Iklim

Ketiga indikator pernyataan dari variabel ini dipersepsikan cukup beragam oleh responden penelitian. Namun secara persentase masih didomoinas oleh jawabann setuju.

e. X_{25} Materi Kegiatan Penyuluhan

Keempat indikator pernyataan dari variabel Materi Kegiatan Penyuluhan ini dipersepsikan kurang mencapai tujuan kelompok oleh responden penelitian. Namun demikian berbeda dengan variabel lainnya, jawab ketidaksetujuaan responden pada variabel ini cukup besar.

f. X_{26} Kebijakan Pemerintah

Ketiga indikator pernyataan dari variabel ini dipersepsikan pesimis akan ketercapaian pengelolaan program.

Analisis Deskriptif Variabel Dependent, yakni Peran Serta Masyarakat

Variabel Dependent dalam penelitian ini, peran serta masyarakat, meliputi partisipasi (Y_1), kualitas pendamping (Y_2), keterlibatan masyarakat dalam perencanaan (Y_3), pemberdayaan masyarakat (Y_4), Promosi Argowisata (Y_5), dan Upaya Tumbuhnya Kemitraan (Y_6).

1) Y_1 Partisipasi

Ketiga indikator pernyataan dari variabel ini dipersepsikan tidak/kurang setuju oleh responden penelitian.

2) Y_2 Kualitas Pendamping

Keenam indikator pernyataan dari variabel Kualitas Pendamping ini dipersepsikan mayoritas tidak dan kurang setuju oleh responden penelitian.

3) Y_3 Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan

Keempat indikator pernyataan dari variabel ini dipersepsikan setuju oleh responden penelitian.

4) Y_4 Pemberdayaan Masyarakat

Keempat indikator pernyataan dari variabel ini dipersepsikan setuju oleh responden penelitian.

5) Y_5 Promosi Agrowista

Kedua indikator pernyataan dari variabel ini dipersepsikan setuju oleh responden penelitian.:

6) Y_6 Upaya Tumbuhnya Kemitraan

Keempat indikator pernyataan dari variabel ini dipersepsikan setuju oleh responden penelitian. Besarnya persentase dari masing-masing item dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Pengaruh Faktor Internal (X_1) dan Eksternal (X_2) Terhadap Peran Serta Masyarakat (Y)

Model 1, hubungan X_1 , X_2 , dan Y secara umum

a. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Kesesuaian model yang dibangun memiliki R Square 0,117. Hal ini menunjukkan bahwa variabel yang dipilih pada variabel independent X_1 , X_2 dapat menerangkan keragaman variabel dependent Y dengan kontribusi sebesar 11,7%, sedangkan sisanya sebesar 88,3% diterangkan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan pada penelitian ini. Berdasarkan hasil ini untuk melihat kontribusi nyata dari X_1 , X_2 terhadap Y perlu dilakukan analisis regresi dari masing-masing indikator variabel X_1 dan X_2 secara parsial.

Tabel Uji F

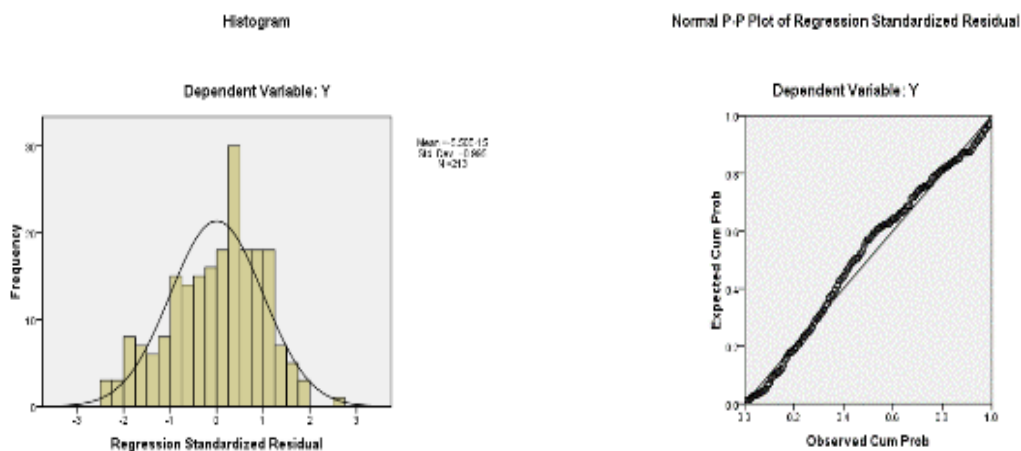
Uji F pada penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah terjadi pengaruh yang signifikan antara peubah independen terhadap peubah dependen secara keseluruhan. Uji F diketahui dengan melihat signifikan F hitung apakah lebih besar dari alpha yang ditetapkan (0,05) atau tidak. Dari hasil uji regresi linier berganda, diperoleh nilai F sebesar 13.873 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, artinya walaupun memiliki kontribusi yang

relatif kecil, namun kedua variabel tersebut memberikan pengaruh secara bersama sama terhadap variabel Y.

Tabel Uji t dan uji Kolinearitas

Bila hubungan Y dan X_1 , X_2 di uji secara partial menggunakan uji t, variabel eksternal X_2 mempunyai pengaruh nyata terhadap Y (peningkatan peran serta masyarakat), sedangkan variabel X_1 , yakni faktor Internal tidak memberikan pengaruh terhadap Y. Sedangkan dilihat dari Nilai VIF dari kedua variabel lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonearitas.

Berikut disajikan hasil pengujian normalitas dari galat regresi, dari kedua gambar terlihat bahwa diagram batang fit dengan kurva normal dan garfik QQ plotnya mendekati garis linear, dapat disimpulkan bahwa asumsi kenormalan model regresi terpenuhi.



Model 2, hubungan indikator-indikator X_1 , dan Y

Berikut Koefisien determinasi (R Square) dari model 2,

Kesesuaian model yang dibangun memiliki R Square 0.040. Hal ini menunjukkan ketiga indikator dari variabel X_1 memberikan kontribusi relatif kecil terhadap variabilitas variabel Y.

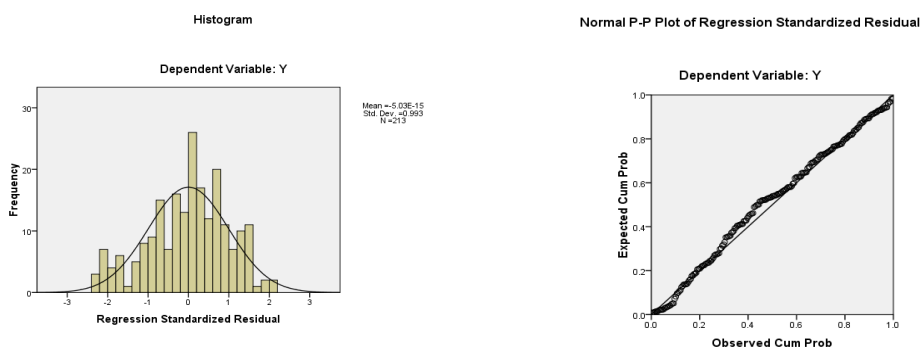
Berikutnya disajikan Tabel Anova seperti berikut:

Uji F pada penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah terjadi pengaruh yang signifikan antara peubah independen terhadap peubah dependen secara keseluruhan. Uji F diketahui dengan melihat signifikan F hitung apakah lebih besar dari alpha yang ditetapkan (0,05) atau tidak. Dari hasil uji regresi linier berganda, diperoleh nilai F sebesar 2,917 dengan nilai signifikansi sebesar $0,035 < 0,05$, artinya model regresi berganda masih layak digunakan.

Tabel Uji t dan uji Kolinearitas

Bila hubungan Y dan indikator indikator X_1 , di uji secara partial menggunakan uji t, hanya indikator kedua yang mempunyai pengaruh nyata terhadap Y (peningkatan peran serta masyarakat), sedangkan indikator kesatu dan ketiga dari variabel X_1 , tidak memberikan pengaruh terhadap Y. Sedangkan dilihat dari Nilai VIF dari ketiga indikator variabel X_1 lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonearitas.

Berikut disajikan hasil pengujian normalitas dari galat regresi, dari kedua gambar terlihat bahwa diagram batang fit dengan kurva normal dan garfik QQ plotnya mendekati garis linear, dapat disimpulkan bahwa asumsi kenormalan model regresi terpenuhi.



Model 3, hubungan indikator-indikator X_2 , dan Y

Berikut Koefisien determinasi (R Square) dari model 3,

Kesesuaian model 3 yang dibangun memiliki R Square 0.178. Nilai R ini lebih besar dari model 1 dan model 2. Hal ini menunjukkan keenam indikator dari variabel X_2

memberikan kontribusi relatif lebih besar terhadap variabilitas variabel Y dibandingkan dengan variabel X_1 .

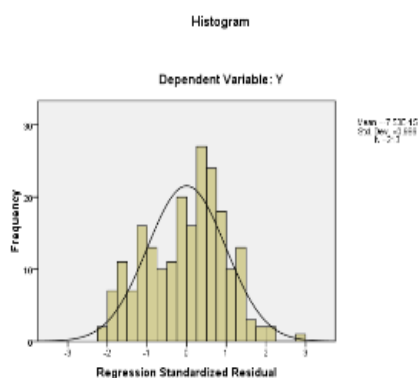
Berikutnya disajikan Tabel Anova seperti berikut:

Dari uji F diketahui dengan melihat signifikan F hitung apakah lebih besar dari alpha yang ditetapkan (0,05) atau tidak. Dari hasil uji regresi linier berganda, diperoleh nilai F sebesar 7,449 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, artinya model regresi berganda layak digunakan.

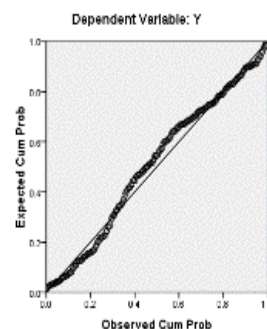
Tabel Uji t dan uji Kolinearitas

Bila hubungan Y dan indikator indikator indikator X_2 , di uji secara partial menggunakan uji t, hanya indikator kedua (sarana dan prasarana), keempat (kondisi iklim), dan keenam (kebijakan pemerintah) yang mempunyai pengaruh nyata terhadap Y (peningkatan peran serta masyarakat), sedangkan indikator lainnya dari variabel X_2 , tidak memberikan pengaruh terhadap Y. Sedangkan dilihat dari Nilai VIF dari keenam indikator variabel X_2 lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonearitas.

Berikut disajikan hasil pengujian normalitas dari galat regresi, dari kedua gambar terlihat bahwa diagram batang fit dengan kurva normal dan garfik QQ plotnya mendekati garis linear, dapat disimpulkan bahwa asumsi kenormalan model regresi terpenuhi.



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



KESIMPULAN

1. Kewirausahaan sosial memainkan peran penting berupa terobosan dalam upaya pengurangan kemiskinan. Namun kewirausahaan sosial di Desa Selupu Rejang belum dilakukan secara maksimal.
2. Peran serta masyarakat dalam pengembangan agrowisata yaitu masyarakat berusaha untuk mengembangkan agrowisata secara swadana, peran serta masyarakat dalam pengembangan agrowisata banyak didominasi oleh motivasi untuk menghasilkan pendapatan dan kondisi alam yang mendukung.
3. Dari ketiga model regresi linear yang dianalisis, disimpulkan bahwa variabel X_2 yakni faktor eksternal memberikan kontribusi lebih dari pada X_1 baik secara simultan maupun secara partial (dilihat dari indikator-indikatornya). Adapun variabilitas yang dapat dijelaskan oleh variabel X_2 terhadap variabel Y adalah sebesar 17,8%. Sedangkan variabilitas yang dapat dijelaskan oleh variabel X_1 terhadap variabel Y adalah hanya sebesar 4 %.
4. Secara umum indikator-indikator yang mempengaruhi nyata dari variabel Y adalah : dari variabel X_1 adalah indikator Sikap, sedangkan variabel X_2 adalah indikator Sarana Dan Prasarana, Kondisi Iklim, dan Kebijakan Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein. SR. 1969. A Ladder Of Citizen Participation. [Internet]. [diunduh 2014 Januari4]:<http://Lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-ofcitizen-participation.html>.
- Anwar. 2004. *Pendidikan Kecakapan Hidup*. Bandung: Alfabeta.
- Arimbawa P. 2004. Peran Kelompok untuk Meningkatkan Kemampuan Anggota dalam Penerapan Inovasi Teknologi.[tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Ahmadi A. 2009. *Ilmu sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta
- Azwar S. 2013. *Sikap Manusia (Teori dan Pengukurannya)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bandura AJ. 1986. *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. New Jersey: Prentice Hall, Inc

- Brolin, D.E. 1989. *Life Centered Career Education: A Competency Based Approach*. Reston, VA: The Council for Exceptional Children.
- [BPS] Badan Pusat Statistik 2012. Jumlah Penduduk Miskin. [Internet]. [diunduh 2013 November 10]:www.bps.or.id.
- Cohen J dan Norman T. Uphoff 1977. *Rural Development Participation Concepts and Measures For Project Design, Implementation and Evaluation Rural Development Committee*. Center for international Studies. New York.
- Chambers R dan Conway G.1991.*Sustainable Rural Livelihood:Practical Concepts for 21 Century*, IDS Discussion Paper 296:IDS.Brighton. Institute for Development Studies.
- Djamahari S B. 2000. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dharmawan, A.H. 2001. *Farm Household Livelihood Strategis and Socio-Economic Change in Rural Indonesia*. [Disertasi]. University of Goettingen. Germany
- Dimiyati dan Mudjiono. 2002. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta
- Deptan (2005) Agrowisata Meningkatkan Pendapatan Petani [Internet]. Available from: <http://database.deptan.go.id> [Accessed 12 September 2012]
- Daniel M et al. 2008. *PRA Participatory Rural Appraisal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Effendy,O U. 2005. *Komunikasi dan Modernisasi*. Jakarta: Mandar Maju
- Elida T. 2008. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan. [Internet]. [diunduh 2014 Januari 8].2(1):81-100;www.journal.gunadarma.ac.id.
- Effendi S dan Tukiran.2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Gulo W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Havighurts, S.J. 1972. *Developmental Task and Education*. New York. Mac Kay
- Hurlock E B. 1980.*Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga.
- Hawkins, Del, I, Best, Roger J., dan Coney, kenneth A. 1986. *Consumer Behavior; Implications for marketing Strategy*. New York: Mc Graw Hill Co.
- Hayami dan Kikuchi. 1987. *Dilema Ekonomi Desa*. Jakarta: Yayasan obor Indonesia.
- Handoko.1995. *Motivasi Daya Penggerak Tingkah Laku*. Yogyakarta: Kanisius
- Hidayat S dan Syamsulbahri D 2001. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Pustaka Quantum
- Hasan I 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia

- Idrus M. 2002. *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Ife J, Tesoriero F. 2006. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Kartono K. 1998. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Keraf S dan Dua M. 2001. *Ilmu Pengetahuan (Sebuah Tinjauan Filosofis)*. Yogyakarta: Kanisius
- Kerlinger N. Fred. 2003. *Asas-asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gadjamadah University Press.
- Kotler, Philip, dan Kevin Lane Keller. (2009) *Manajemen Pemasaran: Jilid 1ed.12*.
- [Kemendikbud] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Dana PKBM Tematik. [Internet]. [diunduh 2014 Februari 11]:www.new.paudni.kemendiknas.go.id.
- Mosher At 1987. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian (Getty Agricultural Moving)*. Disadur oleh Krisandhi dan Bahrin. Jakarta: CV. Yasaguna
- Mikkelsen B. 2001. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Terjemahan dari: Matheos Nalle. Ed ke-2
- Mulyasa 2002. *Kurikulum Berbasis Kompetensi (Konsep, Karakteristik dan Implementasi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muljono P, Hanafi DNT. 2009. Pengembangan Program Kecakapan Hidup (Life Skills) untuk Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren (Studi Kasus PKBM Al-Wathoniyah Di desa Sukosono, Kec. Kedung, Kab. Jepara. Proseding Simposium PAPPI.hal. 1-20 IPB
- Mardikanto T. 1988. *Komunikasi Pembangunan*. Surakarta: UNS Press
- _____. 2009a. *Sistem Penyuluhan Pertanian*. Surakarta: UNS Press.
- _____. 2009b. *Membangun Pertanian Modern*. Surakarta: UNS Press
- Moleong, Lexy J. (2005) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya
- Mohammadia, Akbar, Golnaz Adalatzadeh Aghdamb, Roghayeh Kiyani, Leyla Sattarzedeh, dan . 2011. Investigating Effect of Life Skills Training on Family Functioning of Epileptic People's in Tabriz. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 30 (2011) 2316 – 2318.
- Nadjiyati S. 1995. *Studi Standarisasi Paket-Paket Pertanian*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Nursasongko R. 2002. *Mimbar Pendidikan*. Bandung: UPI Press.
- Nasdian F.T. 2006. *Pengembangan Masyarakat*. Bogor: IPB

- Nazir M. 2011. *Metode Penelitian*. Cetakan 7. Bogor: Ghalia Indonesia
- Osipow M. 1983. *Theories of Career Development*. Tirth Edition. New Jersey: Printice Hall, Inc. Englewood Cliffs.
- Pretty, J dan Guijt O. 1992. *Primary Environmental Care: An Alternative Paradigm for Development Assistance*. Environment. Vol.4. No.1.
- Padmowiharjo S. 1994. *Psikologi Belajar Mengajar*. Bandung: Pustaka Satia
- Pamudji O. 1997. Menuju Pendekatan Pembangunan yang Partisipatif. Buletin Bina Swadaya Mandiri No. 11.
- Prasetyo B dan Jannah L. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Purnomo A.M. 2006. Strategi Nafkah Rumahtangga Desa Sekitar Hutan (Studi Kasus Desa Peserta PHBM di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat). [tesis] Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Purnamasari, Irma. (2008) Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (Studi di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi) Tesis, Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro Semarang.
- Pitana, I Gde. (2009) Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyakarta, Andi Offset
- Rogers dan Schoemaker. 1986. *Memasyarakatkan Ide-ide Baru*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Rusli. S. 1995. *Pengantar Kependudukan*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Rahmat J. 2001. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahadrjo. 2004. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Robbins S dan Coulter M. 2007. *Manajemen*. (Terjemahan). Jakarta: Indeks
- Rosyida I dan Nasdian FT. 2011. Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder dalam Program CSR dan Dampaknya Terhadap Komunitas Pedesaan. *Jurnal Sodality*. 5(1):51-70.
- Rahmawati dan Sumarti T. 2011. Analisis Tingkat Partisipasi Peserta Program Pemberdayaan Ekonomi PT. Arutmin Indonesia (Kasus di Desa Binaan Tambang Senakin, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan). *Jurnal Solidity*. 5(3):91-110.
- Supriatna T. 1977. *Birokrasi, Pemberdayaan, dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: Humaniora Utama Press
- Soewarno H. 1980. *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung
- Sudjana SF. 1983. *Pendidikan Nonformal (Wawasan-Sejarah-Azas)*. Bandung: Theme

- Suparlan Dr. 1984. *Kemiskinan Di Perkotaan, Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan*. Jakarta. Penerbit Sinar Harapan dan Yayasan Obor Indonesia.
- Soehoed. 1993. *Kebijaksanaan Pemerintah dalam Pembangunan Pedesaan. Pembangunan yang Terpadu Berkesinambungan*. Jakarta: Balitbangsos Depsos.
- Santoso A. 1999. *Demokrasi Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Suyanto B. 2001. Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin. *Jurnal masyarakat, kebudayaan dan politik*. 14(4):81-100
- Sugiyanto. 2002. *Lembaga Sosial*. Yogyakarta: UGM
- Soekanto S. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutanta E. 2003. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Slamet M, 2003. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Penyunting Ida Yustina dan Adjat Sudrajat. Bogor: IPB Press.
- Suryabrata, S.2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sevilla, Consuelo G. Tuwu. Syah, Alimudin. Alam.2006. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta (ID): UI Press.
- Setiadi et al. 2008. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Sugiyono.2009. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Soetomo. 2012. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka pelajar
- Tjokroamidjojo B.1995. *Manajemen Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Tarigan. RV.2009. Peranan Pendidikan Nonformal Memberdayakan Ekolem. [Internet].[diunduh2014 Januari 30]:<http://skbtenggarong.wordpress.co.id>.
- Yoeti, H, Oka . (1993) *Pemasaran Pariwisata*. Bandung, Angkasa.
- Van den Ban, A.W, dan H.S. Hawkins. 2001. *Penyuluhan Pertanian*. Yogyakarta: Kanisius.
- Walgito B. 2003. *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Andi
- Winkel WS. 2009. *Psikologi Pengajaran*. Yogyakarta: Media Abadi
- Widoyoko.2010. *Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

POTENSI PENGEMBANGAN EKONOMI PRODUKTIF DI DESA SAMBIREJO, KECAMATAN NGAWEN, KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Ratih Ineke Wati^{1*}, Sri Peni Wastutiningsih¹, Yuhan Farah Maulida¹, Gilar Mentari¹,
Analisa Anggraini¹

¹Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Universitas Gadjah Mada,
Email: ratihinekewati@ugm.ac.id*; peni@ugm.ac.id; yuhanfm@ugm.ac.id;
gilar.mentari@mail.ugm.ac.id; analisa.anggraini@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Pembangunan pertanian yang mengutamakan laju pertumbuhan ekonomi melalui dukungan berlebih pada usaha berskala besar dan sektor tertentu hanya memberikan manfaat pada sebagian kelas sosial sehingga memperparah ketimpangan pendapatan pada masyarakat. Secara nasional, BPS mencatat bahwa Indonesia mampu menjaga rata-rata tingkat pertumbuhannya sekitar 6%, namun ketimpangan meningkat hampir 30% selama 2001-2017 dari 0,33 ke 0,39. Persentase kemiskinan di pedesaan juga hampir dua kali lebih besar dari kemiskinan di perkotaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa perlu strategi dan keberpihakan pada perekonomian pedesaan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pedesaan dan sektor pertanian serta secara otomatis mengurangi ketimpangan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi pengembangan ekonomi produktif berbasis potensi lokal di Desa Sambirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Jenis data berasal dari hasil observasi dan wawancara yang dianalisis menggunakan triangulasi data. Potensi pengembangan ekonomi produktif yang dimiliki desa ini berupa (1) komoditas pangan yang diproduksi, seperti singkong, talas, ubi, kacang-kacangan, dan sayuran; (2) kemampuan (skill) dalam pengolahan pangan menjadi keripik, kudapan, dan susu kedelai; serta (3) kelembagaan yang dapat dilihat dari sumber daya manusia. Selain potensi-potensi tersebut, dukungan pihak eksternal seperti pemerintah, perbankan, dan perguruan tinggi dapat disinergikan dengan potensi-potensi tersebut, agar perekonomian pedesaan meningkat.

Kata kunci : Ekonomi Pedesaan, Kewirausahaan Sosial, Kelembagaan, Potensi Lokal, Pangan Lokal

PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian yang mengutamakan laju pertumbuhan ekonomi melalui dukungan berlebih pada usaha berskala besar dan sektor tertentu hanya memberikan manfaat pada sebagian kelas sosial sehingga memperparah ketimpangan pendapatan pada

masyarakat. Secara nasional, BPS mencatat bahwa Indonesia mampu menjaga rata-rata tingkat pertumbuhan ekonominya sekitar 6%, namun ketimpangan meningkat hampir 30% selama 2001-2017 dari 0,33 ke 0,39. Persentase kemiskinan di pedesaan juga hampir dua kali lebih besar dari kemiskinan di perkotaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa perlu strategi dan keberpihakan pada perekonomian pedesaan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pedesaan dan sektor pertanian serta secara otomatis mengurangi ketimpangan. Upaya-upaya pemerataan pembangunan melalui pengentasan kemiskinan perlu dilakukan seperti penyediaan lapangan pekerjaan, pelatihan keterampilan dan manajerial, serta perbaikan infrastruktur desa.

Dari aspek demografis, mata pencaharian masyarakat Desa Sambirejo bervariasi mulai dari karyawan, petani, hingga pekerjaan di sektor jasa. Tabel 1 menunjukkan distribusi jenis pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Pertanian merupakan sektor yang paling banyak menampung angkatan kerja di Desa Sambirejo. Data menunjukkan sebesar 13,39 % masyarakat bekerja sebagai petani dan 2,85 % masyarakat bekerja sebagai buruh tani. Akan tetapi, presentase warga yang tidak bekerja ternyata lebih tinggi ketika dibandingkan dengan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, yaitu 71,46 % dari total populasi. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada upaya untuk menambah lapangan kerja di desa. Salah satunya melalui pengembangan ekonomi produktif berbasis potensi lokal.

Tabel 1. Kondisi Demografis berdasarkan Jenis Pekerjaan

Pekerjaan	Populasi (orang)	Persentase (%)
Pegawai Negeri Sipil	120	1,54
Tentara dan Polisi	7	0,09
Swasta	427	5,49
Wiraswasta atau Pedagang	212	2,73
Petani	1.041	13,39
Tukang	132	1,70
Buruh tani	222	2,85
Pensiunan	58	0,75
Tidak/belum bekerja	5.557	71,46
Total	7.776	100.00

Sumber: Data Monografi Desa Sambirejo, 2017

Salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah pedesaan adalah dengan memanfaatkan potensi lokal yang diarahkan pada pertumbuhan dan pengembangan

agroindustri pangan lokal. Salah satu strateginya adalah melalui pembangunan partisipatif secara *bottom up* dengan pendekatan kewirausahaan sosial. Dalam konteks ini, menurut Dewi et. al. (2013), pemerintah dapat merevitalisasi perannya melalui: (1) dukungan penyediaan sarana dan prasarana sekaligus infrastruktur pendukung untuk pengembangan agroindustri pangan lokal, sekaligus mempermudah arus distribusi pangan dari dan ke luar daerah; (2) upaya pengembangan agroindustri pangan lokal perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan skill masyarakat; (3) pemerintah dapat mengambil peran strategis seperti pengembangan iklim usaha, jaringan pasar, dan rantai tata niaga, misalnya melalui kredit lunak (*soft loan*), intensif bagi pelaku usaha pangan lokal, atau memberikan jaminan harga jual produk-produk berbahan pangan lokal sehingga masyarakat dan industri lokal lebih bergairah untuk bergerak di usaha-usaha pro pertanian lokal; dan (4) pemerintah perlu menjamin ketersediaan bahan pangan lokal yang cukup, baik jumlah, mutu, dan keamanannya melalui fungsi pengelolaan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.

Strategi pengembangan ekonomi produktif berbasis potensi lokal melalui pendekatan kewirausahaan sosial dapat dipacu melalui peningkatan sumber daya manusia pada kelembagaan sosial masyarakat. Melalui pendekatan kewirausahaan sosial, beberapa manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat (Firdaus, 2014), seperti: peningkatan kapasitas ekonomi petani, peningkatan keberdayaan masyarakat, dan kohesi sosial petani.

Seperti yang dijelaskan oleh Marsigit (2010), peningkatan ekonomi produktif masyarakat dapat dilakukan melalui kelompok usaha pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, kelompok tani dan wanita tani, gapoktan, PKK, Dasa Wisma dan berbagai kelompok di masyarakat lainnya. Pada kelembagaan inilah perlu pendampingan dalam pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan kapasitas pengetahuan akan bahan baku, kandungan gizi produk dan pendampingan cara pengolahan agar dapat terus dilakukan latihan dan praktik. Upaya ini dilakukan agar ketrampilan kelompok usaha menjadi meningkat dan motivasi semua anggota tetap terjaga.

METODE PENELITIAN

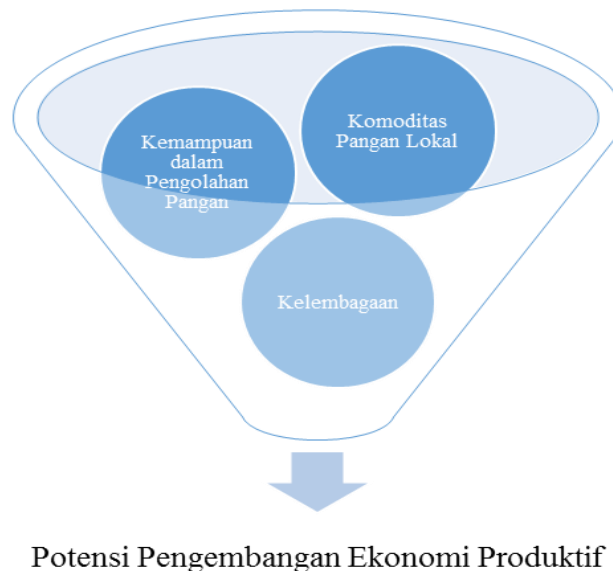
Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2018 di Desa Sambirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul. Metode penelitian yang digunakan adalah diskriptif

dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi, dan kepustakaan. Informan dipilih secara sengaja (purposif) sebagai narasumber ketika melakukan wawancara mendalam. Informan merupakan masyarakat Desa Sambirejo yang aktif dalam usaha ekonomi produktif dan tergabung sebagai anggota Desa Prima. Selain itu terdapat pula informan pendukung dari beberapa tokoh kunci, seperti Pamong Desa, Ketua Gabungan Keompok Tani (Gapoktan), dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) baik yang berasal dari pemerintah maupun swadaya. Validitas data diukur dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk menemukan kepastian terhadap data. Adapun list pertanyaan diajukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Fungsi/Peran	Informasi yang digali
1	Masyarakat Usaha Pelaku	Sebagai pihak yang melakukan usaha ekonomi produktif	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis usaha yang ditekuni - Kemampuan (keterampilan/<i>skill</i>) yang dimiliki dalam mendukung usaha - Pemanfaatan sumber daya alam dan manusia untuk meningkatkan ekonomi keluarga - Kelembagaan masyarakat yang diikuti dan perannya dalam mendukung usaha ekonomi produktif
2	Pamong Desa	Sebagai fasilitator dan motivator dalam mendukung kemajuan ekonomi produktif masyarakat desa	<ul style="list-style-type: none"> - Iklim usaha yang telah terbentuk di masyarakat - Dukungan sarana dan Prasarana (infrastruktur) - Upaya peningkatan <i>skill</i> - Jaringan pasar - Jaminan ketersediaan bahan baku - Kebijakan pemerintah - Prospek pengembangan
3	Ketua Kelompok (Gapoktan)	Gabungan Tani Sebagai koordinator dalam aktivitas pertanian di desa	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi sektor pertanian dalam mendukung usaha ekonomi produktif
4	Penyuluh Lapangan (PPL)	Pertanian Sebagai komunikator, fasilitator, dan motivator dalam meningkatkan daya dukung desa untuk memasok bahan baku dari sektor pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi sektor pertanian dalam mendukung usaha ekonomi produktif - Usaha yang telah dilakukan dalam menyinergikan sektor pertanian dan usaha ekonomi produktif

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Potensi Pengembangan Ekonomi Produktif Desa Sambirejo

Pengembangan ekonomi produktif dengan pendekatan kewirausahaan sosial yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat desa yang masih miskin dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa. Dari penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2018, terdapat tiga potensi pengembangan ekonomi produktif di Desa Sambirejo, yaitu komoditas pangan lokal, kemampuan masyarakat dalam mengolah makanan serta kelembagaan.

A. Komoditas Pangan Lokal

Kondisi cuaca sangat mempengaruhi sektor pertanian di Gunungkidul termasuk di Desa Sambirejo. Hal ini terutama karena sistem pengairan tadah hujan yang sangat bergantung pada datangnya air hujan. Komoditas pertanian yang dibudidayakan pada akhirnya tergantung pada faktor-faktor tersebut. Meskipun nasi masih tetap menjadi makanan pokok, pangan lokal juga berkembang dengan baik termasuk di Desa Sambirejo. Potensi pangan lokal yang dapat dijumpai adalah hasil panen dari tanaman palawija seperti: singkong, talas, ubi, kacang-kacangan (kedelai, kacang panjang, kacang tanah, kacang hijau, kacang mete), bayam, pare, kenikir, terong, kelor, kangkung, dan kemangi.

Selain ditanam di lahan sawah saat musim kemarau atau setelah selesai musim hujan, jenis tanaman sayuran biasanya juga dibudidayakan di lahan pekarangan oleh Kelompok Wanita Tani.

Dalam kegiatan agribisnis pangan lokal, sarana prasarana baik itu fisik (*tangible*) maupun non-fisik (*intangible*) diperlukan untuk mengembangkan usaha dan mempertahankan kegiatan usaha sebagai mata pencaharian yang berkelanjutan (*sustainable livelihood*). Dalam proses produksi, lahan pertanian merupakan aset yang cukup penting dan tersedia cukup banyak untuk pengembangan budidaya pangan lokal. Produksi bahan baku yang selama ini dilakukan di pekarangan cenderung menghasilkan kuantitas produksi yang rendah. Perluasan skala usaha melalui pemanfaatan lahan pertanian komersial menjadi suatu potensi yang dapat dikembangkan.

B. Kemampuan dalam Pengolahan Pangan

Olahan pangan lokal sesungguhnya bukan sesuatu yang baru bagi masyarakat Desa Sambirejo. Produk pertanian yang melimpah, terutama untuk komoditas tanaman pangan seperti umbi-umbian, melahirkan daya kreasi masyarakat untuk membuat berbagai olahan pangan lokal. Mayoritas olahan ini kemudian dinikmati sebagai makanan ringan di sore hari ditemani secangkir kopi atau teh. Bahan baku olahan pangan lokal biasanya dipanen dari kebun milik pribadi.

Semenjak pemanfaatan pangan lokal mulai dikempanyekan sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan, olahan pangan lokal berkembang menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat Desa Sambirejo. Dukungan pemerintah desa sangat terlihat terutama dengan dibentuknya Desa Prima. Melalui Desa Prima, masyarakat yang memiliki minat di bidang pengolahan pangan lokal difasilitasi untuk mengembangkan potensi mereka. Hingga tahun 2018, fasilitas yang telah mereka peroleh sebagai anggota Desa Prima antaralain: pelatihan yang mendatangkan narasumber dari dinas-dinas terkait pangan lokal, studi banding ke kelompok pengolahan pangan lokal, bantuan alat pengolahan pangan lokal, pameran promosi produk olahan pangan lokal, dan bantuan memasarkan produk olahan pangan lokal baik *online* maupun *offline*.

Hasil olahan pangan lokal mayoritas diolah menjadi keripik, seperti keripik bayam, keripik pare, keripik kenikir, keripik terong, keripik kelor, keripik kangkung, keripik

kemangi, keriping singkong, keripik talas, dsb. Selain itu, terdapat olahan lain seperti getuk, tiwul, kacang mete goreng, dan kacang bawang. Kebutuhan bahan baku untuk jenis olahan pangan lokal di atas dapat dipenuhi 100% dari hasil bumi Desa Sambirejo. Namun, terdapat produk olahan pangan lokal yang bahan bakunya belum dapat dipenuhi 100% dari hasil pertanian Desa Sambirejo. Untuk olahan keripik pisang dan susu kedelai, bahan baku masih harus dibeli di pasar tradisional sekitar Desa Sambirejo. Meskipun pisang dan kacang kedelai juga dibudidayakan di Desa Sambirejo, hasil panen kedua komoditas ini ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan industri pengolahan pangan lokal. Pelaku usaha mengaku bahwa jenis pisang tanduk yang ditanam di Desa Sambirejo memiliki rasa yang tidak cocok untuk diolah menjadi keripik pisang. Meskipun begitu, mereka telah berhasil mengolah bonggol pisang menjadi keripik bonggol pisang. Sedangkan budidaya kacang kedelai dinilai sulit sehingga tidak banyak petani yang tertarik. Pada akhirnya buah pisang dan kacang kedelai harus didatangkan dari luar Desa Sambirejo.

C. Kelembagaan di Desa Sambirejo

Dalam hidup bermasyarakat, manusia dituntut untuk mematuhi aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku yang telah mereka sepakati bersama bahkan sejak dari nenek moyang. Hal ini dilakukan sebagai wujud saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Kelembagaan merupakan cerminan dari peradaban manusia yang menjadi identifikasi suatu daerah. Orang-orang yang tinggal di Desa Sambirejo telah terlembaga sebagai masyarakat Desa Sambirejo yang memiliki hak dan kewajiban terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Organisasi dan kelompok yang berkembang di dalam Desa Sambirejo selanjutnya juga dapat disebut sebagai lembaga ketika mereka memiliki aturan dan norma yang disepakati bersama antaranggotanya. Beberapa lembaga yang berkembang di Desa Sambirejo selanjutnya dapat dikategorikan menjadi lembaga yang bergerak di sektor pertanian dan yang bergerak di luar sektor pertanian. Lembaga di sektor pertanian antarlain meliputi: Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelompok Wanita Tani (KWT), dan Desa Prima. Sedangkan lembaga yang bergerak di luar sektor pertanian antarlain meliputi: Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Dusun, Ronda, Karang Taruna,

Arisan, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dsb.

Lembaga di bidang pertanian telah memberikan banyak kontribusi dalam agribisnis olahan pangan lokal di Desa Sambirejo. Adapun lembaga-lembaga tersebut adalah:

1. Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Pertanian, Kelompok Tani (Poktan) adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Umumnya Poktan terdiri dari 50-60 rumah tangga petani yang bertempat tinggal atau memiliki lahan pertanian di area yang sama. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan kumpulan beberapa kelompok tani dalam satu desa. Gapoktan memfasilitasi pemecahan masalah yang dihadapi petani dari berbagai kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan (Hermanto dan Subowo, 2006 *cit* Pujiharto, 2010). Dalam satu desa pertanian pada umumnya akan dijumpai satu Gapoktan yang didampingi seorang Penyuluh Pertanian Lapangan dari Dinas Pertanian. Dukungan baik Poktan dan Gapoktan pada pengembangan agribisnis olahan pangan lokal di Desa Sambirejo adalah sebagai penyedia bahan baku utama.

2. Kelompok Wanita Tani

Kelompok Wanita Tani (KWT) awalnya dibentuk untuk mengakomodasi wanita tani dan isteri petani dalam proses peningkatan hasil produk pertanian. Umumnya KWT bergerak di sektor pasca panen seperti mengolah hasil pertanian menjadi produk makanan. Beberapa KWT di Desa Sambirejo sudah mulai memproduksi olahan pangan lokal dengan menggunakan nama kelompok, seperti KWT Sinar Rejeki. Selain di pasca panen, beberapa KWT juga ada yang mengelola tanaman pekarangan dengan tanaman sayur dan buah. Lingkup wilayah KWT sama sengan Poktan yaitu di tingkat RT hingga dusun.

3. Kelompok Desa Prima

Desa Prima (Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri) adalah desa percontohan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan sekaligus meningkatkan ekonomi perempuan dengan memanfaatkan potensi yang ada dan melibatkan segenap peran lintas terkait. Desa Prima di Desa Sambirejo dibentuk khusus untuk memberdayakan perempuan di bidang pengolahan pangan lokal. Saat ini Desa Prima beranggotakan 22 orang. Anggota desa prima juga merupakan anggota kelompok wanita tani di dusun masing-masing.

Dukungan non-fisik juga telah diterima oleh masyarakat Sambirejo untuk meningkatkan kapasitas dan *skill* dalam pengembangan agribisnis pangan lokal. Dukungan tersebut berupa sosialisasi manfaat pangan lokal dan pelatihan pengolahan pangan lokal. Narasumber sosialisasi dan pelatihan tersebar dari berbagai *stakeholders* seperti dari Dinas Perindustrian, Dinas Pertanian, Perguruan Tinggi sampai pelaku usaha. Selain kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas dan *skill*, penyuluh juga menyampaikan bahwa pidato-pidato persuasif pejabat pemerintahan yang melakukan kunjungan kerja di Desa Sambirejo mengenai potensi pangan lokal sangat meningkatkan motivasi mereka dalam melakukan pendampingan dan diseminasi teknologi pengembangan agribisnis pangan lokal.

Austin (2006) menekankan ada dua elemen penting kewirausahaan sosial, yaitu inovasi dan penciptaan nilai sosial (*social value creation*). Selanjutnya dalam upaya pengembangan ekonomi produktif di Desa Sambirejo, inovasi perlu dilakukan di sektor hulu sampai hilir, mulai dari proses produksi bahan baku, pengolahan makanan sampai ke pemasaran. Dalam menciptakan nilai sosial, peran pemimpin masyarakat, tokoh kunci serta penyuluh baik penyuluh lapangan maupun penyuluh swadaya sangatlah penting. Nilai sosial yang dapat dimandatkan di masing-masing kelembagaan baiknya disesuaikan dengan nilai-nilai yang berlaku di Desa Sambirejo.

KESIMPULAN

Desa Sambirejo memiliki potensi sebagai modal dalam pengembangan ekonomi produktif. Potensi-potensi tersebut antarlain: keberadaan komoditas pangan lokal, kemampuan dalam pengolahan pangan, dan kelembagaan pertanian yang telah tumbuh dan

mengakar di kalangan masyarakat Desa Sambirejo. Sinergisitas antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) perlu dilakukan agar tercipta keberlanjutan usaha ekonomi produktif yang mampu bersaing baik dalam lingkup lokal maupun nasional. Kerjasama antara pelaku ekonomi produktif dengan pelaku di sektor pertanian perlu digiatkan dengan difasilitasi oleh pamong desa. Misalnya ketika pelaku usaha pengolahan pangan lokal membutuhkan bahan baku maka kelompok tani dapat memenuhi permintaan tersebut. Pamong desa, ketua kelompok tani, dan PPL ikut mengontrol dalam proses ini. Keberlanjutan usaha ekonomi produktif yang didukung oleh semua pihak akan mendorong peningkatan perekonomian baik dalam skala rumah tangga maupun skala desa. Jumlah penduduk yang tidak bekerja pun dapat ditekan dengan peningkatan usaha ekonomi produktif yang dikelola secara berkesinambungan dan difasilitasi oleh desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Austin, J. E., 2006. Three Avenues for Social Entrepreneurship Research. Dalam. J. Mair, J. Robinson, dan K. Hockerts (Ed.). *Social Entrepreneurship*: 22-33. New York (USA): Palgrave Macmillan.
- BPS Nasional. 2013. Hasil Sensus Pertanian 2013 (Angka Tetap). Berita Resmi Statistik Nomor 90/12/Th. XVI, 2 Desember 2013. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Dewi, Y. A., Hendriadi, A. dan Ananto, E.E. (2013) *Potensi Penyediaan Pangan Berbasis Pemanfaatan Pangan Lokal di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan* dalam *Membangun Kemandirian Pangan* [[http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/membangun-kemandirian-pangan/](http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/membangun-kemandirian-pangan/BAB-IV/BAB-IV-4.pdf) **BAB-IV/BAB-IV-4.pdf**] [Diakses 20 April 2019]
- Firdaus, N. 2014. Pengentasan kemiskinan melalui pendekatan kewirausahaan sosial. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*. Vol. 22. No. 1. Pp. 55-67.
- Marsigit, W. 2010. Pengembangan Diversifikasi Produk Pangan Olahan Lokal Bengkulu untuk Menunjang Ketahanan Pangan Berkelanjutan. *Agritech*. Vol. 30 No. 4.
- Pujiharto (2010) Kajian Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai Kelembagaan Pembangunan Pertanian di Pedesaan. *Agritech*, Vol XII No. 1 Juni 2010: 64-80 [<http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/AGRITECH/article/view/988>. Diakses 26 November 2018]. [Diakses 20 April 2019]

EPILOG

Kesimpulan umum seminar muncul dengan tuntutan adanya suatu literasi baru. Disini mahasiswa tidak hanya sekedar bisa membaca, menulis dan matematika. Akan tetapi mereka memiliki kecakapan pada tiga kategori. (1). Literasi data, yaitu kemampuan untuk membaca, analisis dan menggunakan informasi (big data) di dunia digital. (2). Literasi teknologi, yakni dapat memahami cara kerja mesin dan aplikasi teknologi (coding, artificial intelligence dan engenering principles). (3). Literasi kemanusiaan. Hal ini adalah ketrampilan kepemimpinan, bisa bekerja dalam tim, kelincahan dan kematangan berbudaya, inovasi dan entrepreneurship. Literasi humanistik ini mampu menggali dan menguatkan nilai budaya, jati diri, identitas dan kebanggaan untuk meraih vitalitas optimal sebagai bangsa yang cerdas dan bermartabat.

Kotak:

“UKURAN BELAJAR”

Pendapat Benjamin Bloom, seorang akademisi dari Universitas Chicago, kerap sekali dikutip. Khususnya, saat menilai peserta proses penyuluhan, pendidikan dan latihan. Indikatornya tiga; kognitif, afektif dan psikomotor. Ukuran sederhananya ialah “tahu, mau dan mampu” (TMM). Apakah TMM sebagai mewakili fisik atau non-fisik ?. Atau justru menggambarkan fungsi suatu perangkat lunak ?. Soalan ini lebih rumit ketika ada teknologi digital 4.0. Oleh karena, salah satu produknya mampu menggantikan kecerdasan, kecepatan dan ketepatan dari rata rata manusia.

Simak dimensi fisik dari ketiganya; kognitif (mind-otak), afektif (soul-jantung) dan psikomotor (body-mata, telinga, lidah, tangan, perut, alat kelamin dan kaki). Watak dari kognitif sebagai ukuran belajar ialah tepat dan jitu. Tiada toleransi pada kekeliruan dari jawaban kategori ini. Potretnya hitam putih. Pada psikomotor/body ada toleransi terhadap kesalahan. Dengan kata lain, pembelajar dapat saja tidak memenuhi standar capaian kinerja. Artinya ada keringanan atau diringankan. Untuk jantung /soul ada dinamika, naik turun. Terkadang tinggi dan bagus, sebaliknya bisa menurun sampai tahap mengkusarkan.

Uniknya, kebutuhan pembelajaran justru bukan pada otak, melainkan buah fikiran. Bukan pada jantung melainkan kemauan, teguh, sepenuh hati, lapang dada, daya juang dan semangat pantang menyerah. Bukan pada tangan dan kaki, melainkan layanan, produk dan barang jadi. Maka, apa relevan pendekatan fisik saja manakala mengusung proses pembelajaran ?. Jelas, Tidak !,

Pengakuan bahwa tidak hanya dimensi fisik belaka untuk menghadapi teknologi 4.0, dan ukuran belajar, maka perlu perangkat lunak. Apa itu ?. Semacam kiat untuk bisa mengatasi naik turunnya semangat belajar. Capaiannya bukan IP, waktu tamat dan meraih pekerjaan saja, melainkan pada kompetensi keberkahan (syukur dan ikhlas), daya tahan (sabar) dan keredhaan dari Tuhan, bukan ?.

Untuk menyikapi perkembangan teknologi 4.0. dalam perspektif penyuluhan, komunikasi pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat, maka beberapa hal perlu dicapai;

Pertama, kompetensi mahasiswa yang cocok dan jitu mengendalikan masa depan adalah *complex problem solving*. Hal ini ialah lulusan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang asing dan belum diketahui solusinya di dalam dunia nyata.

Kedua, kompetensi sosial atau *social skill*. Yaitu, kemampuan untuk melakukan koordinasi, negosiasi, persuasi, *mentoring*, kepekaan dalam memberikan bantuan sampai *emotional intelligence*.

Ketiga, kompetensi mengendalikan proses atau *Process Skill*. Yakni kemampuan terdiri dari: *active listening*, *logical thinking*, dan *monitoring self and the others*. Belajar secara aktif, berfikir logis/ masuk akal dengan pertimbangan logika dan etika (*raso dengan pareso*).

Keempat, kompetensi memahami sistem atau *system skill*. Adalah kemampuan untuk dapat melakukan *judgement* dan keputusan dengan pertimbangan *cost-benefit* serta kemampuan untuk mengetahui bagaimana sebuah sistem dibuat dan dijalankan.

Kelima, kemampuan kognitif atau *Cognitive Abilities*. Yaitu skill yang terdiri dari antara lain: *Cognitive Flexibility*, *Creativity*, *Logical Reasoning*, *Problem Sensitivity*, *Mathematical Reasoning*, dan *Visualization*.

SEMINAR NASIONAL

PENYULUHAN, KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

[Semnas PKP-PM]

2 MEI 2019

GRAND INNA HOTEL PADANG

KERJASAMA



Diterbitkan Oleh :
Program Pascasarjana
Universitas Andalas



ISBN 978-602-73463-2-1



SEKRETARIAT

Gedung Program Pascasarjana Kampus Limau Manis Padang - 25163

Telp : 0751-71686; Fax: 0751-71691

Website : <http://seminar.pasca.unand.ac.id/pkp-pm-2019>

Email : semnas.pkppm.2019@gmail.com